



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2020**



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program strategis nasional untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pembanghunan Nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
- (2) RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai :
 - a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012;

- b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten atau Kota di Sulawesi Selatan dalam mendukung capaian target dan sasaran Pembangunan Daerah; dan
- c. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2021, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 8 (delapan) Bab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Hasil Pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (5) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Bab III tidak memproyeksikan alokasi Transfer Alokasi Dana Khusus sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD dengan APBD Tahun 2021, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- (6) Sasaran dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang sifatnya indikatif terdapat pada Bab IV.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perangkat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 6

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Juli 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 17 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 38

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-3
	1.3.1. Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Daerah.....	I-3
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-4
	1.5. Sistematika Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan	I-4
BAB II	GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN	II-1
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.1 Karateristik Lokasi Wilayah Sulawesi Selatan.....	II-1
	2.1.2 Wilayah Rawan Bencana	II-6
	2.1.3 Kondisi Demografi	II-9
	2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah	II-13
	1. Kawasan Pertanian	II-13
	2. Kawasan Perikanan.....	II-14
	3. Kawasan Industri.....	II-15
	4. Kawasan Pariwisata.....	II-15
	5. Sistem Perkotaan	II-16
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-19
	2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-19
	1. Pertumbuhan Ekonomi	II-19
	2. PDRB Perkapita	II-26
	3. Laju Inflasi.....	II-31
	4. Indeks Gini dan Indeks Wiliamson	II-32
	5. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan.....	II-33
	6. Indeks Pembangunan Manusia	II-36
	7. Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun	II-38
	8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-38
	9. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	II-39
	10. Angka Harapan Lama Sekolah	II-41
	11. Pengeluaran Per Kapita	II-42
	12. Persentase Balita Gizi Buruk	II-44
	13. Prevalensi Balita Gizi Kurang.....	II-44
	14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	II-44
	15. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-45
	16. Rasio Penduduk Yang bekerja	II-47
	17. Laju Pertumbuhan PDRB/PDB per Tenaga Kerja.....	II-48
	18. Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja.....	II-48
	19. Indeks Kepuasan Masyarakat	II-49
	20. Presentase PAD Terhadap Pendapatan	II-49
	21. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pertanian	II-50
	22. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB.....	II-50
	23. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB.....	II-50
	24. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	II-51
	25. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	II-51
	26. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	II-52
	27. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	II-52
	28. PDRB (Adhk) Kawasan (Luwu Utara, Selayar, Bone (Rp.ADHK).....	II-53
	29. Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi dan pengadaan Air.....	II-53
	30. Indeks Akseibilitas Infrastruktur.....	II-54

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

31. Penguatan Cadangan Pangan.....	II-54
32. Rata-rata Nilai Indeks Pembangunan Desa.....	II-55
33. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	II-55
2.2.2 Seni, Budaya dan Olahraga.....	II-56
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-57
2.3.1. Pelayanan Dasar	II-57
2.3.1.1 Pendidikan.....	II-57
2.3.1.2 Kesehatan.....	II-63
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-77
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-90
2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-92
2.3.1.6 Sosial	II-93
2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-97
2.3.2.1 Ketenagakerjaan	II-97
2.3.2.2 Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-103
2.3.2.3 Pangan.....	II-107
2.3.2.4 Pertanahan	II-109
2.3.2.5 Lingkungan Hidup	II-109
2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	II-112
2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-114
2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-116
2.3.2.9 Perhubungan	II-122
2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika	II-127
2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-128
2.3.2.12 Penanaman Modal dan Investasi.....	II-129
2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga.....	II-130
2.3.2.14 Statistik	II-131
2.3.2.15 Persandian.....	II-132
2.3.2.16 Kebudayaan.....	II-133
2.3.2.17. Perpustakaan.....	II-133
2.3.2.18. Kearsipan.....	II-135
2.3.3 Layanan Pilihan	II-135
2.3.3.1 Pariwisata	II-135
2.3.3.2 Pertanian.....	II-138
2.3.3.3 Kehutanan.....	II-143
2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral	II-147
2.3.3.5 Perdagangan	II-148
2.3.3.6 Perindustrian.....	II-149
2.3.3.7 Transmigrasi.....	II-150
2.3.3.8 Kelautan dan Perikanan.....	II-150
2.3.4 Penunjang Urusan	II-157
2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan.....	II-157
2.3.4.2 Keuangan.....	II-157
2.3.4.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan.....	II-159
2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan.....	II-161
2.3.4.5 Pengawasan	II-163
2.3.4.6 Sekertariat Dewan.....	II-164
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-164
2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita.....	II-164
2.4.2. Nilai Tukar Petani.....	II-165
2.4.3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	II-166
2.4.4. Produktifitas Total Daerah.....	II-166
2.4.5. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB/PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi).....	II-166
2.4.6. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	II-167

2.5 Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan	
Minimal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019	II-167
2.5.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	II-170
2.5.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) RKPD Sampai Tahun 2019.....	II-183
2.5.3. Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2019	II-183
2.5.4 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan	II-222
2.6 Permasalahan Pembangunan.....	II-229
2.6.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan Sasaran pembangunan daerah.....	II-229
2.6.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-230
2.6.2.1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar.....	II-230
2.6.2.2. Urusan Pemerintah Bukan Pelayanan Dasar	II-231
2.6.2.3. Urusan Pemerintah Pilihan.....	II-233
2.6.2.4. Urusan Penunjang Pemerintah	II-235
2.7 Isu Strategis Daerah.....	II-235

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI

DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah	III-1
3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah	III-1
3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah	III-2
3.1.1.3 Inflasi	III-6
3.1.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	III-7
3.1.1.5 Kemiskinan.....	III-7
3.1.1.6 Gini Rasio.....	III-8
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2021.....	III-9
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-10
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-11
3.2.1.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2018-2022.....	III-11
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-15
3.2.2.1 Belanja Operasi	III-16
3.2.2.2 Belanja Modal	III-17
3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga.....	III-18
3.2.2.4 Belanja Transfer	III-18
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-40

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021.

	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	IV-9
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021.....	IV-9
4.2.1.1 Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	III-9
4.2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional	III-10
4.2.1.3 Prioritas Pembangunan Nasional	III-11
4.2.1.4 Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi	III-13
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.....	IV-15
4.2.3 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	IV-22
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021.....	IV-35
4.4 Program Prioritas Pembangunan	IV-47
4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	IV-65

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	V-1
	5.1 Kondisi Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	V-1
	5.2 Sasaran Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	V-1
	1. Arah Pengembangan Wilayah Makassar dan Sekitarnya.....	V-2
	2. Arah Pengembangan Wilayah Bulukumba dan Sekitarnya	V-3
	3. Arah Pengembangan Wilayah Watampone dan Sekitarnya	V-3
	4. Arah Pengembangan Wilayah Palopo dan Sekitarnya	V-3
	5. Arah Pengembangan Wilayah Parepare dan Sekitarnya	V-4
	5.3 Sasaran Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	V-5
	1. Kawasan Makassar dan Sekitarnya.....	V-6
	2. Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya.....	V-6
	3. Kawasan Watampone dan Sekitarnya	V-7
	4. Kawasan Parepare dan Sekitarnya.....	V-8
	5. Kawasan Palopo dan Sekitarnya	V-8
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	VI-1
	6.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2021	VI-1
	6.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	VI-2
	6.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021	VI-15
BAB VII	KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VII-1
	7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VII-1
	7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	VII-2
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1
	8.1 Kaidah Pelaksanaan.....	VIII-1
	8.2 Kesimpulan	VIII-3

Daftar Tabel

Tabel II.1	Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019	II-2
Tabel II.2	Kondisi Kemiringan Lereng di Provinsi Sulawesi Selatan	II-3
Tabel II.3	Kondisi Ketinggian Lahan di Provinsi Sulawesi Selatan	II-4
Tabel II.4	Tingkat Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019	II-6
Tabel II.5	Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.....	II-7
Tabel II.6	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten Kota	II-10
Tabel II.7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	II-11
Tabel II.8	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kab/Kota Tahun 2018-2019	II-12
Tabel II.9	Rasio Ketergantungan Tahun 2019.....	II-12
Tabel II.10	Arah Pengembangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan	II-16
Tabel II.11	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-19
Tabel II.12	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-19
Tabel II.13	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-21
Tabel II.14	Pertumbuhan PDRB menurut sektor Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-22
Tabel II.15	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-23
Tabel II.16	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-23
Tabel II.17	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-24
Tabel II.18	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-25
Tabel II.19	Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK) Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional Tahun 2015-2019	II-26
Tabel II.20	Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019....	II-27
Tabel II.21	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019	II-28
Tabel II.22	Perbandingan Rasio Perubahan TPT/Gini Rasio/Persentase Penduduk Miskin dengan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan terhadap Rata-rata Capaian Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019.....	II-29
Tabel II.23	Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019	II-32
Tabel II.24	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-34
Tabel II.25	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-35
Tabel II.26	Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-35
Tabel II.27	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019	II-36
Tabel II.28	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-37
Tabel II.29	Melek Huruf Penduduk yang Berusia >15 Tahun (Tidak Buta Aksara) Provinsi Sulawesi Selatan.....	II-38

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

Tabel II.30	Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-40
Tabel II.31	Pengeluaran Per Kapita di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019 (juta Rp.).....	II-43
Tabel II.32	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-44
Tabel II.33	Prevalensi Balita Gizi Kurang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-44
Tabel II.34	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-45
Tabel II.35	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, 2015-2019.....	II-45
Tabel II.36	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019.....	II-46
Tabel II.37	Rasio penduduk yang bekerja Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019.....	II-48
Tabel II.38	Laju Pertumbuhan PDRB/PDB Per Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-48
Tabel II.39	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-48
Tabel II.40	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-50
Tabel II.41	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-50
Tabel II.42	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-50
Tabel II.43	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-51
Tabel II.44	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019.....	II-51
Tabel II.45	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-52
Tabel II.46	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-52
Table II.47	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-52
Tabel II.48	Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi, dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air (%) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-54
Tabel II.49	Penguatan Cadangan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-54
Tabel II.50	Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-58
Tabel II.51	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019.....	II-58
Tabel II.52	Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-59
Tabel II.53	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-60
Tabel II.54	Angka Putus Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-60
Tabel II.55	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-61
Tabel II.56	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-61
Tabel II.57	Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SMP/Mts ke SMA/SMK/Ma Menurut Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019.....	II-61
Tabel II.58	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-62
Tabel II.59	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-63

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Tabel II.60	Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-64
Tabel II.61	Rasio Puskesmas, Posyandu dan Pustu Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-64
Tabel II.62	Rasio Puskesmas, Posyandu dan Pustu Per Satuan Penduduk Jumlah dan rasio Puskesmas, Posyandu, dan Puskesmas Pembantu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2019.....	II-65
Tabel II.63	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-66
Tabel II.64	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-66
Tabel II.65	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-67
Tabel II.66	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-67
Tabel II.67	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-68
Tabel II.68	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-68
Tabel II.69	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-68
Tabel II.70	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-69
Tabel II.71	Non Polio AFP Rate.....	II-69
Tabel II.72	Cakupan Balita Pneumonia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-69
Tabel II.73	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-70
Tabel II.74	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-70
Tabel II.75	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-70
Tabel II.76	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-71
Tabel II.77	Angka Kejadian Malaria Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-71
Tabel II.78	Penderita Malaria yang diobati dengan ACT Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-71
Tabel II.79	Penderita Malaria yang diobati dengan ACT menurut Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-72
Tabel II.80	Prevalensi HIV/AIDS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-73
Tabel II.81	Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang memiliki Pengetahuan Komprehensif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-73
Tabel II.82	Cakupan Kunjungan Bayi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-73
Tabel II.83	Cakupan Puskesmas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-73
Tabel II.84	Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-74
Tabel II.85	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-74
Tabel II.86	Cakupan Pelayanan Nifas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-74
Tabel II.87	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-75
Tabel II.88	Cakupan Pelayanan Anak Balita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-75
Tabel II.89	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-75
Tabel II.90	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dengan Setingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-76

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

Tabel II.91	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-76
Tabel II.92	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)	II-76
Tabel II.93	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidik Epidemiologi <24 Jam Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-77
Tabel II.94	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-77
Tabel II.95	Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-78
Tabel II.96	Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019...	II-78
Tabel II.97	Sempadan Jalan dipakai pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-79
Tabel II.98	Rumah Tinggal Bersanitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-79
Tabel II.99	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Menurut Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-80
Tabel II.100	Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan	II-81
Tabel II.101	Kondisi Sanitasi dan Akses Layanan Sanitasi Menurut Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.....	II-81
Tabel II.102	Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar.....	II-82
Tabel II.103	Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019	II-82
Tabel II.104	Rasio Jaringan Irigasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-83
Tabel II.105	Persentase Penduduk Berkases Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-84
Tabel II.106	Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakases Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-84
Tabel II.107	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Menurut Kab/Kota Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan.....	II-85
Tabel II.108	Proporsi Penduduk Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019	II-86
Tabel II.109	Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-87
Tabel II.110	Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-87
Tabel II.111	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-88
Tabel II.112	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-88
Tabel II.113	Rasio Bangunan ber IMP per Satuan Bangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-89
Tabel II.114	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pohon Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-89
Tabel II.115	Ketaatan Terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-90
Tabel II.116	Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-90
Tabel II.117	Lingkungan Permukiman Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-90
Tabel II.118	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-91
Tabel II.119	Luas Kawasan Kumuh Menurut Kab/Kota Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan.....	II-91
Tabel II.120	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-92
Tabel II.121	Tingakt Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-93

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Tabel II.122	Persentase Penegakan PERDA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-93
Tabel II.123	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-93
Tabel II.124	Persentase PMKS yang Tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-94
Tabel II.125	Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-94
Tabel II.126	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-95
Tabel II.127	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-95
Tabel II.128	Persentase Korban bencana yang Dievakuasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-96
Tabel II.129	Persentase Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-97
Tabel II.130	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-97
Tabel II.131	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-98
Tabel II.132	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-98
Tabel II.133	Keselamatan dan Perlindungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-98
Tabel II.134	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Progam Jamsostek Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-99
Tabel II.135	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-99
Tabel II.136	Besaran Pemeriksaan Perusahaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-99
Tabel II.137	Besaran Penguji Peralatan di Perusahaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-100
Tabel II.138	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-100
Tabel II.139	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-100
Tabel II.140	Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-101
Tabel II.141	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-101
Tabel II.142	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Keatas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-101
Tabel II.143	Persentase Tenaga Kerja dan Pekerja Bebas Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-102
Tabel II.144	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-104
Tabel II.145	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-104
Tabel II.146	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-104
Tabel II.147	Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-105
Tabel II.148	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-105
Tabel II.149	Cakupan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019....	II-106
Tabel II.150	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Korban Kekerasan.....	II-106
Tabel II.151	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-107
Tabel II.152	Ketersediaan Pangan Utama, Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita dan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-107

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

Tabel II.153	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-108
Tabel II.154	Sebaran Kerawanan Pangan dan Gizi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-108
Tabel II.155	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-110
Tabel II.156	Potensi Penurunan Emisi GRK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-111
Tabel II.157	Jumlah Limbah B3 yang Dikelolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-111
Tabel II.158	Sampah Perkotaan yang Tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-112
Tabel II.159	Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-112
Tabel II.160	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-113
Tabel II.161	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	II-113
Tabel II.162	Rasio Pasangan Berakte Nikah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-113
Tabel II.163	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-113
Tabel II.164	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-114
Tabel II.165	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-114
Tabel II.166	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-114
Tabel II.167	Persentase LPM Berprestasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-115
Tabel II.168	Persentase PKK Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-115
Tabel II.169	Jumlah Posyandu Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-116
Tabel II.170	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).....	II-116
Tabel II.171	Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-116
Tabel II.172	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-117
Tabel II.173	Ratio Akseptor KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-117
Tabel II.174	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-117
Tabel II.175	Cakupan PUS Unmet Need Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-118
Tabel II.176	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-118
Tabel II.177	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-118
Tabel II.178	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-119
Tabel II.179	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-119
Tabel II.180	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-119
Tabel II.181	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-119
Tabel II.182	Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber KB Mandiri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-120
Tabel II.183	Rasio PPKBD per Desa/Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-120
Tabel II.184	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-121
Tabel II.185	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-121

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Tabel II.186	Cakupan Kelompok Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-121
Tabel II.187	Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-122
Tabel II.188	Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-122
Tabel II.189	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-122
Tabel II.190	Rasio Ijin Trayek Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019...	II-123
Tabel II.191	Jumlah Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan Terminal Bis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-123
Tabel II.192	Hirarki Pelabuhan Laut, Sungai Menurut Kabupaten/Kota	II-123
Tabel II.193	Jumlah Halte BRT Kawasan Perkotaan Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-127
Tabel II.194	Jumlah Barang Terangkut Angkutan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-127
Tabel II.195	Persentase Koperasi Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-128
Tabel II.196	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-128
Tabel II.197	Investor/Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-129
Tabel II.198	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi (PDMDN/PMA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-129
Tabel II.199	Nilai Realisasi PMDN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-130
Tabel II.200	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-131
Tabel II.201	Data dan Statistik yang Terintegritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-132
Tabel II.202	Ketersediaan Buku Kabupaten dalam Angka Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-132
Tabel II.203	Buku PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-132
Tabel II.204	Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.	II-133
Tabel II.205	Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-133
Tabel II.206	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-134
Tabel II.207	Koleksi dan Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-134
Tabel II.208	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilaian yang Memiliki Sertifikat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-134
Tabel II.209	Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-135
Tabel II.210	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-135
Tabel II.211	Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Pengeluaran Wisatawan Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-136
Tabel II.212	Kunjungan Wisatawan Mancanegara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-136
Tabel II.213	Lama Kunjungan Wisatawan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-136
Tabel II.214	PAD Sektor Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-137
Tabel II.215	Perkembangan Kunjungan dan Pengeluaran Wisatawan Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-137
Tabel II.216	Target dan Capaian Kunjungan Wisatawan Mancanegara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-138
Tabel II.217	Kunjungan Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Pintu Masuk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-138

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

Tabel II.218	Perkembangan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-138
Tabel II.219	Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Palawija, Tanaman Pangan Terhadap PDRB dan Produktivitas padi atau Bahan Pangan Utama local lainnya per Hektar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-139
Tabel II.220	Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-140
Tabel II.221	Produktivitas Hasil Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-141
Tabel II.222	Populasi Sapi Menurut Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-141
Tabel II.223	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-142
Tabel II.224	Produksi Kakao Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-143
Tabel II.225	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-144
Tabel II.226	Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-144
Tabel II.227	Rasio Luas Kawasan Lindung Terhadap Total Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-145
Tabel II.228	Perubahan Peruntuka Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-146
Tabel II.229	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik, Rasio Ketersediaan Daya Listrik Persentase Pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-147
Tabel II.230	Rasio Desa Berlistrik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-147
Tabel II.231	Jumlah Produksi Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-148
Tabel II.232	Ekspor Bersih Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-148
Tabel II.233	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/usaha Informal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-149
Tabel II.234	Cakupan Bina Kelompok Pengerajin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-149
Tabel II.235	Pertumbuhan Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-149
Tabel II.236	Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah, Besar, dan UMKM Pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-150
Tabel II.237	Persentase Transmigrasi Swakarsa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-150
Tabel II.238	Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-150
Tabel II.239	Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-151
Tabel II.240	Cakupan Bina Kelompok Nelayanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-152
Tabel II.241	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-152
Tabel II.242	Proporsi Tangkapan Ikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-153
Tabel II.243	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-153
Tabel II.244	Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-154
Tabel II.245	Produksi Rumput Laut Menurut Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-154
Tabel II.246	Produksi Udang Menurut Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-155
Tabel II.247	Perkembangan Capaian Produksi perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-156
Tabel II.248	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-158

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Tabel II.249	Persentase SILPA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..	II-158
Tabel II.250	Persentase Belanja Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-158
Tabel II.251	Perbandingan Antar Belanja Langsung dan Tidak Langsung Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-159
Tabel II.252	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-159
Tabel II.253	Penetapan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019...	II-159
Tabel II.254	Rata-rata Lama dan Persentase ASN mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Formal serta Struktur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-160
Tabel II.255	Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-161
Tabel II.256	Persentase Tindak Lanjut Temuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-163
Tabel II.257	Persentase Pelanggaran Pegawai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-163
Tabel II.258	Jumlah Temuan BPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-164
Tabel II.259	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-164
Tabel II.260	Pengeluaran Perkapita Per Tahun di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-165
Tabel II.261	Nilai Tukar Petani (NTP).....	II-165
Tabel II.262	Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-165
Tabel II.263	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-166
Tabel II.264	Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-167
Tabel II.265	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.....	II-167
Tabel II.266	Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-167
Tabel II.267	Capaian Target Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-172
Tabel II.268	Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019	II-184
Tabel II.269	Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.....	II-191
Tabel II.270	Capaian Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.....	II-197
Tabel II.271	Capaian Target Outcome Program Pembangunan Daerah dan Program Strategis Perangkat Daerah	II-201
Tabel II.272	Riview Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019	II-204
Tabel II.273	Komposisi Program dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	II-222
Tabel II.274	Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun 2019.....	II-225
Tabel III.1	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021	III-9
Tabel III.2	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005	III-13
Tabel III.3	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019	III-14
Tabel III.4	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022	III-15
Tabel III.5	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2018,2019,2020,2021 dan 2022 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005	III-20
Tabel III.6	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2018,2019,2020,2021 dan 2022 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019	III-21

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

Tabel III.7	Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja Terhadap urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tahun 2021	III-22
Tabel III.8	Dukungan Besaran Anggaran Program Prioritas Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	III-24
Tabel III.9	Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2021.....	III-29
Tabel III.10	Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah Terhadap Tujuan TPB/SDGs Tahun 2021	III-31
Tabel III.11	Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022.....	III-42
Tabel IV.1	Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023	IV-2
Tabel IV.2	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD	IV-3
Tabel IV.3	Tujuan dan Sasaran Serta Target Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.....	IV-5
Tabel IV.4	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021.....	IV-9
Tabel IV.5	Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2021	IV-15
Tabel IV.6	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	IV-16
Tabel IV.7	Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2021	IV-17
Tabel IV.8	Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Misi RPJMD untuk Tahun 2021	IV-19
Tabel IV.9	Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2021.....	IV-20
Tabel IV.10	Target Kinerja Utama Daerah Tahun 2021	IV-21
Tabel IV.11	Keselarasn Target Makro Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Tahun 2021.....	IV-23
Tabel IV.12	Keterkaitan Sasaran Pembangunan Nasional Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Tahun	IV-27
Tabel IV.13	Sinkronisasi Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Major Project Tahun 2021.....	IV-31
Tabel IV.14	Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah	IV-35
Tabel IV.15	Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021.....	IV-42
Tabel IV.16	Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	IV-47
Tabel IV.17	Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	IV.48
Tabel V.1	Target Pengembangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021	V-5
Tabel VI.1	Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2021	VI-1
Tabel VI.2	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	VI-3
Tabel VI.3	Program Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	VI-21
Tabel VII.1	Capaian Indikator Kinerja Utama 2019 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021	VII-1
Tabel VII.2	Kondisi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019,2020 dan Target 2021	VII-3

Daftar Grafik

Grafik II.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDB/PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi, Tahun 2019 Laju Pertumbuhannya Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi Tahun 2019.....	II-21
Grafik II.2.	Perbandingan Perubahan PDRB/PDB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2019.....	II-28
Grafik II.3.	Perbandingan Rasio Perubahan TPT, Gini Rasio dan Persentase Penduduk Miskin dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi Tahun 2019.....	II-30
Grafik II.4.	Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-31
Grafik II.5.	Tingkat Inflasi di Sulawesi, Nasional dan Provinsi Pulau Sulawesi, Tahun 2019.....	II-31
Grafik II.6.	Perubahan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi Tahun 2019.....	II-32
Grafik II.7.	Perkembangan dan Perubahan Indeks Ketimpangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019.....	II-33
Grafik II.8.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019.....	II-33
Grafik II.9.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi, Tahun 2019.....	II-34
Grafik II.10.	Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi Tahun 2019.....	II-36
Grafik II.11.	Perbandingan Perubahan IPM Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi dan Nasional Tahun 2019.....	II-38
Grafik II.12.	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-39
Grafik II.13.	Perbandingan Perubahan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2019.....	II-39
Grafik II.14.	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019.....	II-40
Grafik II.15.	Perbandingan Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019.....	II-41
Grafik II.16.	Perbandingan Perubahan Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2019.....	II-41
Grafik II.17.	Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019.....	II-42
Grafik II.18.	Tingkat Perubahan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2019.....	II-42
Grafik II.19.	Pengeluaran Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi dan Nasional Tahun 2015-2019 (Juta Rp.).....	II-43
Grafik II.20.	Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional dan Pulau Sulawesi, Tahun 2019.....	II-43
Grafik II.21.	Perbandingan Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2019.....	II-47
Grafik II.22.	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019.....	II-47

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Grafik II.23.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Perubahan Nilai Indeks IKM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-49
Grafik II.24.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Menurut jenis Kelamin, Tahun 2015-2019	II-55
Grafik II.25.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut jenis Kelamin, Tahun 2015-2019	II-56
Grafik II.26.	Persentase Pembinaan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-56
Grafik II.27.	Cakupan Pembinaan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-57
Grafik II.28.	Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	II-63
Grafik II.29.	Perkembangan Jumlah Penganggur Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019 (Ribu Orang)	II-103
Grafik II.30.	Perbandingan Perubahan Pertumbuhan Jumlah Pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019	II-103
Grafik II.31.	Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019.....	II-110
Grafik II.32.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet dan Kepemilikan Komputer Pribadi Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019	II-128
Grafik II.33.	Persentase Pembinaan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-130
Grafik II.34.	Cakupan Pembinaan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	II-131
Grafik II.35.	Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha) Provinsi Sulawesi Selatan	II-145
Grafik II.36.	Persentase Perubahan Luas Areal Kawasan Hutan Sesuai Peruntukan Provinsi Sulawesi Selatan.....	II-146
Grafik II.37.	Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019..	II-151
Grafik II.38.	Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019	II-190
Grafik III.1.	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan & Nasional Capaian 2019, Perkiraan Capaian 2020 dan Target 2021	III-4
Grafik III.2.	Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK) menurut lapangan Usaha (%) Tahun 2019, Perkiraan Capaian 2020 dan Target 2021.....	III-5
Grafik III.3.	PDRB Perkapita Sulawesi Selatan, Capaian 2019, Perkiraan 2020 dan Target 2021.....	III-6
Grafik III.4.	Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019, Perkiraan Capaian 2020 dan Target 2021.....	III-6
Grafik III.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019, Perkiraan Capaian 2020 dan Target 2021.....	III-7
Grafik III.6.	Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019, Perkiraan Capaian 2020 dan Target 2021.....	III-8
Grafik III.7.	Gini Rasio Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019, Perkiraan Capaian 2020 dan Target 2021	III-8

Daftar Gambar

Gambar II.1	Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	II-1
Gambar II.2.	Peta Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan	II-3
Gambar II.3.	Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan.....	II-4
Gambar II.4.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan	II-5
Gambar II.5.	Peta Potensi Komoditi Unggulan	II-14
Gambar III.1.	Tema dan Fokus Pembangunan Ekonomi Makro RKP Tahun 2021	III-9
Gambar IV.1.	Tema, Fokus, dan Strategi Pembangunan Tahun 2021	IV-10
Gambar IV.2.	<i>Major Project</i> (MP) yang Terkait Langsung dengan Fokus Pembangunan Tahun 2021	IV-11
Gambar V.1.	Peta Kawasan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.....	V-5

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses awal pada pelaksanaan pembangunan yang akan menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumberdaya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daerah sesuai dengan kewenangannya diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis, Penyusunan dokumen RKPD 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang di tujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dengan seluruh pemangku kepentingan berbasis E-planning.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan tahun ke III (ketiga) dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023. RKPD ini merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan untuk penyusunan RKPD, baik yang berskala Nasional maupun lokal antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

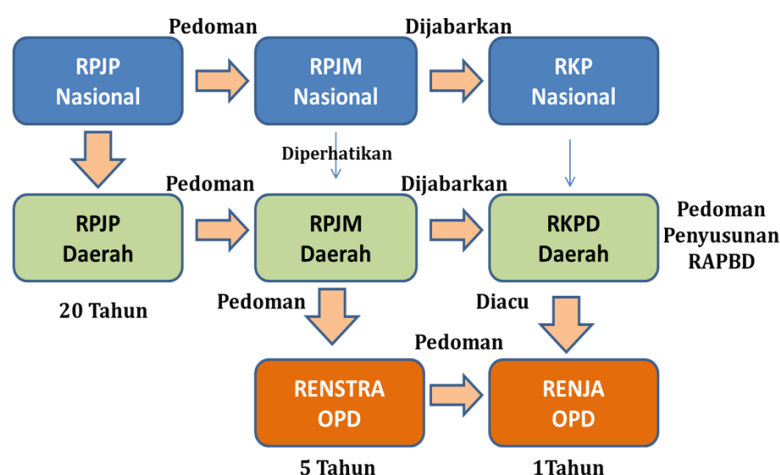
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2021, dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029.

Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, dapat dilihat (gambar 1.1)

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021



1.3.1. Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2021 yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran

pembangunan, selain itu juga menyangkut penyalarsan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan sinergitas perencanaan program dan kegiatan pembangunan antara wilayah, antar sector pembangunan dan antara pemerintah;
2. Sebagai alat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dasasaran program pembangunan yang di tetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD Tahun Anggaran 2021;

Adapun tujuan dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2021;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasa;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, disusun dengan sistematika berdasarkan kaidah peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran kinerja Arah kebijakan ekonomi dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan daerah Tahun 2021.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Bab ini memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan sasaran pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan tahun 2021, program prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2021 yang akan dilaksanakan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan target tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan substansi dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Sulawesi Selatan

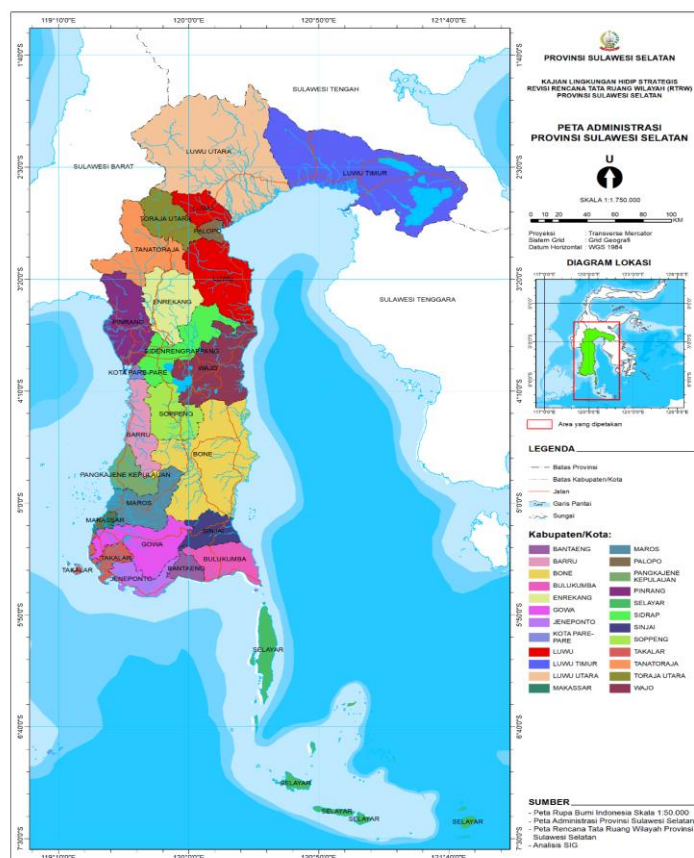
Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak dibagian selatan semenanjung pulau Sulawesi, merupakan salah satu lokasi wilayah yang strategis ditengah-tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mempunyai luas wilayah sekitar 4.544.367 Ha dan secara administratif terbagi 21 wilayah Kabupaten, dan tiga wilayah kota. Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah dengan wilayah terluas dengan luasan sebesar 740.246 Ha atau sebesar 16,29% dari luas wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan Kota Parepare merupakan daerah dengan wilayah terkecil dengan luasan sebesar 9.777 Ha atau 0,22% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara Geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara 0°12' Lintang Selatan-8° Lintang Selatan dan 116°48' Bujur Timur - 122°36' Bujur Timur, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar

Posisi geografis tersebut secara tidak langsung menjadikan Sulawesi Selatan sebagai hub distribusi barang dan jasa dari dan ke timur-barat Indonesia wilayah perdagangan dan jasa, karena posisi Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran internasional, dan berfungsi sebagai titik simpul transportasi laut dan udara yang menghubungkan Asia Timur dan Benua Australia.

Gambar II.1.
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang RTRW
Provinsi Sulawesi Selatan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Terdapat perbedaan luasan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi yang menetapkan luasan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4.671.748 Ha dengan luasan wilayah berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Informasi Geospasial dalam rangka persetujuan konsultasi perpetaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yang menetapkan luasan wilayah Sulawesi Selatan seluas 4.554.367 Ha, sehingga data luasan yang digunakan pada RKPD Tahun 2021 mengacu pada data luasan berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Informasi Geospasial.

**Tabel II.1.
Luas Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Jumlah Penduduk
		Ha	%	
1	Kep. Selayar	118.240	2,60	135.624
2	Bulukumba	117.426	258	420.603
3	Bantaeng	39.659	0,87	187.626
4	Jeneponto	80.117	1,76	363.792
5	Takalar	55.880	1,23	298.688
6	Gowa	180.435	3,97	772.684
7	Sinjai	86.558	1,90	244.125
8	Maros	144.287	3,18	353.121
9	Pangkep	89.008	1,96	335.514
10	Barru	120.386	2,65	174.323
11	Bone	457.975	10,08	758.589
12	Soppeng	137.280	3,02	226.991
13	Wajo	263.488	5,80	397.814
14	Sidrap	176.320	3,88	301.972
15	Pinrang	188.237	4,14	377.119
16	Enrekang	184.749	4,07	206.387
17	Luwu	305.143	6,71	362.027
18	Tana Toraja	209.187	4,60	234.002
19	Luwu Utara	740.246	16,29	312.883
20	Luwu Timur	680.589	14,98	299.673
21	Toraja Utara	116.885	2,57	231.214
22	Makassar	17.437	0,38	1.526.677
23	Pare Pare	9.777	0,22	145.178
24	Palopo	25.059	0,55	184.614
Sulawesi Selatan		4.554.367	100	8.851.240

Sumber : RTRW Prov. Sulsel

Topografi merupakan salah satu faktor pembatas pemanfaatan ruang untuk pembangunan. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis dan memiliki tingkat erosi yang tinggi yang dipengaruhi oleh kecepatan pengaliran air. Kondisi topografi Sulawesi Selatan dibagi berdasarkan kondisi kemiringan lahan atau kondisi kelerengan dan kondisi ketinggian lahan.

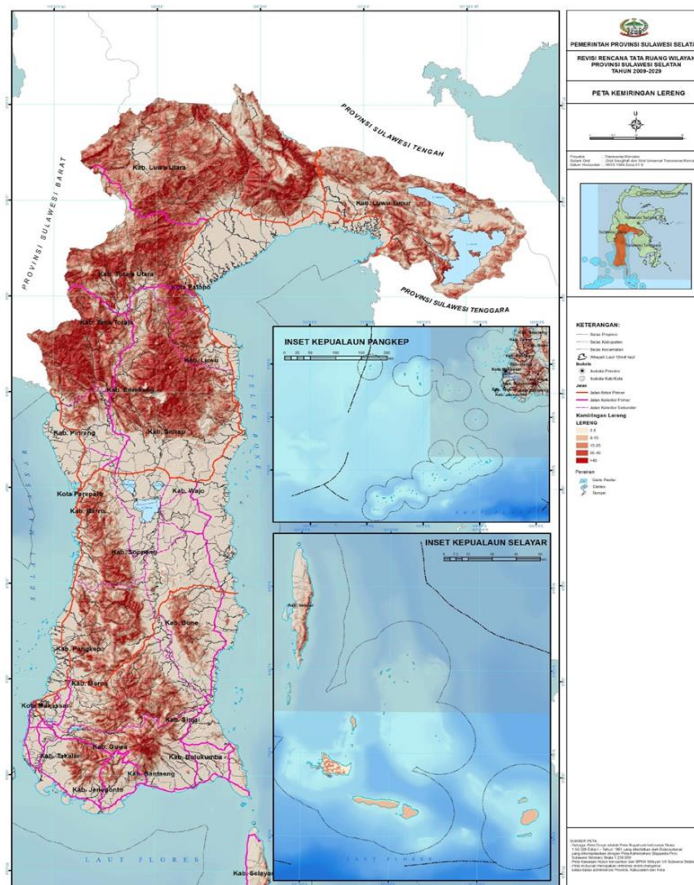
Berdasarkan kondisi kelerengan, wilayah Sulawesi Selatan terbagi dalam 6 (enam) kelas kelerengan yang didominasi oleh lahan dengan kemiringan lereng 0 – 2 persen seluas 1.330.065 Ha atau sebesar 29,27 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan kelas kelerengan yang paling kecil luasan wilayahnya adalah lahan dengan kemiringan lereng 30 -40 persen seluas 264.084 Ha atau sebesar 5,81 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan.

**Tabel II.2.
Kondisi Kemiringan Lereng di Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Kemiringan Lereng (%)	Luas Wilayah	
		Ha	%
1	0 – 2%	1.330.065	29,27
2	2 – 5%	406.193	8,94
3	5 – 15%	1.019.916	22,44
4	15 – 30%	1.229.224	27,05
5	30 -40%	264.084	5,81
6	> 40%	294.885	6,49
Sulawesi Selatan		4.554.367	100

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRWP Sulawesi Selatan

**Gambar II.2.
Peta Kemiringan Lereng Provinsi Sulawesi Selatan**



Sumber: Dokumen Fakta dan Analisis Revisi RTRWP Sulawesi Selatan, Tahun 2019

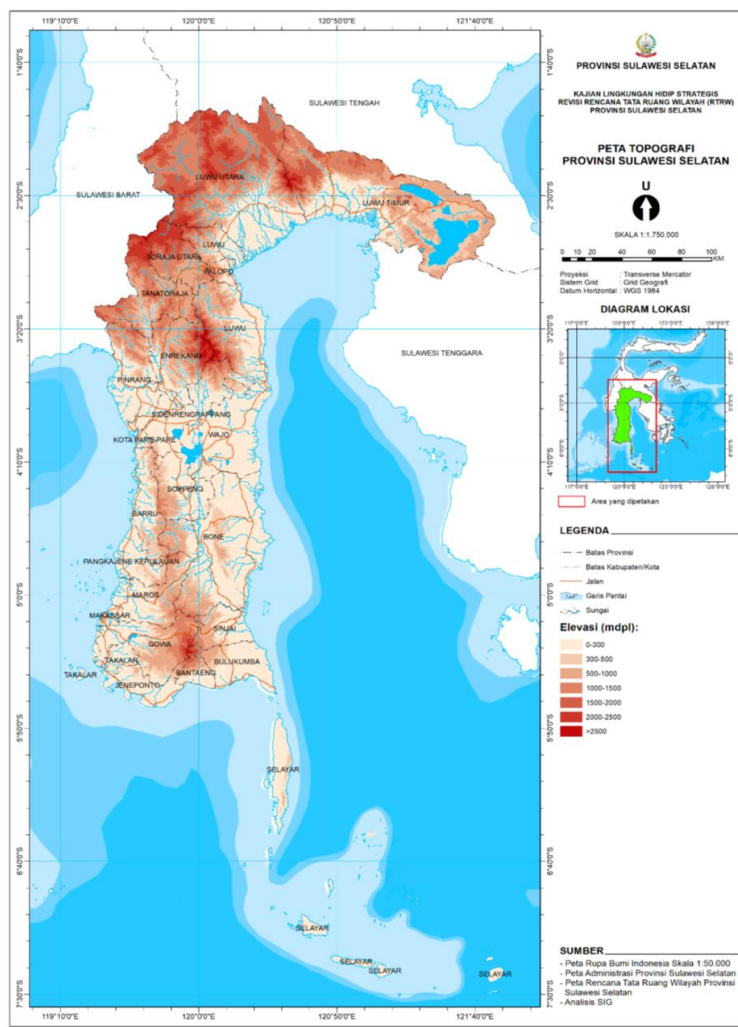
Berdasarkan kondisi ketinggian lahan, wilayah Sulawesi Selatan terbagi dalam 7 (tujuh) kategori yang didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0 – 300 mdpl seluas 2.176.517 Ha atau sebesar 47,89 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan ketinggian lahan yang paling kecil luasan wilayahnya adalah wilayah dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl seluas 20.600 Ha atau sebesar 0,45 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan.

**Tabel II.3.
Kondisi Ketinggian Lahan di Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Ketinggian Lahan (mdpl)	Luas Wilayah	
		Ha	%
1	0 -300	2.176.517	47,89
2	300 – 500	521.674	11,48
3	500 – 1000	759.588	16,71
4	1000 -1500	574.748	12,65
5	1500 – 2000	355.551	7,82
6	2000 – 2500	135.689	2,99
7	> 2500	20.600	0,45
Sulawesi Selatan		4.554.367	100

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRWP Sulawesi Selatan

**Gambar II.3.
Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan**

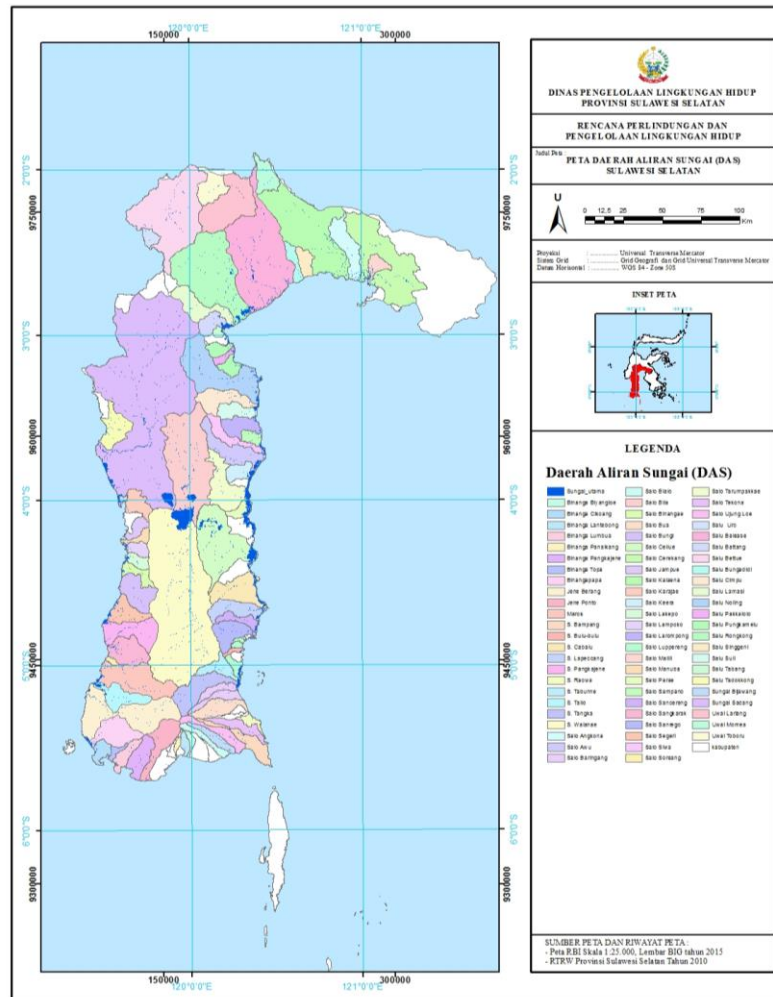


Sumber: Dokumen KLHS Revisi RTRWP Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Kondisi hidrologi Provinsi Sulawesi Selatan sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada di wilayah ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 73 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di 24 Kabupaten/kota, diantara DAS tersebut terdapat 2 DAS prioritas dari 15 DAS prioritas nasional yaitu DAS Jeneberang dan DAS Saddang. DAS Saddang merupakan DAS terbesar di Sulawesi Selatan dengan luasan sekitar 649.320 Ha yang melintasi 11 wilayah Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Maros, Pangkajene

Kepulauan, Barru, Bone, Soppeng, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Parepare.

Gambar II.4.
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan



Sumber : Rancangan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulsel, Tahun 2019

Berdasarkan aspek klimatologi, Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan klasifikasi Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu: Tipe Iklim A, Tipe iklim ini dinotasikan sebagai iklim sangat basah dengan curah hujan rata-rata pada iklim tipe A adalah 3500 – 4000 mm/tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Enrekang. Tipe iklim B, Tipe iklim ini dinyatakan sebagai iklim basah dengan curah hujan rata-rata 3000 – 3500 mm/tahun. Wilayah yang memiliki karakteristik iklim basah antara lain, yaitu: Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng. Tipe iklim C, Tipe ini merupakan tipe iklim agak basah, dengan dengan curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/tahun. Wilayah yang masuk ke dalam iklim C terdiri dari Kabupaten Wajo, Luwu, Tana Toraja, Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkajene Kepulauan, Enrekang, Maros, Makassar, Jeneponto, Sinjai, Gowa, Toraja Utara, Parepare, dan Kepulauan Selayar. Tipe iklim D, Tipe iklim ini memiliki curah hujan rata-rata 2000 – 2500 mm/tahun. Wilayah yang masuk ke dalam tipe iklim D meliputi Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Soppeng, Sinjai, Maros, Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Makassar, Pangkajene Kepulauan, dan Gowa. Tipe iklim E, Tipe iklim ini merupakan iklim kering yang memiliki curah hujan rata-rata antara 1500 – 2000 mm/tahun. Tipe iklim E terdapat di Kabupaten Maros, Bone, Enrekang, Kepulauan Selayar, Bantaeng, dan Maros dengan curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/tahun.

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan proses terbentuknya Pulau Sulawesi, maka terdapat garis sesar gempa memanjang dari perairan kanan dan kiri Pulau Selayar menuju ke utara melewati Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, bercabang di Kabupaten Enrekang yang merupakan kawasan pengaruh gempa. Garis sesar gempa ini menunjukkan daerah rawan gempa di daerah yang melewatinya dan berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara. Selain daripada itu garis sesar di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan di sebelah selatan Selat Kota Makassar menyebabkan daerah pantai di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar serta Kota Makassar rawan terhadap bencana Tsunami.

Berdasarkan data BNPB pada tahun 2019, jumlah kejadian bencana di Sulawesi Selatan sebanyak 357 jumlah kejadian, yang didominasi oleh bencana banjir sebanyak 108 jumlah kejadian, bencana kekeringan sebanyak 51 kali jumlah bencana, bencana kebakaran sebanyak 32 jumlah kejadian, dan bencana longsor sebanyak 32 kali jumlah kejadian. Bencana banjir merupakan bencana yang paling banyak menimbulkan kerugian yaitu jumlah korban jiwa yang terdampak dan mengungsi sebanyak 225.801 orang dan sebanyak 64.266 rumah yang terendam, serta kerusakan 780 unit fasilitas kesehatan, sosial dan pendidikan. Berdasarkan hasil analisis indeks bahaya untuk setiap potensi bencana yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat diketahui probabilitas dan intensitas kejadian setiap potensi bencana di Provinsi Sulawesi Selatan yang disajikan sebagai berikut.

**Tabel II.4.
Tingkat Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019**

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Terdampak Bencana dengan Klasifikasi Tinggi (Ha)							
		Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Tsunami	Cuaca Ekstrem	Gempa	Kebakaran	Kekeringan
1	Kep. Selayar	1.937		6.612	65.112	14.391	1.880	26.448	2.057
2	Bulukumba	5.539	1.675	4.053	4.295	60.448		674	19.680
3	Bantaeng	549	269	3.051	1.084	22.856		2.181	13.786
4	Jeneponto	8.761	1.717	5.434	4.771	46.429		3.050	33.353
5	Takalar	19.091	1.454	1.350	3.946	28.508		4.107	1.282
6	Gowa	17.939	1.235	33.911	342	62.797		11.128	46.347
7	Sinjai	1.162	741	11.260	164	34.434		1.070	4.736
8	Maros	19.070	22.050	22.050	83	39.946		6.014	34.254
9	Pangkep	16.178	589	11.160	2.823	27.533	1.315	7.163	10816
10	Barru	5.749	2.311	35.224	564	21.886	2	24.872	251
11	Bone	45.101	3.100	39.907	9	14.878	20.413	50.473	4.059
12	Soppeng	12.963	3.604	32.501		45.879	20.621	5.480	
13	Wajo	44.623	974	2.881		74.069	49.912	10.539	3.656
14	Sidrap	38.636	1.756	34.550		41.563	44.635	11.762	5.381
15	Pinrang	39.745	1.552	39.947	142	46.848	78.424	17.316	
16	Enrekang	1.110	1.963	74.790		32.446	401	28.397	846
17	Luwu	14.648	2.180	72.363				22.319	51
18	Tana Toraja		605	47.906		2.990		29.867	1.560
19	Luwu Utara	40.017		22		48.214			
20	Luwu Timur	33.133	6.906	169.748		48.214	126.465	30.406	62.840
21	Toraja Utara	72	1.130	48.348		24.618		6.464	106
22	Makassar	7.921			729	179			9

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Terdampak Bencana dengan Klasifikasi Tinggi (Ha)							
		Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Tsunami	Cuaca Ekstrim	Gempa	Kebakaran	Kekeringan
23	Parepare	398	178	2.323	63	4.981	27	1.693	
24	Palopo	1.534	672	12.123		7.059	19	4	
JUMLAH		375.876	56.661	711.514	84.127	751.166	344.114	301.427	245.070

Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat bencana di Provinsi Sulawesi Selatan terutama yang klasifikasi tinggi cukup luas. Jika di *highlight* untuk bencana yang sering terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yakni banjir dan tanah longsor, memiliki area yang cukup luas yakni untuk banjir seluas 375.876,00 ha dan longsor seluas 711.514,00 ha. Jika diamati pada distribusi peta rawan banjir dan longsor, dapat dilihat gambaran bahwa distribusi spasial kejadian banjir sering terjadi didaerah-daerah yang relatif datar di seluruh wilayah Kabupaten khususnya di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan untuk kejadian longsor umumnya terjadi pada morfologi perbukitan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada wilayah-wilayah Kabupaten yang berada di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana dilakukan untuk memacu kembali perkembangan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan jalur evakuasi bencana pada struktur ruang wilayah dan kawasan rawan bencana pada pola ruang wilayah. Berdasarkan arahan peruntukan kawasan permukiman pada RTRWK, maka lokasi potensi relokasi pasca bencana pada Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

Tabel II.5.

Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

No.	Kabupaten/- Kota	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
1	Kota Makassar	Banjir	Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Ujung Pandang, Biringkanaya, dan Wajo
		Cuaca Ekstrim	
		Tsunami	
2	Kota Parepare	Cuaca Ekstrim	Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Watang Soreang, Kelurahan Ujung Bulu, Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Cappa Galung, dan Kelurahan Ujung Sabbang
		Longsor	
		Kebakaran	
3	Kota Palopo	Banjir	Kelurahan Maroangin, Kec. Telluwanua; Kel. Rampoang, Kec. Bara; Kel. Songka, Kec. Wara Selatan
		Longsor	
		Cuaca Ekstrim	
4	Barru	Longsor	Kelurahan Lalolang, Sepe'E, Lompo Riaja, Desa Batupute, dan Desa Nepo
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
5	Soppeng	Cuaca Ekstrim	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Kabupaten/- Kota	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
		Gempa	Desa Watu dan Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo; Desa Baringeng dan Desa Tetewatu di Kecamatan Lilirilau; Desa Panincong di Kecamatan Marioriwawo;
		Longsor	
6	Wajo	Banjir	Kelurahan Maroangin, Kec. Pammana, Kelurahan Solo Kec. Bola, Kel. Jalang dan Salo Bulu Kec. Sajoanging, dan Kel. Peneki dan Kel. Botto, Kec. Takkalalla
		Cuaca Ekstrim	
		Gempa	
7	Sidrap	Banjir	Desa Kulo, Kec. Kulo; Kaw. Baranti Kec. Baranti; Kaw. Bilokka, Kec. Panca Lautang
		Cuaca Ekstrim	
		Gempa	
8	Enrekang	Longsor	Desa Kalosi, Pana di Kec. Alla; Desa Baba di Kec. Cendana; Desa Kaluppang di Kec. Maiwa; Desa Kotu, Rurah, Cendana, Sossok, Singki di Kec. Anggeraja
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
9	Pinrang	Longsor	Kawasan Waetuo, Kec. Lanrisang
		Cuaca Ekstrim	
		Gempa	
10	Toraja Utara	Longsor	Kawasan Rantebua Sanggalangi, Kec. Rantebua
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
11	Tana Toraja	Longsor	Kec. Makale Utara; Kec. Malimbong Belepe; Kec. Mappak; Kec. Mengkendek; Kec. Rano; Kec. Rantetayo
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
12	Luwu	Longsor	Kaw. Lindajang, Bone Lemo, Rante Balla, Beuma, Ilanbatu dan Bosso
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
13	Luwu Utara	Banjir	Desa Kapidi di Kecamatan Mappedeceng; Desa Pao di Kecamatan Malangke Barat; Desa Baebunta di Kecamatan Baebunta
		Cuaca Ekstrim	
14	Luwu Timur	Kekeringan	Burau, Wonorejo, Kertoraharjo, Wasuponda, Solo, Kalaena dan Wawondula
		Longsor	
		Gempa Bumi	
15	Gowa	Longsor	Kaw. Ballabatua, Kec. Bajeng Barat; Kaw. Pencong, Kec. Biring Bulu; Kaw. Ulugalung, Kec. Tompobulu; Kaw. Buki-Buki Kec. Tombolo Pao
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
16	Takalar	Tsunami	Kec. Polombangkeng Utara; Kec. Polombangkeng Selatan; Kec. Mappakasunggu; Kec. Galesong Selatan, Kec. Mangarabombang
		Cuaca Ekstrim	
		Banjir	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Kabupaten/- Kota	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
17	Bantaeng	Longsor	Kaw. Bonto Maccini, Kec. Sinoa; Kaw. Bonto Marannu, Kec. Ulu Ere; Kaw. Gantarang Keke, Kec. Gantarang Keke; Kaw. Ulugalung, Kec. Eremerasa
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
18	Bulukumba	Banjir	Kawasan Tanah Beru, Kec. Bontobahari; Kawasan Palampang, Kec. Rilau Ale
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
19	Sinjai	Longsor	Kaw. Manipi, Kec. Sinjai Barat; Kaw. Bulupoddo, Kec. Bulupoddo; Kaw. Bikeru, Kec. Sinjai Selatan
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
20	Bone	Banjir	Kaw. Taccipi, Kec. Ulaweng; Kaw. Lalebbata, Kec. Lamuru; Kaw. Pompanua, Kec. Ajangale; Kaw. Bojo, Kec. Kajuara; Kaw. Appala, Kec. Barebbo; Kaw. Bengo, Kec. Bengo; Kaw. Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
21	Maros	Longsor	Kaw. Ladange; Kaw. Padaelo; Kaw. Samaenre; Kaw. Barugae; dan Kaw. Batu Putih, Kec. Mallawa
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
22	Pangkep	Banjir	Kaw. Balang Lompo, Mattiro Sompe, Mattiro Bone, Kec. Liukang Tupabbiring, Kaw. Biraeng, Bontokio, Kalabbirang, Kec. Minasa Te'ne
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
23	Jeneponto	Banjir	Kaw. Rumbia, Kec. Rumbia; Kaw. Paitana, Kec. Turatea; Kaw. Bontotangnga, Kec. Tamalatea; Kaw. Bontoramba, Kec. Bontoramba
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
24	Selayar	Longsor	Kaw. Matalalang, Kec. Bontoharu; Kaw. Polebungin, Kec. Bontomanai; Kaw. Buki, Kec. Buki
		Tsunami	
		Kebakaran	

Sumber : Hasil Analisis RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

2.1.3 Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun periode 2015-2019 sebesar 0,76 persen, dimana Jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada Tahun 2015 sebesar 8.520.304 jiwa meningkat menjadi sebesar 8,851,240 jiwa pada Tahun 2019. Terdapat empat (4) Kabupaten/Kota yang mempunyai Laju pertumbuhan penduduk terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Kota Palopo dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 1,80 persen kemudian disusul Kabupaten Luwu Timur dengan laju pertumbuhan sebesar 1,69 persen, menyusul Kabupaten Gowa sebesar 1.35 persen dan Kota Makassar sebesar 1.04 persen. sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten/kota yang terkecil adalah Kabupaten Soppeng dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,10 persen.

**Tabel II.6.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di
Sulawesi Selatan, Tahun 2019**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)					Laju Pert. Penduduk per Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Selayar	130,199	130,605	133,003	134,426	135,624	0,81
2	Bulukumba	410,485	410,485	415,713	418,332	420,603	0,49
3	Bantaeng	183,386	184,517	185,581	186,694	187,626	0,46
4	Jeneponto	355,599	357,807	359,787	361,910	363,792	0,46
5	Takalar	286,906	289,978	292,983	296,059	298,688	0,81
6	Gowa	722,702	735,493	748,200	761,294	772,684	1,35
7	Sinjai	238,099	239,689	241,208	242,776	244,125	0,50
8	Maros	339.300	342,890	346,383	349,985	353,121	0,80
9	Pangkep	323,597	326,700	329,791	332,924	335,514	0,73
10	Barru	171,217	171,906	172,767	173,544	174,323	0,36
11	Bone	742,912	746,973	751,026	755,082	758,589	0,42
12	Soppeng	226,116	226,305	26,466	226,647	226,991	0,10
13	Wajo	393,218	394,495	395,583	396,770	397,814	0,23
14	Sidrap	289,787	292,985	296,125	299,353	301,972	0,83
15	Pinrang	366,789	369,595	372,230	374,985	377,119	0,56
16	Enrekang	199,998	201,614	203,320	205,008	206,387	0,63
17	Luwu	350,218	353,277	356,305	359,405	362,027	0,67
18	Tana Toraja	228,984	230,195	231,519	232,792	234,002	0,43
19	Luwu Utara	302,687	305,372	308,001	310,681	312,883	0,66
20	Luwu Timur	275,595	281,822	287,874	294,207	299,673	1,69
21	Toraja Utara	225,516	226,959	228,414	229,876	231,214	0,50
22	Makassar	1,449,401	1,469,601	1,489,011	1,509,262	1,526,677	1,04
23	Pare Pare	138,699	140,423	142,097	143,831	145,178	0,92
24	Palopo	168,894	172,916	176,907	181,047	184,614	1,80
Sulawesi Selatan		8,520,304	8,606,375	8,690,294	8,776,888	8,851,240	0,76

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Berdasarkan rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan, pada beberapa kelompok umur dapat digambarkan bahwa rasio diatas berada pada kelompok umur 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 dan kelompok umur 20-24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki pada kelompok umur tersebut lebih banyak dari pada perempuan pada tahun 2019, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel II.7.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Sulawesi Selatan, Tahun 2019**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin L/P
		Laki-Laki	Perempuan		
1	0 - 4	420,691	404,024	824,715	1.04
2	5 - 9	423,310	407,118	830,428	1.04
3	10 - 14	409,791	392,082	801,873	1.05
4	15 - 19	405,550	388,070	793,620	1.05
5	20 - 24	398,854	389,880	788,734	1.02
6	25 - 29	345,624	356,975	702,617	0.97
7	30 - 34	306,753	330,160	636,913	0.93
8	35 - 39	289,129	322,228	611,357	0.90
9	40 - 44	282,734	309,984	592,718	0.91
10	45 - 49	266,342	289,913	556,255	0.92
11	50 - 54	226,790	252,188	478,978	0.90
12	55 - 59	178,011	205,061	383,072	0.87
13	60 - 64	137,048	159,195	296,243	0.86
14	65+	99,534	119,401	218,935	0.83
Sulawesi Selatan		4.326.409	4.524.831	8.851.240	0.96

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Berdasarkan sebaran jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2018 dan 2019, Kota Makassar menempati peringkat pertama terbesar dengan sebaran jumlah penduduk pada tahun 2018 sebesar 1.508,326 Jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 1.526,677 Jiwa, sementara jumlah penduduk terkecil pada tahun 2018 dan 2019, berada pada Kabupaten Selayar dengan jumlah penduduk sebesar 134,062 Jiwa pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 135,624 Jiwa.

Jika dibandingkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 jenis kelamin perempuan lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki, yaitu pada tahun 2018 jumlah penduduk perempuan sebesar 4.489,625 Jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 4.524,831 Jiwa. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2018 sebesar 4.287,262 Jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 4.326,409 Jiwa.

Adapun perbandingan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut kab/kota pada tahun 2018 sebesar 95,49 menunjukkan bahwa terdapat 95 penduduk laki-laki per 100 perempuan, selanjutnya tahun 2019 sebesar 95,60 menunjukkan bahwa terdapat 95 penduduk laki-laki per 100 perempuan.

Adapun perbandingan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2018 dan tahun 2019, menunjukkan bahwa terdapat 5 Kabupaten yang rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan melebihi 100 yaitu, Kabupaten Enrekang, Luwu Utara, Toraja Utara, Tana Toraja, dan Luwu Timur.

**Tabel II.8.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan,
Tahun 2018-2019**

No.	Kabupaten/ Kota	2018				2019			
		Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Selayar	64,652	69,410	134,062	93.15	65,424	70,200	135,624	93.20
2	Bulukumba	197,663	220,165	417,828	89.78	198,701	221,902	420,603	89.54
3	Bantaeng	90,031	97,797	187,828	92.06	90,38	97,246	187,626	92.94
4	Jeneponto	174,796	183,795	358,591	95.10	175,607	188,185	363,792	93.32
5	Takalar	142,349	154,359	296,708	92.22	143,674	155,014	298,688	92.68
6	Gowa	374,678	383,873	758,551	97.60	380,488	392,196	772,684	97.01
7	Sinjai	117,525	126,166	243,691	93.15	118,202	125,923	244,125	93.87
8	Maros	171,195	179,661	350,856	95.29	172,793	180,328	353,121	95.82
9	Pangkep	161,127	172,685	333,812	93.31	162,618	172,896	335,514	94.06
10	Barru	83,456	91,437	174,893	91.27	83,878	90,445	174,323	92.74
11	Bone	360,827	395,061	755,888	91.33	363,03	395,559	758,589	91.78
12	Soppeng	106,676	120,838	227,514	88.28	106,927	120,064	226,991	89.06
13	Wajo	189,947	207,717	397,664	91.45	190,693	207,121	397,814	92.07
14	Sidrap	146,584	153,648	300,232	95.40	148,201	153,771	301,972	96.38
15	Pinrang	181,922	193,936	375,858	93.81	183,129	193,99	377,119	94.40
16	Enrekang	102,965	102,903	205,868	100.06	103,627	102,76	206,387	100.84
17	Luwu	176,35	182,908	359,258	96.41	177,382	184,645	362,027	96.07
18	Tana Toraja	117,674	115,157	232,831	102.19	118,102	115,9	234,002	101.90
19	Luwu Utara	155,939	154,578	310,517	100.88	156,878	156,005	312,883	100.56
20	Luwu Timur	151,24	143,756	294,996	105.21	154,006	145,667	299,673	105.72
21	Toraja Utara	115,242	114,49	229,732	100.66	115,712	115,502	231,214	100.18
22	Makassar	747,171	761,155	1.508,326	98.16	755,968	770,709	1.526,677	98.09
23	Pare Pare	70,674	73,065	143,739	96.73	71,406	73,772	145,178	96.79
24	Palopo	86,579	91,065	177,644	95.07	89,583	95,031	184,614	94.27
Sulawesi Selatan		4.287,262	4.489,625	8.776,887	95,49	4.326.409	4.524,831	8.851,240	95,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Rasio ketergantungan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Sulawesi Selatan pada tahun 2019, dapat digambarkan bahwa kelompok umur 0-14 tahun dan diatas 65+ tahun memiliki rasio ketergantungan 51.55. Hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok umur tersebut bergantung kepada kelompok umur 15-64 tahun. Selanjutnya proporsi penduduk usia produktif sebesar 65,99 di kelompok umur 15-64 menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 51 orang penduduk usia tidak produktif.

**Tabel II.9.
Rasio Ketergantungan menurut Kelompok Umur/Usia Produktif
di Sulawesi Selatan, Tahun 2019**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Rasio Ketergantungan	Proporsi Penduduk Usia Produktif
		Laki-Laki	Perempuan		
1	0 - 14	1,253,792	1,203,224	51,55	65,99
2	15 - 64	2,836,853	3,003,654		
3	65+	235,764	317,953		

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mewujudkan ruang Sulawesi Selatan yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkelanjutan, yang diarahkan untuk meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur wilayah, peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka upaya yang akan dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan dengan mengutamakan pengembangan wilayah berbasis rencana tata ruang melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Industri (KI) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KI, dan KSPN, serta kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada Kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada Kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah telah menetapkan lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas tanaman pangan di Sulawesi Selatan yaitu lokasi pengembangan komoditas tanaman padi di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Wajo, sedangkan lokasi pengembangan komoditas tanaman jagung yaitu di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto dan Kota Palopo; sementara lokasi pengembangan komoditas kedelai yaitu di Kabupaten Jeneponto, Takalar, Gowa, Maros, Bone, Soppeng, dan Wajo; dan lokasi pengembangan komoditas ubi kayu di Kabupaten Bulukumba, Gowa, dan Kabupaten Maros.

Pengembangan komoditas pertanian hortikultura di arahkan, sebagai berikut:

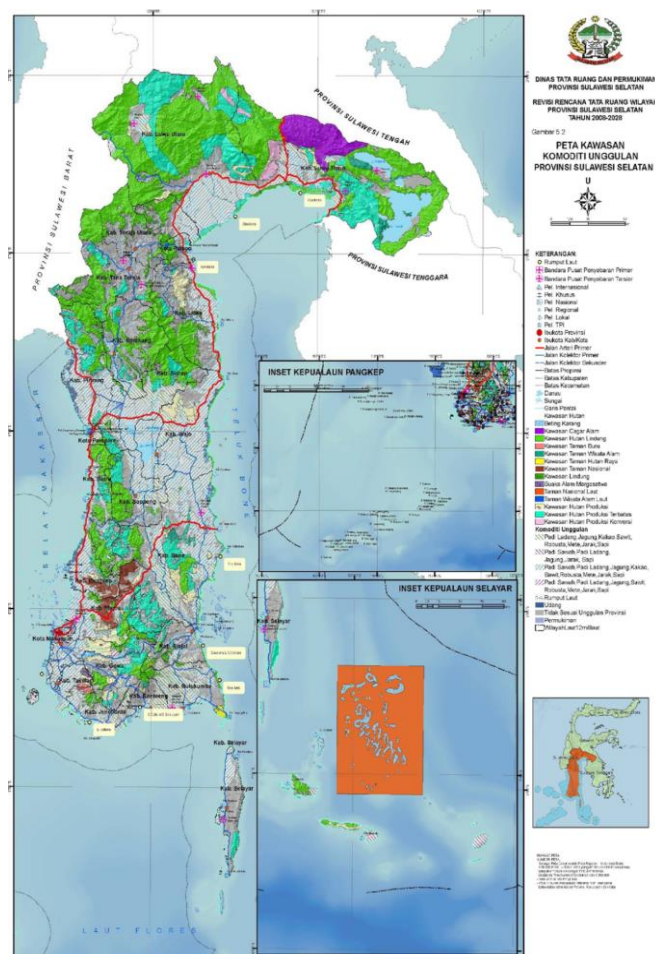
- bawang merah pada Kabupaten Pinrang, Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, dan Takalar;
- tanaman cabai pada Kabupaten Pinrang, Bone, Maros, Enrekang, dan Takalar;
- tanaman jeruk di Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Pangkajene Kepulauan;
- perkebunan tebu diprioritaskan di Kabupaten Gowa, Takalar, dan Bone;
- perkebunan kopi di Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Jeneponto;
- perkebunan kakao di Kabupaten Bone, Luwu Timur, Soppeng, Wajo, Luwu Utara, Luwu, dan Bulukumba;
- komoditas perkebunan lada di Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Luwu Timur;
- komoditas perkebunan cengkeh di Kabupaten Luwu, Sinjai, Wajo, dan Bone dan Kabupaten Bulukumba.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Sedangkan pengembangan komoditas prioritas peternakan di Sulawesi Selatan, untuk komoditas sapi potong diarahkan lokasinya di Kabupaten Bulukumba, Gowa, Sinjai, Bone, Pangkajene Kepulauan, Barru, Sidenreng Rappang, Wajo, Pinrang dan Maros. Sementara lokasi pengembangan komoditas peternakan sapi perah diarahkan di Kabupaten Enrekang dan lokasi pengembangan komoditas ayam buras diarahkan di Kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan kontribusi pertanian terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan sebagai kontributor utama terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, maka penting untuk menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Untuk itu dalam revisi RTRWP Sulawesi Selatan ditetapkan keberadaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di 24 Kabupaten/kota dengan luasan 582.924 Hektar yang proporsi luasan terbesarnya adalah Kabupaten Wajo sebesar 17,80% dengan luasan 103.748 Hektar, Kabupaten Bone sebesar 14,71% dengan luasan 85.737 Hektar, dan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 9,18% dengan luasan sebesar 53.488 Hektar.

Gambar II.5.
Peta Potensi Komoditi Unggulan
Sulawesi Selatan



Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel

2. Kawasan Perikanan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Pengelolaan kawasan perikanan di Sulawesi Selatan diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan.

Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, Teluk Bone, Kepulauan Spermonde, Kepulauan Selayar dan sekitar Kepulauan Tana Keke yang meliputi

wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Sinjai, Pangkajene Kepulauan, Bone, dan Kota Makassar.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.

Selain kawasan perikanan, pengembangan sumber daya kemaritiman dan kelautan di Sulawesi Selatan juga diarahkan untuk memprioritaskan pengembangan komoditas garam di Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Kabupaten Takalar.

3. Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri di kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yaitu kawasan perkotaan Mamminasata dan kawasan perkotaan di Kabupaten Bone, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Bantaeng, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan kota Makassar.

Selain itu RTRWP Sulawesi Selatan menetapkan pula kawasan industri khusus yang mengolah bahan baku komoditas pertambangan di sentra komoditas pertambangan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Maros, Luwu Timur dan Bantaeng, Serta menetapkan beberapa sentra industri kecil dan menengah yang diarahkan pada sentra-sentra produksi yang berorientasi ke pengembangan industri rakyat sebagai komoditas lokal. Disamping itu, kebijakan pembangunan nasional juga mengarahkan transformasi ekonomi Sulawesi Selatan diantaranya melalui peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan akhir. Demikian pula Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan maupun RZWP3K Sulawesi Selatan juga mengarahkan pengembangan komoditas pertambangan di Sulawesi Selatan.

RZWP3K mengarahkan pengembangan komoditas pertambangan pasir di Kabupaten Takalar, Jeneponto, dan Kabupaten Luwu Utara dan pengembangan Blok Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Sinjai, Bone, Wajo, dan Kabupaten Luwu. Sedangkan RTRWP Sulawesi Selatan menetapkan wilayah usaha pertambangan berupa wilayah usaha pertambangan Batubara di Kabupaten Barru, Bone, Enrekang, Maros, Pangkajene Kepulauan, Sidenreng Rappang, Sinjai dan Kabupaten Soppeng, wilayah usaha pertambangan mineral logam di seluruh wilayah Kabupaten/kota kecuali kota Makassar dan kota Parepare, dan wilayah usaha pertambangan mineral radioaktif di Kabupaten Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang dan Kota Parepare.

4. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata buatan.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Arahan pengembangan potensi pariwisata Sulawesi Selatan meliputi arahan pengembangan potensi wisata alam berbasis pariwisata bahari di Taman Nasional Laut Takabonerate dan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang; pariwisata alam berbasis ekowisata di Taman Wisata Alam (TWA) Danau Matano – Mahalona dan TWA Danau Towuti di Kabupaten Luwu Timur, TWA Malino di Kabupaten Gowa, TWA Cani Sirenreng di Kabupaten Bone, TWA Lejja di Kabupaten Soppeng, Taman Nasional Bantimurung – Bulusarang di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Taman Buru Ko'mara di Kabupaten Takalar dan Taman Buru Bangkala di Kabupaten Jeneponto, TWA Danau Tempe - Sidenreng di Kabupaten Wajo dan Sidenreng Rappang, TWA Laut Kepulauan Spermonde di Kota Makassar, TWA Kebun Raya Enrekang; TWA Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros, TWA Sungai Saddang di Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang, Taman Rutan Rakyat (Tahura) Abdul Latief di Kabupaten Sinjai, dan Tahura Nanggala di kota Palopo.

Pengembangan wisata budaya berbasis *heritage tourism* dan wisata sejarah di kawasan Toraja di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, kawasan pusat Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu di Kota Makassar, kawasan permukiman Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, kawasan wisata pelabuhan perahu tradisional Paotere di kota Makassar, dan kawasan industri perahu tradisional Phinisi di Kabupaten Bulukumba, Taman Wisata Sejarah Fort Rotterdam dan Situs Benteng Tallo di kota Makassar, Makam Syech Yusuf di kota Makassar, Masjid Tua Katangka di Kabupaten Gowa, dan Masjid Jami Tua Palopo di Kota Palopo. Sedangkan pengembangan wisata buatan diarahkan di kawasan perkotaan Mamminasata antara lain berupa *meeting-incentive-convention exhibition* (MICE), wisata kebugaran, wisata kesehatan dan wisata olah raga.

5. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Sulawesi Selatan berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang, meliputi: Sistem perkotaan nasional berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah, dan sistem perkotaan provinsi berupa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan Kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

**Tabel II.10.
Arahan Pengembangan Wilayah di Sulawesi Selatan**

No	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
1	Kepulauan Selayar			Kawasan Perkotaan Benteng. Sektor unggulan agroindustri dan perikanan
2	Bulukumba		Kawasan Perkotaan Bulukumba. Sektor unggulan Agroindustri, Pertanian, Pariwisata, Perikanan	
3	Bantaeng			Kawasan Perkotaan Bantaeng. Sektor unggulan perdagangan dan jasa

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
4	Jeneponto		Kawasan Perkotaan Jeneponto. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Pariwisata	
5	Takalar	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
6	Gowa	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
7	Sinjai			Kawasan Sinjai. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
8	Maros	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
9	Pangkep		Kawasan Perkotaan Pangkepene. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan, Pariwisata	
10	Barru		Kawasan Perkotaan Barru. Sektor unggulan Agroindustri, perikanan, pertanian, perkebunan	
11	Bone		Kawasan Perkotaan Watampone. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan, Pertanian	
12	Soppeng			Kawasan Perkotaan Watansoppeng. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
13	Wajo			Kawasan Perkotaan Sengkang. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
				Kawasan Perkotaan Siwa Sektor Unggulan
14	Sidrap			Kawasan Perkotaan Pangkajene. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
15	Pinrang			Kawasan Perkotaan Pinrang. Sektor unggulan perdagangan dan jasa

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
16	Enrekang			Kawasan Perkotaan Enrekang. Sektor unggulan pertanian dan perdagangan dan jasa
17	Luwu			Kawasan Perkotaan Batusitanduk. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
				Kawasan Perkotaan Belopa Sektor Unggulan
18	Tana Toraja			Kawasan Perkotaan Makale. Sektor unggulan perdagangan dan jasa dan pariwisata
19	Luwu Utara			Kawasan Perkotaan Masamba. Sektor unggulan Agropolitan dan Agroindustri
20	Luwu Timur			Kawasan Perkotaan Malili. Sektor unggulan agroindustri
21	Toraja Utara			Kawasan Perkotaan Rantepao Sektor Unggulan Perdagangan dan Jasa
22	Makassar	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
23	Pare Pare		Parepare. Sektor unggulan Agroindustri, Perdagangan dan Jasa	
24	Palopo		Palopo. Sektor unggulan Agroindustri, Perkebunan, Pertanian	

Sumber : RTRWN dan Revisi RTRWP Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan wilayah sebagaimana Tema Pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2021, maka pembangunan infrastruktur wilayah Sulawesi Selatan diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata dan koridor pertumbuhan serta koridor pemerataan di Sulawesi Selatan, dengan prioritas pada penguatan konektivitas dan mengacu pada rencana struktur ruang wilayah Sulawesi Selatan yaitu penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi melalui pembangunan jalur KA Makassar-Parepare; pembangunan jaringan

pelabuhan utama terpadu Makassar, pembangunan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional; pembangunan, dan preservasi jalan provinsi dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mengalami pelambatan dan hanya bertumbuh sebesar 6,92 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang mencapai 7,06 persen, serta lebih rendah dari yang ditargetkan dalam RPJMD untuk tahun 2019 yaitu 7,2 – 7,6 persen.

Pelambatan ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu: faktor cuaca/iklim serta faktor permintaan transportasi dan pergudangan, akibat pada tahun 2019 telah terjadi banjir yang melanda 13 kabupaten/kota dan berdampak pada lahan pertanian seluas 13 ribu hektar (*menurut BNPB*). Juga kekeringan mempengaruhi kegiatan pertanian, dimana luas panen padi berkurang hingga 15 persen dan kenaikan tarif angkutan udara yang mengakibatkan penurunan persentase penumpang menjadi 1,74 persen pada tahun 2019, yang sebelumnya 10,32 persen di tahun 2018.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selalu berada di atas rata-rata Nasional. Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada tahun 2019 hanya mencapai 5,02 persen, lebih rendah dari capaian Sulawesi Selatan yaitu 6,92 persen sebagaimana di gambarkan pada tabel dibawah.

**Tabel II.11.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan Ekonomi						
Sulawesi Selatan	%	7,19	7,42	7,23	7,06	6,92
Nasional	%	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 rata-rata mengalami pelambatan. Berdasarkan data pada table dibawah, dapat digambarkan bahwa dari 24 kabupaten/kota terdapat 1 kabupaten dan 1 kota yang pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2019 yaitu Kabupaten Barru dan Kota Makassar. Dan terdapat 1 kabupaten yang pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2019 yaitu Kabupaten Maros.

Untuk tahun 2019, pertumbuhan ekonomi tertinggi di 24 kabupaten/kota adalah Kabupaten Bantaeng dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 10,75 persen, dan Kota Makassar sebesar 8,79 persen. Sedangkan kabupaten yang pertumbuhan ekonominya terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya adalah Kabupaten Luwu Timur yang bertumbuh hanya 1,17 persen, disusul Kabupaten Maros yang bertumbuh 1,24 persen.

**Tabel II.12.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

No.	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kep. Selayar	8.83	7.35	7.61	8.77	7.66
2	Bulukumba	5.62	6.79	6.92	5.05	5.49
3	Bantaeng	6.64	7.39	7.32	8.08	10.75
4	Jeneponto	6.54	8.37	8.26	6.30	5.47
5	Takalar	8.42	9.61	7.39	6.65	6.87
6	Gowa	6.79	7.61	7.23	7.11	7.46
7	Sinjai	7.55	7.09	7.23	7.49	6.12
8	Maros	8.44	9.50	6.81	6.91	1.24
9	Pangkep	7.63	8.31	6.60	4.76	6.41
10	Barru	6.32	6.01	6.48	7.08	7.41
11	Bone	8.30	9.01	8.43	8.90	7.01
12	Soppeng	5.11	8.14	8.34	8.15	7.69
13	Wajo	7.06	4.98	5.22	1.07	4.06
14	Sidrap	8.03	8.81	7.11	5.02	4.65
15	Pinrang	8.24	7.44	7.86	6.91	6.53
16	Enrekang	6.91	7.64	6.89	3.12	5.43
17	Luwu	7.26	7.88	6.79	6.85	6.26
18	Tana Toraja	6.85	7.32	7.50	7.93	7.22
19	Luwu Utara	6.67	7.49	7.60	8.42	7.11
20	Luwu Timur	6.42	1.58	3.07	3.44	1.17
21	Toraja Utara	7.76	8.04	8.22	8.11	7.56
22	Makassar	7.55	8.03	8.23	8.42	8.79
23	Parepare	6.30	6.87	6.99	5.58	6.65
24	Palopo	6.47	6.95	7.19	7.52	6.75
SULAWESI SELATAN		7,19	7,42	7,23	7,06	6,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Secara regional, pertumbuhan ekonomi enam provinsi di Pulau Sulawesi selama lima tahun terakhir dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi.

Pada periode 2015 sampai 2016 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan bergerak naik dari 7,19 persen pada tahun 2015 menjadi 7,42 persen di tahun 2016, kemudian melambat di tahun berikutnya hingga mencapai angka 6,92 persen di tahun 2019. Meskipun demikian, dalam skala nasional angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selama periode 2015 sampai 2019 selalu berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara dalam lingkup Regional Sulawesi, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di lima provinsi lainnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berada di urutan kedua setelah Sulawesi Tengah yang bertumbuh sebesar 7,15 persen.

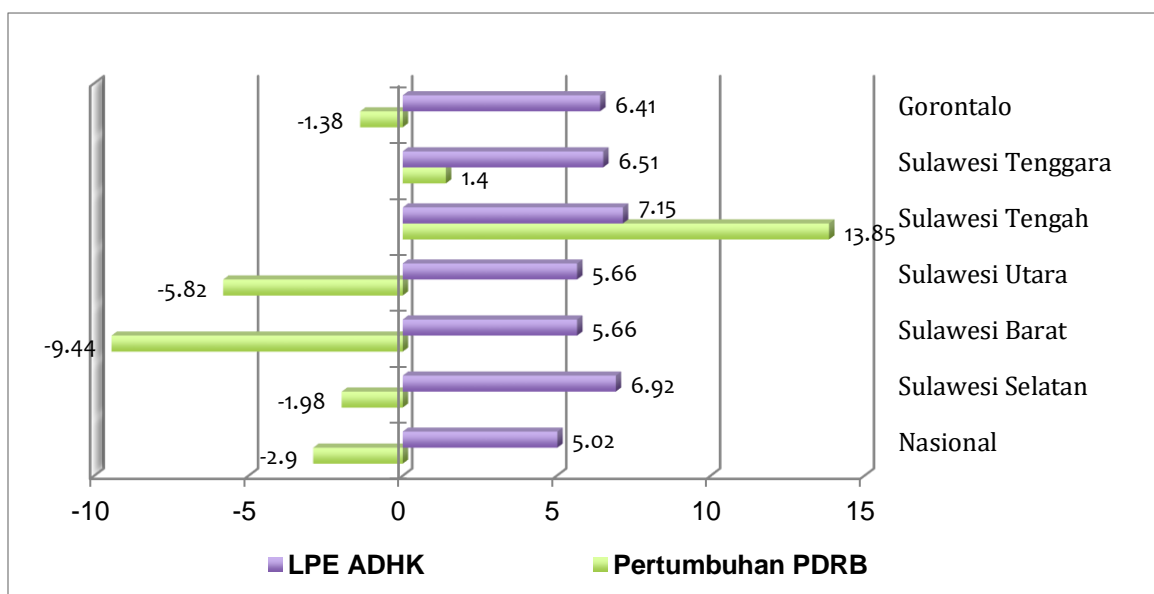
Tabel II.13.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019

Nama Wilayah	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	%	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02
Sulawesi Selatan	%	7,19	7,42	7,23	7,06	6,92
Sulawesi Utara	%	6,12	6,16	6,31	6,01	5,66
Sulawesi Tengah	%	15,50	9,94	7,10	6,28	7,15
Sulawesi Tenggara	%	6,88	6,51	6,76	6,42	6,51
Gorontalo	%	6,22	6,52	6,73	6,50	6,41
Sulawesi Barat	%	7,31	6,01	6,39	6,25	5,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sulawesi mengalami tren perlambatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Hanya dua provinsi yang pertumbuhannya terakselerasi pada tahun 2019, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang terakselerasi signifikan merupakan *base effect* dari pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun sebelumnya akibat bencana gempa Palu 2018. Sementara, di Sulawesi Tenggara, pertumbuhan ekonomi pada 2019 utamanya didukung oleh investasi Tiongkok pada nikel yang mendorong kinerja industri pengolahan melalui hilirasi nikel dan turut meningkatkan ekspor luar negeri. Tren perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 5 dari 6 provinsi di Pulau Sulawesi menunjukkan perlunya mencari dan mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Pulau Sulawesi.

Grafik II.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDB/PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi, Tahun 2019



Sumber: BPS Tahun 2020, Diolah

Berdasarkan PDRB sektor lapangan usaha di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada sektor lapangan usaha Informasi dan Komunikasi serta sektor lapangan usaha Jasa Perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 10,99 persen dan 10,53 persen. Berbagai data pendukung menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap produk informasi dan komunikasi meningkat cukup tinggi di tahun 2019. Selain itu jumlah tenaga kerja yang bergerak di bidang informasi dan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

komunikasi serta Jasa Perusahaan juga tumbuh signifikan. Sedangkan sektor lapangan usaha yang masih memerlukan perhatian adalah sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang yang hanya bertumbuh sebesar 1,73 persen dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 1,74 persen.

**Tabel II.14.
Pertumbuhan PDRB menurut Sektor Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Sektor Lapangan Usaha		Pertumbuhan PDRB				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,87	7,86	5,56	5,27	2,80
b	Pertambangan dan Penggalian	7,42	1,22	3,80	1,11	2,68
c	Industri Pengolahan	6,77	8,23	5,03	0,94	9,91
d	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,38	11,52	6,10	7,26	6,21
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,34	5,44	7,89	5,49	1,73
f	Konstruksi	8,32	7,02	8,74	8,55	8,92
g	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	7,89	9,57	10,42	11,57	9,15
h	Transportasi dan Pergudangan	6,82	7,75	8,37	10,32	1,74
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,81	8,47	11,94	12,71	6,16
j	Informasi dan Komunikasi	7,92	8,13	10,52	11,99	10,99
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,41	13,63	4,39	4,67	4,01
l	Real Estat	7,39	6,37	4,48	4,63	5,42
m,n	Jasa Perusahaan	5,87	7,88	8,44	10,02	10,53
o	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7,88	-0,22	5,20	9,96	9,98
p	Jasa Pendidikan	7,25	6,86	9,72	9,77	6,93
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,31	8,45	8,80	8,59	8,05
r,s,t,u	Jasa Lainnya	8,99	9,81	9,58	13,13	9,73
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7,19	7,42	7,23	7,06	6,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

Sementara nilai PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2019 berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan di 17 sektor lapangan usaha. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan pada tahun 2019 sebesar 330,61 triliun rupiah, meningkat dibanding tahun 2018 yang hanya mencapai nilai 309,20 triliun rupiah. Adapun nilai PDRB (ADHK) menurut lapangan usaha yang terbesar berada pada sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 66,66 trilyun rupiah, kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 51,44 trilyun rupiah, dan selanjutnya adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 44,83 trilyun rupiah. Sedangkan nilai PDRB ADHK tahun 2019 yang terendah dan masih perlu didorong adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu 0,37 trilyun rupiah, serta pengadaan listrik dan gas hanya sebesar 0,31 trilyun rupiah.

**Tabel II.15.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

LAPANGAN USAHA	NILAI PDRB-ADHK (Trilyun Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	53,96	58,44	61,60	64,84	66,66
Pertambangan dan Galian	15,87	15,96	16,60	16,79	17,24
Industri Pengolahan	35,51	38,45	40,41	40,79	44,83
Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,26	0,27	0,29	0,31
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,3	0,32	0,34	0,36	0,37
Konstruksi	29,97	31,99	34,87	37,85	41,23
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	34,92	38,36	42,25	47,13	51,44
Transportasi dan Pergudangan	9,19	9,86	10,68	11,78	11,98
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,37	3,66	4,09	4,61	4,90
Informasi dan Komunikasi	15,71	16,99	18,78	21,03	23,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,66	9,84	10,28	10,75	11,19
Real Estate	9,2	9,78	10,22	10,70	11,28
Jasa Perusahaan	1,06	1,14	1,24	1,36	1,51
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	11,38	11,22	11,93	13,11	14,42
Jasa Pendidikan	13,38	14,3	15,69	17,22	18,41
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,85	5,25	5,72	6,21	6,71
Jasa Lainnya	3,21	3,25	3,86	4,37	4,79
Total PDRB	250,73	269,07	288,81	309,20	330,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Seperti halnya nilai PDRB atas dasar harga konstan, nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) juga meningkat pada Tahun 2019 mencapai 504,76 trilyun rupiah dibandingkan tahun 2018 hanya mencapai nilai 456,61 trilyun rupiah. Peningkatan tersebut di sumbangkan oleh sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 107,42 trilyun rupiah, kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 74,70 Trilyun rupiah.

**Tabel II.16.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

LAPANGAN USAHA	NILAI PDRB-ADHB (Trilyun Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	78,78	88,34	96,11	103,96	107,42
Pertambangan dan Galian	21,52	19,56	20,41	22,17	23,30
Industri Pengolahan	47,25	53,02	57,45	59,45	66,43
Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,22	0,27	0,30	0,32
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,37	0,39	0,43	0,46	0,48

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

LAPANGAN USAHA	NILAI PDRB-ADHB (Trilyun Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Konstruksi	42,18	47,62	53,56	62,57	71,56
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	43,79	50,06	59,98	66,44	74,70
Transportasi dan Pergudangan	14,25	16,17	17,51	19,76	21,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,55	4,99	5,71	6,53	7,11
Informasi dan Komunikasi	15,72	17,57	19,93	22,78	25,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	12,26	14,36	15,80	17,28	18,50
Real Estate	13,59	14,88	15,87	17,14	18,41
Jasa Perusahaan	1,48	1,65	1,85	2,11	2,37
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	16,29	16,84	18,19	20,65	23,33
Jasa Pendidikan	17,30	19,13	21,76	24,43	26,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,52	7,33	8,19	6,21	10,16
Jasa Lainnya	4,37	4,96	5,57	4,37	7,29
Total Nilai PDRB	340,39	377,09	415,59	456,61	504,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Dari segi kontribusi PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan di Sulawesi Selatan didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,16 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,56 persen dan Industri Pengolahan sebesar 13,56 persen. Dari 17 sektor lapangan usaha, dapat di gambarkan bahwa kontribusi PDRB menurut lapangan usaha utama berdasarkan harga konstan, hanya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mengalami peningkatan kontribusi setiap tahunnya.

Tabel II.17.
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

LAPANGAN USAHA	Kontribusi PDRB ADHK (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,52	21,72	21,33	20,97	20,16
Pertambangan dan Galian	6,33	5,94	5,75	5,43	5,21
Industri Pengolahan	14,16	14,29	13,99	13,19	13,56
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,10	0,09	0,09	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
Konstruksi	11,95	11,89	12,07	12,24	12,47
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,93	14,26	14,63	15,24	15,56
Transportasi dan Pergudangan	3,67	3,66	3,70	3,81	3,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,34	1,36	1,42	1,49	1,48

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

LAPANGAN USAHA	Kontribusi PDRB ADHK (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Informasi dan Komunikasi	6,27	6,31	6,50	6,80	7,06
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,45	3,66	3,56	3,48	3,38
Real Estate	3,67	3,63	3,54	3,46	3,41
Jasa Perusahaan	0,42	0,42	0,43	0,44	0,46
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	4,54	4,17	4,13	4,24	4,36
Jasa Pendidikan	5,34	5,31	5,43	5,57	5,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,93	1,95	1,98	2,01	2,03
Jasa Lainnya	1,28	1,21	1,34	1,41	1,45
Total Kontribusi PDRB (adhk)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku menunjukkan bahwa, terdapat tiga sektor lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,28 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,80 persen dan konstruksi sebesar 14,18 persen. Berdasarkan data kontribusi PDRB berdasarkan harga berlaku menunjukkan bahwa pada lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan lapangan usaha konstruksi mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan penurunan besaran kontribusi dalam lima tahun terakhir.

**Tabel II.18.
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

LAPANGAN USAHA	Kontribusi PDRB ADHB (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,14	23,43	23,13	22,77	21,28
Pertambangan dan Galian	6,32	5,19	4,91	4,86	4,62
Industri Pengolahan	13,88	14,06	13,82	13,02	13,16
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	12,39	12,63	12,89	13,70	14,18
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,86	13,28	14,43	14,55	14,80
Transportasi dan Pergudangan	4,19	4,29	4,21	4,33	4,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,34	1,32	1,37	1,43	1,41
Informasi dan Komunikasi	4,62	4,66	4,80	4,99	5,05
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,60	3,81	3,80	3,78	3,67
Real Estate	3,99	3,95	3,82	3,75	3,65
Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

LAPANGAN USAHA	Kontribusi PDRB ADHB (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	4,79	4,47	4,38	4,52	4,62
Jasa Pendidikan	5,08	5,07	5,24	5,35	5,26
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,92	1,94	1,97	1,36	2,01
Jasa Lainnya	1,28	1,32	4,37	0,96	1,44
Total Kontribusi PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapitanya, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, PDRB per kapita tercatat sebesar 39,95 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 57,03 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Walaupun terjadi kenaikan, namun nilai ini masih berada dibawah rata-rata Nasional yaitu 59,07 juta rupiah, serta belum mencapai target RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 yaitu sebesar 57,64 juta rupiah.

Tabel II.19.
Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK)
Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB/PDB Perkapita (ADHB)						
Sulawesi Selatan	Juta Rp	39,95	43,82	47,82	52,64	57,03
Nasional	Juta Rp	45,12	47,94	51,89	55,99	59,07
PDRB/PDB Perkapita (ADHK)						
Sulawesi Selatan	Juta Rp	29,44	31,30	33,23	35,23	37,35
Nasional	Juta Rp	35,16	36,47	37,85	39,34	40,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

PDRB perkapita (ADHB) menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Walaupun demikian, dari 24 kabupaten/kota terdapat satu kabupaten yang PDRB perkapita mengalami penurunan nilai di tahun 2016 sampai 2018 dibanding nilai yang dicapai pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Luwu Timur. Namun nilai tersebut telah meningkat menjadi 70,07 juta rupiah di tahun 2019 dari 69,73 juta rupiah pada tahun 2015.

Adapun kabupaten/kota yang PDRB perkapitanya tertinggi di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 adalah Kota Makassar sebesar 116,87 juta rupiah, menyusul Kabupaten Pangkep dengan PDRB perkapita sebesar 77,46 juta rupiah dan Kabupaten Luwu Timur

sebesar 77,07 juta rupiah. Sedangkan PDRB perkapita terendah diantara kabupaten lainnya, adalah Kabupaten Gowa yang hanya mencapai 27,10 juta rupiah dan Kabupaten Jeneponto 27,74 Juta rupiah.

**Tabel II.20.
Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

No	Kab. / Kota	PDRB Perkapita Adhb (Juta Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kep. Selayar	31,86	35,46	39,27	43,62	47,50
2	Bulukumba	23,31	26,06	29,03	31,55	33,80
3	Bantaeng	30,42	34,13	37,41	41,63	46,80
4	Jeneponto	19,69	21,94	23,94	26,03	27,74
5	Takalar	23,78	26,73	29,21	31,51	34,01
6	Gowa	19,03	21,04	22,98	25,07	27,10
7	Sinjai	31,57	34,61	37,89	41,88	44,90
8	Maros	45,94	52,09	56,12	60,92	64,33
9	Pangkep	56,94	62,92	67,60	71,98	77,46
10	Barru	28,87	31,75	34,51	38,09	41,71
11	Bone	31,36	35,15	39,04	43,87	47,50
12	Soppeng	30,27	34,89	39,19	44,12	48,18
13	Wajo	38,45	41,94	45,08	47,15	49,87
14	Sidrap	32,12	36,66	40,24	43,25	46,01
15	Pinrang	35,83	39,78	43,95	48,29	52,05
16	Enrekang	26,20	29,22	31,28	32,81	35,36
17	Luwu	29,59	33,55	36,56	40,20	43,25
18	Tana Toraja	21,43	23,72	26,15	29,31	31,96
19	Luwu Utara	28,73	32,02	35,02	38,65	41,70
20	Luwu Timur	69,73	61,72	63,71	69,41	70,07
21	Toraja Utara	26,10	29,91	33,80	37,84	41,50
22	Makassar	78,94	87,13	95,67	106,23	116,87
23	Parepare	36,50	39,35	42,88	45,94	49,80
24	Palopo	31,68	34,04	36,83	40,32	43,02
SULAWESI SELATAN		39,95	43,82	47,82	52,64	57,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

Berdasarkan skala regional, pertumbuhan tahunan PDRB per kapita Sulawesi Selatan merupakan yang tertinggi di Pulau Sulawesi dari Tahun 2017 sampai tahun 2019, dan selalu berada diatas PDB per kapita Nasional. Meski demikian, pertumbuhan tahunan PDRB per kapita Sulawesi Selatan mengalami tren penurunan semenjak tahun 2017 sampai tahun 2019.

Pertumbuhan PDRB per kapita dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Rata-rata pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan tahun 2015-

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

2018 sebesar 1,06 persen (yoy - BPS, 2019). Pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan tersebut merupakan yang terendah di Pulau Sulawesi, dan lebih rendah dibandingkan Nasional. Faktor kedua adalah pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2015–2019 Sulawesi Selatan mencapai 6,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa skala pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dibandingkan skala pertumbuhan penduduknya, sehingga pertumbuhan PDRB per kapita Sulawesi Selatan lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB-nya.

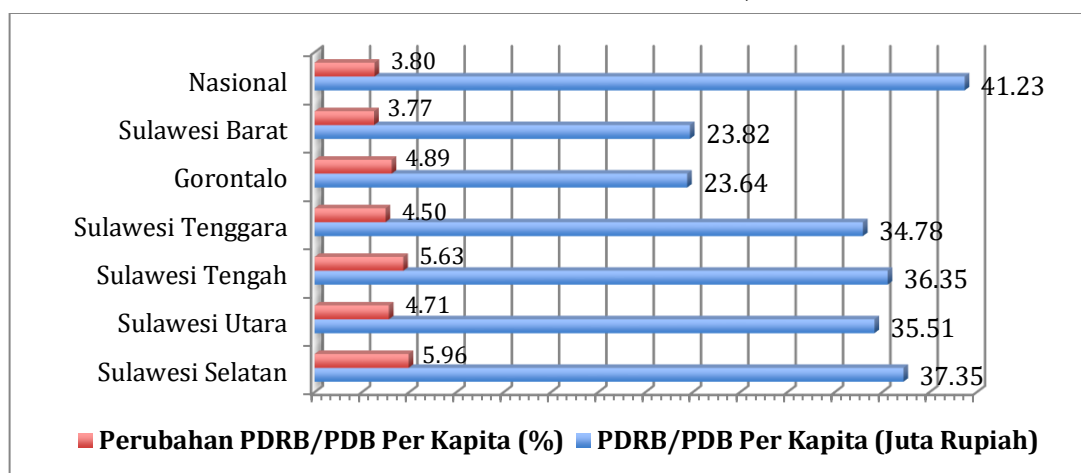
Tabel II.21.
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019

NAMA WILAYAH (Nasional dan Provinsi)	PDRB/PDB Perkapita adhk (Rp.)					Pertumbuhan PDRB Perkapita 2018 - 2019
	2015	2016	2017	2018	2019	
NASIONAL (PDB Perkapita ADHK)	35.162	36.469	37.851	39.339	40.844	3.83
Sulawesi Selatan	29.436	31.303	33.234	35.249	37.351	5.96
Sulawesi Utara	29.196	30.680	32.297	33.915	35.512	4.71
Sulawesi Tengah	28.779	31.151	32.860	34.411	86.347	150.93
Sulawesi Tenggara	29.203	30.476	31.894	33.286	34.783	4.50
Gorontalo	19.474	40.427	21.478	22.540	23.642	4.89
Sulawesi Barat	20.251	21.068	22.001	22.951	23.817	3.77

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi se Sulawesi, Tahun 2015-2019 (diolah)

Nilai PDRB per kapita riil Provinsi Sulawesi Selatan dalam Periode 2015-2019 terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata sekitar Rp. 33 juta pertahun, yang artinya, dalam kurun waktu tersebut rata-rata pendapatan yang di terima selama satu tahun oleh penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sekitar Rp. 33 Juta. PDRB per kapita riil Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 senilai Rp. 29.436,00 ribu meningkat menjadi Rp. 37.351,00 ribu pada tahun 2019. Dalam skala Nasional, selama lima tahun terakhir PDRB per kapita riil Provinsi Sulawesi Selatan masih di bawah PDRB/PDB perkapita riil Nasional, dimana PDRB/PDB per kapita riil nasional sebesar Rp. 35.162,00 ribu di tahun 2015 menjadi Rp. 40.844,00 ribu di tahun 2019, dengan rata-rata hampir 38 juta pertahun. Sementara di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan nilai PDRB per kapita riil terbesar yaitu Rp. 86.347,00 ribu.

Grafik II.2.
Perbandingan Perubahan PDRB/PDB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi, Tahun 2015-2020

Secara keseluruhan gambaran indikator TPT, Gini Rasio, dan Tingkat Kemiskinan yang saling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional, maupun masing-masing

Provinsi di Pulau Sulawesi, serta gambaran perbandingan rasio perubahan indikator tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut:

Tabel II.22.

Perbandingan Rasio Perubahan TPT/Gini Rasio/Persentase Penduduk Miskin Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan terhadap Rata-Rata Capaian Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2019

Wilayah	Selisih Capaian TPT/Gini Rasio/Persentase Penduduk Miskin dengan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan (Tahun 2018-2019)			Rasio Perubahan TPT/Gini Rasio/Persentase Penduduk Miskin dengan Pertumbuhan Ekonomi dengan Sulawesi Selatan		
	TPT	Gini Rasio	% Penduduk Miskin	TPT	Gini Rasio	% Penduduk Miskin
Sulawesi Selatan	-0.0535	0.0004	-0.0448			
Nasional	-0.0120	-0.0008	-0.0876	4.4735	-0.5441	0.5111
Sulawesi Utara	-0.1078	0.0007	-0.0141	0.4961	0.6134	3.1694
Sulawesi Tengah	-0.0392	0.0018	-0.0713	1.3653	0.2384	0.6280
Sulawesi Tenggara	0.0507	0.0002	-0.0430	-1.0548	2.8223	1.0415
Gorontalo	0.0047	-0.0011	-0.0811	-11.4244	-0.3970	0.5522
Sulawesi Barat	0.0035	-0.0002	-0.0477	-15.1315	-2.4538	0.9391

Sumber: Diolah dari Data BPS Tahun 2015-2020

a. Perbandingan Rasio Perubahan TPT dengan Pertumbuhan Ekonomi

Rasio perubahan TPT terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 menunjukkan nilai -0,0535 yang berarti setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 disertai dengan penurunan TPT sebesar 0,0535. Angka ini lebih baik dari pada capaian Nasional, dimana 1% pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2019 hanya disertai dengan penurunan TPT sebesar 0,0120. Secara keseluruhan, dampak kinerja perekonomian Sulawesi Selatan terhadap penurunan tingkat pengangguran lebih baik dari pada Nasional, disertai dengan rasio akhir yang sebesar 4,4735 atau lebih tinggi dari 1 Indikator ini juga menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian Sulawesi Selatan lebih baik daripada Nasional.

Dibandingkan provinsi lain di Pulau Sulawesi, untuk indikator yang sama, Sulawesi Selatan lebih baik dibandingkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Bahkan di Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 justru disertai dengan peningkatan TPT, masing-masing sebesar 0,0507 persen di Sulawesi Tenggara, 0,0047 persen Gorontalo, dan disertai dengan penurunan TPT hanya sebesar 0,1078 persen di Sulawesi Utara.

b. Perbandingan Rasio Perubahan Gini Rasio dengan Pertumbuhan Ekonomi

Rasio perubahan gini ratio terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 menunjukkan nilai 0,0004, yang berarti setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 masih disertai dengan kenaikan gini ratio sebesar 0,0004 persen. Angka lebih buruk dibandingkan capaian Nasional, di mana 1 persen pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2019 disertai dengan penurunan gini ratio sebesar 0,0008 persen. Secara keseluruhan, rasio akhir sebesar -0,5441 (nilai negatif) dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan kinerja perekonomian Sulawesi Selatan tidak berdampak lebih baik bagi ketimpangan sosialnya; berlawanan dengan Nasional di mana kinerja perekonomian berdampak relatif baik bagi ketimpangan sosialnya.

Dibandingkan provinsi lain di Pulau Sulawesi, untuk indikator yang sama, Sulawesi Selatan masih lebih baik dibandingkan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Pada provinsi-provinsi tersebut, tiap 1 persen pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 disertai dengan naiknya gini ratio masing-masing sebesar 0,0007 persen dan 0,0018 persen. Namun, untuk provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo, posisi Sulawesi Selatan tidak lebih baik dari Gorontalo dan Sulawesi Barat, yaitu tiap 1 persen Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 disertai dengan penurunan gini rasio masing-masing sebesar 0,001 dan 0,0002 persen.

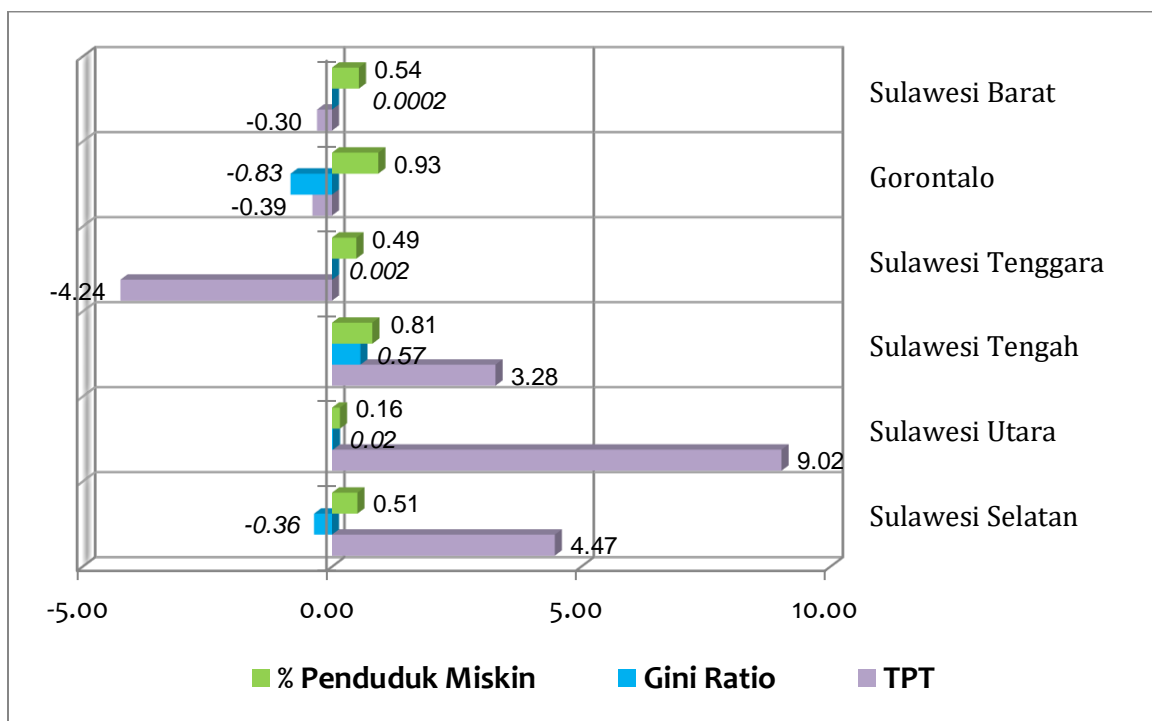
c. Perbandingan Rasio Perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan Pertumbuhan Ekonomi

Rasio perubahan persentase penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Pada tahun 2019 menunjukkan nilai -0,0448, yang berarti setiap 1% pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 disertai dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,0448 persen. Meski sudah cukup baik, namun angka ini masih lebih rendah dibandingkan capaian Nasional, dimana 1% pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2019 disertai dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,0876 persen. Secara keseluruhan, dampak kinerja perekonomian Sulawesi Selatan terhadap penurunan penduduk miskin masih lebih rendah dari pada Nasional, ditandai dengan rasio akhir yang sebesar 0,5111 atau lebih rendah dari 1.

Dibandingkan provinsi lain di Pulau Sulawesi, untuk indikator yang sama, Sulawesi Selatan masih lebih baik dibandingkan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara yang tiap 1 persen pertumbuhannya pada tahun 2019 disertai dengan penurunan persentase penduduk miskin masing-masing sebesar 0,043 persen dan 0,0141 persen. Pada provinsi lain di Pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, tiap 1 persen pertumbuhannya pada tahun 2019 disertai dengan penurunan persentase penduduk miskin yang lebih besar dari Sulawesi Selatan yakni Sulawesi Tengah sebesar 0,0713 persen, Gorontalo 0,0811 persen, dan Sulawesi Barat 0,0477 persen.

Grafik II.3.

Perbandingan Rasio Perubahan TPT, Gini Rasio dan Persentase Penduduk Miskin dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019

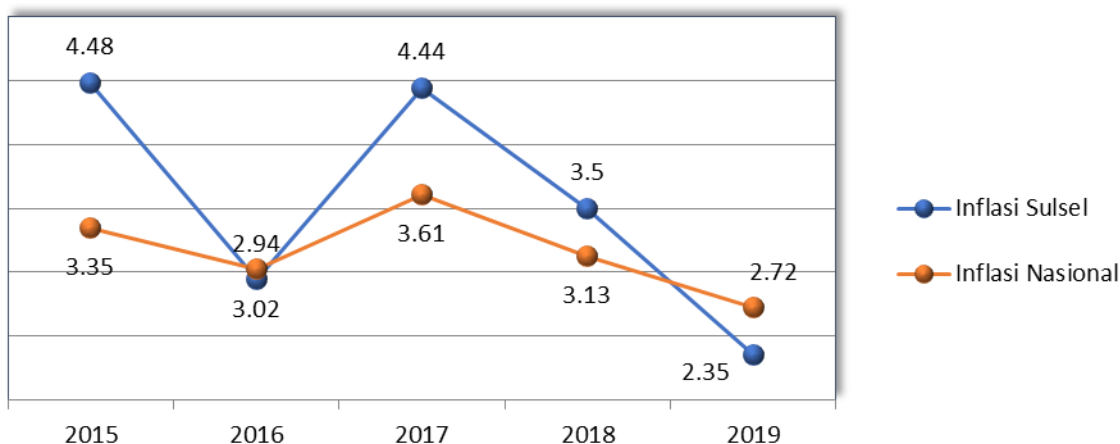


Sumber : Diolah dari Data BPS Tahun 2015-2020

3. Laju Inflasi

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur stabilitas perekonomian suatu wilayah adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi dari tahun ke tahun di Sulawesi Selatan (Desember 2019 terhadap Desember 2018) sebesar 2,35 persen. Tingkat inflasi tahunan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi pada periode tahun 2018 dan 2017 yaitu masing-masing sebesar 3,50 persen dan 4,44 persen. Capaian tahun 2019 tersebut telah melampaui target RPJMD yang ditargetkan untuk menekan inflasi di Sulawesi Selatan menjadi $3,5 \pm 1,0$.

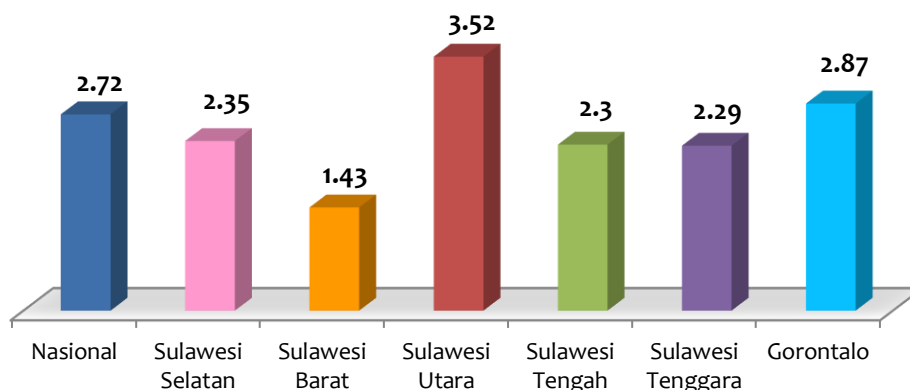
Grafik II.4.
Perkembangan Laju Inflasi
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Jika dibandingkan tingkat inflasi Sulawesi Selatan dengan tingkat inflasi Nasional pada tahun 2019, maka tingkat inflasi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 2,35 persen lebih rendah dari tingkat inflasi Nasional yang mencapai angka 2,72 persen, dimana andil inflasi komponen pengeluaran sandang mengalami inflasi paling tinggi yaitu sebesar 6,14 persen, sedangkan komponen transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 1,92 persen. Berdasarkan tingkat inflasi tahun 2019 untuk regional Pulau Sulawesi, maka tingkat inflasi Sulawesi Selatan tahun 2019 berada di bawah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,52 persen dan Provinsi Gorontalo sebesar 2,87 persen.

Grafik II.5.
Tingkat Inflasi di Sulawesi Selatan, Nasional dan
Provinsi Pulau Sulawesi, Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020

4. Gini Rasio dan Indeks Williamson

Gini Rasio Provinsi di Pulau Sulawesi dan Nasional dari tahun ke tahun capaiannya berfluktuasi. Pada September 2019, Gini Rasio Sulawesi Selatan sebesar 0,391 menunjukkan adanya peningkatan angka sebesar 0,003 poin dibandingkan dengan Gini Rasio September 2018 yang besarnya 0,388. Besaran Gini Rasio Sulawesi Selatan tahun 2019, menunjukkan bahwa Gini Rasio Sulawesi Selatan masih di atas Gini Rasio Nasional dan belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,385. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2019 ketimpangan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Namun bila dibandingkan dengan Gini Rasio di Pulau Sulawesi, maka Gini Rasio Sulawesi Selatan tahun 2019 masih lebih baik dari Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 0,399 dan Provinsi Gorontalo sebesar 0,407.

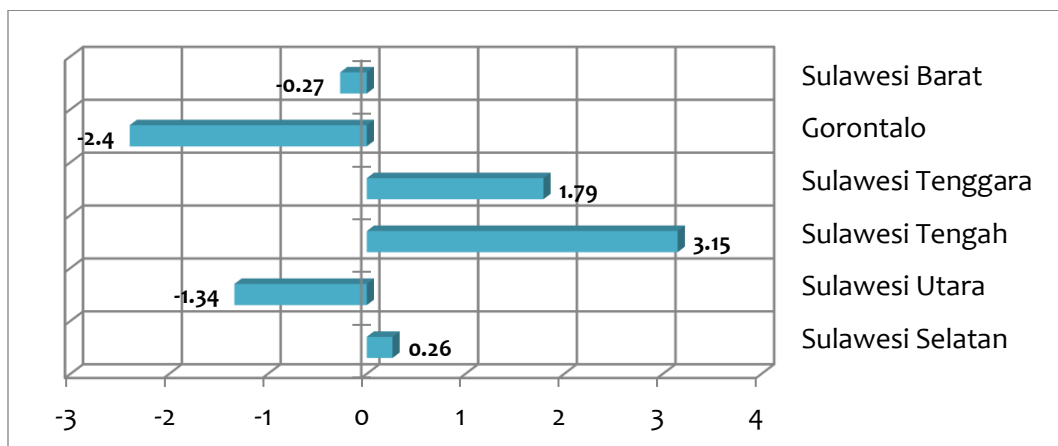
**Tabel II.23.
Perbandingan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019**

Indikator	Gini Rasio				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Selatan	0,404	0,400	0,429	0,388	0,391
Sulawesi Utara	0,366	0,379	0,394	0,372	0,367
Sulawesi Tengah	0,370	0,347	0,345	0,317	0,327
Sulawesi Tenggara	0,381	0,388	0,404	0,392	0,399
Gorontalo	0,401	0,410	0,405	0,417	0,407
Sulawesi Barat	0,362	0,371	0,339	0,366	0,365
Nasional	0,402	0,394	0,391	0,384	0,380

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Memperhatikan capaian Gini Rasio Provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2019, maka diperoleh gambaran bahwa terjadi peningkatan ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,26, Sulawesi Tenggara sebesar 1,29 dan Sulawesi Tengah sebesar 3,15. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan upaya untuk menurunkan ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dan Provinsi di Pulau Sulawesi pada umumnya.

**Grafik II.6.
Perubahan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2019**

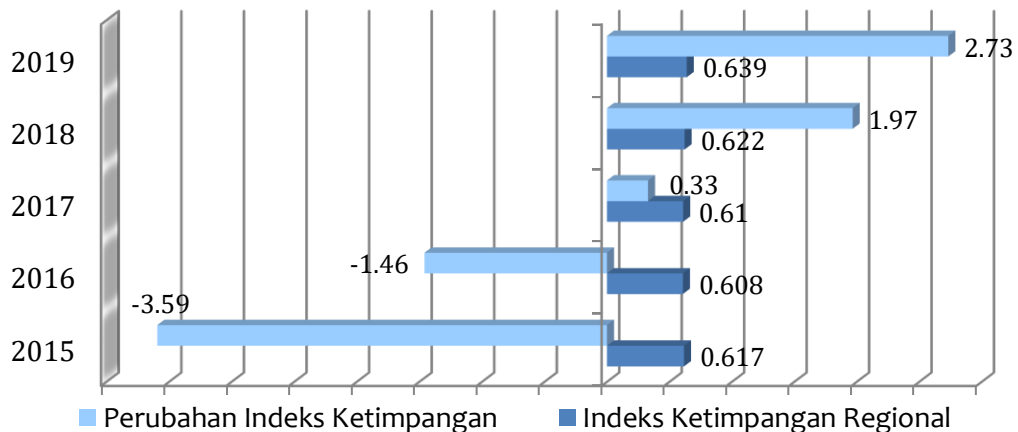


Sumber : Diolah dari Data BPS Provinsi Tahun 2020

Indeks Ketimpangan Williamson berdasarkan data pada tabel berikut menunjukkan nilai ketimpangan yang berfluktuasi sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah/daerah mengalami

pertumbuhan yang lebih cepat dibanding wilayah/daerah lain meskipun pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahun. Indeks Ketimpangan Williamson pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,639 dari tahun 2018 dengan nilai indeks 0,622, atau mengalami penurunan nilai indeks sebesar 2,73 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai Indeks Ketimpangan Williamson Sulawesi Selatan pada tahun 2019 menyebabkan target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 yaitu sebesar 0,580 belum tercapai.

**Grafik II.7.
Perkembangan dan Perubahan Indeks Ketimpangan
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2015-2020

5. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Selama periode tahun 2015 sampai tahun 2019, jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan mengalami penurunan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin sebesar 864,51 ribu jiwa atau 10,12 persen dan turun menjadi 759,58 ribu jiwa atau 8,56 persen di tahun 2019. Perbandingan persentase penduduk miskin antara Sulawesi Selatan dengan Nasional dari tahun 2015 sampai tahun 2019, menunjukkan angka persentase penduduk miskin Nasional selalu berada di atas rata-rata Sulawesi Selatan yaitu 11,13 persen pada tahun 2015 dan 9,22 persen pada tahun 2019.

**Grafik II.8.
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional,
Tahun 2015-2019**



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

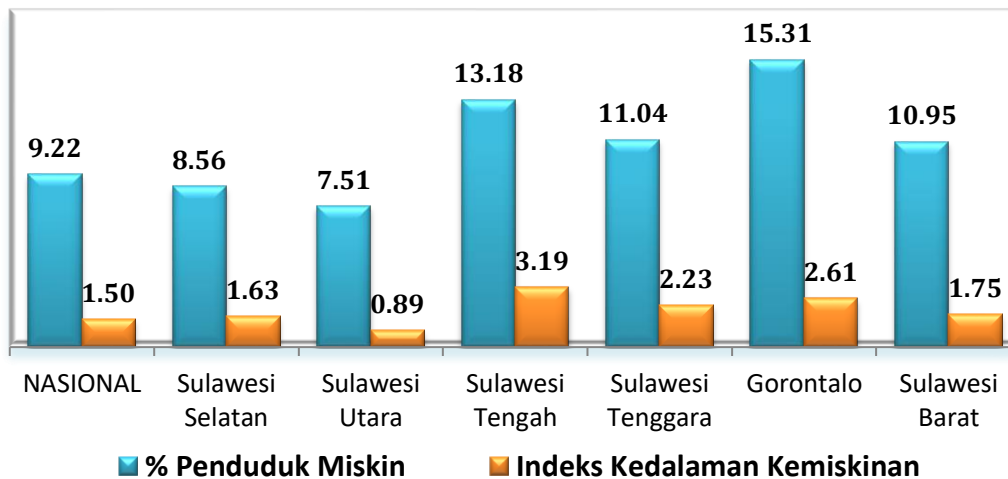
Jika dibandingkan Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019 menunjukkan bahwa, persentase penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Gorontalo dengan angka 15,31 persen, kemudian disusul Provinsi Sulawesi Tengah dengan angka 13,18 persen, dan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan angka 11,04 persen. Demikian pula angka indeks kedalaman kemiskinan tertinggi juga berada di tiga Provinsi tersebut, namun yang mendominasi adalah Provinsi Sulawesi

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Tengah dengan angka 3,19 persen, disusul Provinsi Gorontalo dengan angka 2,61 persen dan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan angka 2,23 persen. Sementara persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai angka terendah setelah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu 0,89 persen dan 7,51 persen serta dibawah rata-rata angka Nasional 9,22 persen. Walaupun persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dibawah rata-rata Nasional, disisi lain indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, masih lebih tinggi dibandingkan Nasional.

Grafik II.9.

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi, Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi se Sulawesi, Tahun 2020

Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin berdasarkan wilayah pada tahun 2019 dengan angka tertinggi berada pada wilayah perdesaan yaitu sebesar 597,19 ribu jiwa atau 11,90 persen, sedangkan jumlah dan persentase penduduk miskindi perkotaan hanya sebesar 162,39 ribu jiwa atau 4,22 persen.

Berdasarkan capaian tersebut, maka Target RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menurunkan persentase penduduk miskin yaitu 8,78 persen pada tahun 2019 telah tercapai (melampaui).

Tabel II.24.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019

Penduduk Miskin Wilayah	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan	Ribu Jiwa	157,18	150,6	166,5	168,7	162,39
Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan	Ribu Jiwa	707,34	646,21	659,47	610,94	597,19
Jumlah Penduduk Miskin Kota + Desa	Ribu Jiwa	864,51	796,81	825,97	779,64	759,58
Jumlah Penduduk Miskin Nasional	Juta Jiwa	28.513,57	27.764,32	26.582,99	25.674,58	24.785,87
Persentase Penduduk Miskin Perkotaan	%	4,93	4,47	4,76	4,48	4,22
Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	%	13,22	12,3	12,65	12,15	11,90
Persentase Penduduk Miskin Kota + Desa	%	10,12	9,24	9,48	8,87	8,56
Persentase Penduduk Miskin Nasional	%	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

Periode 2015 sampai 2019 garis kemiskinan di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, garis kemiskinan berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan mencapai Rp. 254.524, kemudian meningkat menjadi Rp. 341.555 atau meningkat sebesar 8,18 persen pada tahun 2019.

Garis kemiskinan di daerah perkotaan pada tahun 2019 sebesar Rp. 354.770 dan garis kemiskinan di perdesaan sebesar Rp. 331.064. Dibandingkan dengan garis kemiskinan Nasional maka sama halnya dengan Sulawesi Selatan garis kemiskinan perkotaan lebih besar dari pada garis kemiskinan di perdesaan.

**Tabel II.25.
Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019**

Wilayah	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan						
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	274.140	286.669	303.834	327.725	354.770
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	254.524	267.428	287.788	306.250	331.064
Perkotaan + Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	254.524	267.428	287.788	315.738	341.555
Garis Kemiskinan Nasional						
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	356.378	372.114	400.995	425.770	442.063
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	333.034	350.420	370.910	392.154	404.398

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Ditinjau dari jumlah penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2015-2019. Pada tahun 2015, penduduk diatas garis kemiskinan Sulawesi Selatan sebesar 89,88 persen, lebih tinggi dari Nasional yaitu 88,87 persen. Demikian pula halnya pada tahun 2019, penduduk diatas garis kemiskinan Sulawesi Selatan sebesar 91,44 persen, lebih tinggi dari Nasional yaitu 90,78 persen.

**Tabel II.26.
Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019**

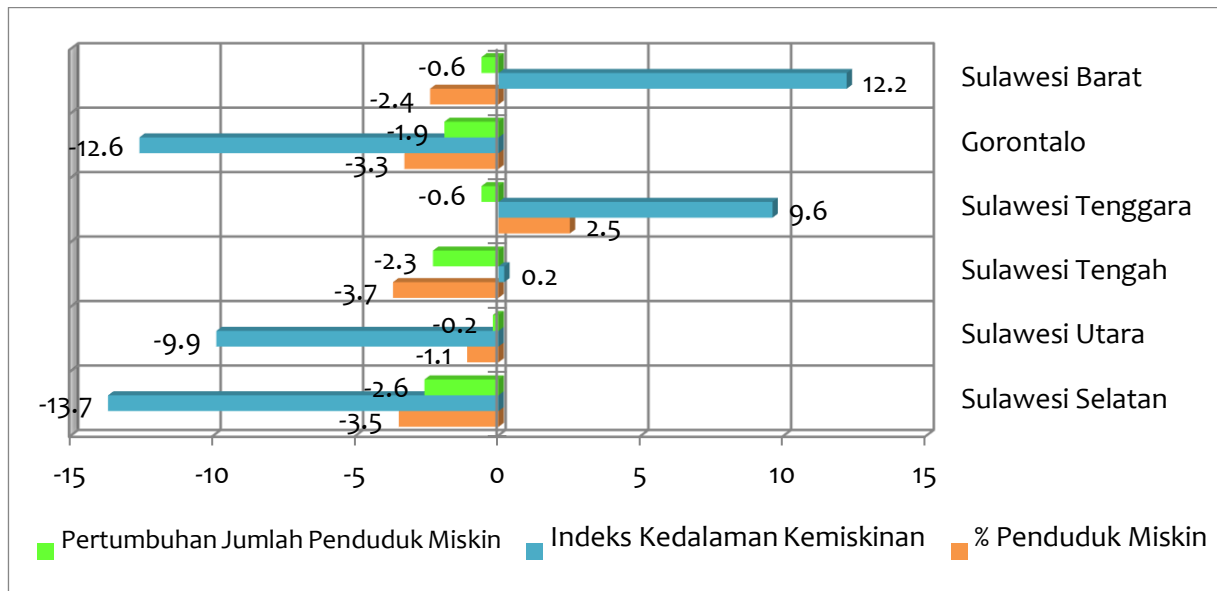
Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan						
Sulawesi Selatan	%	89,88	90,76	90,52	91,13	91,44
Nasional	%	88,87	89,3	89,88	90,34	90,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Perbandingan penduduk diatas garis kemiskinan Sulawesi Selatan dengan Nasional tersebut, menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan Nasional lebih baik daripada kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi, maka kinerja penurunan kemiskinan Sulawesi Selatan berada di bawah provinsi Sulawesi Utara. Kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan masih perlu lebih dioptimalkan.

Grafik II.10.

Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan cenderung mengalami kemajuan, dimana pada tahun 2015 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan sebesar 69,15 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 71,66 lebih rendah daripada Indeks Pembangunan Manusia Nasional yang hanya sebesar 71,39.

Memperhatikan capaian IPM Sulawesi Selatan tahun 2019, walaupun capaiannya masih di bawah Indeks Pembangunan Manusia Nasional, akan tetapi peningkatannya sebanyak 0.76 poin lebih besar daripada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Nasional sebesar 0,53 poin dan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yaitu sebesar 71,58. Apabila dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan regional wilayah Pulau Sulawesi, maka capaian Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan lebih besar dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia provinsi lain di Pulau Sulawesi namun masih lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia provinsi Sulawesi Utara sebesar 72,99.

Tabel II.27.

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lain di Pulau Sulawesi
Tahun 2015-2019**

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Sulawesi Selatan	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66
Provinsi Sulawesi Utara	70,39	71,05	71,66	72,20	72,99
Provinsi Sulawesi Tengah	66,76	67,47	68,11	68,88	69,50
Provinsi Sulawesi Tenggara	68,75	69,31	69,86	70,61	71,20
Provinsi Gorontalo	65,86	66,29	67,01	67,71	68,49
Provinsi Sulawesi Barat	62,96	63,60	64,30	65,10	65,73
Nasional	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menggambarkan bahwa Kota Makassar memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi yaitu sebesar 82,25 dan yang terendah adalah Kabupaten Jeneponto yang hanya sebesar 64. Sedangkan menurut kinerja peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, kabupaten yang tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Takalar dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1,32 persen dan terendah adalah kota Parepare sebesar 0,56 persen.

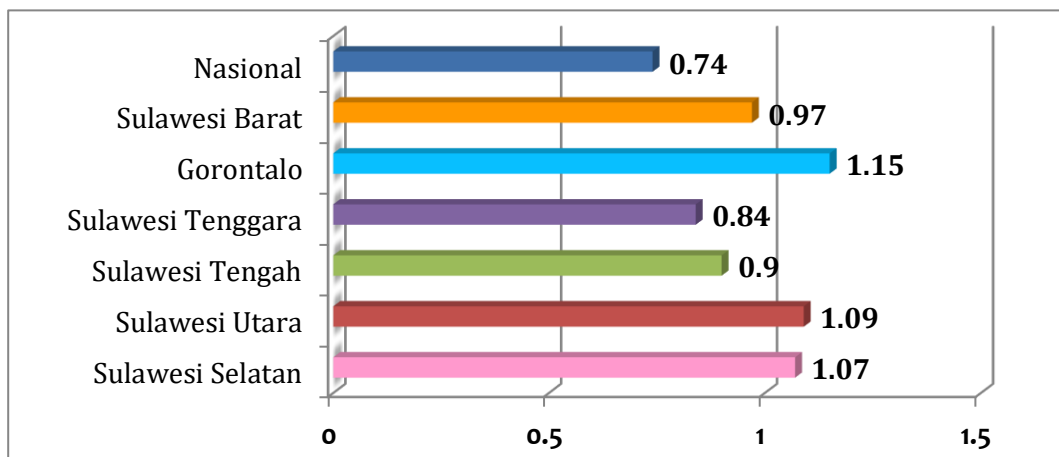
**Tabel II.28.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

No.	Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kep. Selayar	64,32	64,95	65,39	66,04	66,91
2	Bulukumba	65,58	66,46	67,08	67,70	68,28
3	Bantaeng	66,20	66,59	67,27	67,76	68,30
4	Jeneponto	61,61	61,81	62,67	63,33	64,00
5	Takalar	64,07	64,96	65,48	66,07	66,94
6	Gowa	66,87	67,70	68,33	68,87	69,66
7	Sinjai	64,48	65,36	65,80	66,24	67,05
8	Maros	67,13	67,76	68,42	68,94	69,50
9	Pangkep	66,65	66,86	67,25	67,71	68,29
10	Barru	68,64	69,07	69,56	70,05	70,60
11	Bone	63,11	63,86	64,16	65,04	65,67
12	Soppeng	65,33	65,95	66,67	67,60	68,26
13	Wajo	66,90	67,52	68,18	68,57	69,05
14	Sidrap	69,00	69,39	69,84	70,60	71,05
15	Pinrang	69,24	69,42	69,90	70,62	71,12
16	Enrekang	70,03	70,79	71,44	72,25	72,66
17	Luwu	68,11	68,71	69,02	69,60	70,39
18	Tana Toraja	65,75	66,25	66,82	67,66	68,25
19	Luwu Utara	67,44	67,81	68,35	68,79	69,46
20	Luwu Timur	70,43	70,95	71,46	72,16	72,80
21	Toraja Utara	66,76	67,49	67,90	68,49	69,23
22	Makassar	80,53	80,53	81,13	81,73	82,25
23	Pare-Pare	76,48	76,48	76,68	77,19	77,62
24	Palopo	76,45	76,45	76,71	77,30	77,98
Sulawesi Selatan		67,92	68,49	69,15	70,34	71,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Secara regional di Pulau Sulawesi, perubahan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan berada pada peringkat ketiga (1,07 persen) setelah Provinsi Gorontalo (1,15 persen) dan Provinsi Sulawesi Utara (1,09 persen).

**Grafik II.11.
Perbandingan Perubahan IPM Sulawesi Selatan, Nasional dengan
Provinsi di Pulau Sulawesi, Tahun 2019**



Sumber: BPS Provinsi Tahun 2015-2020

7. Angka Melek Huruf Penduduk yang Berusia >15 Tahun (Tidak Buta Aksara)

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis dapat dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). AMH juga merupakan salah satu indikator pencapaian SDGs, yang akan menjamin bahwa pada tahun 2030 semua remaja dan proporsi kelompok penduduk dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis, baik huruf latin dan atau huruf lainnya. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah. Tahun 2019 tercatat penduduk Sulawesi Selatan yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 92,45 persen. Capaian tersebut belum dapat memenuhi target RPJMD untuk tahun 2019 yaitu 91,23 persen. Dengan kata lain, kedepan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 7,55 persen.

Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program kejar paket A, paket B, dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia.

**Tabel II.29.
Melek Huruf Penduduk Yang Berusia >15 Tahun (Tidak Buta Aksara)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	91,78	91,52	90,44	91,81	92,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Tahun 2020

8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

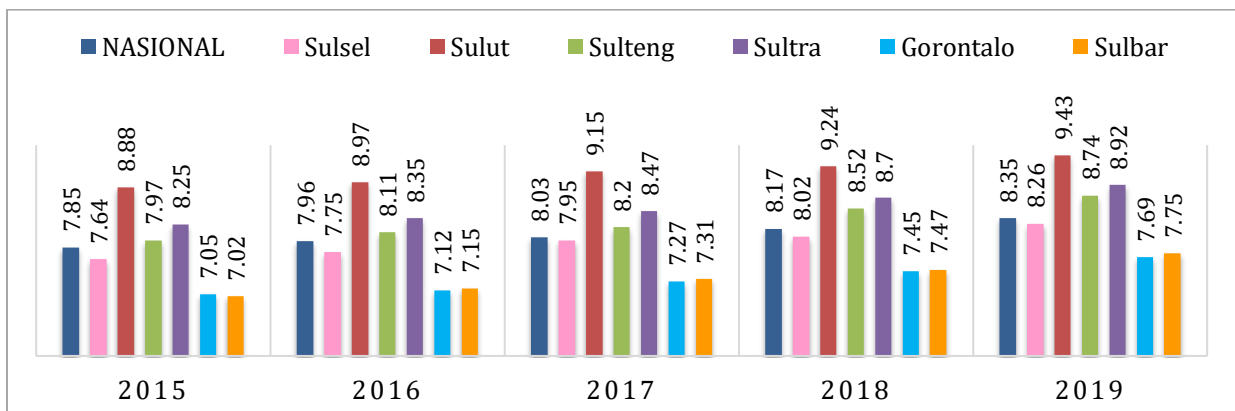
Selama periode tahun 2015 sampai tahun 2019, Rata-rata Lama Sekolah di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata Lama Sekolah tahun 2019 adalah 8,26 tahun yang menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Sulawesi Selatan secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,26 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas IX atau SMP kelas 3. Capaian

Rata-rata Lama Sekolah tersebut juga menunjukkan bahwa telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 8,16 tahun.

Memperhatikan capaian angka Rata-Rata Lama Sekolah di wilayah Pulau Sulawesi, maka diperoleh gambaran bahwa semua daerah di wilayah Pulau Sulawesi menunjukkan adanya tren peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Apabila dibandingkan Rata-rata Lama Sekolah di Sulawesi Selatan dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, maka pencapaian rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan masih belum optimal. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini yang menunjukkan bahwa angka Rata-Rata Lama Sekolah Sulawesi Selatan masih berada di bawah angka Rata-Rata Lama Sekolah Nasional dan hanya di atas angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat.

Grafik II.12.

Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019

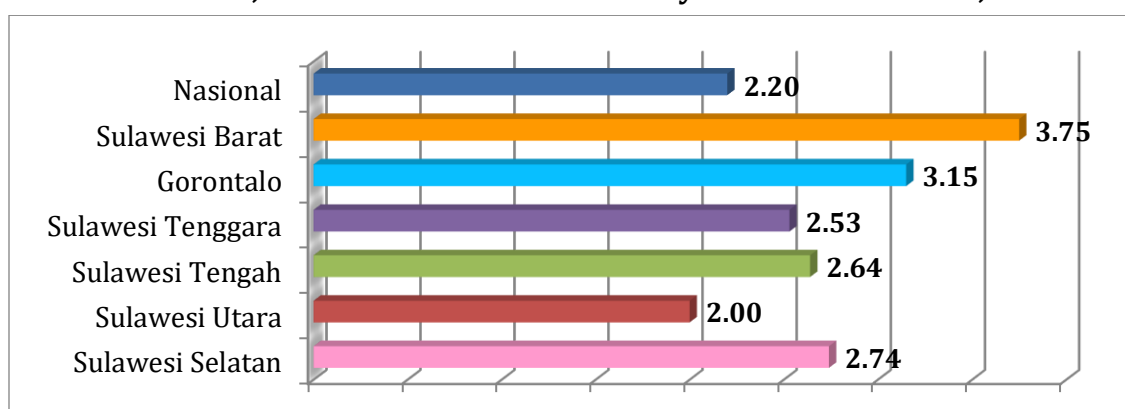


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi se Sulawesi, Tahun 2015-2020 (Data Diolah)

Akan tetapi berdasarkan laju perubahan angka Rata-Rata Lama Sekolah di wilayah Pulau Sulawesi, maka perubahan angka Rata-Rata Lama Sekolah Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan capaian nasional dan capaian provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, maka capaian perubahan angka Rata-Rata Lama Sekolah Sulawesi Selatan sebesar 2,74 persen lebih besar daripada angka perubahan Nasional dan di atas tiga provinsi lainnya yang perubahan angka Rata-Rata Lama Sekolahnya lebih kecil daripada Sulawesi Selatan.

Grafik II.13.

Perbandingan Perubahan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi se Sulawesi, Tahun 2015-2020 (Data Diolah)

9. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Secara umum kualitas kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan meningkat berdasarkan rata-rata angka harapan hidup yang semakin panjang.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Angka Harapan Hidup di Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, Angka Harapan Hidup di Sulawesi Selatan mencapai 69,80 tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 70,43 tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 70,07 tahun telah tercapai dan melampaui. Walaupun demikian, Angka Harapan Hidup di Sulawesi Selatan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 selalu berada di bawah rata-rata capaian Nasional, sebagaimana tabel dibawah.

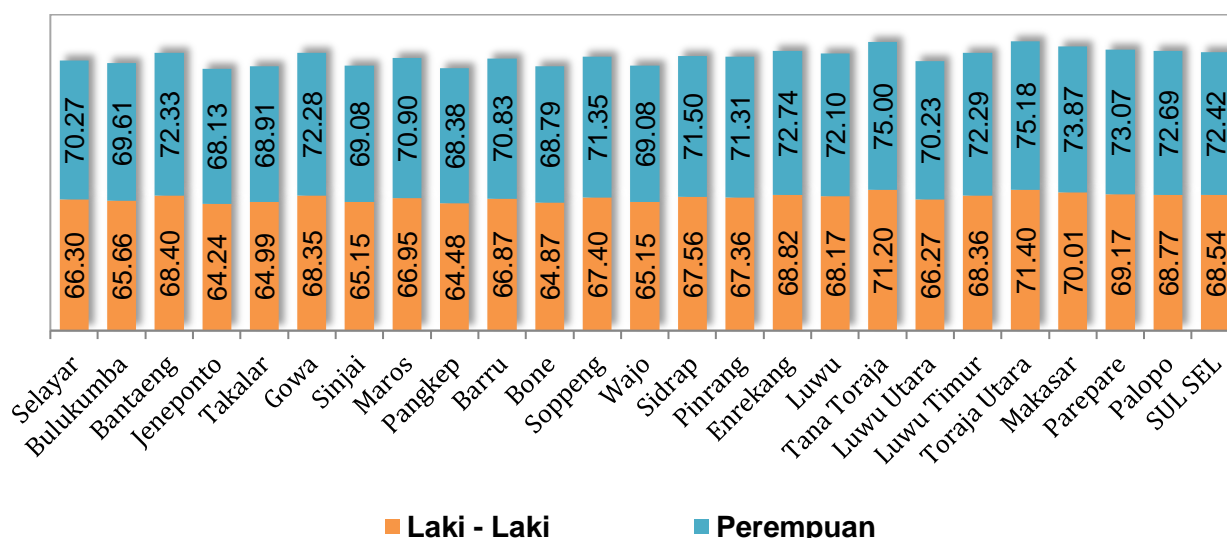
**Tabel II.30.
Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional,
Tahun 2015-2019**

Wilayah	Satuan	Angka Harapan Hidup				
		2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	Tahun	70.86	70.95	71.11	71.23	71.39
Sulawesi Selatan	Tahun	69.80	69.82	69.84	70.08	70.43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Angka Harapan Hidup di kabupaten/kota menurut jenis kelamin pada tahun 2019, secara umum menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup tertinggi berada pada jenis kelamin perempuan dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Jika di lihat data tersaji, dimana Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja memiliki Angka Harapan Hidup pada jenis kelamin perempuan lebih tinggi dari laki-laki dibanding kabupaten/kota lainnya se Sulawesi Selatan. Adapun Angka Harapan Hidup di Kabupaten Toraja Utara mencapai 75,18 tahun dan di Kabupaten Tana Toraja mencapai 75,00 tahun. Sedangkan Angka Harapan Hidup pada jenis kelamin laki-laki juga demikian berada di Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja yaitu 71,40 tahun dan 71,20 tahun. Capaian Angka Harapan Hidup tertinggi menurut jenis kelamin perempuan maupun laki-laki tersebut sudah berada diatas rata-rata capaian Provinsi. Sedangkan Angka Harapan Hidup terendah menurut jenis kelamin perempuan maupun laki-laki terdapat di Kabupaten Jeneponto, yaitu perempuan mencapai 68,13 tahun dan laki-laki mencapai 64,24 tahun dan berada dibawah capaian Provinsi.

**Grafik II.14.
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin di
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019**



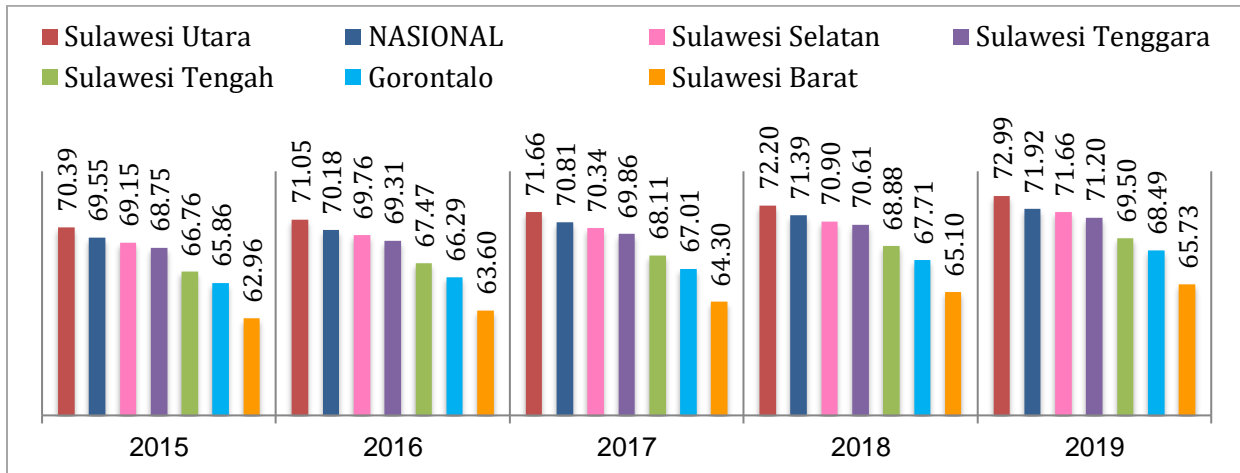
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Jika dibandingkan Angka Harapan Hidup secara kewilayahan di Pulau Sulawesi, maka dapat dijelaskan bahwa semua daerah di wilayah Pulau Sulawesi menunjukkan adanya tren peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Angka Harapan Hidup tertinggi dari tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan

Angka Harapan Hidup terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat. Sementara Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan masih berada dibawah Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional, sebagaimana grafik dibawah.

Grafik II.15.

Perbandingan Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019



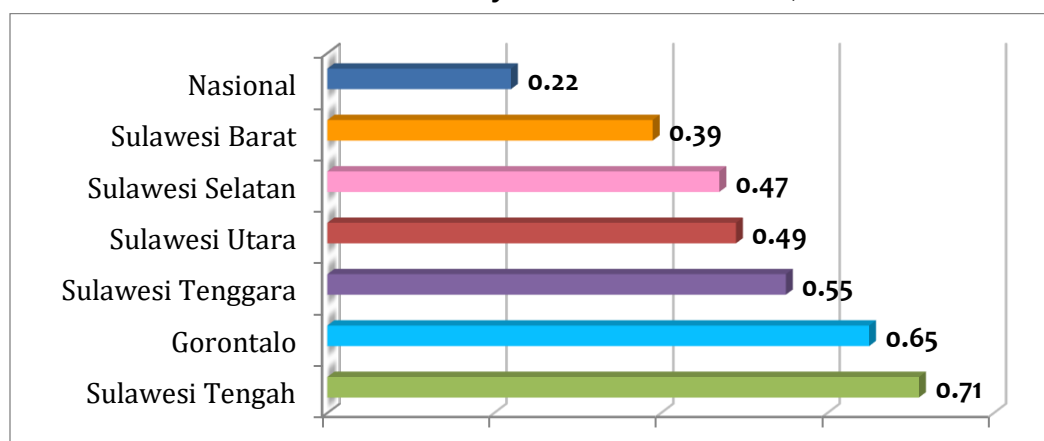
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Dari capaian tersebut diatas, maka dapat digambarkan perbandingan tingkat perubahan Angka Harapan Hidup provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lainnya di wilayah Pulau Sulawesi tahun 2019, yaitu tingkat perubahan Angka Harapan Hidup provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,71 persen, provinsi Gorontalo sebesar 0,65 persen, provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,55 persen, provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,49 persen, provinsi Sulawesi Selatan 0,47 persen, dan provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,39 persen. Dari enam provinsi tersebut, tingkat perubahan Angka Harapan Hidupnya berada diatas rata-rata Nasional, yang mana perubahan Angka Harapan Hidup Nasional hanya sebesar 0,22 persen.

Provinsi Sulawesi Selatan, walaupun tingkat perubahan Angka Harapan Hidupnya lebih rendah daripada 4 (empat) provinsi lainnya, namun capaian tersebut masih lebih baik daripada capaian nasional.

Grafik II.16.

Perbandingan Perubahan Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

10. Angka Harapan Lama Sekolah

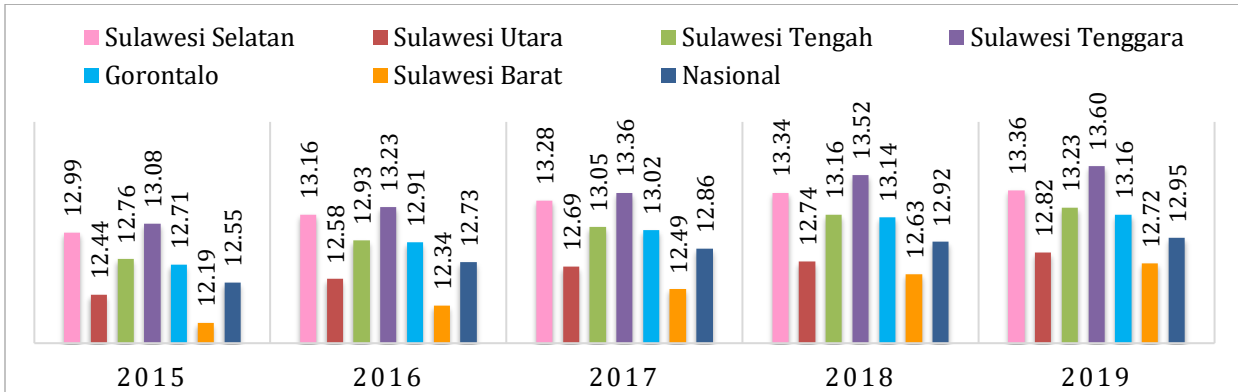
Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 0,91 persen. Pada tahun 2019 Angka Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Selatan mencapai 13,36 tahun. Ini berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun di Sulawesi Selatan memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga jenjang D1. Namun capaian Harapan Lama Sekolah tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 13,68 tahun.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Memperhatikan gambaran angka Harapan Lama Sekolah di wilayah Pulau Sulawesi, maka angka Harapan Lama Sekolah Sulawesi Selatan menunjukkan capaian yang menggembirakan yaitu di atas angka Harapan Lama Sekolah Nasional tertinggi kedua setelah angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 13,60 tahun.

Grafik II.17.

Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019

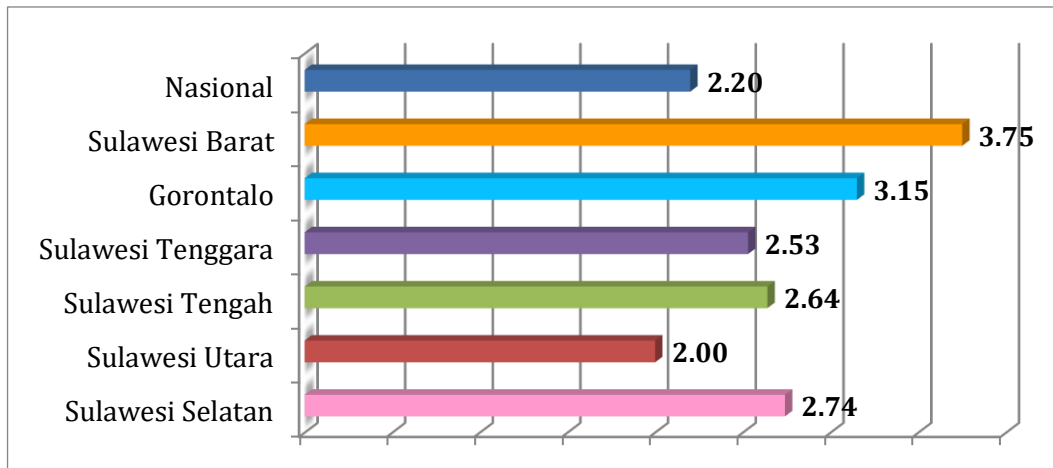


Sumber: BPS Provinsi se Sulawesi, Tahun 2015-2020 (diolah)

Jika dilihat dari tingkat perubahan angka Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Selatan, maka capaian angka Harapan Lama Sekolah Sulawesi Selatan tidak berjalan seiring dengan tingkat perubahannya yang hanya mencapai 0,15 persen. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih optimal guna mempercepat laju peningkatan angka Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Selatan.

Grafik II.18.

Tingkat Perubahan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi se Sulawesi, Tahun 2015-2020 (diolah)

11. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per Kapita merupakan salah satu komponen penilaian Indeks Pembangunan Manusia, untuk mengukur standar hidup layak. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita masyarakat di Sulawesi Selatan sebesar Rp. 11.118 juta per tahun dan masih berada di bawah rata-rata pengeluaran per kapita Nasional yaitu sebesar Rp. 11.299 juta per tahun.

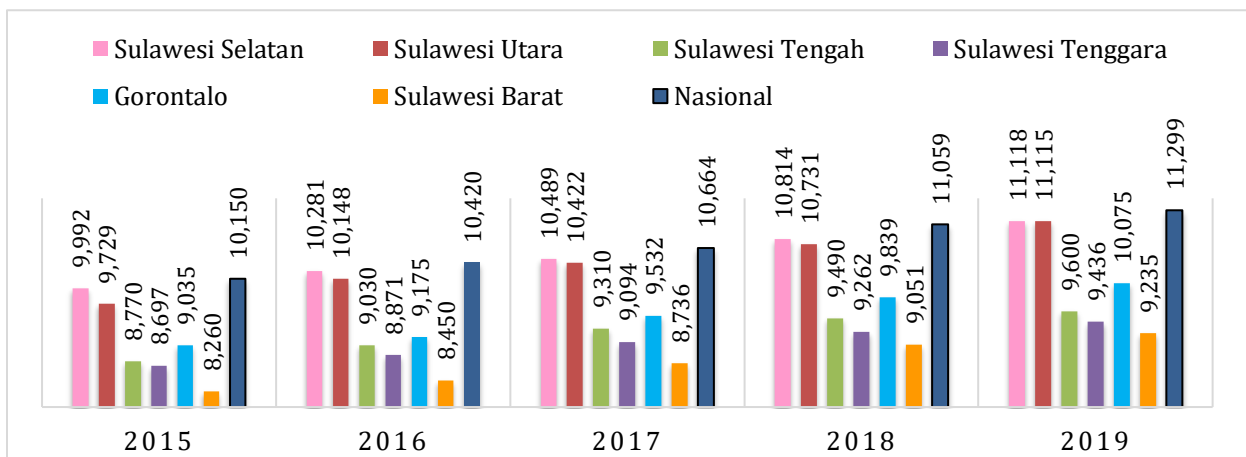
**Tabel II.31.
Pengeluaran Per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional,
Tahun 2015-2019 (Juta Rp.)**

Wilayah	Satuan	Pengeluaran Per kapita				
		2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	Rp.	10,150	10,420	10,664	11,059	11,299
Sulawesi Selatan	Rp.	9,992	10,281	10,489	10,814	11,118

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020.

Jika dibandingkan pengeluaran per kapita provinsi di Pulau Sulawesi, maka provinsi yang pengeluaran per kapita terbesar adalah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Rp. 11.118 juta per tahun dan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 11.115 juta per tahun, namun masih berada di bawah rata-rata Nasional yaitu Rp. 11.299 juta per tahun.

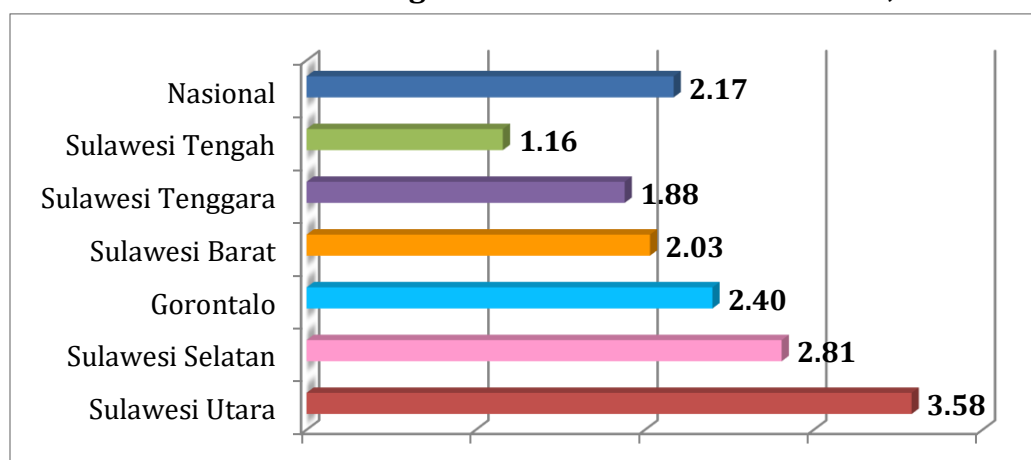
**Grafik II.19.
Pengeluaran Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Lainnya
di Pulau Sulawesi dan Nasional Tahun 2015-2019 (Juta Rp.)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi se Sulawesi, Tahun 2020

Sementara dari sisi pertumbuhan pengeluaran per kapita provinsi di Pulau Sulawesi, dapat digambarkan bahwa provinsi yang pertumbuhan pengeluaran per kapita-nya tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,58 persen, menyusul Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,81 persen, kemudian Provinsi Gorontalo sebesar 2,40 persen, dan ketiganya berada di atas pertumbuhan pengeluaran per kapita Nasional yang hanya bertumbuh sebesar 2,17 persen.

**Grafik II.20.
Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional dan Pulau Sulawesi, Tahun 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi se Sulawesi, Tahun 2015-2020

12. Presentase Balita Gizi Buruk

Berdasarkan data cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015–2019 menunjukkan bahwa balita gizi buruk rata-rata mendapatkan perawatan 100 persen, baik dari sisi yang mendapatkan perawatan di Sarana Pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu maupun yang di temukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama, namun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir data balita gizi buruk mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 mencapai 184 balita menjadi 138 balita pada tahun 2017. Bila melihat kondisi balita gizi buruk pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 369 balita dan terus bertambah menjadi 446 balita pada tahun 2019 sebagai mana pada tabel berikut dibawa ini.

**Tabel II.32.
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 - 2019**

No.	Bidang/ Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Balita Gizi buruk mendapat perawatan di Sarana Pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita	184	156	138	369	446
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang di temukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Balita	184	156	138	369	446
3	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

13. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Berdasarkan data tabel dibawah ini pada tahun 2015, Proporsi Prevalensi Balita Gizi kurang di Sulawesi Selatan mencapai 17,1 persen, dan pada tahun 2019 menjadi 15,3 persen.

**Tabel II.33.
Prevalensi Balita Gizi kurang
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	17,1	20,2	17,59	18,4	15,3

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2019 sebanyak 6.407.285 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang tergolong angkatan kerja mencapai 4.030.400 orang, naik 42.371 orang dibanding Agustus 2018. Angkatan

kerja terdiri dari penduduk bekerja 3.830.096 orang dan pengangguran 200.304 orang. Dibandingkan Agustus 2018, jumlah penduduk bekerja bertambah 55.172 orang, sedangkan pengangguran berkurang sebanyak 12.801 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2019 sebesar 62,90 persen. Indikator ini lebih rendah 0,11 persen poin dibanding TPAK Agustus 2018. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang menurun.

**Tabel II.34.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja	Orang	3.706.128	3.881.003	3.812.358	3.988.029	4.030.400
Bekerja	Orang	3.485.492	3.694.712	3.598.666	3.774.924	3.830.096
Pengangguran	Orang	220.636	186.291	213.695	213.105	200.304
Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.375.747	2.349.137	2.439.019	2.340.550	2.376.885
Penduduk Usia Kerja	Orang	6.081.875	6.124.063	6.251.377	6.328.579	6.407.285
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,94	62,92	60,98	63,02	62,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

15. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dibanding angkatan kerja merupakan salah satu acuan bagi pemerintah untuk memperkirakan pembukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengangguran terbuka memiliki implikasi sosial yang luas, karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019 sebesar 4,97 persen dengan total jumlah pengangguran sebanyak 200.304 orang. Pada Agustus 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan sebesar 4,97 persen, mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2018 yang besarnya 5,34 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam RPJMD yang sebesar 5,17 persen telah tercapai atau melampaui target.

**Tabel II.35.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan
dengan Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019**

Wilayah	Satuan	Tingkat Pengangguran Terbuka				
		2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	%	6,18	5,61	5,50	5,34	5,28
Sulawesi Utara	%	9,03	6,18	7,18	6,86	6,25
Sulawesi Tengah	%	4,10	3,29	3,81	3,43	3,15
Sulawesi Tenggara	%	5,55	2,72	3,30	3,26	3,59
Gorontalo	%	4,65	2,76	4,28	4,03	4,06

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Wilayah	Satuan	Tingkat Pengangguran Terbuka				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Barat	%	3,35	3,33	3,21	3,16	3,18
Sulawesi Selatan	%	5,95	4,80	5,34	5,42	4,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi se Sulawesi, Tahun 2015-2020

Pada skala regional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi se Sulawesi tahun 2019 dapat digambarkan bahwa dari 6 (enam) provinsi di Pulau Sulawesi, terdapat 3 (tiga) provinsi yang Tingkat Pengangguran Terbukanya mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu Provinsi Sulawesi Utara dari 6,86 persen turun menjadi 6,25 persen, disusul oleh Provinsi Sulawesi Selatan dari 5,42 persen turun menjadi 4,97 persen, kemudian Provinsi Sulawesi Tengah dari 3,43 persen turun menjadi 3,15 persen. Sedangkan 3 (tiga) provinsi lainnya yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan Tingkat Pengangguran Terbukanya dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sementara Provinsi yang Tingkat Pengangguran Terbukanya berada diatas rata-rata Nasional adalah Sulawesi Utara.

Tabel II.36.

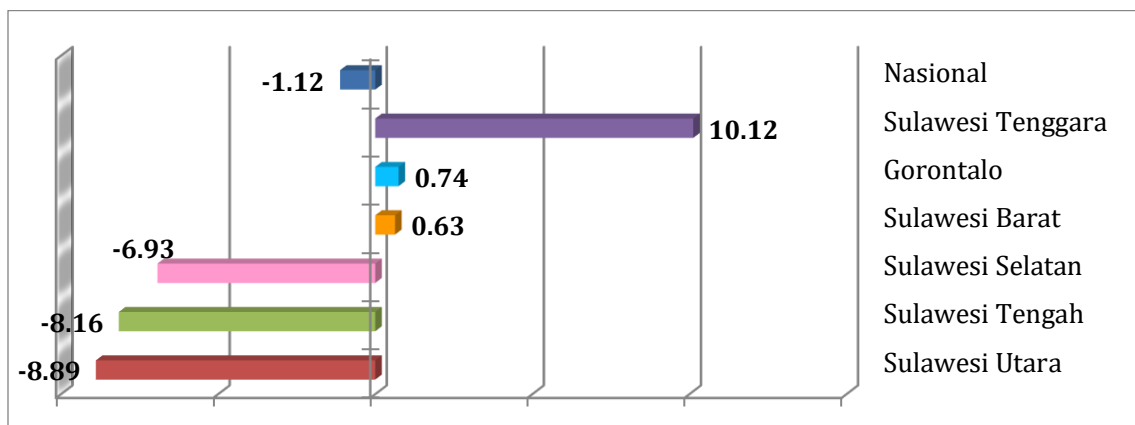
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi, Tahun 2015-2019

Wilayah	Satuan	Tingkat Pengangguran Terbuka				
		2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	%	6,18	5,61	5,50	5,34	5,28
Sulawesi Utara	%	9,03	6,18	7,18	6,86	6,25
Sulawesi Tengah	%	4,10	3,29	3,81	3,43	3,15
Sulawesi Tenggara	%	5,55	2,72	3,30	3,26	3,59
Gorontalo	%	4,65	2,76	4,28	4,03	4,06
Sulawesi Barat	%	3,35	3,33	3,21	3,16	3,18
Sulawesi Selatan	%	5,95	4,80	5,34	5,42	4,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi se Sulawesi, Tahun 2015-2020

Sementara perbandingan perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi se Sulawesi tahun 2019 dapat digambarkan bahwa dari 6 (enam) provinsi di Pulau Sulawesi, terdapat 3 (tiga) provinsi yang perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka bergerak ke angka positif seiring dengan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan 3 (tiga) provinsi lainnya yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Provinsi Sulawesi Tengah perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka bergerak ke angka negatif. Provinsi yang Perubahan Tingkat Pengangguran Terbukanya bergerak ke angka positif, menunjukkan bahwa penduduk usia kerja masih banyak yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja.

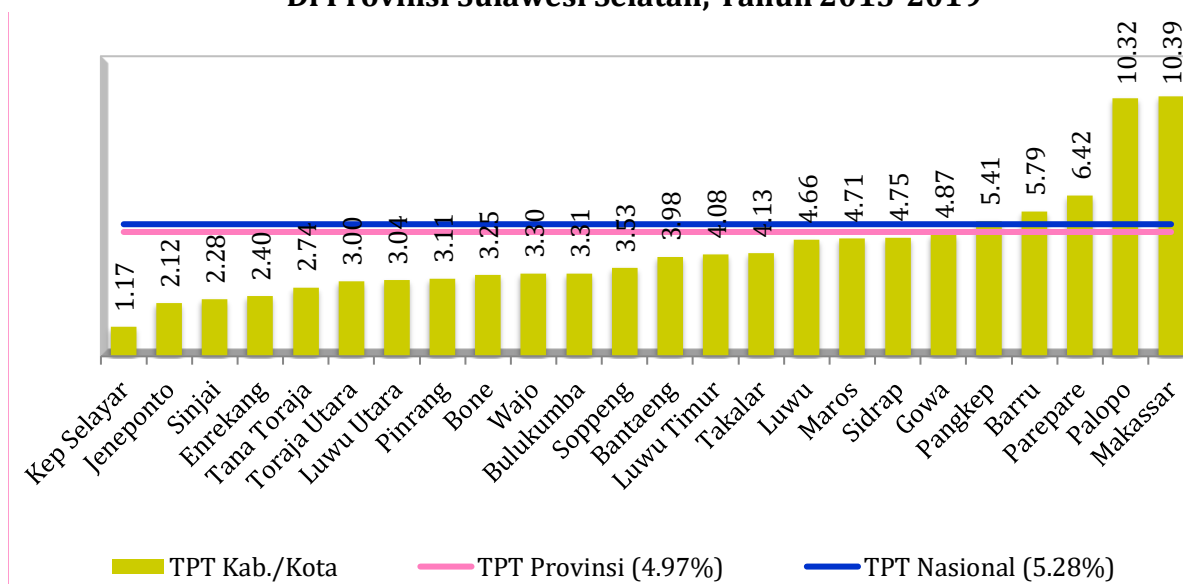
Grafik II.21.
Perbandingan Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi,
Tahun 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi se Sulawesi, Tahun 2015-2020 (Data Diolah)

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dapat digambarkan bahwa dari 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota, terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang angka Tingkat Pengangguran Terbukanya berada diatas rata-rata Provinsi dan Nasional yaitu Kota Makassar dengan Tingkat Pengangguran Terbuka 10,39 persen, disusul Kota Palopo dengan TPT 10,32 persen, dan Kota Parepare 6,42 persen, kemudian Kabupaten Barru 5,97 persen dan Kabupaten Pangkep 5,41 persen. Sementara 19 kabupaten lainnya masih memiliki angka Tingkat Pengangguran Terbuka dibawah rata-rata Provinsi dan Nasional.

Grafik II.22.
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

16. Rasio Penduduk yang Bekerja

Salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah tentunya dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Di Sulawesi Selatan, jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2019 sebesar 3.830.096 orang, meningkat dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar 3.774.924 orang. Sedangkan jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 juga meningkat sebesar 4.030.400 orang dibanding tahun 2018 yang mencapai 3.988.029 orang. Adapun rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 adalah 0,9 persen.

**Tabel II.37.
Rasio penduduk yang bekerja
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk yang bekerja	Orang	3,485,492	3,694,712	3,598,663	3,774,924	3,830,096
Jumlah angkatan kerja	Orang	3,706,128	3,881,003	3,812,358	3,988,029	4,030,400
Rasio penduduk yang bekerja	%	0.94	0.95	0.94	0.95	0.95

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

17. Laju Pertumbuhan PDRB/PDB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDRB/PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB/PDB per kapita per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB/PDB yang digunakan adalah PDRB/PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja. Tahun 2017 laju pertumbuhan PDRB/PDB per tenaga kerja berada pada angka 10,09 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 2,06 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 5,38 persen.

**Tabel II.38.
Laju Pertumbuhan PDRB dan PDB Per Tenaga Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019**

Wilayah	Satuan	Laju Pertumbuhan PDRB/ PDB Per Tenaga Kerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Selatan	%	8,46	1,34	10,09	2,06	5,38
Nasional	%	4,62	1,83	10,09	2,06	5,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

18. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Untuk melihat proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019 berpluktuasi dimana pada tahun 2015 mencapai 0.369, dan pada tahun 2016 menurun menjadi 0.356. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 0.373 dan pada tahun 2018 menurun menjadi 0.365, dan hingga tahun 2019 meningkat lagi menjadi 0.369 bahwa sebagaimana pada tabel berikut di bawah ini.

**Tabel II.39.
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan
Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Berusaha Sendiri	Orang	624,330	627,171	771,130	780,326	849,305
Pekerja Bebas Keluarga	Orang	660,366	689,929	569,877	598,725	562,304
Jumlah	Orang	1,284,696	1,317,100	1,341,007	1,379,051	1,411,609
Kesempatan Kerja	Orang	3,485,492	3,694,712	3,598,663	3,774,924	3,830,096
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	%	0.369	0.356	0.373	0.365	0.369

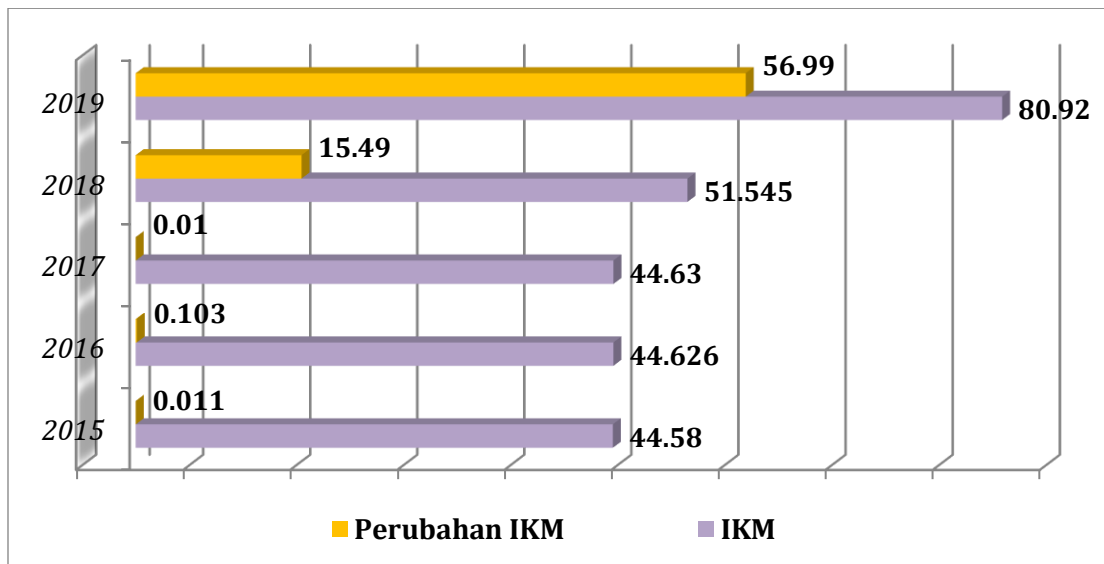
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

19. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan yaitu berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik yang dinilai pada 10 (sepuluh) unsur pelayanan. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pelayanan publik pada 9 (sembilan) unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Universitas Hasanuddin yang memperoleh nilai sebesar 80,92 pada tahun 2019 yang termasuk dalam kategori B.

Grafik II.23.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Perubahan Nilai Indeks IKM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



Sumber: PPID Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Sementara perubahan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digambarkan bahwa pada tahun 2018 terjadi perubahan nilai dari tahun sebelumnya, yaitu 15,49 poin seiring dengan meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Kemudian perubahan nilai ini meningkat lagi pada tahun 2019 sebesar 56,99.

20. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pada tahun 2015, persentase PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 53,56 persen sedikit mengalami penurunan dibanding dengan capaian sebelumnya yaitu sebesar 55,04 persen pada tahun 2014, hal ini disebabkan oleh kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah yang tidak seagresif tahun 2014. Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah kembali mengalami penurunan sampai pada tahun 2017 hal ini disebabkan karena dampak penyerahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah atas kepada Pemerintah Provinsi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disamping itu Gaji guru SMA/SMK dialokasikan pada DAU Pemerintah Provinsi mulai tahun anggaran 2017 yang mengakibatkan persentase Dana Transfer terhadap total Pendapatan Daerah kembali naik sehingga persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah hanya sebesar 40,62 persen. Namun demikian Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 42,00 persen.

**Tabel II.40.
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	53,56	48,16	40,62	42,67	42,00

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

21. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pertanian

Keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan tercermin dari makin beragam dan berimbangya pola konsumsi pangan penduduk yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Peningkatan skor PPH dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi, hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) belum sesuai dengan yang diharapkan, karena masih didominasi oleh unsur karbohidrat khususnya beras, sedangkan unsur sayur dan mineral lainnya masih sangat kurang. Untuk mencapai nilai ideal 100 persen, diperlukan kerjasama lintas sektor terutama dalam mengembangkan pangan pangan lokal dan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras.

**Tabel II.41.
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pertanian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Skor Pola Pangan Harapan	%	81,30	79,90	92,60	82,60	83,40

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Tahun 2020

22. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, tetapi hanya sebagian kecil dari sumber daya hutan yang berkontribusi secara riil terhadap penerimaan negara dan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pencapaian Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ketahun mengalami penurunan, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 0,08 persen dan tahun 2019 menurun menjadi 0,06 persen. Kecilnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB disebabkan karena kayu sudah semakin habis.

**Tabel II.42.
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

23. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Perkembangan pembangunan pertambangan di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari jumlah investasi sektor pertambangan, dimana jumlah izin usaha pertambangan mengalami peningkatan. Namun dengan berlakunya kebijakan pemerintah terhadap Peningkatan Nilai Tambah (PNT) yang memaksa perusahaan-perusahaan tambang untuk meningkatkan kadar pada batasan tertentu sebelum diizinkan untuk dijual ke luar negeri.

Kebijakan pemerintah inilah yang menyebabkan menurunnya nilai ekspor komoditas logam sehingga berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada sektor pertambangan. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 6,32 persen dan tahun 2019 hanya sebesar 4,62 persen. Salah satu sumber produksi pertambangan terbesar di Sulawesi Selatan adalah pertambangan Bijih Nikel yang terletak di Soroako Kabupaten Luwu Timur.

**Tabel II.43.
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	6,32	5,19	4,91	4,80	4,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2020

24. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2015-2019, mengalami peningkatan setiap tahun, dimana pada tahun 2015 sektor pariwisata memberi kontribusi sebesar 2,62 persen dan pada tahun 2019 memberi kontribusi sebesar 2,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan meningkat setiap tahun, walaupun demikian upaya-upaya pemerintah provinsi dalam mempromosikan objek wisata perlu di tingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Disamping itu, peningkatan infrastruktur wilayah juga perlu lebih ditingkatkan agar dapat memberi kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan.

**Tabel II.44.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata	Trilyun Rupiah	8.915.115,59	9.947.505,61	11.278.227,75	13.041.097,50	14.400.460,57
PDRB	Trilyun Rupiah	340.390.214,27	377.108.906,54	415.588.200,98	461.719.487,85	504.746.873,15
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,62	2,64	2,71	2,82	2,85

Sumber: BPS Prov. Sulsel, Tahun 2015-2020

25. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang signifikan, dimana kontribusi pada tahun 2015 sebesar 8,10 persen dan pada tahun 2019 mencapai 8,42 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi perikanan tangkap, yaitu udang windu, vannamei, udang putih, dan pengembangan budidaya rumput laut.

**Tabel II.45.
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	8,10	8,14	8,33	8,40	8,42

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

26. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,60 persen selama 5 tahun terakhir. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 9,15 persen terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019, kontribusi ini mencapai 74,70 triliun rupiah atau sekitar 14,80 persen, atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang hanya memberi kontribusi 13,02 persen terhadap total PDRB.

**Tabel II.46.
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	12,86	13,39	13,94	13,02	14,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

27. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi industri yang sangat besar dengan bahan baku yang tersedia. Ada 6 (enam) sektor industri unggulan yang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya pengolahan kopi, kakao/coklat, kain sutera, markisa dan pengolahan hutan. Alasan pengembangan sektor industri pengolahan, karena mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi dan sekaligus membuka lapangan kerja yang luas.

Kontribusi industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pun menurun dari 13,61 persen pada tahun 2018 menjadi 13,16 persen pada tahun 2019. Untuk mendorong industrialisasi di Sulawesi Selatan, pemerintah membangun beberapa kawasan industri antara lain; di Kabupaten Takalar untuk pengelolaan logam dan kilang minyak yang sudah disiapkan lahan seluas 750 hektar; Kawasan Industri Bantaeng yang fokus pada industri smelter ferronikel berupa stainless steel. Meskipun nilai kontribusi mengalami fluktuasi mulai tahun 2015 hingga 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,66 persen, namun kontribusi sektor industri menempati urutan kedua terbesar berdasarkan lapangan usaha.

**Tabel II.47.
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	13,88	13,97	13,71	13,61	13,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

28. PDRB (Adhk) Kawasan (Luwu Utara, Selayar, Bone)

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Target PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone) Tahun 2019 sebesar 33.110.348,45 juta rupiah dan dapat direalisasikan sebesar 34.013.980,00 juta rupiah atau telah melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian target yang melebihi tersebut di dukung oleh pelaksanaan beberapa program prioritas Gubernur antara lain Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Program Hilirisasi Pertanian, Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Kelautan serta Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Pembinaan Kelompok UKM bagi Masyarakat Miskin, Program Pengembangan Usaha dan Promosi Produk UMKM, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

29. Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, dan Pengadaan Air

Pada sektor Transportasi dan Pergudangan terdapat 6 (enam) sub sektor, namun hanya 5 (lima) sektor yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Angkutan Darat; Angkutan Laut; Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan; Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir Lapangan Usaha Angkutan Udara. Kontribusi sektor ini mencapai 21,34 triliun rupiah atau sekitar 4,23 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Moda Angkutan Udara memberikan kontribusi terbesar, disusul oleh Angkutan Darat serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir, dengan kontribusi masing-masing sebesar 41,73 persen, 35,61 persen dan 14,21 persen pada tahun 2019. Sedangkan untuk Angkutan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan hanya berkontribusi sebesar 5,65 persen dan 2,79 persen.

Laju pertumbuhan sektor ini juga mengalami peningkatan dari 6,82 persen pada tahun 2015 hingga menjadi 10,32 persen di tahun 2018. Ditahun 2019, kategori ini mengalami perlambatan, disebabkan karena adanya kenaikan harga tiket yang membuat minat masyarakat untuk menggunakan angkutan udara turun signifikan.

Sementara sub sektor pengadaan air mencakup pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan sektor ini terhadap perekonomian di Sulawesi Selatan selama tahun 2019 relatif kecil, hanya 476,36 miliar rupiah atau sebesar 0,09 persen dengan pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 1,73 persen.

Pada tahun 2019, kontribusi sektor konstruksi mencapai 71,56 triliun rupiah atau sebesar 14,18 persen terhadap total perekonomian Sulawesi Selatan dan menduduki peringkat ketiga. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2015 dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,31 persen per tahun. Adanya sejumlah pembangunan yang dilakukan di Sulawesi Selatan diantaranya Pembangunan Jalan Layang Pettarani, RSD di Jeneponto, perluasan Bandara Sultan Hasanuddin, pembangunan beberapa perumahan di Makassar serta tempat wisata di beberapa kabupaten seperti Sidrap dan Pangkep secara signifikan mendorong pertumbuhan untuk sektor Konstruksi. Selain itu, permintaan yang tinggi akan property juga mendorong peningkatan kontribusi sektor Konstruksi.

Kontribusi sektor konstruksi relatif mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu 14,18 persen dari tahun 2015 hanya sebesar 12,39 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan sector konstruksi di Sulawesi Selatan relatif stabil di kisaran 8 persen yaitu dari 8,32 persen pada tahun 2015 menjadi 8,92 persen pada tahun 2019.

Secara keseluruhan, Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air pada tahun 2019 mencapai 7,18 Persen. Target

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air pada tahun yang sama sebesar 7,60 Persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel II.48.

Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air (%) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air (%)	7,90	7,18	8,65	8,94	7,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

30. Indeks Aksesibilitas Infrastruktur

Indeks Aksesibilitas Infrastruktur pada tahun 2019 mencapai 63,07 persen, dan target RPJMD sebesar 56 persen, ini berarti bahwa capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut adalah melaksanakan beberapa Program Pembangunan Infrastruktur antara lain; Program Pembangunan Preservasi Jalan dan Kebijakan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah kabupaten/kota untuk Pembangunan Wilayah Terisolir, yaitu “Pembangunan Infrastruktur SEKO Kabupaten Luwu Utara”.

Pembangunan infrastruktur jalan menuju SEKO, dapat mendukung konektivitas dan membuka jalur terisolir di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi selatan, bahkan jalur ini dirancang berbentuk segi tiga emas di Kecamatan Seko untuk meningkatkan perekonomian di wilayah terpencil.

31. Penguatan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; dan (3) pengelolaan cadangan pangan. Hal yang perlu diperhatikan adalah agar ketersediaan pangan pokok kita dapat memenuhi kebutuhan pangan dari produksi sendiri, bahkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di provinsi lain. Indikator ketersediaan pangan meliputi ketersediaan pangan utama (beras, jagung dan kedelai).

Pada tabel di bawah, menunjukkan bahwa rata-rata ketersediaan pangan utama beras sekitar 372,34 persen, selama kurun waktu lima tahun terakhir artinya tersedia 3 kali lipat dibanding kebutuhan konsumsi Penduduk Sulawesi Selatan, sedangkan jagung sekitar 37,89 persen dan kedelai sekitar 23,13 persen dari kebutuhan penduduk Sulawesi Selatan. Sedangkan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (CPPP) setara beras sampai dengan tahun 2019 sebanyak 140 ton.

Tabel II.49.

**Penguatan Cadangan Pangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan pangan utama (%) :						
- Beras	%	352,00	373,67	384,00	388,24	363,78
- Jagung	%	24,33	34,02	38,89	44,33	47,88
- Kedelai	%	23,56	23,71	20,88	22,55	24,96

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Tahun 2020

32. Rata-rata Nilai Indeks Pembangunan Desa

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan salah satu indikator dalam prioritas Nasional dalam rangka mengurangi desa tertinggal yang ada di Indonesia, dimana output dari Penyusunan IPD ini adalah terpetakannya desa-desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IPD ke dalam 3 (Tiga) Klasifikasi yaitu; Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal .

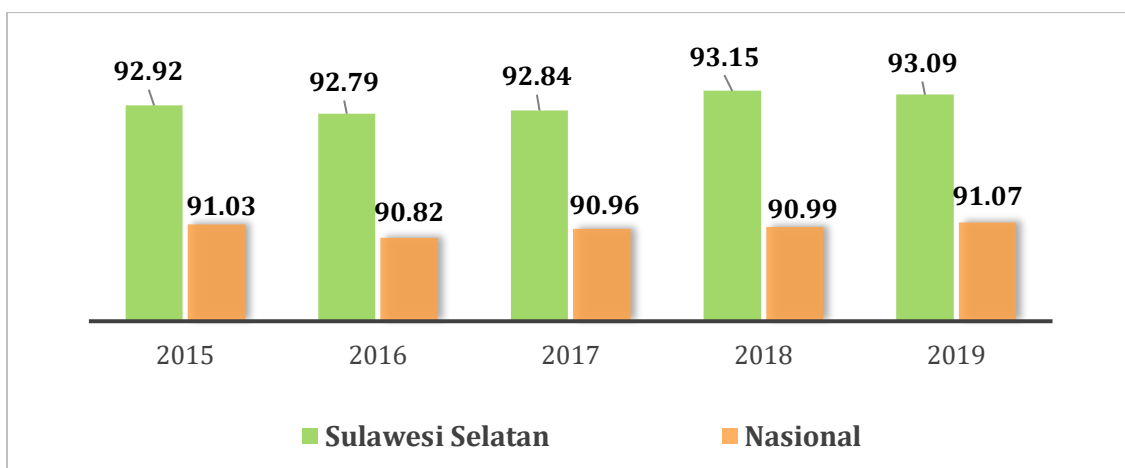
Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Sulawesi Selatan tahun 2018 sebesar 63,57, lebih tinggi dari angka rata-rata Indeks Perkembangan Desa secara Nasional, yaitu 59,36. Dengan jumlah desa di Sulawesi Selatan sebanyak 2.255 desa, 390 desa (17,29 persen) diantaranya dalam kategori desa tertinggal, dan sebanyak 1.490 desa (66,08 persen) dalam kategori desa berkembang, kemudian desa mandiri sebanyak 25 desa (1,11 persen). Sementara sisanya 350 desa (15,52 persen) dalam kategori maju dan sangat tertinggal. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 wilayah administrasi tingkat III yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Adapun unit analisis penghitungan IPD mencakup 2.255 desa atau setingkat desa dari 21 Kabupaten yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan dengan karakteristik masing-masing.

33. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 indeks pembangunan gender mencapai 93,15 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 93,09. Walaupun mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Gender Nasional, maka Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Selatan masih diatas angka Nasional.

Grafik II.24.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan
Dan Nasional Menurut jenis Kelamin, Tahun 2015-2019

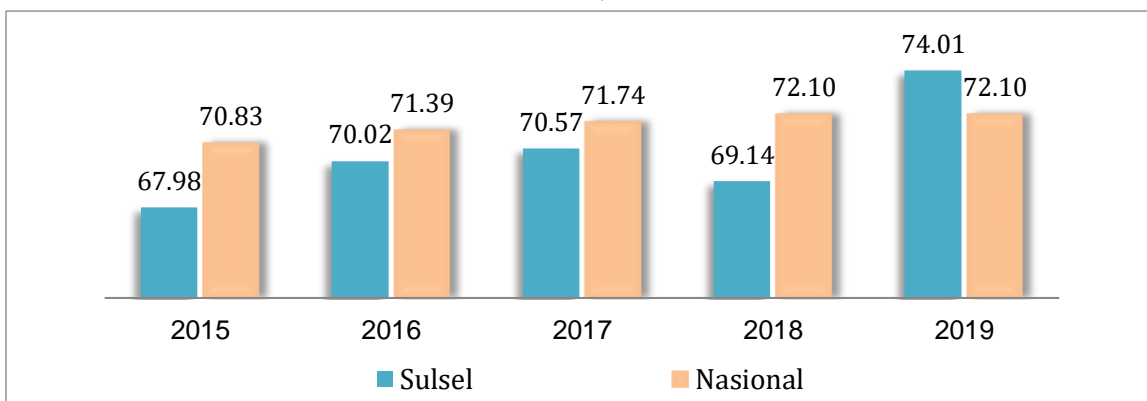


Sumber: bps.go.id

Berdasarkan indikator komposit pembentuk dari Indeks Pembangunan Gender, ternyata Angka Harapan Hidup laki-laki jauh lebih rendah dibandingkan perempuan. Demikian juga di tingkat nasional. kondisi ini terjadi baik pada tahun 2015 maupun tahun 2019. Untuk melihat peran aktif perempuan dibidang politik dan ekonomi, maka dapat diketahui dari angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Sementara capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulawesi Selatan selama periode tahun 2015 sampai tahun 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2015 Indeks Pemberdayaan Gender mencapai angka 67,98 atau lebih rendah dari Indeks Pemberdayaan Gender Nasional yang mencapai angka 70,83. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan, tetapi masih dibawah angka Indeks Pemberdayaan Gender Nasional. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan bahkan lebih tinggi dari nasional yaitu 74,01, sedangkan Nasional hanya 72,10.

**Grafik II.25.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Sulawesi Selatan Menurut jenis Kelamin, Tahun 2015-2019**



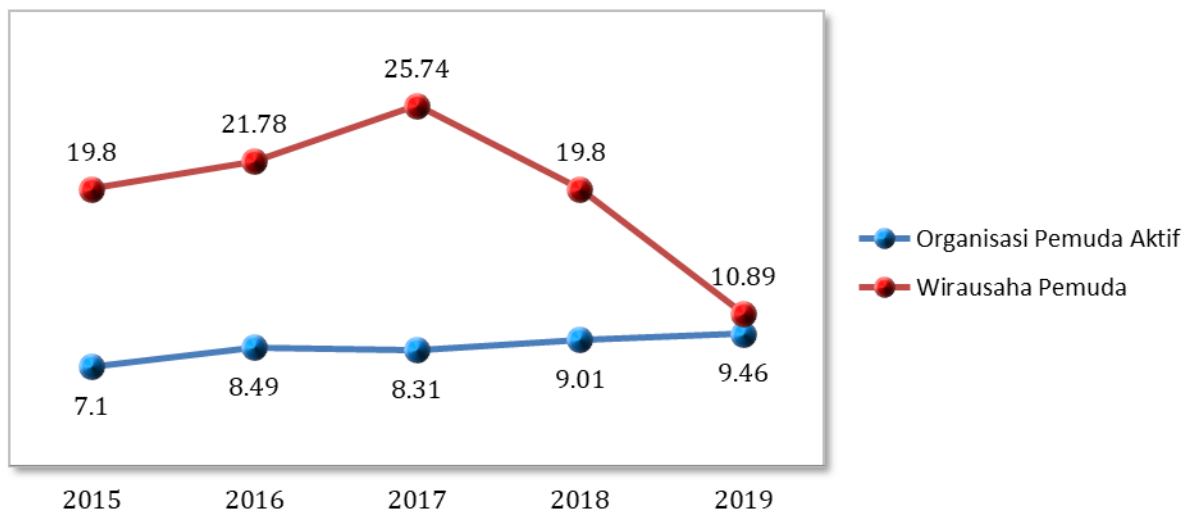
Sumber: bps.go.id dan Rancangan RKP 2021

2.2.2 Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga berperan penting terhadap peningkatan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia. Pemuda sebagai generasi penerus, penanggungjawab dan pelaku pembangunan bangsa di masa depan dapat menentukan keberhasilan pemanfaatan peluang bonus demografi. Olahraga sebagai sarana peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat berperan penting dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa, serta peningkatan daya saing dan prestasi.

Pembinaan pemuda dilakukan melalui pembinaan organisasi kepemudaan, namun keberadaan dan kiprah organisasi pemuda di Sulawesi Selatan dari tahun 2015 hingga 2019 berfluktuasi, namun menunjukkan adanya tren peningkatan organisasi pemuda yang aktif. Akan tetapi minat pemuda sebagai wirausaha selama lima tahun terakhir cenderung menurun, sehingga dibutuhkan upaya optimalisasi peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam mengembangkan potensinya sebagai wirausaha muda.

**Grafik II.26.
Persentase Pembinaan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

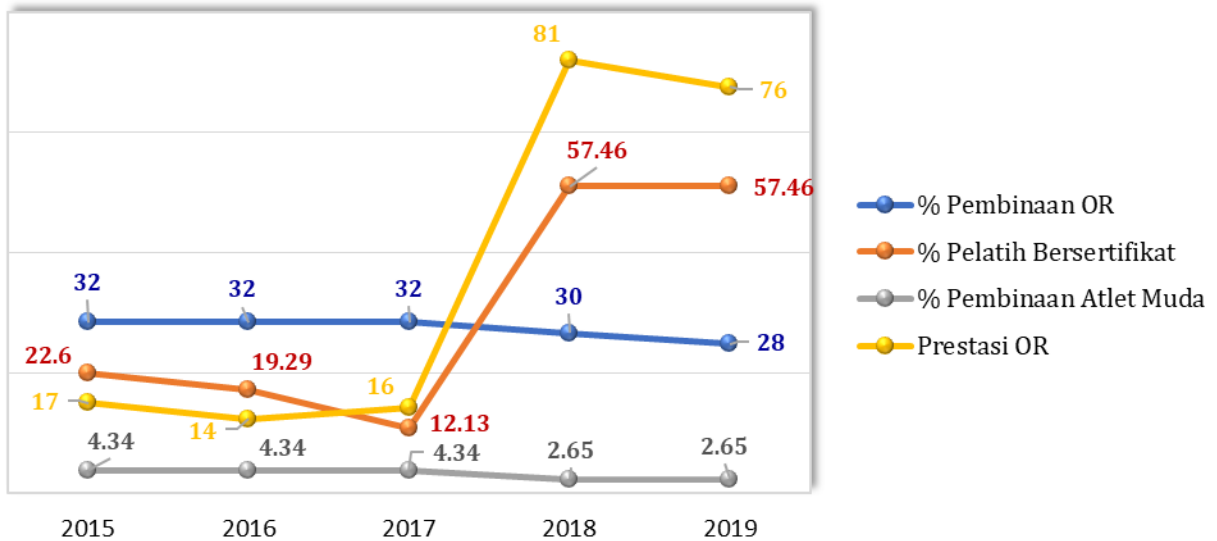


Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

Cabang olahraga yang menjadi binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 sampai tahun 2017 sebanyak 16 cabang olahraga, yang kemudian menurun menjadi 14 cabang olahraga pada tahun 2019. Pengurangan cabang olahraga binaan disebabkan kurang maksimalnya prestasi sejak tiga tahun terakhir. Adapun jumlah keseluruhan cabang olahraga yang terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2015 hingga 2019 sebanyak 50 cabang olahraga.

Gambaran pembinaan keolahragaan di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa keberadaan pelatih yang bersertifikat berkontribusi terhadap peningkatan prestasi olahraga, namun tidak diikuti dengan upaya peningkatan pembinaan sehingga prestasi olahraga di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya tren penurunan.

Grafik II.27.
Cakupan Pembinaan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

Kekayaan dan keragaman kebudayaan Sulawesi Selatan dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan dapat meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan, mengingat beragamnya budaya Sulawesi Selatan yang dipengaruhi oleh 3 Etnis yang berbeda yaitu: Etnis Makassar, Bugis dan Toraja.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki cagar budaya sebanyak 81 dan museum sebanyak 16 buah yang tersebar di 24 kabupaten/kota, namun belum terkelola dengan baik yang diindikasikan dengan penurunan jumlah karya budaya dan cagar budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi serta jumlah museum yang terstandarisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 hanya sebanyak 3 buah. Karya budaya Sulawesi Selatan yang dimasukkan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 sampai saat ini baru terinventarisasi sebanyak 670 Karya Budaya, dan hanya 44 karya budaya yang dianggap lengkap datanya dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai warisan Budaya Tak benda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang 1 karya budaya diantaranya telah mendapatkan pengakuan Dunia sebagai warisan Dunia oleh UNESCO yaitu Phinisi berupa seni pembuatan kapal.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Kinerja pembangunan pendidikan Sulawesi Selatan dapat digambarkan dari beberapa indikator keberhasilan antara lain angka partisipasi sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar.

Angka partisipasi sekolah diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan.

**Tabel II.50.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019**

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Selatan						
PAUD	%	65,71	66,37	67,51	34,50	31,17
SD/MI	%	108,31	105,76	103,74	102,55	101,63
SMP/MTs	%	101,59	102,78	103,99	102,75	103,63
SMA/SMK/MA	%	79,63	84,99	88,64	90,63	99,57
Nasional						
PAUD	%	68,10	70,06	74,28	38,85	32,53
SD/MI	%	107,96	106,4	105,89	108,61	107,46
SMP/MTs	%	100,72	101,05	102,08	91,52	90,57
SMA/SMK/MA	%	76,45	81,95	86,94	80,68	83,98

Sumber: Dinas Pendidikan Prov Sulawesi Selatan, 2019

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, bahkan pencapaiannya pada tahun 2019 sebesar 99,57 persen, diatas Angka Partisipasi Kasar Nasional yang nilainya sebesar 92,92 serta melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 88,12 persen.

Pada tahun 2019 terdapat 6 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang mengalami penurunan angka Angka Partisipasi Kasar dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kota Pare-Pare dan Kota Palopo sebagaimana table berikut.

Sementara Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2019 menurut kabupaten/kota tertinggi, terdapat di 3 kabupaten/kota, yaitu Kota Makassar mencapai angka 101,90, menyusul Kabupaten Takalar mencapai angka 101,01, Kabupaten Maros mencapai angka 100,20.

**Tabel II.51.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019**

No.	Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		2018	2019
1	Kepulauan Selayar	86,45	90,52
2	Bulukumba	80,02	80,46
3	Bantaeng	72,8	74,06
4	Jeneponto	69,15	72,48
5	Takalar	97,92	101,01
6	Gowa	79,97	83,15
7	Sinjai	76,19	76,69
8	Bone	77,24	74,48
9	Maros	93,15	100,20
10	Pangkajene Kepulauan	72,09	70,90

No.	Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		2018	2019
11	Barru	64,84	67,12
12	Soppeng	89,49	91,13
13	Wajo	61,4	62,52
14	Sidenreng Rappang	80,8	82,66
15	Pinrang	83,65	84,26
16	Enrekang	92,92	96,34
17	Luwu	87,97	72,86
18	Tana Toraja	84,06	88,50
19	Luwu Utara	82,22	88,48
20	Luwu Timur	77,46	66,99
21	Toraja Utara	83,81	87,55
22	Makassar	96,09	101,90
23	Pare-Pare	82,11	81,57
24	Palopo	91,56	88,67
Sulawesi Selatan		81,47	82,58

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM pada tiap jenjang pendidikan di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan APM Nasional maka dapat digambarkan bahwa, hanya jenjang pendidikan SD Sederajat yang capaian APM-nya tahun 2019 diatas rata-rata Nasional yaitu 98,06 persen dan secara Nasional hanya mencapai 97,64 persen. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP Sederajat dan SM Sederajat, capaian APM-nya masih berada dibawah rata-rata capaian nasional. Adapun capaian APM SMP Sederajat pada tahun 2019 yaitu 75,82 persen dan Nasional 79,40 persen, sementara APM SMA Sederajat di tahun yang sama hanya mencapai 60,14 persen, sedangkan Nasional mencapai 60,84 persen.

**Tabel II.52.
Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2015-2019**

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Murni (APM)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Selatan						
SD Sederajat	%	96,84	96,99	97,49	98,03	98,06
SMP Sederajat	%	73,51	73,67	74,36	75,13	75,82
SM Sederajat	%	59,47	59,62	59,86	60,03	60,14
Nasional						
SD Sederajat	%	96,70	96,82	97,19	97,58	97,64
SMP Sederajat	%	77,82	77,95	78,40	78,84	79,40
SM Sederajat	%	59,71	59,95	60,37	60,67	60,84

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah.

Capaian Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan pada setiap kelompok umur menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, kecuali pada penduduk usia 7-12 tahun mengalami penurunan dari 99,25 persen di tahun 2018 menjadi 99,23 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa, penduduk usia 7-12 tahun di Sulawesi Selatan yang bersekolah berkurang sebesar 0,02 persen. Sementara jika dibandingkan Angka Partisipasi Sekolah dengan Nasional pada semua penduduk usia sekolah, maka diperoleh gambaran bahwa Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia 19-24 tahun yang capaiannya 34,44 persen berada di atas rata-rata Nasional yaitu 25,21 persen.

**Tabel II.53.
Angka Partisipasi Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Kelompok Umur	Satuan	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Selatan						
Penduduk Usia 7-12 Tahun	%	99,03	99,12	99,16	99,25	99,23
Penduduk Usia 13-15 Tahun	%	92,66	92,85	93,09	93,13	93,22
Penduduk Usia 16-18 Tahun	%	69,66	70,09	70,60	70,81	70,85
Penduduk Usia 19-24 Tahun	%	30,64	31,48	32,16	33,72	34,44
Nasional						
Penduduk Usia 7-12 Tahun	%	99,09	99,09	99,14	99,22	99,24
Penduduk Usia 13-15 Tahun	%	94,72	94,88	95,08	95,36	95,51
Penduduk Usia 16-18 Tahun	%	70,61	70,83	71,42	71,99	72,36
Penduduk Usia 19-24 Tahun	%	22,95	23,93	24,77	24,40	25,21

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

4. Angka Putus Sekolah

Capaian angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dari tahun 2015 sebanyak 1,10 persen sampai pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,71 persen. Angka ini menunjukkan adanya kondisi pemerataan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang semakin baik. Keberhasilan ini didukung adanya pendanaan dana BOS nasional yang setiap tahunnya meningkat dan adanya sebagian daerah (Kab/Kota) menyediakan BOSDA.

**Tabel II.54.
Angka Putus Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Putus Sekolah				
		2015	2016	2017	2018	2019
SMA/SMK/MA	%	1,10	1,19	1,18	1,00	0,71

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

5. Angka Kelulusan (AL)

Kondisi angka kelulusan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dari tahun 2017 sampai ke tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, angka kelulusan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 99,95 persen dan pada tahun 2019 mencapai 99,99

persen. Hal ini menunjukkan, bahwa hampir seluruhnya penduduk usia 16-18 tahun di Sulawesi selatan telah lulus pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.

**Tabel II.55.
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Kelulusan (AL)				
		2015	2016	2017	2018	2019
SMA/SMK/MA	%	96,65	100	99,95	99,98	99,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

6. Angka Melanjutkan

Berdasarkan data BPS dari tahun 2015 sampai tahun 2018, menunjukkan angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mengalami peningkatan, yaitu dari 87,46 persen pada tahun 2015 menjadi 98,99 pada tahun 2018. Sementara pada tahun 2019 terjadi penurunan dari tahun 2018 menjadi 97,20 persen. Kondisi ini menunjukkan, menurunnya kesadaran masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA/MA/SMK.

**Tabel II.56.
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Melanjutkan (AM)				
		2015	2016	2017	2018	2019
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	87,46	94,13	94,65	98,99	97,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

Sementara angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2018, menunjukkan penduduk kabupaten/kota usia 13-15 tahun yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi mencapai 98 persen. Sedangkan pada tahun 2019, dapat digambarkan bahwa terdapat 6 Kabupaten/kota yang angka melanjutkan pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tertinggi adalah Kota Palopo sebesar 124,43 persen, Kota Parepare 120,56 persen, Kabupaten Bantaeng 112,57 persen, Kabupaten Takalar 107,53 persen, dan Tana Toraja 100,60 persen. Adapun angka melanjutkan pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA terendah adalah Kabupaten Wajo yang hanya sebesar 88,40 persen. Hal ini, mengindikasikan bahwa masih terdapat 11,60 persen penduduk Kabupaten Wajo yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

**Tabel II.57.
Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2019**

No.	Kabupaten/Kota	Angka Melanjutkan (AM)	
		2018	2019
1	Kepulauan Selayar	98,17	95,56
2	Bulukumba	98,74	92,76
3	Bantaeng	98,46	112,57
4	Jeneponto	98,65	98,65
5	Takalar	98,57	107,53
6	Gowa	98,66	90,39
7	Sinjai	98,57	99,18

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Kabupaten/Kota	Angka Melanjutkan (AM)	
		2018	2019
8	Bone	98,78	93,11
9	Maros	98,66	92,94
10	Pangkajene Kepulauan	98,48	94,69
11	Barru	98,45	95,11
12	Soppeng	99,07	98,33
13	Wajo	98,50	88,40
14	Sidenreng Rappang	98,38	89,42
15	Pinrang	98,92	93,96
16	Enrekang	98,74	98,04
17	Luwu	98,58	91,11
18	Tana Toraja	98,49	100,60
19	Luwu Utara	98,82	90,35
20	Luwu Timur	98,64	92,73
21	Toraja Utara	98,81	96,28
22	Makassar	99,44	103,80
23	Pare-Pare	98,87	120,56
24	Palopo	99,07	124,43
Sulawesi Selatan		98,99	97,20

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

7. Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru dibandingkan dengan jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap murid dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio guru terhadap murid digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah siswa yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu.

Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah di Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sampai tahun 2019, rasio guru terhadap murid sebesar 1:12 pada tahun 2015, dan pada tahun 2019 rasio guru terhadap murid meningkat menjadi 1:14. Hal ini menunjukkan bahwa 1 orang guru mempunyai beban kerja dalam mengajar dan mengawasi 14 murid.

Tabel II.58.
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Murid SMA/MA/SMK	Orang	260.842	266.407	279.292	290.422	295.634
Jumlah Guru SMA/MA/SMK	Orang	22.566	18.963	22.700	20.015	20.469
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Guru: Murid	1:12	1:14	1:12	1:15	1:14

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

8. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Sulawesi Selatan pada tahun 2015 yang sebanyak 79,59 persen kemudian bertambah pada tahun 2016 menjadi 98,99 persen, dan

terjadi pengurangan pada tahun 2017 menjadi 91,80 persen, selanjutnya bertambah kembali pada tahun 2019 sebanyak 98,69 persen.

Tabel II.59.
**Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	79,59	98,99	91,80	98,63	98,69

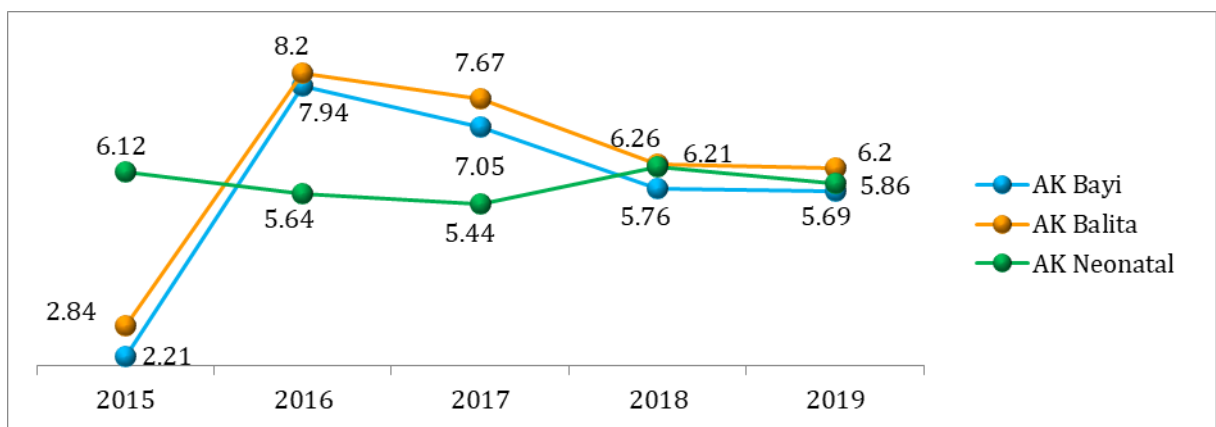
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

2.3.1.2 Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal per 1000 Penduduk

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan penduduk secara umum adalah angka kematian Bayi, Balita dan Neonatal. Perkembangan angka kematian Bayi, Balita dan Neonatal di Sulawesi Selatan dari tahun 2015 hingga 2017 berfluktuasi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa angka kematian bayi pada tahun 2015 sebesar 2,21 per 1.000 kelahiran hidup kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 mencapai 7,94 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, namun pada tahun 2019 telah mengalami penurunan menjadi 5,69 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Demikian pula angka kematian Balita mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2015 sebesar 2,84 kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup menjadi 8,2 kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup, namun mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2019 yaitu 6,2 kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya, Angka Kematian Neonatal pada tahun 2015 sebesar 6,12 per 1.000 kelahiran hidup turun menjadi 5,86 kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup di Tahun 2019. Angka kematian Neonatal ini berarti bahwa terdapat 5,86 kasus kematian Neonatal untuk 1000 kelahiran hidup.

Grafik II.28.
**Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global yaitu dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Perkembangan angka kematian ibu di Sulawesi Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 berfluktuasi, namun demikian cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Tahun 2015 angka kematian ibu sebanyak 103 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 66 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Adapun angka kematian terkecil di capai pada tahun 2016 yaitu 29 kematian.

**Tabel II.60.
Angka Kematian Ibu (AKI)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jiwa	103	29	77	69	66

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

3. Rasio Puskesmas, Posyandu dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk

Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas mengalami peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan Puskesmas pada tahun 2015 yang berjumlah 448 unit telah meningkat menjadi 463 unit pada tahun 2019.

Demikian pula pelayanan kesehatan dasar di Posyandu, juga mengalami peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa jumlah Posyandu pada tahun 2015 sebanyak 9.592 dan bertambah menjadi 9.974 Posyandu pada tahun 2019, yang seluruhnya telah terakreditasi dengan kategori akreditasi yang beragam dari dasar sampai utama. Hal ini menunjukkan bahwa strategi untuk pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak dapat berjalan dengan baik.

Selain pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Posyandu, di Sulawesi Selatan juga terdapat Puskemas Pembantu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Selama 5 tahun terakhir, jumlah Puskemas Pembantu berfluktuasi, dimana pada tahun 2015 jumlah Puskemas Pembantu sebanyak 1.227 unit, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.303 unit, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.233 unit.

Dari ketiga unit pelayanan kesehatan dasar tersebut, dapat digambarkan Rasio Puskesmas, Posyandu dan Pustu Per Satuan Penduduk di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cukup stabil. Berdasarkan data hasil perhitungan, dari tahun 2015 sampai tahun 2019 menunjukkan bahwa rasio Puskesmas, Posyandu dan Pustu berada pada angka 1,33 dan angka 1,32. Hal ini seiring dengan tujuan penyelenggaraan Puskesmas, Posyandu dan Pustu antara lain menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu serta meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan yang menunjang untuk mencapai masyarakat sehat.

**Tabel II.61.
Rasio Puskesmas, Posyandu dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk	Jiwa	8.520.304	8.606.375	8.690.294	8.776.888	8.851.240
Jumlah Puskesmas	Unit	448	448	451	493	463
Jumlah Posyandu	Unit	9.657	9.710	9.755	9.800	9.984
Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	1.227	1.211	1.303	1.394	1.233

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Puskesmas, Posyandu dan Pustu	Per 10000 Penduduk	1,33	1,32	1,32	1,33	1,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel, *diolah*

Jumlah Puskesmas, posyandu, dan pustu di Sulawesi Selatan sebanyak 11.099. Adapun Rasio Puskesmas, Posyandu dan Pustu Per 1000 Penduduk di Sulawesi Selatan adalah 1,25. Rasio tertinggi berada di Kabupaten Enrekang yaitu 1,96 dan rasio terkecil berada di Kabupaten Luwu yaitu hanya 0,59.

**Tabel II.62.
Rasio Puskesmas, Posyandu dan Pustu Per Satuan Penduduk
Jumlah dan rasio Puskesmas, Posyandu, dan Puskesmas Pembantu
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2019**

No.	Kab./Kota	Fasilitas Pelayanan Dasar				Jumlah Penduduk	Rasio Puskesmas, Posyandu dan Pustu Per 1000 Penduduk
		Puskesmas	Posyandu	Pustu	Jumlah		
1	Kep. Selayar	14	88	64	166	135.624	1,22
2	Bulukumba	20	581	62	663	420.603	1,58
3	Bantaeng	13	242	22	277	187.626	1,48
4	Jeneponto	19	520	60	599	363.792	1,65
5	Takalar	16	420	55	491	298.688	1,64
6	Gowa	26	765	108	899	772.684	1,16
7	Sinjai	16	352	61	429	244.125	1,76
8	Maros	14	415	24	453	353.121	1,28
9	Pangkep	23	359	70	452	335.514	1,35
10	Barru	12	265	32	309	174.323	1,77
11	Bone	39	1006	75	1120	758.589	1,48
12	Soppeng	17	327	38	382	226.991	1,68
13	Wajo	23	450	53	526	397.814	1,32
14	Sidrap	13	309	40	362	301.972	1,20
15	Pinrang	17	372	45	434	377.119	1,15
16	Enrekang	17	316	72	405	206.387	1,96
17	Luwu	22	92	98	212	362.027	0,59
18	Tana Toraja	20	328	31	379	234.002	1,62
19	Luwu Utara	14	364	65	443	312.883	1,42
20	Luwu Timur	18	273	68	359	299.673	1,20
21	Toraja Utara	28	271	25	324	231.214	1,40
22	Makassar	44	1010	30	1084	1.526.677	0,71
23	Parepare	6	129	13	148	145.178	1,02
24	Palopo	12	149	22	183	184.614	0,99
Sulawesi Selatan		463	9.403	1.233	11.099	8.851.240	1,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel, *diolah*

4. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Seiring dengan penambahan penduduk, maka untuk memenuhi pelayanan kesehatan diperlukan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat melalui penyediaan Rumah Sakit.

Jumlah seluruh Rumah Sakit di Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 berjumlah 93 unit dan pada tahun 2019

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

berjumlah 110 Unit yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Adapun Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk di Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2015 yaitu 1,09 dan meningkat menjadi 2,25 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 satu rumah sakit melayani 91.743 jiwa penduduk dan pada tahun 2019 satu rumah sakit melayani 80.000 jiwa penduduk.

**Tabel II.63.
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk	Jiwa	8,520,304	8,606,375	8,690,294	8,776,888	8,851,240
Jumlah Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Pusat/Vertikal)	Unit	2	2	2	2	2
Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	Unit	6	5	6	6	6
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	Unit	7	7	7	7	8
Jumlah Rumah Sakit Pemprov dan Pemkab/Kota	Unit	32	34	32	35	39
Jumlah Rumah Sakit Swasta	Unit	46	45	51	57	59
Jumlah Seluruh Rumah Sakit	Unit	93	93	98	106	110
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk (Per 100.000 Satuan Penduduk)	RS : 100.000 Satuan Penduduk	1,09	1,08	1,03	1,1	1,25

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

5. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Jumlah dokter di Provinsi Sulawesi Selatan lima tahun mengalami peningkatan cukup signifikan dimana pada tahun 2015 berjumlah 1.413 orang meningkat pada tahun 2019 sebanyak 1.629 orang. Adapun rasio dokter persatuan penduduk pada tahun 2015 yaitu 16,58 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 18,40, yang berarti bahwa setiap 1 dokter melayani 5.435 penduduk.

**Tabel II.64.
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Dokter Umum	Orang	1.413	1.356	1.341	1.537	1.629
Jumlah Penduduk		8.520,304	8.606,375	8,690,294	8,776,888	8,851,240
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Per 100.000 Penduduk)	Dokter : Satuan Penduduk	16,58	15,76	15,43	17,51	18,40

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

6. Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk

Upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini dianggap belum mencukupi dan belum sesuai kebutuhan di unit pelayanan kesehatan termasuk di Puskesmas dan Rumah Sakit. Khususnya untuk pemenuhan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan, ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang jumlahnya masih kurang seperti tenaga untuk upaya promotive dan preventif (tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga farmasi, dan tenaga ahli teknologi laboratorium medis).

Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata utamanya di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan dan rawan bencana serta daerah bermasalah kesehatan lainnya. Ini disebabkan karena daerah tersebut masih kurang diminati oleh tenaga kesehatan. Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan dengan melakukan penugasan khusus namun tenaga medis tersebut tidak berminat untuk bertugas di daerah tersebut.

Jumlah tenaga medis di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2015-2019 mengalami peningkatan yaitu dari 3.111 orang pada tahun 2015 menjadi 4.028 orang pada tahun 2019. Jika dibandingkan antara jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk, maka rasio tenaga medis per 100.000 penduduk adalah 36,51 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 42,72 tenaga medis per 100.000 penduduk pada tahun 2019 yang menandakan bahwa satu tenaga medis melayani 2.740 penduduk.

**Tabel II.65.
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Tenaga Medis	Orang	3.111	4.089	3.581	3.590	4,028
Jumlah Penduduk	Orang	8.520,304	8.606.375	8.690.294	8.776.888	8.851.240
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (Per 100.000 Penduduk)	Tenaga Medis : Satuan Penduduk	36,51	47,99	41,61	37,70	42,72

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

7. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2015 sebesar 79,21 persen, angka ini mengalami peningkatan hingga mencapai 82% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dapat menangani komplikasi kebidanan secara defenitif sesuai dengan standar baik di fasilitas pelayanan dasar maupun di fasilitas pelayanan rujukan.

**Tabel II.66.
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	79,21	76,48	81,84	80,70	82

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

8. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2015 sebesar 94,02 persen, terjadi peningkatan pada tahun 2017 menjadi 94,05 persen, kemudian di tahun 2019 persalinan oleh tenaga kesehatan menurun menjadi 91,91 persen.

**Tabel II.67.
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	94,02	92,90	94,05	91,99	91,91

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

9. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Penyelenggaraan imunisasi di Indonesia diukur dengan cakupan UCI (Universal Child Immunization) telah mencakup minimal 80 persen bayi yang berada dalam suatu desa telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Pencapaian jumlah Desa/Kelurahan UCI di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 adalah 2.923 desa/kel. dari 3.051 desa/kel. dengan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 95,80 persen.

**Tabel II.68.
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Desa/Kel	2.884	2.855	2.933	2884	2.923
Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan	Desa/Kel	3.033	3.033	3.054	3.049	3.051
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	95,08	94,13	96,03	94,59	95,80

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

10. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapatkan Perawatan di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, dapat di tangani 100 persen.

**Tabel II.69.
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita	184	156	138	369	446
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Balita	184	156	138	369	446
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

11. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya fluktuasi pencapaian target persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak. Selama 5 tahun terakhir, target 100 persen hanya dicapai pada tahun 2016 dan tahun 2017. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 98,5 persen, sehingga membutuhkan dukungan pemerintah Kabupaten/Kota agar pencapaian target provinsi dapat terwujud di tahun 2020.

**Tabel II.70.
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	98,4	101	102	103,8	98,5

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

12. Non Polio AFP Rate

Pada tabel berikut, Non Polio AFP rate tahun 2017- 2018 di Sulawesi Selatan mencapai 1,60 dan memperlihatkan data pada tahun 2019 yang berfluktuasi dimana tahun 2015 di dapat 1,92 sedangkan di tahun 2019 di dapatkan 1,96.

**Tabel II.71.
Non Polio AFP Rate
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	1,92	2,08	1,60	1,60	1,96

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

13. Cakupan Balita Pneumonia

Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani berfluktuasi meskipun menunjukkan adanya peningkatan cakupan penanganan dari tahun 2015 ke tahun 2019 yaitu dari 10,89 persen pada tahun 2015, meningkat menjadi 19,04 persen pada tahun 2019. Peningkatan cakupan ini dapat bermakna positif, bahwa terjadi peningkatan cakupan penanganan terhadap balita yang menderita pneumonia, akan tetapi juga dapat bermakna bahwa terjadi peningkatan kasus balita yang menderita pneumonia di Sulawesi Selatan.

**Tabel II.72.
Cakupan Balita Pneumonia
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	10,89	10,04	10,01	18,24	19,04

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

14. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC tahun 2015, ke 2016 ada penurunan, namun selama 3 tahun terakhir (2017-2019) menunjukkan adanya peningkatan yaitu

tahun 2017 sebanyak 46 persen, tahun 2018 sebanyak 49 persen dan tahun 2019 sebanyak 61 persen.

**Tabel II.73.
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun	Jiwa/orang	8.191	7.139	7.890	9.314	11.401
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Jiwa/orang	17.518	17.518	26.919	26.086	27.196
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	48,3	43,9	46	49	61

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

15. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Prevalensi Kasus TBC untuk semua jenis, selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Tingkat Prevalensi Kasus TBC pada tahun 2015 sebesar 156 meningkat tahun 2019 menjadi 214.

**Tabel II.74.
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Per 100.000 penduduk	156	156	197	208	214

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Data evaluasi kesembuhan terhadap kasus tuberkulosis yang diobati, diperoleh gambaran bahwa peningkatan hasil penanganan kasus tuberkulosis di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS sebesar 88 persen, meningkat dibanding tahun 2015 yang hanya 86 persen.

**Tabel II.75.
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	%	86	87	86	87	88

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

16. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan paling rendah dalam lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 yaitu 1.755 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah

1.755 kasus (100%). Jika dibandingkan kondisi pada tahun 2015 terhadap tahun 2019 jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani mengalami peningkatan dari 4.037 jiwa pada tahun 2015 dan pada tahun 2019 ditemukan 3.515 kasus yang semuanya tertangani (100%).

**Tabel II.76.
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun	Jiwa	4.037	7.587	1,755	2.122	3.515
Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wikayah dalam kurun waktu yang sama	Jiwa	4.037	7.587	1,755	2.122	3.515
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

17. Angka Kejadian Malaria

Angka Kejadian Malaria per 100.000 penduduk mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir, dimana kejadian terendah terjadi pada tahun 2019 dan kejadian tertinggi pada tahun 2017.

**Tabel II.77.
Angka Kejadian Malaria
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	0,12	0,13	0,15	0,15	0,10

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Cakupan kasus yang dinyatakan positif dan mendapatkan pengobatan, diukur melalui indikator persentase penderita malaria yang diobati. Data persentase penderita malaria yang diobati dengan Obat Anti Malaria yang tepat (ACT) di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 merupakan capaian tertinggi sebesar 96,18 persen, dan capaian terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 88 persen.

**Tabel II.78.
Penderita Malaria yang Diobati dengan ACT
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Positif Malaria	Kasus	953	1.073	1.237	1.285	808
Pengobatan ACT	Penderita	864	1.032	1.156	1.237	711
Persentase Penderita Malaria yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat (ACT)	%	90,66	96,18	93,45	96,26	88,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Penanganan penyakit malaria menurut kabupaten/kota lima tahun terakhir, maka diperoleh gambaran secara rata-rata bahwa terdapat beberapa kabupaten/kota dengan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

cakupan pengobatan yang sangat rendah yaitu < 90 persen, diantaranya adalah Kota Makassar (88,55 persen), Pare-pare (83,72 persen), Palopo (70,16 persen), Toraja Utara (74,96 persen). Adapun yang mencapai rata-rata 100persen lima tahun terakhir adalah Kabupaten Sidrap dan Bulukumba.

**Tabel II.79.
Penderita Malaria yang Diobati dengan ACT Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun						Rata-Rata
		2018			2019			
		Positif	ACT	%	Positif	ACT	%	%
1	Kep. Selayar	30	29	96,67	7	7	100,00	96,20
2	Bulukumba	45	45	100,00	19	19	100,00	100,00
3	Bantaeng	24	24	100,00	14	14	100,00	98,67
4	Jeneponto	60	60	100,00	68	68	100,00	99,62
5	Takalar	31	30	96,77	10	10	100,00	97,25
6	Gowa	7	7	100,00	0	0	0	95,00
7	Sinjai	34	34	100,00	12	12	100,00	98,79
8	Bone	83	82	98,80	42	41	97,62	95,95
9	Maros	141	129	91,49	63	55	87,30	91,49
10	Pangkep	36	36	100,00	29	29	100,00	97,21
11	Barru	15	15	100,00	21	17	80,95	96,19
12	Soppeng	16	14	87,50	5	4	80,00	92,63
13	Wajo	32	31	96,88	32	30	93,75	93,85
14	Sidrap	18	18	100,00	8	8	100,00	100,00
15	Pinrang	60	60	100,00	81	80	98,77	99,48
16	Enrekang	54	54	100,00	29	28	96,55	94,86
17	Luwu	59	59	100,00	52	45	86,54	96,13
18	Tana Toraja	29	29	100,00	21	2	9,52	74,96
19	Luwu Utara	34	34	100,00	40	37	92,50	97,39
20	Luwu Timur	72	75	104,17	19	16	84,21	93,97
21	Toraja Utara	172	172	100,00	6	5	83,33	96,19
22	Makassar	191	167	87,43	157	117	74,52	88,55
23	Pare-Pare	24	23	95,83	13	13	100,00	83,72
24	Palopo	18	10	55,56	60	54	90,00	70,16
Sulawesi Selatan		1.285	1.237	96,26	808	711	88,00	92,91

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

18. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi di Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terlihat berfluktuasi, dimana Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi tertinggi terjadi pada tahun tahun 2016 yaitu 0,28 persen dan terendah pada tahun 2019 sebesar 0,019 persen.

**Tabel II.80.
Prevalensi HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0,056	0,28	0,33	0,013	0,019

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

19. Proporsi Jumlah Penduduk Memiliki Pengetahuan Komprehensif

Persentase Pengetahuan Komprehensif pada Penduduk Usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan Komprehensif tentang HIV dan AIDS mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 mencapai 73,4 persen menjadi 87,60 persen pada tahun 2018.

**Tabel II.81.
Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif	%	73,4	83,40	n.a	87,60	n.a

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

20. Cakupan Kunjungan Bayi

Persentase Cakupan kunjungan bayi dari tahun 2015 sampai 2019 ada penurunan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 98,11 persen menurun pada tahun 2019 menjadi 89,96 persen.

**Tabel II.82.
Cakupan Kunjungan Bayi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Kunjungan Bayi	%	98,11	98,08	98,54	96,40	89,96

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

21. Cakupan Puskesmas

Jumlah puskesmas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga cakupan Puskesmas Provinsi Sulawesi selatan mengalami peningkatan dari 146 persen pada tahun 2015, meningkat menjadi 148 persen pada tahun 2019.

**Tabel II.83.
Cakupan Puskesmas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Puskesmas	Unit	448	448	451	458	459
Jumlah Kecamatan	Kec.	306	306	307	310	310
Cakupan Puskesmas	%	146	146	147	148	148

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

22. Cakupan Puskesmas Pembantu

Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu) memperlihatkan ada fluktuasi persentase. Pada tahun 2015 sebesar 54,82 persen hingga pada tahun 2019 sebesar 43,6 persen.

**Tabel II.84.
Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)	%	54,82	54,06	56,56	42,2	43,6

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

23. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Persentase Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 selama lima tahun menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2015, cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 91,72 persen, yang menggambarkan bahwa terdapat sekitar 8,28 persen ibu hamil yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4. Sedangkan pada tahun 2019, cakupan kunjungan ibu hamil K4 menurun menjadi 87,96 persen.

**Tabel II.85.
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	91,72	89,25	91,13	89,32	87,96

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

24. Cakupan Pelayanan Nifas

Persentase Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan pada tahun 2015 sebesar 91,72 persen, dan menurun pada tahun 2019 cakupan pelayanan nifas bagi ibu melahirkan sebesar 90,35 persen.

**Tabel II.86.
Cakupan Pelayanan Nifas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Pelayanan Nifas	%	91,72	91,32	91,48	90,09	90,35

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

25. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani di Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2015 sebesar 88,74 persen, dan menurun hingga tahun 2019 menjadi 62,87 persen.

**Tabel II.87.
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	%	88,74	60,66	60,28	58,32	62,87

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

26. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sampai 2019 persentase mengalami fluktuasi, terlihat bahwa pada tahun 2015 cakupan pelayanan anak balita sebesar 76,51 persen, kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 69,09 persen, selanjutnya naik kembali sampai pada tahun 2018 sebesar 71,64 persen dan pada tahun 2019 kembali terjadi penurunan menjadi 69,71 persen.

**Tabel II.88.
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	76,51	69,09	71,74	71,64	69,71

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

27. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak Usia 6-24 bulan Keluarga Miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada keluarga miskin di Sulawesi Selatan sebagaimana data pada tabel di bawah, menggambarkan bahwa dalam dua tahun terakhir terjadi penurunan dalam pemberian makanan pendamping ASI pada keluarga miskin. Pada tahun 2018, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada keluarga miskin mencapai 91 persen, dan pada tahun 2019 cakupannya berkurang menjadi 83,43 persen.

**Tabel II.89.
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	0	100	100	91	83,43

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

28. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat berfluktuasi sebagaimana tahun 2015 memperlihatkan capaian 82,58 persen, tahun 2016 mencapai 65,76, tahun 2017 naik lagi menjadi 83,19 persen di tahun 2018 naik menjadi 85,93 persen dan di tahun 2019 turun menjadi 79,29 persen.

**Tabel II.90.
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	82,58	65,76	83,19	85,93	79,29

Sumber : Dinas Kesehatan Prrovinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

29. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar merupakan prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. Dalam lima tahun, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sudah mencapai 100 persen.

**Tabel II.91.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Prrovinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

30. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus di Berikan Sarana Kesehatan (RS)

Seperti halnya dengan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, maka perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus di berikan sarana kesehatan (RS) cukup bersal. Hal ini dapat terlihat dari capaian selama 5 (lima) tahun yang sudah mencapai target 100 persen.

**Tabel II.92.
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus di Berikan
Sarana Kesehatan (RS) di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus di Berikan Sarana Kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Prrovinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

31. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Adapun cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi di bawah 24 jam di Provinsi Sulawesi Selatan, sudah mencapai 100 persen dalam lima (5) tahun berturut-turut.

**Tabel II.93.
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Prrovisi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1159/IV/Tahun 2018 tentang Penetapan Status dan Fungsi Jalan Provinsi Sulawesi Selatan terjadi penambahan panjang jalan provinsi dari 1.500,15 Km menjadi 2.009,35 Km. Penambahan panjang jalan tersebut mengakibatkan menurunnya kemantapan jalan provinsi dikarenakan beberapa ruas jalan kabupaten yang berubah menjadi ruas jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Hal ini terlihat pada proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2015 sebesar 87,42 persen menurun menjadi 61,52 persen pada tahun 2019. Demikian juga proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2015 sebesar 42 persen mengalami penurunan menjadi 33,45 persen pada tahun 2019. Selain itu, prioritas penanganan jalan rusak berat pada tahun 2019 sehingga terjadi penurunan panjang jalan dalam kondisi rusak berat dari tahun 2018 sepanjang 554,99 Km (27,62%) menjadi 453,70 Km (22,58%) dari keseluruhan jalan provinsi sepanjang 2.009,35 Km. Penanganan jalan dalam kondisi rusak berat diprioritaskan pada jalan yang menghubungkan antara pusat produksi komoditas pertanian, dan perikanan dengan pusat pengolahan dan pemasaran melalui kegiatan preservasi jalan di Kabupaten Bone, Pinrang, Sidenreng Rappang, Barru, Soppeng, Wajo, Sinjai, dan kota Parepare dan pada jalan yang menghubungkan kawasan pariwisata prioritas melalui kegiatan preservasi jalan di Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar sepanjang 157,84 Km. Kondisi jalan secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.94.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

No.	Uraian	Satuan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan									
			2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
1.	Kondisi baik	Km	483,21	42,11	633,36	42,22	516,26	34,41	733,51	36,50	672,13	33,45
2.	Kondisi sedang	Km	519,92	45,31	294,70	19,64	437,41	29,16	450,72	22,43	564,03	28,07
3.	Kondisi rusak ringan	Km	88,77	7,74	188,34	12,55	128,59	8,57	270,14	13,44	319,49	15,90
4.	Kondisi rusak berat	Km	55,61	4,85	383,75	25,58	417,89	27,86	554,99	27,62	453,70	22,58
5.	Panjang jalan Keseluruhan	Km	1.147,51	100	1.500,15	100	1.500,15	100	2.009,35	100	2.009,35	100
6.	Mantap	Km	1.003,13	87,42	928,06	61,86	953,65	63,58	1.184,23	58,93	1.236,16	61,52
7.	Tidak Mantap	Km	144,38	12,58	572,09	38,14	546,5	36,42	825,12	41,07	773,19	38,48

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 2020

2) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Adapun rasio panjang jalan yang menggambarkan aksesibilitas layanan jaringan jalan, semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi pula jumlah penduduk/masyarakat yang dilayani. Kinerja rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya tren penurunan rasio dikarenakan panjang jalan baik kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota bersifat statis yang ditetapkan secara berhirarki dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali yang mengacu pada penetapan status dan fungsi ruas jalan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Angka rasio panjang jalan di provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 setiap 0,00329 Km jalan di Sulawesi Selatan melayani 1 (satu) jiwa penduduk Sulawesi Selatan (329 km melayani 100.000 penduduk).

**Tabel II.95.
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang Jalan Nasional	Km	1.745,92	1.745,92	1.745,92	1.745,92	1.745,92
2.	Panjang jalan Provinsi	Km	1.147,51	1.500,15	1.500,15	2.009,35	2.009,35
3.	Panjang jalan Kab/Kota	Km	25.379,58	25.379,58	25.379,58	25.379,58	25.379,58
4.	Total Panjang Jalan	Km	28.273,01	28.625,65	28.625,65	29.134,86	29.134,86
5.	Jumlah penduduk	Jiwa	8.520.304	8.606.375	8.690.294	8.771.970	8.851.240
	Rasio panjang jalan dengan Jumlah penduduk	Km/ jumlah penduduk	0,00332	0,00333	0,00329	0,00332	0,00329

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 2020

3) Persentase Jalan Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Jalan provinsi di Sulawesi Selatan yang dilengkapi dengan trotoar dan drainase pada tahun 2019 dan tahun 2019 sepanjang 1.547,21 Km atau sebesar 77 persen dari keseluruhan panjang jalan provinsi. Dari data tersebut, jalan provinsi yang memiliki trotoar dan drainase tidak mengalami penambahan pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel. Hal ini dikarenakan pada beberapa ruas jalan provinsi tidak dilengkapi dengan lahan terbuka di sisi kiri dan kanan jalan karena telah dipadati dengan bangunan sehingga untuk penyediaannya diperlukan alokasi pendanaan yang besar.

**Tabel II.96.
Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	963,9	1.125	1.155,12	1.547,21	1.547,21*
2.	Panjang jalan keseluruhan	Km	1.147,51	1.500,15	1.500,15	2.009,35	2.009,35
3	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	84	75	77	77	77*

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

* Data sementara, Bappelitbangda Tahun 2020

4) Persentase Sempadan Jalan Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Pemanfaatan sempadan jalan provinsi oleh pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 sama dengan kondisi pada tahun 2018 yaitu sepanjang 202,14 Km atau sebesar 10,05 persen, hal ini menunjukkan bahwa panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar tidak mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan pengendalian pemanfaatan sempadan jalan yang dipakai oleh pedagang kaki lima atau bangunan liar, membutuhkan dukungan pemerintah Kabupaten/kota, khususnya dalam konsistensi penegakan aturan sempadan jalan sebagaimana amanat Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005.

**Tabel II.97.
Sempadan Jalan Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Panjang jalan yang sempadannya dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Km	107,29	152,72	147,76	202,14	202,14
Panjang jalan provinsi	Km	1.147,51	1.500,15	1.500,15	2.009,35	2.009,35
Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar	%	9,35	10,18	9,85	10,11	10,11

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, tahun 2020

5) Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan gambaran akses penduduk terhadap jamban, dimana terdapat peningkatan jumlah rumah tangga berakses sanitasi dari 1.651.626 rumah tangga atau sebesar 83,00 persen pada tahun 2015 menjadi sebanyak 1.824.220 rumah tangga atau sebesar 89,77 persen pada tahun 2019.

**Tabel II.98.
Rumah Tinggal Bersanitasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi	Unit	1.651.626	1.767.440	1.713.087	1.729.089	1.824.220
Jumlah Rumah Tangga	Unit	1.990.008	2.009.996	2.029.478	2.048.450	2.032.133
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	83,00	87,93	84,41	84,41	89,77

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2019

Peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi di Sulawesi Selatan merupakan kontribusi dari peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi di beberapa kabupaten/kota yang telah mencapai 100 persen, diantaranya Kepulauan Selayar, Bantaeng, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Makassar, Parepare dan Palopo. Namun masih terdapat beberapa kabupaten yang persentase rumah tinggal bersanitasinya di bawah 90 persen yang masih membutuhkan peningkatan upaya penanganan adalah Kabupaten Bone, Maros, dan Luwu.

**Tabel II.99.
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019**

No.	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	Persentase (%)
1	Kep. Selayar	134.280	33.168	28.257	100
2	Bulukumba	418.236	102,392	88.437	94,14
3	Bantaeng	185.581	45.044	43.379	100
4	Jeneponto	359.787	85,056	63,035	93,51
5	Takalar	292.983	70.769	63.416	95,03
6	Gowa	748.200	173.596	137.908	98,56
7	Sinjai	241.208	52.666	51.477	93,61
8	Bone	751.026	171.859	122.307	86,47
9	Maros	346.383	76,974	49.536	84,59
10	Pangkep	329.791	77.781	57.933	96,27
11	Barru	172.767	41.832	39.126	96,49
12	Soppeng	226.466	58.217	48.479	100
13	Wajo	395.583	96.484	90.590	100
14	Sidrap	296.125	71.184	59.677	100
15	Pinrang	372.230	87.378	85.890	100
16	Enrekang	203.320	45.283	37.608	92,76
17	Luwu	356.305	77.122	54.578	88,09
18	Tana Toraja	231.519	55.788	44.037	97,08
19	Luwu Utara	308.001	72.642	56.868	93,39
20	Luwu Timur	287.874	68.869	58.501	92,81
21	Toraja Utara	228.414	50.091	40.569	97,73
22	Makassar	1.489.011	345.478	336.576	100
23	Pare-Pare	142.097	32.004	22.764	100
24	Palopo	176.907	37.801	32.139	100
Sulawesi Selatan		8.690.294	2.032.113	1.729.089	89,77

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2019

Akses sanitasi layak merupakan indikator kepemilikan jamban beserta tangki septik yang layak. Salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah keterpenuhan akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan yang capaiannya meningkat dari 82,94 persen pada tahun 2015 menjadi 85,30 persen pada tahun 2019 yang diindikasikan dengan persentase rumah tangga yang memiliki jamban sebesar 92,34 persen dan yang telah dilengkapi dengan tangki septik yang layak sebesar 78,25 persen.

**Tabel II.100.
Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	%	82,94	83,40	84,41	84,41	85,30

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, tahun 2020

Namun capaian keterpenuhan akses terhadap layanan sanitasi layak di Sulawesi Selatan masih membutuhkan dukungan ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan beserta layanannya. Hal ini terlihat dari 24 kab/kota di Sulawesi Selatan, terdapat 10 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang belum memiliki IPLT, dan dari 14 kabupaten/kota yang telah memiliki IPLT hanya ada 7 IPLT yang berfungsi.

**Tabel II.101.
Kondisi Sanitasi dan Akses Layanan Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Kabupaten/ Kota	BAB Sembarangan (%)	Akses Jamban (%)	Septic Tank Layak (%)	Cakupan Layanan Truk Tinja (%)	Kondisi IPLT
1	Kep. Selayar	21,76	78,24	56,64	21,60	Belum Tersedia
2	Bulukumba	7,51	92,49	83,71	83,71	Rusak
3	Bantaeng	8,66	91,34	91,13	87,87	Tidak Berfungsi
4	Jeneponto	15,59	84,41	71,18	71,18	Belum Tersedia
5	Takalar	7,71	92,29	59,26	40,74	Tidak Berfungsi
6	Gowa	5,67	94,33	81,94	81,94	Belum Tersedia
7	Sinjai	10,63	89,37	70,13	70,13	Berfungsi
8	Bone	7,67	92,33	83,98	76,31	Rusak
9	Maros	16,75	83,25	92,28	75,53	Tidak Berfungsi
10	Pangkep	20,17	79,83	89,81	69,64	Belum Tersedia
11	Barru	6,80	93,20	76,89	76,31	Berfungsi
12	Soppeng	3,35	96,55	60,03	36,52	Belum Tersedia
13	Wajo	1,74	98,26	93,68	91,94	Tidak Berfungsi
14	Sidrap	3,02	96,98	90,32	87,30	Tidak Berfungsi
15	Pinrang	3,32	96,68	58,4	55,08	Berfungsi
16	Enrekang	8,96	91,04	98,53	89,57	Belum Tersedia
17	Luwu	16,97	83,03	77,55	60,58	Belum Tersedia
18	Tana Toraja	3,95	96,05	66,16	62,21	Berfungsi
19	Luwu Utara	11,21	88,79	89,64	78,43	Belum Tersedia
20	Luwu Timur	9,89	90,11	66,84	56,95	Belum Tersedia
21	Toraja Utara	2,99	97,01	65,86	31,15	Belum Tersedia
22	Makassar	2,78	97,22	63,87	33,35	Berfungsi
23	Pare-Pare	0	100	87,18	87,18	Berfungsi
24	Palopo	7,81	92,12	99,99	92,18	Berfungsi
Sulawesi Selatan		7,66	92,34	78,25	64,40	

Sumber: Data Olahan AMPL, STBM, dan Dokumen SSK, BAPPELITBANGDA tahun 2020

6) Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Persentase pemanfaatan sempadan sungai yang dipakai bangunan rumah liar di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebesar 35 persen, menunjukkan bahwa belum ada peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang sempadan sungai di provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dikarenakan pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai belum optimal dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/kota, mengingat kewenangan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota yang telah menetapkan sempadan sungai sebagai kawasan lindung.

Tabel II.102.

**Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	30	32	35	35*	35*

Sumber: Data sementara, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020

7) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Meskipun belum seluruh lahan sawah di Sulawesi Selatan mempunyai saluran irigasi, namun proporsi lahan sawah beririgasi masih lebih besar dibandingkan lahan sawah yang tidak mempunyai saluran pengairan. Dari keseluruhan lahan sawah, luas lahan sawah yang mempunyai saluran irigasi adalah 392.622 hektar atau sekitar 59,20 persen. Adapun 270.624 hektar (40,80 persen) merupakan lahan sawah yang belum/tidak mempunyai saluran irigasi baik berupa sawah tadah hujan, rawa pasang surut, maupun rawa lebak (Statistik Penggunaan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan, 2018).

Persentase irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 yang mencapai 72,26 persen, hal ini diindikasikan dengan meningkatnya panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dari 309.638 m menjadi 325.232 m pada tahun 2019. Peningkatan persentase irigasi dalam kondisi baik di Sulawesi Selatan didukung oleh kebijakan Pemerintah dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk melakukan kegiatan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Bengo di Kabupaten Bone dan rehabilitasi DI Salobunne di Kabupaten Soppeng seluas 2.386 Hektar, dan alokasi penerusan hibah (*on granting*) melalui Program IPDMIP dengan melakukan kegiatan rehabilitasi DI Cenrana di Kabupaten Wajo seluas 2.305 Hektar.

Tabel II.103.

**Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019**

No.	Uraian	Satuan	Tahun	
			2018	2019
1	Panjang Saluran Irigasi	M	449.878	450.058
	Saluran Primer	M	196.585	196.756
	Saluran Sekunder	M	253.293	253.293
2	Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik	M	309.638	325.232
	Saluran Primer	M	141.277	147.062
	Saluran Sekunder	M	168.361	178.170
	Persentase Irigasi Kewenangan Provinsi Kondisi Baik	%	68,83	72,26

Sumber: Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

8) Rasio Jaringan Irigasi

Peningkatan panjang saluran irigasi dengan kondisi baik di Sulawesi Selatan tahun 2019 belum diikuti dengan peningkatan luas lahan sawah yang terlayani system irigasi, kondisi ini tergambar dari jumlah tambahan luas lahan yang tertangani system pengairan irigasi yang ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 10.787 Ha namun yang tercapai baru 2.746 Ha. Rendahnya capaian target penambahan luas lahan yang terlayani oleh sistem pengairan irigasi pada tahun 2019 dikarenakan adanya kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan rasionalisasi terhadap alokasi pendanaan pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya untuk memenuhi kekurangan alokasi dana bagi hasil kewajiban pemerintah provinsi terhadap pemerintah kabupaten/kota tahun 2018.

Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada daerah irigasi kewenangan provinsi yang ditargetkan sebesar 69,47 persen pada tahun 2019, baru tercapai 18 persen pada tahun 2019 hal ini disebabkan oleh ketersediaan air irigasi yang masih minim akibat kerusakan lingkungan di wilayah hulu serta adanya penambahan lahan sawah baru melalui program pencetakan sawah baru yang belum diiringi dengan pembangunan jaringan irigasi dan upaya peningkatan ketersediaan debit air irigasi. Sehingga masih terdapat lahan persawahan yang melaksanakan sistem pertanian tadah hujan.

Rasio jaringan Irigasi Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan cakupan pelayanan jaringan irigasi terhadap luasan lahan budidaya pertanian yang pada tahun 2019 sebesar 16,49 mengindikasikan bahwa pada tahun 2019 jaringan irigasi provinsi sepanjang 16,49 M dapat mengairi 1 Ha lahan budidaya pertanian berupa sawah, sebagaimana tercantum pada dokumen materi teknis revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 seluas 653.633 Hektar. Gambaran rasio jaringan irigasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 menunjukkan bahwa walaupun terjadi peningkatan panjang jaringan irigasi primer dan panjang jaringan irigasi sekunder serta penurunan luasan lahan sawah, namun kinerja rasio jaringan irigasi di Sulawesi Selatan masih sangat jauh dari optimal.

**Tabel II.104.
Rasio Jaringan Irigasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang Jaringan Irigasi	M	7.196.037	8.465.227	9.551.227	10.694.227	10.775.727
	Jaringan Irigasi Primer	M	1.457.964	1.669.964	1.729.964	1.829.964	1.830.665
	Jaringan Irigasi Sekunder	M	2.615.286	2.931.286	3.057.286	3.257.286	3.338.085
	Jaringan Irigasi Tersier	M	3.122.787	3.863.977	4.763.977	5.606.977	5.606.977
2.	Luas Lahan Budidaya Pertanian	Ha	541.568	635.141	714.641	794.141	653.633
Rasio Jaringan Irigasi		M/Ha	13,29	13,33	13,37	13,47	16,49

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta karya dan Tata Ruang, Tahun 2020

9) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Penyediaan air minum terkait dengan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menurunkan kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah melalui program Penyediaan Air Bersih. Memperhatikan jumlah penduduk yang berakses air minum di Sulawesi Selatan yang meningkat tiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan, maka diperoleh gambaran bahwa persentase penduduk berakses air minum di Sulawesi Selatan meningkat dari 87,37 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 87,74 persen pada tahun 2019. Namun peningkatan persentase penduduk yang berakses air minum di Sulawesi Selatan keberhasilannya dikontribusi oleh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pemerintah Kabupaten/Kota melalui alokasi Dana Alokasi Khusus.

**Tabel II.105.
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk berakses air minum	Jiwa	7.443.530	7.517.263	7.593.263	7.668.636	7.765.741
Jumlah Penduduk	Jiwa	8.520.304	8.606.375	8.690.294	8.776.888	8.851.240
Persentase Penduduk Berakses air minum	%	87,36	87,35	87,38	87,37	87,74

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2019

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka meningkatkan persentase penduduk berakses air minum, yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan pemenuhannya menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pada tahun 2019, jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan akses air minum sebanyak 1.784.487 RT atau sebesar 87,81 persen dari seluruh rumah tangga di Sulawesi Selatan. Persentase rumah tangga berakses air minum tahun 2019 sebesar 87,38 persen menunjukkan bahwa target persentase penduduk berakses air minum tahun 2019 di Sulawesi Selatan sebesar 90 persen belum tercapai, dikarenakan masih terdapat 13 Kabupaten yang persentase penduduknya berakses air minum masih di bawah 90 persen dan beberapa Kabupaten diantaranya memerlukan perhatian khusus yaitu Kabupaten Maros, Pangkajene Kepulauan, Enrekang, Tana Toraja, Luwu Utara, dan Toraja Utara yang capaian persentase rumah tangga berakses air minum di bawah 75 persen.

**Tabel II.106.
Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum	Rumah Tangga	1.740.268	1.757.030	1.774.720	1.792.323	1.784.487
Jumlah Rumah Tangga	Unit	1.990.008	2.009.996	2.029.478	2.048.450	2.032.113
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	87,45	87,41	87,45	87,50	87,81

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2019

Penyediaan air minum di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBN untuk pembangunan SPAM kawasan perkotaan dan fasilitasi SPAM serta Dana Alokasi Khusus bagi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan untuk penyediaan akses air minum.

**Tabel II.107.
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	Persentase (%)
1	Kep. Selayar	34.076	30.491	89,48
2	Bulukumba	101.841	85.006	83,47
3	Bantaeng	46.100	43.767	94,94
4	Jeneponto	82.306	78.824	95,77
5	Takalar	68.981	62.476	90,57
6	Gowa	177.629	170.808	96,16
7	Sinjai	54.371	45.063	82,88
8	Maros	78.646	58.874	74,86
9	Pangkep	75.059	54.080	72,05
10	Barru	41.407	38.811	93,73
11	Bone	171.239	152.694	89,17
12	Soppeng	57.033	53.879	94,47
13	Wajo	95.399	80.860	84,76
14	Sidrap	71.220	70.194	98,56
15	Pinrang	87.702	83.948	95,72
16	Enrekang	46.172	32.824	71,09
17	Luwu	78.702	59.680	75,83
18	Tana Toraja	53.425	30.020	56,19
19	Luwu Utara	73.275	53.579	73,12
20	Luwu Timur	69.369	56.057	80,81
21	Toraja Utara	50.402	34.337	68,61
22	Makassar	345.402	337.527	97,72
23	Parepare	32.406	31.693	97,80
24	Palopo	40.309	38.995	96,74
Sulawesi Selatan		2.032.113	1.784.487	87,81

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2019

Air minum layak adalah air minum yang memenuhi 4 kriteria diantaranya; Kualitas air sesuai dengan standar air minum, Kuantitas yang mengacu pada standar penyediaan yaitu 60 liter/hari/orang, Kontinuitas atau tersedia secara terus menerus, serta Keterjangkauan yaitu akses dan harga terjangkau.

10) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak perkotaan dan perdesaan provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pencapaian sebesar 87,81 persen pada tahun 2019, namun pencapaian akses ini masih bertumpu pada masyarakat perkotaan yang terlayani oleh PDAM. Sedangkan pemenuhan akses air minum layak di perdesaan masih belum optimal, dikarenakan sumber air dan pengaliran yang digunakan masyarakat khususnya di area terpencil dan pulau-pulau masih belum layak, belum terjangkau serta belum menggunakan jaringan perpipaan. Selain itu, pengelolaan sumber air baku belum maksimal untuk menjamin penyediaan dan penyaluran air baku sesuai standar kebutuhan.

Target *universal access* pada tahun 2030 adalah mencapai akses universal dan merata kepada air minum aman dan terjangkau bagi semua. Proporsi penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahun dengan capaian pada tahun 2019 sebanyak 7.765.741 jiwa atau sebesar 87,73 persen dari penduduk Sulawesi Selatan. Capaian ini mengindikasikan bahwa pemenuhan akses air minum layak masih membutuhkan upaya yang maksimal, khususnya pada masyarakat di perdesaan karena masyarakat di perkotaan sebagian besar telah terlayani oleh PDAM.

**Tabel II.108.
Proporsi Penduduk Akses Berkelanjutan
Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jiwa	5.669.766	6.194.207	6.497.004	7.668.636	7.765.741
Jumlah Penduduk Seluruhnya	Jiwa	8.520.304	8.606.342	8.690.294	8.776.888	8.851.240
Proporsi Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	66,54	71,97	74,76	87,42	87,73

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2020

11) Persentase Areal Kawasan Kumuh

Areal kawasan kumuh di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 seluas 4.073,92 Hektar yang didasarkan pada surat keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan luas areal kawasan kumuh di masing-masing wilayah, hal ini dapat ditunjukkan dengan persentase luas areal kawasan kumuh terhadap luas wilayah perkotaan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang signifikan dari 0,049 persen pada tahun 2018 menjadi 0,158 persen pada Tahun 2019. Peningkatan persentase luas areal kawasan kumuh menunjukkan upaya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota belum dilakukan secara optimal, sehingga memicu terjadinya peningkatan luas areal kawasan kumuh kawasan perkotaan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

**Tabel II.109.
Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Luas Kawasan Kumuh	Hektar	2.552,51	2.517,86	1.729,35	1.267,86	4.073,92
Luas Kawasan Perkotaan	Hektar	2.582.120	2.582.120	2.582.120	2.582.120	2.582.120
Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh	%	0,099	0,098	0,067	0,049	0,158

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2020

12) Tersediannya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka jumlah sampah juga akan mengalami peningkatan yang akan mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah, khususnya sampah di perkotaan. Pengelolaan sampah di kawasan perkotaan tahun 2019, menunjukkan adanya penurunan kinerja pengurangan sampah yang tergambar dari meningkatnya volume sampah dari 77.748 ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 80.850 ton pada tahun 2019, namun terjadi peningkatan volume sampah yang tertangani melalui prinsip 3R dari 1.095 ton menurun menjadi 3.187 ton.

Memperhatikan persentase sampah di kawasan perkotaan yang tertangani melalui fasilitas pengurangan sampah dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai Tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu dari 1,41 persen menjadi 7,70 persen. Namun, pada tahun 2019 terjadi pengurangan fasilitas dalam penanganan sampah sebesar 3,94 persen. Kinerja pengurangan sampah sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah serta optimalisasi implementasi kebijakan dan strategi daerah terkait pengelolaan sampah.

**Tabel II.110.
Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	Ton	1.095	1.460	4.015	6.163	3.187
Total volume sampah	Ton	77.748	78.533	79.297	80.075	80.850
Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	1,41	1,86	5,06	7,70	3,94

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, serta Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tahun 2019; dan * Data sementara, diolah BAPPELITBANGDA, Tahun 2020

13) Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 2,58 pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,53 pada tahun 2019. Bertambahnya jumlah rumah ibadah setiap tahunnya ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan rasio tempat ibadah per satuan penduduk, dikarenakan laju pertumbuhan penduduk lebih besar daripada laju peningkatan rasio tempat ibadah di

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Sulawesi Selatan. Namun rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Sulawesi Selatan tahun 2019 sebesar 2,53 menunjukkan bahwa capaian rasio tempat ibadah per satuan penduduk telah mencapai 120,48 persen dari target tahun 2019 sebesar 2,10.

**Tabel II.111.
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah tempat ibadah	Unit	17.785	17.086	18.129	19.533	22.333
Jumlah penduduk	Jiwa	8.520.345	8.606.375	8.690.294	8.776.888	8.819.500
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Unit/ Jiwa	2,09	1,98	2,09	2,58	2,53

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

* Data sementara, diolah BAPPELITBANGDA, Tahun 2020

14) Luasan RTH publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan (RTH) sebesar 30% yang terdiri dari RTH publik sebesar 20 persen dan RTH privat sebesar 10 persen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Akan tetapi sampai saat ini, pemenuhan kebutuhan RTH sebagaimana diamanatkan dalam RTRW Kota dan RTRW Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan belum tercapai, khususnya pada kabupaten/kota yang sudah pesat pembangunannya, dikarenakan hampir semua lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH pada RTRW kabupaten/kota merupakan milik masyarakat yang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mewujudkannya menjadi RTH. Memperhatikan hal tersebut, maka kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diprioritaskan pada upaya menjaga keberadaan RTH yang telah terbangun, agar tidak dialihfungsikan penggunaannya, yang tergambar pada target persentase pemenuhan RTH public sebesar 25 persen dari luas kawasan perkotaan pada tahun 2019 yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2019 tercapai sebesar 25 persen.

**Tabel II.112.
Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen dari luas wilayah Kota/Kawasan perkotaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan perkotaan	%	24	25	25	25	25

Sumber: Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

15) Rasio Bangunan ber - IMB per satuan Bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung merupakan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan yakni dari 25 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 48 persen pada tahun 2019. Berdasarkan data

tersebut menandakan bahwa izin mendirikan bangunan sudah mengikuti rencana tata ruang, namun belum maksimal.

**Tabel II.113.
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	%	25	29	35	38	48

Sumber: sipd.kemendagri.go.id/ proyeksi bappelitbangda tahun 2020

16) Rasio Luas Kawasan Tertutup Pohon Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Pemantauan terhadap kawasan tertutup pepohonan merupakan upaya pemantauan terhadap sumber daya hutan yang dilakukan oleh Pemerintah yang dilaksanakan dengan menyusun peta penutupan lahan melalui penafsiran citra satelit dan survey udara. Hasil penafsiran penutupan lahan tersebut menunjukkan laju deforestasi di Sulawesi Selatan sebesar 0,003 selama 5 (lima) tahun terakhir. Menurunnya rasio luas kawasan tertutup pepohonan dari 40,01 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 34,27 persen dikarenakan adanya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan pada beberapa wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa target pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjaga rasio luasan kawasan hutan sebesar 46 persen pada tahun 2019 tidak tercapai.

**Tabel II.114.
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pohon
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pohon Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan	%	35	38	46	40,01	34,27

Sumber: * Data sementara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

17) Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap rencana tata ruang didasarkan pada persentase implementasi indikasi program pembangunan yang tercantum dalam rencana tata ruang yang mengindikasikan kesesuaian antara rencana tata ruang dengan pelaksanaan pembangunan. Memperhatikan implementasi indikasi program dalam RTRWP Sulawesi Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029, maka dapat digambarkan bahwa ketaatan terhadap rencana tata ruang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebesar 65 persen kemudian tahun 2019 mencapai 66 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan pembangunan dengan mengacu pada rencana tata ruang.

**Tabel II.115.
Ketaatan terhadap RTRW
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ketaatan Terhadap RTRW	%	65	65	65	65*	66*

Sumber: * Data sementara Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni dibandingkan jumlah penduduk, kategori rumah layak huni di Sulawesi Selatan Tahun 2019 mengacu pada jenis lantai rumah yang bukan tanah yang persentasenya sebesar 99,04%, karena di Sulawesi Selatan masih terdapat rumah dengan lantai berupa tanah yang jumlahnya pada Tahun 2019 sebanyak 19,711 rumah. Berdasarkan data tersebut, maka besaran rasio rumah layak huni di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebesar 0,228 yang menunjukkan adanya peningkatan rasio dari 0,195 pada tahun 2018. Pencapaian rasio rumah layak huni menunjukkan bahwa target rasio rumah layak huni melampaui target sebesar 0,195 dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,196.

**Tabel II.116.
Rasio Rumah Layak Huni
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Rumah Layak Huni	0,192	0,193	0,194	0,195	0,228

Sumber: * Data sementara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, diolah tahun 2020

2. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 mengamanatkan penanganan kawasan kumuh di Sulawesi Selatan melalui program penataan permukiman dengan melakukan pembinaan penanganan kawasan kumuh kabupaten/kota. Pada tahun 2019 ditargetkan penataan kawasan kumuh sebesar 49 persen pada kawasan kumuh yang merupakan tanggungjawab pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yaitu kawasan kumuh yang luasannya 10 Ha sampai dengan 15 Ha.

**Tabel II.117.
Lingkungan Permukiman Kumuh
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0,099	0,098	0,048	0,048	0,009

Sumber: * Data sementara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, diolah tahun 2020

3. Persentase Luasan Kawasan Kumuh Tertangani

Penanganan kawasan kumuh di Sulawesi Selatan dilakukan pada kawasan kumuh yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten/kota yang pada tahun 2019 telah

menangani kawasan kumuh seluas 261,05 Hektar, atau sebesar 6,41 persen dari luasan kawasan kumuh di Sulawesi Selatan yang luasnya mencapai 4.073,92 Hektar pada tahun 2019. Peningkatan luasan kawasan kumuh yang sangat besar mengakibatkan rendahnya kinerja penanganan kawasan kumuh, sehingga target penanganan kawasan kumuh sebesar 42,25 pada tahun 2019 tidak tercapai.

Memperhatikan hasil pendataan penanganan kawasan kumuh di kabupaten/kota pada tahun 2019, maka terdapat pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 261,05 Hektar atau sebesar 78,71 persen dari target luasan permukiman perkotaan yang mengindikasikan bahwa target penanganan kawasan kumuh belum tercapai. Capaian ini menunjukkan kinerja adanya peningkatan kinerja penanganan lingkungan permukiman kumuh di Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan terlampauinya target persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditetapkan sebesar 0,043 persen pada tahun 2019. Namun capaian ini menunjukkan adanya kesenjangan penanganan kawasan kumuh antara perkotaan dan perdesaan yang ditandai dengan besarnya persentase kawasan permukiman di perkotaan sebesar 0,158 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan, masih rendahnya Perhatian pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan melakukan upaya pencegahan permukiman kumuh.

**Tabel II.118.
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Luas Permukiman Kumuh Tertangani	Ha	208,33	374,33	538,76	461,49	261,05
Luas Permukiman Kumuh	Ha	2.552,51	2.517,86	1.517,86	1.267,86	4.073,92
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani	%	8,16	14,87	35,49	36,40	6,41

Sumber: * Data sementara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, diolah tahun 2020

Penanganan lingkungan permukiman kumuh di Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 yang menetapkan aspek dan kriteria kekumuhan. Berdasarkan pendataan kawasan kumuh yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/kota dan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah, pada tahun 2019 terdapat 4.073,92 Hektar kawasan kumuh di Sulawesi Selatan atau sebesar 0,009 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan.

**Tabel II.119.
Luas Kawasan Kumuh Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019**

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Lokasi	Tahun Penetapan SK. Kawasan Kumuh
1	Kepulauan Selayar	128,12	16	2018
2	Bulukumba	118,37	40	2019
3	Bantaeng	171,94	11	2019
4	Jeneponto	365,92	59	2016
5	Takalar	110,65	10	2019
6	Gowa	231,03	74	2016

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Lokasi	Tahun Penetapan SK. Kawasan Kumuh
7	Sinjai	115,34	21	2019
8	Maros	101,30	11	2019
9	Pangkajene Kepulauan	60,7	24	2016
10	Barru	31,04	6	2014
11	Bone	219,05	17	2018
12	Soppeng	97,85	8	2019
13	Wajo	256,79	28	2019
14	Sidenreng Rappang	105,77	11	2019
15	Pinrang	108,25	11	2019
16	Enrekang	38,47	10	2014
17	Luwu	117,45	10	2014
18	Tana Toraja	14,25	9	2014
19	Luwu Utara	251,35	114	2017
20	Luwu Timur	114,90	2	2019
21	Toraja Utara	143,50	16	2018
22	Makassar	650,74	127	2018
23	Parepare	94,77	30	2018
24	Palopo	426,37	47	2019
Sulawesi Selatan		4.073,92	712	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2020

2.3.1.5 Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan Petugas perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perlindungan masyarakat guna mengurangi serta ikut memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tabel dibawah memperlihatkan bahwa cakupan perlindungan masyarakat masih berada pada angka 32,84 persen di Tahun 2015 namun terus meningkat hingga mencapai angka 40,27 persen pada tahun 2019.

**Tabel II.120.
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	32,84	34,04	34,54	34,94	40,27

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan, tahun 2020

2) Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan(K3)

Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 91 persen di tahun 2015 menjadi 95 persen ditahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Sulawesi Selatan sudah sangat baik.

**Tabel II.121.
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan(K3)
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan. (K3).	%	91	92	93	94	95

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan, tahun 2020

3) Penegakan PERDA

Tingkat persentase Penegakan PERDA di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami Peningkatan. Dari tabel dibawah menunjukkan tingkat persentasi penegakan PERDA di tahun 2015 hanya mencapai 35 persen dan mengalami peningkatan di Tahun 2019 menjadi 89 persen. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja di Sulawesi Selatan dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah sudah cukup optimal, namun masih perlu ditingkatkan agar peraturan daerah yang berlaku di taati dan dipatuhi oleh seluruh pelaku pembangunan di Sulawesi Selatan.

**Tabel II.122.
Persentase Penegakan PERDA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penegakan PERDA	%	35	55	75	80	89

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.1.6 Sosial

1) Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pada tahun 2015 jumlah total Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 376.071 jiwa dan yang diberikan bantuan sosial hanya 101.154 jiwa. Sementara pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari tahun 2015, yaitu jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial sebanyak 287.692 jiwa dari total jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 503.755 jiwa. Yang menerima bantuan sosial pada tahun 2019 ini hanya 57,11 persen dari total keseluruhan jumlah PMKS. Adapun permasalahan yang sering dihadapi di lapangan yaitu masih kurangnya petugas dalam melakukan pendataan dimana petugas tersebut harus melakukan verifikasi dan validasi data 2 kali dalam 1 tahun di setiap kab/kota.

**Tabel II.123.
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan	Orang/ Jiwa	101.154	187.972	185.514	148.711	287.692
Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang/ Jiwa	376.071	456.381	584.240	355.136	503.755

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	26,90	41,18	31,75	70,48	57,11

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2) Persentase PMKS yang Tertangani

Pada tahun 2015 jumlah PMKS sebanyak 376.071 jiwa dan yang tertangani sebanyak 104.542 jiwa atau 27,8 persen dari jumlah PMKS. Tahun 2016 jumlah PMKS sebanyak 456.381 jiwa dan yang tertangani sebanyak 216.431 jiwa atau 47,42. Tahun 2017 jumlah PMKS sebanyak 584.240 jiwa dan yang PMKS tertangani sebanyak 204.428 atau 35,00 persen. Kemudian pada tahun 2018 jumlah PMKS menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 503.847 jiwa, sementara PMKS yang tertangani meningkat sebanyak 357.226 atau 70,89 persen dibanding tahun lalu. Dan pada tahun 2019 jumlah PMKS kembali berkurang menjadi 503.755 jiwa, demikian pula PMKS yang tertangani menurun dibanding tahun 2018 yaitu hanya 288.535 jiwa atau 57,27 persen. Hal ini disebabkan oleh pendataan yang belum lengkap, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak dapat direalisasikan pada tahun berkenaan.

**Tabel II.124.
Persentase PMKS yang Tertangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PMKS yang Tertangani	Jiwa	104.542	216.431	204.428	357.226	288.535
Jumlah PMKS	Jiwa	376.071	456.381	584.240	503.847	503.755
Persentase PMKS yang Tertangani	%	27,8	47,42	35,00	70,89	57,27

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

3) Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Persentase panti sosial dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena seluruh panti yang ada telah memiliki paling minimum sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Kendala yang sering dihadapi yaitu, masih kurangnya jumlah peralatan dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan sehingga masih perlu adanya penambahan unit alat kesehatan dan rehabilitasi tempat pelayanan kesehatan.

**Tabel II.125.
Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

4) Persentase WKBSM yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat di Sulawesi Selatan yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2015 sebanyak 361 unit, namun yang memiliki sarana dan prasarana hanya sebanyak 200 unit atau 55,40 persen. Kinerja penanganan sosial berbasis wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat menunjukkan adanya penurunan dalam penanganan dikarenakan penyediaan sarana dan prasarana bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah.

**Tabel II.126.
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	200	250	350	350	350
Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	361	383	573	673	773
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	55,40	65,27	61,08	52,00	45,28

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

5) Penanganan Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial

Penerima bantuan sosial korban bencana selama tanggap darurat, dalam hal ini bantuan logistik sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun sebanyak 31.908 jiwa dari Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun sebanyak 45.422 jiwa atau hanya 70,25 persen. Dan pada tahun 2019 jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun meningkat menjadi 45.847 jiwa dari Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun yaitu 72.821 jiwa. Namun jika dibandingkan persentase antara yang menerima dengan yang seharusnya menerima, maka terjadi penurunan dari tahun 2015 sebesar 70,25 persen ke tahun 2019 menjadi 62,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemberian bantuan sosial bagi korban bencanadi Sulawesi Selatan belum optimal.

**Tabel II.127.
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	31.908	31.998	30.925	43.755	45.847

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	45.422	45.611	37.645	65.632	72.821
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	70,25	70,15	82,15	66,67	62,96

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

6) Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat di Sulawesi Selatan pada Tahun 2015 sebanyak 8.622 jiwa atau 94,91 persen. Namun laju pertambahan jumlah korban bencana belum dapat diimbangi oleh kinerja penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat sehingga persentase korban bencana yang dievakuasi menunjukkan adanya trend penurunan dari 94,91 persen pada tahun 2015 menjadi 66,66 persen pada tahun 2019.

**Tabel II.128.
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	8.622	6.832	6.198	8.751	9.709
Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	9.084	8.522	7.529	13.126	14.564
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	94,91	80,17	82,32	66,67	66,66

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

7) Penanganan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial

Pencapaian target indikator jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun di Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai yang tetap yaitu 1.135 jiwa, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 75 jiwa dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 1.125 jiwa. Sedangkan untuk indikator jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun yaitu sebesar 17.668 jiwa pada tahun 2015 dan terjadi peningkatan pada tahun 2019 menjadi 19.013 jiwa. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami penurunan, dari 6,42 persen di tahun 2015 menjadi 5,92 persen di tahun 2019.

**Tabel II.129.
Persentase Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	Jiwa	1.135	1.135	1.135	75	1125
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	Jiwa	17.668	18.124	17.668	19.013	19.013
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	6,42	6,26	6,42	0,39	5,92

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1 Ketenagakerjaan

1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun

Angka sengketa pengusaha dengan pekerja dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2018 mengalami persentase peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar 18,90 persen dengan jumlah perusahaan sebesar 12.487 perusahaan dan jumlah sengketa sebanyak 236 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 29,40 persen dengan jumlah perusahaan 14.828 perusahaan dan jumlah sengketa sebanyak 261 kasus. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan angka sengketa pengusaha dengan pekerja menjadi 17,22 persen, walaupun jumlah perusahaan bertambah menjadi 15.157 perusahaan.

**Tabel II.130.
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per tahun
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Sengketa PengusahaPekerja	Kasus	236	245	279	436	261
Jumlah Perusahaan	Perusahaan	12.487	12.487	12.487	14.828	15.157
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	18,90	19,62	22,34	29,40	17,22

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama pada tahun 2015 sebesar 206 dari jumlah kasus yang tercatat sebanyak 235 kasus atau besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebesar 87,66 persen, sedang pada tahun 2016 sampai tahun 2017 jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama telah mencapai 100 persen. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan terkait besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama dibanding tahun 2018 yaitu 33,33 persen dari 61,70 persen.

**Tabel II.131.
Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	87,66	100	100	61,70	33,33

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

3. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan berfluktuasi dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Jika dibandingkan besarnya setiap tahun berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, makapada tahun 2015 besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan mencapai 61,67 persen, dan pada tahun 2016 turun menjadi 45,59 persen, kemudian pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 51,20 persen, selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 4,36 persen.

**Tabel II.132.
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	%	61,67	45,59	51,20	3,19	4,36

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

4. Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan perlindungan merupakan perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan K3 terhadap jumlah perusahaan. Keselamatan dan perlindungan K3 dari tahun 2015-2019 rata rata mencapai realisasisebesar 100%. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 4.573 Perusahaan yang telah menerapkan SMK3 dari jumlah perusahaan Wajib Laport Ketenagakerjaan sejumlah 15.157 Perusahaan.

**Tabel II.133.
Keselamatan dan Perlindungan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Keselamatan dan Perlindungan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

5. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Persentase Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Jamsostek cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 sebesar 71,16 persen, kemudian menurun menjadi 63,55 persen pada tahun 2019, meskipun pernah mengalami kenaikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 75,56 persen.

**Tabel II.134.
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun					Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	71,16	73,56	71,23	64,51	63,55	68,80

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah terjadi selama 5 tahun terakhir, akibat ditetapkannya Upah Minimum setiap tahunnya. Hal ini berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah tidak pernah terjadi mencapai 100 persen. Penetapan standar Upah Minimum setiap tahunnya sangat penting karena kemampuan perusahaan untuk membayar upah pegawai tidak semua sama dan juga untuk menghindari terjadinya Perselisihan Buruh dan Pengusaha.

**Tabel II.135.
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Hasil pemeriksaan di Perusahaan selama kurun waktu 2015 sampai 2019 berfluktuatif, dimana pada tahun 2015 sebesar 25,19 persen dan pada tahun 2018 meningkat kembali cukup tinggi sebesar 35,34 persen. Jumlah besaran pemeriksaan diperusahaan sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 5.240 perusahaan dari total jumlah perusahaan wajib lapor ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 adalah sebanyak 15.157 perusahaan.

**Tabel II.136.
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Besaran Pemeriksaaan Perusahaan	%	25,19	28,83	25,48	35,34	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Besaran pengujian peralatan di Perusahaan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 pengujian peralatan sebesar 4,35 persen, dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 6,92 persen. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 6,74 persen. Jumlah besaran pengujian peralatan di perusahaan

sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 1.022 perusahaan dari total jumlah perusahaan yang telah terdaftar dan wajib lapor ketenagakerjaan sebanyak 15.157 perusahaan.

**Tabel II.137.
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	4,35	4,50	5,00	6,92	6,74

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

9. Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2015, 2016, dan tahun 2018 telah mencapai angka 100 persen, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 70 persen.

**Tabel II.138.
Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	100	100	80,49	100	70,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

10. Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2018 mencapai 100 persen, namun pada tahun 2019 menurun menjadi 98,75 persen.

**Tabel II.139.
Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	100	100	66,67	100	98,75

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

11. Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja

Selama periode tahun 2015 sampai tahun 2019, penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan didominasi oleh sektor pertanian walaupun seiring dengan waktu menunjukkan pola cenderung menurun. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam usia kerja tahun 2019 sebanyak 6.407.285 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang tergolong angkatan kerja mencapai 4.030.400 orang dengan komposisi 3.830.096 adalah penduduk yang bekerja bertambah 55.172 orang sejak Agustus 2018 dan 200.304 orang penduduk yang menganggur. Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja pada tahun 2019 sebesar 95,03 persen. Dapat digambarkan bahwa, struktur

penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2019 di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 35,96 persen (menyerap pekerja sejumlah 1.377.408 orang); Perdagangan sebesar 18,27 persen (menyerap pekerja sejumlah 1.377.408 orang); dan Industri Pengolahan sebesar 8,93 persen.

**Tabel II.140.
Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	94,05	95,2	94,39	94,65	95,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

12. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas

Rasio Kesempatan Kerja adalah merupakan prosentase Penduduk Yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja. Pada tahun 2015 hingga 2019 persentase penduduk yang bekerja terhadap total jumlah penduduk usia kerja cenderung mengalami fluktuasi. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun keatas pada tahun 2015 sebesar 57,31 persen, pada tahun 2016 meningkat sebesar 2,59 persen menjadi 59,90 persen, dan mengalami penurunan sebesar 2,33 persen menjadi 57,57 persen pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebesar 2,08 persen menjadi 59,65 persen, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan lagi sebesar 0,13 persen menjadi 59,78 persen.

**Tabel II.141.
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk usia 15 Tahun ke atas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk usia 15 Tahun keatas	%	57,31	59,90	57,57	59,65	59,78

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

13. Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Keatas

Persentase Angkatan Kerja untuk pendidikan menengah atas pada tahun 2015 mencapai 41,52 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 45,81 persen, dengan rata-rata persentase angkatan kerja berpendidikan menengah keatas sebesar 43 persen.

**Tabel II.142.
Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Keatas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun					Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah keatas	%	41,52	40,41	41,98	43,32	45,81	43

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

14. Persentase Tenaga Kerja dan Pekerja Bebas Keluarga

Dalam setahun terakhir (Agustus 2018 hingga Agustus 2019), persentase penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai meningkat dari 33,44 persen pada Agustus 2018 menjadi 36,38 persen pada Agustus 2019. Peningkatan juga terjadi pada pekerja yang berusaha sendiri dari 20,67 persen menjadi 22,17 persen di tahun yang sama. Sebaliknya penduduk yang berusaha dibantu pekerja keluarga/tidak dibayar mengalami penurunan dalam setahun terakhir dari 15,86 persen menjadi 14,68 persen demikian pula berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar menurun dari 23,22 persen ke 20,91 persen. Secara sederhana kegiatan formal dan informal diidentifikasi melalui status pekerjaan komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas pada sektor pertanian, pekerja bebas pada sektor non pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar dan sisanya merupakan pekerja formal.

Sementara persentase tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total penduduk dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, persentase tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga di Sulawesi Selatan sebesar 36,86 persen, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 36,85 persen. Namun, jika dibandingkan dengan persentase pada tahun 2018 yang sebesar 36,52 persen, maka capaian pada tahun 2019 meningkat.

**Tabel II.143.
Persentase Tenaga Kerja dan Pekerja Bebas Keluarga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja	%	36,86	35,65	37,26	36,52	36,85

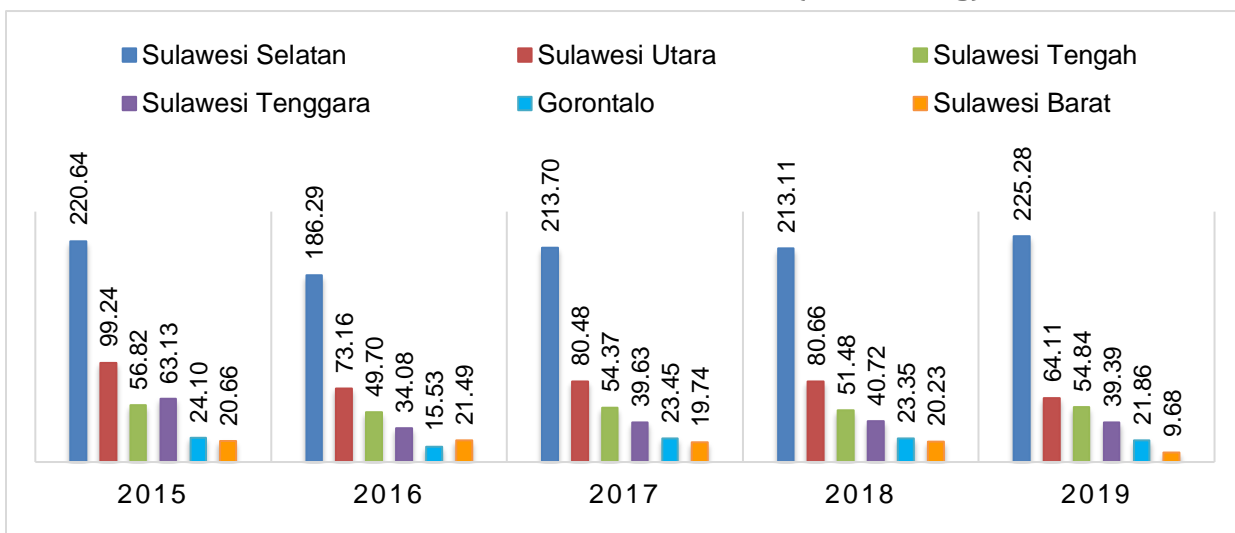
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

15. Jumlah Penganggur

Jumlah penganggur di Sulawesi Selatan berdasarkan angka terbanyak jumlahnya di regional Pulau Sulawesi, namun hal ini diakibatkan oleh besarnya jumlah penduduk Sulawesi Selatan dibanding provinsi lain di pulau Sulawesi yaitu 8.851.240. jika dibandingkan secara persentase dengan jumlah angkatan kerja maka besarnya 4,97 persen terbesar kedua setelah Sulawesi Utara. Memperhatikan tren penambahan jumlah penganggur di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, sehingga dibutuhkan berbagai kebijakan khususnya terkait kesesuaian antara pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dengan angkatan kerja.

Grafik II.29.

Perkembangan Jumlah Penganggur Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019 (Ribu Orang)

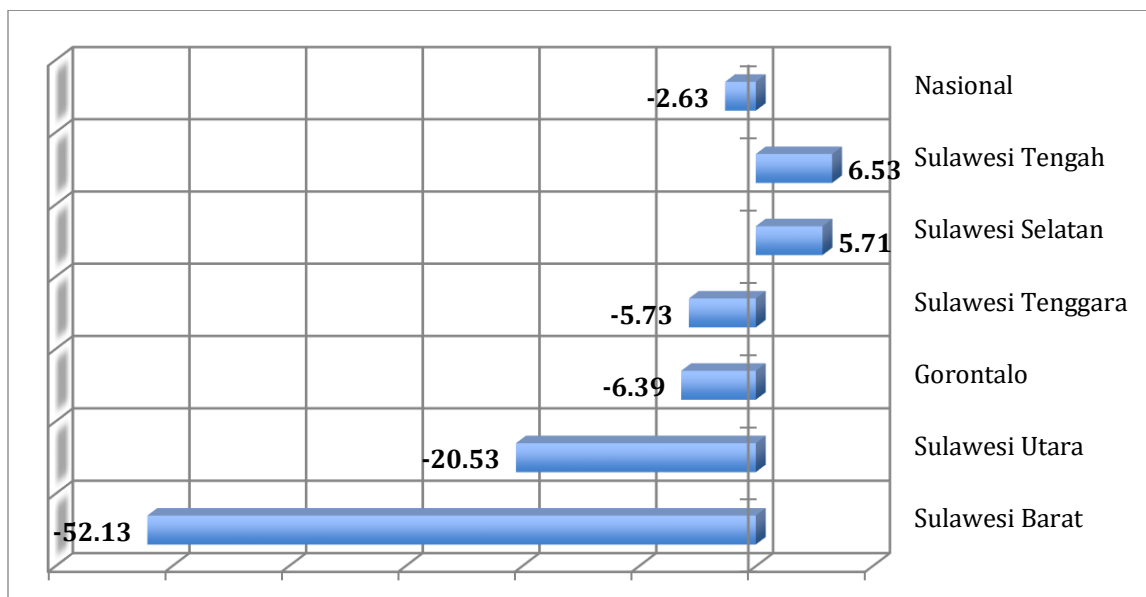


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Memperhatikan perubahan pertumbuhan jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan, maka diperoleh gambaran bahwa upaya penanganan jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan belum menunjukkan keberhasilan yang diindikasikan dengan perubahan pertumbuhan jumlah penganggur tahun 2019 sebesar 5,71 persen. Capaian ini jauh di bawah nasional dan 4 (empat) provinsi lainnya di Pulau Sulawesi yang berhasil menurunkan jumlah pengangguran di daerahnya masing-masing. Untuk itu perlu dilakukan adanya kebijakan dan upaya yang tepat guna mengatasi angka pengangguran di Sulawesi Selatan, terlebih lagi dengan adanya dampak pandemi Covid-19 yang akan mempengaruhi bertambahnya jumlah pengangguran.

Grafik II.30.

Perbandingan Perubahan Pertumbuhan Jumlah Pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Provinsi Lainnya di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Selama tahun 2015 sampai tahun 2019, partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (eksekutif) di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2015 sebanyak 48,41 persen dan tahun 2019 partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mencapai 53,10 persen.

**Tabel II.144.
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	48,41	48,91	49,66	51,25	53,10

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2019

2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Persentase keterwakilan perempuan di parlemen dalam 3 (tiga) periode Pemilu, yaitu periode 2009-2014, periode 2015-2018 dan periode 2019-2024 di Sulawesi Selatan cukup bervariasi, dimana perempuan yang duduk di lembaga legislative periode 2009-2014 sebanyak 19 persen, kemudian pada periode 2015-2018 ditargetkan sebanyak 21 persen namun sampai dengan pemilihan dan pengambilan sumpah anggota dewan terealisasi sebanyak 17 persen, kemudian pada periode 2019-2024 jumlah anggota dewan perempuan meningkat menjadi 19 persen dari target 22 persen. Meskipun belum mencapai target pemerintah Daerah dan kuota 30 persen, namun pencapaian perempuan dalam bidang politik di Sulawesi Selatan sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

**Tabel II.145.
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD	%	17	17	17	17	19

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2019

3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu tahun 2015 sebesar 67 persen meningkat menjadi 71 persen pada tahun 2018, hal ini disebabkan karena akses yang dibuka untuk perempuan bekerja seperti di perusahaan atau pabrik sudah terbuka secara luas. Dan pada tahun 2019 Partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami penurunan menjadi 69 persen yang salah satu faktor yang berpengaruh adalah adanya efisiensi dilingkup perusahaan yang merupakan dampak dari ekonomi global/pasar bebas.

**Tabel II.146.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	67	69	71	71	69

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2019

4. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Provinsi Sulawesi Selatan cukup banyak memiliki tenaga kerja dibawah umur yang umumnya bekerja di sector informal, yang rentan akan tindakan kekerasan, pelecehan seksual, seks bebas dan narkoba. Dari jumlah tenaga informal dan formal, pekerja anak mengalami peningkatan yg cukup signifikan dari tahun-tahun dan pada tahun 2019 mencapai 0,09 persen atau jika dirata-ratakan pekerja anak dibawah umur cenderung meningkat 0,10 persen pertahun.

**Tabel II.147.
Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Usia	%	0,15	0,18	0,40	0,05	0,09

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Sulawesi Selatan peningkatannya berfluktuasi yaitu pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 47,47 persen menjadi 43,76 persen atau turun kurang lebih 7,8 persen dari tahun sebelumnya, atau dengan kata lain partisipasi Angkatan Kerja Perempuan pada tahun 2017 sebanyak 43,76 persen saja dari penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang siap dalam dunia kerja. Tahun 2018 sampai dengan 2019 persentase partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sampai pada tahun 2019 sebanyak 50,32 persen atau naik kurang lebih 12,88 persen dari dua tahun tahun sebelumnya.

**Tabel II.148.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	44,31	47,47	43,76	50,23	50,32

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Layanan Terpadu

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, mengamanatkan perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan amanat tersebut dengan capaian sebesar 100 persen sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan terus berkomitmen untuk memenuhinya.

Selain layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial, perempuan dan anak korban kekerasan juga berhak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum berupa penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cakupan penegakan hukum di provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai 100 persen, melalui penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik kasus ringan dan berat mulai dari proses penyidikan pada unit perlindungan anak dan perempuan di Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort dan Kepolisian Kota Besar sampai dengan putusan pengadilan

yang didampingi oleh oleh petugas dari Pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

**Tabel II.149.
Cakupan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	58	57	54	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2019

7. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA) Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang kinerjanya pada tahun 2019 baru mencapai 30 persen dikarenakan kondisi keluarga dan kesiapan korban kekerasan perempuan dan anak yang mempengaruhi kinerja pemulangan korban kekerasan. Demikian halnya dengan layanan reintegrasi sosial, yang merupakan upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga dengan memberikan berbagai layanan untuk mempersiapkan perempuan dan anak korban kekerasan melalui pemberian layanan terapi oleh konselor, dan pelatihan keterampilan termasuk pemenuhan spiritual klien sampai kondisi korban siap untuk pulang dan keluarga mau menerima korban. Persentase layanan reintegrasi sosial yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi Sulsel sampai tahun 2019 sebanyak 28 persen ke wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke luar Provinsi Sulawesi Selatan antara lain ke Jakarta, Timika, dan Ambon.

**Tabel II.150.
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Korban Kekerasan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	27	26	28	28	28

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2019

8. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi dan Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Rasio APM perempuan dan laki laki pada berbagai jenjang pendidikan di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa terjadi kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

**Tabel II.151.
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	%	101,55	100,75	100,1	97,85	101
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP	%	106,59	105,33	104,1	75,08	105,4
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	%	102,95	101,86	110,6	110,6	110,6
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi	%	110,02	110,00	103,1	103,3	105,2
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	%	100,57	100,49	100,15	100,28	100,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

2.3.2.3 Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Persentase ketersediaan pangan utama yaitu beras, jagung dan kedelai Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2015 Ketersediaan beras Sulawesi Selatan sebesar 354 persen meningkat menjadi 388,24 persen pada tahun 2018 namun, mengalami penurunan menjadi 363,76 persen pada tahun 2019. Ketersediaan jagung Sulawesi Selatan cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2015 ketersediaan jagung sebesar 24,33 persen dan menjadi 47,88 persen di tahun 2019. Capaian ketersediaan beras dan jagung sangat berbeda dengan ketersediaan kedelai yang mana hanya bertumbuh 1,4 persen dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019.

**Tabel II.152.
Ketersediaan Pangan Utama, Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita dan
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Komoditas	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan Beras	%	352	373,6	384	388,24	363,76
Ketersediaan Jagung	%	24,33	34,02	38,89	44,33	47,88
Ketersediaan Kedelai	%	23,56	23,71	20,88	22,55	24,96

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulsel, tahun 2020

2. Ketersediaan Energi, Protein Perkapita, Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Kondisi Ketersediaan energi dan protein perkapita provinsi sulawesi selatan pada tahun 2015 masing-masing sebesar 5.544 kkal/kapita/hari dan 154 gram/kapita/hari dan menurun masing-masing menjadi 3879 kkal/kapita/hari dan 112,67 gram/kapita/hari pada tahun 2019. Sedangkan untuk Persentase pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan tahun 2015 sebesar 77,27 persen dan mencapai 100 persen pada tahun 2017, sampai tahun 2019.

**Tabel II.153.
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan Energi Perkapita	kcal/ kapita/ hari	5.544	5.862	3.906	3.572	3.879
Ketersediaan Protein Perkapita	kcal/ kapita/ hari	154,52	168,34	125,41	103,75	112,67
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	77,27	85,13	100	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulsel, tahun 2020

3. Sebaran Kerawanan Pangan dan Gizi Menurut Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan status ketahanan pangan di Sulawesi Selatan yang ditunjukkan bahwa terdapat 93 desa/kelurahan atau sebesar 3,05 persen yang terindikasi Sangat Rentan Terhadap Kerawanan Pangan, 272 desa/kelurahan atau sebesar 8,91 persen yang terindikasi Rentan, 392 desa/kelurahan atau sebesar 12,82 persen yang terindikasi Agak Rentan dan 2.297 atau 75,21 persen tahan terhadap kerawanan pangan.

**Tabel II.154.
Sebaran Kerawanan Pangan dan Gizi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan /Lembang	Jumlah Desa			
				Sangat Rentan	Rentan	Agak Rentan	Tahan Pangan
1	Kep. Selayar	11	88	6	9	7	66
2	Bulukumba	10	136	3	1	19	113
3	Bantaeng	8	67	2	9	14	42
4	Jeneponto	11	113	4	18	36	55
5	Takalar	9	100	2	7	15	76
6	Gowa	18	167	1	16	25	125
7	Sinjai	9	80	1	3	6	70
8	Bone	27	372	6	18	36	312
9	Maros	14	103	3	10	11	79
10	Pangkep	13	103	3	8	25	67
11	Barru	7	55	0	5	14	36
12	Soppeng	8	70	2	4	5	59
13	Wajo	14	190	2	24	15	149
14	Sidrap	11	106	3	7	7	89
15	Pinrang	12	108	18	33	33	24
16	Enrekang	12	129	0	19	16	94
17	Luwu	22	227	6	31	24	166

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan /Lembang	Jumlah Desa			
				Sangat Rentan	Rentan	Agak Rentan	Tahan Pangan
18	Tana Toraja	19	159	3	17	26	113
19	Luwu Utara	12	179	10	8	13	148
20	Luwu Timur	11	128	4	5	8	111
21	Toraja Utara	21	151	4	8	25	114
22	Makassar	15	153	6	5	6	136
23	Pare-Pare	9	22	1	3	0	18
24	Palopo	4	48	3	4	6	35
Sulawesi Selatan		307	3.054	93	272	392	2.297

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulsel, tahun 2020

2.3.2.4 Pertanahan

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pengelolaan pertanahan sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar yang difokuskan pada peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan sertifikasi tanah dan penyelesaian kasus pertanahan. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, luas tanah bersertifikat di Sulawesi Selatan Tahun 2019 sebesar 2.123.226 Hektar yang terdiri dari hak milik seluas 1.935.698 Hektar, hak guna usaha seluas 113 Hektar, hak guna bangunan seluas 169.545 Hektar, hak pakai seluas 16.749 hektar, hak pengelolaan seluas 267 hektar dan hak wakaf seluas 854 hektar, sehingga persentase luas lahan yang bersertifikat pada tahun 2019 sebesar 46,62 persen. Sedangkan penyelesaian kasus pertanahan di Sulawesi Selatan tahun 2019 hanya sebesar 29,77 persen yang diindikasikan dari jumlah kasus yang tertangani hanya 142 kasus dari 477 kasus pertanahan.

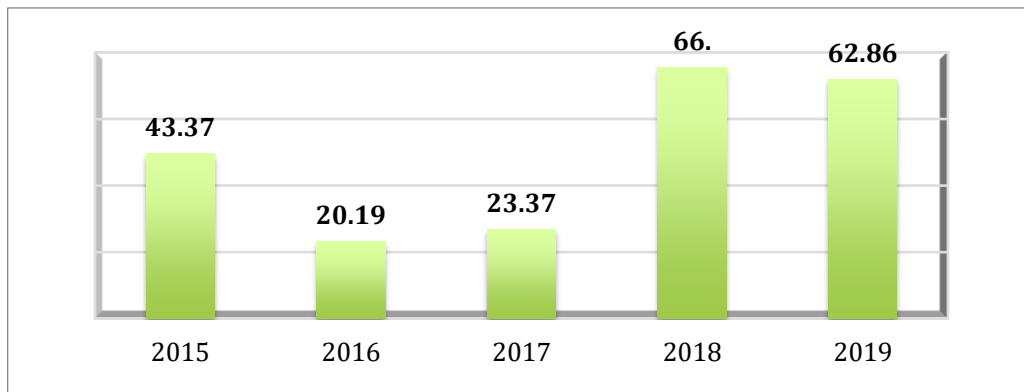
2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup merupakan salah satu sasaran utama dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang pemenuhannya diatur dalam dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dokumen RPPLH Sulawesi Selatan telah disusun sejak tahun 2017 dan telah digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023, sehingga telah terintegrasi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sampai saat ini dokumen RPPLH belum dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan, kinerja pelaksanaan kewenangan tersebut menunjukkan fluktuasi dikarenakan keterbatasan jumlah pengawas PPLH serta sarana dan prasarana pengawasan sehingga kinerja pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH hanya mencapai 62,86 persen dari 75 persen kinerja pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditargetkan pada tahun 2019.

**Grafik II.31.
Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Izin Lingkungan,
Izin PPLH dan PUU LH di Provinsi Sulawesi Selatan,
Tahun 2015-2019**



Sumber : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel 2020

Selain RPPLH, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mewajibkan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Menindaklanjuti amanat tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun dokumen KLHS untuk penyusunan rencana tata ruang yaitu KLHS RZWP3K dan KLHS RTR Revisi RTRWP beserta rencana rincinya antara lain KLHS RTR KSP Pusat Bisnis Terpadu, KLHS RTR KSP Taman Wisata Alam Malino, dan KLHS RTR KSP Kawasan Kebun Raya Pucak serta menyusun dokumen KLHS untuk penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2029-2023.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator utama pada sasaran pembangunan Sulawesi Selatan yang terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada tahun 2019 IKLH Sulawesi Selatan mencapai 75,12 yang dikontribusi oleh peningkatan Indeks Kualitas Air naik pada tahun 2018 sebesar 57,7 menjadi 81,47 di tahun 2019, namun kenaikan ini tidak menggambarkan peningkatan indeks karena adanya perubahan metode perhitungan. Untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2018 sampai Tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan nilai indeks sebesar 0,03 yang tergambar dari nilai parameter SO₂ dan NO₂. Demikian halnya dengan Indeks tutupan lahan pada Tahun 2015 sebesar 50,85 meningkatkan menjadi 61,14 pada tahun 2019 hal ini disebabkan upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan rehabilitasi Hutan dan Lahan. Peningkatan nilai IKLH Sulawesi Selatan dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 menandakan meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan.

**Tabel II.155.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Indeks Kualitas Air	Angka	56,29	75,44	54,29	57,7	81,47
Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Angka	76,80	85,80	88,66	88,67	88,69
Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	Angka	50,85	55,43	54,81	60,41	61,14
IKLH		67,01	70,54	73,24	74,83	75,12

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel 2020

2. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pemerintah mengamanatkan target penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan kegiatan sendiri dan 41 persen dengan bantuan pihak asing pada tahun 2030, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK yang telah dilakukan kaji ulang dengan memperbaiki target penurunan emisi GRK menjadi 5,6 persen di tahun 2030 atau dapat dijabarkan menjadi 300.000 ton CO₂eq setiap tahun. Untuk memastikan pelaksanaan RAD-GRK berjalan sesuai yang direncanakan maka dilakukan inventarisasi GRK dan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaporkan setiap tahun.

Pencapaian penurunan emisi GRK yang ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 pada tahun 2019 tidak tercapai, hal ini tergambar pada realisasi penurunan emisi GRK pada tahun 2019 hanya sebesar 0,89 juta ton CO₂eq dari target 1,1 juta ton CO₂eq, yang disebabkan antara lain karena belum optimalnya penggunaan transportasi massal di perkotaan, khususnya di kawasan perkotaan Mamminasata.

**Tabel II.156.
Potensi Penurunan Emisi GRK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi Penurunan Emisi GRK (Ton CO ₂ Equivalen)	Juta Ton	0,48	0,72	0,79	0,84	0,89

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel 2020

3. Jumlah Limbah B3 yang Dikelola

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Hasil pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan dan atau kegiatan pengelolaan limbah B3, diperoleh gambaran bahwa jumlah limbah B3 yang dikelola dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan setiap tahun yang sumber utamanya dari sektor pertambangan dan energi. Peningkatan limbah B3 yang terkelola meningkat sangat signifikan tahun 2018 dan tahun 2019, dikarenakan pengelolaan limbah B3 di Sulawesi Selatan sudah memasukkan limbah B3 yang diangkut, ditimbun, dimanfaatkan, disimpan dan di musnahkan.

**Tabel II.157.
Jumlah Limbah B3 yang Dikelola
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Ton	611.898	677.869	667.900	4.365.759,98	5.373.629,74

Sumber : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel 2020

4. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Pada Kondisi Khusus di Provinsi

Besarnya timbunan sampah yang belum tertangani, menyebabkan berbagai fenomena permasalahan baik langsung maupun tidak langsung bagi penduduk perkotaan. Selain menimbulkan pencemaran dan sumber berbagai penyakit menular, juga pudarnya nilai-nilai keindahan kota karena maraknya tumpukan-tumpukan sampah. Penanganan sampah di perkotaan pada Tahun 2019 mencapai 87,73 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan penanganan sampah perkotaan dari tahun 2015 yang hanya mencapai 71,67 persen.

**Tabel II.158.
Sampah Perkotaan yang Tertangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	71,67	74,5	75,41	85,14	87,73*

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, tahun 2019

* Data sementara, diolah BAPPELITBANGDA, Tahun 2020

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka jumlah sampah juga akan mengalami peningkatan yang akan mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah, khususnya sampah di perkotaan. Pengelolaan sampah di kawasan perkotaan tahun 2019, menunjukkan adanya penurunan kinerja pengurangan sampah yang tergambar dari meningkatnya volume sampah dari 77.748 ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 80.850 ton pada tahun 2019, namun terjadi peningkatan volume sampah yang tertangani melalui prinsip 3R dari 1.095 ton menurun menjadi 3.187 ton.

Memperhatikan persentase sampah di kawasan perkotaan yang tertangani melalui fasilitas pengurangan sampah dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai Tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu dari 1,41 persen menjadi 7,70 persen. Namun, pada tahun 2019 terjadi pengurangan fasilitas dalam penanganan sampah sebesar 3,94 persen. Kinerja pengurangan sampah sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah serta optimalisasi implementasi kebijakan dan strategi daerah terkait pengelolaan sampah.

**Tabel II.159.
Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	Ton	1.095	1.460	4.015	6.163	3.187
Total volume sampah	Ton	77.748	78.533	79.297	80.075	80.850*
Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	1,41	1,86	5,06	7,70	3,94

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tahun 2019

* Data sementara, diolah BAPPELITBANGDA, Tahun 2020

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2019 rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk sudah mencapai 0,94 artinya hampir semua penduduk yang berumur diatas 17 tahun (>17) atau sudah menikah telah memiliki KTP.

**Tabel II.160.
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	0,79	0,79	0,82	0,87	0,94

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2015 sebesar 0,81 yang cenderung meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2019 mencapai 0,92. Terjadi kecenderungan peningkatan rasio karena semakin banyaknya inovasi pelayanan yang dilakukan kab/kota untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bayi.

**Tabel II.161.
Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,81	0,81	0,86	0,88	0,92

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 0,09 dan meningkat menjadi 0,26 pada tahun 2019. Masih Rendahnya cakupan kepemilikan akte nikah disebabkan oleh data yang dijadikan acuan adalah data SIAK, banyak akte nikah yang sudah diterbitkan jauh sebelumnya namun belum dikonversi ke dalam SIAK. Rendahnya kesadaran masyarakat, faktor budaya serta kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menjadi penyebab masih banyaknya pasangan menikah yang belum memiliki akte pernikahan/buku nikah.

**Tabel II.162.
Rasio Pasangan Berakte Nikah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Pasangan Berakte Nikah	0,09	0,09	0,11	0,15	0,26

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

4. Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran

Rasio kepemilikan akte kelahiran pada tahun 2015 sampai tahun 2017 sebesar 0,11 meningkat menjadi 0,38 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 Rasio kepemilikan akte kelahiran Sulawesi Selatan sebesar 0,43. Terjadinya peningkatan rasio karena berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran ataupun mengkonversi data manual ke data yang sudah terintegrasi ke SIAK.

**Tabel II.163.
Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran	0,11	0,11	0,11	0,38	0,43

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Indikator terkait cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik belum tersedia pada tahun 2015-2016. Tahun 2017 terdapat 31,47 persen, kemudian menurun drastis pada tahun 2018 menjadi 4,08 persen dan kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar 17,38 persen.

**Tabel II.164.
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	N/A	N/A	31,47	4,08

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Pada tahun 2015 sampai tahun 2017, tiap LPM mempunyai kelompok binaan sebanyak 17 sampai 20 kelompok. Namun sejak tahun 2018 sampai tahun 2019, dilakukan perubahan kebijakan agar LPM fokus melakukan pembinaan pada 1 desa yang terpilih sebagai juara 1 pada perlombaan antar desa se-Sulawesi Selatan agar menjadi desa percontohan bagi desa lainnya.

**Tabel II.165.
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah LPM	Lembaga	3.037	3.037	3.038	3.038	3.038
Jumlah Kelompok Binaan LPM	Klp	51.650	56.431	60.866	3.038	3.038
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	17	19	20	1	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

3. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pada tahun 2015 jumlah rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 19 kelompok dan meningkat secara signifikan pada tahun 2019 menjadi 43 kelompok. Banyaknya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

**Tabel II.166.
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PKK	Klp	7.531	3.328	3.632	3.344	3.344
Jumlah Kelompok Binaan	Klp	146.835	123.487	142.517	142.517	142.517

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Klp	19	37	39	43	43

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

4. Persentase LPM Berprestasi

Pada tahun 2015 persentase LPM berprestasi sangat rendah yaitu 1,22 persen dari 3037 jumlah LPM, karena faktor tolok ukur penentuan indikator LPM berprestasi dan pembinaan masih kurang terhadap tugas dan fungsi LPM didalam masyarakat sehingga banyak yang tidak masuk kategori. Kemudian tahun 2016 meningkat secara signifikan menjadi 24,24 persen dan kembali meningkat menjadi 24,33 persen pada tahun 2019 dari 3038 jumlah LPM, hal ini disebabkan oleh peran aktif pemerintah daerah provinsi beserta kabupaten/kota dalam mendukung keterlibatan LPM dalam proses pembangunan.

**Tabel II.167.
Persentase LPM Berprestasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah LPM	Lembaga	3.037	3.037	3.038	3.038	3.038
Jumlah LPM Berprestasi	Lembaga	37	736	739	739	739
Persentase LPM Berprestasi	%	1,22	24,24	24,33	24,33	24,33

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

5. Persentase PKK Aktif

Data persentase PKK aktif mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2015 sebesar 97,68 persen dan meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa semua PKK di Provinsi Sulawesi Selatan sudah aktif.

**Tabel II.168.
Persentase PKK Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PKK	Klp	7.531	3.328	3.632	3.632	3.632
Jumlah PKK Aktif	Klp	7.536	3.251	3.549	3.632	3.632
Persentase PKK aktif	%	97,68	97,69	97,71	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

6. Jumlah Posyandu Aktif

Jumlah dan persentase posyandu aktif meningkat dalam lima tahun terakhir. Tahun 2015 persentasenya sebesar 99,28 meningkat menjadi 99,89 persen pada tahun 2019. Keaktifan posyandu didukung oleh program/kegiatan melalui pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi posyandu. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pembinaan posyandu adalah beberapa desa yang berada di wilayah kepulauan yang jauh.

**Tabel II.169.
Jumlah Posyandu Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Posyandu Aktif	Unit	9.589	9.725	10.936	10.976	10.979
Persentase Posyandu Aktif	%	99,28	99,49	99,53	99,89	99,89

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk yang terus menurun setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,16 persen dan menurun menjadi -0,030 persen pada tahun 2019.

**Tabel II.170.
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,16	1,39	1,36	-0,010	-0,030

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2. Total Fertility Rate (TFR)

Dalam kurun tahun 2015 samapai tahun 2019 angka TFR Provinsi Sulawesi Selatan masih tinggi, hal ini disebabkan oleh masih tingginya angka unmet need (kejadian kebutuhan KB yang tidak terpenuhi), dan masih relatif tingginya angka putus pemakaian kontrasepsi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pada program KB di Provinsi Sulawesi Selatan harus terus diprogramkan. Pada tahun 2019 angka TFR sebesar 2,74 persen masih diatas target nasional sebesar 2,1 persen.

**Tabel II.171.
Total Fertility Rate (TFR)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,28	2,35	2,40	2,62	2,74

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

3. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Jumlah rata-rata anak per keluarga di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya penurunan dari 3 orang anak di tiap keluarga pada tahun 2015 menjadi 2 orang anak di tiap keluarga pada tahun 2019.

**Tabel II.172.
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	Anak/ Keluarga	3	3	2	2	2

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

4. Ratio Akseptor KB

Jumlah ratio akseptor KB di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya tren penurunan yaitu dari 66,87 persen pada tahun 2015 menurun menjadi 52,97 persen pada tahun 2019 yang menggambarkan bahwa jumlah akseptor KB aktif hanya sebesar 52,97 persen dari jumlah pasangan usia subur di Sulawesi Selatan.

**Tabel II.173.
Ratio Akseptor KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ratio Akseptor KB	%	66,87	67,42	66,30	66,00	52,97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020

5. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49

Upaya pemerintah yang lain dalam meningkatkan kesehatan adalah dengan menggalakkan program KB (Keluarga Berencana). KB diharapkan dapat mengatur jarak kelahiran sehingga mengurangi angka kematian ibu, menjamin tumbuh kembang bayi dan mencegah bayi kekurangan gizi. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 51,5 persen pada tahun 2018 menjadi 52,57 persen pada tahun 2019.

**Tabel II.174.
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	66,87	67,42	66,30	51,5	52,97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020

6. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Cakupan PUS Unmet Need di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan kinerja, pada tahun 2015 sebesar 15,13 persen dan menurun menjadi 13,3 persen pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan bahwa hanya 13,3 persen pasangan usia subur yang belum mendapatkan pelayanan KB dari petugas KB.

**Tabel II.175.
Cakupan PUS Unmet Need
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	15,13	13,98	14,14	14,19	13,3

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020

7. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada 5 tahun terakhir menunjukkan menurun jumlah peserta KB aktif yang berhenti, dimana pada tahun 2017 persentase peserta KB aktif yang berhenti menggunakan KB sebesar rata-rata 87,95 persen menurun menjadi 76,40 persen pada tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase peserta KB yang aktif ber KB untuk jangka panjang dari 22,05 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 23,60 persen pada tahun 2019.

**Tabel II.176.
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	19,40	21,1	22,05	21,34	23,6

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020

8. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi untuk 5 tahun terakhir, semakin meningkat yaitu dari 8,16 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 18,31 persen pada tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat peserta KB sebesar 81,69 persen yang berpotensi untuk tidak melanjutkan memakai kontrasepsi pada tahun 2019.

**Tabel II.177.
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	8,16	8,76	10,99	18,09	18,31

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020

9. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga balita untuk ber KB selama lima tahun terakhir berfluktuasi namun pada tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan cakupan pada tahun 2017 yang cakupannya mencapai 75,48 persen dan menurun menjadi 75,59 persen pada tahun 2019.

**Tabel II.178.
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	75,47	76,33	75,48	76,5	75,59

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020

10. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Presentase Cakupan BKR Ber-KB selama 5 tahun lima tahun terakhir menunjukkan adanya trend penurunan, dimana pada tahun 2015 sebesar 75,41 persen menurun menjadi 72,31 persen pada tahun 2019.

**Tabel II.179.
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	75,41	74,96	74,74	75,59	72,31

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020

11. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Cakupan anggota BKL Ber-KB selama 5 tahun menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan yaitu, pada tahun 2015 cakupannya hanya sebesar 39 persen namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 72,33 persen.

**Tabel II.180.
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	39	43	44	75,54	72,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Sulaesi Selatan tahun 2020

12. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi yang berperan memberikan informasi melalui kegiatan pelayanan keluarga dengan melakukan pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. Akan tetapi peran wadah tersebut belum dioptimalkan keberadaannya yang ditunjukkan dengan persentase keberadaannya yang terus menurun dari 55 persen pada tahun 2015 menurun menjadi hanya sebesar 23 persen pada tahun 2019.

**Tabel II.181.
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	55	54	55	23	23

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020

13. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri

Dengan peningkatan pendapatan masyarakat, diharapkan keikutsertaan dan kesinambungan ber-KB dapat ditingkatkan, upaya ini terus dilakukan, sehingga terjadi peningkatan cakupannya dari 13 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 17 persen pada tahun 2019.

**Tabel II.182.
Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber-KB Mandiri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	%	13	15	15	17	17

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020

14. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Keberadaan petugas pembantu pembina KB desa pada setiap desa/kelurahan sangat diperlukan, namun rasionya terus menurun sejak tahun 2015 yang rasionya mencapai 100,26 persen terus menurun sehingga pada tahun 2019 rasionya menjadi sebesar 98,65 persen. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan komitmen dari pemerintah Kabupaten/kota untuk meningkatkan jumlah petugas pembantu pembina KB desa pada setiap desa/kelurahan.

**Tabel II.183.
Rasio PPKBD per Desa/Kelurahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	100,26	100,26	100,26	99,47	98,64

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020

15. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase Faskes dan Jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2015 sebesar 65 persen meningkat menjadi 77,98 persen pada tahun 2019. Upaya tersebut menggambarkan bahwa terjadi peningkatan jumlah Faskes dan jejaringnya yang telah bekerjasama dengan BPJS dan telah memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.

**Tabel II.184.
Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan	%	65,00	65,00	65,71	76,98	77,98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020

16. Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual memerlukan perhatian, seiring dengan meningkatnya keterbukaan informasi dan penggunaan teknologi informatika, khususnya dikalangan remaja. Dalam kurun tahun 2015 sampai tahun 2019 menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2015 sebesar 0,12 persen menurun menjadi 0,04 persen pada tahun 2019.

**Tabel II.185.
Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0,12	0,04	0,02	0,08	0,04

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

17. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Tahun 2017 semua POKTAN melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga. Akan tetapi pada tahun 2013 hingga 2016 tidak tersedia data yang akurat untuk menjelaskan cakupan pembinaan 8 fungsi keluarga oleh POKTAN, namun kinerjanya menurun pada tahun 2018 yang cakupannya hanya sebesar 62,95 persen dan akhirnya meningkat kembali menjadi sebesar 65,40 persen pada tahun 2019.

**Tabel II.186.
Cakupan Kelompok Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	0	0	100	62,95	65,40

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

18. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan

melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak pada tahun 2015 sebesar 70 persen dan meningkat menjadi 75 persen pada tahun 2019.

**Tabel II.187.
Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	70	70	71	75	75

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

19. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui anggaran pembangunan belanja daerah semakin meningkat seiring dengan peningkatan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah yang menunjukkan persentase pada tahun 2015 sebesar 0,03 persen meningkat menjadi 1,50 persen pada tahun 2019 dari total anggaran.

**Tabel II.188.
Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,03	0,03	0,03	1,50	1,50

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.2.9 Perhubungan

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Angkutan umum masih merupakan alat transportasi umum utama di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan karena mempunyai jangkauan layanan yang luas, hal ini terlihat pada jumlah arus penumpang angkutan umum di tahun 2015 sebesar 11.833 juta orang dan pada tahun 2018 sebesar 13,962 juta orang. Namun pada tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum sebesar 13,724 juta orang yang disebabkan adanya peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi, angkutan berbasis online dan menurunnya kualitas armada angkutan umum, sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel II.189.
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Orang	11,833	12,684	13,323	13,962	13,724*

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

*) Data sementara

2. Rasio Ijin Trayek

Penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum yang diiringi dengan penurunan kualitas armada angkutan umum pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kinerja angkutan umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Selatan belum optimal. Selanjutnya dapat dilihat pada rasio ijin trayek di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 hingga pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan capaian yaitu sebesar 0,20.

**Tabel II.190.
Rasio Ijin Trayek
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk	Jiwa	8,520,304	8,606,375	8,690,294	8,776,888	8,851,240
Rasio ijin trayek	%	1,99	0,26	0,20	0,3	0,3

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

3. Jumlah Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan Terminal Bis

Pelabuhan laut, bandar udara dan terminal penumpang sebagai prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang. Perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi untuk dapat mengoptimalkan kinerja pelayanan transportasi di Sulawesi Selatan khususnya upaya peningkatan kinerja pelayanan prasarana perhubungan. Berdasarkan data dalam kurun tiga tahun terakhir (2017-2019) tidak adanya perubahan jumlah pelabuhan laut, bandar udara dan terminal penumpang di Provinsi Sulawesi Selatan dimana sampai dengan tahun 2019 mencapai 181 unit yang berperan sebagai simpul transportasi yang dapat mengintegrasikan berbagai moda transportasi di Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel II.191.
Jumlah Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan Terminal Bis
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Jenis Prasarana Transportasi	Satuan	Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pelabuhan Udara	Unit	11	11	11	11	11
Pelabuhan Laut	Unit	89	91	109	109	109
Terminal Penumpang	Unit	51	51	61	61	61
Jumlah	Unit	151	153	181	181	181

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

4. Hierarki Pelabuhan Laut, Sungai Menurut Kabupaten/Kota

Penetapan hirarki pelabuhan di Sulawesi Selatan didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 yang menetapkan hirarki pelabuhan yaitu pelabuhan - pelabuhan pengumpan regional yang merupakan kewenangan provinsi.

**Tabel II.192.
Hierarki Pelabuhan Laut, Sungai Menurut Kabupaten/Kota**

No.	Kab/Kota	Pelabuhan	Hirarki Pelabuhan	Kewenangan
1	Bantaeng	Bantaeng / Bonthain	Pengumpan Regional	Provinsi
2	Barru	Garongkong	Pengumpul	Pusat
3	Barru	Awerange	Pengumpan Regional	Provinsi
4	Bone	Bajoe	Pengumpul	Pusat
5	Bone	Pattirobajo	Pengumpan Regional	Provinsi

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Kab/Kota	Pelabuhan	Hirarki Pelabuhan	Kewenangan
6	Bulukumba	Bulukumba / Lappe'e	Pengumpul	Pusat
7	Bulukumba	Maccini Baji	Pengumpan Regional	Provinsi
8	Jeneponto	Jeneponto /Bunging	Pengumpan Regional	Provinsi
9	Luwu	Belopa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
10	Luwu Timur	Malili	Pengumpan Regional	Provinsi
11	Luwu Timur	Lampia	Pengumpul	Pusat
12	Luwu Utara	Munte	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
13	Makassar	Makassar	Utama	Pusat
14	Palopo	Palopo / Tg. Ringgit	Pengumpul	Pusat
15	Pangkep	Biringkasi	Pengumpan Regional	Provinsi
16	Pangkep	P. Kalukalukuang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
17	Pangkep	P. Sabutung	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
18	Pangkep	P. Sailus	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
19	Pangkep	P. Sapuka	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
20	Pare-Pare	Pare - Pare	Pengumpul	Pusat
21	Pinrang	Marabombang	Pengumpan Lokal	PR
22	Kep. Selayar	Jampea	Pengumpan Regional	Provinsi
23	Kep. Selayar	Selayar/Benteng/Rauf Rahman	Pengumpul	Pusat
24	Kep. Selayar	Galesong/Takalar	Pengumpan Regional	Provinsi
25	Kep. Selayar	P. Bonerate	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
26	Kep. Selayar	Kalaotoa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
27	Kep. Selayar	Kayuadi	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
28	Kep. Selayar	P. Jinato	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
29	Kep. Selayar	Ujung Jampea	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
30	Kep. Selayar	Pamatata	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
31	Sinjai	Sinjai / Larea-rea	Pengumpul	Pusat
32	Wajo	Siwa / Bangsalae	Pengumpan Regional	Provinsi
33	Barru	Lamuru Kung	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
34	Barru	Pancana / Pute Angin	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
35	Bone	Waetuo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
36	Bone	Cenrana	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
37	Bone	Lapangko / Salameko	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
38	Bone	Barebbo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
39	Bone	Uloe	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
40	Bone	Tuju-Tuju	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
41	Bulukumba	Butung / Kasuso	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
42	Bulukumba	Bira / Tanah Beru	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
43	Bulukumba	Kajang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
44	Jeneponto	Tarowang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
45	Luwu	Bawa Salo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Kab/Kota	Pelabuhan	Hirarki Pelabuhan	Kewenangan
46	Luwu	Bona Pute	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
47	Luwu	Larompong	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
48	Luwu Timur	Wotu	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
49	Luwu Utara	Labuange	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
50	Luwu Utara	Cappasalo/Malangke	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
51	Makassar	Kayu Bangkoa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
52	Makassar	Pulau Barrang Caddi	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
53	Makassar	Pulau Barrang Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
54	Makassar	Pulau Bonetambung	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
55	Makassar	Pulau Kodingareng	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
56	Makassar	Pulau Lae-Lae	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
57	Makassar	Pulau Langkai	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
58	Makassar	Pulau Samalona	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
59	Pangkep	P. Badi	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
60	Pangkep	P. Balang Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
61	Pangkep	P. Balo-Baloang Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
62	Pangkep	P. Dewakang Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
63	Pangkep	P. Doang-Doangan Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
64	Pangkep	P. Gondong Bali	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
65	Pangkep	P. Kapoposang Bali	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
66	Pangkep	P. Karangrang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
67	Pangkep	P. Kulambing	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
68	Pangkep	P. Langkoitang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
69	Pangkep	P. Matalaang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
70	Pangkep	P. Pammantauang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
71	Pangkep	P. Salemo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
72	Pangkep	P. Karumpa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
73	Pangkep	Kalatoa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
74	Pinrang	Langga	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
75	Pinrang	Ujung Lero	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
76	Kep. Selayar	Appatana	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
77	Kep. Selayar	Bangkala	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
78	Kep. Selayar	P. Batang Mata	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
79	Kep. Selayar	P. Bembe / Tanamlala	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
80	Kep. Selayar	P. Biropa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
81	Kep. Selayar	P. Bona Lohe	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
82	Kep. Selayar	P. Kalao	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
83	Kep. Selayar	P. Komba- Komba	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
84	Kep. Selayar	P. Lambego	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
85	Kep. Selayar	P. Padang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Kab/Kota	Pelabuhan	Hirarki Pelabuhan	Kewenangan
86	Kep. Selayar	P. Samatellu	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
87	Kep. Selayar	P. Tarupa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
88	Kep. Selayar	P. Tambolongan	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
89	Kep. Selayar	P. Madu	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
90	Kep. Selayar	P. Rajuni	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
91	Kep. Selayar	Pasitallu	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
92	Sinjai	Cappa Ujung Sinjai	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
93	Sinjai	P. Burung Lohe	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
94	Sinjai	Patubukan	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
95	Sinjai	P. Kambuno	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
96	Takalar	P. Tanakeke/Satanga	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
97	Takalar	Salomakko	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
98	Wajo	Doping	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
99	Wajo	Jalang/Cendrane	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
100	Wajo	Danggae	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
Daftar Dermaga Sungai dan Danau				
101	Dermaga Danau Soroako	Operasi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
102	Dermaga Danau Nuha	Operasi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
103	Dermaga Penyeberangan Beau Tokalimbo di Danau Towuti	Konstruksi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
104	Dermaga Danau Towuti	Rencana	Pengumpan	Kabupaten/Kota
105	Dermaga Danau Matano	Operasi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
106	Dermaga Danau Mahalona	Rencana	Pengumpan	Kabupaten/Kota
107	Dermaga Sungai Sadang	Operasi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
108	Dermaga Danau Sidenreng	Rencana	Pengumpan	Kabupaten/Kota
109	Dermaga Danau Tempe	Rencana	Pengumpan	Kabupaten/Kota

Sumber : Keputusan Menhub Nomor 432 TAHUN 2017 dan Keputusan Menhub Nomor 432 TAHUN 2017

5. Jumlah Halte BRT Kawasan Perkotaan Mamminasata

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui fasilitasi Kementerian Perhubungan dalam upaya memenuhi kebutuhan penggunaan transportasi massal di perkotaan sejak tahun 2015 telah mengoperasikan *Bus Rapid Transit* (BRT) di kawasan perkotaan Mamminasata yang terdiri dari 8 koridor yang saat ini telah dilengkapi dengan 145 buah halte, namun minat masyarakat untuk menggunakan BRT sebagai sarana transportasi umum semakin menurun sehingga sejak tahun 2018 tidak lagi dilakukan penyediaan halte BR.

**Tabel II.193.
Jumlah Halte BRT Kawasan Perkotaan Mamminasata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Koridor/ Tahun	Satuan	Jumlah Halte Koridor BRT					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
2	Unit	6	-	12	-	-	18
3	Unit	13	12	15	-	-	40
4	Unit	17	2	10	-	-	29
5	Unit	-	13	1	-	-	14
7	Unit	-	38	2	-	-	40
8	Unit	-	-	2	-	-	2
PLUS	Unit	-	-	2	-	-	2
Jumlah	Unit	36	65	44	-	-	145

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2019

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut maupun udara merupakan faktor utama yang mendukung pengembangan wilayah di Sulawesi Selatan melalui peningkatan arus penumpang dan barang untuk menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari peningkatan arus barang yang diangkut melalui berbagai moda transportasi yang meningkat sebanyak 12.329.139 ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 24.537.258 ton pada tahun 2019.

**Tabel II.194.
Jumlah Barang Terangkut Angkutan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

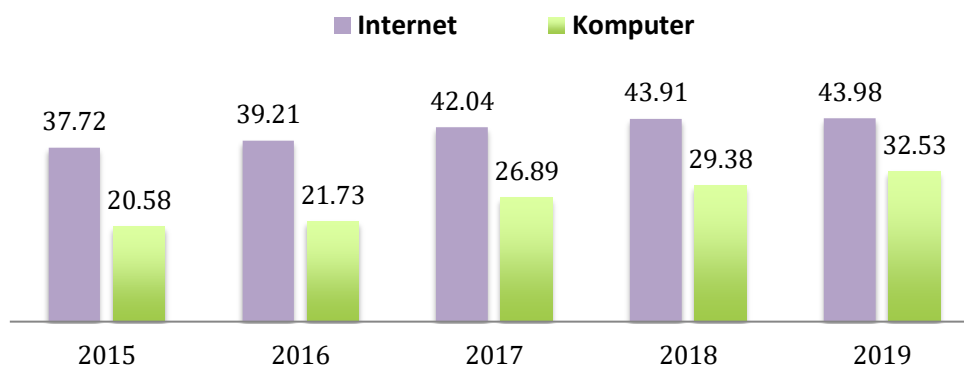
Jenis Transportasi	Satuan	Jumlah Barang Terangkut Angkutan Umum				
		2015	2016	2017	2018	2019
Bus	Ton	121.080	121.425	121.785	122.145	122.413*
Pesawat Udara	Ton	4.905.622	4.927.755	5.808.590	8.469.309*	9.069.783*
Kapal Laut	Ton	7.302.437	7.756.915	8.309.167	13.537.770	15.345.062*
Jumlah	Ton	12.329.139	12.806.095	14.239.542	22.129.224	24.537.258*

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Penggunaan TIK di Sulawesi Selatan yang diukur berdasarkan proporsi rumah tangga dengan akses internet dan kepemilikan komputer pribadi. Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mencapai 43,98 persen yang menunjukkan bahwa kinerja proporsi rumah tangga dengan akses internet melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 42,25 persen. Demikian halnya dengan proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi yang meningkat dari 26,89 persen pada tahun 2017 menjadi 32,53 persen pada tahun 2019.

**Grafik II.32.
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet dan
Kepemilikan Komputer Pribadi
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Presentase Koperasi Aktif

Perkembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) hampir setiap tahunnya terus mengalami peningkatan jumlah dan telah memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat, namun peningkatan jumlah koperasi belum diiringi dengan peningkatan jumlah koperasi yang aktif. Diperlukan upaya bersama dan dukungan pemerintah Kabupaten/kota, karena keberadaan koperasi yang aktif dapat mengurangi angka pengangguran dan menciptakan wirausaha-wirausaha baru di Sulawesi Selatan.

**Tabel II.195.
Persentase Koperasi Aktif
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Koperasi	Unit	916.323	916.323	918.500	923.000	932.100
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	572.519	537.771	542.650	514.573	536.703
Persentase Koperasi Aktif	%	62,48	58,68	59,08	55,75	57,58

Sumber :Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap Kesempatan Kerja

Persentase koperasi dan usaha kecil dan menengah terhadap peningkatan kesempatan kerja di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah tenaga kerja yang diserap oleh koperasi pada tahun 2017 sebanyak 2,25 juta orang yang meningkat menjadi 2,53 juta orang pada tahun 2019. Demikian halnya dengan persentase usaha mikro dan kecil yang meningkat dari 94,29 persen pada tahun 2017 menjadi 97,18 persen pada tahun 2019 yang tentu saja berkontribusi terhadap penyediaan dan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

**Tabel II.196.
Presentase Usaha Mikro dan Kecil
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	91,64	92,48	94,29	95,65	97,18

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.2.12 Penanaman Modal dan Investasi

1. Investor/Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Peningkatan investor tersebut tidak terlepas dari dukungan beberapa kebijakan pemerintah daerah yang memberi berbagai kemudahan kepada investor, peningkatan iklim yang lebih kondusif, sistem perizinan yang lebih baik dan adanya jaminan kepastian hukum dari pemerintah dalam berinvestasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel II.197.
Investor/Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019**

Indikator	Jumlah Investor/Proyek				
	2015	2016	2017	2018	2019
PMA	71	100	155	371	506
PMDN	121	181	171	540	1042
Total	192	281	326	911	1548

Sumber : DPM PTSP Prov. Sulsel Tahun 2019

2. Jumlah Proyek dan Nilai Investasi (PDMDN/PMA)

Nilai investasi Provinsi Sulawesi Selatan mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 rata-rata mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya pula jumlah investor yang masuk. Adapun pada Tahun 2019 mengalami penurunan disebabkan karena terdapat beberapa proyek investasi baru maupun pengembangan/perluasan usaha yang tidak sesuai dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di beberapa Kabupaten/kota.

**Tabel II.198.
Jumlah Proyek dan Nilai Investasi (PDMDN/PMA)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Proyek	Proyek	192	281	326	911	1548
2	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rupiah	5,32	7,90	12,10	8,30	11,48

Sumber : DPM PTSP Prov. Sulsel Tahun 2019

3. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persen)

Terjadinya fluktuasi nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Sulawesi Selatan diakibatkan karena peningkatan iklim investasi yang lebih kondusif dan adanya jaminan kepastian hukum dari pemerintah dalam berinvestasi di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga turut mendorong peningkatan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Akan tetapi, nilai realisasi PMDN pada tahun 2019 di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya penurunan nilai realisasi dari 11,50 Persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 10,20 Persen pada tahun 2019.

**Tabel II.199.
Nilai Realisasi PMDN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	12.10	8.40	11.45	11.50	10.20

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Selatan, tahun 2020.

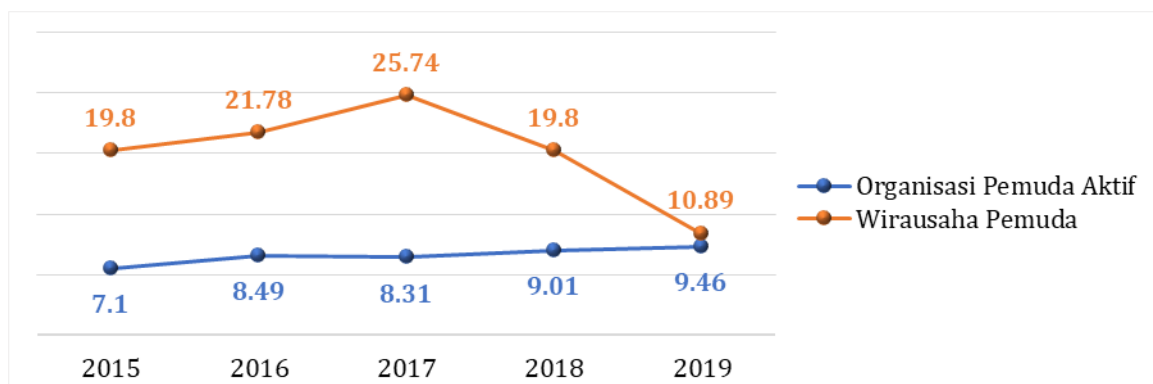
2.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif dan Wira Usaha Muda

Pembinaan pemuda dilakukan melalui pembinaan organisasi kepemudaan, namun keberadaan dan kiprah organisasi pemuda di Sulawesi Selatan dari tahun 2015 hingga 2019 berfluktuasi, namun menunjukkan adanya tren peningkatan organisasi pemuda yang aktif. Akan tetapi minat pemuda sebagai wirausaha selama lima tahun terakhir cenderung menurun, sehingga dibutuhkan upaya optimalisasi peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam mengembangkan potensinya sebagai wirausaha muda.

Grafik II.33.

Persentase Pembinaan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



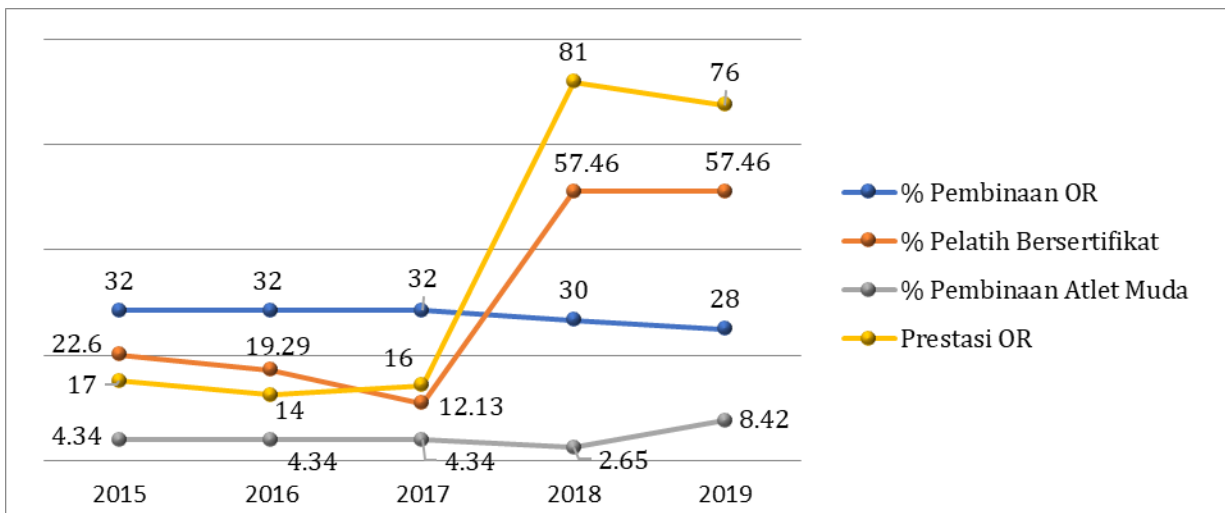
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

2. Persentase Pembinaan Olah Raga, Cakupan Pelatih Bersertifikasi, Cakupan Pembinaan Atlet Muda dan Prestasi Olah Raga

Cabang olahraga yang menjadi binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 dan tahun 2017 sebanyak 16 cabang olahraga, yang kemudian menurun menjadi 14 cabang olahraga pada tahun 2019. Pengurangan cabang olahraga binaan disebabkan kurang maksimalnya prestasi sejak tiga tahun terakhir. Jumlah keseluruhan cabang olahraga yang terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2015 hingga 2019 sebanyak 50 cabang olahraga.

Gambaran pembinaan keolahragaan di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa keberadaan pelatih yang bersertifikat berkontribusi terhadap peningkatan prestasi olahraga, namun tidak diikuti dengan upaya peningkatan pembinaan sehingga prestasi olahraga di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya trend penurunan.

Grafik II.34.
Cakupan Pembinaan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2020

3. Jumlah Atlet Berprestasi

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu pembinaan olahraga seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga. Berprestasi dikancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana. Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 pada 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebanyak 46 atlet meningkat menjadi 76 atlet pada tahun 2019.

Tabel II.200.
Jumlah Atlet Berprestasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	46	76	81	81	76

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14 Statistik

1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegritas

Ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan kebutuhan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan, karena informasi statistik berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Penyediaan data statistik di Sulawesi Selatan sampai saat ini dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pusat Statistik baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota yang diwujudkan dalam berbagai seri publikasi, khususnya publikasi yang memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial demografi dan perekonomian.

**Tabel II.201.
Data dan Statistik yang Terintegritas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Jumlah	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik 2019

2. Buku “Kabupaten Dalam Angka”

Provinsi Dalam Angka sangat membantu dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, dengan tersedianya data yang lengkap, valid, relevan dan tepat waktu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui BPS telah mempublikasi Provinsi Dalam Angka setiap tahun. Dimana dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 BPS telah mempublikasikan Buku Provinsi Dalam Angka serta data-data indikator makro social dan ekonomi.

**Tabel II.202.
Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Jumlah	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik 2019

3. Buku PDRB Disediakan Setiap Tahun pada 24 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi, struktur perekonomian daerah yang sudah dilaksanakan adalah tersedianya data statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB juga dipergunakan sebagai bahan evaluasi, analisa dan bahan perencanaan yang bermanfaat untuk menentukan sasaran pembangunan tahun berikutnya. Penyediaan buku PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan jumlah Kabupaten yang ada setiap tahunnya yakni masing masing 1 ekslamper per Kabupaten.

**Tabel II.203.
Buku PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Buku PDRB	jumlah	48	48	48	24	24

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik 2020

2.3.2.15 Persandian

1. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Layanan penyelenggaraan pengamanan persandian dilaksanakan melalui tata kelola jaminan keamanan informasi dengan menggunakan persandian yang berdasarkan asas kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan nir-sangkal, yang kinerjanya dinilai berdasarkan jumlah rata-rata kegiatan penting yang didukung pengamanannya dengan persandian dan jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian

untuk mengamankan informasi yang wajib diamankan. Kinerja penyelenggaraan layanan persandian di Provinsi Sulawesi Selatan telah memperlihatkan kinerja yang baik yang ditunjukkan dengan ketaatan seluruh perangkat daerah provinsi Sulawesi Selatan untuk menggunakan persandian dalam mengamankan informasi dan berkomunikasi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan fasilitas penggunaan sandi dalam berkomunikasi. Persentase keterhubungan antar Perangkat Daerah dalam jaringan komunikasi sandi telah menjangkau seluruh perangkat daerah (100%).

**Tabel II.204.
Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik 2019

2.3.2.16 Kebudayaan

Kekayaan dan keragaman kebudayaan Sulawesi Selatan dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan dapat meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan, mengingat beragamnya budaya Sulawesi Selatan yang dipengaruhi oleh 3 Etnis yang berbeda yaitu: Etnis Makassar, Bugis dan Toraja.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki cagar budaya sebanyak 81 dan museum sebanyak 16 buah yang tersebar di 24 kabupaten/kota, namun belum terkelola dengan baik yang diindikasikan dengan penurunan jumlah karya budaya dan cagar budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi serta jumlah museum yang terstandarisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 hanya sebanyak 3 buah. Karya budaya Sulawesi Selatan yang dimasukkan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 sampai saat ini baru terinventarisasi sebanyak 670 Karya Budaya, dan hanya 44 karya budaya yang dianggap lengkap datanya dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai warisan Budaya Tak benda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang 1 karya budaya diantaranya telah mendapatkan pengakuan Dunia sebagai warisan Dunia oleh UNESCO yaitu Pinisi berupa seni pembuatan kapal.

2.3.2.17 Perpustakaan

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 hingga mencapai 732.403 pengunjung, akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup drastis yaitu 365.781 pengunjung.

**Tabel II.205.
Pengunjung Perpustakaan Per tahun
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	440.579	513.408	621.306	732.403	365.781

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Prov. Sulsel, tahun 2020

2. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Rasio perpustakaan per satuan penduduk mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 0,326, tahun 2016 sebesar 0,336 tahun 2017 sebesar 0,346, tahun 2018 sebesar 0,355 serta tahun 2019 sebesar 0,365. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mendukung terhadap upaya pengembangan perpustakaan.

**Tabel II.206.
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perpustakaan	Unit	2.783	2.896	3.009	3.122	3.235
Jumlah Penduduk	Jiwa	8.520.304	8.606.375	8.690.294	8.776.888	8.851.240
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	1:1000	0,326	0,336	0,346	0,355	0,365

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

3. Jumlah Koleksi dan Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan

Penurunan jumlah pengunjung perpustakaan di Sulawesi Selatan tidak mempengaruhi upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menambah jumlah koleksi buku yang diindikasikan dengan bertambahnya jumlah koleksi buku yang disediakan di perpustakaan dari 390.672 eksemplar pada tahun 2018 menjadi sebanyak 394.251 eksemplar pada tahun 2019 dan bertambahnya koleksi judul buku di perpustakaan dari 390.672 judul pada tahun 2018 menjadi 394.251 judul buku pada tahun 2019.

**Tabel II.207.
Koleksi dan Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Koleksi Judul Buku	Judul	280,570	300,575	380.579	390.672	394.251
Buku yang Tersedia	Eksamplar	350.802	360.902	571,002	581.201	582.490

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Prov. Sulsel, tahun 2020

4. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perpustakaan tentunya harus ditunjang oleh jumlah tenaga pustakawan dan tenaga teknis yang bertugas di perpustakaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelayanan perpustakaan yang tergambar pada peningkatan jumlah pustakawan tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat yang jumlahnya sudah mencapai 3.500 orang pada tahun 2019.

**Tabel II.208.
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilaian yang Memiliki Sertifikat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	Orang	1.800	2.300	2.900	3.250	3.500

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Prov. Sulsel, tahun 2020

2.3.2.18 Kearsipan

1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sistem pengelolaan arsip merupakan hal yang sangat penting dalam pertanggungjawaban tentang perencanaan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan arsip merupakan langkah awal dalam membangun sistem informasi. Jumlah perangkat daerah yang dibina untuk mengelola arsip secara baku terus meningkat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan, dimana OPD yang dibina berjumlah 56 di Tahun 2019. Hal ini dikarenakan terjadi perampingan OPD di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel II.209.
Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	OPD/Unit Kerja & Desa Kelurahan	54	58	62	65	56

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Prov. Sulsel, tahun 2020

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Dalam mengelola arsip secara baku tentunya sangat diperlukan sumberdaya manusia yang handal dibidangnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, salah satunya adalah pengelola kearsipan. Berdasarkan tabel dibawah ini, menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan pada jumlah orang/SDM pengelola kearsipan yaitu 368 orang dari 4200 orang pada tahun 2018.

**Tabel II.210.
Peningkatan SDM Pengelolah Kearsipan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	3.250	3.620	3.700	4.200	368

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Prov. Sulsel, tahun 2020

2.3.3 Layanan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

1. Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)

Realisasi jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya berfluktuasi, realisasi kunjungan pada tahun 2016 merupakan kunjungan terbanyak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebesar 8.426.528 kunjungan dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kunjungan sebesar 6.256.376 kunjungan. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran dari pemerintah untuk terus mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada di wilayahnya yang bertujuan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung atau berlibur di Sulawesi Selatan. Adapun rata-rata pengeluaran lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 750.000 perhari.

**Tabel II.211.
Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Pengeluaran Wisatawan Nusantara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Target Kunjungan	Kunjungan	5.500.000	5.750.000	6.000.000	6.250.000	7.500.000
Realisasi Kunjungan	Kunjungan	7.128.826	8.426.528	8.367.748	8.393.024	6.256.376
Rata-Rata Pengeluaran/Hari	Rupiah	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Belanja/Tahun	Trilyun Rupiah	26,73	31,60	31,38	31,47	9,44

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, Tahun 2019

2. Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)

Pencapaian peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 yang hanya berjumlah 115.000 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar 56,3 persen dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 263.293 kunjungan.

**Tabel II.212.
Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Kunjungan	191.773	236.491	255.747	263.293	115.000

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel, Tahun 2019

3. Lama kunjungan Wisata

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, secara umum rata-rata lama kunjungan wisata di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya tinggal selama 5 (lima) hari, dengan besaran pengeluaran perharinya sebesar Rp 750.000.

**Tabel II.213.
Lama Kunjungan Wisata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Lama kunjungan Wisata	Hari	5	5	5	5	5

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

4. PAD Sektor Pariwisata

Padatahun 2019, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan diberikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 653.602.725,- dan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019 hanya dapat mencapai Rp. 401.800.000,- atau 61,47 persen dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan, masih banyaknya aset yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti pada Monumen Mandala dimana lift sudah tidak berfungsi lagi ataupun Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* yang mana sound system yang akan digunakan untuk pertunjukan sudah tidak layak pakai dan begitu juga dengan lampu-lampu yang sudah rusak pada bangunan tersebut.

Disamping itu, banyaknya daerah pesaing yang memiliki sarana yang jauh lebih representatif juga menjadi kendala tersendiri dalam pencapaian target PAD. Oleh karena itu, melalui Revitalisasi Gedung Kesenian Societeit de Harmonie, Pembenahan Kawasan Benteng Somba Opu dan Monumen Mandala yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020, diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih dalam peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada sektor pariwisata. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir PAD pada sektor pariwisata tertinggi terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 491.991.000 dan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp. 375.900.000.

**Tabel II.214.
PAD Sektor Pariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	491.991.725	383.640.000	451.750.000	375.900.000	401.800.000

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel, Tahun 2019

5. Perkembangan Kunjungan dan Pengeluaran Wisatawan

Banyaknya jumlah kunjungan wisatawan tentu tidak terlepas dari peran pemerintah daerah untuk terus mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada di wilayahnya agar dapat meningkatkan daya tarik wisatawan berkunjung atau berlibur di Sulawesi Selatan. Dari data perkembangan kunjungan dan pengeluaran wisatawan nusantaradi Sulawesi Selatan sejak tahun 2015 sampai tahun 2018, menunjukkan angka realisasi kunjungan yang melampaui target setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2015, kunjungan wisatawan Nusantara di targetkan 5.500.000 kunjungan dan terealisasi sebanyak 7.128.826 kunjungan atau melampaui target. Kemudian pada tahun 2018 di targetkan 6.250.000 kunjungan dan terealisasi sebanyak 8.393.024 kunjungan atau melampaui target. Namun pada tahun 2019, target kunjungan wisatawan Nusantara tidak tercapai dimana dari target kunjungan 7.500.000, yang dapat direalisasikan hanya 2.519.040 kunjungan. Adapun rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara selama berkunjung adalah sebesar Rp. 750.000 per hari.

**Tabel II.215.
Perkembangan Kunjungan dan Pengeluaran Wisatawan Nusantara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Target Kunjungan	Kunjungan	5.500.000	5.750.000	6.000.000	6.250.000	7.500.000
Realisasi Kunjungan	Kunjungan	7.128.826	8.426.528	8.367.748	8.393.024	2.519.040
Rata-Rata Pengeluaran/Hari	Rupiah	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Belanja/Tahun	Trilyun Rupiah	26,73	31,60	31,38	31,47	9.44

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel, Tahun 2019

6. Target dan Capaian Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Capaian kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sebesar 191.773 kunjungan yang melebihi target di tahun 2015 sebesar 125.000 kunjungan, selanjutnya mengalami peningkatan hingga tahun 2018 sebesar 263.293 kunjungan yang juga melebihi target di tahun 2018 sebesar 200.000 kunjungan, namun pada tahun 2019

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

mengalami penurunan capaian sebesar 115.000 kunjungan dibandingkan jumlah capaian di tahun 2018 atau belum mencapai dari target tahun 2019 sebesar 300.000 kunjungan.

**Tabel II.216.
Target dan Capaian Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Target	Kunjungan	125.000	175.000	200.000	200.000	300.000
Capaian	Kunjungan	191.773	236.491	255.747	263.293	115.000

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

7. Kunjungan Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Pintu Masuk

Secara umum rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pintu masuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 14.126 kunjungan dari tahun 2017 yang sebesar 18.335 kunjungan, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebanyak 14.432 orang.

**Tabel II.217.
Kunjungan Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Pintu Masuk
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kunjungan Wisatawan Mancanegara berdasarkan Pintu Masuk	Kunjungan	13.713	17.705	18.335	14.126	14.432

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

2.3.3.2 Pertanian

2.3.3.2.1 Pertanian Tanaman Pangan

1. Perkembangan Lahan Pertanian Pangan Kab/Kota di Sulawesi Selatan

Perkembangan rata-rata lahan pertanian pangan menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sampai tahun 2019 sebesar 1,480 Ha atau 0,24 persen, kabupaten dengan perkembangan rata-rata lahan pertanian pangan tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu Kabupaten Jeneponto, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki penurunan jumlah lahan pertanian pangan terbesar adalah Kota Palopo. Data terkait perkembangan lahan pertanian pangan di Sulawesi Selatan sebagaimana yang tersaji dalam tabel dibawah.

**Tabel II.218.
Perkembangan Lahan Pertanian Pangan di Sulawesi Selatan
Tahun 2015-2019**

No.	Kab./Kota	Tahun					Perkembangan Rata-Rata Tahun	
		2015	2016	2017	2018	2019	(Ha)	(%/Thn)
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(%/Thn)
1	Kep. Selayar	3,572	3,825	3,825	1,507	1,809	-441	-8.37
2	Bulukumba	22,828	22,912	22,954	22,232	24,844	504	2.29
3	Bantaeng	7,829	7,829	7,829	10,339	6,585	-311	-1.06
4	Jeneponto	16,853	17,303	17,666	27,709	25,996	2,286	13.86
5	Takalar	16,779	16,619	16,876	18,424	17,182	101	0.76
6	Gowa	34,238	34,219	34,223	37,272	32,903	-334	-0.71

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

7	Sinjai	15,863	15,949	16,136	16,082	16,322	115	0.72
8	Maros	25,997	26,122	25,952	25,978	26,205	52	0.2
9	Pangkep	16,732	16,732	16,732	16,770	16,819	22	0.13
10	Barru	14,818	14,818	14,666	15,939	15,703	221	1.54
11	Bone	110,760	113,076	112,968	115,248	117,842	1,771	1.57
12	Soppeng	28,341	28,744	29,082	27,211	28,355	4	0.09
13	Wajo	96,634	99,720	100,354	98,897	101,326	1,173	1.21
14	Sidrap	48,603	48,076	48,512	46,970	48,831	57	0.15
15	Pinrang	53,584	54,615	55,111	46,141	48,811	-1,193	-1.91
16	Enrekang	10,861	10,831	11,178	9,562	8,454	-602	-5.78
17	Luwu	38,430	38,930	33,234	29,577	30,655	-1,944	-5.17
18	Tana Toraja	10,761	10,761	10,761	14,043	14,392	908	8.25
19	Luwu Utara	27,709	27,542	27,654	21,671	27,874	41	1.7
20	Luwu Timur	26,170	26,487	26,737	17,931	23,394	-694	-0.08
21	Toraja Utara	15,378	15,342	15,342	16,423	16,047	167	1.13
22	Kota Makassar	2,636	2,636	2,636	2,174	2,035	-150	-5.98
23	Kota Pare Pare	834	834	834	937	865	8	1.17
24	Kota Palopo	2,690	2,689	2,685	1,837	1,570	-280	-11.58
Sulawesi Selatan		648,900	656,611	653,947	640,874	654,819	1,481	0.24

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulsel, Tahun 2019

2. Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Palawija, Tanaman Pangan Terhadap PDRB dan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Pada sektor pertanian menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi mayoritas penduduk Sulawesi Selatan, dimana perekonomian Sulawesi Selatan masih ditopang oleh sektor pertanian dengan kontribusi sekitar 21,28 persen dari seluruh sektor pada tahun 2019. Sementara produktivitas pertanian (palawija) seperti jagung dan umbi-umbian yang menjadi faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian (palawija) yang kontribusinya pada tahun 2019 sebesar 6,01 persen.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 terus difokuskan pada sektor pertanian, khususnya sub sektor tanaman pangan. Namun demikian bila melihat kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB Sulawesi Selatan mengalami penurunan 3 (tiga) tahun terakhir dimana pada tahun 2016 mencapai 7,83 persen turun menjadi 6,28 persen pada tahun 2019 atau 1,55 persen.

Untuk sektor pertanian Sub sektor hortikultura juga menjadi fokus pengembangan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian (hortikultura) terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan dari tahun 2018 yaitu 1,12 persen. Adapun produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mencapai 50,03 persen, sedikit mengalami penurunan sebesar 0,10 persen bila dibandingkan pada tahun 2018 dengan capaian 50,13 persen, sebagaimana yang tersaji dalam berikut:

Tabel II.219.

Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Palawija, Tanaman Pangan Terhadap PDRB dan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (Sumber :Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulsel, Tahun 2019)	%	23,14	23,43	23,13	22.52	21,28

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020)	%	3,30	3,94	4,07	5,42	6,01
Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB (Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulsel, Tahun 2019)	%	7,65	7,83	7,55	7,12	6,28
Kontribusi sektor pertanian (hortikultura) terhadap PDRB (Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020)	%	1,30	1,31	1,24	1,12	1,12
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020)	%	52,41	50,72	50,93	50,13	50,03

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulsel, Tahun 2019

2.3.3.2.2 Peternakan

Perkembangan sektor peternakan terhadap PDRB terus pula dikembangkan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data menunjukkan bahwa kontribusi sektor peternakan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 1,08 persen sedangkan pada tahun 2019 capaian sebesar 1,18% atau naik dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 1,83 persen. Untuk perkembangan sub sektor peternakan melalui kontribusi produksi kelompok petani ternak terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurung waktu tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi. Berdasarkan data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 mencapai 31 persen dan turun menjadi 30 persen pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 naik mencapai 33 persen, begitu pula pada tahun 2018 mengalami kenaikan capaian sebesar 34 persen, sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 32 persen, sebagaimana yang tesaji dalam tabel dibawah ini:

**Tabel II.220.
Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	%	1,08	1,11	1,10	1,16	1,18
Kontribusi Produksi Kelompok Petani Ternak terhadap PDRB	%	31	30	33	34	32

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2019

Produktivitas hasil peternakan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sampai tahun 2019, menunjukkan bahwa jenis produksi daging terus meningkat dimana pada tahun 2015 mencapai 121.141,81 Kg, dan hingga tahun 2019 mencapai 136.772,04 Kg atau rata-rata capaian 2,25 persen. Sementara pada jenis produksi telur juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 mencapai sebesar 133.600,12 Kg sedangkan pada tahun 2019 mencapai 152.785,41 Kg, mengalami penurunan dari tahun 2018, namun secara kumulatif rata – rata mencapai 1,49 persen. Begitu pula dari jenis produksi susu dimana 4 (empat) tahun terakhir terus meningkat yaitu pada tahun 2015 mencapai 2.727.000 Kg sedangkan pada tahun 2018 mencapai 3.173.400 Kg, dan pada tahun 2019

mengalami penurunan dan hanya mencapai 1.888.200 Kg, namun secara kumulatif rata – rata mencapai 7,09 persen, sebagaimana yang tersaji dalam tabel dibawah ini:

**Tabel II.221.
Produktivitas Hasil Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Jenis Produksi	Satuan	Produktivitas Hasil Peternakan					(%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
Daging	Kg	121.141.815	119.811.816	126.958.696	136.712.419	136.772.042	2,25
Telur	Kg	133.600.123	143.847.787	151.100.277	170.766.932	152.785.412	1,49
Susu	Kg	2.727.000	2.752.200	3.173.400	3.173.400	1.888.200	7,09

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2019

Populasi sapi menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2015 mencapai sebesar 1,201,601ekor dan hingga tahun 2019 mencapai sebesar 1,310,224 ekor. Adapun 4 (empat) kabupaten/kota penyumbang terbesar dengan populasi sapi tertinggi pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Bone sebesar 422.059 ekor, disusul Kabupaten Gowa sebesar 106.726 ekor dan Kabupaten Wajo sebesar 91.989 ekor, serta Kabupaten Sinjai sebesar 85.446 ekor, sebagaimana yang tersaji dalam tabel dibawah ini:

**Tabel II.222.
Populasi Sapi Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak (Ekor)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kep. Selayar	15,995	16,756	18,070	18,894	18,760
2	Bulukumba	65,451	68,345	70,662	73,177	75,993
3	Bantaeng	24,891	26,046	27,789	28,824	24,870
4	Jeneponto	27,817	29,925	30,955	32,246	25,989
5	Takalar	38,410	36,374	36,025	32,336	44,345
6	Gowa	104,257	111,399	107,573	109,605	106,726
7	Sinjai	92,537	97,805	101,860	105,806	85,446
8	Bone	325,425	362,821	395,310	419,819	422,059
9	Maros	72,869	76,381	80,540	83,902	73,520
10	Pangkep	45,981	49,585	53,377	53,816	41,053
11	Barru	65,645	68,805	70,850	71,857	62,706
12	Soppeng	36,310	41,327	46,441	49,120	33,153
13	Wajo	89,858	100,913	111,968	116,518	91,989
14	Sidrap	49,960	54,950	60,433	64,604	36,063
15	Pinrang	24,072	24,937	25,821	26,628	28,114
16	Enrekang	47,433	47,552	48,912	50,175	54,460
17	Luwu	18,133	17,886	18,870	18,065	19,721
18	Tana Toraja	6,659	6,714	6,961	7,006	8,066
19	Luwu Utara	24,852	26,456	27,963	29,361	27,652
20	Luwu Timur	13,740	14,010	15,021	15,546	17,198
21	Toraja Utara	352	450	422	493	178
22	Makassar	3,219	3,334	3,409	3,483	3,881
23	Pare-Pare	4,713	5,090	5,538	5,814	5,014

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak (Ekor)				
		2015	2016	2017	2018	2019
24	Palopo	3,022	3,096	3,415	3,619	3,268
Sulawesi Selatan		1,201,601	1,290,957	1,368,185	1,420,714	1,310,224

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

2.3.3.2.3 Perkebunan

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB mengalami penurunan pada tahun 2019 yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi PDRB atas harga yang berlaku hanya mampu mencapai sebesar 3,88 persen, bila dibandingkan pada tahun 2018 dan tahun 2017 dimana pada sektor ini mampu mencapai sebesar 4,26 persen, bahkan pada tahun 2015 sampai tahun 2016 dapat mencapai sebesar sebesar 4,45 persen. Adapun yang mempengaruhi terjadinya penurunan capaian disebabkan karena adanya alih fungsi lahan dan komoditi dari komoditas perkebunan ke komoditas lain diluar perkebunan. Selain itu adanya serangan hama dan anomali iklim yang terjadi, sehingga berpengaruh pula pada peningkatan produksi kakao. Untuk kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurung waktu tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 mencapai 89,78 persen, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan capaian 90,48 persen, kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 90,18 persen, selanjutnya pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar capaian diatas 2 (dua) tahun sebelumnya sebesar 90,90 persen, dan pada tahun 2019 terjadi penurunan dan hanya mencapai 87,71 persen, sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini:

**Tabel II.223.
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%	4,55	4,45	4,26	4,26	3,88
Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB	%	89,78	90,48	90,18	90,90	87,71

Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Produksi kakao menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebesar 118,775 ton, menurun bila dibandingkan pada tahun 2018 yang mampu mencapai sebesar 124.952 Ton. Faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan capaian produksi kakao pada tahun 2019 adalah adanya alih fungsi lahan dan komoditi dari komoditas perkebunan ke komoditas lain diluar perkebunan, adanya serangan hama dan anomali iklim yang terjadi, dan banyaknya tanaman kakao yang sudah mulai tua sehingga tidak mampu lagi memproduksi secara optimal. Namun demikian, beberapa pula kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih mampu memproduksi kakao secara optimal. Adapun 4 (empat) kabupaten/kota penyumbang terbesar produksi kakao tertinggi pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Luwu Utara sebesar 26.275 Ton, disusul Kabupaten Luwu sebesar 24.670 Ton, dan Kabupaten Bone sebesar 12.234 Ton serta Kabupaten Pinrang sebesar 11.067 Ton, sebagaimana yang tersaji dalam dibawah ini :

**Tabel II.224.
Produksi Kakao Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Kakao (Ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kep. Selayar	158	165	159	166	143
2	Bulukumba	4,985	5,802	4,596	4,552	3,808
3	Bantaeng	2,849	3,047	3,088	2,896	2,878
4	Jeneponto	50	34	33	33	33
5	Takalar	26	26	10	8	6
6	Gowa	1,342	1,458	1,350	1,472	832
7	Sinjai	1,646	2,495	3,023	2,479	3,023
8	Bone	17,474	18,079	12,234	10,692	12,234
9	Maros	351	586	586	582	587
10	Pangkep	51	55	58	58	61
11	Barru	485	751	263	265	265
12	Soppeng	12,345	12,361	9,807	7,310	3,372
13	Wajo	11,290	11,180	10,904	10,700	10,500
14	Sidrap	7,133	7,527	7,607	5,891	7,424
15	Pinrang	10,935	12,281	11,067	10,556	11,067
16	Enrekang	7,019	5,000	3,289	3,289	2,960
17	Luwu	27,000	28,989	24,262	24,640	24,670
18	Tana Toraja	1,364	1,392	966	1,348	1,014
19	Luwu Utara	22,296	27,391	26,275	26,406	26,275
20	Luwu Timur	11,908	12,250	12,862	9,975	6,780
21	Toraja Utara	812	812	822	813	406
22	Makassar	-	-	-	-	-
23	Pare-Pare	-	-	-	-	-
24	Palopo	-	1,240	828	821	437
Sulawesi Selatan		141,519	152,921	134,089	124,952	118,775

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

2.3.3.3 Kehutanan

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Perkembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurung waktu tahun 2015 sampai tahun 2019, terus mengalami perubahan dimana pada tahun 2017 merupakan persentase tertinggi dengan Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi sebesar 217.613,30 Ha atau telah merehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis sebesar 48,48 persen dari Luas Total Hutan dan Lahan Kritis sebesar 448.856,47 Ha. Pada tahun 2018 terjadi penurunan Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi sebesar 101.744,88 Ha atau hanya merehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis sebesar 23,13 persen dari Luas Total Hutan dan Lahan Kritis sebesar 439.937,89 Ha. Sementara pada tahun 2019 mengalami kenaikan persentase dimana Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi sebesar 122.254,06 Ha atau dapat merehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis sebesar 27,61 persen dari Luas Total Hutan dan Lahan Kritis sebesar 442.738,75 Ha sebagaimana yang tersaji dalam tabel dibawah ini:

**Tabel II.225.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	Ha	178.458,32	205.527,32	217.613,30	101.744,88	122.254,06
Luas Total Hutan dan Lahan Kritis	Ha	478.430,23	457.985,01	448.856,47	439.937,89	442.738,75
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	37,30	44,87	48,48	23,13	27,61

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

2. Kerusakan Kawasan Hutan

Luas kerusakan kawasan hutan pada tahun 2018 dan 2019 Provinsi Sulawesi Selatan terlihat mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya (2015-2017) dimana pada tahun 2018 Luas Kerusakan Kawasan Hutan sebesar 310.780 Ha atau 14,49 persen dari Luas Kawasan Hutan sebesar 2.145.031 Ha. Sedangkan pada tahun 2019 Luas Kerusakan Kawasan Hutan sebesar 362.260 Ha atau 13,88 persen dari Luas Kawasan Hutan sebesar 2.610.060 Ha. Terjadinya kenaikan yang sangat signifikan disebabkan karena adanya kewenangan pusat yang dilimpahkan dan menjadi tanggung jawab provinsi. Begitu pula dengan luasan kawasan hutan yang berkurang disebabkan karena adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana terdapat pelepasan wilayah kawasan hutan. Adapun kondisi kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini.

**Tabel II.226.
Kerusakan Kawasan Hutan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	327,85	49,00	25,18	310.780	362.260
Luas Kawasan Hutan	Ha	2.725.796	2.725.796	2.725,796	2.145.031	2.610.060
Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,01203	0,00180	0,0092	14,49	13,88

Sumber : Dinas Kehutanan, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

3. Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Bila melihat rasio luas kawasan lindung terhadap total Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2015 sampai tahun 2019, menunjukkan bahwa rasio luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan di Sulawesi Selatan pada periode sebelumnya (2015-2018) sebesar 76,45 persen menurun menjadi 75,86 persen pada tahun 2019 sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut.

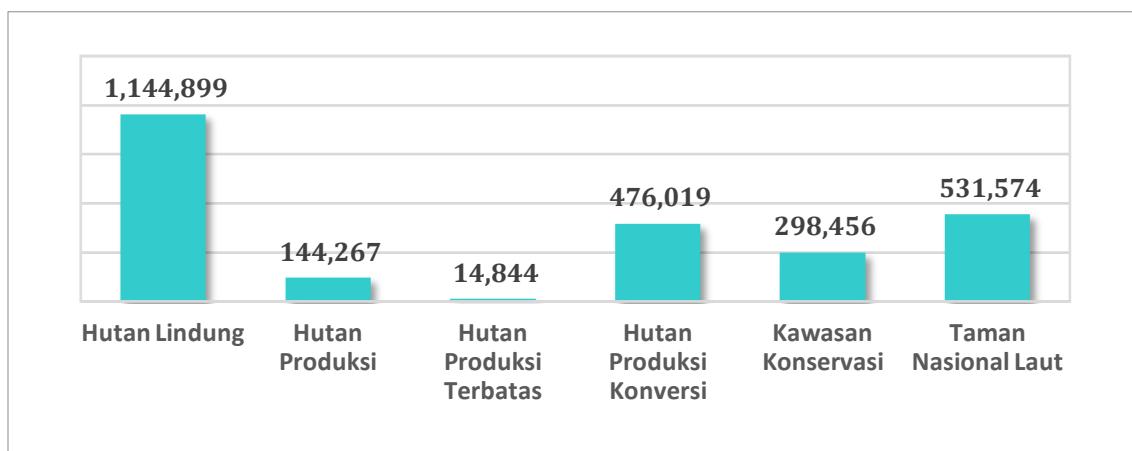
**Tabel II.227.
Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Luas Kawasan Lindung	Ha	2.083.950	2.083.950	2.083.950	2.083.950	1.979.929
Total Luas Kawasan Hutan	Ha	2.725.796	2.725.796	2.725.796	2.725.796	2.610.060
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Luas Kawasan Lindung : Luas Kawasan Hutan	76,45	76,45	76,45	76,45	75,86

Sumber : Dinas Kehutanan, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Sampai dengan tahun 2018 rasio luas Kawasan lindung terhadap total luas Kawasan hutan sebesar 76,45 persen. Sedangkan rasio luas Kawasan lindung terhadap total luas Kawasan hutan pada tahun 2019 sebesar 75,86 persen. Rasio ini merupakan luas Kawasan hutan lindung dan Kawasan pelestarian alam (hutan suaka alam, cagar alam) terhadap luas Kawasan hutan sebagaimana yang tersaji dalam grafik berikut.

**Grafik II.35.
Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha) Provinsi Sulawesi Selatan**



Sumber : Dinas Kehutanan, Tahun 2019 (Data Diolah)

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan salah satu konsep pengentasan kemiskinan melalui sektor kehutanan yang diharapkan dapat mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.o/1/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) revisi III, target program perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 403.162 Ha. Realisasi capaian program perhutanan sosial di Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2019 seluas 80.425,79 Ha atau 19,94 persen dari luas indikatif perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan yaitu 403.162 Ha, dengan jumlah KK sebanyak 43.414 KK.

Dengan capaian tersebut, diharapkan program perhutanan sosial di Sulawesi Selatan dapat lebih ditingkatkan mengingat banyaknya penduduk yang bermukim dalam kawasan hutan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat interaksi masyarakat terhadap hutan masih cukup tinggi sehingga program perhutanan sosial diharapkan dapat menjadi program unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Realisasi capaian program perhutanan sosial tersebut masih tergolong rendah sehingga perlu tenaga ekstra untuk menyelesaikan target Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) diantaranya dengan cara penyederhanaan kebijakan mengenai izin pemanfaatan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

kawasan hutan negara, terutama dari aspek layanan pengusulan dan layanan verifikasi teknis areal yang diusulkan serta dukungan pemerintah berupa pendampingan kelompok tanihutan, baik dalam penguatan kelembagaan, penyelesaian konflik, hingga memfasilitasi penguatan sistem pasar unit.

4. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan

Kawasan hutan Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mengalami perubahan luasan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 91.337 Ha, perubahan fungsi Kawasan hutan seluas ± 84.032 Ha dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi Kawasan hutan seluas ± 1.838 Ha. Namun bila melihat kondisi perubahan peruntukan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 434 Tahun 2009 menunjukkan bahwa dalam kurung 10 (sepuluh) tahun terakhir telah terjadi perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan dimana pada tahun 2009 Total Luas Hutan sebesar 2,725,796 Ha dan secara keseluruhan mengalami penurunan luas kawasan hutan sebesar 115.736 Ha pada tahun 2019 sehingga total luas kawasan hutan menjadi 2,610,060Ha, hanya pada kawasan hutan produksi yang mengalami peningkatan sebesar 20.244 Ha atau sebesar 5,00 persen dari total luas kawasan hutan.

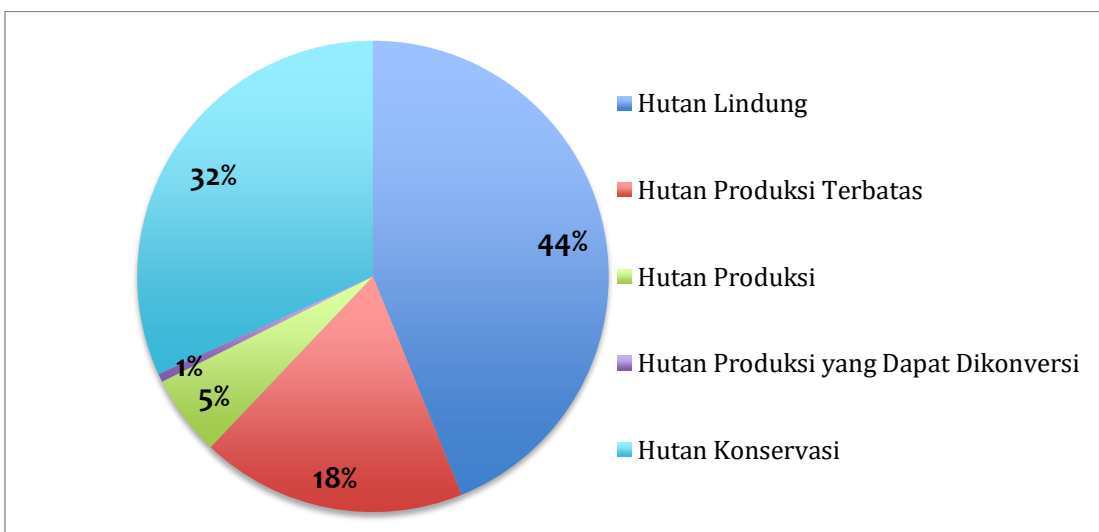
**Tabel II.228.
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan**

Peruntukan Kawasan Hutan	Luas Berdasarkan SK. No. 434 Tahun 2009 (Hektar)	Luas Berdasarkan SK Nomor 362 Tahun 2019 (Hektar)	Bertambah/ Berkurang (Hektar)	Luas Kawasan Hutan 2019 (%)
Hutan Lindung	1,232,683	1,144,899	(87,784)	43.86
Hutan Produksi Terbatas	494,846	476,019	(18,827)	18.24
Hutan Produksi	124,024	144,268	20,244	5.53
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	22,976	14,844	(8,132)	0.57
Hutan Konservasi	851,267	830,030	(21,237)	31.80
Total	2,725,796	2,610,060	(115,736)	100

Sumber : Dinas Kehutanan, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

Persentase perubahan peruntukan kawasan hutan Sulawesi Selatan yang dilakukan dalam rangka perubahan RTRWP Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II.36.
Persentase Perubahan Luas Areal Kawasan Hutan Sesuai Peruntukan Provinsi Sulawesi Selatan**



Sumber : Dinas Kehutanan, Tahun 2020

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Presentase Rumah Tangga Pengguna Listrik, Pertambangan Tanpa Izin, Rasio Ketersediaan Daya Listrik dan Luas Wilayah Pemataan

Persentase rumah tangga pengguna listrik Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 persentase rumah tangga pengguna listrik sebesar 88,30 persen dan mengalami peningkatan menjadi 97,80 persen pada tahun 2019. indikator ini menggambarkan bahwa sebesar 97,80 persen rumah tangga provinsi sulawesi selatan telah memiliki listrik.

Indikator terkait rasio ketersediaan listrik di provinsi Sulawesi selatan selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuatif namun secara akumulatif mengalami kenaikan sebesar 3 persen. Pada tahun 2015 rasio ketersediaan listrik sebesar 95 persen dan meningkat menjadi 98 persen pada tahun 2019. indikator ini menggambarkan bahwa antara kebutuhan listrik dan jumlah daya yang terpasang sudah hampir sebanding.

Sementara indikator persentase pertambangan tanpa izin Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 secara akumulatif mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2015 persentase pertambangan tanpa izin sebesar 35,69 persen dan menurun menjadi 15,57 persen pada tahun 2019 dari total jumlah luas area penambangan liar di provinsi sulawesi selatan.

Selain hal tersebut diatas, yang terkait dengan luas wilayah pemataan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun tahun 2015 sampai tahun 2019 secara akumulatif mengalami penurunan, pada tahun 2015 seluas 15.672 ha dan menurun menjadi 9.200 ha tahun 2019.

Tabel II.229.

**Presentase Rumah Tangga Pengguna Listrik, Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Persentase Pertambangan Tanpa Izin dan Luas Wilayah Pemataan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Jenis	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	88,30	90,78	93,19	95,53	97,80
Rasio ketersediaan daya listrik	%	95	82	104	97	98
Persentase pertambangan tanpa ijin	%	35,69	40,01	14,22	11,30	15,57
Luas Wilayah Pemetaan	Ha	15.672	9.244	6.500	4.558	9.200

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2020

2. Rasio Desa Berlistrik

Kinerja penyediaan energi listrik di Sulawesi Selatan meningkat pada lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 rasio desa berlistrik di Sulawesi Selatan sudah mencapai 99 persen yang mengindikasikan bahwa masih terdapat 31 desa dari 3.051 desa di Sulawesi Selatan yang belum berlistrik.

Tabel II.230.

**Rasio Desa Berlistrik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Desa Berlistrik	Desa	2.736	2.777	2.807	2.921	3.020
Jumlah Desa	Desa	3.033	3.033	3.034	3.049	3.051
Rasio Desa Berlistrik	Desa Berlistrik : Jumlah Desa	0.90	0.92	0.93	0.96	0.99

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Tahun 2020

3. Jumlah Produksi Mineral dan Batubara

Pemenuhan kebutuhan energi di Sulawesi Selatan selain dipenuhi melalui pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan berupa Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibangun pada desa yang terpencil dan terisolir juga dipenuhi melalui pembangunan bio gas. Pada tahun 2019, dilakukan pembangunan instalasi biogas sebanyak 30 unit, sehingga jumlah instalasi biogas yang dibangun sejak tahun 2015 sudah berjumlah 1.400 Unit.

Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya cadangan sumber daya mineral. Selama lima tahun terakhir telah dilakukan penyelidikan dan eksplorasi ketersediaan sumber daya dan diperoleh data bahwa Sulawesi Selatan memiliki cadangan sumberdaya mineral berupa mineral batuan, mineral logam dan mineral bukan logam sebanyak 1,422,136,384 Ton dengan luas wilayah pemetaan seluas 45,174 Ha.

**Tabel II.231.
Jumlah Produksi Mineral dan Batubara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Jenis	Satuan	Jumlah Produksi Mineral dan Batubara				
		2015	2016	2017	2018	2019
Logam	Ton	87.901	77.581	79.837	73.879	638.197
Non Logam	Ton	10.245.160	11.082.066	16.894.928	14.684.509	3.109.021
Batuan	M ³	7.347.647	1.212.249	8.481.874	689.921	1.524.910
Batubara	Ton	12.472	10.226	10.070	51.063	12.558

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2020

Pemenuhan kebutuhan air untuk keperluan masyarakat, selain diperoleh dari sumber air permukaan, juga dipenuhi dari pemanfaatan air tanah dengan melakukan pembangun sUsia bor. Pada tahun 2019 dilakukan pembangunan sUsia bor pada wilayah rawan air di Sulawesi Selatan sebanyak 6 unit, sehingga selama kurun waktu lima tahun telah terbangun 54 unit bor yang tersebar di berbagai wilayah yang rawan air bersih di Sulawesi Selatan.

2.3.3.5 Perdagangan

1. Ekspor Bersih Perdagangan

Indikator terkait ekspor bersih perdagangan provinsi sulawesi selatan dalam kurun tahun 2015 sampai tahun 2019 berfluktuatif, capaian nilai ekspor bersih perdagangan Sulawesi Selatan tertinggi pada tahun 2015 dengan surplus sebesar 415.988.894 US\$ dan terendah pada tahun 2017 karena mengalami defisit sebesar 22.468.747 US\$. setelah mengalami defisit selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2017 dan tahun 2018 nilai ekspor bersih perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengalami surplus tahun 2019 sebesar 59.970.000 US\$.

**Tabel II.232.
Ekspor Bersih Perdagangan
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	415.988.894	310.889.806	-22.468.747	-19.444.277	59.970.000

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Selanjutnya indikator mengenai capaian cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 sampai tahun 2019 secara akumulatif cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2015 cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,92 persen dan menurun menjadi 0,85 persen pada tahun 2019. Agar kondisi ini dapat meningkat maka diperlukan dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap pedagang/usaha informal yang ada di daerahnya.

**Tabel II.233.
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,92	0,94	0,74	0,83	0,85

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.3.6 Perindustrian

1. Cakupan bina kelompok pengrajin

Belum adanya data spesifik yang menghitung jumlah cakupan kelompok pengrajin. Sedangkan data di dalam tabel didapatkan berdasarkan hasil perhitungan jumlah industri kerajinan yang bersumber dari data industri.

**Tabel II.234.
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	978	1.065	1.121	1.134	1.189

Sumber : Dinas Perindustrian Prov. Sulsel, Tahun 2019

2. Pertumbuhan Industri Pengolahan

Pemerintah Sulawesi Selatan terus menggenjot perkembangan industri pengolahan, khususnya pada sektor pertanian dan kelautan yang merupakan komoditi unggulan daerah, namun masih memerlukan upaya lebih agar kinerja dapat meningkat yang pada tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 5,56 persen yang menurun dari 15,02 persen pada tahun 2018.

**Tabel II.235.
Pertumbuhan Industri Pengolahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase pertumbuhan industri pengolahan	%	13,69	13,92	14,51	15,02	5,56

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

3. Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah, Besar, dan UMKM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri, sasaran pokok pembangunan perindustrian adalah menciptakan industri yang berdaya saing berbasis pada sumber daya unggulan daerah didukung kekuatan struktur industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global.

**Tabel II.236.
Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah, Besar, dan UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perkembangan Industri Pengolahan	%	13,69	13,92	14,51	15,02	15,32
Industri Besar	Unit	338	341	348	350	532
Industri Kecil	Unit	12.166	12.370	12.894	13.347	18.680
Industri Menengah	Unit	670	681	710	734	880
Usaha Mikro Kecil Menengah	Unit	37.967	38.917	40.561	41.932	45.760

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

2.3.3.7 Transmigrasi

1. Persentase Transmigran Swakarsa

Indikator terkait persentase transmigrasi swakarsa dalam kurun tahun 2015 sampai tahun 2019 meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 Persentase Transmigrasi swakarsa sebesar 90,77 persen, dan meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2019. Capaian ini seiring dengan meningkatnya peran dan perhatian pemerintah dalam mengembangkan kawasan transmigrasi di kabupaten sehingga meningkatkan minat pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan kawasan transmigrasi di wilayahnya termasuk di Sulawesi Selatan.

**Tabel II.237.
Persentase Transmigran Swakarsa
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase transmigran swakarsa	%	90,77	93,70	95,72	98,67	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.3.8 Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana produksi perikanan pada tahun 2015 sebesar 3.786.837,2 ton meningkat sebesar 3.941.648,8 ton pada tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.262.553,5 ton, pada tahun 2018 produksi mengalami penurunan sebesar 3.895.086,6 ton atau turun 79,4 persen, hal ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi rumput laut akibat pergeseran pemanfaatan lahan di Kabupaten Takalar, namun pada tahun 2019 produksi mengalami peningkatan menjadi 4.076.527,2 ton atau naik 81,1 persen.

**Tabel II.238.
Produksi Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

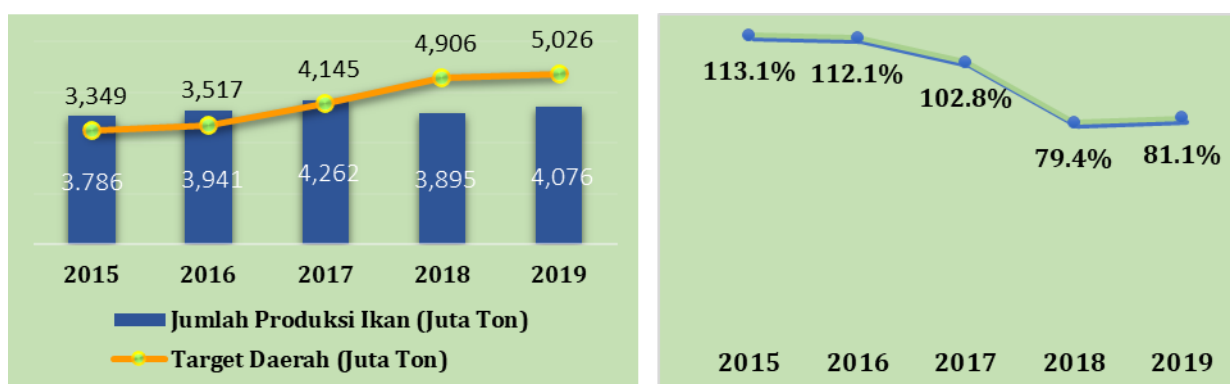
Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Produksi Ikan	Ton	3.786.837	3.941.649	4.262.554	3.895.087	4.076.527
Target Daerah	Ton	3.349.135	3.517.299	4.145.761	4.906.673	5.026.223

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Produksi Perikanan	%	113,1	112,1	102,8	79,4	81,1

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain mulai tahun 2015 sampai tahun 2019 telah dilakukan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, bantuan bibit, akses permodalan, penerapan inovasi teknologi dan perluasan jejaring serta kemitraan. Kenaikan produksi perikanan didukung pada nilai produksi, dimana kontribusi produksi dari sektor perikanan budidaya sebesar 89 persen dan perikanan tangkap sebesar 11 persen. Kenaikan nilai produksi perikanan sangat dipengaruhi oleh nilai produksi rumput laut, dimana kontribusi produksi nilai rumput laut terhadap nilai produksi perikanan budidaya selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2015 kontribusinya sebesar 49 persen, dan tahun 2019 sebesar 52 persen. Adapun Kabupaten penghasil rumput laut di Sulawesi Selatan. antara lain Kabupaten Luwu sebesar 604.420,8 ton, Kabupaten Wajo sebesar 476.055 ton, Kabupaten Pangkep 427.208 ton, dan Kabupaten Takalar sebesar 466.014,1 ton.

Grafik II.37.
Produksi Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 (Data Diolah)

2. Konsumsi Ikan

Dalam periode 2015-2019 telah terjadi peningkatan konsumsi ikan dengan capaian rata-rata 4,5 persen pertahun, dimana pada tahun 2015 sebesar 49,7 kg/kap, meningkat menjadi sebesar 57,4 kg/kap pada tahun 2019 dan telah melampaui jumlah konsumsi ikan yang ditargetkan untuk Sulawesi Selatan sebesar 57,02 Kg/kapita.

Tabel II.239.
Konsumsi Ikan
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	49,7	52,5	55,2	55,9	57,4
Target Daerah	Kg	45,2	45,6	46,1	46,5	57,02
Konsumsi Ikan	%	110,0	115,1	119,7	120,2	100,6

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan selama 5 tahun terakhir sekitar 469 kelompok dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok. Tahun 2015 hanya 89 kelompok yang

mendapatkan bantuan, sedangkan tahun yang paling banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah adalah pada tahun 2016 yaitu sebesar 193 kelompok. Kemudian di tahun 2017 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 78 kelompok dan di tahun 2018 sebanyak 50 kelompok. Pada tahun 2019 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 55 Kelompok. Hal ini Cakupan bina kelompok nelayan diarahkan untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan.

**Tabel II.240.
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun n	Klp	89	193	78	50	55
Jumlah Kelompok Nelayan	Klp	295	333	358	308	314
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	30,17	57,96	21,79	16,23	17,52

Sumber : Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dimana produksi kelompok nelayan pada tahun 2015 sebesar 93.614 ton, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 181.055,91 ton, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 78.393,90 ton kemudian pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 173.412,00 ton, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 174.620,24 ton.

**Tabel II.241.
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Ton	93.614	181.055,91	78.393,90	173.412,00	174.620,24
Jumlah Produksi Ikan di Daerah	Ton	310.290,4	312.380,8	359.770,1	366.540,6	436.550,6
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	28,71	55,18	20,02	47,66	40

Sumber : Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

5. Proporsi Tangkap Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman

Tahun 2015, proporsi tangkapan ikan sebesar 41,7persen dan sampai tahun 2018 mencapai 48,92 persen. Walaupun proporsi tersebut mengalami kenaikan, namun masih dapat dikendalikan untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap tahun 2011 untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk propinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk propinsi sebesar 743.800 ton. Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh Kabupaten/kota.

**Tabel II.242.
Proporsi Tangkapan Ikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Tangkapan Ikan	Ton	310.290	312.381	359.770	363.853	436.551
80 persen dari Tangkapan Maksimum Lestari	Ton	743.776	743.776	743.776	743.776,0	743.776,0
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	41,7	42,0	48,4	48,92	58,69

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

6. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial

Luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 674.119,88 Ha, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan maka pada periode tahun 2018-2023 luas kawasan akan ditargetkan seluas 1,038.859,36 Ha dengan penambahan sebesar 97.648,48 Ha. Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik termasuk penguatan fungsi otoritas pengelolaan konservasi sumberdaya ekosistem dan habitat laut maka pada tahun 2015 kawasan konservasi yang dikelola bertambah sebesar 92.557,0 Ha kemudian tahun 2016 dengan adanya kewenangan pengelolaan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014 sehingga pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan telah bertambah 95.241,1 Ha atau seluas 769.360,98 dan tahun 2017 pengelolaan kawasan konservasi bertambah sebesar 95.752,1 Ha sehingga luas kawasan konservasi mencapai 769.871,98, kemudian pada tahun 2018 luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 433.551,94 Ha atau mencapai 353,3 persen dari target 122.728 Ha dan tahun 2019 meningkat menjadi 433.574,94 Ha.

**Tabel II.243.
Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Territorial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kawasan Lindung Perairan	Ha	92.557,1	95.241,0	95.752,1	433.551,94	433.574,94
Total Luas Perairan Tutorial	Km ²	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	Kawasan Lindung Perairan : Total Luas Perairan Tutorial	0,22	0,22	0,22	1,01	1,01

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

7. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk

proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Memperhatikan kemampuan tukar hasil tangkapan nelayan di Sulawesi Selatan yang besarnya di atas 100, maka diperoleh gambaran bahwa pada dasarnya kondisi nelayan di Sulawesi Selatan semakin meningkat. Namun pola konsumsi nelayan terhadap kebutuhan sandang, pangan dan papan serta kebutuhan BBM untuk operasional melaut yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan hasil tangkapan nelayan sehingga nilai tukar nelayan Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 107,8 pada tahun 2018 menjadi 107,6 pada tahun 2019.

**Tabel II.244.
Nilai Tukar Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks yang Diterima Nelayan	107,80	156,70	186,80	140,8	143,5
Indeks yang Dibayar Nelayan	140,90	143,70	128,10	130,5	133,9
Nilai Tukar Nelayan	76,51	109,05	145,82	107,8	107,6

Sumber : Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

8. Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain mulai tahun 2015-2019 telah dilakukan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, bantuan bibit, akses permodalan, penerapan inovasi teknologi dan perluasan jejaring serta kemitraan. Kenaikan produksi perikanan didukung pada nilai produksi, dimana kontribusi produksi dari sektor perikanan budidaya sebesar 89 persen dan perikanan tangkap sebesar 11 persen. Kenaikan nilai produksi perikanan sangat dipengaruhi oleh nilai produksi rumput laut, dimana kontribusi produksi nilai rumput laut terhadap nilai produksi perikanan budidaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2015 kontribusinya sebesar 49 persen, meningkat di tahun 2018 sebesar 51 persen dan tahun 2019 sebesar 52 persen.

**Tabel II.245.
Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

No.	Kab/Kota	Jumlah Produksi Rumput Laut (Ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kep. Selayar	285	170	334	366	395
2	Bulukumba	157.920	158.440	168.717	178.848	177.351
3	Bantaeng	85.349	82.628	83.455	84.077	84.805
4	Jeneponto	138.081	149.885	150.510	193.518	165.036
5	Takalar	846.395	923.832	996.550	538.684	466.014
6	Gowa	-	-	-	-	-
7	Sinjai	7.680	12.220	40.208	40.776	43.426
8	Bone	126.128	128.204	247.178	275.627	291.686
9	Maros	-	-	125	13.241	12.475
10	Pangkep	179.603	202.552	280.976	314.201	427.208
11	Barru	788	892	936	959	1.114
12	Soppeng	-	-	-	-	-

No.	Kab/Kota	Jumlah Produksi Rumput Laut (Ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
13	Wajo	263.159	237.900	462.479	462.475	476.055
14	Sidrap	-	-	-	-	-
15	Pinrang	6.754	9.027	11.056	15.449	16.266
16	Enrekang	-	-	-	-	-
17	Luwu	392.024	244.946	622.251	598.037	604.420
18	Tana Toraja	-	-	-	-	-
19	Luwu Utara	31.422	33.931	190.255	196.989	206.618
20	Luwu Timur	141.789	145.099	294.406	294.897	299.067
21	Toraja Utara	-	-	-	-	-
22	Makassar	-	-	-	-	-
23	Pare-Pare	28	-	-	-	-
24	Palopo	31.589	27.519	113.536	109.386	112.276
Sulawesi Selatan		2.059.892	2.409.022	2.357.245	3.662.971	3.384.216

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

9. Produksi Udang Menurut Kabupaten/Kota

Sulawesi Selatan merupakan penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Selain rumput laut, Sulawesi Selatan juga dikenal sebagai penghasil udang terutama jenis udang Vannamei dan udang windu. Selama 5 tahun terakhir kenaikan produksi udang di Sulawesi Selatan sebesar 2,3 persen. Pada tahun 2019 Kabupaten penghasil udang di Sulawesi Selatan antara lain Kabupaten Pinrang sebesar 11.239,1 Ton, Kabupaten Bone sebesar 5.103,4 ton, Kabupaten Barru sebesar 4.211,4 ton, Kabupaten Pangkep sebesar 3.922 ton, Kabupaten Luwu sebesar 3.691,7 ton, Kabupaten Maros sebesar 3.381,2 ton, Kabupaten Bulukumba sebesar 3.337,5 ton. Selain itu, Bandeng merupakan salah satu komoditi unggulan sektor perikanan budidaya, dimana kenaikan rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 11,3persen. Pada tahun 2019 Kabupaten penghasil Bandeng di Sulawesi Selatan antara lain Kabupaten Bone sebesar 78.199,0 Ton, Kabupaten Wajo sebesar 22.144,1,0 ton, Kabupaten Pinrang sebesar 20.236,0 Ton, Kabupaten Pangkep sebesar 14.541,0 ton, Kabupaten Luwu Timur sebesar 11.710,0 Ton. Dari sisi produksi, capaian hasil komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC) telah terjadi kenaikan rata-rata selama 5 tahun sebesar 7,8 persen.

**Tabel II.246.
Produksi Udang Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

No.	Kab/Kota	Jumlah Produksi Udang (Ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kep. Selayar	261,3	189	74,4	75,3	68,2
2	Bulukumba	2.951,5	3.287,9	3.990,3	5.302,7	3.337,5
3	Bantaeng	32,5	38,3	34,9	39,9	56,9
4	Jeneponto	610,8	586,7	684,2	1.206,3	1.654,3
5	Takalar	4.538,7	4.805	4.516	1.908,4	1.007,7
6	Gowa	51,4	67,2	67,5	71,6	76,7
7	Sinjai	117,7	169,4	160,2	177,6	172,7
8	Bone	4.189,4	3.840,5	4.885,9	4.900,1	5.103,4

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Kab/Kota	Jumlah Produksi Udang (Ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
9	Maros	3.485,2	2.911,5	3.122,6	3.484,1	3.381,2
10	Pangkep	2.546	2.850	3.463	3.851,0	3.922,0
11	Barru	3.209,4	3.430,8	3.810	4.188,4	4.211,4
12	Soppeng	-	-	-	-	-
13	Wajo	2.086,8	1.849,1	1.956,1	1.502,5	1.446,6
14	Sidrap	-	-	-	-	-
15	Pinrang	7.479,5	7.467,2	9.935,7	11.100,0	11.239,1
16	Enrekang	-	-	-	-	-
17	Luwu	3.585,9	3.812,7	3.847,4	3.882,3	3.691,7
18	Tana Toraja	-	-	-	-	-
19	Luwu Utara	1.367,8	1.317,4	1.331,1	1.298,1	1.430,0
20	Luwu Timur	3.397,8	4.510,4	2.897	2.951,0	3.091,5
21	Toraja Utara	-	-	-	-	-
22	Makassar	248,1	302,9	300,3	331,1	367,0
23	Pare-Pare	16,9	10,2	15,7	13,1	17,2
24	Palopo	170	239,7	249,2	240,5	245,6
Sulawesi Selatan		43.865	40.346,7	41.685,9	45.342	44.520,5

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

10. Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

Produksi perikanan Sulawesi Selatan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap berfluktuasi, dimana tahun 2017 merupakan tahun dengan produksi perikanan terbesar yaitu sebanyak 4,26 juta ton. Produksi perikanan Sulawesi Selatan didominasi oleh produksi perikanan budidaya dengan persentase rata-rata 91,2 persen dari total volume produksi perikanan. Fluktuasi volume produksi perikanan Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh kinerja produksi perikanan budidaya yang menurun pada tahun 2018, sedangkan kinerja produksi perikanan tangkap menunjukkan adanya konsistensi peningkatan produksi yang pada tahun 2019 mencapai 436,5 ribu ton atau 10,72 persen dari total volume produksi perikanan.

Tabel II.247.

Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
Total Volume Produksi Perikanan	Ton	3.786.837,2	3.941.648,8	4.262.553,5	3.895.086,6	4.076.527,2
Volume produksi perikanan budidaya	Ton	3.476.546,8	3.629.268,0	3.902.783,4	3.531.233,6	3.639.976,6
Volume produksi perikanan tangkap	Ton	310.290,4	312.380,8	359.770,1	363.853,0	436.550,6

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

2.3.4 Penunjang Urusan

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

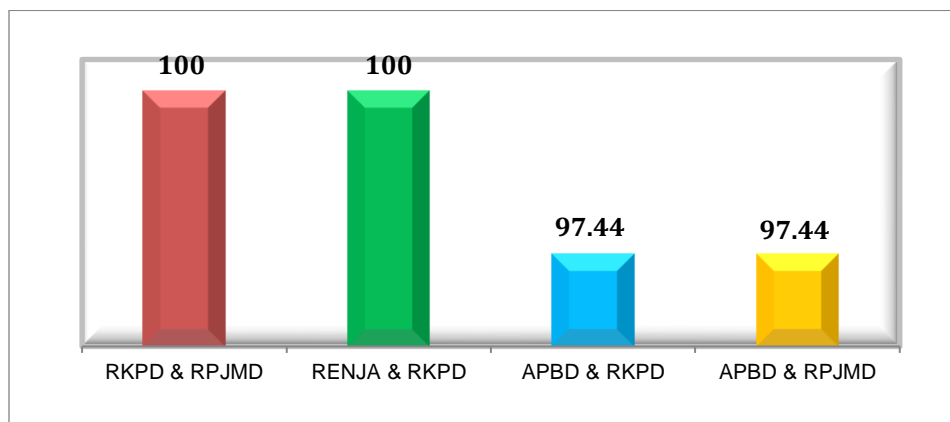
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 dan dokumen rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029.

Dokumen RPJPD dan RTRWP menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan seiring dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan akan menjadi acuan di dalam penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun konsistensi perencanaan antara RPJMD dan RKPD Sulawesi Selatan tahun 2019 dimana Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah 431 program, dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2019 adalah 431 program dengan tingkat konsistensi sebesar 100 persen, sedangkan konsistensi RKPD ke dalam APBD sebesar 97,44 persen, sebagai mana dapat dilihat pada Grafik berikut.

Gambar 2.13
Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan
RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019



Sumber data : Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan 2019

2.3.4.2 Keuangan

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik tersebut saat ini telah menjadi sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan indikator Opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk opini LKPD tahun anggaran 2019 sementara masih dalam tahap pengusulan dan diharapkan sekitar bulan Mei baru keluar hasil penilaian dari BPK. Sebagai perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah meraih predikat opini WTP terhadap laporan keuangan daerah selama 7 tahun secara berturut turut. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang secara konsisten menjaga dan mentaati aspek-aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan.

**Tabel II.248.
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2. Persentase SILPA

Perkembangan SILPA APBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuatif dimana silpa terkecil dicapai pada tahun 2019 sebesar 0,58 persen dan SILPA terbesar yaitu 2,89 persen pada tahun 2015, walaupun silpa terus menurun tetapi sekecil apapun sangat berarti serta akan berpengaruh terhadap belanja APBD, disisi lain turut mempengaruhi bagaimana sistem perencanaan yang telah ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dan transfer anggaran keuangan dari pusat berdasarkan schedule penganggaran yang telah disusun sehingga daya serap bisa maksimal. Dari trend tersebut menunjukkan bahwa SILPA APBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata masih dikategorikan sangat rendah.

**Tabel II.249.
Persentase SILPA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase SILPA	%	2,89	1,78	1,78	1,99	0,58

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel, Tahun 2019

3. Persentase belanja pendidikan (20%) dan Kesehatan (10%)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 4 mengamanatkan bahwa alokasi anggaran pembangunan pada bidang pendidikan terhadap APBD sebesar 20 persen yang dilakukan secara konsisten oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun persentase alokasi pada tahun 2015 mencapai 24,34 persen yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 besaran persentasenya meningkat menjadi 42,19 persen.

Adapun persentase belanja kesehatan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana capaian tertinggi dicapai pada tahun 2015 alokasi belanja kesehatan mencapai 11,97 persen dan terendah pada tahun 2019 hanya mencapai sebesar 9,01 persen. Meskipun terjadi penurunan persentase alokasi belanja kesehatan namun kinerja pelayanan Kesehatan tetap berjalan secara maksimal.

**Tabel II.250.
Persentase Belanja Pendidikan dan kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	24,34	28,82	42,53	35,60	42,19
Persentase belanja kesehatan (10%)	%	11,97	10,30	10,03	8,54	9,01

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

4. Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Tidak Langsung

Berdasarkan proporsi belanja langsung terhadap belanja tidak langsung selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan indikasi bahwa belanja tidak langsung lebih dominan dibanding belanja langsung, pada tahun 2015 mencapai 60,64 persen sedangkan belanja tidak langsung hanya 39,46 persen, dan pada tahun anggaran 2019 belanja tidak langsung sebesar 71,04persen dan belanja langsung sebesar 28,96 persen. Memperhatikan kondisi yang ada, menjadi bahan evaluasi secara selektif untuk lebih efisien dan efektif dalam menyusun anggaran sehingga presentase anggaran kedepan lebih proporsional dan lebih dirasakan oleh masyarakat.

**Tabel II.251.
Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Tidak Langsung
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Langsung	%	39,46	36,36	34,36	25,75	28,96
Belanja Tidak Langsung	%	60,54	63,64	65,64	74,25	71,04

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel, Tahun 2019

5. Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa

Adapun dana bagi hasil kabupaten/kota lima tahun terakhir capaiannya berfluktuasi, dimana capaian tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 19,52 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar 13,93 persen, sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel II.252.
Bagi Hasil Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Bagi hasil Kabupaten/kota	%	19,17	19,52	16,86	13,93	17,49

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel, Tahun 2019

6. Penetapan APBD

Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 penetapan APBD telah sesuai dengan tahapan dan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel II.253.
Penetapan APBD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penetapan APBD	No Perda dan Tanggal	Perda No. 8 Tahun 2014, Tanggal 31 Desember 2014	Perda No. 13 Tahun 2015, Tanggal 31 Desember 2015	Perda No. 11 Tahun 2016, Tanggal 30 Desember 2016	Perda No. 9 Tahun 2017, Tanggal 28 Desember 2017	Perda No. 6 Tahun 2018, Tanggal 28 Desember 2018

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel, Tahun 2019

2.3.4.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dari tahun ke tahun yang pelaksanaannya mulai Tahun 2015 sampai Tahun 2019 rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

umumnya 15 jam belajar setiap tahunnya, persentase keikutsertaan ASN dalam Pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ketesediaan biaya pada setiap tahun dalam APBD masih sangat rendah dan sangat fluktuatif dari tahun ke tahun, selain itu pelaksanaan Pergub No. 73 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Diklat Satu Pintu tidak dipatuhi oleh setiap OPD lingkup Pemerintah Provinsi sehingga data ASN yang telah mengikuti diklat teknis yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemerintah Provinsi tidak dapat diketahui oleh BPSDM. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal tahun 2015 sebesar 4,3 persen dan pada tahun 2019 sebesar 1,0 persen, artinya terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Demikian pula persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2015 sebesar 37,64 persen sementara untuk tahun 2019 hanya 0,6 persen artinya juga terjadi penurunan. Hal tersebut terjadi karena adanya peraturan perundang-undangan sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel II.254.

Rata-rata lama dan persentase ASN mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal serta struktural di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata lama ASN mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam Belajar/ Tahun	15	15	15	15	15
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,3	0,1	0,1	0,2	1,0
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	37,64	3,3	2,9	2,9	0,6

Sumber : Badan Pengembangan SDM dan Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sebanyak 64 jabatan sebagaimana amanat PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, namun seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan maka dilakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah sebagaimana amanat PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengakibatkan adanya perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Pada tahun 2017, jabatan pimpinan tinggi sebanyak 60 jabatan dan pada tahun 2019 sebanyak 59 jabatan, artinya mengalami tren penurunan jabatan pelaksana yang disebabkan oleh jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP), meninggal dunia, atau yang beralih ke jabatan fungsional lebih tinggi dibandingkan jumlah pegawai yang berasal dari penerimaan CPNS (2019) maupun usulan pindah masuk ke Instansi Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2016. Pada tahun 2015 jumlah jabatan sebesar 7.793 dan tahun 2016 sebesar 7.587, terjadi penurunan 1,03 persen jabatan administrasi, hal ini disebabkan penambahan jumlah pegawai (pelaksana) yang berasal dari penerimaan CPNS daerah (2015) dan usulan pindah masuk dari luar instansi ke Instansi Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun (Batas Usia Pensiun / BUP). Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 8.877 terjadi peningkatan yang signifikan sebagai implikasi diterapkannya UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Jabatan fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Pada tahun 2015

jumlah pemangku jabatan tertentu sebanyak 2.424 orang, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 2.400 orang dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selanjutnya dari tahun 2017 sampai tahun 2019 terus mengalami perubahan dan penurunan. Hal ini terutama setelah adanya pengalihan PNS berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada tahun 2018, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak lagi melakukan pengalihan PNS kecuali perpindahan pegawai antar daerah maupun antar tingkatan pemerintahan atas permintaan sendiri, dapat dilihat di tabel di bawah.

**Tabel II.255.
Jumlah jabatan struktural dan fungsional pada instansi pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	64	64	60	60	59
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	7.793	7.587	8.877	8.546	8.536
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.424	2.400	17.485	16.670	16.243

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

2.3.4.4 Penelitian Dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan daerah merupakan salah satu unsur penunjang peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar, dan percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan riset dan inovasi daerah. Kinerja penelitian dan pengembangan di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas melalui peningkatan implementasi rencana penelitian dan pengembangan, peningkatan inovasi perangkat daerah dan peningkatan inovasi daerah yang diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan, khususnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan sampai tahun 2019 persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan baru mencapai 46 persen dari target 100 persen hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan pada tahun 2019.

1. Jumlah Inovasi Daerah yang Dikembangkan

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi pembangunan yang berjalan secara komprehensif terjadi karena adanya kolaborasi antar aktor pembangunan yang merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Sistem inovasi merupakan suatu jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memprakarsai dan mendisfungsikan teknologi baru. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, pada tahun 2018-2023, Provinsi Sulawesi Selatan akan fokus untuk menggali dan mengembangkan inovasi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah. Adapun Inovasi yang dikembangkan daerah Sulawesi Selatan yaitu:

a. Mesin Fillet Ikan Otomatis Bertenaga Surya

Ruang Lingkup Inovasi berkaitan dengan pemanfaatan teknologi terbaru dan hemat energi serta dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomi dari

suatu produk ikan melalui pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi terbarukan bertenaga surya atau matahari, yang bermanfaat untuk mengurangi biaya operasional dari penggunaan listrik, serta pemanfaatan teknologi mesin yang dapat menghasilkan pemisah tulang tengah tanpa melalui proses penghancuran terlebih dahulu terhadap ikan, dimana produk ikan fillet semakin digemari masyarakat, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi.

Mesin fillet ikan ini setelah dilakukan implementasi penggunaannya di lapangan berupa mesin dengan mudah dapat digunakan, melalui penggunaan spare part pada mesin yang mudah ditemukan, menggunakan tenaga surya dan dapat memotong ikan dengan baik. Adapun manfaat dan keberhasilan yang dirasakan oleh masyarakat antara lain meningkatnya industri rumah tangga di dalam pengelolaan ikan fillet, meningkatnya produksi pengelolaan ikan fillet, serta meningkatnya pendapatan para pelaku usaha pengelolaan ikan fillet.

b. “Teseng Sapita” Berdayakan Peternak di Sulawesi Selatan

Populasi sapi di Sulawesi Selatan merupakan terbesar ke-3 di Indonesia. Sebanyak 98,62 persen ternak tersebut dipelihara oleh rumah tangga peternak. Di Sulawesi Selatan masyarakat mengenal istilah “Teseng”. Teseng adalah bahasa bugis yang artinya bagi hasil, yang melibatkan 2 pihak, yaitu pemberi modal dan peternak, dimana pemilik modal memberikan sapi kepada peternak untuk dipelihara secara tradisional di rumah mereka, tanpa adanya perjanjian, pendampingan serta pengelolaan manajemen peternak, model pemeliharaan secara tradisional berdampak pada rendahnya produktifitas ternak dan tidak adanya pendampingan dalam pengelolaan manajemen peternak. Hal ini yang banyak diterapkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

Terkait hal tersebut di atas, dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi para peternak maka diluncurkan inovasi dengan mengadopsi kearifan lokal masyarakat yaitu “Teseng Sapita” Berdayakan Peternak Di Sulawesi Selatan. Teseng Sapita merupakan perjanjian kerjasama pengelolaan ternak sapi pemerintah dengan kelompok maupun masyarakat, dalam melaksanakan perjanjian tersebut pemerintah melakukan pendampingan terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas sapi melalui inseminasi buatan dengan mengambil bibit dari sapi berkualitas, contoh dari sapi bali dan melakukan sistem bagi hasil antara kedua pihak, bagi hasil tersebut berpihak kepada para peternak yang dapat mengumpulkan modal secara bertahap dengan pemanfaatan kotoran sapi sebagai bahan baku pupuk kompos dan lainnya.

Output yang dihasilkan dari Teseng Sapita yaitu bertambahnya populasi ternak tiap tahun, terkendalinya pemotongan sapi betina, pemanfaatan kotoran sapi menjadi berdaya guna, pemanfaatan inseminasi buatan, meningkatnya kualitas sapi serta semakin banyaknya peternak yang menerapkan pola manajemen berternak. Adapun manfaat dan keberhasilan yang dirasakan antara diantaranya pendapatan peternak semakin meningkat, semakin bertambahnya jumlah kepemilikan sapi terhadap peternak, meningkatnya kualitas sapi, meningkatnya pendapatan daerah melalui kerjasama pemerintah dengan para peternak sapi.

c. Pengembangan Alat / Mesin Pertanian dan Industri Kecil Menengah (IKM)

Ruang Lingkup Inovasi berkaitan dengan pembinaan melalui pembuatan alat/mesin pertanian dan IKM sebagai bentuk kerja rekayasa dan inovasi, memberikan layanan jasa konsultasi terhadap alat atau mesin yang digunakan oleh petani dan IKM melalui Klinik Teknologi yang dibuat dan dirakit oleh Sumber Daya Manusia lokal, serta memberikan bantuan peralatan bagi kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas serta kualitas terhadap para petani dan IKM. Adapun alat atau mesin hasil prototype yang dibuat dan dikembangkan antara lain: alat/mesin penempa besi, alat/mesin pengolahan abon, alat/mesin penghancur kakao. Outcome yang dihasilkan dari inovasi tersebut adalah meningkatkan kapasitas, kualitas dan jumlah produksi dari produk yang dihasilkan oleh para pengguna dan pelaku usaha, sehingga dapat bersaing di pasaran.

2.3.4.5 Pengawasan

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Terkait dengan adanya temuan hasil pemeriksaan dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang disebabkan karena kurangnya kemampuan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing perangkat daerah dalam memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku khususnya bagi para pegawai pengelola keuangan.

Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2019 presentase tindak lanjut temuan capaian kinerja mencapai 67,91 persen dan meningkat pada tahun 2019 yaitu 74,43 persen. Peningkatan capaian kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan antara lain adanya respon dan koordinasi aktif dari perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan. Selanjutnya, di tahun 2020 tetap dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan untuk lebih mengurangi persentase Jumlah temuan sekaligus meningkatkan persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.

**Tabel II.256.
Persentase Tindak Lanjut Temuan
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	78,18	74,09	67,91	71,72	74,43

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Selanjutnya terkait dengan indikator persentase pelanggaran pegawai yang diukur berdasarkan jumlah PNS yang direkomendasikan mendapatkan Sanksi Disiplin dibandingkan dengan total pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan capaian indikator dari tahun 2015 sampai dengan 2019 pelanggaran pegawai yang ada mengalami fluktuasi. Hal ini tergantung dari adanya laporan yang dikategorikan sebagai perbuatan indisipliner yang diadukan oleh kepala perangkat daerah supaya dilakukan pemeriksaan khusus kepada yang bersangkutan. Diharapkan ke depan dampak dari sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin dapat lebih meningkatkan kesadaran pegawai dalam mentaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS sehingga pengaduan atau laporan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dapat lebih diturunkan. Capaian Indikator ini, mengandung makna, Capaian yang semakin jauh dari target, menandakan bahwa Jumlah Pelanggaran Pegawai semakin Berkurang. Berikut perkembangan Persentase Persentase Pelanggaran Pegawai dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

**Tabel II.257.
Persentase Pelanggaran Pegawai
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0,08	0,19	0,08	0,13	0,04

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

3. Jumlah Temuan BPK

Indikator Jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Perkembangan jumlah temuan oleh BPK dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan masing-masing perangkat daerah lebih aktif berkoordinasi dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat peningkatan jumlah temuan dari tahun sebelumnya karena masa transisi pemerintahan yang baru yang berdampak adanya perubahan struktur kelembagaan di beberapa perangkat daerah sehingga menyulitkan dalam melakukan koordinasi secara intens. Akan tetapi pemerintah prov. Sulsel terus berupaya dapat mempertahankan predikat WTP untuk yang ke-10 kalinya. Berikut perkembangan Jumlah Temuan BPK dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

**Tabel II.258.
Jumlah Temuan BPK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah temuan BPK	Temuan	15	18	16	13	18

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

2.3.4.6 Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan sampai saat ini telah menunjukkan adanya sinergitas antara program kerja pemerintah daerah dan DPRD yang diindikasikan dengan ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Kemampuan ekonomi rumah tangga di Sulawesi Selatan mengalami penguatan yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada tahun 2015 sebesar 17,58 juta rupiah terus mengalami peningkatan menjadi 25,94 juta rupiah pada tahun 2019.

**Tabel II.259.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rp	17,58	19,65	21,78	23,75	25,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

Pengeluaran per kapita Penduduk di Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan setiap tahun, dimana pada tahun 2015 berada pada Rp. 9.992, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 10.489, dan pada tahun 2019 mencapai Rp. 11.118. Walaupun terjadi peningkatan namun pengeluaran perkapita penduduk di Sulawesi Selatan masih berada di bawah pengeluaran per kapita nasional, dimana pada tahun 2015 sebesar Rp. 10.150 dan pada tahun 2019 mencapai Rp. 11.299.

**Tabel II.260.
Pengeluaran Perkapita per Tahun
Di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Perkapita/Tahun Sulawesi Selatan	Ribu Rp	9.992	10.281	10.489	10.814	11.118
Pengeluaran Perkapita/Tahun Nasional	Ribu Rp	10.150	10.420	10.664	11,059	11,299

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2019

2.4.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel II.261.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Tukar Petani	Poin	104,72	104,73	101,71	103,31	104,42

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2019

Nilai Tukar Petani (NTP) berdasarkan sub sektor pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sub sektor hortikultura memiliki angka terbesar yaitu 113,85 dan mengalami peningkatan besaran dari tahun 2018 sebesar 7,26 persen. NTP berdasarkan sub sektor pada tahun 2019 menunjukkan adanya dinamika yang ditandai dengan peningkatan pada beberapa sub sektor diantaranya sub sektor hortikultura, peternakan, dan perikanan budidaya, sedangkan sub sektor lainnya yaitu sub sektor tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan tangkap mengalami penurunan jika dibandingkan dengan NTP tahun 2018.

**Tabel II.262.
Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Sub Sektor	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tanaman Pangan	99,69	100,56	99,17	102,25	100,54
Hortikultura	110,69	115,00	107,76	106,14	113,85
Perkebunan Rakyat	105,95	102,39	93,64	95,64	95,62
Peternakan	107,86	108,46	109,73	110,88	113,60
Perikanan	104,24	100,98	105,13	105,01	106,68
Perikanan Tangkap	107,12	103,48	110,97	107,63	107,16
Perikanan Budidaya	102,92	99,13	100,83	103,08	106,33

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2019

2.4.3 Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. konsumsi bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Rata-rata pengeluaran per kapita selama sebulan untuk semua kabupaten/kota. Secara provinsi pengeluaran rata-rata per kapita penduduk sebesar Rp 927.908,- kabupaten/kota dengan rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi adalah Kota Makassar sebesar Rp 1.536.017,- sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Soppeng sebesar Rp 607.629,-. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dari tahun 2015 sebesar 9,81 persen dan pada tahun 2019 sebesar 14,35 persen.

**Tabel II.263.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita	%	9,81	11,06	12,28	13,17	14,35

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

2.4.4 Produktifitas Total Daerah

Target Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja) tahun 2019 sebesar 78.777.309 dengan Realisasi sebesar 82.027.871 dengan tingkat capaian sebesar 104,13 %, Pencapaian ini dapat diwujudkan dengan pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Kelautan Dan Perikanan, Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha Dan Daya Saing, Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor.

2.4.5 Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB/PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Nilai ekspor Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2018. Sepanjang tahun 2019, total nilai ekspor Sulawesi Selatan mencapai USD 123 juta, sementara 2018 sebesar USD 147,17 Juta. Sejalan dengan ekspor yang meningkat, jumlah nilai impor sepanjang tahun 2019 juga meningkat dari tahun 2018 sebesar USD 80,27 Juta, menjadi USD 147,18 Juta.

Seiring dengan peningkatan nilai ekspor dan impor pada tahun 2019 dibanding tahun 2018, maka rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun yang sama juga mengalami peningkatan rasio, dari 5,81 pada tahun 2018, menjadi 8,22 pada tahun 2019.

Ekspor Sulawesi Selatan yang mengalami pertumbuhan cukup pesat pada tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yang sangat berpengaruh adalah dibukanya keran ekspor langsung (direct call) dari Pelabuhan di Makassar. Adanya direct call dari Makassar tentunya memberi pengaruh besar terhadap meningkatnya nilai ekspor Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Adapun Net ekspor lima tahun terakhir berfluktuasi dimana Net ekspor tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 73,96 US\$ Juta dan pada tahun 2019 mengalami defisit secara tajam sebesar -24,17 US\$ Juta. Dari nilai net ekspor tersebut, maka dapat digambarkan Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi), dimana pada tahun 2015 ke tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2015 rasio ekspor dan impor terhadap PDRB sebesar 5,67 menjadi 8,22.

**Tabel II.264.
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Ekspor	Juta US\$	107,38	127,52	122,06	98,48	123,00
Nilai Impor	Juta US\$	33,42	98,19	91,18	80,27	147,17
Net ekspor	Juta US\$	73,96	29,33	30,88	18,21	-24,17
Nilai PDRB di konversi, Milyar Rp. Ke Juta US\$	Juta US\$	24,85	26,72	28,67	30,74	32,87
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	Nilai Ekspor, Impor : PDRB	5,67	8,45	7,44	5,81	8,22

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

2.4.6 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Salah satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 persen pada tahun 2019 adalah lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,80 persen. Walaupun bertumbuh positif namun terjadi penurunan di banding tahun 2018 yang bertumbuh sebesar 5,27 persen sebagai gambaran pada tabel II.265. terkait Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Turunnya kinerja Lapangan Usaha Pertanian tersebut dikarenakan (1) Curah hujan yang tinggi mengurangi aktivitas nelayan dalam menangkap ikan; (2) Pertumbuhan harga komoditas perkebunan seperti kopi arabica dan robusta masih berkontraksi; dan (3) Masuknya musim tanam disejumlah tanaman bahan makanan.

**Tabel II.265.
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) ADHK	%	5,87	7,86	5,56	5,27	2,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel, Tahun 2020

2.5 Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Kinerja pemenuhan SPM Provinsi Sulawesi Selatan diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing bidang urusan dan jenis pelayanan pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, sebagai berikut:

**Tabel II.266.
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019**

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pendidikan						
Pendidikan Menengah						
Persentase jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	70.12	70.46	70.54	74.23	75.25
Pendidikan Khusus						

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100%				80	81
Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi						
Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	75%	80%	85%	87,71%	89,84%
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi						
Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pekerjaan Umum						
Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat						
Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang	60%	87.42%	61.86%	57.51%		
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	100%	100%	100%	100%		
Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi						
Persentase tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	100%	100%	100%	100%		
Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat						
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70%	51.18%	56.06%	57.22%		
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi						

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	35	55	75	80	89
Sosial						
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti						
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	6.42%	6.26%	6.42%	2.1 %	20.83%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti						
Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	9.15%	8.52%	8.91%	1.6%	28.83%
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti						
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	4.97%	4.97%	4.97%	1.08 %	6.97
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti						
Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	6.37%	0	8.13%	4.5%	11.35
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi						
Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	75.09%	80.16%	82.32%	100	100
Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Sosial						
Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar	80%	27.80%	47.42%	35%	70.48	57.11
Persentase Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial	60%	100	100	100	100	100
Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial						

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Panti Sosial skala provinsi yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	100	100	100	100	100
Persentase Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	60%	100	100	100	100	100
Penanggulangan Korban Bencana						
Persentase Kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	80%	70.25	75.09	82.15	66.67	66.67
Persentase Kabupaten/kota yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	80%	75.09	80.16	82.32	46%	66.65
Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial						
Persentase Kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	40%	Lanjut Usia : 4,97%	Lanjut Usia : 4,97%	Lanjut Usia : 4,97%	Lanjut Usia : 4,97%	Lanjut Usia : 4,97%
	40%	Disabilitas : 6,42%	Disabilitas : 6,26%	Disabilitas : 6,42%	Disabilitas : 6,42%	Disabilitas : 6,42%

2.5.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;

7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat provinsi. Target-target SDGs di tingkat provinsi telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta dukungan pembiayaannya. Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan mencapai target nasional sejumlah 17 Tujuan (Goals) sejumlah 75 indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi sejumlah 235 indikator, namun untuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah melaksanakan sekitar 120 indikator dari berbagai OPD yang terkait. Capaian target indikator 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel II.267.
Capaian Target Indikator TPB/SDGs
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2019**

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
1	Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun							
1.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	7%	9,24	9,48	8,87	8,56	Dinas Sosial
1.2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	90%	75%	70	75	85,76	87,02	Dinas Kesehatan
1.3	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	17,12%	1173%	11,73	6,00	0,03	5,54	Dinas Sosial
1.4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	2,8 Juta Rumah Tangga	178.594 Rumah Tangga	100.473	182.057	314.420	232.935	Dinas Sosial
1.5	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	70%	81%	80,96	91,11	90,48	89,43	Dinas Kesehatan
1.6	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	63%	63%	100	102,90	91,67	98	Dinas Kesehatan
1.7	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%	68%	72,39	72,67	73,28	73	Dinas Kesehatan
1.8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	100%	100%	83,40	84,41	84,41	85,30	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	91,63%	63,50%	70,46	70,54	70,89	67,23	Dinas Pendidikan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
1.10	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	77,4%	77,4%	57,22	66,09	76,72	86,14	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.11	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	100%	95%	91,65	92,52	97,83	97,06	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.12	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	5.598 Jiwa	14.472	Meninggal=0,22 Terdampak =64416,7	Meninggal=0,005 Terdampak=5.403	Meninggal=0,03 Terdampak=153,81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.13	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	39 Daerah	24 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.14	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.15	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Meningkat	435	476				Dinas Sosial
2	Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
2.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	17%	22,1%	25,20	22,8	23	15,30	Dinas Kesehatan
2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Menurun	48,9%	-	40	-		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	8,5%	15,87%	14,34	8,11	9,44	9,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Menurun	33,86%	36	35	35,6	30,59	Dinas Kesehatan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
2.5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	28%	33,87%	36	35	35,6	14% E-PPGBM	Dinas Kesehatan
2.6	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Menurun	7,25%	9,40	8,70	12,30	14% e-PPGBM	Dinas Kesehatan
2.7	Prevalensi anemia pada ibu hamil	28%	28,5%	15	13,40	15,5	17,64	Dinas Kesehatan
2.8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	50%	44%	68	73	73,6	70,82	Dinas Kesehatan
2.9	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor PPH = 92,5; Tingkat Konsumsi Ikan = 54,5 kg/kapita/thn	57,67	79,90	92,60	82,60	83,40	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia							
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	306	104	156	115	139	144	Dinas Kesehatan
3.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	95%	96%	92,90	94,05	91,99	90,97	Dinas Kesehatan
3.3	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	85 %	81%	80,96	91,11	90,48	89,43	Dinas Kesehatan
3.4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	1.151	1.303	1.151	1.124	990	Dinas Kesehatan
3.5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	835	887	818	799	713	Dinas Kesehatan
3.6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	24	1037	1183	1.059	1.037	916	Dinas Kesehatan
3.7	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	95%	85%	100	95,83	83,33	96,15	Dinas Kesehatan
3.8	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	<0,5%	<0,5%	0,28	0,33	0,013	0,019	Dinas Kesehatan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
3.9	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	245	158	155	155	196	21,6	Dinas Kesehatan
3.10	Kejadian Malaria per 1000 orang	Menurun	<1	0,12	0,15	0,15	0,10	Dinas Kesehatan
3.11	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	300 Kab/Kota	5 Kab/Kota	14	4	18	2 Kabupaten	Dinas Kesehatan
3.12	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B		30%	17	50	100	100	Dinas Kesehatan
3.13	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Menurun	338.635	283.942	333.251	91	81	Dinas Kesehatan
3.14	Jumlah Provinsi/Kab/Kota dengan eliminasi Kusta	34 Provinsi	14 Kab/Kota	12	11	13	11	Dinas Kesehatan
3.15	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	35 Kab/Kota	1 Kab/Kota	-	-	3	-	Dinas Kesehatan
3.16	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	5,4%	6%	-	1,30	2,37	3,10	Dinas Kesehatan
3.17	Prevalensi tekanan darah tinggi	24,3%	19,82%	20,08	5,02	4,4	4,7	Dinas Kesehatan
3.18	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	15,4%	13,60%	10,11	3,17	4,22	4,35	Dinas Kesehatan
3.19	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Menurun	3,7	0	0,1	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.20	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	280 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24	24	18	18	Dinas Kesehatan
3.21	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	0,02%	1,95%	-	1,95	-	2,10	Dinas Kesehatan
3.22	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	66%	1.495.547	-	1.387.345	97,15	97,49	Dinas Kesehatan
3.23	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada	65%	68%	72,39	72,67	73,28	73	Dinas Kesehatan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
	Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin							
3.24	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	23,5%	11%	12,47	14	14,98	17,13	Dinas Kesehatan
3.25	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Meningkat	700 Jiwa	600	750	8.138	8.200	Dinas Kesehatan
3.26	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95%	75%	70	75	85,76	87,02	Dinas Kesehatan
3.27	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Meningkat	83%	83	85	87,08	90	Dinas Kesehatan
3.28	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Meningkat	357	296	296	386	332,4	Dinas Kesehatan
4	Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat	91,63%	82%	81,37	81,39	81,47	82,58	Dinas Pendidikan
4.2	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	8,8 Tahun	8,11 Tahun	8,28	8,31	8,34	8,36	Dinas Pendidikan
4.3	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	Meningkat	79,9	82,83	82,93	83,13	83,24	Dinas Pendidikan
4.4	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	96,1%	93,78%	93,01	94,06	94,61	95,12	Dinas Pendidikan
4.5	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Meningkat	93,78%	93,08	94,06	94,61	95,12	Dinas Pendidikan
5	Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
5.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	16 Kebijakan	10 Kebijakan	10	5	6	7	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	70%	70%	90	100% (56 kasus)	100%(74 kasus)	100% (132 kasus)	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	91,63%	82%	81,37	81,39	81,47	82,58	Dinas Pendidikan
5.4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	16,6%	60 orang	60	17	17	19	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6	Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan							
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	100%	100%	83,41	84,41	84,41	89,77	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.2	Kualitas Air Danau	Meningkat	Meningkat	40,25	55,05	Hanya mendata 1 titik	Tidak melakukan perhitungan	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.3	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Meningkat	Meningkat	10	12	34,64	33,3	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.4	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi	5,5 Juta Ha (Skala Nasional)	6.000 Ha	27.069	11.461	385 Ha	20508 Ha	Dinas Kehutanan
7	Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua							
7.1	Rasio elektrifikasi	96,6%	96,6%	94,53	97,33%	97,80	98,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Meningkat	9,29%	7,41	7,21	7,06	6,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.2	PDB per kapita	50 Juta	48,21 Juta	44,11	48,21	52,64	57,03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.3	Persentase tenaga kerja formal	51%	44,97%	35,11	37,63	36,99	39,87	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
8.4	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Meningkat	39,42%	39,76	3,06	3,16	2,88	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	25%	20%	20,30	20	20	20	Dinas Koperasi & UMK
8.6	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun	4,56%	4,74	L = 4,98 P = 6,66	L = 5,29 P = 5,40	L = 5,10 P = 4,89	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.7	Tingkat setengah pengangguran	Menurun	Menurun	7.443	8.985	7.169	7.193	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.8	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Meningkat	Meningkat	22,21	42,43	40,35	40,22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.9	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	8%	8%	1,32	1,37	1,41	2,85	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
8.10	Jumlah wisatawan mancanegara	20 Juta (skala nasional)	151.763 Wisman	236.491	255.747	263,293	115,000*	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
8.11	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkat	6.000.000	8.426.528	8.367.748	9.616.232	6,256,376*	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
8.12	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Meningkat	Meningkat	12,28%	-	3,55	3,73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.13	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Meningkat	20%	20,30	20	20	20	Dinas Koperasi & UMKM
9	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi							
9.1	Panjang jalur kereta api	3.258 Km	145 Km	16,1	16,1	42,85	47,85	Dinas Perhubungan
9.2	Jumlah dermaga penyeberangan	275 Unit	80 Unit	80	80	87 unit	87 unit	Dinas Perhubungan
9.3	Jumlah pelabuhan strategis	24 Pelabuhan (skala nasional)	19 Pelabuhan (skala nasional)	19 Pelabuhan	19 Pelabuhan	20 pelabuhan	20 pelabuhan	Dinas Perhubungan
9.4	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Meningkat	14,25%	13,92%	13,95%	12,87	13,56	Dinas Perindustrian
9.5	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Lebih tinggi dari	9,25%	13,92	13,95	5,56	5,36	Dinas Perindustrian

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
		pertumbuhan PDB						
9.6	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Meningkat	287.269	296.882	262.936 (7,31%)	9,05%	8,93%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.7	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Meningkat	53.000	52.309	54.513	14.431	20.092	Dinas Perindustrian
9.8	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	26%	22,5%	7,5	-	11,41%	6,4%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
10	Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara							
10.1	Koefisien Gini	0,36	0,36	0,4	0,429	0,388	0,391	BPS
10.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	7%	9,24	9,48	8,87	8,56	BPS
10.3	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Meningkat	Meningkat	8,32	8,25	6,29	5,97	BPS
10.4	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	14%	14%	15,49	15,4	15,48	14,88	BPS
11	Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan							
11.1	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	32%	22,8%	21,20%	22,80%	NA	NA	Dinas Perhubungan
11.2	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama	20 kota sedang (skala nasional)	7 kota sedang (skala nasional)	7 ota sedang	7 kota sedang	7 kota sedang	7 kota sedang	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
11.3	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	5 Metropolitan (skala nasional)	1 Metropolitan	1	1	1	1	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
11.4	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	5.598 Orang		Meninggal=0,22 Terdampak =64416,7	Meninggal=0,005 Terdampak=5.403	Meninggal=0,03 Terdampak=153, 81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	30%	24%	164.65	162.59	160.05	Belum rilis dari pusat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
11.6	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Ada	75	-	-	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.7	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	80%	80%	16,54	17,53	44,20%	51,93%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
11.8	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Ada	1 Dokumen	1	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan							
12.1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	150 Juta Ton (skala nasional)		677,87 Ton/ Periode	743,29 Ton/ Periode	4,365,759,985 ton/periode	5,373,629,74ton/ periode	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
12.2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	20 Ton/Hari (skala nasional)	20 Ton/ Hari	15,15 Ton/	15,29 Ton/	15,42/ton	17,5/ton	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
13	Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya							
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	1 Dokumen	1	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.2	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	5.598 Orang	17.472 Orang	Meninggal=0,22 Terdampak =64416,7	Meninggal=0,005 Terdampak=5.403	Meninggal=0,03 Terdampak=153,81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.3	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ada	1 Dokumen	1	1	1	1	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
14	Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan							
14.1	Jumlah nelayan yang terlindungi	Meningkat	37.648 Nelayan	35.000	37.450	48.857	60.824	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati							
15.1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Meningkat	55,65	59,56	59,56	59,56%	57,03%	Dinas Kehutanan
15.2	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Meningkat	22 KPH	9 KPH	16 KPH	16 KPH	16 KPH	Dinas Kehutanan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
15.3	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Meningkat	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	1 dok	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
16	Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
16.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Meningkat	Rp. 190.759.499.612	Rp. 3.583.608.000	Rp. 3.670.839.640,8			Badan Pengelola Keuangan Daerah
16.2	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	75%	BB	CC	B	B	B	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda
16.3	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	80%	100% (602 Paket/ Kegiatan)	100% (525)	100% (507)	100%	100%	Biro Pembangunan Setda
16.4	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Meningkat	60 Orang	60 Orang	17,64	17,64	28,91	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
17	Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
17.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Meningkat	Rp. 9.292.958.272.501	7.162.588.691.182,52	9.055.278.907.514,25	9.252.221.942.175,45	9.574.846.121.830,84	Badan Pendapatan Daerah
17.2	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga	71%	63%	NA	NA	NA	Dinas Komunikasa, Informatika, Statistik, dan Persandian

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	
		dan 6% populasi						
17.3	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Meningkat	PM	-	92,71	96,2	100	BPS
17.4	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Meningkat	PM	90,80	85,13%	92,3	93	BPS
17.5	Jumlah metadada kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	Meningkat	1	9	1	NA	NA	BPS
17.6	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	ada	-	ada	ada	ada	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17.7	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Meningkat	PM	45.247 User	27.712 User	NA	NA	BPS
17.8	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	Meningkat	PM	95,94	90,46	88,69	97	BPS

2.5.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) RKPD sampai Tahun 2019

Kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2019, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RAD TPB Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, dari 130 indikator kinerja pada 17 tujuan TPB sebanyak 54 indikator (41,54 persen) berstatus telah tercapai, 54 indikator (41,54 persen) berstatus tidak tercapai, dan 22 indikator (16,92 persen) tidak mempunyai data.

2.5.3 Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2019

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

1. untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
3. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

A. Konsistensi Program dan Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD serta konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

**Tabel II.268.
Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Selisih				Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Tidak Sama	
		RPJMD	RKPD	Renja- PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Dinas Pendidikan	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	1	97	97	89	97	89	0	8
2	Dinas Kesehatan	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	165	165	146	165	146	0	19
3	UPT Transfusi Darah	4	4	4	3	4	4	3	3	0	0	1	1	18	18	15	18	15	0	3
4	UPT Pelatihan Kesehatan	5	5	5	4	5	5	4	4	0	0	1	1	16	16	15	16	15	0	1
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	0
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	14	14	14	14	14	0	0
7	Rumah Sakit Khusus Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	5	5	5	5	5	0	0
8	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	3	3	3	3	3	0	0
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	2	2	2	3	2	2	2	2	1	0	1	1	5	5	5	5	4	0	2
10	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	5	5	5	5	5	0	0
11	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	6	6	6	6	6	0	0
12	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	38	38	38	38	38	0	0

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Selisih				Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Tidak Sama	
		RPJMD	RKPD	Renja- PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
13	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	91	91	89	91	89	0	2
14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	10	10	10	9	10	10	9	9	0	0	1	1	31	31	26	31	26	0	5
15	Satuan Polisi Pamong Praja	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	26	26	25	26	25	0	1
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	32	32	29	32	29	0	3
17	Dinas Sosial	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	59	59	59	59	59	0	0
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	66	66	64	66	64	0	2
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	20	20	51	51	48	51	48	0	3
20	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	65	65	65	65	65	0	0
21	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	9	9	9	8	9	9	8	8	0	0	1	1	36	36	33	36	33	0	3
22	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, Dan KB	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	30	30	30	30	30	0	0
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	55	55	53	55	53	0	2

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Selisih				Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Tidak Sama	
		RPJMD	RKPD	Renja- PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
24	Dinas Perhubungan	8	8	8	7	8	8	7	7	0	0	1	1	58	58	57	58	56	0	3
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10	10	10	9	10	10	9	9	0	0	1	1	59	59	56	59	56	0	3
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	53	53	50	53	50	0	3
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	32	32	31	32	31	0	1
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	40	40	43	40	38	0	7
29	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	69	69	66	69	66	0	3
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	58	58	57	58	57	0	1
31	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	68	68	66	68	66	0	2
32	Dinas Perkebunan	7	7	7	6	7	7	6	6	0	0	1	1	53	53	51	53	51	0	2
33	Dinas Kehutanan	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	97	97	92	97	92	0	5
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	64	64	62	64	62	0	2
35	Dinas Perdagangan	9	9	9	8	9	9	8	8	0	0	1	1	40	40	38	40	38	0	2
36	Dinas Perindustrian	8	8	8	7	8	8	7	7	0	0	1	1	55	55	53	55	53	0	2
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	106	106	104	106	104	0	2
38	Badan Perencanaan Pemb. Daerah	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	71	71	69	71	69	0	2

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Selisih				Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Tidak Sama	
		RPJMD	RKPD	Renja- PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
39	Badan Pendapatan Daerah	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	143	143	140	143	140	0	3
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	16	48	48	45	48	45	0	3	
41	Badan Kepegawaian Daerah	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	53	53	51	53	51	0	2
42	Badan Pengemb. Sumber Daya Manusia	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	36	36	36	36	36	0	0
43	Badan Penelitian dan Pengemb. Daerah	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	46	46	42	46	42	0	4
44	Sekretariat DPRD	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	41	41	41	41	41	0	0
45	Biro Hukum dan HAM	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	36	36	34	36	34	0	2
46	Biro Pemerintahan	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	20	20	19	20	19	0	1
47	Biro Humas dan Protokol	6	6	6	5	6	6	5	5	0	0	1	1	21	21	20	21	20	0	1
48	Biro Perekonomian	4	4	4	3	4	4	3	3	0	0	1	1	19	19	18	19	18	0	1
49	Biro Pemb. dan Pengadaan Barang/Jasa	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	30	30	29	30	29	0	1
50	Biro Kesejahteraan	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	47	47	27	47	27	0	20
51	Biro Organisasi dan Tata Laksana	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	26	26	27	26	26	0	1
52	Biro Umum dan Perlengkapan	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	35	35	34	35	33	0	3

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Selisih				Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Tidak Sama	
		RPJMD	RKPD	Renja- PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD	Renja	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
53	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	27	27	27	27	27	0	0
54	Inspektorat Daerah	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	56	56	55	56	55	0	1
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	40	40	38	40	38	0	2
56	Badan Penghubung Daerah	6	6	6	5	6	6	5	5	0	0	1	1	29	29	28	29	28	0	1
J U M L A H		431	431	431	420	431	431	409	401	1	0	33	50	2,594	2,594	2,472	2,594	2,463	0	140

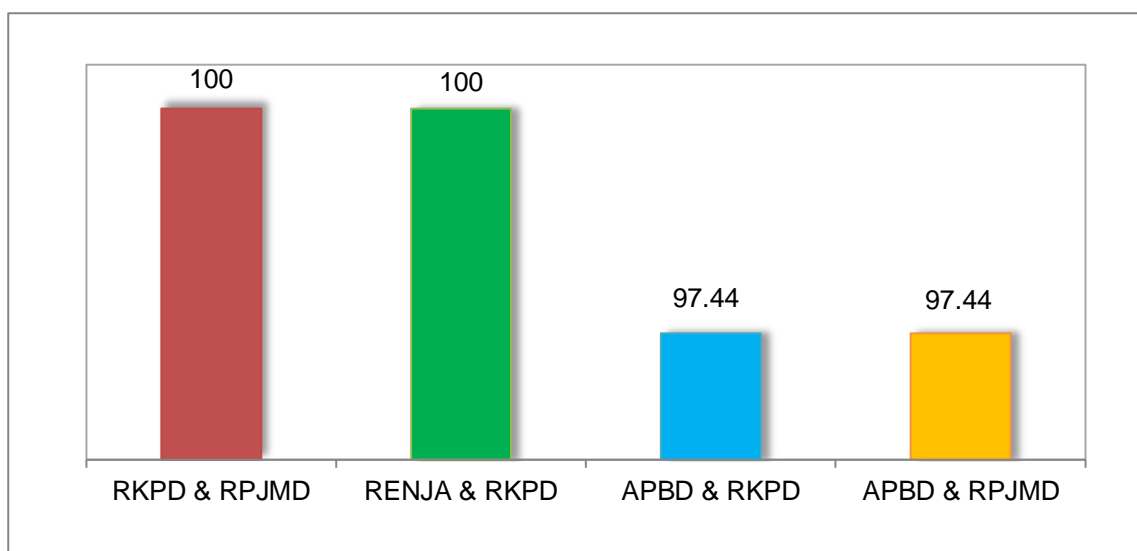
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Berdasarkan tabel di atas, dapat diberikan penjelasan terkait dengan kesesuaian program dan kegiatan RKPD dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut: :

- a. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
 - 1) Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah 431 program (jumlah pada kolom 3), dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2019 adalah 431 program (jumlah pada kolom 4).
 - 2) Jumlah program antara RPJMD dan RKPD sama yaitu 431 (jumlah pada kolom 7).
- b. Kesesuaian program RKPD dan APBD
 - 1) Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 431 program (jumlah pada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 420 program (jumlah pada kolom 6). Dari sejumlah program dalam RKPD dan APBD tersebut, terdapat 409 program yang sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 9).
 - 2) terdapat 33 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 13) yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD.
 - 3) Program yang tidak sesuai tersebut seluruhnya adalah program RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD.
- c. Kesesuaian program RPJMD dan APBD
 - 1) Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah 431 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 420 program.
 - 2) Terdapat 50 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 14).
 - 3) Seluruh program yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut, merupakan program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD.
- d. Kesesuaian kegiatan RKPD dan APBD
 - 1) Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 2.549 (jumlah pada kolom 15) dan APBD adalah sejumlah 2.472 (jumlah pada kolom 15). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 2,463 (jumlah pada kolom 17), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 140 (jumlah pada kolom 21).
 - 2) Dari sejumlah 140 kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut, 1.359 kegiatan adalah kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD.
 - 3) Dari 56 perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 13 perangkat daerah yang sesuai kegiatannya antara RKPD dan APBD.
 - 4) Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 97,44%.

Tingkat kesesuaian program dan kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik II.38.
Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan
RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penjabaran RPJMD ke dalam RKPD sudah sempurna (**Konsisten**). Namun demikian, dalam penganggarannya dilakukan efisiensi pada beberapa program dan kegiatan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang terbatas serta dilakukannya simplikasi kegiatan, sehingga konsistensi program maupun kegiatan antara RKPD dan APBD lebih rendah.

B. Konsistensi Kerangka Pendanaan

Salah satu hal penting dalam muatan RPJMD dan RKPD adalah adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dalam APBD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD.

APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang dirumuskan berdasarkan RKPD setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan APBD memiliki hubungan yang sangat terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penjabaran pendanaan belanja langsung dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD selengkapny pada setiap perangkat daerah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel II.269.
Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019**

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2019					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran			
		RPJMD	RKPD		APBD		APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5) - (4)		(7) = (5) - (3)	
1	Dinas Pendidikan	581,666,397,174	581,666,397,174	100.00	660,548,589,492	113.56	78,882,192,318	-41.33%	78,882,192,318	-41.33%
2	Dinas Kesehatan	187,338,871,512	187,338,871,512	100.00	45,584,407,770	24.33	(141,754,463,742)	74.28%	(141,754,463,742)	74.28%
3	UPT Transfusi Darah	12,591,393,788	12,591,393,788	100.00	14,084,663,498	111.86	1,493,269,710	-0.78%	1,493,269,710	-0.78%
4	UPT Pelatihan Kesehatan	3,914,398,626	3,914,398,626	100.00	4,121,674,926	105.30	207,276,300	-0.11%	207,276,300	-0.11%
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	12,087,475,045	12,087,475,045	100.00	13,087,475,045	108.27	1,000,000,000	-0.52%	1,000,000,000	-0.52%
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	97,263,370,454	97,263,370,454	100.00	94,607,459,005	97.27	(2,655,911,449)	1.39%	(2,655,911,449)	1.39%
7	Rumah Sakit Khusus Daerah	40,550,000,000	40,550,000,000	100.00	45,085,021,237	111.18	4,535,021,237	-2.38%	4,535,021,237	-2.38%
8	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	56,800,000,000	56,800,000,000	100.00	56,324,829,909	99.16	(475,170,091)	0.25%	(475,170,091)	0.25%
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	22,500,000,000	22,500,000,000	100.00	19,039,619,247	84.62	(3,460,380,753)	1.81%	(3,460,380,753)	1.81%
10	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	21,357,540,000	21,357,540,000	100.00	21,250,801,123	99.50	(106,738,877)	0.06%	(106,738,877)	0.06%
11	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	12,896,225,000	12,896,225,000	100.00	15,361,076,003	119.11	2,464,851,003	-1.29%	2,464,851,003	-1.29%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2019					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran			
		RPJMD	RKPD		APBD		APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5) - (4)		(7) = (5) - (3)	
12	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	210,150,412,390	210,150,412,390	100.00	172,227,084,964	81.95	(37,923,327,426)	19.87%	(37,923,327,426)	19.87%
13	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	601,366,070,284	601,366,070,284	100.00	541,500,651,512	90.05	(59,865,418,772)	31.37%	(59,865,418,772)	31.37%
14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	101,534,470,000	101,534,470,000	100.00	24,947,196,588	24.57	(76,587,273,412)	40.13%	(76,587,273,412)	40.13%
15	Satuan Polisi Pamong Praja	12,237,523,636	12,237,523,636	100.00	15,623,523,636	127.67	3,386,000,000	-1.77%	3,386,000,000	-1.77%
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,526,232,532	7,526,232,532	100.00	7,526,232,532	100.00	-	0.00%	-	0.00%
17	Dinas Sosial	15,787,073,055	15,787,073,055	100.00	15,610,689,755	98.88	(176,383,300)	0.09%	(176,383,300)	0.09%
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10,607,969,027	10,607,969,027	100.00	10,268,914,322	96.80	(339,054,705)	0.18%	(339,054,705)	0.18%
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,322,737,523	8,322,737,523	100.00	7,569,259,481	90.95	(753,478,042)	0.39%	(753,478,042)	0.39%
20	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	184,769,127,981	184,769,127,981	100.00	173,911,022,578	94.12	(10,858,105,403)	5.69%	(10,858,105,403)	5.69%
21	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	10,566,019,964	10,566,019,964	100.00	8,997,467,898	85.15	(1,568,552,066)	0.82%	(1,568,552,066)	0.82%
22	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian	5,855,232,423	5,855,232,423	100.00	6,784,545,323	115.87	929,312,900	-0.49%	929,312,900	-0.49%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2019					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran				
		RPJMD	RKPD		APBD		APBD & RKPD		APBD & RPJMD		
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5) - (4)		(7) = (5) - (3)		
	Penduduk Dan Keluarga Berencana										
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13,088,449,716	13,088,449,716	100.00	13,605,449,716	103.95	517,000,000	-0.27%	517,000,000	-0.27%	
24	Dinas Perhubungan	28,482,710,720	28,482,710,720	100.00	24,433,498,120	85.78	(4,049,212,600)	2.12%	(4,049,212,600)	2.12%	
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	18,698,935,130	18,698,935,130	100.00	19,992,343,717	106.92	1,293,408,587	-0.68%	1,293,408,587	-0.68%	
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17,517,112,569	17,517,112,569	100.00	14,517,112,569	82.87	(3,000,000,000)	1.57%	(3,000,000,000)	1.57%	
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3,998,899,731	3,998,899,731	100.00	5,498,899,731	137.51	1,500,000,000	-0.79%	1,500,000,000	-0.79%	
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22,198,337,523	22,198,337,523	100.00	30,322,198,872	136.60	8,123,861,349	-4.26%	8,123,861,349	-4.26%	
29	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	19,903,249,615	19,903,249,615	100.00	19,869,920,244	99.83	(33,329,371)	0.02%	(33,329,371)	0.02%	
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8,847,820,018	8,847,820,018	100.00	14,011,724,888	158.36	5,163,904,870	-2.71%	5,163,904,870	-2.71%	
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	35,609,773,138	35,609,773,138	100.00	35,652,974,768	100.12	43,201,630	-0.02%	43,201,630	-0.02%	
32	Dinas Perkebunan	22,053,089,196	22,053,089,196	100.00	28,350,789,196	128.56	6,297,700,000	-3.30%	6,297,700,000	-3.30%	
33	Dinas Kehutanan	45,628,892,179	45,628,892,179	100.00	37,758,912,785	82.75	(7,869,979,394)	4.12%	(7,869,979,394)	4.12%	
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	19,274,121,584	19,274,121,584	100.00	17,762,648,901	92.16	(1,511,472,683)	0.79%	(1,511,472,683)	0.79%	
35	Dinas Perdagangan	11,871,143,523	11,871,143,523	100.00	11,506,037,523	96.92	(365,106,000)	0.19%	(365,106,000)	0.19%	
36	Dinas Perindustrian	9,905,521,350	9,905,521,350	100.00	10,637,028,350	107.38	731,507,000	-0.38%	731,507,000	-0.38%	
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	75,429,977,368	75,429,977,368	100.00	52,843,838,675	70.06	(22,586,138,693)	11.83%	(22,586,138,693)	11.83%	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2019					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran			
		RPJMD	RKPD		APBD		APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5) - (4)		(7) = (5) - (3)	
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26,963,476,000	26,963,476,000	100.00	27,266,076,000	101.12	302,600,000	-0.16%	302,600,000	-0.16%
39	Badan Pendapatan Daerah	45,130,007,184	45,130,007,184	100.00	47,116,532,184	104.40	1,986,525,000	-1.04%	1,986,525,000	-1.04%
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	22,673,087,853	22,673,087,853	100.00	23,138,087,853	102.05	465,000,000	-0.24%	465,000,000	-0.24%
41	Badan Kepegawaian Daerah	13,201,946,303	13,201,946,303	100.00	14,689,760,289	111.27	1,487,813,986	-0.78%	1,487,813,986	-0.78%
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16,862,964,469	16,862,964,469	100.00	19,670,013,469	116.65	2,807,049,000	-1.47%	2,807,049,000	-1.47%
43	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11,586,729,523	11,586,729,523	100.00	12,063,682,023	104.12	476,952,500	-0.25%	476,952,500	-0.25%
44	Sekretariat DPRD	228,683,602,471	228,683,602,471	100.00	232,976,747,661	101.88	4,293,145,190	-2.25%	4,293,145,190	-2.25%
45	Biro Hukum dan HAM	3,054,003,889	3,054,003,889	100.00	3,780,523,842	123.79	726,519,953	-0.38%	726,519,953	-0.38%
46	Biro Pemerintahan	2,680,898,315	2,680,898,315	100.00	3,965,898,315	147.93	1,285,000,000	-0.67%	1,285,000,000	-0.67%
47	Biro Humas dan Protokol	6,124,306,018	6,124,306,018	100.00	10,922,378,018	178.34	4,798,072,000	-2.51%	4,798,072,000	-2.51%
48	Biro Perekonomian	4,256,141,000	4,256,141,000	100.00	4,171,141,000	98.00	(85,000,000)	0.04%	(85,000,000)	0.04%
49	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	6,393,267,541	6,393,267,541	100.00	6,393,267,541	100.00	-	0.00%	-	0.00%
50	Biro Kesejahteraan	4,199,100,000	4,199,100,000	100.00	4,100,313,974	97.65	(98,786,026)	0.05%	(98,786,026)	0.05%
51	Biro Organisasi dan Tata Laksana	7,100,000,000	7,100,000,000	100.00	8,624,191,336	121.47	1,524,191,336	-0.80%	1,524,191,336	-0.80%
52	Biro Umum dan Perlengkapan	70,953,322,244	70,953,322,244	100.00	103,213,539,660	145.47	32,260,217,416	-16.90%	32,260,217,416	-16.90%
53	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	6,000,000,000	6,000,000,000	100.00	11,789,120,598	196.49	5,789,120,598	-3.03%	5,789,120,598	-3.03%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2019					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran			
		RPJMD	RKPD		APBD		APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5) - (4)		(7) = (5) - (3)	
54	Inspektorat Daerah	13,580,348,036	13,580,348,036	100.00	16,580,348,036	122.09	3,000,000,000	-1.57%	3,000,000,000	-1.57%
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7,935,655,027	7,935,655,027	100.00	11,941,655,027	150.48	4,006,000,000	-2.10%	4,006,000,000	-2.10%
56	Badan Penghubung Daerah	16,079,756,901	16,079,756,901	100.00	19,579,756,901	121.77	3,500,000,000	-1.83%	3,500,000,000	-1.83%
J U M L A H		3,083,655,186,548	3,083,655,186,548	100.00	2,892,808,617,628	93.81	(190,846,568,921)	100.00%	(190,846,568,921)	100.00%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel di atas antara lain adalah sebagai berikut:

- a. RKPD terhadap RPJMD
 - 1) Jumlah pagu indikatif RKPD sama dengan kerangka pendanaan RPJMD (100%), atau sebesar Rp 3.083.655.186.548,- (tiga triliun delapan puluh tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
 - 2) pagu indikatif RKPD dan kerangka pendanaan RPJMD semua perangkat daerah sama (100%)
- b. APBD terhadap RKPD
 - 1) Jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu RKPD (93,81%), dengan total selisih Rp. 190,846,568,921,- (seratus Sembilan puluh milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
 - 2) Terdapat 2 (dua) perangkat daerah yang memiliki jumlah pagu indikatif dan anggaran yang sama antara RKPD dan APBD, sejumlah 32 perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih besar dibanding pagu indikatif RKPD, dan sisanya sejumlah 22 perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD yang lebih kecil dibanding pagu indikatif RKPD.
- c. APBD terhadap RPJMD
 - 1) Jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding kerangka pendanaan RPJMD (93,81%), dengan total selisih Rp. 190,846,568,921,- (seratus Sembilan puluh milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
 - 2) Terdapat 2 (dua) perangkat daerah yang memiliki pagu APBD yang sama dengan kerangka pendanaan RPJMD, sejumlah 32 perangkat daerah memiliki pagu APBD yang lebih besar dibanding RPJMD, sedangkan sisanya yaitu 22 perangkat daerah memperoleh pagu APBD yang lebih kecil dibanding RPJMD.

C. Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2019

Keberhasilan pelaksanaan RKPD dipengaruhi oleh konsistensinya dalam penganggaran. Semakin banyak kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD, maka semakin kecil pula tingkat capaian RKPD.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan menggunakan tabel sebagaimana terlampir, diperoleh capaian kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Dari total 2.594 kegiatan dalam RKPD, terdapat 131 kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD.
- b. Jumlah indikator output dari seluruh kegiatan tersebut adalah sejumlah 3.242 indikator (satu kegiatan bisa lebih dari satu indikator).
- c. Output yang tidak ada realisasinya adalah sejumlah 411, output yang tidak mencapai target adalah sejumlah 331, output yang capaiannya 100% adalah sejumlah 2.295, dan output yang capaiannya melebihi target adalah sejumlah 205.
- d. Kegiatan yang tidak ada realisasinya disebabkan beberapa faktor, antara lain dana APBN yang didampinginya dana APBD tidak terealisasi, tidak dilaksanakan karena permasalahan teknis pelelangan atau kewenangan yang berubah, kesulitan memperoleh data realisasi dari bidang yang melaksanakan kegiatan.
- e. Rata-rata capaian perangkat daerah adalah 98,97% untuk kinerja output dan 92,45% untuk anggaran, dengan predikat kinerja “sangat tinggi”. Capaian kinerja sebagaimana dimaksud selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.270.
Capaian Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 201**

No. Urut	Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Keg	Tidak Dianggarkan di APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan	97	8	102	9	3	88	2	94.69	98.81	ST	ST
2	Dinas Kesehatan	165	19	173	25	11	137	0	89.46	89.05	T	T
3	UPT Transfusi Darah	18	3	19	3	0	16	0	133.75	93.66	ST	ST
4	UPT Pelatihan Kesehatan	16	1	16	5	7	1	3	16.00	94.14	SR	ST
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	4	0	4	0	2	2	0	100.00	61.60	ST	R
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	14	0	14	0	0	14	0	100.00	87.66	ST	T
7	Rumah Sakit Khusus Daerah	5	0	7	0	2	5	0	96.45	81.77	ST	T
8	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	3	0	5	1	2	2	0	97.06	92.32	ST	ST
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	5	1	8	1	1	3	3	66.58	75.09	S	S
10	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	5	0	7	0	3	4	0	93.49	96.52	ST	ST
11	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	6	0	8	0	3	2	3	290.00	89.0	ST	T
12	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	38	0	63	7	14	42	0	93.89	90.60	ST	T
13	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	91	2	140	11	22	101	6	108.76	83.35	ST	T
14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	31	5	42	12	7	19	4	67.40	91.33	S	ST

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No. Urut	Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Keg	Tidak Dianggarkan di APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Satuan Polisi Pamong Praja	26	1	28	1	4	23	0	100.00	98.40	ST	ST
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32	3	33	4	0	29	0	100.00	99.66	ST	ST
17	Dinas Sosial	59	0	62	1	0	61	0	87.50	98.73	T	ST
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	66	2	72	33	25	14	0	46.21	96.39	SR	ST
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51	3	59	3	3	52	1	100.00	97.73	ST	ST
20	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	65	0	78	5	8	58	7	83.40	96.72	T	ST
21	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	36	3	37	3	4	25	5	79.68	91.13	T	ST
22	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	30	0	37	3	1	33	0	92.05	97.91	ST	ST
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55	2	60	3	8	49	0	100.00	96.67	ST	ST
24	Dinas Perhubungan	58	2	69	5	1	59	4	96.25	92.25	ST	ST
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	59	3	64	5	3	53	3	88.18	98.27	T	ST
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	53	3	55	3	0	52	0	100.00	92.79	ST	ST
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	32	1	36	1	0	28	7	157.03	97.92	ST	ST
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	40	2	71	14	11	44	2	99.77	97.22	ST	ST
29	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	69	3	77	3	7	66	1	84.64	96.95	T	ST
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58	1	63	0	11	38	14	126.21	99.73	ST	ST

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No. Urut	Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Keg	Tidak Dianggarkan di APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	68	2	112	32	11	64	5	90.67	96.37	T	ST
32	Dinas Perkebunan	53	2	59	2	8	46	3	100.72	95.02	ST	ST
33	Dinas Kehutanan	97	5	209	80	11	105	13	108.18	94.02	ST	ST
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	64	2	78	4	16	38	20	105.49	95.61	ST	ST
35	Dinas Perdagangan	40	2	44	2	0	42	0	88.89	96.18	T	ST
36	Dinas Perindustrian	55	2	59	2	0	57	0	87.50	97.61	T	ST
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	106	2	146	28	10	78	30	106.03	94.51	ST	ST
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	71	2	95	5	4	75	11	99.70	88.76	ST	T
39	Badan Pendapatan Daerah	143	3	153	2	0	149	2	100.00	94.77	ST	ST
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	48	3	67	4	19	35	9	100.25	91.40	ST	ST
41	Badan Kepegawaian Daerah	53	2	61	4	0	57	0	100.00	95.82	ST	ST
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36	0	46	3	1	42	0	99.91	93.43	ST	ST
43	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	46	4	73	18	3	52	0	100.00	94.14	ST	ST
44	Sekretariat DPRD	41	0	48	0	2	46	0	98.13	90.88	ST	T
45	Biro Hukum dan HAM	36	2	37	3	7	15	12	280.56	97.50	ST	ST
46	Biro Pemerintahan	20	1	27	1	8	17	1	100.00	98.38	ST	ST
47	Biro Humas dan Protokol	21	1	23	2	10	8	3	70.00	99.55	S	T
48	Biro Perekonomian	19	1	19	1	0	17	1	75.00	98.26	S	S

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No. Urut	Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Keg	Tidak Dianggarkan di APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	30	1	35	1	26	3	5	62.40	95.11	R	ST
50	Biro Kesejahteraan	47	20	53	21	5	27	0	83.33	99.39	T	ST
51	Biro Organisasi dan Tata Laksana	26	0	58	8	5	31	14	100.00	92.96	ST	ST
52	Biro Umum dan Perlengkapan	35	2	36	2	0	33	1	100.00	96.46	ST	ST
53	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	27	0	31	0	6	22	3	100.00	75.61	ST	S
54	Inspektorat Daerah	56	1	91	4	3	79	5	101.09	97.44	ST	ST
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40	2	42	4	4	32	2	91.57	97.47	ST	ST
56	Badan Penghubung Daerah	29	1	31	17	9	5	0	4.52	94.86	SR	ST
		2,594	131	3,242	411	331	2,295	205	98.97	92.45	ST	ST

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Program dalam RKPD pada dasarnya terdiri dari program rutin, program pembangunan daerah dan program strategis perangkat daerah. Program rutin adalah program yang ada disetiap perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah adalah program yang langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi RPJMD. Sedangkan program strategis perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan, pelayanan maupun pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Capaian outcome program pembangunan daerah dan program strategis perangkat daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.271.
Capaian Target Outcome Program Pembangunan Daerah dan
Program Strategis Perangkat Daerah**

No. Urut	Organisasi Perangkat Daerah	Capaian Target Outcome Program Prioritas				
		Jumlah Indikator	Rerata Anggaran	Belum tercapai	Sesuai	Melampaui
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan	93	81.37	83	9	1
2	Dinas Kesehatan	184	69.75	175	4	5
3	UPT Transfusi Darah	8	78.17	5	0	3
4	UPT Pelatihan Kesehatan	9	86.75	9	0	0
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	7	82.47	4	3	0
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	20	97.10	12	8	0
7	Rumah Sakit Khusus Daerah	8	90.77	5	3	0
8	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	5	88.58	4	1	0
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	8	72.62	7	1	0
10	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	8	95.61	6	2	0
11	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	10	95.76	5	4	1
12	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	39	93.11	33	6	0
13	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	78	82.22	75	1	2
14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	32	83.29	26	6	0
15	Satuan Polisi Pamong Praja	24	74.97	16	8	0
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31	99.62	23	8	0
17	Dinas Sosial	57	98.24	49	8	0
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	64	94.61	61	3	0
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44	96.33	34	10	0
20	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	82	96.82	73	9	0
21	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	39	94.86	33	5	1
22	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	35	98.12	30	4	1
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50	92.27	41	9	0
24	Dinas Perhubungan	54	92.44	47	6	1

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No. Urut	Organisasi Perangkat Daerah	Capaian Target Outcome Program Prioritas				
		Jumlah Indikator	Rerata Anggaran	Belum tercapai	Sesuai	Melampaui
1	2	3	4	5	6	7
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	57	93.17	49	8	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50	95.84	42	8	0
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	26	98.04	20	3	3
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	45	91.47	38	7	0
29	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	67	96.40	59	8	0
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	57	97.53	49	6	2
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	64	94.62	58	4	2
32	Dinas Perkebunan	70	93.42	64	5	1
33	Dinas Kehutanan	89	94.82	81	5	3
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	59	95.99	50	6	3
35	Dinas Perdagangan	35	90.96	27	8	0
36	Dinas Perindustrian	47	97.13	40	7	0
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	97	90.53	91	2	4
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	64	77.05	55	9	0
39	Badan Pendapatan Daerah	128	95.96	122	6	0
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	46	85.12	38	7	1
41	Badan Kepegawaian Daerah	46	95.74	36	10	0
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26	90.52	20	6	0
43	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	30	91.69	24	6	0
44	Sekretariat DPRD	24	89.41	17	7	0
45	Biro Hukum dan HAM	35	91.82	29	5	1
46	Biro Pemerintahan	22	93.94	15	7	0
47	Biro Humas dan Protokol	15	99.61	13	2	0
48	Biro Perekonomian	17	97.77	14	3	0
49	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	28	92.10	28	0	0
50	Biro Kesejahteraan	42	62.26	37	5	0
51	Biro Organisasi dan Tata Laksana	31	92.77	24	7	0
52	Biro Umum dan Perlengkapan	30	87.90	23	7	0
53	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	22	55.84	17	5	0
54	Inspektorat Daerah	52	96.07	44	7	1
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31	96.96	23	8	0
56	Badan Penghubung Daerah	12	91.54	12	0	0
JUMLAH		2,453	90.18	2,115	302	36

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian program dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:

- Terdapat 2.453 indikator kinerja outcome program pembangunan daerah dan program strategis perangkat daerah dalam RKPD Tahun 2019.
- Sejumlah 2.115 outcome belum mencapai target yang ditetapkan, 302 outcome mencapai target 100%, dan 36 outcome melampaui target yang ditetapkan.

- c. Hal penting lainnya yang menjadi catatan adalah indikator kinerja outcome yang masih banyak kurang terukur atau tidak menunjukkan kinerja, misalnya “jumlah”, “persentase”, “meningkatnya”, dan lain-lain.

Hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana digambarkan di atas merupakan gambaran kinerja perangkat daerah, mengingat pelaksanaan RKPD dalam operasionalnya dilakukan oleh perangkat daerah.

Terkait dengan realisasi program dan kegiatan RKPD berdasarkan tabel-tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
- 1) Tidak dianggarkan dalam APBD.
 - 2) Tidak diperoleh data yang valid dan terverifikasi dari perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab program/kegiatan.
 - 3) Tidak dilaksanakan karena perubahan peraturan perundangan dan/ atau kewenangan yang mendasari pelaksanaan suatu kegiatan.
 - 4) Kegiatan yang bersumber dari APBN yang akan didampingi kegiatan RKPD tidak terealisasi.
 - 5) Permasalahan teknis seperti lelang yang terlambat, cuaca, dan lain-lain.
- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
- 1) Dianggarkan dalam APBD.
 - 2) Pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 - 3) Anggaran yang tersedia mencukupi untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana.
- c. Faktor-faktor penyebab realisasi melebihi target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
- 1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai APBN.
 - 2) Dukungan stakeholders terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
 - 3) Penetapan target lebih rendah dari anggaran yang tersedia.
- d. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
- 1) Peningkatan pemahaman aparatur perangkat daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
 - 2) Penyusunan dokumen rencana dan anggaran sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundangan.
 - 3) Pengelolaan data yang baik.

D. Review Capaian Kinerja RPJMD

Review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai. Review capaian kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

**Tabel II.272.
Review Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP		B	33,050,193,275		37,387,777,684			113.12	ST	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan SDM Aparatur yang lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Manajerial	%	100	2,994,519,000	100	3,438,579,127	100	ST	89.65	T	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	PROGRAM PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI APARATUR	Cakupan SDM yang ditempatkan sesuai kompetensinya	%	75	2,963,200,000	75	4,097,223,684	100	ST	99.74	ST	Badan Kepegawaian Daerah
3	PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN	Cakupan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kab/kota	%	100	1,654,894,400	100	1,582,928,158	100	ST	91.16	ST	Biro Organisasi dan Tata Laksana
4	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD	%	100	10,771,598,000	100	9,429,867,096	100	ST	87.74	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
	PEMBANGUNAN DAERAH	% Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD	%	97		97		100	ST			
		%Ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan	%	100		100		100	ST			
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT	% Penerapan e-Government pada lingkup Perangkat Daerah	%	60	9,641,502,075	133	8,741,422,704	221.67	ST	99.21	ST	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN	% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah	%	20	5,024,479,800	-	5,378,284,085	0	SR	93.46	ST	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
II	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik		D	671,486,295,229		735,840,941,663			109.58	ST	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN BARUGA LAYANAN PUBLIK	% Pemanfaatan Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	%	100	1,016,200,000	75	1,240,488,397	75	S	97.74	ST	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
2	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS	Angka Partisipasi Murni (APM)		63	527,908,752,174	63	638,199,052,614	100	ST	98.91	ST	Dinas Pendidikan
		% Jumlah warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	74		74		100	ST			
		Angka Partisipasi Kasar (APK)		88		98		111.35	ST			
3	PROGRAM PENDIDIKAN SISWA KEBUTUHAN KHUSUS	% Jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	%	80	178,050,000	80	160,470,000	100	ST	99.89	ST	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN KESEHATAN BRIGADE SIAGA BENCANA (BSB)	% Penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	11,550,000,000	92	11,338,825,094	92	ST	96.50	ST	Dinas Kesehatan
		% Penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	%	100		100		100	ST			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	
		yang mendapatkan pelayanan kesehatan									
5	PROGRAM PENGEMBANGAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA	% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	30,000,000	50	13,421,626	50	SR	44.74	SR
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Jumlah tambahan luas lahan yang terlayani sistem pengairan irigasi	Ha	10,787	117,785,237,000	2,746	76,830,702,037	25.45	SR	89.69	T
		% Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	69		18		25.42	SR		
7	PROGRAM BINA KONSTRUKSI	% Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar	%	75	5,650,700,000	45	825,426,731	60.43	R	33.63	SR
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	% Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	%	100	199,150,000	-	167,064,200	0	SR	83.89	T

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
	DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	program Pemerintah Daerah										
		% Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	%	100		15		15	SR			
9	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	% Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	1,037,800,000	100	1,236,436,540	100	ST	98.03	ST	Dinas Sosial
		% Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100		100		ST				
		% Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100		100		ST				
10	PROGRAM PELAYANAN DAN	Cakupan anak dalam panti/lembaga	Jiwa	425	4,524,400,055	425	4,062,090,457	100	ST	97.69	ST	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK	kesejahteraan sosial yang dibina										
		% Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100		100		100	ST			
11	PROGRAM PELAYANAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO	% Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	1,131,875,000	100	1,066,933,947	100	ST	99.12	ST	
		Cakupan lansia yang memperoleh perawatan di panti jompo	Jiwa	75		75		100	ST			
12	PROGRAM LAYANAN DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100	232,931,000	100	377,266,670	100	ST	87.14	T	Satuan Polisi Pamong Praja
13	PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL	% Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	%	2	241,200,000	-	322,763,350	0	SR	99.31	ST	Biro Kesejahteraan
		% Penurunan Penduduk Buta Aksara AlQuran	%	10		-		0	SR			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		% Penurunan Kejahatan terhadap Kesusilaan	%	10		-		0	SR			
III	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	Indeks aksesibilitas infrastruktur		56	376,379,476,554		331,164,021,462			87.99	T	
1	PROGRAM PRESERVASI JALAN	% Tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (mantap)	%	60	357,254,311,554	44	318,039,866,793	72.94	S	90.42	T	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN DAN ANGKUTAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan	Orang	980,537	11,073,000,000	735,402	5,572,500,057	75	S	92.39	ST	Dinas Perhubungan
		Jumlah pelabuhan strategis provinsi	Lokasi	10		9		90	T			
		Jumlah pelabuhan yang beroperasi	Lokasi	35		24		68.57	S			
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	%	22	3,329,665,000	15	2,613,825,454	68.18	S	97.56	ST	Dinas Perhubungan
		Cakupan penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	Ruas	78		46.0		58.97	R			
4	PROGRAM PENANGGULANGAN DAERAH-DAERAH POTENSI BANJIR	Jumlah daerah potensi banjir yang tertangani	Kawasa n	1	67,500,000	0	64,660,730	16	SR	95.79	ST	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
5	PROGRAM PENYEDIAAN LISTRIK DAN KETAHANAN ENERGI	% Desa Berlistrik	%	97	4,655,000,000	99	4,873,168,428	102.06	ST	98.83	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		% Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	97		-		0	SR			
		Jumlah Kapasitas Bio Energi yang terbangun	M3	120		120		100	ST			
IV	Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar dan Bone) (Milyar Rp)		33,110,348.45	8,568,524,000		8,939,482,622			104.33	ST	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		5.17								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU	Jumlah Kawasan yang difasilitasi perencanaan dan pengembangannya	Kawasa n	3	689,310,000	3	594,852,993	100	ST	86.30	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	PRGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	Jumlah kerjasama antara Pemerintah dan lembaga dunia usaha	MoU	2	1,605,000,000	2	1,455,256,558	100	ST	97.87	ST	Dinas Perdagangan
		Jumlah penyelenggaraan pameran dalam dan luar negeri	Pamera n	4		2		50	SR			
3	PROGRAM PENINGKATAN DAN	Nilai ekspor bersih perdagangan	Juta \$ US	125,749,800	4,647,714,000	94,312,350	4,712,073,336	75	S	99.48	ST	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
	PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Total Ekspor	Rp (Milyar)			943,123,500		75	S			
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI	% Peningkatan produksi industri potensial	%	10	508,800,000	10	971,165,085	100	ST	94.0	ST	Dinas Perindustrian
		Jumlah kawasan pergudangan yang tertata	Kawasa n	2		2		100	ST			
		Jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukannya	Sentra	2		2		100	ST			
5	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA	Rasio daya serap tenaga kerja	%	58.17	1,117,700,000	62	1,206,134,650	106.15	ST	98.39	ST	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		% Pencari kerja yang ditempatkan	%	3.48		-		0	SR			
v	Menurunnya kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah	Gini Rasio		0.385	126,242,831,960		11,775,150,312			9.33	SR	
		Indeks Williamson		0.58								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN FASILITAS UMUM	Jumlah fasilitas rest area yang terbangun	Lokasi	2	82,107,240,000	-	5,868,865,400	0	SR	89.64	T	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Jumlah Fasilitas Pendukung Kawasan Pariwisata	Lokasi	2		15		15	SR			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK UKM BAGI MASYARAKAT MISKIN	% Pertumbuhan UKM Bagi Masyarakat Sangat Miskin Dan Miskin	%	20	6,932,900,000	15	3,149,253,942	75	S	80.07	T	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah pengguna rest area sebagai spot wisata alternatif	Orang	-	2,889,343,000	-	2,692,355,464	0	SR	98.12	ST	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	WNA	300,000		1,986		0.66	SR			
		Jumlah kunjungan wisatawan lokal	WNI	7,500,000		2,119,762		28.26	SR			
4	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL	Jumlah Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	Kab/Kota	1	65,916,000	-	64,675,506	0	SR	98.12	ST	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DAN PROMOSI PRODUK UMKM	Cakupan promosi produk UMKM pada Rest Area	Produk	10	900,000,000	7	894,678,406	70	S	99.46	ST	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN	Jumlah klinik rest area yang berfungsi	Klinik	2	2,062,718,800	1	2,150,572,883	50	SR	83.99	T	Dinas Kesehatan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
	STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	% Puskesmas yang Menyelenggarakan Program Kesehatan Tradisional	%	30				0	SR			
		% RS yang Terakreditasi Nasional	%	70				0	SR			
		% Puskesmas Terakreditasi	%	60		81.3		135.42	ST			
		% Puskesmas yang menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Penunjang	%	50				0	SR			
		% RS Kabupaten/Kota yang Telah Menjadi BLU	%	75				0	SR			
7	PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN SMA/SMK/SLB BAGI SISWA MISKIN	Cakupan siswa SMA/SMK/SLB miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan	%	50	29,158,714,160	50	38,967,193,250	99.9	ST	99.73	ST	Dinas Pendidikan
8	PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH	Jumlah RT pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih	RT	-	2,126,000,000	-	1,903,768,000	0	SR	89.55	T	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Cakupan Pembinaan Penanganan Air Minum Kab/Kota	Kab/Kota	24				0	SR			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
VI	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan		65.19	4,037,655,995		3,704,814,476			91.76	ST	
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH	% Tamatan SMA/SMK/SLB yang lulus Perguruan Tinggi Negeri yang bereputasi	%	45	377,401,750	45	256,833,750	100	ST	81.85	T	Dinas Pendidikan
2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN VOKASIONAL	% Tamatan SMK yang bekerja 3 bulan setelah tamat	%	44	521,400,000	44	378,165,538	100	ST	77.66	T	
		Jumlah peserta didik yang menerima pembiayaan gratis pendidikan life skill/kejuruan	Orang	100		25		25	SR			
3	PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER DAN SEKOLAH SEHAT	% SMA/SMK yang bebas Narkoba	%	90	2,609,102,245	90	2,110,876,216	100	ST	92.71	ST	
		% Sekolah yang menerapkan budaya sehat dan Faham Radikalisme	%	50		25		50.00	SR			
		% Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal	%	50.05		25		49.95	SR			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		penambahan waktu pelajaran agama										
4	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA	Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing	Pemuda	900	529,752,000	900	958,938,972	100	ST	99.18	ST	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		% Wirausaha muda	%	14.60		14.40		98.63	ST			
VII	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	IDG		74.01	2,404,701,000		2,575,328,282			107.10	ST	
		IPG		93.18								
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	31	230,251,000	31	209,982,726	100	ST	99.53	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PERDESAAN	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok Binaan PKK	1	2,174,450,000	-	2,365,345,556	0	SR	96.35	ST	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		% Posyandu aktif	%	99.91		-		0	SR			
		% PKK aktif	%	100		-		0	SR			
VIII	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan		77.03	149,373,252,992		4,590,905,277			3.07	SR	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
1	PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL	Jumlah RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan	Unit	2	145,845,418,992	-	2,055,000,000	0	SR	59.85	R	Dinas Kesehatan
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi.	Unit	6	646,936,000	-	652,940,203	0	SR	94.60	ST	
3	PROGRAM PELAYANAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)	% Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	11	250,000,000	68	94,859,480	618.18	ST	37.94	SR	
		% Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	5.5		88		1606	ST			
4	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN, BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	Prevalensi Balita Stunting	%	33	2,630,898,000	47	1,788,105,594	142.33	ST	71.45	S	
		Prevalensi Balita Kurus (Wasting)	%	8.25		-		0	SR			
		Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (Underweight)	%	22		-		0	SR			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	
		% Kabupaten Kota yang memiliki kebijakan PHBS	%	45		20		44.44	SR		
		% Lansia Usia ≥ 60 Tahun yang mendapat pelayanan Santun Lansia	%	50		-		0.00	SR		
		% Posyandu Aktif	%	61		-		0.00	SR		
		Jumlah Kematian Ibu	Kasus	114		-		0.00	SR		
		Jumlah Kematian Bayi	Kasus	1,057		-		0.00	SR		
IX	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam	Produktivitas Total Daerah (Rp / Angkatan Kerja)		78,777,309	158,263,259,650		50,547,082,404			31.94	SR
1	PROGRAM HILIRISASI PERTANIAN	Nilai Hilirisasi Produksi Pertanian	Rp	369,485,250,000	75,817,194,500	-		0	SR	SR	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	PROGRAM HILIRISASI PERKEBUNAN	Nilai Hilirisasi Produksi Perkebunan	Rp	3,578,350,000	3,578,350,000	-		0	SR	SR	Dinas Perkebunan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
3	PROGRAM HILIRISASI PETERNAKAN	Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan	Rp	9,412,084,000	2,699,254,000	10,233,714,519	3,322,384,931	108.73	ST	91.51	ST	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan	Rp	18,851,212,376,010	47,368,673,650	18,333,372,275,300	24,212,459,551	97.25	ST	96.40	ST	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	PROGRAM HILIRISASI PERTAMBANGAN	Nilai Hilirisasi Produksi Pertambangan	Rp	13,821,750,000,000	1,225,000,000	7,691,299,526,148	619,073,447	55.65	R	99.05	ST	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TERNAK	Jumlah Populasi ternak kecil	Ekor	1,656,799	22,705,787,500	1,656,800	20,849,828,389	100.00	ST	97.94	ST	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Populasi ternak sapi perah	Ekor	1,384		1,833		132.44	ST			
		Jumlah Populasi ternak unggas	Ekor	117,948,275		119,616,687		101.41	ST			
		Jumlah Populasi ternak kuda	Ekor	180,532		180,533		100	ST			
		Jumlah produksi telur	Kg	162,594,471		186,601,357		114.76	ST			
		Jumlah produksi susu	Kg	3,240,432		3,299,400		101.82	ST			
		Jumlah produksi daging	Kg	138,164,039		148,101,013		107.19	ST			
		Jumlah Populasi sapi potong	Ekor	1,263,719		1,362,604		107.82	ST			
		Jumlah Populasi ternak kerbau	Ekor	105,219		96,565		91.78	ST			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
7	PROGRAM EKSPLORASI SUMBER DAYA GEOLOGI, KONSERVASI DAN PEMANFAATAN AIR TANAH	Luas Wilayah Pemetaan	Ha	9,200	4,869,000,000	9,200	1,543,336,086	100	ST	82.76	T	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Cadangan Sumber Daya	Ton	2,400,000		2,300,000		95.83	ST			
		Jumlah Pembangunan SUSia Bor	Unit	23		6		26.09	SR			
X	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		73.33	28,163,849,532		22,952,225,077			81.50	T	
		Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2eq)		1.1								
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas udara		88.68	848,400,000	89	685,337,754	100.01	ST	98.37	ST	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Indeks kualitas air		78		81		104.95	ST			
		Cakupan lokasi kerusakan sumber daya alam yang dipulihkan	%	20		20		100.00	ST			
		% Penurunan Jumlah Beban Pencemaran	%	38		38		100.00	ST			
2		Indeks kualitas tutupan lahan		59	14,517,881,500	55	13,779,919,976	93.75	ST	97.48	ST	Dinas Kehutanan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD 2019		Realisasi RKPD 2019		Capaian Kinerja Outcome		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Cakupan Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Ha	1,000		1,348		134.80	ST			
		Cakupan Ketersediaan Jumlah Bibit Tanaman Hutan	Bibit	1,000,000		864,612		86.46	T			
3	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	Panjang Sungai/Danau/Waduk yang dipelihara	Meter	15,000	11,727,968,032	4,061	8,157,042,747	27.07	SR	90.06	T	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Cakupan Data Potensi Sumber Daya Air yang tersedia daya potensinya	%	80		22		27.08	SR			
4	PROGRAM PENATAAN HUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	283	1,069,600,000	3,329,167	329,924,600	100	ST	99.98	ST	Dinas Kehutanan
		Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan	M3	64,123		387,604		100	ST			
		% Luas kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	%	64.67		68		105.46	ST			
Jumlah					1,557,970,040,187		1,209,477,729,259	82.63	T	77.63	T	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bagaimana capaian kinerja RPJMD untuk pelaksanaan tahun 2019. Beberapa hal yang perlu digaris bawahi antara lain adalah sebagai berikut: jawab

1. Realisasi kerangka pendanaan RPJMD adalah sebesar 77,63% dengan predikat “tinggi”.
2. Terdapat capaian outcome maupun sasaran yang belum tersedia data capaiannya.
3. Semua program prioritas dianggarkan dalam APBD.
4. Dari sejumlah 122 indikator program prioritas RPJMD untuk tahun 2019, terdapat 46 indikator atau 37,70% dengan predikat capaian kinerja “sangat rendah”, 3 indikator atau 2,45% dengan predikat “rendah”, 9 indikator atau 7,37% dengan predikat “sedang”, 2 indikator atau 1,63% dengan predikat “tinggi” dan sisanya sejumlah 64 indikator atau 52,45% dengan predikat “sangat tinggi”.
5. Dari sejumlah 58 program prioritas RPJMD untuk tahun 2019, terdapat 5 program atau 8,62% dengan predikat kinerja anggaran “sangat rendah”, 1 program atau 1,72% dengan predikat “rendah”, 1 program atau 1,72% dengan predikat “sedang”, 15 program atau 25,86% dengan predikat “tinggi” dan sisanya sejumlah 36 program atau 62,06% dengan predikat “sangat tinggi”.

2.5.4 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Oleh karena itu, belum terdapat hasil pelaksanaan RPJMD s/d tahun lalu yang akan dianalisis pencapaiannya. Sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD, sebelum menyajikan capaian RKPD, perlu dikemukakan bagaimana komposisi program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD (yang disebut program prioritas) dan program perangkat daerah (yang disebut program strategis) serta program rutin yang menunjang pencapaian sasaran tersebut, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel II.273.
Komposisi Program dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan**

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD Tahun 2019			Jumlah Program RPJMD Tahun 2018-2023		
		Prioritas	Strategis-PD	Rutin	Prioritas	Strategis-PD	Rutin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dinas Pendidikan	6	2	4	6	2	4
2	Dinas Kesehatan	6	4	4	6	4	4
3	UPT Transfusi Darah	1	0	3	1	0	3
4	UPT Pelatihan Kesehatan	0	2	3	0	2	3
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	1	2	0	1	2	0
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	2	4	2	2	4	2
7	Rumah Sakit Khusus Daerah	0	3	1	0	3	1
8	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	0	2	0	0	2	0
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	0	2	0	0	2	0
10	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	1	2	0	1	2	0
11	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	1	3	1	1	3	1
12	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	4	2	4	4	2	4

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD Tahun 2019			Jumlah Program RPJMD Tahun 2018-2023		
		Prioritas	Strategis- PD	Rutin	Prioritas	Strategis- PD	Rutin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	2	2	4	2	2	4
14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	3	3	4	3	3	4
15	Satuan Polisi Pamong Praja	1	4	3	1	4	3
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	4	4	0	4	4
17	Dinas Sosial	3	3	4	3	3	4
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	4	4	1	4	4
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	5	4	1	5	4
20	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	10	4	1	10	4
21	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	4	4	1	4	4
22	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0	5	3	0	5	3
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	4	4	1	4	4
24	Dinas Perhubungan	2	2	4	2	2	4
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2	4	4	2	4	4
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	3	3	2	3	3
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0	4	4	0	4	4
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	5	4	1	5	4
29	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	2	4	4	2	4	4
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	7	3	0	7	3
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	1	4	2	1	4
32	Dinas Perkebunan	1	2	4	1	2	4
33	Dinas Kehutanan	2	3	4	2	3	4
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3	3	4	3	3	4
35	Dinas Perdagangan	2	3	4	2	3	4
36	Dinas Perindustrian	1	3	4	1	3	4
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	3	4	1	3	4
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	4	4	2	4	4
39	Badan Pendapatan Daerah	0	2	4	0	2	4
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	4	4	0	4	4
41	Badan Kepegawaian Daerah	1	5	4	1	5	4
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	2	4	1	2	4
43	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	1	4	1	1	4
44	Sekretariat DPRD	0	4	4	0	4	4
45	Biro Hukum dan HAM	0	4	2	0	4	2
46	Biro Pemerintahan	0	4	3	0	4	3
47	Biro Humas dan Protokol	0	3	3	0	3	3
48	Biro Perekonomian	0	1	3	0	1	3
49	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	0	3	3	0	3	3

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD Tahun 2019			Jumlah Program RPJMD Tahun 2018-2023		
		Prioritas	Strategis- PD	Rutin	Prioritas	Strategis- PD	Rutin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	Biro Kesejahteraan	1	2	3	1	2	3
51	Biro Organisasi dan Tata Laksana	1	2	4	1	2	4
52	Biro Umum dan Perlengkapan	0	5	2	0	5	2
53	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	0	1	4	0	1	4
54	Inspektorat Daerah	1	3	4	1	3	4
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	6	4	0	6	4
56	Badan Penghubung Daerah	0	2	4	0	2	4
J U M L A H		65	181	185	65	181	185
		431			431		

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat adanya konsistensi antara jumlah program dalam RKPD Tahun 2019 dengan jumlah program dalam RPJMD pada masing-masing kategori. Hal ini menunjukkan bahwa program yang terdapat dalam RPJMD seluruhnya dilaksanakan pada tahun 2019.

Adapun hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.274.
Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

No. Urut	Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Keg	Tidak Dianggarkan di APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan	97	8	102	9	3	88	2	94.69	98.81	ST	ST
2	Dinas Kesehatan	165	19	173	25	11	137	0	89.46	89.05	T	T
3	UPT Transfusi Darah	18	3	19	3	0	16	0	133.75	93.66	ST	ST
4	UPT Pelatihan Kesehatan	16	1	16	5	7	1	3	16.00	94.14	SR	ST
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	4	0	4	0	2	2	0	100.00	61.60	ST	R
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	14	0	14	0	0	14	0	100.00	87.66	ST	T
7	Rumah Sakit Khusus Daerah	5	0	7	0	2	5	0	96.45	81.77	ST	T
8	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	3	0	5	1	2	2	0	97.06	92.32	ST	ST
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	5	1	8	1	1	3	3	66.58	75.09	S	S
10	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	5	0	7	0	3	4	0	93.49	96.52	ST	ST
11	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	6	0	8	0	3	2	3	290.00	89.0	ST	T
12	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	38	0	63	7	14	42	0	93.89	90.60	ST	T

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No. Urut	Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Keg	Tidak Dianggarkan di APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	91	2	140	11	22	101	6	108.76	83.35	ST	T
14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	31	5	42	12	7	19	4	67.40	91.33	S	ST
15	Satuan Polisi Pamong Praja	26	1	28	1	4	23	0	100.00	98.40	ST	ST
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32	3	33	4	0	29	0	100.00	99.66	ST	ST
17	Dinas Sosial	59	0	62	1	0	61	0	87.50	98.73	T	ST
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	66	2	72	33	25	14	0	46.21	96.39	SR	ST
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51	3	59	3	3	52	1	100.00	97.73	ST	ST
20	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	65	0	78	5	8	58	7	83.40	96.72	T	ST
21	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	36	3	37	3	4	25	5	79.68	91.13	T	ST
22	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	30	0	37	3	1	33	0	92.05	97.91	ST	ST
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55	2	60	3	8	49	0	100.00	96.67	ST	ST
24	Dinas Perhubungan	58	2	69	5	1	59	4	96.25	92.25	ST	ST
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	59	3	64	5	3	53	3	88.18	98.27	T	ST

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No. Urut	Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Keg	Tidak Dianggarkan di APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	53	3	55	3	0	52	0	100.00	92.79	ST	ST
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	32	1	36	1	0	28	7	157.03	97.92	ST	ST
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	40	2	71	14	11	44	2	99.77	97.22	ST	ST
29	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	69	3	77	3	7	66	1	84.64	96.95	T	ST
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58	1	63	0	11	38	14	126.21	99.73	ST	ST
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	68	2	112	32	11	64	5	90.67	96.37	T	ST
32	Dinas Perkebunan	53	2	59	2	8	46	3	100.72	95.02	ST	ST
33	Dinas Kehutanan	97	5	209	80	11	105	13	108.18	94.02	ST	ST
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	64	2	78	4	16	38	20	105.49	95.61	ST	ST
35	Dinas Perdagangan	40	2	44	2	0	42	0	88.89	96.18	T	ST
36	Dinas Perindustrian	55	2	59	2	0	57	0	87.50	97.61	T	ST
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	106	2	146	28	10	78	30	106.03	94.51	ST	ST
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	71	2	95	5	4	75	11	99.70	88.76	ST	T
39	Badan Pendapatan Daerah	143	3	153	2	0	149	2	100.00	94.77	ST	ST
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	48	3	67	4	19	35	9	100.25	91.40	ST	ST
41	Badan Kepegawaian Daerah	53	2	61	4	0	57	0	100.00	95.82	ST	ST

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No. Urut	Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Keg	Tidak Dianggarkan di APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36	0	46	3	1	42	0	99.91	93.43	ST	ST
43	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	46	4	73	18	3	52	0	100.00	94.14	ST	ST
44	Sekretariat DPRD	41	0	48	0	2	46	0	98.13	90.88	ST	T
45	Biro Hukum dan HAM	36	2	37	3	7	15	12	280.56	97.50	ST	ST
46	Biro Pemerintahan	20	1	27	1	8	17	1	100.00	98.38	ST	ST
47	Biro Humas dan Protokol	21	1	23	2	10	8	3	70.00	99.55	S	T
48	Biro Perekonomian	19	1	19	1	0	17	1	75.00	98.26	S	S
49	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	30	1	35	1	26	3	5	62.40	95.11	R	ST
50	Biro Kesejahteraan	47	20	53	21	5	27	0	83.33	99.39	T	ST
51	Biro Organisasi dan Tata Laksana	26	0	58	8	5	31	14	100.00	92.96	ST	ST
52	Biro Umum dan Perlengkapan	35	2	36	2	0	33	1	100.00	96.46	ST	ST
53	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	27	0	31	0	6	22	3	100.00	75.61	ST	S
54	Inspektorat Daerah	56	1	91	4	3	79	5	101.09	97.44	ST	ST
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40	2	42	4	4	32	2	91.57	97.47	ST	ST
56	Badan Penghubung Daerah	29	1	31	17	9	5	0	4.52	94.86	SR	ST
		2,594	131	3,242	411	331	2,295	205	98.97	92.45	ST	ST

Keterangan :

Predikat Kinerja yang digunakan berpedoman pada predikat kinerja yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

No.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval nilai Realisasi Kinerja 1 tahun
1.	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2.	Tinggi	T	76 % ≤ 90%
3.	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4.	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5.	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sejumlah 2.594 kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah diligkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah indikator seluruhnya adalah 3.242. Jumlah indikator yang lebih besar dari jumlah kegiatan menunjukkan bahwa satu kegiatan bisa memiliki indikator lebih dari satu sesuai dengan output yang ingin diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Capaian kinerja RKPD Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2019 sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Dari 3.242 indikator kegiatan, terdapat 411 kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya masih 0%, sejumlah 331 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan, sejumlah 2.295 indikator capaiannya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan 205 indikator capaiannya melebihi target yang ditetapkan.
2. Rata-rata capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan adalah 98,97% dengan predikat kinerja “sangat tinggi”, sedangkan rata-rata capaian anggaran adalah sebesar 92,45% dengan predikat kinerja “sangat tinggi”.

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Sulawesi tahun 2021 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan tema pembangunan “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial yang Didukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM”. Permasalahan pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2021, teridentifikasi dari hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah sampai dengan tahun 2019, meliputi:

1. Belum berkualitasnya SDM dan daya saing pendidikan;
2. Belum optimalnya nilai tambah komoditas unggulan daerah (Nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan);
3. Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah;
4. Belum meratanya kualitas Infrastruktur wilayah;
5. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi;
6. Meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja;
7. Masih Tingginya Jumlah Penduduk miskin;
8. Belum Optimalnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah;
9. Belum memadainya Pelestarian Lingkungan Hidup;
10. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.6.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
 - a. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online
 - b. Masih Rendahnya angka partisipasi sekolah;
 - c. Belum Optimalnya layanan pendidikan khusus;
 - d. Belum Optimalnya pelayanan tatakelola pendidikan yang akuntabel.
2. Kesehatan
 - a. Masih terdapat kasus kematian ibu dan bayi di Sulawesi Selatan.
 - b. Masih ditemukannya kasus gizi buruk dan stunting di Sulawesi Selatan
 - c. Belum optimalnya penanganan HIV/AIDS, TB dan meluasnya potensi daerah endemis DBD;
 - d. Belum optimalnya upaya promotif dan preventif dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - e. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan di rumah sakit, terutama yang berkaitan di dalam penanganan pasien covid-19;
 - f. Masih kurangnya rumah sakit di daerah yang memfasilitasi penanganan kasus penyakit pandemic terutama terkait covid-19.
3. Pekerjaan Umum
 - 1) Jalan dan Jembatan
 - a. Masih diperlukannya peningkatan kondisi jalan dan peningkatan kapasitas (pelebaran) jalan kewenangan provinsi menyesuaikan dengan standard jalan provinsi sebagai jalan kolektor;
 - b. Diperlukannya percepatan pemenuhan bangunan pelengkap perlengkapan jalan diantaranya (saluran drainase, bahu jalan dan dinding penahan badan jalan) untuk mempertahankan kinerja jalan provinsi dan mendukung keselamatan pengguna jalan;
 - c. Diperlukannya penanganan jalan provinsi yang terputus akibat bencana.
 - 2) Sumber Daya Air
 - a. Masih adanya kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang perlu direhabilitasi dan ditingkatkan untuk dapat mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional;
 - b. Masih diperlukannya upaya peningkatan pasokan sumber air baku untuk pertanian dan domestic;
 - c. Masih diperlukannya upaya pengurangan luasan genangan banjir.
 - 3) Keciptakaryaan
 - a. Belum optimalnya pelayanan air bersih, dan akses pelayanan sanitasi layak;
 - b. Belum tersedianya SPAM Regional di Sulawesi Selatan untuk penyediaan air baku lintas wilayah;
 - c. Belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah regional di Sulawesi Selatan;
 - 4) Jasa Konstruksi
 - a. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi dan belum optimalnya pemanfaatan informasi jasa konstruksi;
 - b. Masih terbatasnya SDM pendamping teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung negara/daerah.
 - 5) Tata Ruang
 - a. Masih rendahnya progres revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota, serta masih terbatasnya rencana rinci tata ruang yang telah disusun;
 - b. Belum optimalnya sinergitas rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;

- c. Belum optimalnya pengembangan basis data penataan ruang dalam skala Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. Masih terbatasnya SDM dalam pemenuhan kebutuhan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - e. Belum optimalnya upaya penegakan konsistensi dan ketaatan terhadap rencana tata ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - a. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin dengan keterbatasan akses pembiayaan;
 - b. Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten/kota;
 - c. Belum optimalnya Sistem Data dan Informasi perumahan dan kawasan permukiman.
 5. Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 6. Sosial
 - a. Belum memenuhinya kualitas mutu pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai standar teknis SPM;
 - b. Terbatasnya SDM pengelola dan pendampingan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) yang belum optimal;
 - c. Belum optimalnya penanganan dan pemberian bantuan sosial pada korban bencana alam;
 - d. Belum optimalnya upaya penyelenggaraan kesejahteraan bagi lanjut usia.

2.6.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
 - a. Belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan;
 - b. Belum optimalnya penyelesaian kasus tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Adanya kesenjangan gender di beberapa bidang pembangunan, khususnya pada bidang ekonomi, dan politik;
 - b. Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Pangan
 - a. Belum terwujudnya sistem logistik daerah yang terintegrasi dan informatif.
 - b. Pola konsumsi pangan yang belum berimbang, perlu dorongan untuk kelompok umbi-umbian; pangan hewani; sayur dan buah; serta minyak dan lemak.
4. Pertanahan
 - a. Belum optimalnya proses pengadaan tanah karena masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pengadaan lahan kurangnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan sosialisasi kepada masyarakat pada tahapan perencanaan, serta belum dilaksanakannya pemantauan terhadap penerbitan izin penetapan lokasi;
 - b. Belum optimalnya jangkauan dan pemahaman Reforma Agraria pada pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
 - c. Masih banyaknya izin Hak Pakai (HP) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang belum teridentifikasi kesesuaian pemanfaatannya serta yang telah habis masa pakainya.
 - d. Belum tersedianya Perda LP2B yang berbasis spasial dan terintegrasi dengan RTR agar dapat berfungsi sebagai perangkat pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

5. Lingkungan Hidup
 - a. Belum terintegrasinya RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - b. Belum dilegalisasinya dokumen RPPLH sebagai acuan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Sulawesi Selatan;
 - c. Kemampuan penanganan sampah khususnya upaya mengurangi sampah dan limbah di Sulawesi Selatan masih terbatas.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sektor pembangunan.
 - b. Belum seluruh masyarakat memiliki dokumen administrasi kependudukan.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Masih belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa;
8. Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
 - a. Rendahnya kesertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - b. Belum optimalnya peran aktif kelompok Tribina (bina keluarga balita, remaja dan lansia) dan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
9. Perhubungan
 - a. Belum optimalnya pengembangan koridor dan peningkatan jumlah armada bus angkutan umum massal berbasis jalan berupa Bus Rapid Transit (BRT) untuk membantu mengatasi kemacetan jalan dan peningkatan mobilitas antar wilayah;
 - b. Masih diperlukannya upaya peningkatan pelayanan pada terminal penumpang tipe B secara kualitas bangunan utama dan penunjang terminal maupun secara kuantitas peningkatan jumlah terminal tipe B di Sulawesi Selatan.
 - c. Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan sesuai jumlah dan standar, khususnya pada ruas jalan kewenangan provinsi;
 - d. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan pada pelabuhan pengumpan regional di Sulawesi Selatan.
10. Komunikasi dan Informatika
 - a. Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi publik;
 - b. Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai;
 - c. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah.
11. Koperasi dan UKM
 - a. Tingkat pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat koperasi relatif terbatas. Hal ini menjadikan koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian.
 - b. Menurunnya jumlah koperasi aktif, akibat terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pengurus koperasi;
 - c. Tingkat produktivitas dan daya saing UKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaan proses produksi dan teknologi.
12. Penanaman Modal
 - a. Terhambatnya investasi yang disebabkan antara lain permasalahan pada perolehan lahan dan ketersediaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
 - b. Belum optimalnya upaya pemberian dukungan kemudahan berusaha dan perbaikan iklim berusaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan keterbukaan investasi, keterampilan

tenaga kerja, teknologi serta peningkatan akses kredit bagi perusahaan kecil.

13. Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia dini dan pelajar;
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. Kurang optimalnya peran serta pemuda dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.
14. Statistik
 - a. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
 - b. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi;
 - c. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral.
15. Persandian
 - a. Perlunya peningkatan kesadaran dan sistem keamanan informasi berdasarkan hasil assesment
16. Kebudayaan
 - a. Perlunya peningkatan optimalisasi pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta nilai-nilai budaya lokal.
17. Perpustakaan
 - a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat;
 - b. Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan;
 - c. Belum optimalnya sarpras dan SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat.
18. Kearsipan
 - a. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM pengelola arsip digital dalam mendukung reformasi birokrasi.

2.6.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
 - a. Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan infrastruktur dalam usaha budidaya garam.
 - b. Perlunya peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.
 - c. Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas dan terbatasnya akses dan tingginya harga pakan ikan
 - d. Perlunya peningkatan ketaatan dan upaya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penyusunan rencana rinci yang diamanatkan oleh RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan;
 - e. Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan upaya pembinaan kepada petani untuk menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - f. Belum optimalnya upaya penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
2. Pariwisata
 - a. Belum optimalnya pengembangan pasar wisatawan ke Sulawesi Selatan.
 - b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta pemasaran destinasi pariwisata.
 - c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Pariwisata yang berdaya saing di bidang pariwisata.
 - d. Rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata tentang sadar wisata dan kewirausahaan.
 - e. Kurangnya inovasi dan kreasi produk wisata dan produk UKM sektor pariwisata.

- f. Pembiayaan untuk pengembangan Usaha Pariwisata di Sulawesi Selatan masih tinggi;
3. Pertanian
 - a. Terbatasnya jumlah tenaga kerja pertanian termasuk kapasitas dan kualitas SDM pertanian;
 - b. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian pada beberapa wilayah, khususnya pada Kabupaten pendukung ketahanan pangan Sulawesi Selatan akan mempengaruhi peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional;
 - c. Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan perkebunan sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
 - d. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian karena usaha pertanian masih berorientasi pada on-farm;
 - e. Belum tercapainya mutu hasil pertanian dan perkebunan yang diharapkan, dan penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan;
 - f. Belum optimalnya penggunaan benih dan bibit unggul bersertifikat sehingga berdampak pada tingkat produktivitas;
 - g. Masih dibutuhkan upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan serta peningkatan upaya pendampingan kelompok peternak.
4. Kehutanan
 - a. Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
 - d. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan belum optimal, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a. Masih maraknya Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman penambangan yang benar (good mining practice);
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan EBT sebagai sumber energi dalam rangka peningkatan capaian rasio desa berlistrik.
6. Perdagangan
 - a. Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail modern karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
 - b. Belum optimalnya Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Produk dan Komoditi Unggulan Orientasi Ekspor.
 - c. Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen dan penerapan SNI.
7. Industri
 - a. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah;
 - b. Belum meratanya persebaran industri di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga pertumbuhan lapangan pekerjaan lebih banyak bertumpu pada kawasan perkotaan dibandingkan dengan pedesaan;
 - c. Rendahnya kemampuan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar.
 - d. Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor baik bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi, terutama industri makanan, tekstil dan logam;
 - e. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang;

- f. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah, khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi;
- 8. Ketransmigrasian
 - a. Masih kurangnya optimalnya pelaksanaan pemetaan calon transmigran pada saat proses seleksi sehingga pengiriman transmigran tidak sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan dilokasi;
 - b. Kurangnya kesiapan provinsi penempatan transmigran untuk menyediakan sarana dan prasarana pemukiman.

2.6.2.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

- 1. Perencanaan
 - a. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan.
- 2. Keuangan
 - a. Koordinasi antar instansi di daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan terkait identifikasi serta pemetaan sumber PAD baru dari sektor PAP belum optimal;
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah.
- 3. Kepegawaian dan Diklat
 - a. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS;
 - b. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier;
- 4. Penelitian dan Pengembangan
 - a. Pemanfaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
 - b. Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.
- 5. Pengawasan
 - a. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu ditingkatkan;
 - b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
 - c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.7 Isu Strategis Daerah

Isu strategis pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2021 merupakan isu yang didasarkan pada permasalahan pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023 serta permasalahan pembangunan secara global, nasional maupun lokal di tahun berjalan maupun pada beberapa tahun terakhir, dengan memperhatikan permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD serta merujuk pada arah kebijakan pada rancangan RKP tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Dalam mencapai tujuan SDGs yang meliputi pembangunan manusia, ekonomi, dan lingkungan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Di bidang sosial ekonomi, sejumlah isu penting terkait SDGs di antaranya pertumbuhan ekonomi, gejala deindustrialisasi, diversifikasi ekonomi, hingga penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. ekonomi Sulawesi Selatan dalam tiga (3) tahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 7,42 dan pada tahun 2017 turun menjadi 7,21, tahun 2018 turun lagi menjadi 7,06 dan pada Tahun 2019 turun menjadi 6,92. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut diakibatkan adanya efek musiman pada

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi minus pada tiap tahunnya, dan pada tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar -27,54 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Di bidang lingkungan, perubahan iklim dan kualitas air dan udara menjadi perhatian khusus, sementara di bidang tata kelola hukum, konstelasi geopolitik dan volatilitas ekonomi global serta kualitas regulasi adalah beberapa isu utama. Untuk mencapai tujuan TPB/SDGs dengan sebaik baiknya, perlunya mengedepankan prinsip pelaksanaan dengan inklusivitas, yakni melibatkan baik unsur pemerintah maupun non pemerintah seperti pelaku usaha, filantropi, organisasi masyarakat, juga akademisi dan perguruan tinggi agar semakin banyak masyarakat yang terlibat.

2. Dukungan Pemerintah Pusat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Selatan

Keunggulan posisi Sulawesi Selatan yang strategis di Kawasan Indonesia Timur tidaklah cukup, dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur untuk penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dari dan menuju kawasan potensial, Sebagai upaya meningkatkan kinerja perekonomian wilayah, dibutuhkan dukungan infrastruktur, khususnya yang menunjang konektivitas antar wilayah. Saat ini di Sulawesi Selatan memiliki 109 pelabuhan laut, 11 pelabuhan udara, dan jalan Provinsi sepanjang 2.009,35 Km. Namun ketersediaan infrastruktur tersebut belum didukung oleh kualitas infrastruktur yang memadai, yang terlihat dari proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 33,45% pada tahun 2019. Peningkatan konektivitas merupakan prioritas pembangunan di Sulawesi Selatan, guna membuka keterisolasian pada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan guna mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah, melalui pembangunan jalan yang menghubungkan antara destinasi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja dengan simpul transportasi dan menghubungkan antara pusat produksi komoditas unggulan wilayah Sulawesi Selatan yaitu komoditas pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan dengan simpul transportasi.

3. Dampak Pandemi Covid-19

Pemulihan ekonomi dan sosial ini tak lepas dari dampak yang ditimbulkan dari pandemi virus korona (covid-19) pada tahun 2020. Percepatan proses pemulihan ekonomi yang mengalami tekanan imbas covid-19 diperlukan untuk mengangkat kembali berbagai indikator seperti kemiskinan dan pengangguran yang diprediksi akan mengalami lonjakan. Pemulihan ekonomi akan mulai pada sektor-sektor yang dapat memulihkan lebih cepat. Utamanya terkait dengan lapangan kerja, karena lapangan kerja penting sekali.

4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat yang secara minimal harus disediakan oleh daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib. ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat menjadi isu penting untuk diperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Sulawesi Selatan. Isu utama dalam bidang pendidikan di Sulawesi Selatan diantaranya adalah akses layanan pendidikan untuk semua, mutu pendidikan, sarana dan prasarana serta pemerataan dan kualitas pendidik yang belum sesuai dengan perubahan dinamika perilaku lapangan kerja di era milenial dan revolusi industri 4.0. Sementara di bidang kesehatan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah pemulihan kesehatan masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dengan tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Masalah lainnya adalah pada pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yang diukur dari Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

lintas Kabupaten/kota sampai dengan tahun 2019 belum terpenuhi dikarenakan di Sulawesi Selatan belum terdapat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sedang mengupayakan pembangunan SPAM Regional di kawasan Perkotaan Mamminasata dengan melakukan penyusunan Rencana Induk SPAM Regional Mamminasata yang direncanakan akan dibangun di Kabupaten Gowa dan akan difasilitasi pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Situasi pandemi dan ketidakpastian yang tinggi mengharuskan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 yang hanya bertumbuh 3,07 persen, hal ini menunjukkan telah terjadi koreksi yang cukup tajam.

Kondisi ini, mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2021, yang artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat pada tahun 2020 sebesar 4,5 persen, namun pada tahun 2021 di prediksi akan kembali optimis ke angka 6,1 persen. Untuk itu, langkah dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi harus terus diperkuat dan dilaksanakan dengan efektif agar pemburukan lebih lanjut dapat diminimalkan. Oleh karena itu, APBD tahun 2020 dan 2021 dilakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk menangani dan pemulihan tiga prioritas utama, yaitu penanganan kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi.

Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi 6,1 persen; Tingkat Kemiskinan 9,1 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 7,2 persen; Tingkat Inflasi 3,0 persen; Gini Rasio 0,414; dan PDRB Perkapita (adhb) Rp. 65,76 Juta.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2021, diarahkan pada "***Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial didukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM***", dengan prioritas meliputi Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing; Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan; Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan social; Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik.

3.1.1 PROSPEK DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Dengan modal pembangunan yang telah dilakukan pada tahun 2019 dan dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2021 diperkirakan akan mengalami peningkatan kembali menjadi 6,1 persen dari perkiraan capaian di tahun 2020 yaitu 4,5 persen. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 antara lain; komoditas ekspor Sulawesi Selatan tidak terdampak perang dagang Amerika dan Tiongkok, peningkatan konsumsi rumah tangga, berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah

pada peningkatan infrastruktur di luar daerah, serta berlangsungnya beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang ikut mendorong lapangan usaha konstruksi.

Peran wilayah Pulau Sulawesi terhadap perekonomian nasional diharapkan mampu melakukan terobosan di beberapa sektor potensial agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Wilayah Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau yang berpotensi besar baik sebagai penggerak ekonomi, sumber kebudayaan Indonesia, maupun sumber keanekaragaman hayati Indonesia, seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan menjadi keunggulan Pulau Sulawesi. Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi serta pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi. Peningkatan peran di sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar Indonesia. Selain itu, pengembangan Kawasan Pariwisata diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor jasa. Sedangkan peningkatan sektor industri pengolahan akan didorong dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao dan pengembangan industri barang dari rotan serta pembangunan industri pengolahan logam dasar dan non logam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berkaitan hal tersebut Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, diarahkan agar seyogyanya mampu mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah dalam meningkatkan daya saing serta menjaga stabilitas politik dan keamanan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2021 diproyeksikan masih tetap optimis, yang antara lain didukung oleh masih cukup tingginya ekspektasi dan minat investor terhadap potensi dan peluang investasi yang bersifat padat karya, yang didukung oleh terealisasinya sejumlah pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian, pengendalian inflasi, berkembangnya UMKM yang berbasis produk unggulan daerah, peningkatan intensifikasi sektor pertanian yang didukung rekayasa teknologi, pengembangan usaha di sektor kemaritiman, semakin berkembangnya sektor pariwisata dan kepariwisataan, dan dukungan regulasi yang lebih efektif dan efisien.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah

A. Tantangan Perekonomian Global

Tantangan perekonomian global pada tahun depan dengan masih menyebarnya wabah Virus Covid – 19 di beberapa belahan dunia yang membuat perekonomian global menjadi tidak stabil. Diperkirakan situasi ekonomi global akan mengalami perlambatan dan ancaman resesi di sejumlah Negara akibat perang dagang Amerika dan Tiongkok/China, tapi juga perang dagang AS dan Eropa.

Untuk itu, Indonesia harus menggunakan kekuatan perekonomian dalam negeri, yaitu konsumsi domestik yang berkontribusi hampir sekitar 46% dari perekonomian nasional. Selain itu penopang pertumbuhan lainnya adalah, belanja pemerintah, ekspor, dan investasi. Disamping itu, sektor yang dinilai punya potensi besar antara lain sektor pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa umum seperti perdagangan dan pariwisata inklusif. Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan diprediksi melambat. Hal ini dikarenakan dampak ketidakpastian serta perlambatan ekonomi global yang diprediksi masih akan terjadi pada tahun ini.
2. Virus Covid – 19 (Coronavirus Disease 19)
Dengan adanya wabah Virus Covid – 19 yang melanda beberapa negara, akan berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Global sehingga dapat diperkirakan bahwa dampak Virus Covid – 19 bagi daerah antara lain : Menurunnya kunjungan wisata, Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri, Menurunnya permintaan ekspor komoditas perikanan dan perkebunan, serta Menurunnya arus perdagangan dan Meningkatnya Inflasi.
3. Defisit transaksi berjalan (*Current Account Deficit/CAD*).
CAD masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Pada kuartal III/2018 CAD tercatat sebesar USD 8,8 miliar atau 3,37% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu membaik di kuartal III/2019 menjadi USD 7,7 miliar atau 2,7% dari PDB, namun masih di atas target CAD pada tahun ini yang berada di kisaran 2,5%.
4. Pertumbuhan kredit masih akan melambat.
Penyaluran kredit perbankan hingga tahun 2020 diyakini masih akan mengalami perlambatan. Pasalnya kondisi permintaan kredit tahun ini juga masih dibayangi oleh ketidakpastian ekonomi global.
5. Defisit neraca perdagangan.
Tekanan atas kinerja perdagangan Indonesia diperkirakan belum akan mereda seiring masih terus terkoreksinya pertumbuhan perdagangan global. Sementara, perang dagang diperkirakan masih akan berlanjut dan turut menekan negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
6. Investasi melambat.
Seperti tahun 2019, investasi ke dalam negeri diperkirakan masih akan mengalami tekanan. Hal ini terlihat pada pencapaian pajak yang tidak sesuai target di tahun 2019.

B. Tantangan Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 - 3,8 persen per tahun, sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat tersebut, penyebab utamanya adalah tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem perpajakan dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan (5) intermediasi sektor keuangan yang rendah dan pasar keuangan yang dangkal.

C. Tantangan Perekonomian Daerah

Tantangan perekonomian Sulawesi Selatan ke depan, sebagaimana pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, tidak lagi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Faktanya, bahwa inklusivitas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tergolong rendah dalam lima tahun terakhir, sehingga kerangka pendanaan harus

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

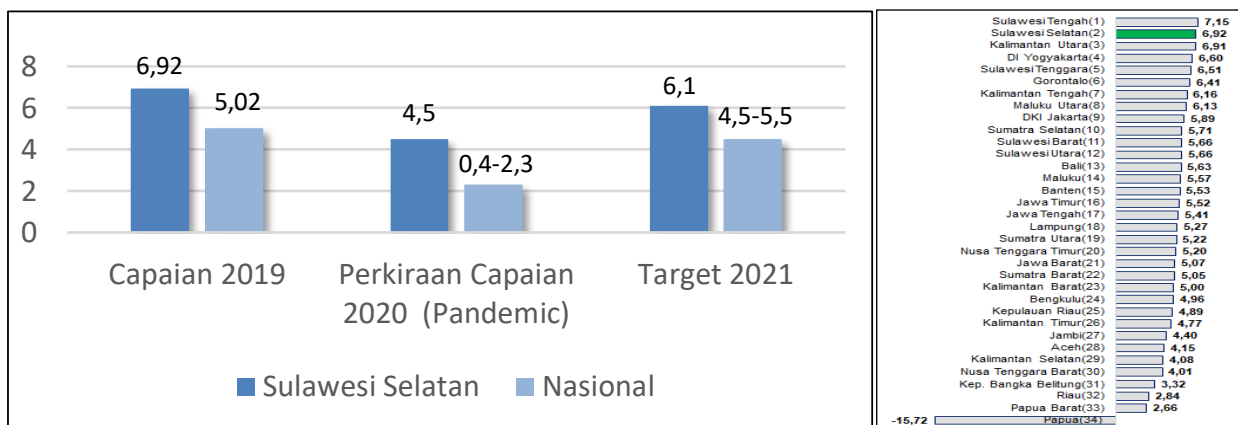
mampu difokuskan pada inklusivitas pertumbuhan, dan tetap diupayakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan harus mendorong alokasi pembiayaan pembangunan untuk menurunkan tingkat pengangguran, menciptakan pemerataan pendapatan antar wilayah, serta mereduksi tingkat kemiskinan. Sehingga tantangannya bukan semata-mata pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada meningkatkan sensitivitas pertumbuhan ekonomi tersebut untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan berusaha bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah yang tersebar hingga ke daerah-daerah pelosok Sulawesi Selatan.

Untuk itu, kecenderungan pembiayaan yang lebih ekspansif ditempuh Sulawesi Selatan harus dapat memastikan untuk meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan untuk alokasi program pembangunan daerah dan program perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih ekspansif ke depan, akan difokuskan pada arah kebijakan, antara lain: (1) mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, untuk tetap menjaga stabilitas permintaan konsumsi domestik; serta (2) menciptakan iklim investasi untuk mendorong peningkatan investasi daerah, selain untuk merespon permintaan konsumsi domestik juga ditujukan untuk mendorong produksi unggulan daerah dalam memenuhi permintaan pasar ekspor.

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang terkena dampak akibat penyebaran wabah covid-19, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan, maka di tahun 2020 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4-2,3 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan capaian Sulawesi Selatan dan Nasional pada tahun 2019 yaitu sebesar 6,92 persen dan 5,02 persen. Walaupun terjadi penurunan, namun secara Nasional pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berada pada peringkat ke-2 setelah Sulawesi Tengah dan masih berada diatas angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional. Sementara untuk target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional di tahun 2021 adalah 6,1 persen dan 4,5-5,5 persen.

Grafik III.1.

**Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional,
Capaian 2019, Perkiraan Capaian 2020 dan Target 2021**

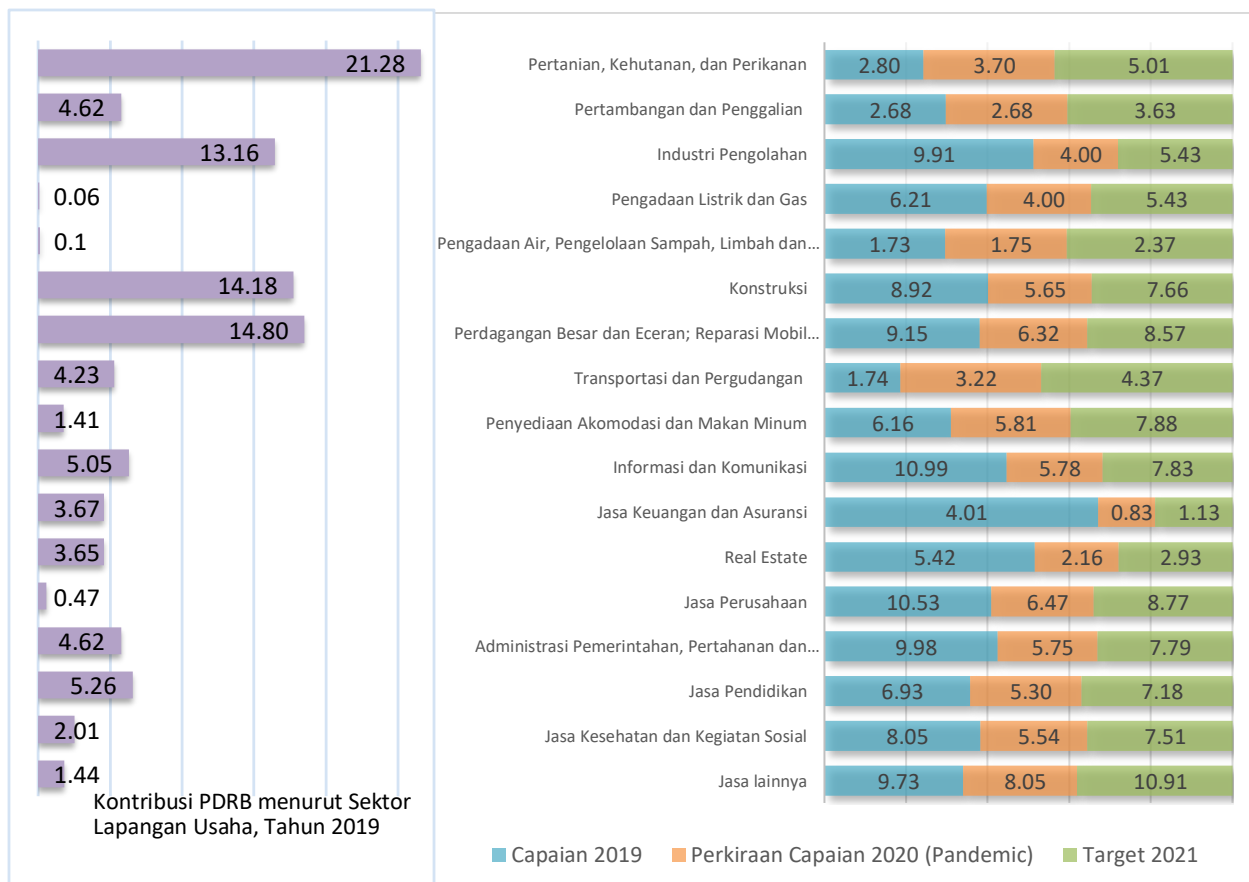


Sumber : BPS, Rancangan RKP 2021 dan Diolah oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan 2020

Jika dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut sektor Lapangan Usaha, yang masih didominasi oleh 4 peran teratas Lapangan Usaha diantaranya : Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,28 persen dengan laju pertumbuhan 2,80 persen, diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 14,80 dengan laju pertumbuhan 9,15 persen, Konstruksi sebesar 14,18 dengan laju pertumbuhan 8,92 persen. Selanjutnya Industri Pengolahan memiliki peran sebesar 13,16 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 9,91 persen.

Grafik III.2.

**Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK) menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2019, Perkiraan Capaian 2020 dan Target 2021**

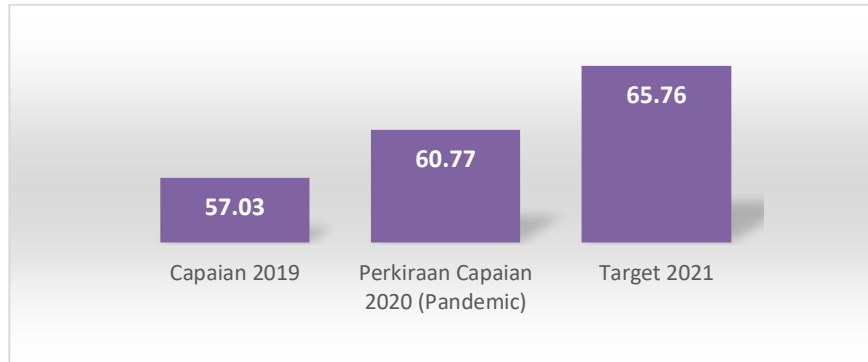


Sumber : Diolah oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebesar Rp. 57,03 juta. Dan pada tahun 2020, ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 60,77 juta, kemudian untuk tahun 2021 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp. 65,76 Juta.

Grafik III.3.

**PDRB Perkapita Sulawesi Selatan,
Capaian 2019, Perkiraan 2020 dan Target 2021**



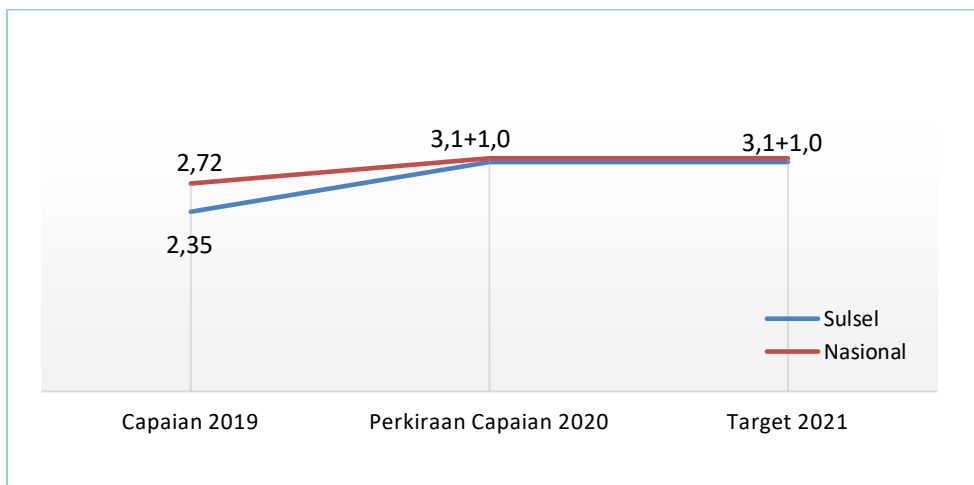
Sumber : BPS, dan Diolah oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan 2020

3.1.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan tingginya inflasi, akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2019, inflasi Sulsel (2,35 persen) lebih rendah dibandingkan Nasional (2,72 persen). Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (demand side) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (supply side) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Sehingga untuk mempertahankan hal tersebut, tim pengendali inflasi daerah akan terus memastikan upaya stabilitas harga untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun melihat dari kondisi saat ini dengan adanya Pandemi wabah virus Covid-19 yang akan berimplikasi buruk bagi perekonomian Sulawesi Selatan, yang terjadi secara bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan serta ketatnya pasokan pangan dan depresiasi mata uang yang diperkirakan dapat diimbangi sebagian oleh penurunan harga bahan bakar non-subsidi, serta subsidi tambahan untuk listrik dan pangan. Maka Inflasi yang terjadi ditahun 2020 diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3,0 persen demikian juga tahun 2021 sebesar 3,0 persen.

Grafik III.4.

**Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2019, Perkiraan Capaian 2020 dan Target 2021**



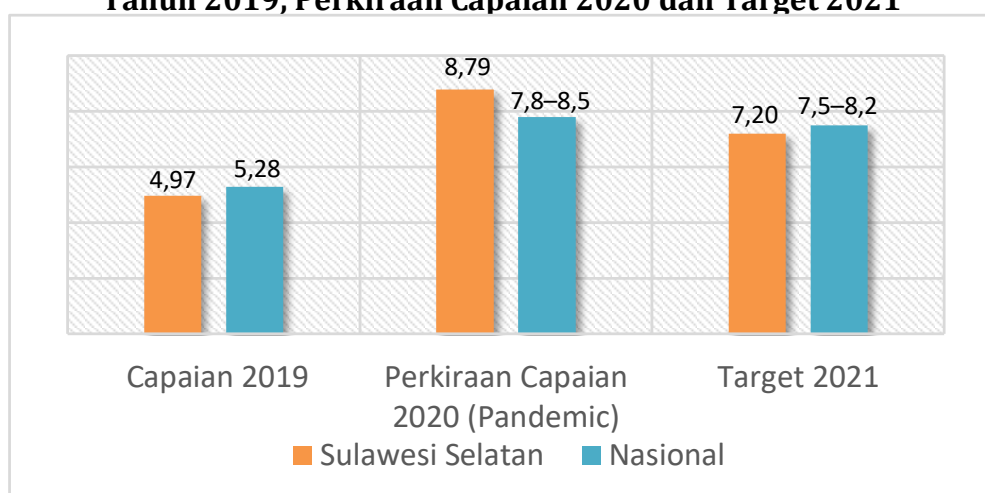
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

3.1.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Memperhatikan perkembangan ekonomi dan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia terkhusus Provinsi Sulawesi Selatan, maka diprediksi akan semakin meningkat jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan akibat pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, Pemerintah Sulawesi Selatan tahun 2020 memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka akan meningkat menjadi 8,79 persen atau lebih tinggi dibandingkan dari capaian tahun 2019 yang hanya sebesar 4,97 persen dan lebih tinggi dari target Nasional yang akan dicapai pada tahun 2020 yaitu 7,8-8,5 persen. Sementara untuk tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka di target oleh pemerintah Sulawesi Selatan sebesar 7,20 persen atau lebih rendah dari target Nasional yaitu 7,5-8,2 persen.

Grafik III.5.

Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019, Perkiraan Capaian 2020 dan Target 2021



Sumber : BPS, Rancangan RKP 2021 dan Diolah oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan 2020

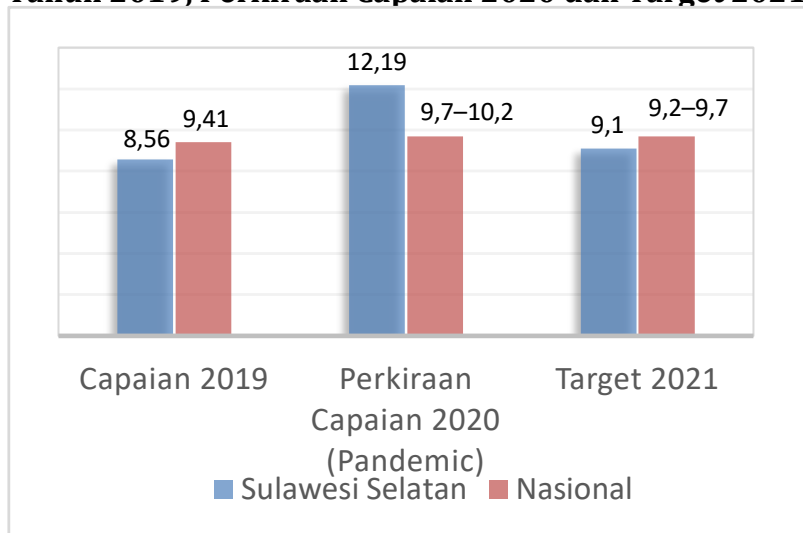
3.1.1.5 Kemiskinan

Seperti halnya dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, dengan adanya pandemi Covid-19 sebagian besar masyarakat di Sulawesi Selatan juga terkena dampaknya, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah serta sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 di prediksi akan meningkat menjadi 12,19 persen dibandingkan dari tahun 2019 yang mencapai 8,56 persen (meningkat sebesar 3,63 persen), atau lebih tinggi dari prediksi target Nasional untuk menurunkan penduduk miskin yaitu 9,7-10,20 persen. Namun pada tahun 2021, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan social masyarakat akan membaik, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 9,1 persen atau dibawah target Nasional yaitu 9,2-9,7 persen.

Grafik III.6.

**Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2019, Perkiraan Capaian 2020 dan Target 2021**



Sumber : BPS dan Diolah oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan 2020

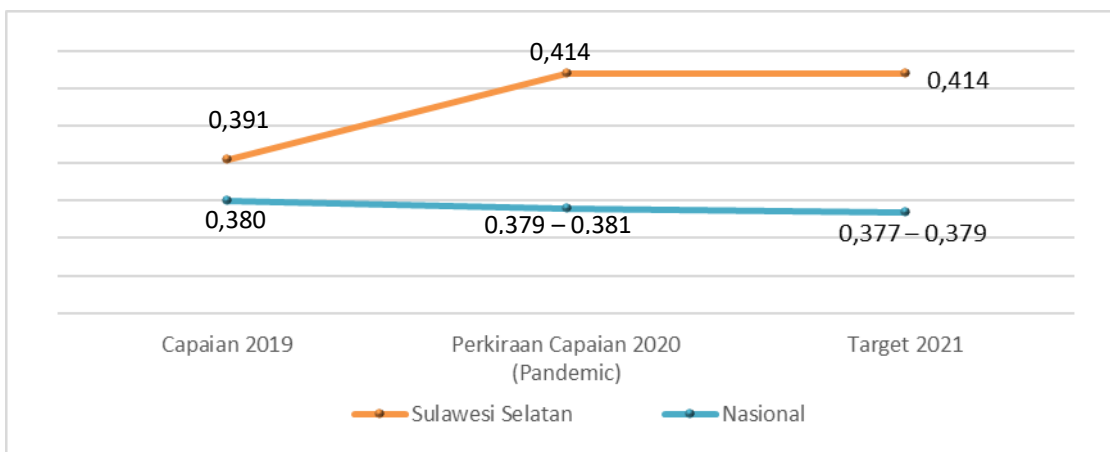
3.1.1.6 Gini Rasio

Gini Ratio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah.

Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan pada periode September tahun 2019 sebesar 0,391, atau berada diatas angka rata-rata Nasional yaitu 0,379-0,381. Untuk tahun 2020, Gini Ratio di Sulawesi Selatan di prediksi akan mencapai angka 0,414, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,379-0,381, atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2021, angka Gini Rasio Sulawesi Selatan di targetkan sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan target Nasional sebesar 0,377-0,379 atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Hal Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan kenaikannya dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan 2021. Kenaikan Gini Ratio ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 sehingga pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) desil 1 meningkat, sementara golongan menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat namun pendapatannya naik. Akibat pendapatan penduduk menengah atas lebih tinggi, maka menyebabkan gap (jarak) antara penduduk miskin dan menengah atas menjadi semakin jauh.

Grafik III.7.

**Gini Rasio Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2019, Perkiraan Capaian 2020 dan Target 2021**



Sumber : BPS, Rancangan RKP 2021 dan Diolah oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan 2020

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Sulawesi Selatan 2021 dan pencapaian target Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Sulawesi Selatan.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2021

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Gambar III.1.

Tema dan Fokus Pembangunan Ekonomi Makro RKP Tahun 2021



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, yaitu sebagai berikut :

Tabel III.1.

Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,5-8,2
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2-9,7
Rasio Gini (indeks)	0,377-0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78-72,90
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) <i>*menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)</i>	23,55-24,14

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Indikator Pembangunan	Target 2021
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	3,41-4,26
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	3,35-4,21
Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,20

Sumber: Rancangan awal RKP tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2021, maka strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan akses pendidikan yang berkeadilan dan merata;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara promotif, preventif dan kuratif;
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis keterampilan dan kompetensi tenaga kerja;
4. Mengefektifkan link and match antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industry;
5. Meningkatkan kualitas dan perlindungan perempuan;
6. Meningkatkan Penyediaan sarana dan parasarana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
7. Meningkatkan pemenuhan kualitas dan pemerataan akses pelayanan dasar bidang pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur pendukung perekonomian;
8. Meningkatkan Kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah;
9. Memperluas kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan;
10. Memperkuat ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
11. Memperluas akses program pengentasan kemiskinan;
12. Memperkuat koordinasi untuk menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi;
13. Memperluas jangkauan pelayanan sosial dan subsidi yang tepat sasaran;
14. Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam;
15. Mengoptimalkan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup;
16. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon;
17. Meningkatkan nilai tambah produk komunikasi unggulan daerah;
18. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur;
19. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah sebagai berikut :

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Mengacu pada Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, kebijakan umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Untuk jenis pajak daerah yang bersifat *self assessment*, koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah akan terus diintensifkan dengan harapan adanya kerjasama-kerjasama lintas sektor yang menguntungkan bagi penerimaan pendapatan daerah. Disamping modernisasi pelayanan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan terus ditingkatkan melalui pendataan dan penagihan pajak secara aktif diiringi penegakan sanksi yang efektif. Selain berdampak langsung kepada penerimaan Pajak Daerah, upaya ini juga menunjang penerimaan dari sisi Lain-Lain PAD Yang Sah.

Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah, peningkatan hasil retribusi daerah juga akan mendapat perhatian melalui perbaikan sistem pengelolaan retribusi menjadi lebih efisien dan akuntabel. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Untuk itu gambaran rencana teknis optimalisasi pendapatan daerah tahun 2021 secara umum akan diarahkan pada:

1. Perluasan layanan pembayaran pajak melalui *channel-channel* pembayaran *online*;
2. Peningkatan efektivitas implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) se Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Penegakan sanksi pajak dengan melakukan penagihan pajak oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan aset daerah yang berpotensi PAD;
5. Koordinasi intensif dengan pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Lintas Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya;
6. Intensifikasi pendataan dan penagihan tunggakan pajak secara *door to door* dan penertiban kendaraan bermotor di jalan raya;
7. Peningkatan kualitas sumber daya aparat pengelola pendapatan;
8. Sosialisasi pajak dan retribusi daerah.

3.2.1.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2018-2022

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2018-2019, target APBD Pokok Tahun 2020 serta proyeksi pendapatan tahun 2021 dan 2022 dari masing-masing jenis pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005

Uraian	Realisasi		Target APBD Pokok 2020	Tahun Rencana 2021 *)	Proyeksi 1 Tahun setelah tahun rencana Tahun 2022 **)
	2018	2019			
Pendapatan Asli Daerah	3,948,349,252,423.00	4,139,566,475,784.00	4,496,954,868,938.00	4,617,613,027,000.00	4,910,507,974,000.00
Pajak Daerah	3,462,184,656,928.00	3,710,611,599,841.00	3,849,150,026,481.00	4,009,685,323,000.00	4,189,532,457,000.00
Retribusi Daerah	70,370,128,268.00	40,874,810,923.00	77,951,954,000.00	110,008,562,000.00	119,646,363,000.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	108,949,315,359.00	111,357,119,117.00	132,334,391,887.00	185,581,088,000.00	260,268,985,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	306,845,151,868.00	276,722,945,903.00	437,518,496,570.00	312,338,054,000.00	341,060,169,000.00
Pendapatan Transfer	5,295,519,277,687.00	5,388,320,704,592.00	5,821,858,609,600.00	6,187,913,977,000.00	6,511,975,541,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	237,746,371,914.00	169,796,915,880.00	222,761,097,600.00	257,485,363,000.00	266,595,056,000.00
Dana Alokasi Umum	2,509,480,255,000.00	2,586,312,342,000.00	2,600,586,502,000.00	2,799,499,275,000.00	2,937,234,639,000.00
Dana Alokasi Khusus	2,540,292,650,773.00	2,632,211,446,712.00	2,998,011,010,000.00	3,109,840,280,000.00	3,286,635,006,000.00
Dana Insentif Daerah	8,000,000,000.00	-	500,000,000.00	21,089,059,000.00	21,510,840,000.00
Lain - lain Pendapatan yang Sah	8,353,412,065.00	46,958,941,454.00	80,950,980,375.00	24,585,653,000.00	24,585,653,000.00
Hibah	8,353,412,065.00	18,017,093,454.00	80,950,980,375.00	24,585,653,000.00	24,585,653,000.00
Dana Penyesuaian		28,941,848,000.00	-	-	-
Jumlah	9,252,221,942,175.00	9,574,846,121,830.00	10,399,764,458,913.00	10,830,112,657,000.00	11,447,069,168,000.00

Sumber Data: Bapenda Provinsi Sulsel

*) Proyeksi Tahun 2021 dalam RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023

**) Proyeksi Tahun 2022 dalam RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023

Tabel III.3.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019

Uraian	Realisasi		Target APBD Pokok 2020	Tahun Rencana 2021 *)	Proyeksi 1 Tahun setelah tahun rencana Tahun 2022 **)
	2018	2019			
Pendapatan Asli Daerah	3,948,349,252,423.00	4,139,566,475,784.00	4,496,954,868,938.00	4,617,613,027,000.00	4,910,507,974,000.00
Pajak Daerah	3,462,184,656,928.00	3,710,611,599,841.00	3,849,150,026,481.00	4,009,685,323,000.00	4,189,532,457,000.00
Retribusi Daerah	70,370,128,268.00	40,874,810,923.00	77,951,954,000.00	110,008,562,000.00	119,646,363,000.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	108,949,315,359.00	111,357,119,117.00	132,334,391,887.00	185,581,088,000.00	260,268,985,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	306,845,151,868.00	276,722,945,903.00	437,518,496,570.00	312,338,054,000.00	341,060,169,000.00
Pendapatan Transfer	5,287,519,277,687.00	5,388,320,704,592.00	5,821,358,609,600.00	6,166,824,918,000.00	6,490,464,701,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	237,746,371,914.00	169,796,915,880.00	222,761,097,600.00	257,485,363,000.00	266,595,056,000.00
Dana Alokasi Umum	2,509,480,255,000.00	2,586,312,342,000.00	2,600,586,502,000.00	2,799,499,275,000.00	2,937,234,639,000.00
Dana Alokasi Khusus	2,540,292,650,773.00	2,632,211,446,712.00	2,998,011,010,000.00	3,109,840,280,000.00	3,286,635,006,000.00
Lain - lain Pendapatan yang Sah	16,353,412,065.00	46,958,941,454.00	81,450,980,375.00	45,674,712,000.00	46,096,493,000.00
Hibah	8,353,412,065.00	18,017,093,454.00	80,950,980,375.00	24,585,653,000.00	24,585,653,000.00
Dana Penyesuaian		28,941,848,000.00	-	-	-
Dana Insentif Daerah	8,000,000,000.00	-	500,000,000.00	21,089,059,000.00	21,510,840,000.00
Jumlah	9,252,221,942,175.00	9,574,846,121,830.00	10,399,764,458,913.00	10,830,112,657,000.00	11,447,069,168,000.00

Sumber Data: Bapenda Provinsi Sulsel

*) Proyeksi Tahun 2021 dalam RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023

**) Proyeksi Tahun 2022 dalam RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023

Selama kurun waktu tahun 2018-2022, pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat bertumbuh dengan baik utamanya dari sumber PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kinerja Keuangan daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 diproyeksikan mencapai Rp10,83 triliun, atau terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 17,05 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.9,25 triliun. Adapun kontribusi sumber pendapatan selama kurun waktu 2018-2022 dapat diuraikan bahwa PAD berkontribusi rata-rata sebesar 42,93 persen, pendapatan transfer sebesar 56,71 persen dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 0,36 persen. Adapun besaran kontribusi masing-masing sumber pendapatan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel III.4.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	2018	2019*)	2020	2021**)	2022**)
I	Pendapatan Asli Daerah	42,67	43,23	43,24	42,64	42,90
A	Pajak daerah	87,69	89,64	85,59	86,83	85,32
B	Retribusi daerah	1,78	0,99	1,73	2,38	2,44
C	Hasil pengel. Kekada yg	2,76	2,69	2,94	4,02	5,30
D	Lain - lain PAD yang sah	7,77	6,68	9,73	6,76	6,95
II	Pendapatan Transfer	57,24	56,28	55,98	57,14	55,89
A	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	4,49	3,15	3,83	4,16	4,09
	- Bagi Hasil Pajak	81,70	71,38	81,74	0	0
	- Bagi Hasil SDA	18,30	28,62	18,26	0	0
B	Dana Alokasi Umum	47,39	48,00	44,67	45,24	45,11
C	Dana Alokasi Khusus	47,97	48,85	5,86	50,26	50,47
D	Dana Insentif Daerah			0,01	0,34	0,33
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,09	0,49	0,78	0,23	0,21
A	Hibah	100,00	38,37	100,00	100,00	100,00
B	Dana Penyesuaian	0	61,63	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Daerah(1+2+3)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

Ket : *) Realisasi Unaudited

***) Proyeksi tahun 2021 dalam RPJMD Tahun 2018-2023

****) Proyeksi tahun 2022 dalam RPJMD Tahun 2018-2023

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam peraturan Gubernur tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Nomenkelatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk

menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- e. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Dan Penanganan Gangguan Keamanan Serta Penghentian Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.4 Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2021, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2020 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2021 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.5.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2018,2019, 2020, 2021 dan 2022
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005

NO	URAIAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019	APBD 2020	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022
2	BELANJA DAERAH	9,322,103,147,943.00	9,489,469,127,454.00	10,723,764,155,127.00	10,830,112,656,999.00	11,447,069,167,998.00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,548,504,115,658.00	6,870,221,685,087.00	7,196,088,267,404.00	7,447,052,146,176.00	8,020,622,452,154.00
2.1.1	Belanja Pegawai	3,064,236,808,013.00	3,232,076,825,506.00	3,363,894,773,960.00	3,483,807,162,825.00	3,778,518,823,282.00
2.1.3	Belanja Bunga	1,212,859,794.00				
2.1.4	Belanja Subsidi					
2.1.5	Belanja Hibah	1,864,993,851,524.00	1,391,918,320,000.00	1,686,445,840,000.00	1,594,966,853,826.00	1,599,966,853,826.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	600,000,000.00	818,000,000.00	1,420,000,000.00	1,200,000,000.00	1,250,000,000.00
2.1.7	Belanja Bagi Hasil	1,383,334,398,528.00	1,733,213,706,105.00	1,545,230,812,644.00	1,895,228,788,725.00	2,169,037,434,246.00
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan	234,126,197,799.00	512,194,833,476.00	579,096,840,800.00	446,849,340,800.00	446,849,340,800.00
2.1.9	Belanja Tidak Terduga			20,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
2.2	BELANJA MODAL	2,773,599,032,285.00	2,619,247,442,367.00	3,527,675,887,723.00	3,383,060,510,823.00	3,426,446,715,844.00
2.2.1	Belanja Pegawai	3,807,162,825.00	3,894,773,960.00	4,523,762,200.00	17,558,608,565.00	18,436,538,993.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,687,986,093,900.00	1,645,861,899,471.00	1,812,130,687,978.00	1,782,923,444,198.00	1,787,528,261,782.00
2.2.3	Belanja Modal	1,081,805,775,560.00	969,490,768,936.00	1,711,021,437,545.00	1,582,578,458,060.00	1,620,481,915,069.00

Sumber :RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Tabel III.6.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2018,2019, 2020, 2021 dan 2022
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019

NO	URAIAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019	APBD 2020	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022
2.00	BELANJA DAERAH	9.322.103.147.944,74	9.489.469.127.455,93	10.723.764.155.129,50	10.830.112.657.000,00	11,447,069,168,000.00
2.10	BELANJA OPERASI	6.622.836.776.056,97	6.274.569.818.938,29	6.868.415.064.139,08	6.880.456.069.414,74	7,185,700,477,883.85
2.1.1	Belanja Pegawai	3.068.043.970.838,00	3.235971.599.466,65	3.368.418.536.160,47	3.501.365.771.390,74	3,796,955,362,275.85
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.687.986.093.900,97	1.645.861.899.471,64	1.812.130.687.978,61	1.782.923.444.198,00	1,787,528,261,782.00
2.1.3	Belanja Bunga	1.212.859.794,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.5	Belanja Hibah	1.864.993.851.524,00	1.391.918.320.000,00	1.686.445.840.000,00	1.594.966.853.826,00	1,599,966,853,826.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	818.000.000,00	1.420.000.000,00	1.200.000.000,00	1,250,000,000.00
2.20	BELANJA MODAL	1.081.805.775.560,77	969.490.768.936,07	1.711.021.437.545,80	1.582.578.458.060,00	1,620,481,915,069.30
2.2.1	Belanja Modal	1.081.805.775.560,77	969.490.768.936,07	1.711.021.437.545,80	1.582.578.458.060,00	1,620,481,915,069.30
2.30	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25,000,000,000.00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25,000,000,000.00
2.40	BELANJA TRANSFER	1.617.460.596.327,00	2.245.408.539.581,57	2.124.327.653.444.62	2.342.078.129.525,00	2,615,886,775,046.85
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.383.334.398.528,00	1.733.213.706.105,57	1.545.230.812.644,62	1.895.228.788.725,00	2,169,037,434,246.85
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	234.126.197.799,00	512.194.833.476,00	579.096.840.800,00	446.849.340.800,00	446,849,340,800.00

Sumber :RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. **10.830.112.657.000,50** yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar Rp. **6.880.456.069.414,74**, Belanja Modal sebesar Rp. **1.582.578.458.060,00**, Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 25.000.000.000,00**, serta Belanja Transfer sebesar Rp. **2.342.078.129.525,00**. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2021.

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga maupun belanja Transfer, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan fasilitas sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (**SPM**) di tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 1,142,266,255,177.61** atau **10,55 persen** dari total Belanja Daerah dengan rincian alokasi sebagai berikut :

**Tabel III.7.
Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2021**

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Program Peningkatan Partisipasi Pendidikan Menengah Dan Khusus (Prioritas)	546,775,081,644.16	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Siswa Kebutuhan Khusus (Prioritas)	185,067,821.78	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	Program Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (Bsb) (Prioritas)	10,159,896,973.00	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Prioritas)	800,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional (Prioritas)	800,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya (Prioritas)	255,556,510,793.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Preservasi Jalan (Prioritas)	316,319,776,635.40	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	Program Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Dan Relokasi Program Pemerintah Daerah	1,120,000,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
		(Prioritas)		
		Program Penyediaan Dan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin Dan Mbr (Prioritas)	3,000,000,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Program Layanan Dan Penegakan Produk Hukum Daerah (Prioritas)	695,000,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Sosial	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Prioritas)	1,128,704,776.46	Dinas Sosial
		Program Pelayanan Dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (Prioritas)	4,549,728,801.25	Dinas Sosial
		Program Pelayanan Panti Asuhan/Panti Jompo (Prioritas)	1,176,487,732.56	Dinas Sosial
Total			1,142,266,255,177.61	

Sumber : Bappelitbangda 2020, Diolah

Kebijakan Belanja Daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2021, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja daerah terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender.
2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Kerangka pendanaan yang merupakan perspektif rencana penganggaran untuk tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Hal ini diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran telah menentukan porsi besaran anggaran terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2021 sebesar **Rp. 2.043.055.787.607,85** atau **18,86 persen** dari total Belanja Daerah untuk membiayai 80 program prioritas yang rinciannya telah tertuang pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.8.
Dukungan Besaran Anggaran Program Prioritas terhadap Prioritas
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021**

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran Prioritas	Program Prioritas		Pagu Anggaran Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing	744,393,516,853.35	1	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah (Prioritas)	892,276,999.78	Dinas Pendidikan
			2	Program Pendidikan Siswa Kebutuhan Khusus (Prioritas)	185,067,821.78	Dinas Pendidikan
			3	Program Pendidikan Karakter Dan Sekolah Sehat (Prioritas)	3,211,939,732.07	Dinas Pendidikan
			4	Program Peningkatan Dan Pemerataan Mutu Dan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	30,308,001,772.74	Dinas Pendidikan
			5	Program Peningkatan Partisipasi Pendidikan Menengah Dan Khusus (Prioritas)	546,775,081,644.16	Dinas Pendidikan
			6	Program Pembangunan Rumah Sakit Regional (Prioritas)	130,471,937,258.00	Dinas Kesehatan
			7	Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Prioritas)	2,272,390,000.00	Dinas Kesehatan
			8	Program Pengembangan Spesialisasi Dan Kualitas Layanan Rumah Sakit (Prioritas)	653,669,842.00	Dinas Kesehatan
					350,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
					825,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
					360,000,000.00	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
					207,882,978.70	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
			9	Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Prioritas)	9,457,778,825.61	UPT Transfusi Darah
					600,000,000.00	UPT RSK Gigi dan Mulut
					430,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1,465,375,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar					
		100,000,000.00	Rumah Sakit Khusus			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran Prioritas	Program Prioritas	Pagu Anggaran Program Prioritas	Perangkat Daerah	
					Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	
				411,824,468.05	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
				100,000,000.00	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	
			10	Program Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (Hpk) (Prioritas)	5,692,101,020.00	Dinas Kesehatan
			11	Program Promosi Kesehatan, Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak (Prioritas)	2,657,684,500.00	Dinas Kesehatan
			12	Program Perluasan Dan Pengembangan Tenaga Kerja (Prioritas)	1,738,500,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			13	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasional (Prioritas)	541,950,925.46	Dinas Pendidikan
			14	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,299,650,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			15	Program Perlindungan Perempuan Dan Anak (Prioritas)	931,360,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			16	Program Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak	899,184,580.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	554,859,485.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	671,294,717,449.58	1	Program Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Ternak (Prioritas)	19,488,720,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian	51,737,985,999.50	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
			3	Program Penataan Hutan Dan Pemanfaatan Hutan (Prioritas)	3,405,000,000.00	Dinas Kehutanan
			4	Program Peningkatan Produksi Kelautan Dan Perikanan	2,598,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			5	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya (Prioritas)	255,556,510,793.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			6	Program Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Prioritas)	800,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal (Prioritas)	316,014,072.12	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
			8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5,440,760,946.00	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran Prioritas	Program Prioritas		Pagu Anggaran Program Prioritas	Perangkat Daerah
			9	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	224,861,482,285.10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			10	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Prioritas)	4,954,375,430.49	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
			11	Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional (Prioritas)	800,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			12	Program Pengembangan Dan Penataan Fasilitas Umum (Prioritas)	64,355,000,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			13	Program Pengembangan Dan Pembinaan Kelompok Ukm Bagi Masyarakat Miskin (Prioritas)	5,732,900,000.00	Program Pengembangan Dan Pembinaan Kelompok Ukm Bagi Masyarakat Miskin (Prioritas)
			14	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	3,474,954,357.90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			15	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1,386,548,500.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1,219,458,183.67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			17	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,000,111,095.63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			18	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	3,468,419,457.00	Dinas Kesehatan
			19	Program Penyediaan Air Bersih (Prioritas)	12,560,000,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			20	Program Penyediaan Listrik Dan Ketahanan Energi (Prioritas)	8,138,476,329.17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	331,612,687,963.22	1	Program Preservasi Jalan (Prioritas)	316,319,776,635.40	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	2		Program Penyelenggaraan Kepelabuhanan Dan Angkutan Pelayaran (Prioritas)	11,509,441,115.54	Dinas Perhubungan	
	3		Program Penyelenggaraan Angkutan Jalan	3,783,470,212.28	Dinas Perhubungan	
4	Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial	216,335,324,262.40	1	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Prioritas)	356,227,346.97	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2		Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	7,600,000,000.00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	
	3		Program Peningkatan Produksi Dan Mutu Produk Hortikultura	5,800,000,000.00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	
	4		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri (Prioritas)	7,600,000,000.00	Dinas Perindustrian	
	5		Program Bantuan Pendidikan Sma/Smk/Slb Bagi Siswa Miskin	120,000,000.00	Dinas Pendidikan	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran Prioritas	Program Prioritas	Pagu Anggaran Program Prioritas	Perangkat Daerah
			(Prioritas)		
			6 Program Pengembangan Usaha Dan Promosi Produk Umkm (Prioritas)	900,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			7 Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif Dan Pengembangan Produk Pemasaran Bagi Koperasi Dan Umkm	300,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			8 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	466,907,030.00	Dinas Kesehatan
			9 Program Penyediaan Dan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin Dan Mbr (Prioritas)	3,000,000,000.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			10 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Komunitas Adat Terpencil (Kat)	11,734,601,334.89	Dinas Sosial
			11 Program Pengembangan Perekonomian Dan Pembinaan Kelembagaan Ekonomi	3,277,752,622.75	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
			12 Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	489,824,268.00	Dinas Perdagangan
			13 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1,143,356,382.00	Dinas Perdagangan
			14 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Prioritas)	1,128,704,776.46	Dinas Sosial
			15 Program Pelayanan Dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (Prioritas)	4,549,728,801.25	Dinas Sosial
			16 Program Pelayanan Panti Asuhan/Panti Jompo (Prioritas)	1,176,487,732.56	Dinas Sosial
			17 Program Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (Bsb) (Prioritas)	10,159,896,973.00	Dinas Kesehatan
			18 Program Hilirisasi Peternakan (Prioritas)	6,261,903,750.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			19 Program Hilirisasi Pertanian (Prioritas)	94,300,000,000.00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
			20 Program Hilirisasi Perkebunan (Prioritas)	780,000,000.00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
			21 Program Hilirisasi Pertambangan (Prioritas)	1,273,283,244.52	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			22 Program Hilirisasi Perikanan (Prioritas)	45,732,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			23 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	3,450,000,000.00	Dinas Perindustrian
			24 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,299,650,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			25 Program Pengembangan Dan Kepeloporan Pemuda (Prioritas)	2,435,000,000.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5	Pengelolaan Sumber daya alam berbasis	43,508,232,879.82	1 Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	936,750,015.95	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran Prioritas	Program Prioritas	Pagu Anggaran Program Prioritas	Perangkat Daerah	
	kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim					
			2	Hidup (Prioritas)		
			2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	476,484,313.87	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
			3	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan	3,230,000,000.00	Dinas Kehutanan
			4	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Prioritas)	14,148,550,000.00	Dinas Kehutanan
			5	Program Penataan Hutan Dan Pemanfaatan Hutan (Prioritas)	3,405,000,000.00	Dinas Kehutanan
			6	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya (Prioritas)	21,311,448,550.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	35,911,308,199.48	1	Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Prioritas)	3,112,493,647.42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			2	Program Penilaian Potensi Dan Kompetensi Aparatur (Prioritas)	2,205,000,000.00	Badan Kepegawaian Daerah
			3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Dan Keuangan Daerah (Prioritas)	4,464,952,193.04	Inspektorat Daerah
			4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	10,503,413,677.35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	253,003,979.22	Biro Organisasi
			6	Program Penguatan Ketatalaksanaan Dan Reformasi Birokrasi	1,550,915,120.23	Biro Organisasi
			7	Program Pengembangan Dan Implementasi E-Government (Prioritas)	9,932,559,414.41	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			8	Program Pengembangan Dan Implementasi Inovasi Pemerintahan (Prioritas)	2,832,716,752.81	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			9	Program Pengembangan Baruga Layanan Publik (Prioritas)	1,056,253,415.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Total		2.043.055.787.607,85				

Sumber : Bappelitbangda 2020, Diolah

Disisi lain dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut, telah ditetapkan proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang mana nomenkelatur perangkat daerah ini telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

**Tabel III.9.
Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2021**

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2021
1	Dinas Pendidikan	603,345,418,389.43
2	Dinas Kesehatan	178,891,281,263.00
3	UPT Transfusi Darah	14,087,682,232.96
4	UPT Pelatihan Kesehatan	4,068,684,230.90
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	12,563,901,586.87
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	101,096,995,840.30
7	Rumah Sakit Khusus Daerah	42,148,273,930.76
8	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	59,038,765,949.87
9	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	23,386,835,103.39
10	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	22,199,345,164.17
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	13,404,528,334.73
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	940,135,864,741.02
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	105,536,440,319.97
14	Satuan Polisi Pamong Praja	15,200,156,879.87
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,822,878,185.58
16	Dinas Sosial	26,409,318,857.88
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10,526,967,763.61
18	Dinas Ketahanan Pangan	16,214,142,329.79
19	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	10,982,478,515.38
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,209,825,357.62
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17,104,329,567.42
22	Dinas Perhubungan	29,605,353,729.15
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	21,238,297,091.71
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22,207,547,695.05
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,580,515,000.00
26	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	40,494,452,845.02
27	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	26,687,734,078.55
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9,196,555,901.56
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	37,013,328,553.21
30	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	197,412,883,358.15
31	Dinas Kehutanan	47,427,350,104.01
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	23,333,809,033.22
33	Dinas Perdagangan	14,839,043,380.49

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2021
34	Dinas Perindustrian	24,295,946,418.91
35	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17,026,080,996.28
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	78,403,041,891.43
37	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	32,493,514,737.94
38	Badan Pendapatan Daerah	56,908,801,610.07
39	Badan Keuangan dan Aset Daerah	32,431,804,805.22
40	Badan Kepegawaian Daerah	13,722,299,610.31
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17,527,616,417.36
42	Sekretariat DPRD	240,514,695,499.36
43	Biro Hukum	4,174,377,126.98
44	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2,786,565,636.54
45	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	9,107,469,325.52
46	Biro Pengadaan Barang/Jasa	7,827,304,501.52
47	Biro Kesejahteraan Rakyat	6,364,607,079.23
48	Biro Organisasi	6,756,196,807.64
49	Biro Umum	71,368,607,037.94
50	Biro Administrasi Pimpinan	7,908,539,131.13
51	Inspektorat Daerah	14,595,908,560.57
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,748,438,024.61
53	Badan Penghubung Daerah	22,687,710,290.54
TOTAL		3,383,060,510,823.74

Sumber : Bappelitbangda 2020, Diolah

Berakhirnya MDGs pada 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030. Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan. Sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Akan tetapi, beberapa indikator yang mengukur target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan perhatian khusus. Target yang belum tercapai di antaranya adalah tingkat kemiskinan nasional, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk, prevalensi HIV dan AIDS serta beberapa indikator terkait lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis. Sejumlah langkah yang telah ditempuh Indonesia sampai dengan akhir 2016 antara lain (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap

target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs, (iv) menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia.

Dalam SDGs, terdapat 17 sasaran dan 169 target yang terukur dan ditetapkan PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi kita tercinta. Tujuan pembangunan dunia ini dicanangkan bersama pada resolusi PBB 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian, serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan RKPD. Sehingga dalam mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan Anggaran sebesar **Rp.3.528.077.533.985,83** atau **32,58 persen** dari total Belanja Daerah untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian Target-target TPB/SDGs agar dapat sejalan dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

**Tabel III.10.
Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah terhadap
Tujuan TPB/SDGs Tahun 2021**

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran Tahun 2021	
1	Tujuan 1	1	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	11,734,601,334.89
	Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;	2	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	466,907,030.00
		3	Program Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	5,692,101,020.00
		4	Program Pengembangan Layanan Kesehatan Siaga Bencana	10,159,896,973.00
		5	Program Pembangunan Rumah Sakit Regional	130,471,937,258.00
		6	Program Bantuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Siswa Miskin (Prioritas)	120,000,000.00
		7	Program Perencanaan Perekonomian	764,784,633.41
		8	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	697,368,744.00
		9	Program Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan	2,260,155,715.14
		10	Program Pengembangan Penganekaragaman	3,590,000,000.00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran Tahun 2021
		Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	
11		Program Hilirisasi Pertanian	94,300,000,000.00
12		Program Hilirisasi Perkebunan	780,000,000.00
13		Program Keluarga Sejahtera	262,957,416.24
14		Program Pengembangan Kemitraan dan Sumber Daya Pariwisata	1,879,973,000.00
15		Program Pengembangan dan Pembinaan Kelompok UKM Bagi Masyarakat Miskin	5,732,900,000.00
16		Program Hilirisasi Peternakan	6,261,903,750.00
17		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak	19,488,720,000.00
18		Program Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan	2,598,000,000.00
19		Program Pengendalian Jalan Akses Wilayah Terisolir	700,000,000.00
20		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1,143,356,382.00
21		Program Penyediaan Listrik dan Ketahanan Energi	8,138,476,329.17
22		Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	466,907,030.00
23		Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1,268,850,000.00
24		Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial (Prioritas)	1,128,704,776.46
25		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3,468,419,457.00
26		Program Peningkatan Keluarga Berencana	222,295,505.61
27		Program Penyediaan Air Bersih	12,560,000,000.00
28		Program	800,000,000.00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran Tahun 2021
			Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	
		29	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional	800,000,000.00
		30	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	4,590,000,000.00
		31	Program Penataan Permukiman	3,900,000,000.00
		32	Program Partisipasi Pendidikan Menengah dan Khusus (Prioritas)	546,775,081,644.16
		33	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Manusia dan Kebudayaan	697,368,744.00
		34	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1,590,124,884.04
		35	Program Pencegahan dan mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	907,010,010.55
		36	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	2,482,002,249.66
		37	Program Pendidikan Siswa Kebutuhan Khusus	185,067,821.78
		38	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	829,037,319.04
		39	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	3,302,898,513.75
2	Tujuan 2	1	Pembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan segar	3,590,000,000.00
	Tanpa Kelaparan : Mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;	2	Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan	1,878,256,809.00
		3	Pengembangan Distribusi Harga Pangan	1,000,000,000.00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran Tahun 2021
		4 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak (Prioritas	19,488,720,000.00
		5 Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	5,692,101,020.00
		6 Promosi Kesehatan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak	2,657,684,500.00
		7 Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB)	10,159,896,973.00
		8 Pembangunan Rumah Sakit Regional	130,471,937,258.00
		9 Pendidikan Karakter Sekolah Sehat (Prioritas)	3,211,939,732.07
		10 Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	709,675,297.32
		11 Hilirisasi Pertanian	94,300,000,000.00
		12 Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga	616,317,280.00
		13 Upaya Kesehatan dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	9,457,778,825.61
3	Tujuan 3	1 Promosi Kesehatan, Bina Gizi, dan Kesehatan Ibu dan Anak	2,657,684,500.00
	Kehidupan Sehat dan Sejahtera : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia;	2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3,468,419,457.00
		3 Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB)	10,159,896,973.00
		4 Pembangunan Rumah Sakit Regional	130,471,937,258.00
		5 Program peningkatan keluarga Berencana	222,295,505.61
		6 Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8,254,753,442.00
		7 Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	466,907,030.00
4		Tujuan 4	1 Program Peningkatan Partisipasi Pendidikan Menengah dan Khusus

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran Tahun 2021
			(Prioritas)	
	Pendidikan Berkualitas : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;	2	Program Pendidikan Karakter dan Sekolah Sehat	3,211,939,732.07
		3	Program Pendidikan Siswa Kebutuhan Khusus	185,067,821.78
		4	Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	1,409,290,683.33
		5	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	4,590,000,000.00
		6	Peningkatan dan Pemerataan Mutu dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	30,308,001,772.74
5		Tujuan 5	1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
	Kesetaraan Gender : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;	2	Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	554,859,485.00
		3	Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	249,577,450.00
		4	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	899,184,580.00
		5	Perlindungan Perempuan dan Anak (Prioritas)	249,577,450.00
		6	Peningkatan Partisipasi Pendidikan Menengah dan Khusus	546,775,081,644.16
		7	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	776,601,500.00
		8	Program Peningkatan Keluarga Berencana	222,295,505.61
		9	Program Pengembangan Data dan informasi Statistik Sektoral	570,449,827.00
6		Tujuan 6	1	Program Pengembangan Air Minum Curah Lintas

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran Tahun 2021
			Kabupaten/Kota (Prioritas)	
	Air Bersih dan Sanitasi Layak : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	2	Program Penyediaan Air Bersih	12,560,000,000.00
		3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya (Prioritas)	255,556,510,793.00
		4	Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga	616,317,280.00
		5	Program Eksplorasi Sumberdaya Geologi, Konservasi, dan Pemanfaatan Air Tanah	5,060,911,116.37
		6	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	936,750,015.95
		7	Program Penegenalian dan Evaluasi Pemanfaatan Energi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	477,455,231.32
		8	Program Penanggulangan Daerah-Daerah Potensi Banjir (Prioritas)	450,000,000.00
		9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	255,556,510,793.00
		10	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	14,148,550,000.00
			11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
7	Tujuan 7	1	Program Penyediaan Listrik dan Ketahanan Energi	8,138,476,329.17
	Energi Bersih dan Terjangkau : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua			
8	Tujuan 8	1	Program pengembangan sentra-sentra industri	7,600,000,000.00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran Tahun 2021
	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	2	Program Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja	2,299,650,000.00
		3	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,299,650,000.00
		4	Program pengembangan pusat pertumbuhan baru	356,227,346.97
9	Tujuan 9	1	Program Perencanaan dan Fasilitas pengembangan transportasi.	635,415,861.06
	Industri, Inovasi dan Infrastruktur : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri kreatif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;	2	Program Penyelenggaraan kepelabuhan dan angkutan pelayaran	11,509,441,115.54
		3	Program penataan lingkungan.	793,842,730.75
		4	Program Pengembangan dan implementasi Inovasi pemerintahan.	2,832,716,752.81
		5	Program kelitbangan dan pemanfaatan IPTEK daerah	847,200,000.00
		6	Program pengembangan data dan informasi statistic sectoral	570,449,827.00
		7	Program Pengembangan dan impementasi e-government.	9,932,559,414.41
10	Tujuan 10	1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1,219,458,183.67
	Berkurangnya kesenjangan : Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara;	2	Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan	2,260,155,715.14
		3	Program Pengembangan dan Pembinaan Kelompok UKM bagi masyarakat miskin.	5,732,900,000.00
		4	Program penyediaan dan pembiayaan	3,000,000,000.00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran Tahun 2021
			perumahan bagi masyarakat miskin dan MBR	
		5	Program Penataan pemukiman	3,900,000,000.00
		6	Program Penyediaan air bersih	12,560,000,000.00
		7	Program peningkatan partisipasi pendidikan menengah dan khusus	546,775,081,644.16
		8	Program penyediaan listrik dan ketahanan energy.	8,138,476,329.17
		9	Program hubungan industri dan jaminan social tenaga kerja.	1,268,850,000.00
11	Tujuan 11	1	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	3,460,903,391.31
	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh berkelanjutan	2	Penyelenggaraan Angkutan Jalan	3,783,470,212.28
		3	Program Bina Konstruksi	4,040,867,400.00
		4	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	1,865,000,000.00
		5	Program Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	907,010,010.55
		6	Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	2,482,002,249.66
		7	Program Penanggulangan Daerah-Daerah Potensi Banjir	450,000,000.00
		8	Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	829,037,319.04
		9	Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	5,364,744,562.72
		10	Program Pengembangan dan Penataan Fasilitas Umum	64,355,000,000.00
12	Tujuan 12	1	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	936,750,015.95

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran Tahun 2021
			hidup	
	Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;	2	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	687,907,433.26
13	Tujuan 13	1	Program pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	907,010,010.55
	Penanganan Perubahan Iklim : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	2	Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	2,482,002,249.66
		3	Penataan Lingkungan	793,842,730.75
		4	Program Perencanaan Sumberdaya Alam	218,529,256.85
		5	program Rehabilitasi hutan dan lahan	14,148,550,000.00
14		Tujuan 14	1	Program Hilirisasi Perikanan
	Ekosistem Lautan : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	2	Program Peningkatan Produksi kelautan dan Perikanan	2,598,000,000.00
		3	Program Penerapan Mutu , Pengembangan Usaha dan Daya Saing	3,370,000,000.00
		4	Program Pengawasan, Konservasi, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut	11,787,000,000.00
15		Tujuan 15	1	Program penataan dan pemanfaatan hutan
	Ekosistem Daratan : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggunaan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	936,750,015.95
		3	Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	4,230,000,000.00
		4	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	14,148,550,000.00
		5	Tata Lingkungan	793,842,730.75

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran Tahun 2021
		6	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	687,907,433.26
16	Tujuan 16	1	Program peningkatan perlindungan hak perempuan	554,859,485.00
	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat	2	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	931,360,000.00
		3	Proram peningkatan akuntabilitas kinerja	253,003,979.22
		4	Penguatan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi	1,550,915,120.23
		5	Program Pengelolaan Informasi Publik	1,643,526,973.00
17	Tujuan 17	1	Program Pengembangan dan Implementasi E-Goverment	9,932,559,414.41
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan : Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	2	Program Pengembangan Baruga Layanan Publik	1,056,253,415.00
		3	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	570,449,827.00
		4	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	709,675,297.32
		5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1,590,124,884.04
Total				3,528,077,533,985.83

Sumber : Bappelitbangda 2020, Diolah

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2014-2018 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Sesuai Pasal 22 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

1. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT.Bank Sulselbar setiap tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Selengkapnya realisasi, target dan proyeksi pembiayaan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.11.
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018- 2022

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH (Rp.)				
		Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	Target APBD Pokok 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
	Surplus/Defisit	(69.881.205.769,29	84.441.734.504,77	(323.999.696.216,5	-	-
1.	Penerimaan Pembiayaan	192,336,065,874.01	57.128.681.556,72	323.999.696.216,50	0,00	0,00
1.1.	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	192,336,065,874.01	57.128.681.556,72	323.999.696.216,50	0,00	0,00
1.2.	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
1.7.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
1.8.	Penerimaan Pengembalian Investasi Perusda	-	-	-	-	-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	65.276.338.548,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2.2.	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	650.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Pembayaran Pokok Utang	64.626.338.548,00	-	-	-	-
2.4.	Pembayaran Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	127.059.727.326,01	7.128.681.556,72	323.999.696.216,50	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	57.178.521.556,72	91.570.416.061,49	-	-	-

Sumber : BKAD dan Proyeksi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2020

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2021, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2019, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2021 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Gubernur yang termuat dalam visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, capaian target pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal- eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2021 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan pada Rancangan RKP 2021.
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2021
3. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah dan Provinsi sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional maupun provinsi.
4. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2020. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2021.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan selama 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC.

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2018- 2023. Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 (tiga) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 dalam rangka mencapai visi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018- 2023 adalah sebagai berikut:

“Sulawesi Selatan Yang

Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”.

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 yaitu provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV. 1

Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkarakter	Inovatif	Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”
	Kompetitif	Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”
	Produktif	Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.
	Inklusif	Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.
	Ber karakter	Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “ber karakter”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel*
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Ber karakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel IV.2.

Tabel IV. 2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

Pernyataan Visi: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Ber karakter			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi	Inovatif dan Inklusif
2.	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	Membangun infrastruktur dalam menguatkan inter-konektivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir	Produktif dan Inklusif
3.	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	Mengembangkan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah	Produktif
4.	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Ber karakter	Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan ipteks tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan ber-kualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan kemajuan kebudayaan daerah	Kompetitif, Inklusif dan Ber karakter
5.	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Kompetitif

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan.

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C

Target dari tujuan dan sasaran tahun 2021 menjadi landasan RKPD Tahun 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel IV. 3.

Tabel IV. 3
Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2019	Target Tahun 2021 Pada RPJMD	Target Tahun 2021 Pada RKPD	Penjelasan	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif						
	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	BB (75,00)	Target RPJMD sama dengan Target RKPD Tahun 2021
	1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	2	Nilai SAKIP	B	BB	BB (76,00)	Target RPJMD sama dengan Target RKPD Tahun 2021
	2. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	B	C	B (85,00)	Pada Tahun 2019 capaiannya telah mencapai nilai B, serta tingkat pelayanan publik semakin membaik sehingga target berubah dari C menjadi B pada tahun 2021
2.	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel						
	2. Meningkatkan infrastruktur wilayah	4	Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air (%)	7,18	8	5,92	Perbedaan target disebabkan adanya perlambatan sebagai akibat dari kontrakkdi sektor usaha transportasi
	3. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	5	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	63,07	65	65	Target RPJMD sama dengan Target RKPD Tahun 2021
3.	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif						
	3. Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah	6	PDRB Perkapita (Juta Rp)	57,03	62,97	65,76	Perubahan target karena adanya pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 6,1%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2019	Target Tahun 2021 Pada RPJMD	Target Tahun 2021 Pada RKPD	Penjelasan	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
		7	Angka Kemiskinan (%)	8,56	8,14	9,1	Peningkatan angka kemiskinan disebabkan karena adanya pemutusan kerja sebagai akibat dari pandemi covid-19 dimana di proyeksikan akan terjadi peningkatan angka kemiskinan di wilayah kota.
	4. Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	8	PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone) (Milyar RP)	34.013.980	37,138,364.43	36.946.200	Penurunan target karena diproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebagai akibat dari beberapa sector lapangan usaha yang mengalami perlambatan
		9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,97	4,77	7,2	Peningkatan angka TPT disebabkan karena adanya pemutusan kerja sebagai akibat dari pandemi covid-19 serta pertumbuhan ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja
	5. Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	10	Indeks Gini	0,391	0,366	0,414	Gini Ratio di daerah perkotaan diproyeksikan akan mengalami peningkatan pada tahun 2021, distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah diproyeksi adanya penurunan
		11	Indeks Williamson	0,63	0,56	0,61	ketimpangan antar wilayah meningkat diakibatkan beberapa Kab/Kota yang diproyeksi mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat secara signifikan, disamping itu ketimpangan antar sektor yang terjadi di dalam Kabupaten/kota

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator		Capaian Tahun 2019	Target Tahun 2021 Pada RPJMD	Target Tahun 2021 Pada RKPD	Penjelasan	
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	
4.	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel							
	4.	Meningkatkankualitas SDM secara inklusif	12	IPM	71,66	72,79	72,22	Penurunan Target sebagai akibat dari adanya perlambatan dari pengeluaran perkapita penduduk, semakin rendahnya nilai daya beli masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian yang memburuk pada tahun 2020 sebagai akibat covid-19 menyebabkan semakin rendahnya kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.
	6.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	13	Indeks Pendidikan	64,64	67,02	67,02	Target RPJMD sama dengan Target RKPD Tahun 2021
	7.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	14	IPG	93,09	93,62	93,62	Target RPJMD sama dengan Target RKPD Tahun 2021
			15	IDG	74,01*	77,07	77,07	Target RPJMD sama dengan Target RKPD Tahun 2021
8.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	16	Indeks Kesehatan	77,58	77,31	77,31	Target RPJMD sama dengan Target RKPD Tahun 2021	
5.	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan							
	5.	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	17	Pertumbuhan PDRB (%)	6,92	7,6-8,0	6,1	Penurunan pertumbuhan ekonomi diakibatkan karena beberapa sektor lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan yang sangat signifikan, diantaranya sektor transportasi, perdagangan, dan sektor jasa
	9.	Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam	18	Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)	82.027.871,00	87.882.496	83.797.510	Terjadinya penurunan target kerna adanya penurunan pertumbuhan PDRB

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No.	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator	Capaian Tahun 2019	Target Tahun 2021 Pada RPJMD	Target Tahun 2021 Pada RKPD	Penjelasan	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	
		10.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,5	73,4	77,78	Terjadi peningkatan target sebagai akibat semakin membaiknya indeks tutupan lahan serta indeks kualitas air di Sulawesi Selatan
				20	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	0,86	1,7	1,7	Target RPJMD sama dengan Target RKPD Tahun 2021

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disusun berdasarkan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan tahun 2021 sebagai mana yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 sebagai mana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 memiliki 10 sasaran pembangunan yang menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka RKPD 2021 merupakan penjabarab dari prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2018-2023 dengan tetap mengaju pada RKP Tahun 2021 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan.

4.2.1.1. Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tema pembangunan RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.-19.

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel IV.4

**Tabel IV. 4
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021**

Indikator Pembangunan	Target 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,5-8,2
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2-9,7
Rasio Gini (indeks)	0,377-0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78-72,90
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) <i>*menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)</i>	23,55-24,14
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	3,41-4,26
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	3,35-4,21
Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,20

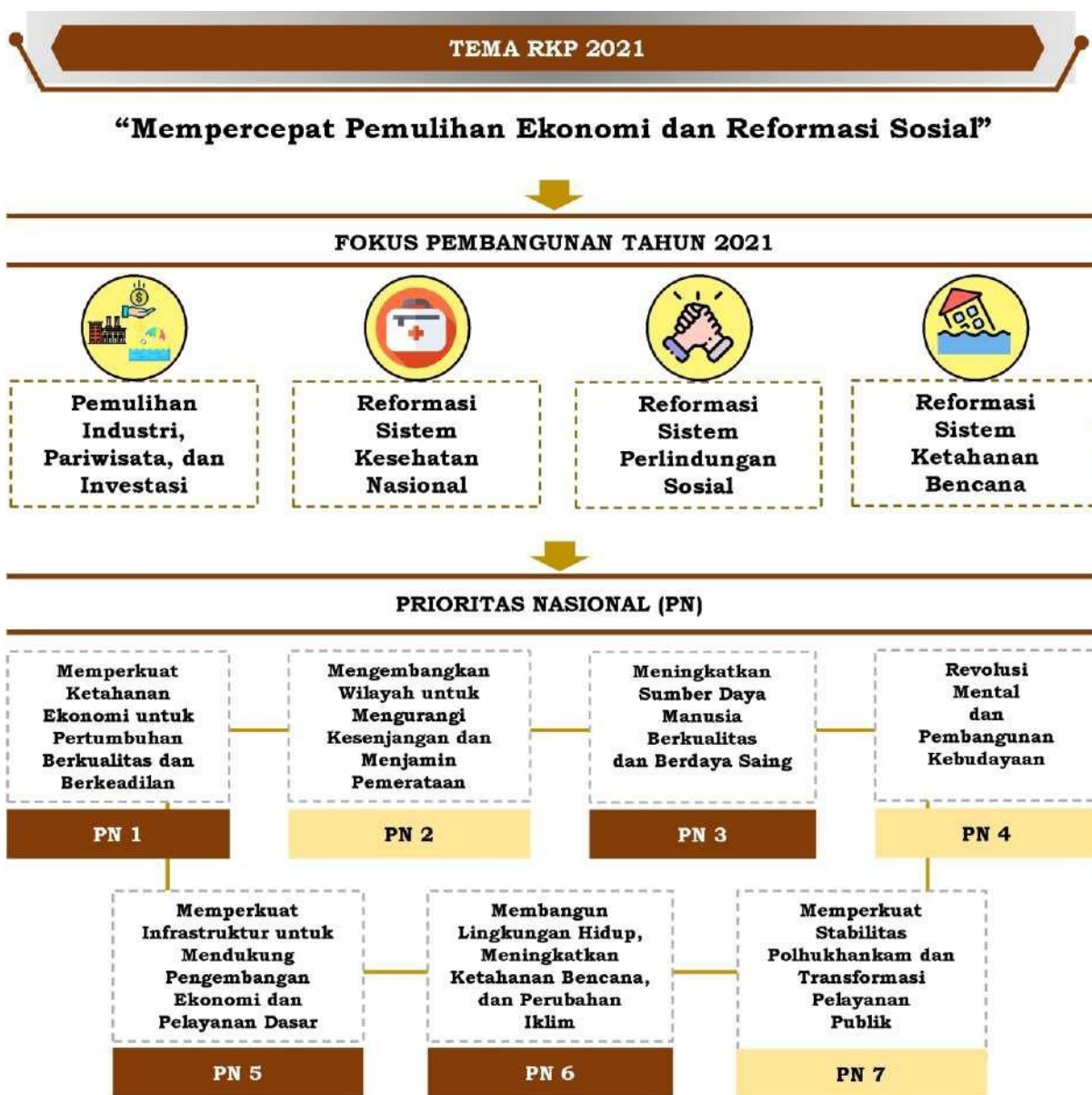
Sumber: Rancangan awal RKP tahun 2021

4.2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) seperti Gambar IV.1.

Gambar IV.1

Tema, Fokus, dan Strategi Pembangunan Tahun 2021



Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2021

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2021, terdapat Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang terkait langsung dengan fokus pembangunan tahun 2021 antara lain Industri 4.0 di lima Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi; (2) Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika,

Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai; (3) Sembilan Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; (5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (6) Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; (7) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh; (8) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana (Gambar IV.2).

Gambar IV.2

Major Project (MP) yang Terkait Langsung dengan Fokus Pembangunan Tahun 2021



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Keterangan: *) Major project baru yang diusulkan pada tahun 2021

4.2.1.3. Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang- Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang- Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan

menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, PN5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

4.2.1.4. Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif tinggi dan mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah, memantapkan perannya sebagai hub dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur, serta peran sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Wilayah Sulawesi merupakan penghasil utama komoditas perikanan tangkap dan budidaya; pertanian tanaman pangan padi dan jagung; perkebunan kakao, kopi, kelapa sawit, dan kelapa; peternakan sapi; hasil hutan berupa rotan; serta pertambangan aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi. Di samping itu, Wilayah Sulawesi juga memiliki keunggulan pariwisata bahari Bunaken dan Wakatobi serta pariwisata alam dan budaya Tanah Toraja.

Pada tahun 2021 strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi Wilayah Sulawesi akan dilakukan dengan enam langkah. Pertama, mengoptimalkan peran kawasan-kawasan strategis baik KEK maupun KI sebagai pusat

industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah, yaitu KEK/KI Palu dan KEK Bitung. Kedua, meningkatkan investasi di kawasan-kawasan pariwisata unggulan yaitu DPP Manado – Likupang/KEK Likupang dan DPP Wakatobi. Ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah, baik infrastruktur darat yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, maupun infrastruktur pelabuhan dan udara yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Sulawesi dengan wilayah lain. Keempat, meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan pendukung sektor industri dan pariwisata di Wilayah Sulawesi, termasuk di WM Makassar sebagai pusat pelayanan aglomerasi wilayah, dengan fokus pada penyediaan transportasi massal, drainase perkotaan, akses pada energi, perumahan, air minum, sanitasi dan pengelolaan persampahan yang aman, serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah urban sprawl. Kelima, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sulawesi. Keenam, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.

Sementara itu strategi pemerataan akan dilakukan dengan lima langkah. Pertama, pemerataan pelayanan dasar dengan fokus pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman. Kedua, meningkatkan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar. Ketiga, memantapkan keterkaitan antara jaringan transportasi utama Trans Sulawesi dan jaringan pengumpan (feeder) ke kawasan-kawasan perdesaan dan kota-kota kecil. Keempat, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. Kelima, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah) dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

Wilayah Sulawesi mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, likuifaksi, tsunami, tanah longsor, banjir dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, pada tahun 2021 upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, serta peningkatan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah dan daerah lainnya di Wilayah Sulawesi akan terus dilanjutkan dan diperkuat.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2021 adalah (1) mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) memperluas kesempatan kerja. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19, serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Adapun target pembangunan wilayah Sulawesi sesuai dengan Rancangan RKP 2021 sebagai mana pada table IV.5 berikut ini.

Tabel IV. 5

Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2021

Indikator	Target Tahun 2021					
	Sulut	Sulteng	Sulsel	Sulteng	Gorontalo	Sulbar
Pertumbuhan Ekonomi (%)*	5,6-6,1	4,2-7,4	6,0-7,2	4,5-7,1	5,6-6,8	4,4-6,2
Tingkat Kemiskinan (%)	7,3	12,7	8,2	11,5	14,1	10,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,6	4,9	7,4	5,3	5,5	4,9

Sumber: Rancangan Awal RKP 2021

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Prioritas tahun 2021 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2021 yaitu: **Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial didukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
4. Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial
5. Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada table IV.6 berikut:

**Tabel IV. 6
Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2021**

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN PEMBANGUNAN 2021	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET 2021
1	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	IPM (Nilai/Angka)	72,22
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,47
			Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,72
			Umur Harapan Hidup (Tahun)	70,54
		Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan daya saing daerah	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (% Periode Agustus)	47,52
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,62
IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	77,07			
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Berkembangnya komoditas unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%: ADHK)	5,72
			PDRB Kawasan (luwu Utara, Selayar, Bone) (Rp. ADHK)	36.946.200
		Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	Gini Ratio (Periode: September)	0,414
			Indeks Williamson	0,61
		Berkembangnya Pembangunan Desa	Rata-Rata Nilai Indeks Pembangunan Desa	64,9
3	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	65
			Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, dan Pengadaan Air (% / ADHK)	5,92
			Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1
4	Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial	Meningkatnya kinerja ekonomi makro.	PDRB Perkapita AHB (RP)	65,76
			Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%) (September)
		Tingkat Pengangguran Terbuka TPT (%) (Periode Agustus)		7,2
		Membbaiknya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi (%)	3
		Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	4,41
			Proporsi rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	47,21
		Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam	Produktifitas Total daerah	83.797.510

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN PEMBANGUNAN 2021	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET 2021
5	Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	77,78
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	1,7
		Meningkatnya nilai tambah Produk unggulan daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	14,48
Pertumbuhan nilai ekspor (%)	6,1			
6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Nilai SAKIP	BB (75,00)
			Indeks Reformasi Birokrasi	BB (76,00)
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	B (85,00)

Prioritas Pembangunan Tahun 2021 di atas dimaksudkan sebagai fokus pembangunan tahun 2021 untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah tahun 2021 sebagai mana yang telah di bahas pada II (kedua), untuk melihat sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan tahun 2021, sebagai mana tabel IV.7 sebagai berikut:

Tabel IV. 7

Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2021

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN 2021	INDIKATOR PEMBANGUNAN
1 Belum berkualitasnya SDM dan daya saing pendidikan	1 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)	1 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	IPM (Nilai/Angka)
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
				Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)
				Umur Harapan Hidup (Tahun)
2 Belum optimalnya nilai tambah komoditas unggulan daerah (Nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan)	2 Dukungan Pemerintah Pusat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Selatan	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Berkembangnya komoditas unggulan Daerah	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (% Periode Agustus)
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3 Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah	2 Dukungan Pemerintah Pusat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Selatan	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
				Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%: ADHK)
				PDRB Kawasan (luwu Utara, Selayar, Bone) (Rp. ADHK)
3 Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah	2 Dukungan Pemerintah Pusat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Selatan	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Berkembangnya Pembangunan	Gini Ratio (Periode: September)
				Indeks Williamson
				Rata-Rata Nilai Indeks Pembangunan Desa

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN PEMBANGUNAN 2021	INDIKATOR PEMBANGUNAN
						Desa	
4	Belum meratanya kualitas Infrastruktur wilayah			3	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, dan Pengadaan Air (% / ADHK)
5	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi					Meningkatnya kinerja ekonomi makro.	Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB Perkapita ADHB (RP)
6	Meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja					Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka TPT (%) (Periode Agustus)
7	Masih Tingginya Jumlah Penduduk miskin	3	Dampak Pandemi Covid-19	4	Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial	Membbaiknya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi (%)
						Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial Proporsi rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)
8	Belum Optimalnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah					Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam	Produktifitas Total daerah
9	Belum memadainya Pelestarian Lingkungan Hidup	4	Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)	5	Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	IKLH Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)
						Meningkatnya nilai tambah Produk unggulan daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) Pertumbuhan nilai ekspor (%)
10	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	5	Pencapaian Standar Pelayanan Minimum	6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Nilai SAKIP Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik

Perioritas Pembangunan 2021 yang merupakan penjabaran dari Visi/Misi dan arah kebijakan RPJMD 2018-2023 sebagai mana pada tabel IV. 8 yang menggambarkan arah kebijakan RPJMD terhadap Prioritas Pembanguann tahun 2021 sebagaiberikut.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Tabel IV. 8

Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Misi RPJMD untuk Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		Misi RPJM	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021	CAPAIAN 2019	TARGET 2021
1	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter (4)	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	IPM (Nilai/Angka)	71,66	72,22
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,26	8,47
				Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,36	13,72
				Umur Harapan Hidup (Tahun)	70,43	70,54
			Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan daya saing daerah	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (% Periode Agustus)	45,81	47,52
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,09	93,62
IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,01	77,07				
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif (3)	Berkembangnya komoditas unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (% / ADHK)	2,80	5,72
				PDRB Kawasan (luwu Utara, Selayar, Bone) (Rp. ADHK)	34.013.980,00	36.946.200,00
			Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	Gini Ratio (Periode: September)	0,391	0,414
				Indeks Willoamson	0,63	0,61
			Berkembangnya Pembangunan Desa	Rata-Rata Nilai Indeks Pembangunan Desa/ % Desa Mandiri	63,57 (2018)	64,90
3	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel (2)	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	63,07	65,00
				Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, dan Pengadaan Air (% / ADHK)	7,18	5,92
4	Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif (3)	Meningkatnya kinerja ekonomi makro.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,92	6,10
				PDRB Perkapita AHB (RP)	57,03	65,76
			Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	8,56	9,10
				Tingkat Pengangguran Terbuka TPT (%) (Periode Agustus)	4,97	7,20
			Membaihnya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi (%)	2,35	3,00
			Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	3,40	4,41

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		Misi RPJM	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021	CAPAIAN 2019	TARGET 2021
			penduduk	Proporsi rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	45,68	47,21
			Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam	Produktifitas Total daerah	82.027.871	83.797.510
5	Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sumber daya Alam yang Berkelanjutan (5)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	75,5	77,78
			Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	0,86	1,70
			Meningkatnya nilai tambah Produk unggulan daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	13,56	14,48
				Pertumbuhan nilai ekspor (%)	4,23	6,10
6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif (1)	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Nilai SAKIP	2018: 64,26, 2019: B (65,06)	BB (75,00)
				Indeks Reformasi Birokrasi	CC*	BB (76,00)
				Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	B	B (85,00)

Adapun Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2021 terhadap prioritas pembangunan tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada table IV.9. berikut.

**Tabel IV. 9
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2021**

No	Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2021
1	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing	Pemenuhan akses dan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia serta meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat;
		Peningkatan kapasitas, keterampilan, dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan;
		Peningkatan akses dan peran pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
		Memperkuat system perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Meningkatkan konektivitas antarwilayah dari pusat kegiatan menuju pusat pertumbuhan lainnya;
		Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan;

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

No	Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2021
3	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air;
4	Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial	Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan
		Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis SDA serta pengembangan industry;
5	Pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim	Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik	Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah;
		Pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar

Penetapan sasaran pembangunan dari prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 merupakan upaya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah tahun 2021, seperti yang disajikan pada Tabel IV.10 sebagai berikut.

Tabel IV. 10
Target Kinerja Utama Daerah Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target RKPD Tahun 2021
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	1 Indeks Reformasi Birokrasi	BB (75,00)
	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	2 Nilai SAKIP	BB (76,00)
	2 Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	B (85,00)
2	Meningkatkan infrastruktur wilayah	4 Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air (%)	5,92
	3 Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	5 Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	65
3	Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah	6 PDRB Perkapita (Juta Rp)	65,76
		7 Angka Kemiskinan (%)	9,1
	4 Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	8 PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone) (Juta RP)	36.946.200
		9 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,2
	5 Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	10 Indeks Gini	0,414
11 Indeks Williamson		0,61	
4	Meningkatkankualitas SDM secara inklusif	12 IPM	72,22
	6 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	13 Indeks Pendidikan	67,02
	7 Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	14 IPG	93,62
		15 IDG	77,07

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target RKPD Tahun 2021
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	16 Indeks Kesehatan	77,31
5	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	17 Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1
	Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam	18 Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)	83.797.510
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	19 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,78
		20 Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	1,7

4.2.3 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 dan mendukung prioritas nasional tahun 2021 yang merupakan tahun awal dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional tahun 2021 dijabarkan pada Tabel IV.11

Tabel IV. 11

Keselarasan Target Makro Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN PEMBANGUNAN 2021	INDIKATOR PEMBANGUNAN	CAPAIAN 2019	TARGET 2021			
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	1	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	IPM (Nilai/Angka)	71,66	72,22			
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,26	8,47			
				Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,36	13,72			
				Umur Harapan Hidup (Tahun)	70,43	70,54			
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)	1	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan daya saing daerah	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (% Periode Agustus)	45,81	47,52			
				Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,09	93,62		
	1				IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,01	77,07		
				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Berkembangnya komoditas unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (% / ADHK)	2,8
PDRB Kawasan (luwu Utara, Selayar, Bone) (Rp. ADHK)	34.013.980,00	36.946.200							
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	2						Gini Ratio (Periode: September)	0,391	0,414
							Indeks Willoamson	0,63	0,61
	2			Berkembangnya Pembangunan Desa	63,57 (2018)	64,9			
				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	3	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi	Meningkatnya Pembangunan	Indeks Aksesibilitas Infrastuktur	63,07

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN PEMBANGUNAN 2021	INDIKATOR PEMBANGUNAN	CAPAIAN 2019	TARGET 2021
Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)		pertumbuhan	Infrastruktur	Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, dan Pengadaan Air (% / ADHK)	7,18	5,92
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	4	Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial	Meningkatnya kinerja ekonomi makro.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,92	6,1
				PDRB Perkapita AHB (RP)	57,03	65,76
			Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	8,56	9,1
				Tingkat Pengangguran Terbuka TPT (%) (Periode Agustus)	4,97	7,2
			Membaihnya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi (%)	2,35	3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)			Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	3,40	4,41
				Proporsi rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	45,68	47,21
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)			Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam	Produktifitas Total daerah	82.027.871,00	83.797.510
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)	5	Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	75,5	77,78
			Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	0,86	1,7
			Meningkatnya nilai tambah Produk	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	13,56	14,48

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN PEMBANGUNAN 2021	INDIKATOR PEMBANGUNAN	CAPAIAN 2019	TARGET 2021
			unggulan daerah	Pertumbuhan nilai ekspor (%)	4,21	6,1
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Nilai SAKIP	B	BB (76,00)
				Indeks Reformasi Birokrasi	CC*	BB (75,00)
				Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	B	B (85,00)

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan nasional yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam. Sehubungan dengan hal tersebut maka rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka hubungan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 sebagai mana pada tabel berikut.

Tabel IV. 12

Keterkaitan Sasaran pembangunan Nasional terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2021 tahun Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2021
1	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Nilai Budaya Literasi (nilai)
				Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)
			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata lama sekolah
				Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Harapan lama sekolah
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas
				IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan daya saing daerah	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (% Periode Agustus)	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)			
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Berkembangnya komoditas unggulan Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Pertumbuhan PDB Pertanian (%)
					Pertumbuhan PDB industri pengolahan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2021
		Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	Gini Ratio (Periode: September)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia	Laju pertumbuhan PDRB KTI (persen/tahun)1
		Berkembangnya Pembangunan Desa	Indeks Willoamson		Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi	Perkembangan status pembangunan desa
			Rata-Rata Nilai Indeks Pembangunan Desa/ % Desa Mandiri			Penurunan angka kemiskinan Desa (persen)
3	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)
			Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, dan Pengadaan Air (% / ADHK)		Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)
						Volume tampungan air per kapita (m ³ /kapita)
4	Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial	Meningkatnya kinerja ekonomi makro.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia	Laju pertumbuhan PDRB KTI (persen/tahun)
			PDRB Perkapita AHB (RP)			Persentase penduduk miskin KTI (persen) 3
		Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)			IPM KTI
			Tingkat Pengangguran Terbuka TPT (%) (Periode Agustus)			Penurunan angka kemiskinan Desa (persen)
Membayaknya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi (%)		Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2021
		Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan jaminan sosial (%)
			Proporsi rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)
		Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam	Produktifitas Total daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa Rasio kewirausahaan nasi
5	Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)		Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	Persentase penurunan emisi GRK (%)
		Meningkatnya nilai tambah Produk unggulan daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Kontribusi PDB industri pengolahan Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa Rasio kewirausahaan nasi
			Pertumbuhan nilai ekspor (%)			
6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Nilai SAKIP	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas
			Indeks Reformasi Birokrasi			Persentase Instansi Pemerintah dengan skor B ke atas Atas SAKIP (%)
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik			

Sebagai dukungan terhadap major project nasional tahun 2021, maka provinsi Sulawesi Selatan menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung major project tersebut sebagai mana pada tabel IV.13. berikut.

**Tabel IV. 13
Sinkronisasi Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Major Project Tahun 2021**

Prioritas Nasional	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL/MAJOR PROJECT		Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	1	Industri 4.0 di 5 Sub-Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia, dan Farmasi	Program Kefarmasian, Alat Kesehatan Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
	2	Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
	3	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri(Penataan Dan Pengembangan Kawasan Industri)	Dinas Perindustrian
	4		Program Hilirisasi Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Hilirisasi Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
			Program Hilirisasi Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
			Program Hilirisasi Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	Program Pengembangan Dan Pembinaan Kelompok Ukm Bagi Masyarakat Miskin	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
	6	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	7	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	Program Peningkatan Produksi Kelautan Dan Perikanan(Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi)	Dinas Kelautan dan Perikanan
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	1	Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar	Program Preservasi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Daerah	Badan Penghubung Daerah
			Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Nasional	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL/MAJOR PROJECT		Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
			Program Penyelenggaraan Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran	Dinas Perhubungan
			Program Penyelenggaraan Pentaan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penyelenggaraan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	1	Penguatan Sistem Kesehatan Nasional	Program Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (Bsb)	Dinas Kesehatan
	2	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Program Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (Hpk) (Penyediaan Intervensi Gizi Pada Ibu Hamil Dalam Rangka Penanggulangan Stunting)	Dinas Kesehatan
	3	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasional	Dinas Pendidikan
	4	Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	Program Pengembangan Dan Penataan Fasilitas Umum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	5	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Program Pelayanan Dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak	Dinas Sosial
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)		Mendukung beberapa MP yaitu (1) MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (2) MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, (3) MP Wilayah Adat Papua, dan (4) MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0,	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)	1	Rumah Susun Perkotaan (1 juta		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	2	Akses Air Minum Perpipaan (10 juta sambungan rumah)	Program Penyediaan Air Bersih	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	3	Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga);	Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	4	Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis;	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	5	18 Waduk Multiguna	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Nasional	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL/MAJOR PROJECT	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
		Lainnya	
	6 Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa;	Program Pengawasan, Konservasi, Penataan Dan Rehabilitasi Pesisir Dan Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan
	7 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;	Program Penyelenggaraan Kepelabuhanan Dan Angkutan Pelayaran	Dinas Perhubungan
	8 Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	Program Penyelenggaraan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
	9 Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Program Pengendalian Jalan Akses Wilayah Terisolir	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	10 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Dinas Perhubungan
	11 Kereta Api Makassar-Pare Pare;	Program Perencanaan Dan Fasilitasi Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan
	12 KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (JakartaSemarang dan Jakarta-Bandung);	Program Perencanaan Dan Fasilitasi Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan
	13 Jembatan Udara 37 Rute di Papua	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Dinas Perhubungan
	14 Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar;	Program Perencanaan Dan Fasilitasi Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan
	15 Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 Kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	Program Penyediaan Listrik Dan Ketahanan Energi	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
	16 Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	Program Hilirisasi Pertambangan	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
	17 Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	Program Hilirisasi Pertambangan	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
	18 Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)	Program Hilirisasi Pertambangan	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
	19 Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital.	Program Pengembangan Baruga Layanan Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Membangun Lingkungan Hidup,	1 Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	Program Pengelolaan Persampahan Dan Limbah B3	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Nasional	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL/MAJOR PROJECT		Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)	2	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Program Pencegahan, Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	1	Penguatan NSOC((National Security Operation Center) - SOC(Security Operation Center) dan Pembentukan 121 CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Pengawasan, Konservasi, Penataan Dan Rehabilitasi Pesisir Dan Laut Program pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut.	Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Kelautan dan Perikanan

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun rumusan strategi untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 14
Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah**

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Strategi	Penjelasan Strategi
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatkan Kualitas dan akses pendidikan yang berkeadilan dan merata	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan menengah secara luas melalui:1. Meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan, 2. meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan secara merata, 3. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 4. Peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan 5. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, 6. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan,7. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan .
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara promotif, preventif dan kuratif.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai upaya untuk mengurangi dampak pandemi covid-19, melalui: 1. Meningkatkan SDM kesehatan, serta

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Strategi	Penjelasan Strategi
		<p>meningkatkan keterpenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 3. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, 4. Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, 5. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 6. Mempercepat Penurunan Kematian Ibu dan Penurunan Stunting 7. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan,
Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan daya saing daerah	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.	Meningkatkan pendidikan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas tenaga kerja berpendidikan menengah ke atas berbasis kompetensi dan spesialisasi.
	Mengefektifkan link and match antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industri.	<p>Link and Match sebagai keluaran dari sebuah kebijakan, merupakan konsep keterkaitan antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi upaya mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja; b. Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyesuaian program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyesuaian kurikulum sesuai kebutuhan industri; penyesuaian pola pembelajaran; penguatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Strategi	Penjelasan Strategi
		<p>ganda (dual TVET system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan teaching factory/teaching industry berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/teaching factory/teaching industry; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;</p> <p>c. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri; Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi;</p> <p>d. Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan</p> <p>e. Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian izin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching factory/teaching industry.</p>
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan kualitas dan perlindungan perempuan	Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak dan peningkatan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
Berkembangnya komoditas unggulan Daerah	Meningkatkan Penyediaan sarana dan parasarana sektor pertanian, kehutanan,	Memperkuat dukungan sarana-prasarana pertanian, kehutanan dan perikanan, percepatan pembangunan infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Strategi	Penjelasan Strategi
	dan perikanan	kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut .
Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	Meningkatkan pemenuhan kualitas dan pemerataan akses pelayanan dasar bidang pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur pendukung perekonomian	Meningkatkan pemenuhan kualitas dan pemerataan akses pelayanan dasar bidang pendidikan dasar di desa, meningkatkan pembangunan sarana prasana bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat,
Berkembangnya Pembangunan Desa		Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian, melalui Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian; Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petan
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Meningkatkan Kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir, kepulauan, memperkuat interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan.
Meningkatnya kinerja ekonomi makro.	Memperluas kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan	Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.	Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilaksanakan dengan strategi: a. meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; b. meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; c. meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; d. meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; e. meningkatkan pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha. f. Peningkatan pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan. g. Peningkatan keterampilan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra industri kecil dan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Strategi	Penjelasan Strategi
		<p>menengah (IKM).</p> <p>h. Nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.</p>
Membaiknya stabilitas ekonomi makro	<p>Memperluas akses program pengentasan kemiskinan.</p> <p>Memperkuat koordinasi untuk menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi .</p>	<p>Pemulihan usaha koperasi dan UMKM, melalui (a) pemberian pinjaman modal kerja yang dilakukan melalui channelling dengan lembaga keuangan (Perbankan, PNM, BPR, Pegadaian, PNM, Koperasi, dsb) dan (b) pendampingan pemulihan usaha dan rencana keberlanjutan usaha dalam bidang UMKM;</p> <p>Strategi menjaga stabilitas ekonomi makro dengan menjaga inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi, di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Strategi menjaga inflasi adalah memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat dan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional, memperkuat kelembagaan pertanian, disertai peningkatan kapasitas, pembiayaan, dan pengembangan ekosistem pertanian digital. Memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga sehingga inflasi IHK tetap terjaga dalam kisaran sasarannya 3,0 % pada tahun 2021</p>
Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	<p>Memperluas jangkauan pelayanan sosial dan subsidi yang tepat sasaran</p>	<p>Peningkatan perlindungan social melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pelaksanaan jaminan sosial, mencakup: a) penerapan active Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, b) pengembangan digitalisasi dan integrasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bantuan, c) peningkatan inklusi keuangan melalui literasi bagi penerima manfaat; d) peningkatan peran Pemda kabupaten/kota dalam pendampingan dan penyaluran bantuan; e) pengembangan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan risiko ekonomi dan social. f) penguatan sistem kelembagaan perlindungan sosial yang responsive; 2. Peningkatan kesejahteraan sosial, mencakup: a) pengembangan sistem perawatan jangka panjang (long term care) terintegrasi dan holistik; b) pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah lanjut usia dan penyandang disabilitas; c) penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Strategi	Penjelasan Strategi
		<p>hak lanjut usia dan penyandang disabilitas; d) penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan; f) pemberdayaan kelanjutusiaan bagi lanjut usia; dan g) pengembangan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi lanjut usia.</p> <p>3. Memperkuat ketersediaan dan validitas data melalui pengutan koordinasi dengan pemerintah kab/kota dan mendorong integrasi data kemsikinan untuk memperluas jangkauan dan mempercepat penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama penanganan PMKS, pemberdayaan lembaga masyarakat agar dapat mengoptimalkan peran aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara perorangan maupun Lembaga,</p>
Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam	Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam.	Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat;
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengoptimalkan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup	<p>Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara; (b) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (c) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (d) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (e) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem; serta (f) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. 2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan di Pesisir dan Laut; (b) Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik; (c) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis. 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (b) Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut; 4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Strategi	Penjelasan Strategi
		Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (b) Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon	<p>Penanganan perubahan iklim dilakukan melalui upaya mengembangkan strategi adaptasi dan mitigasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan: (a) Pengelolaan energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta (b) Efisiensi dan konservasi energi. 2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan pengelolaan lahan gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan laju deforestasi; serta (d) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian 3. Penanganan Limbah yang dilaksanakan dengan (a) Pengurangan sampah domestik; dan (b) Pengelolaan limbah cair. 4. Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan dengan (a) Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri; (b) Penerapan modifikasi proses dan teknologi; serta (c) Manajemen limbah industri. 5. Rendah Karbon Pesisir dan Laut yang dilaksanakan dengan pelaksanaan Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan (mangrove, padang lamun, terumbu karang, estuari, dan hutan pantai).
Meningkatnya nilai tambah Produk unggulan daerah	Meningkatkan nilai tambah produk komunikasi unggulan daerah	<p>Meningkatkan nilai tambah produk komunikasi unggulan daerah melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, yang terintegrasi hulu-hilir; 2. Akselerasi industrialisasi berbasis pertanian difokuskan pada industri pengolahan hulu, dan industri pengolahan yang memiliki kontribusi nilai tambah dan daya saing yang tinggi, industri pengolahan perikanan, peningkatan nilai tambah juga dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas industri pengolahan pengalengan produk perikanan dan penguatan brand dari. Industrialisasi dilaksanakan melalui (1) peningkatan produktivitas; (2) penguatan rantai pasok/nilai melalui harmonisasi kebijakan yang mempengaruhi efisiensi alur input-proses-output-distribusi, dan pengembangan pemasok; (3) diversifikasi dan peningkatan kualitas produk industri

Sasaran Pembangunan Tahun 2021	Strategi	Penjelasan Strategi
		hulu, antara dan hilir untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi; (4) penguatan jasa industri; (5) penguatan circular economy sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah;
Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Meningkatkan kapasitas dan keunggulan SDM aparatur	Meningkatkan kapasitas dan keunggulan SDM aparatur serta memantapkan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsive
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintah melalui: (1) ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral; (2) Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan; (3) Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh; serta (4) Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang berintegritas.

Adapun Arah kebijakan yang merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Disamping itu arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Adapun arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 15
Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021**

Sasaran Pembangunan 2021	Arah Kebijakan	Penjelas Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Peningkatan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.	Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; peningkatan literasi masyarakat;

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Sasaran Pembangunan 2021	Arah Kebijakan	Penjelas Arah Kebijakan
	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;	Pemenuhan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya promotif dan preventif, pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, dan SDM kesehatan, serta keterpenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan
Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan daya saing daerah	Peningkatan produktivitas, keterampilan tenaga kerja dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program link and match dengan lapangan usaha, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam Pembangunan.	Penguatan peran perempuan dan system perlindungan dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dengan mengoptimalkan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
Berkembangnya komoditas unggulan Daerah	Peningkatan produk unggulan daerah yang berdaya saing pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan perdesaan khususnya melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan.
Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur pendukung perekonomian	Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur pendukung perekonomian, peningkatan pemulihan pariwisata dengan meningkatkan konektivitas dan event, memperluas pemasaran, serta meningkatkan daya dukung dan diversifikasi destinasi pariwisata
Berkembangnya Pembangunan Desa	Peningkatan kapasitas Pemerintahan dan pembangunan desa terpadu	Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar perdesaan, melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi anggaran pembangunan desa dari berbagai sumber
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan Kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah, meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air, dan meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik lingkungan mikro, baik di daerah perdesaan terpencil

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Sasaran Pembangunan 2021	Arah Kebijakan	Penjelas Arah Kebijakan
		maupun pulau-pulau kecil terpencil;
Meningkatnya kinerja ekonomi makro	Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah berbasis komoditas unggulan wilayah	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan industry yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja serta memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya kelautan dan jasa kemaritiman.
Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan	Peningkatan ketahanan ekonomi, Pembukaan lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya, Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan friendly bagi investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum, Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan ketenagakerjaan. Penguatan dilakukan dengan mengamankan pasar dalam negeri dari gangguan impor, memperluas pasar dan pusat distribusi, kepatuhan peredaran barang, serta memberikan peluang sebesar-besarnya bagi wirausaha nasional dalam memasok kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor, termasuk promosi penggunaan produk dalam negeri.
Membaiknya stabilitas ekonomi makro	Jaminan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga pasar	Penguatan dilakukan dengan mengamankan pasar dalam negeri dari gangguan impor, memperluas pasar dan pusat distribusi, kepatuhan peredaran barang, serta memberikan peluang sebesar-besarnya bagi wirausaha nasional dalam memasok kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor
Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Pemenuhan perlindungan dan perluasan jangkauan pelayanan sosial yang tepat sasaran	Jaminan sosial merupakan bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tunjangan pendapatan (income support) dan/atau penanggung biaya ketika sakit, kecelakaan saat bekerja, kelahiran, usia lanjut, serta kematian. Terdapat dua komponen pendekatan yang diperlukan untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang efektif, yakni pendekatan sistem serta pendekatan multisektor. Pendekatan sistem membangun dan memperkuat struktur dan mekanisme yang memfasilitasi integrasi jaringan intervensi kebijakan untuk menangani berbagai macam kerentanan. Pendekatan multisektor mengidentifikasi dan memaksimalkan hubungan antara

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Sasaran Pembangunan 2021	Arah Kebijakan	Penjelas Arah Kebijakan
		<p>perlindungan sosial dengan luaran sektoralnya, seperti pendidikan, kesehatan, nutrisi, air dan sanitasi, dan lain sebagainya. Perlindungan sosial terintegrasi berisi kebijakan perlindungan sosial yang dirangkai secara lebih komprehensif. Beberapa bentuk dari perlindungan sosial yang terintegrasi diantaranya implementasi sistem pelayanan satu pintu (single window services), konvergensi program perlindungan sosial, hingga sistem rujukan dan pelayanan terpadu.</p> <p>Kerjasama dengan pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota perlu dilakukan agar pemerintah tingkat daerah dapat mengimplementasikan program nasional di daerahnya dengan baik. Setidaknya terdapat tiga hal yang ingin dicapai dari implementasi sistem perlindungan sosial yang terintegrasi pertama, meningkatnya efektivitas dan orientasi konsumen dari program melalui pengurangan penghalang akses terhadap layanan perlindungan sosial; kedua, membaiknya efisiensi pemerintah melalui penyelesaian masalah fragmentasi program; dan ketiga lancarnya proses graduasi penduduk penerima manfaat program perlindungan sosial serta meningkatnya partisipasi penduduk yang telah keluar dari kemiskinan dan kerentanan dalam pasar tenaga kerja</p>
Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam	Peningkatan produktivitas perekonomian daerah dan pengembangan industri.	Pemulihan usaha koperasi dan UMKM, melalui (a) pemberian pinjaman modal kerja yang dilakukan melalui channelling dengan lembaga keuangan (Perbankan, PNM, BPR, Pegadaian, PNM, Koperasi, dsb) dan (b) pendampingan pemulihan usaha dan rencana keberlanjutan usaha dalam bidang UMKM;
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan upaya pencegahan, pelestarian, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Sasaran Pembangunan 2021	Arah Kebijakan	Penjelas Arah Kebijakan
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang energi, lahan, limbah, dan industri	<p>Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon. Penerapan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak, baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan.</p> <p>Komitmen untuk menerapkan pembangunan rendah karbon perlu diperkuat bukan hanya untuk membentuk motivasi melainkan juga untuk memperkuat modal dan kapasitas para pihak</p> <p>Kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan beserta dampaknya terhadap lingkungan secara lebih efisien. Hal ini akan memungkinkan intervensi pembangunan rendah karbon dapat terlaksana dengan biaya, koordinasi, waktu yang lebih sedikit.</p> <p>Inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan harus terus dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi usaha ramah lingkungan.</p>
Meningkatnya nilai tambah Produk unggulan daerah	1). Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. 2).Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM,	<p>Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran salah satu program nyata melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja. Fokus pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM khususnya industri skala kecil dan menengah, (iii) membangun rantai nilai dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui hilirisasi sumber daya alam berbasis sentra IKM.</p>

Sasaran Pembangunan 2021	Arah Kebijakan	Penjelas Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif.	1) Penguatan implementasi manajemen ASN melalui peningkatan profesionalitas ASN. 2. Penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan dan proses bisnis instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi. 3. Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan 4. Perluasan penerapan inovasi pelayanan publik

Prioritas, arah kebijakan, strategi, Arah kebijakan, dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan Tahun 2021 yang meliputi antara lain:

Tabel IV. 16

Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Indikator Makro Pembangunan		Realisasi 2019	Target RKPD Tahun 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,92	6,1
2	PDRB per kapita (ADHK)	37,35	40,72
3	PDRB per kapita (ADHB)	57,03	65,76
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Penganggur	4,97	7,20
5	Tingkat Kemiskinan :		
	- Persentase Penduduk Miskin	8,56	9,1
	- Jumlah Penduduk Miskin	759.580	819.169
	- Jumlah Penduduk	8.851.240	9.001.863
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,66	72,22
7	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,43	70,54
8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,26	8,47
9	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,36	13,72
10	Pengeluaran Perkapita	11118	10992
11	Indeks Gini	0,391	0,414
12	Indeks Williamson	0,63	0,61
13	Tingkat Inflasi (%)	2,35	3

4.4. Program Prioritas Pembangunan

Dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2021, dirumuskan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari 6 prioritas pembangunan, sebagai mana table berikut:

Tabel IV. 17
Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1		2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah (Prioritas)	% Tamatan SMA/SMK/SLB yang lulus Perguruan Tinggi Negeri yang bereputasi (Prioritas)	48.25 %	892.276.999,78	Dinas Pendidikan
			Program Pendidikan Siswa Kebutuhan Khusus (Prioritas)	% Jumlah warga negara usia 4 s.d 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	82 %	185.067.821,78	Dinas Pendidikan
			Program Pendidikan Karakter Dan Sekolah Sehat (Prioritas)	% Sekolah yang menerapkan budaya sehat dan Faham Radikalisme	52 %	3.211.939.732,07	Dinas Pendidikan
				% SMA/SMK yang bebas Narkoba (Prioritas)	92 %		
				% Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	54.25 %		
			Program Peningkatan Dan Pemerataan Mutu Dan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	% Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99.48 %	30.308.001.772,74	Dinas Pendidikan
				% Guru SMK yang bersertifikat	43.16 %		
				% Jumlah Sekolah yang terpenuhi daftar kebutuhan guru per mata pelajaran dan Standar Tenaga Kependidikan	1.13 %		
				% Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98.39 %		
						% Guru SMA yang bersertifikat	53.89 %

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Program Peningkatan Partisipasi Pendidikan Menengah Dan Khusus (Prioritas)	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Prioritas)	89.25	546.775.081.644,16	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Murni (APM) (Prioritas)	63.95		
			% Jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	75.68 %		
		Program Pembangunan Rumah Sakit Regional (Prioritas)	Jumlah RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan (Prioritas)	6 Unit	130.471.937.258,00	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Prioritas)	% Puskesmas yang Menyelenggarakan Program Kesehatan Tradisional	40 %	2.272.390.000,00	Dinas Kesehatan
			% RS yang Terakreditasi Nasional	80 %		
			% Puskesmas Terakreditasi	80 %		
			% Puskesmas yang menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Penunjang	70 %		
			% RS Kabupaten/Kota yang Telah Menjadi BLU	85 %		
			Jumlah klinik rest area yang berfungsi (Prioritas)	4 Klinik		
		Program Pengembangan Spesialisasi Dan Kualitas Layanan Rumah Sakit (Prioritas)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi. (Prioritas)	6 Unit	653.669.842,0	Dinas Kesehatan
			Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	1 RS	350.000.000,0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
			Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan	1 RS	825.000.000,0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			spesialisasi			
			Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	1 RS	360.000.000,0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
			Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	1 RS	207.882.978,70	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
		Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Prioritas)	Cakupan pasien yang memperoleh transfusi darah	100 %	9.457.778.825,61	UPT Transfusi Darah
			Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan	100 %	600.000.000,0	UPT RSK Gigi dan Mulut
			Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan	90 %	430.000.000,0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
			Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	90 %	1.465.375.000,0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
			Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	100 %	100.000.000,0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
			Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	100 %	411.824.468,05	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
			Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	100 %	100.000.000,0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
			Program Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (Hpk) (Prioritas)	% Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Prioritas)	12 %	5.692.101.020,0
		% Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Prioritas)		6.5 %		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Program Promosi Kesehatan, Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak (Prioritas)	Prevalensi Balita Kurus (Wasting)	8.25 %	2.657.684.500,0	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (Underweight)	20.3 %		
			Prevalensi Balita Stunting (Prioritas)	33 %		
			Jumlah Kematian Ibu	112 Kasus		
			% Kabupaten Kota yang memiliki kebijakan PHBS	45 %		
			Jumlah Kematian Bayi	1057 Kasus		
			% Lansia Usia ≥ 60 Tahun yang mendapat pelayanan Santun Lansia	65 %		
			% Posyandu Aktif	61 %		
	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan daya saing daerah	Program Perluasan Dan Pengembangan Tenaga Kerja (Prioritas)	% Pencari kerja yang ditempatkan	3.91 %	1.738.500.000,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Rasio daya serap tenaga kerja (Prioritas)	58.78 %		
		Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasional (Prioritas)	Jumlah peserta didik yang menerima pembiayaan gratis pendidikan life skill/kejuruan	200 Orang	541.950.925,46	Dinas Pendidikan
			% Tamatan SMK yang bekerja 3 bulan setelah tamat (Prioritas)	46.75 %		
		Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	71.4 %	2.299.650.000,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80 %		
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan	Program Perlindungan Perempuan Dan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Prioritas)	30.9 %	931.360.000,0

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	
	Perempuan	Anak (Prioritas)				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak	% Kabupaten/Kota Layak Anak Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000)	58 % 2.92	899.184.580,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	% Lembaga layanan Perlindungan Perempuan sesuai standar	50 %	554.859.485,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Berkembangnya komoditas unggulan Daerah	Program Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Ternak (Prioritas)	Jumlah Populasi ternak kecil Jumlah Populasi ternak sapi perah (Prioritas) Jumlah Populasi ternak unggas Jumlah Populasi ternak kuda (Prioritas) Jumlah Populasi ternak kerbau (Prioritas) Jumlah produksi telur (Prioritas) Jumlah Populasi sapi potong (Prioritas) Jumlah produksi daging (Prioritas) Jumlah produksi susu (Prioritas)	1.828.228 Ekor 1.434 Ekor 141.334.762 Ekor 191.527 Ekor 127.387 Ekor 179.260.404 Kg 1.404.487 Ekor 140.872.302 Kg 3.504.851 Kg	19.488.720.000,0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian	Cakupan ketersediaan jaringan irigasi Cakupan ketersediaan alat dan mesin pertanian	20.000 Ha 412 Unit	51.737.985.999,50	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
	Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	Program Penataan Hutan Dan Pemanfaatan Hutan (Prioritas)	% Luas kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (Prioritas)	64.67 %	3.405.000.000,0	Dinas Kehutanan
			Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	283 Ton		
			Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan	92.336,62 M3		
		Program Peningkatan Produksi Kelautan Dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap	380.743 Ton	2.598.000.000,0	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	5.559.907 Ton		
			Jumlah produksi garam rakyat	100.522,3 Ton		
		Program Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya (Prioritas)	% Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (SPM)	69.47 %	255.556.510.793,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Jumlah tambahan luas lahan yang terlayani sistem pengairan irigasi (Prioritas)	15.014,3 Ha		
		Program Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	100 %	800.000.000,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal (Prioritas)	Jumlah Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal (Prioritas)	2 Kab/Kota	316.014.072,12	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
Program Pengembangan Destinasi	Jumlah destinasi yang didukung/difasilitasi menjadi destinasi wisata unggulan	2 Destinasi Wisata	5.440.760.946,0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Pariwisata				
		Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	% Panjang ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi	100 %	224.861.482.285,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Prioritas)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	300.000 WNA	4.954.375.430,49	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
			Jumlah kunjungan wisatawan lokal	7500.000 WNI		
			Peningkatan jumlah produk usaha ekonomi kreatif (Prioritas)	2 Jenis		
			Lama Kunjungan Wisata	5 Hari		
		Jumlah pengguna rest area sebagai spot wisata alternatif (Prioritas)	1.000 Orang			
		Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM)	100 %	800.000.000,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Dan Penataan Fasilitas Umum (Prioritas)	Jumlah fasilitas rest area yang terbangun (Prioritas)	2 Lokasi	64.355.000.000,0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Jumlah Fasilitas Pendukung Kawasan Pariwisata	0 lokasi		
		Program Pengembangan Dan Pembinaan Kelompok Ukm Bagi Masyarakat Miskin (Prioritas)	% Pertumbuhan UKM Bagi Masyarakat Sangat Miskin Dan Miskin (Prioritas)	20 %	5.732.900.000,0	
	Berkembangnya Pembangunan	Program Peningkatan	Jumlah aparat desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	660 Aparat Desa	3.474.954.357,90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
	Desa	Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah desa berstatus swasembada	2 Desa Swasembada		
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	% Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LSM yang aktif)	0.3 %	1.386.548.500,0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			% Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LPM Berprestasi)	6.25 %		
			% Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	1 %		
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDES yang difasilitasi	180 BUMDES	1.219.458.183,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningatan jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	5 %	1.000.111.095,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya	60 RTM		
		Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	96.5 %	3.468.419.457,0	Dinas Kesehatan
			% Orang dengan HIV (ODHA) Mendapatkan Pengobatan	70 %		
			Angka Penemuan/Kejadian Malaria per 1.000 Penduduk (API)	1 /1000 Penduduk (<)		
			Angka Kejadian Tuberkulosis/100.000 Penduduk (Case Notification Rate)	202 /100000 Penduduk		
			Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24	100 %		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	
			Jam				
			% Kab/Kota yang minimal 20% Puskesmasnya melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA	90 %			
			% Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu	60 %			
		Program Penyediaan Air Bersih (Prioritas)	Jumlah RT pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih (Prioritas)	1750 RT	12.560.000.000,0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
			Cakupan Pembinaan Penanganan Air Minum Kab/Kota	24 Kab/Kota			
		Program Penyediaan Listrik Dan Ketahanan Energi (Prioritas)	% Desa Berlistrik (Prioritas)	99 %	8.138.476.329,17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			% Rumah Tangga Pengguna Listrik	98 %			
			Jumlah Kapasitas Bio Energi yang terbangun	1244 M3			
3	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Program Preservasi Jalan (Prioritas)	% Tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (mantap) (SPM)	65.43 %	316.319.776.635,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penyelenggaraan Kepelabuhanan Dan Angkutan Pelayaran (Prioritas)	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	1028 Orang	11.509.441.115,54	Dinas Perhubungan
				Jumlah pelabuhan strategis provinsi	11 Lokasi		
				Jumlah pelabuhan yang beroperasi	35 Lokasi		
			Program Penyelenggaraan Angkutan Jalan	% Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	50 %	3.783.470.212,28	Dinas Perhubungan
				% Layanan Angkutan Darat	54 %		
				Jumlah Terminal Bis Terkelola	10 Lokasi		
				Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	365000 Orang		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	
4	Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial	Meningkatnya kinerja ekonomi makro.	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Prioritas)	Jumlah Kawasan yang difasilitasi perencanaan dan pengembangannya (Prioritas)	3 Kawasan	356.227.346,97	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah produksi kedelai dan palawija	17087 Ton	7.600.000.000,0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Jumlah produksi padi	6645775 Ton		
				Produktivitas padi	51 Kw/Ha		
				Produktivitas jagung	57 Kw/Ha		
				Produktivitas kedelai dan palawija	14 Kw/Ha		
			Program Peningkatan Produksi Dan Mutu Produk Hortikultura	Jumlah produksi jagung	2688281 Ton	5.800.000.000,0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Jumlah produksi tanaman hortikultura	23264 Ton		
				Produktivitas tanaman hortikultura	58 Kw/Ha		
			Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri (Prioritas)	Jumlah bibit Hortikultura bersertifikat yang siap diperbanyak pada IKB	10000 Pohon	7.600.000.000,0	Dinas Perindustrian
		Jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukannya		2 Sentra			
		Jumlah kawasan pergudangan yang tertata		2 Kawasan			
		Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Program Bantuan Pendidikan Sma/Smk/Slb Bagi Siswa Miskin (Prioritas)	% Peningkatan produksi industri potensial (Prioritas)	10 %	120.000.000,0	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan	Cakupan siswa SMA/SMK/SLB miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan (Prioritas)			59.8 %			
		Program Pengembangan	Cakupan promosi produk UMKM pada Rest Area (Prioritas)	10 Produk	900.000.000,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Usaha Dan Promosi Produk Umkm (Prioritas)				
		Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif Dan Pengembangan Produk Pemasaran Bagi Koperasi Dan Umkm	Jumlah KUMKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana	10 Unit	300.000.000,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah produk baru yang terfasilitasi perizinan	5 Produk		
		Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	100 %	466.907.030,0	Dinas Kesehatan
			Cakupan Kepesertaan Kemitraan Asuransi Kesehatan Menuju Universal Coverage	100 %		
		Program Penyediaan Dan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin Dan Mbr (Prioritas)	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (SPM)	2.25 %	3.000.000.000,0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (SPM)	5 %		
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Komunitas Adat Terpencil (Kat)	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil (KAT) yang mendapatkan pengembangan kemampuan dan potensi	800 Jiwa	11.734.601.334,89	Dinas Sosial
			% PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0.7 %		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			% PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1.1 %		
	Membaiknya stabilitas ekonomi makro	Program Pengembangan Perekonomian Dan Pembinaan Kelembagaan Ekonomi	Peningkatan Jumlah Lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing	8 Lembaga	3.277.752.622,75	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan kelompok pedagang/usaha informal yang dibina	1.08 %	489.824.268,0	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Total Ekspor	1466745667 Rp (Milyar)	6.330.903.152,0	Dinas Perdagangan
			Nilai ekspor bersih perdagangan (Prioritas)	146674567 Juta \$ US		
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah izin usaha perdagangan	5 Izin	1.143.356.382,0	Dinas Perdagangan
			Nilai perdagangan dalam negeri	40000000 Rp		
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Prioritas)	% Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (Prioritas)	100 %	1.128.704.776,46	Dinas Sosial
			% Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100 %		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			% Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (Prioritas)	100 %		
		Program Pelayanan Dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (Prioritas)	Cakupan anak dalam panti/lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	425 Jiwa	4.549.728.801,25	Dinas Sosial
			% Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100 %		
		Program Pelayanan Panti Asuhan/Panti Jompo (Prioritas)	Cakupan lansia yang memperoleh perawatan di panti jompo	75 Jiwa	1.176.487.732,56	Dinas Sosial
			% Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100 %		
		Program Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (Bsb) (Prioritas)	% Penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 %	10.159.896.973,0	Dinas Kesehatan
			% Penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 %		
	Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	71.4 %	2.299.650.000,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80 %		
		Program Pengembangan Dan Kepeloporan Pemuda (Prioritas)	% Wirausaha muda	14.6 %	2.435.000.000,0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas)	900 Pemuda			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7		
5	Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Prioritas)	% Penurunan Jumlah Beban Pencemaran	44 %	936.750.015,95	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				Cakupan lokasi kerusakan sumber daya alam yang dipulihkan	20 %			
				Indeks kualitas udara (Prioritas)	88.75			
				Indeks kualitas air (Prioritas)	77.72			
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	Cakupan Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	100 %	476.484.313,87		Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan	Cakupan luas kebakaran hutan yang dikendalikan	100 %	3.230.000.000,0		Dinas Kehutanan
			Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Prioritas)	Cakupan Ketersediaan Jumlah Bibit Tanaman Hutan	1000000 Bibit		14.148.550.000,0
		Cakupan Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Prioritas)			1000 Ha			
		Indeks kualitas tutupan lahan (Prioritas)			58.64			
		Program Penataan Hutan Dan Pemanfaatan Hutan (Prioritas)		% Luas kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (Prioritas)	64.67 %	3.405.000.000,0	Dinas Kehutanan	
				Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	283 Ton			
				Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan	92336.62 M3			
		Program Pengembangan,	Panjang Sungai/Danau/Waduk yang dipelihara (Prioritas)	17000 Meter	21.311.448.550,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya (Prioritas)	Cakupan Data Potensi Sumber Daya Air yang tersedia daya potensinya (Prioritas)	90 %		
	Meningkatnya nilai tambah Produk unggulan daerah	Program Hilirisasi Peternakan (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan (Prioritas)	29493840000 Rp	6.261.903.750,0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Hilirisasi Pertanian (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Pertanian (Prioritas)	460835232750 Rp	94.300.000.000,0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
		Program Hilirisasi Perkebunan (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perkebunan (Prioritas)	6000000 Rp	780.000.000,0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
		Program Hilirisasi Pertambangan (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Pertambangan (Prioritas)	16724317500000 Rp	1.273.283.244,52	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Hilirisasi Perikanan (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas)	20783461644551 Rp	45.732.000.000,0	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah produk industri yang memenuhi standar	4 Produk	3.450.000.000,0	Dinas Perindustrian
6		Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Prioritas)	Cakupan SDM Aparatur yang lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Manajerial (Prioritas)	100 %	3.112.493.647,42
	Program Penilaian Potensi Dan Kompetensi Aparatur		Cakupan SDM yang ditempatkan sesuai kompetensinya (Prioritas)	75 %	2.205.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		(Prioritas)				
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Dan Keuangan Daerah (Prioritas)	Opini LKPD dari BPK RI (Proritas)	100 % (Opini WTP)	4.464.952.193,04	Inspektorat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	%Ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan (Prioritas)	100 %	10.503.413.677,35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (Prioritas)	100 %		
			% Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD (Prioritas)	97 %		
		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Cakupan Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah Provinsi	53 OPD Prov	253.003.979,22	Biro Organisasi
			Cakupan Pembinaan SAKIP Kab/Kota	24 Kab/Kota		
		Program Penguatan Ketatalaksanaan Dan Reformasi Birokrasi	Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov. Sulsel	53 OPD Prov	1.550.915.120,23	Biro Organisasi
			Cakupan Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulsel	53 OPD Prov		
			Cakupan Fasilitasi Penataan Tatalaksana Umum Lingkup Prov. Sulsel	53 OPD Prov		
			Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov.Sulsel	142 UPT		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Cakupan Fasilitas Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov.Sulsel	34 Cabang Dinas		
			Cakupan Fasilitas Pembinaan Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulsel	24 Kab/Kota		
		Program Pengembangan Dan Implementasi E-Government (Prioritas)	% Penerapan e-Government pada lingkup Perangkat Daerah (Prioritas)	78 %	9.932.559.414,41	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Program Pengembangan Dan Implementasi Inovasi Pemerintahan (Prioritas)	% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah (Prioritas)	20 %	2.832.716.752,81	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Pengembangan Baruga Layanan Publik (Prioritas)	% Pemanfaatan Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik (Prioritas)	100 %	1.056.253.415,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

4.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Pokok - pokok pikiran DPRD untuk rencana pembangunan tahun 2020 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD, dan RKPD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pasal 5 ayat (3) menjabarkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan tahun ketiga perencanaan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, selain itu, sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 153 bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi antara lain penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, maka dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 berisi saran dan pendapat dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran yang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok Pikiran DPRD telah diintegrasikan ke dalam aplikasi e-planning, yang terintegrasi pula pada dokumen penyusunan RKPD dan e-budgeting di dalam penyusunan anggaran. Pokok-pokok pikiran yang diusulkan sebanyak 4.005 usulan dan yang telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan sebanyak 2.854 usulan berdasarkan pada hasil telaahan dari tim penyusun RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen pemikiran sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi saran dan pendapat di dalam penyusunan Rancangan RKPD tahun 2021. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara garis besar adalah yang terkait hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan
- ✓ Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan kewirausahaan
- ✓ Peningkatan kualitas dan sarana prasarana kesehatan masyarakat
- ✓ Pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
- ✓ Peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian
- ✓ Peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman
- ✓ Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan yang berkebutuhan khusus
- ✓ Peningkatan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
- ✓ Pengembangan destinasi wisata dalam menunjang ekonomi masyarakat

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Merujuk pada RPJMN Tahun 2020-2024 dimana arah pembangunan wilayah Sulawesi sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi dan sekaligus memantapkan peran sebagai pusat pertumbuhan dan hubungan perdagangan di Kawasan Timur.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu strategi pembangunan sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur wilayah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, maka Pembangunan Kewilayahan Sulawesi Selatan ditetapkan ke dalam 5 (lima) wilayah pengembangan berdasarkan arahan pemanfaatan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional yang meliputi: Kawasan Makassar dan Sekitarnya (Makassar, Gowa, Takalar, Maros, dan Pangkep), Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya (Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Kepulauan Selayar dan Sinjai), Kawasan Watampone dan Sekitarnya (Bone, Soppeng dan Wajo), Kawasan Parepare dan Sekitarnya (Pare-Pare, Barru, Enrekang, Pinrang dan Sidrap), serta Kawasan Palopo dan Sekitarnya (Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara).

5.1. Kondisi Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2021, ditujukan untuk memacu pembangunan daerah yang berkualitas untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dengan memprioritaskan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif, pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Memperhatikan capaian pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2019, maka tergambar bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2019 tumbuh lebih rendah yaitu sebesar 6,92% dari yang ditargetkan 7,2%, namun tetap tumbuh kuat dibandingkan nasional yang hanya sebesar 5,02%. Meskipun laju pertumbuhan PDRB tahun 2019 melambat dibandingkan tahun 2018, namun kondisi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan cenderung membaik yang tercermin dari indikator pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia yang bergerak ke arah yang lebih baik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan per Agustus 2019 sebesar 4,97% yang lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 5,34% dan melebihi persentase TPT yang ditargetkan. Persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 8,67% menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2018 sebesar 5,34%, walaupun capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan.

5.2. Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah melalui peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang didorong oleh peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan sumber daya alam serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur wilayah.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, pembangunan akan dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan dengan mengutamakan pengembangan wilayah berbasis rencana tata ruang melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Industri (KI) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam;

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Guna mencapai tujuan pembangunan Sulawesi Selatan Sebagai upaya mengoptimalkan pengembangan wilayah di Sulawesi Selatan, maka ditetapkan arah pengembangan wilayah tahun 2020 sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan meningkatkan interkoneksi antar pusat-pusat pertumbuhan wilayah, kawasan strategis prioritas, kawasan strategis pariwisata nasional, destinasi pariwisata nasional dan kawasan perkotaan melalui peningkatan konektivitas;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah, meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air, dan meningkatkan jaringan energi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air;
3. Pengembangan kawasan strategis provinsi dengan mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Provinsi melalui peningkatan produktivitas daya saing komoditas berbasis sumberdaya alam, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dan serta pengembangan industri; dan
4. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan inklusif dengan meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah dan meningkatkan kualitas pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan melalui penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim, penanggulangan dan pengurangan resiko bencana pemulihan, pelestarian sumberdaya alam, lingkungan dan pengelolaan bencana.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan sesuai arahan RPJMN tahun 2020-2024 maka ditetapkan arah pembangunan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan tersebut sebagai berikut :

1. Arah Pengembangan Wilayah Makassar dan Sekitarnya

Pengembangan wilayah Makassar dan sekitarnya dengan pendekatan koridor pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata, kawasan industri Takalar, kawasan industri Makassar, dan kawasan industri Maros untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Wilayah Makassar dan Sekitarnya diarahkan sebagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta Mamminasata sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang berorientasi ekspor, pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi, pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran.

Kebijakan pengembangan wilayah dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan wilayah mengedepankan pengarusutamaan penanggulangan bencana, sehingga pembangunan wilayah Makassar dan Sekitarnya perlu mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana, mengingat wilayah Makassar dan Sekitarnya merupakan kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tsunami, dan kawasan rawan bencana longsor dengan resiko tinggi di Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Arah Pengembangan Wilayah Bulukumba dan Sekitarnya

Pengembangan wilayah Bulukumba dan Sekitarnya diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan pendekatan koridor pemerataan melalui pengembangan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Kawasan perkotaan Bulukumba, kawasan perkotaan Sinjai, dan kawasan perkotaan Bantaeng, serta Kawasan Industri Bantaeng guna memenuhi pemerataan dan perluasan cakupan wilayah pemenuhan pelayanan dasar. Sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar, maka pembangunan wilayah Bulukumba dan Sekitarnya diarahkan agar dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, dan pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Wilayah Bulukumba dan Sekitarnya merupakan bagian dari kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Takabonerate dan destinasi pariwisata prioritas Makassar-Takabonerate sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata. Memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang mengedepankan pengarusutamaan penanggulangan bencana, maka pembangunan wilayah Bulukumba dan Sekitarnya perlu mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana, mengingat wilayah Bulukumba dan Sekitarnya merupakan kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tsunami, dan kawasan rawan bencana longsor serta kawasan rawan bencana sempadan sesar aktif dengan resiko tinggi di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Arah Pengembangan Wilayah Watampone dan Sekitarnya

Pengembangan wilayah Watampone dan Sekitarnya dengan pendekatan koridor pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan Watansoppeng dan kawasan perkotaan Sengkang guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan pendekatan koridor pemerataan melalui pengembangan kawasan perkotaan Watampone, dan kawasan perkotaan Kahu di Kabupaten Bone dan kawasan perkotaan Siwa di Kabupaten Wajo guna memenuhi pemerataan dan perluasan cakupan wilayah pemenuhan pelayanan dasar. Sebagai upaya mewujudkan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta perluasan pemenuhan pelayanan dasar, maka pembangunan wilayah Watampone dan Sekitarnya diarahkan agar dapat berfungsi sebagai kawasan lumbung pangan nasional, dan pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.

Wilayah Watampone dan sekitarnya diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan Kebijakan pengembangan wilayah melalui pendekatan pertumbuhan dan pemerataan wilayah mengedepankan pengarusutamaan penanggulangan bencana, sehingga pembangunan wilayah Watampone dan Sekitarnya perlu mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana, mengingat wilayah Watampone dan Sekitarnya merupakan kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana longsor yaitu di Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo dan kawasan rawan bencana sempadan sesar aktif dengan resiko tinggi di Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo.

4. Arah Pengembangan Wilayah Palopo dan Sekitarnya

Pengembangan wilayah Palopo dan Sekitarnya dengan pendekatan koridor pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan Belopa, dan kawasan perkotaan Batu Sitanduk di Kabupaten Luwu, kawasan perkotaan Malili di Kabupaten Luwu Timur, dan kawasan perkotaan Masamba di Kabupaten Luwu Utara, guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan pendekatan koridor pemerataan melalui pengembangan kawasan perkotaan Makale di Kabupaten Tana Toraja, dan kawasan perkotaan Rantepao di Kabupaten Toraja Utara guna memenuhi pemerataan dan perluasan cakupan wilayah pemenuhan pelayanan dasar.

Sebagai upaya mewujudkan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta perluasan pemenuhan pelayanan dasar, maka pembangunan wilayah Palopo dan Sekitarnya diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Kegiatan Lokal (PKL) agar dapat berfungsi sebagai kawasan lumbung pangan nasional, dan pusat industri pengolahan hasil perkebunan, pusat pengembangan komoditas pertambangan nikel. Selain itu, wilayah Palopo dan Sekitarnya juga merupakan bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Toraja dan Sekitarnya yang diarahkan sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang didukung oleh industri dan jasa wisata.

Merupakan wilayah dengan potensi bencana alam banjir, tsunami, longsor dan sesar aktif. Wilayah Palopo dan sekitarnya merupakan kawasan rawan bencana banjir dengan potensi tinggi pada kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur, kawasan rawan bencana sesar aktif dengan resiko tinggi di kabupaten Luwu Timur, dan kawasan rawan bencana longsor dengan potensi tinggi di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.

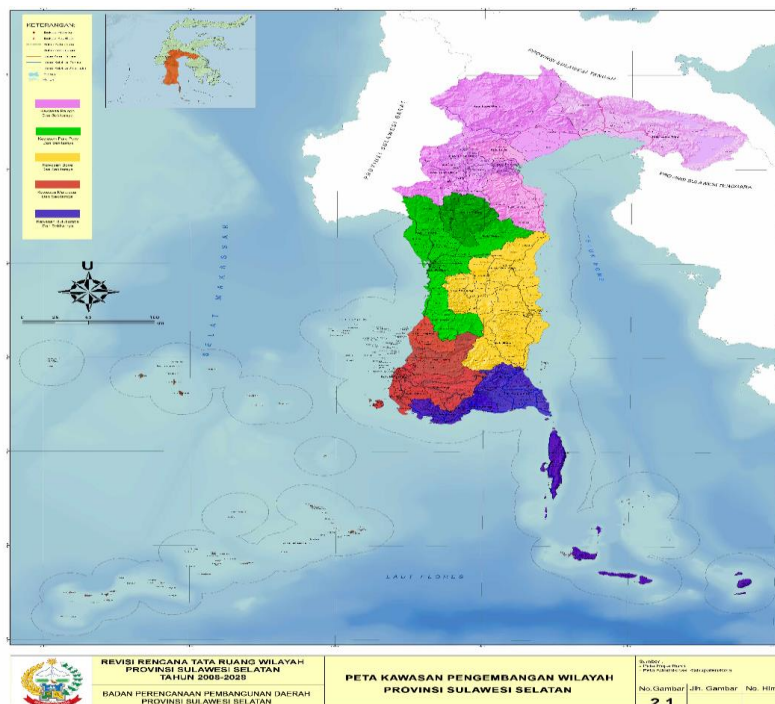
5. Arah Pengembangan Wilayah Parepare dan Sekitarnya

Pengembangan wilayah Parepare dan Sekitarnya dengan pendekatan koridor pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan Barru, dan kota Parepare, dan kawasan perkotaan Pinrang, guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional sebagai salah satu kawasan lumbung pangan nasional, pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan padi, dan pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi yang didukung dengan pengembangan hilirisasi komoditas peternakan, khususnya sapi dan pengembangan industri berbasis komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan serta optimalisasi pengelolaan sumber daya air guna menjaga keberlanjutan pemenuhan kebutuhan air baku.

Kebijakan pengembangan wilayah diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta mengedepankan pengarusutamaan penanggulangan bencana, mengingat Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan potensi bencana alam banjir, tsunami, longsor dan sesar aktif dengan potensi tinggi. Untuk itu, pembangunan wilayah Parepare dan Sekitarnya perlu mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana, mengingat wilayah Parepare dan Sekitarnya merupakan kawasan rawan bencana banjir dengan resiko tinggi di Kabupaten Barru, Pinrang, dan Enrekang, kawasan rawan bencana longsor dengan potensi tinggi di Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Enrekang, dan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Gambar V.1

**Peta Kawasan Pengembangan Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan**



5.3. Sasaran Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam upaya mewujudkan sasaran pengembangan wilayah secara efektif dan integratif, maka Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan *tema RKPD Tahun 2021, yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Yang di dukung pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM”* Berdasarkan tema tersebut maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan akan didorong melalui peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah dan peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Target pengembangan wilayah tahun 2021 pada tabel berikut :

Tabel V.1.

Target Pengembangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Target			
		Penduduk Miskin (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM	Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan Makassar & Sekitarnya					
1	Gowa	8.04	4.77	71.05	7.05
2	Makassar	4.46	10.16	83.45	8,08
3	Maros	10.68	4.82	70.68	4.94
4	Takalar	9.06	4.23	67.91	6.71
5	Pangkep	15.40	5.54	68.98	6.87
Kawasan Bulukumba & Sekitarnya					
6	Bantaeng	9.37	4.07	69.11	7.74
7	Bulukumba	7.70	3.39	69.57	5.88
8	Jeneponto	15.31	2.17	64.89	5.86
9	Kepulauan Selayar	13.09	1.28	68.22	7.48
10	Sinjai	9.26	2.33	68.27	6.56
Kawasan Watampone & Sekitarnya					
11	Bone	10.25	3.18	66.52	7.78
12	Soppeng	7.88	3.61	69.66	7.66
13	Wajo	7.32	3.38	70.16	4.35
Kawasan Pare-pare & Sekitarnya					
14	Barru	9.19	5.93	71.63	6.53
15	Enrekang	12.86	2.46	73.09	5.02
16	Pare-Pare	5.57	6.57	78.18	6.52
17	Pinrang	8.56	3.18	71.88	6.78
18	SidenrengRappang	5.18	4.86	72.22	5.84
Kawasan Palopo & Sekitarnya					
19	Luwu	13.62	4.77	71.44	6.55
20	LuwuTimur	7.36	4.18	73.95	2.15
21	Luwu Utara	13.99	3.11	70.36	7.65
22	Palopo	8.33	10.09	78.66	7.10
23	TanaToraja	12.52	2.68	69.48	6.72
24	Toraja Utara	13.69	3.07	70.37	7.97
SULAWESI SELATAN		9.10	7.2	72.22	6.1

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan sesuai arahan RPJMN tahun 2020-2024 maka pengembangan ke 5 (lima) Kawasan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kawasan Makassar dan Sekitarnya

Pengembangan kawasan Makassar dan sekitarnya tahun 2021 akan dilakukan melalui pendekatan koridor pusat pertumbuhan dengan arah kebijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis sumber daya alam serta pengembangan industri, peningkatan konektivitas antar wilayah dari pusat kegiatan menuju pusat pertumbuhan lainnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembangunan infrastruktur wilayah. Sedangkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Makassar dan Sekitarnya akan dilakukan melalui pemenuhan akses dan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas, keterampilan dan diversifikasi keterampilan wirausaha.

Kawasan Makassar merupakan penggerak utama perekonomian Sulawesi Selatan yang ditandai dengan besarnya kontribusi PDRB provinsi Sulawesi Selatan. Sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian serta transportasi dan pergudangan menjadi sector utama penggerak perekonomian di kawasan ini. Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional utamanya padi di kabupaten Gowa yang didukung oleh investasi Pemerintah dengan rencana pembangunan bendungan Jenelata. Pembangunan infrastruktur dalam rangka pendukung pertumbuhan ekonomi didorong melalui upaya pengembangan kawasan Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh pariwisata melalui penataan bangunan kawasan strategis Benteng Somba Opu, pembangunan TPA Regional Mamminasata, pembangunan SPAM Regional Mamminasata dan pembangunan SPAM di kawasan rawan air di Makassar.

Wilayah Makassar dan Sekitarnya merupakan kawasan rawan bencana banjir, tsunami, dan longsor. Untuk itu pada kawasan ini akan dibangun infrastruktur yang berkaitan dengan pengaman pantai, pengendali banjir dan longsor.

Selanjutnya, penanganan tingkat pengangguran terbuka di kawasan ini melalui kebijakan penguatan pendidikan vokasional yang terintegrasi antara kebutuhan dunia usaha dan industri, khususnya di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kota Makassar yang angka tingkat pengangguran terbukanya lebih tinggi dari TPT Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk peningkatan indeks pembangunan manusia dilakukan melalui kebijakan penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi dan pendanaan mikro serta perbaikan kualitas pelayanan dasar khususnya pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Maros, Gowa, Takalar, dan Pangkajene Kepulauan.

Mengacu pada data BPS tahun 2019, dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia di kawasan Makassar maka kebijakan pembangunan yang terkait dengan bidang pendidikan adalah program yang memacu peningkatan rata-rata lama sekolah kecuali Kota Makassar. Selanjutnya kabupaten yang perlu mengembangkan program yang memacu peningkatan angka harapan lama sekolah adalah Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep. Pada bidang kesehatan kebijakan yang perlu dikembangkan pada kawasan ini adalah optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal khususnya pada Kabupaten Maros, Takalar dan Kabupaten Pangkep. Sedangkan untuk daya beli program yang di prioritaskan pada kawasan ini adalah program yang meningkatkan produksi barang dan jasa terutama di Kabupaten Maros, Gowa dan Kabupaten Takalar.

Dalam rangka pengintegrasian pembangunan rendah karbon, maka di dilakukan peningkatan penggunaan moda transportasi umum di perkotaan yang diharapkan dapat menyumbang penurunan emisi gas rumah kaca.

2. Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya

Pengembangan Kawasan Bulukumba yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai pusat pertumbuhan wilayah seiring dengan ditetapkannya Kabupaten Bantaeng sebagai Kawasan Industri Prioritas serta

pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang didorong melalui kebijakan hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam khususnya komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang didukung kerjasama antar daerah melalui pengembangan pengembangan kawasan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi, dan agrowisata, peningkatan kompetensi keahlian SDM, peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar masyarakat, dan optimalisasi penurunan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan khususnya Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto yang merupakan wilayah dengan kelas multi risiko bencana tinggi. Kawasan Bulukumba diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian Sulawesi Selatan yang ditandai dengan semakin meningkatnya kontribusi PDRB kawasan Bulukumba terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengacu pada data BPS tahun 2019, dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia di Kawasan Bulukumba maka kebijakan pembangunan yang perlu dikembangkan terkait bidang pendidikan dimana fokus pada program yang meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto dimana capaian RLS dan HLS jauh dibawah rata-rata Sulsel yaitu sebesar 6,48 tahun). Pada bidang kesehatan kebijakan yang perlu dikembangkan pada kawasan ini adalah optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal khususnya pada Kabupaten Jeneponto dimana umur harapan hidup saat lahir jauh dibawah rata-rata Sulsel yaitu sebesar 66,24 tahun. Sedangkan untuk daya beli program yang di prioritaskan pada kawasan ini adalah program yang meningkatkan produksi barang dan jasa kecuali di Kabupaten Bantaeng.

Dalam rangka pengintegrasian pembangunan rendah karbon, maka di kawasan Bulukumba akan dilakukan melalui kebijakan peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir dengan mengoptimalkan fungsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai perangkat pengendalian pembangunan.

3. Kawasan Watampone dan Sekitarnya

Pengembangan Kawasan Watampone yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai pusat pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung peran Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan penunjang pangan nasional didukung dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sumber daya air dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung sumber daya air melalui upaya konservasi sumber air baku dengan membangun bendungan yaitu Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo dan pemberian hibah pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi melalui program IPDMIP untuk menjaga keberlanjutan sistem irigasi, mewujudkan ketahanan pangan dan mengurangi persentase penduduk miskin. Pembangunan di Kawasan Watampone dan sekitarnya dilakukan dengan menerapkan prinsip kerjasama antar daerah guna mengefektifkan dan mengoptimalkan pembangunan antar wilayah, peningkatan kompetensi keahlian SDM, peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar masyarakat, dan optimalisasi penurunan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memperhatikan kerentanan wilayah terhadap bencana, mengingat Kabupaten Bone, dan Wajo merupakan wilayah dengan kelas resiko multi bencana tinggi. Kawasan Watampone sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung oleh pengembangan hilirisasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui pengembangan industri yang ditunjang oleh integrasi dengan infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar wilayah yaitu bandar udara dan pelabuhan pengumpul guna mendukung peran Kawasan Watampone sebagai pusat pertumbuhan Sulawesi Selatan.

Mengacu pada data BPS tahun 2019, dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia di Kawasan Watampone maka kebijakan yang perlu dikembangkan dikawasan ini adalah indeks pendidikan fokus pada program yang meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terutama di Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng. Selanjutnya untuk bidang kesehatan secara umum program yang dikembangkan pada kawasan ini tetap melanjutkan program-program kesehatan utamanya pelaksanaan standar pelayanan minimal terutama untuk Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Sedangkan, untuk daya beli program yang di prioritaskan pada kawasan ini adalah program yang meningkatkan produksi barang dan jasa terutama di Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng.

Dalam rangka pengintegrasian pembangunan rendah karbon, maka di Kawasan Watampone akan dilakukan upaya konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir dengan mengoptimalkan fungsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai perangkat pengendalian pembangunan serta memperhatikan kerentanan Kawasan Watampone terhadap bencana, mengingat Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo merupakan wilayah dengan kelas risiko multi bencana tinggi.

4. Kawasan Parepare dan Sekitarnya

Kawasan Parepare yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai pusat pertumbuhan dengan memperhatikan peran Kawasan Parepare sebagai Kawasan Strategis Nasional yang didukung oleh pengembangan kawasan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi, dan agrowisata. Kawasan Parepare memiliki letak geografis yang sangat strategis dalam mendukung calon Ibukota Negara Republik Indonesia dan juga masuk dalam topografi yang alami seperti akses laut, misalnya terdapat pelabuhan yang dapat memfasilitasi akses transportasi laut ke Kalimantan. Dukungan infrastruktur lainnya seperti jalur kereta api yang sedang dibangun oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Adanya dukungan infrastruktur tersebut dapat menopang arus perdagangan yang diharapkan dapat mengoptimalkan perannya untuk menjadi sumber penggerak utama perekonomian Sulawesi Selatan.

Peningkatan peran sektor perdagangan di Kawasan Parepare didorong melalui upaya pengembangan Kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung oleh pengembangan hilirisasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui pengembangan industri pengelolaan komoditas pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh integrasi dengan infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar wilayah melalui pelabuhan pengumpul guna mendukung peran Kawasan Parepare sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Sulawesi Selatan.

Dalam rangka pengintegrasian pembangunan rendah karbon, maka di Kawasan Parepare akan dilakukan melalui kebijakan peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengembangan Kawasan Parepare sebagai kawasan perkotaan dengan memperluas jangkauan transportasi umum massal.

5. Kawasan Palopo dan Sekitarnya

Kawasan Palopo dan Sekitarnya, dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan merupakan kawasan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKW meliputi Kota Palopo, sedangkan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Kawasan Perkotaan Belopa di Kabupaten Luwu, Kawasan Perkotaan Malili di Kabupaten Luwu Timur, Kawasan Perkotaan Makale di Kabupaten Tana Toraja, dan Kawasan Perkotaan Rantepao di Kabupaten Toraja Utara.

Sedangkan tujuan pengembangan Kawasan Palopo yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kepariwisataan, dengan memperhatikan peran Kabupaten Luwu Utara sebagai bagian dari Kawasan Sorowako yang merupakan Kawasan Strategis

Nasional (KSN) dan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara sebagai bagian dari Kawasan Toraja yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang diharapkan dapat mengoptimalkan perannya untuk menjadi salah satu sumber penggerak utama perekonomian Sulawesi Selatan.

Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan Kawasan Palopo sebagai salah satu penyangga pangan Sulawesi Selatan yang berperan sebagai lumbung pangan nasional yang didukung oleh investasi Pemerintah melalui pembangunan bendungan dan peningkatan jaringan di daerah irigasi Baliase di Kabupaten Luwu Utara. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, dan pertambangan tetap menjadi menjadi sektor utama penggerak perekonomian melalui akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam khususnya komoditas kakao dan kopi yang didukung oleh peningkatan konektivitas antar wilayah karena dinamika sektor pertanian, perikanan dan kehutanan akan berdampak positif terhadap penurunan persentase tingkat kemiskinan di Kawasan Palopo.

Peningkatan peran sektor perdagangan di Kawasan Palopo didorong melalui upaya optimalisasi peran Kawasan Toraja sebagai kawasan strategis pariwisata nasional yang didukung oleh infrastruktur transportasi melalui Bandar Udara di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Luwu serta pengembangan pelabuhan pengumpul.

Mengacu pada data BPS tahun 2019, dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia di Kawasan Palopo maka kebijakan pembangunan yang perlu dikembangkan terkait bidang pendidikan yang difokuskan pada program peningkatan angka rata-rata lama sekolah yaitu Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Masih dibidang pendidikan fokus pada program yang meningkatkan harapan lama sekolah yaitu pada Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya pada bidang kesehatan kebijakan yang perlu dikembangkan pada kawasan ini adalah optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal pada kawasan ini masih dibawah rata-rata Sulsel kecuali Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara. Untuk daya beli pada kawasan ini secara umum tinggal melanjutkan kinerja yang dilakukan selama ini, namun pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan Kabupaten Luwu perlu mendapatkan perhatian dengan cara meningkatkan produksi barang dan jasa.

Dalam rangka pengintegrasian pembangunan rendah karbon, maka di Kawasan Palopo akan dilakukan kebijakan peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan yang persentase luasannya terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tetap memperhatikan resiko bencana, mengingat Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, Luwu, dan Luwu Utara, merupakan kabupaten/kota dengan kelas multi resiko bencana tinggi.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2021

Sebagaimana tertuang dalam Bab 3 tentang Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, pendapatan daerah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.10.830.112.657.000,50 yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 4.617.613.027.000,00 dan pendapatan transfer sebesar Rp. 6.187.913.977.000,00 serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 24.585.653.000,00. Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2021, dengan jumlah belanja Rp. 10.830.112.657.000,00.

Belanja daerah tahun 2021 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2021, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2021 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

Tabel VI.1.

Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2021

NO	URAIAN	PROYEKSI 2021
2	BELANJA DAERAH	10.830.112.657.000,00
2.1	BELANJA OPERASI	6.880.456.069.414,74
2.1.1	Belanja Pegawai	3.501.365.771.390,74
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.782.923.444.198,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	1.594.966.853.826,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000,00
2.2	BELANJA MODAL	1.582.578.458.060,00
2.2.1	Belanja Modal	1.582.578.458.060,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	2.342.078.129.525,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.895.228.788.725,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	446.849.340.800,00

6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2021, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 6 (enam) prioritas pembangunan.

Prioritas pertama Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya saing dengan 3 sasaran dan dijabarkan dalam 17 (tujuh Belas) program prioritas, prioritas kedua Pengembangan wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan 3 (tiga) sasaran dijabarkan ke dalam 20 (dua Puluh) Program, Prioritas pembangunan ke 3 Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan dengan sasaran meningkatkannya pembangunan infrastruktur dijabarkan kedalam 3 (tiga) program, prioritas pembangunan ke 4 (empat) Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial dengan 6 (enam) sasaran yang dijabarkan ke dalam 25 (dua puluh lima) program, prioritas pembangunan ke 5 (lima) Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan 2 (dua) sasaran yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) program, sedangkan untuk prioritas pembangunan yang ke 6 (enam) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik dengan sasaran Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan public dijabarkan ke dalam 9 (Sembilan) program prioritas.

Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2021 ada 6 (enam) prioritas pembangunan dengan 16 (enam belas) sasaran, dan 80 (Delapan Puluh) program prioritas sebagai mana di jabarkan pada tabel VI.2. berikut.

**Tabel VI.2.
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah**

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah (Prioritas)	% Tamatan SMA/SMK/SLB yang lulus Perguruan Tinggi Negeri yang bereputasi (Prioritas)	48.25 %	892.276.999,78	Dinas Pendidikan
			Program Pendidikan Siswa Kebutuhan Khusus (Prioritas)	% Jumlah warga negara usia 4 s.d 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	82 %	185.067.821,78	Dinas Pendidikan
			Program Pendidikan Karakter Dan Sekolah Sehat (Prioritas)	% Sekolah yang menerapkan budaya sehat dan Faham Radikalisme	52 %	3.211.939.732,07	Dinas Pendidikan
				% SMA/SMK yang bebas Narkoba (Prioritas)	92 %		
				% Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	54.25 %		
			Program Peningkatan Dan Pemerataan Mutu Dan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	% Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99.48 %	30.308.001.772,74	Dinas Pendidikan
				% Guru SMK yang bersertifikat	43.16 %		
				% Jumlah Sekolah yang terpenuhi daftar kebutuhan guru per mata pelajaran dan Standar Tenaga Kependidikan	1.13 %		
				% Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98.39 %		
				% Guru SMA yang bersertifikat	53.89 %		
			Program Peningkatan Partisipasi Pendidikan Menengah Dan Khusus (Prioritas)	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Prioritas)	89.25	546.775.081.644,16	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) (Prioritas)	63.95		
				% Jumlah warga negara usia 16 â€” 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	75.68 %		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Pembangunan Rumah Sakit Regional (Prioritas)	Jumlah RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan (Prioritas)	6 Unit	130.471.937.258,00	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Prioritas)	% Puskesmas yang Menyelenggarakan Program Kesehatan Tradisional	40 %	2.272.390.000,00	Dinas Kesehatan
			% RS yang Terakreditasi Nasional	80 %		
			% Puskesmas Terakreditasi	80 %		
			% Puskesmas yang menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Penunjang	70 %		
			% RS Kabupaten/Kota yang Telah Menjadi BLU	85 %		
		Jumlah klinik rest area yang berfungsi (Prioritas)	4 Klinik			
		Program Pengembangan Spesialisasi Dan Kualitas Layanan Rumah Sakit (Prioritas)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi. (Prioritas)	6 Unit	653.669.842,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	1 RS	350.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
			Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	1 RS	825.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
			Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	1 RS	360.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
			Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	1 RS	207.882.978,70	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
		Program Upaya Kesehatan Dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Prioritas)	Cakupan pasien yang memperoleh transfusi darah	100 %	9.457.778.825,61	UPT Transfusi Darah
			Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan	100 %	600.000.000,00	UPT RSK Gigi dan Mulut
			Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan	90 %	430.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah	
			Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	90 %	1.465.375.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	
			Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	100 %		100.000.000,00	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
			Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	100 %		411.824.468,05	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
			Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	100 %		100.000.000,00	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
		Program Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (Hpk) (Prioritas)	% Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Prioritas)	12 %	5.692.101.020,00	Dinas Kesehatan	
			% Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Prioritas)	6.5 %			
		Program Promosi Kesehatan, Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak (Prioritas)	Prevalensi Balita Kurus (Wasting)	8.25 %	2.657.684.500,00	Dinas Kesehatan	
			Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (Underweight)	20.3 %			
			Prevalensi Balita Stunting (Prioritas)	33 %			
			Jumlah Kematian Ibu	112 Kasus			
			% Kabupaten Kota yang memiliki kebijakan PHBS	45 %			
			Jumlah Kematian Bayi	1057 Kasus			
			% Lansia Usia ≥ 60 Tahun yang mendapat pelayanan Santun Lansia	65 %			
			% Posyandu Aktif	61 %			
		Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan daya saing daerah	Program Perluasan Dan Pengembangan Tenaga Kerja (Prioritas)	% Pencari kerja yang ditempatkan	3.91 %	1.738.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Rasio daya serap tenaga kerja (Prioritas)	58.78 %		
			Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasional (Prioritas)	Jumlah peserta didik yang menerima pembiayaan gratis pendidikan life skill/kejuruan	200 Orang	541.950.925,46	Dinas Pendidikan
% Tamatan SMK yang bekerja 3 bulan setelah tamat (Prioritas)	46.75 %						

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah	
			Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	71.4 %	2.299.650.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80 %			
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan Dan Anak (Prioritas)	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Prioritas)	30.9 %	931.360.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Program Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak	% Kabupaten/Kota Layak Anak	58 %	899.184.580,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000)	2.92		
		Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	% Lembaga layanan Perlindungan Perempuan sesuai standar	50 %	554.859.485,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Berkembangnya komoditas unggulan Daerah	Program Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Ternak (Prioritas)	Jumlah Populasi ternak kecil	1.828.228 Ekor	19.488.720.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				Jumlah Populasi ternak sapi perah (Prioritas)	1.434 Ekor			
				Jumlah Populasi ternak unggas	141.334.762 Ekor			
				Jumlah Populasi ternak kuda (Prioritas)	191.527 Ekor			
				Jumlah Populasi ternak kerbau (Prioritas)	127.387 Ekor			
				Jumlah produksi telur (Prioritas)	179.260.404 Kg			
				Jumlah Populasi sapi potong (Prioritas)	1.404.487 Ekor			
				Jumlah produksi daging (Prioritas)	140.872.302 Kg			
				Jumlah produksi susu (Prioritas)	3.504.851 Kg			
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian	Cakupan ketersediaan jaringan irigasi	20.000 Ha	51.737.985.999,50	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	
				Cakupan ketersediaan alat dan mesin pertanian	412 Unit			
			Program Penataan Hutan Dan Pemanfaatan Hutan (Prioritas)	% Luas kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (Prioritas)	64.67 %	3.405.000.000,00	Dinas Kehutanan	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
			Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	283 Ton	2.598.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan	92.336,62 M3		
		Program Peningkatan Produksi Kelautan Dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap	380.743 Ton		
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	5.559.907 Ton		
			Jumlah produksi garam rakyat	100.522,3 Ton		
	Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya (Prioritas)	% Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (SPM)	69.47 %	255.556.510.793,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Jumlah tambahan luas lahan yang terlayani sistem pengairan irigasi (Prioritas)	15.014,3 Ha		
		Program Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	100 %	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal (Prioritas)	Jumlah Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal (Prioritas)	2 Kab/Kota	316.014.072,12	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang didukung/difasilitasi menjadi destinasi wisata unggulan	2 Destinasi Wisata	5.440.760.946,00	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
		Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	% Panjang ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi	100 %	224.861.482.285,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Prioritas)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	300.000 WNA	4.954.375.430,49	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
			Jumlah kunjungan wisatawan lokal	7500.000 WNI		
	Peningkatan jumlah produk usaha ekonomi kreatif (Prioritas)		2 Jenis			
Lama Kunjungan Wisata	5 Hari					
		Jumlah pengguna rest area sebagai spot wisata alternatif (Prioritas)	1.000 Orang			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah	
		Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM)	100 %	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Program Pengembangan Dan Penataan Fasilitas Umum (Prioritas)	Jumlah fasilitas rest area yang terbangun (Prioritas)	2 Lokasi	64.355.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
			Jumlah Fasilitas Pendukung Kawasan Pariwisata	0 lokasi			
		Program Pengembangan Dan Pembinaan Kelompok Ukm Bagi Masyarakat Miskin (Prioritas)	% Pertumbuhan UKM Bagi Masyarakat Sangat Miskin Dan Miskin (Prioritas)	20 %	5.732.900.000,00		
	Berkembangnya Pembangunan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparat desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	660 Aparat Desa	3.474.954.357,90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Jumlah desa berstatus swasembada	2 Desa Swasembada			
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	% Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LSM yang aktif)	0.3 %	1.386.548.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			% Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LPM Berprestasi)	6.25 %			
			% Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	1 %			
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDES yang difasilitasi	180 BUMDES	1.219.458.183,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningatan jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	5 %	1.000.111.095,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya	60 RTM		
		Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	96.5 %	3.468.419.457,00	Dinas Kesehatan	
			% Orang dengan HIV (ODHA) Mendapatkan Pengobatan	70 %			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah			
				Angka Penemuan/Kejadian Malaria per 1.000 Penduduk (API)	1 /1000 Penduduk (<)					
				Angka Kejadian Tuberkulosis/100.000 Penduduk (Case Notification Rate)	202 /100000 Penduduk					
				Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100 %					
				% Kab/Kota yang minimal 20% Puskesmasnya melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA	90 %					
				% Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu	60 %					
			Program Penyediaan Air Bersih (Prioritas)	Jumlah RT pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih (Prioritas)	1750 RT	12.560.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
				Cakupan Pembinaan Penanganan Air Minum Kab/Kota	24 Kab/Kota					
			Program Penyediaan Listrik Dan Ketahanan Energi (Prioritas)	% Desa Berlistrik (Prioritas)	99 %	8.138.476.329,17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			
				% Rumah Tangga Pengguna Listrik	98 %					
				Jumlah Kapasitas Bio Energi yang terbangun	1244 M3					
			3	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Program Preservasi Jalan (Prioritas)	% Tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (mantap) (SPM)	65.43 %	316.319.776.635,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Program Penyelenggaraan Kepelabuhanan Dan Angkutan Pelayaran (Prioritas)	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	1028 Orang	11.509.441.115,54	Dinas Perhubungan
Jumlah pelabuhan strategis provinsi	11 Lokasi									
Jumlah pelabuhan yang beroperasi	35 Lokasi									
Program Penyelenggaraan Angkutan Jalan	% Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	50 %				3.783.470.212,28	Dinas Perhubungan			
	% Layanan Angkutan Darat	54 %								
	Jumlah Terminal Bis Terkelola	10 Lokasi								
	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	365000 Orang								

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
4	Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial	Meningkatnya kinerja ekonomi makro.	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Prioritas)	Jumlah Kawasan yang difasilitasi perencanaan dan pengembangannya (Prioritas)	3 Kawasan	356.227.346,97	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah produksi kedelai dan palawija	17087 Ton	7.600.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Jumlah produksi padi	6645775 Ton		
				Produktivitas padi	51 Kw/Ha		
				Produktivitas jagung	57 Kw/Ha		
				Produktivitas kedelai dan palawija	14 Kw/Ha		
			Program Peningkatan Produksi Dan Mutu Produk Hortikultura	Jumlah produksi jagung	2688281 Ton	5.800.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Jumlah produksi tanaman hortikultura	23264 Ton		
			Program Peningkatan Produksi Dan Mutu Produk Hortikultura	Produktivitas tanaman hortikultura	58 Kw/Ha	5.800.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Jumlah bibit Hortikultura bersertifikat yang siap diperbanyak pada IKB	10000 Pohon		
			Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri (Prioritas)	Jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukannya	2 Sentra	7.600.000.000,00	Dinas Perindustrian
				Jumlah kawasan pergudangan yang tertata	2 Kawasan		
		% Peningkatan produksi industri potensial (Prioritas)		10 %			
		Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Program Bantuan Pendidikan Sma/Smk/Slb Bagi Siswa Miskin (Prioritas)	Cakupan siswa SMA/SMK/SLB miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan (Prioritas)	59.8 %	120.000.000,00	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Usaha Dan Promosi Produk Umkm (Prioritas)	Cakupan promosi produk UMKM pada Rest Area (Prioritas)	10 Produk	900.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif Dan Pengembangan Produk Pemasaran Bagi Koperasi Dan Umkm	Jumlah KUMKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana	10 Unit	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Jumlah produk baru yang terfasilitasi perizinan	5 Produk						
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin		100 %	466.907.030,00	Dinas Kesehatan		
	Cakupan Kepesertaan Kemitraan Asuransi Kesehatan Menuju Universal Coverage	100 %					

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Penyediaan Dan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin Dan Mbr (Prioritas)	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (SPM)	2.25 %	3.000.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (SPM)	5 %		
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Komunitas Adat Terpencil (Kat)	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil (KAT) yang mendapatkan pengembangan kemampuan dan potensi	800 Jiwa	11.734.601.334,89	Dinas Sosial
			% PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0.7 %		
	% PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		1.1 %			
	Membaiknya stabilitas ekonomi makro	Program Pengembangan Perekonomian Dan Pembinaan Kelembagaan Ekonomi	Peningkatan Jumlah Lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing	8 Lembaga	3.277.752.622,75	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
			Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan kelompok pedagang/usaha informal yang dibina	1.08 %	489.824.268,00
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah izin usaha perdagangan	5 Izin	1.143.356.382,00	Dinas Perdagangan
	Nilai perdagangan dalam negeri		40000000 Rp			
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Prioritas)	% Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (Prioritas)	100 %	1.128.704.776,46	Dinas Sosial
			% Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100 %		
			% Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (Prioritas)	100 %		
		Program Pelayanan Dan Pembinaan Kesejahteraan	Cakupan anak dalam panti/lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	425 Jiwa	4.549.728.801,25	Dinas Sosial

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
		Sosial Anak (Prioritas)	% Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100 %		
		Program Pelayanan Panti Asuhan/Panti Jompo (Prioritas)	Cakupan lansia yang memperoleh perawatan di panti jompo	75 Jiwa	1.176.487.732,56	Dinas Sosial
			% Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100 %		
		Program Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (Bsb) (Prioritas)	% Penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 %	10.159.896.973,00	Dinas Kesehatan
			% Penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 %		
	Meningkatnya nilai tambah Produk unggulan daerah	Program Hilirisasi Peternakan (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan (Prioritas)	29493840000 Rp	6.261.903.750,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Hilirisasi Pertanian (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Pertanian (Prioritas)	460835232750 Rp	94.300.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
		Program Hilirisasi Perkebunan (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perkebunan (Prioritas)	6000000 Rp	780.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
		Program Hilirisasi Pertambangan (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Pertambangan (Prioritas)	16724317500000 Rp	1.273.283.244,52	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Hilirisasi Perikanan (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas)	20783461644551 Rp	45.732.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah produk industri yang memenuhi standar	4 Produk	3.450.000.000,00	Dinas Perindustrian
	Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	71.4 %	2.299.650.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80 %		
		Program Pengembangan Dan Kepeloporan Pemuda (Prioritas)	% Wirausaha muda	14.6 %	2.435.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas)	900 Pemuda			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
5	Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Prioritas)	% Penurunan Jumlah Beban Pencemaran	44 %	936.750.015,95	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Cakupan lokasi kerusakan sumber daya alam yang dipulihkan	20 %		
				Indeks kualitas udara (Prioritas)	88.75		
				Indeks kualitas air (Prioritas)	77.72		
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	Cakupan Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	100 %	476.484.313,87	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan	Cakupan luas kebakaran hutan yang dikendalikan	100 %	3.230.000.000,00	Dinas Kehutanan	
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Prioritas)	Cakupan Ketersediaan Jumlah Bibit Tanaman Hutan	1000000 Blbit	14.148.550.000,00	Dinas Kehutanan
				Cakupan Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Prioritas)	1000 Ha		
				Indeks kualitas tutupan lahan (Prioritas)	58.64		
		Program Penataan Hutan Dan Pemanfaatan Hutan (Prioritas)	% Luas kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (Prioritas)	64.67 %	3.405.000.000,00	Dinas Kehutanan	
				Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu			283 Ton
				Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olah			92336.62 M3
		Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya (Prioritas)	Panjang Sungai/Danau/Waduk yang dipelihara (Prioritas)	17000 Meter	21.311.448.550,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Cakupan Data Potensi Sumber Daya Air yang tersedia daya potensinya (Prioritas)	90 %						
6	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik	Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Prioritas)	Cakupan SDM Aparatur yang lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Manajerial (Prioritas)	100 %	3.112.493.647,42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Penilaian Potensi Dan Kompetensi Aparatur (Prioritas)	Cakupan SDM yang ditempatkan sesuai kompetensinya (Prioritas)	75 %	2.205.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Dan Keuangan Daerah (Prioritas)	Opini LKPD dari BPK RI (Prioritas)	100 % (Opini WTP)	4.464.952.193,04	Inspektorat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	%Ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan (Prioritas)	100 %	10.503.413.677,35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (Prioritas)		100 %			
	% Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD (Prioritas)		97 %			
		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Cakupan Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah Provinsi	53 OPD Prov	253.003.979,22	Biro Organisasi
			Cakupan Pembinaan SAKIP Kab/Kota	24 Kab/Kota		
		Program Penguatan Ketatalaksanaan Dan Reformasi Birokrasi	Cakupan Fasilitas Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov. Sulsel	53 OPD Prov	1.550.915.120,23	Biro Organisasi
			Cakupan Fasilitas Pembinaan Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulsel	53 OPD Prov		
			Cakupan Fasilitas Penataan Tatalaksana Umum Lingkup Prov. Sulsel	53 OPD Prov		
			Cakupan Fasilitas Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov.Sulsel	142 UPT		
			Cakupan Fasilitas Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov.Sulsel	34 Cabang Dinas		
			Cakupan Fasilitas Pembinaan Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulsel	24 Kab/Kota		
		Program Pengembangan Dan Implementasi E-Government (Prioritas)	% Penerapan e-Government pada lingkup Perangkat Daerah (Prioritas)	78 %	9.932.559.414,41	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Program Pengembangan Dan Implementasi Inovasi Pemerintahan (Prioritas)	% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah (Prioritas)	20 %	2.832.716.752,81	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Pengembangan Baruga Layanan Publik (Prioritas)	% Pemanfaatan Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik (Prioritas)	100 %	1.056.253.415,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

6.3. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Perumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, tersusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar antara lain Pendidikan, Kesehatan, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan, dan sosial. Untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar ada 18 (delapan Belas) antara lain tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, dan seterusnya. urusan pilihan 6 (enam) antara lain pertanian, Kehutanan, Perdagangan, dan seterusnya, Sedangkan untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan 8 (delapan) antara lain Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan seterusnya. Rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel VI.3. berikut.

Tabel VI.3
PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01					Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1.01	01				Pendidikan									
1.01	01	01.00			Dinas Pendidikan			603,345,418,389.43				611,200,765,651.81		
1.01	01	01.00	01		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS (Prioritas)	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Prioritas) Angka Partisipasi Murni (APM) (Prioritas) % Jumlah warga negara usia 16 â€” 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)		89.25 63.95 75.68 %	546,775,081,644.16			89.85 64.45 76.29 %	553,888,484,829.93	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	001	Pelaksanaan Pelayanan Peserta Didik Berbasis Zonasi	Jumlah Zona Pelayanan Peserta Didik	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	1 Zona Pelayanan	315,000,000.0			1 Zona Pelayanan	280,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	002	Pelaksanaan Pelayanan Peserta Didik Home Schooling	Jumlah Unit Pelayanan Home Schooling dan Mobile Schooling	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	2 Unit	650,000,000.0			2 Unit	700,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	003	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Reguler SMA	Jumlah Sarana/Prasarana yang Akan diadakan	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	160 Sekolah	56,010,081,644.16			170 Sekolah	54,663,484,829.93	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	004	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK	Jumlah Sarana/Prasarana yang Diadakan	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	122 Sekolah	105,500,000,000.0			132 Sekolah	105,550,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	005	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Reguler SLB	Jumlah Sarana/Prasarana yang Diadakan	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	56 Sekolah	4,000,000,000.0			66 Sekolah	4,500,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	006	Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMA	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan USB/RKB/LAB/Perpustakaan/Halaman/Pagar SMA	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	10 Sekolah	3,200,000,000.0			10 Sekolah	3,700,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	007	Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMK	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan USB/ RKB/ Lab/ Perpustakaan/ Halaman/Pagar SMK	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	10 Sekolah	3,700,000,000.0			10 Sekolah	3,800,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	008	Pembangunan Prasarana Pembelajaran SLB	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Perpustakaan SLB Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan RKB SLB Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan USB	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	5 Sekolah 5 Sekolah 5 Sekolah	2,350,000,000.0			5 Sekolah 5 Sekolah 5 Sekolah	2,600,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	009	Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Pembelajaran SMA	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Ruang Kelas/LAB/Perpustakaan/Halaman SMA	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	10 Sekolah	2,500,000,000.0			10 Sekolah	2,550,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	010	Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Pembelajaran SMK	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Ruang Kelas/Perpustakaan/Halaman SMK	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	10 Sekolah	2,500,000,000.0			10 Sekolah	2,550,000,000.0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	01	01.00	01	011	Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Pembelajaran SLB	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Ruang Kelas/Perpustakaan/Halaman SLB	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	5 Sekolah	1,500,000,000.0			5 Sekolah	1,750,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	012	Pembangunan Prasarana Pendukung Lainnya Bagi SMA	Jumlah Ruang Pendukung Lainnya SMA yang Dibangun (Ruang Perkantoran, Tempat Ibadah, Jamban/Toilet, Kantin, UKS, Gudang, Bak Sampah)		3 Ruang	1,500,000,000.0			3 Ruang	2,000,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	013	Pembangunan Prasarana Pendukung Lainnya Bagi SMK	Jumlah Ruang Pendukung Lainnya SMK yang Dibangun (Ruang Perkantoran, Tempat Ibadah, Jamban/Toilet, Kantin, UKS, Gudang, Bak Sampah)		4 Ruang	1,500,000,000.0			4 Ruang	2,000,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	014	Pembangunan Prasarana Pendukung Lainnya Bagi SLB	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Kantor Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Asrama Siswa Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Pagar/Halaman		1 Sekolah 1 Sekolah 2 Sekolah 3 Sekolah	1,000,000,000.0			1 Sekolah 1 Sekolah 2 Sekolah 3 Sekolah	1,250,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	015	Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan SMA	Jumlah Sarana Pendidikan yang Diadakan (Mobiler,Komputer,Alat Peraga,DII)		10 Unit	1,500,000,000.0			10 Unit	1,600,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	016	Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan SMK	Jumlah Sarana Pendidikan yang Diadakan (Mobiler,Komputer,Alat Peraga,DII)		3 Unit	375,000,000.0			3 Unit	400,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	017	Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan SLB	Jumlah Sarana Pendidikan yang Diadakan (Mobiler,Komputer,Alat Peraga, DII)		3 Unit	450,000,000.0			3 Unit	500,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	018	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa Se Sulawesi Selatan	Jumlah Sekolah Negeri yang Mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah		519 Sekolah	352,750,000,000.0			519 Sekolah	357,750,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	019	Pembinaan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah Laporan Terkait Pengelolaan Dana BOS		12 Bulan	175,000,000.0			60 Bulan	200,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	020	Peningkatan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Menengah SMA, SMK, dan SLB Non PNS	Jumlah Penerima Insentif PTK SMA, SMK, dan SLB		50 Orang	140,000,000.0			50 Orang	160,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	022	Penguatan Kelembagaan Pendidikan	Jumlah Komite Sekolah, MGMP, MKKS, MKPS, dan Dewan Pendidikan		50 Orang	160,000,000.0			50 Orang	175,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	023	Iklan Layanan Masyarakat	Jumlah Iklan Layanan Masyarakat		5 Iklan	115,000,000.0			5 Iklan	125,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	024	Penanganan Pengaduan Pelayanan Pendidikan	Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Pendidikan		30 Dokumen	60,000,000.0			30 Dokumen	80,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	025	Izin Operasional Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan SMA, SMK, SLB yang Mendapatkan Izin Operasional		10 Sekolah	60,000,000.0			10 Sekolah	70,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	026	Motivasi Warga Belajar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keaksaraan Fungsional	Jumlah Pelajar Pendidikan Keaksaraan Fungsional		30 Orang	125,000,000.0			30 Orang	145,000,000.0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	01	01.00	01	027	Kampanye Peningkatan Partisipasi dalam Pendidikan	Jumlah Kegiatan Partisipasi Pendidikan yang diselenggarakan		1 Kegiatan	120,000,000.0			1 Kegiatan	130,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	028	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas I	Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas		1 Kegiatan	360,000,000.0			1 Kegiatan	370,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	029	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan	Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan		1 Kali	240,000,000.0			1 Kali	260,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	030	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas II	Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas		1 Kegiatan	360,000,000.0			1 Kegiatan	370,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	031	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas III	Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas		1 Kegiatan	360,000,000.0			1 Kegiatan	370,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	032	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas IV	Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas		1 Kegiatan	360,000,000.0			1 Kegiatan	370,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	033	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas V	Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas		1 Kegiatan	360,000,000.0			1 Kegiatan	370,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	034	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas VI	Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas		1 Kegiatan	310,000,000.0			1 Kegiatan	320,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	035	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas VII	Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas		1 Kegiatan	360,000,000.0			1 Kegiatan	370,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	036	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas VIII	Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas		1 Kegiatan	360,000,000.0			0 Kegiatan	370,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	037	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas IX	Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas		1 Kegiatan	370,000,000.0			1 Kegiatan	380,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	038	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas X	Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas		1 Kegiatan	360,000,000.0			1 Kegiatan	370,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	039	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas XI	Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas		1 Kegiatan	360,000,000.0			1 Kegiatan	370,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	01	040	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas XII	Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas		1 Kegiatan	360,000,000.0			1 Kegiatan	370,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN VOKASIONAL (Prioritas)	Jumlah peserta didik yang menerima pembiayaan gratis pendidikan life skill/kejuruan % Tamatan SMK yang bekerja 3 bulan setelah tamat (Prioritas)		200 Orang 46.75 %	541,950,925.46			250 Orang 47.65 %	549,006,937.80	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	001	Pengembangan Program Studi Keahlian (Kurikulum) Berbasis Keunggulan Lokal	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Program Studi/Kurikulum Keunggulan Lokal		1 Sekolah	5,500,000.0			1 Sekolah	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	002	Pengembangan Program Studi Keahlian (kurikulum) Berbasis Keunggulan Dunia Industri dan Dunia Usaha	Jumlah Sekolah yang Menerapkan Pengembangan Program Studi Keahlian Berbasis Keunggulan Industri SMK		10 Sekolah	89,250,925.46			10 Sekolah	89,750,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	003	Pengembangan Program Kewirausahaan (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan)	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Program Pendidikan Kewirausahaan yang Dikembangkan		15 Sekolah	70,400,000.0			15 Sekolah	70,700,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	004	Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Jumlah Siswa yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		50 Orang	135,800,000.0			50 Orang	136,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	005	Penguatan Unit Produksi Siswa berbasis Sekolah (Teaching Factory)	Jumlah Siswa yang Terlibat Dalam Unit Produksi		75 Orang	106,000,000.0			75 Orang	106,200,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	006	Pengembangan Kemitraan Strategis antara Sekolah, DUDI, Lembaga Kursus dan Perguruan Tinggi	Jumlah Siswa dan Sekolah Yang Terlibat Kemitraan Strategis		40 Orang	80,000,000.0			40 Orang	80,356,937.80	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	007	Pengembangan Kompetensi Keahlian Berbasis Produksi	Jumlah Program Studi Keahlian Berbasis Produksi Yang Dikembangkan		1 Studi	5,500,000.0			1 Studi	6,000,000.0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	01	01.00	02	008	Pengembangan Kompetensi Keahlian Berbasis Keunggulan Lokal	Jumlah Program Studi Keahlian Produksi Berbasis Keunggulan Lokal Yang Dikembangkan		1 Studi	5,500,000.0			1 Studi	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	009	Bimtek Pengembangan Kewirausahaan SMK Bidang Keahlian, Kemaritiman dan Agrobisnis/Agroteknologi	Jumlah Guru Yang Mengikuti Bimtek		2 Orang	5,500,000.0			2 Orang	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	010	Fasilitas Pelaksanaan Academy of Community	Jumlah Academy Of Community Yang Terbentuk		1 Akademi	5,500,000.0			1 Akademi	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	011	Pelaksanaan Penilaian Peserta Didik SMK Berbasis IT	Jumlah Siswa SMK Yang Mengikuti Penilaian Berbasis Komputer		1 Orang	5,500,000.0			1 Orang	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	012	Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Industri SMK	Jumlah Guru Yang Mengikuti Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Industri SMK		1 Orang	5,500,000.0			1 Orang	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	013	Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	Jumlah Lokasi Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)		1 Lokasi	5,500,000.0			1 Lokasi	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	014	Workshop Manajemen Berbasis Sekolah SMK	Jumlah Kepala Sekolah Yang Telah Mengikuti Workshop Manajemen Berbasis Sekolah SMK		1 Orang	5,500,000.0			1 Orang	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	015	Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah SMK	Jumlah Operator/Teknisi Sekolah Yang Telah Mengikuti Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah SMK		1 Orang	5,500,000.0			1 Orang	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	02	016	Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum SMK	Jumlah sekolah yang melaksanakan kurikulum		10 Sekolah	5,500,000.0			10 Sekolah	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	03		PROGRAM PENDIDIKAN SISWA KEBUTUHAN KHUSUS (Prioritas)	% Jumlah warga negara usia 4 â€” 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)		82 %	185,067,821.78			83 %	187,477,340.38	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	03	001	Workshop Pengembangan Kurikulum PK-PLK 2013	Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Kurikulum PK-PLK 2013		2 Orang	6,000,000.0			2 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	03	002	Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	Jumlah Peserta Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi		4 Orang	6,000,000.0			5 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	03	003	Pelatihan Keterampilan Siswa PK/PLK	Persiapan Jumlah Siswa PK-PLK yang Dilatih		2 Orang	6,000,000.0			2 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	03	004	Sosialisasi Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Jumlah Guru PK-PLK yang Mengikuti Sosialisasi Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus		2 Orang	6,000,000.0			2 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	03	005	Sosialisasi Sekolah Inklusi dan Ramah Anak	Jumlah Guru yang Mengikuti Workshop Sekolah Inklusi dan Ramah Anak		4 Orang	14,300,000.0			4 Orang	14,400,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	03	006	Workshop Ketunaan Guru PK-PLK	Jumlah Peserta Workshop Ketunaan Guru PK-PLK		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	03	007	Pelayanan Assesment bagi ABK	Jumlah Siswa ABK yang Dinilai		20 Orang	30,500,000.0			20 Orang	30,600,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	03	008	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Kepribadian dan Sosial Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Dalam Kepribadian dan Kompetensi		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	01	01.00	03	009	Pelaksanaan Pendidikan layanan khusus berbasis komunitas dan tempat rehabilitasi	Jumlah Siswa Unit Pendidikan Layanan Khusus Pada Masyarakat dan atau Tempat Rehabilitasi	24 kabupaten/ kota	8 Orang	16,600,000.0			8 Orang	16,700,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	03	010	Pelaksanaan Penilaian Portopolio Sekolah Inklusif	Persentase Jumlah Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Inklusif		1 Sekolah	6,000,000.0			1 Sekolah	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	03	011	Seleksi dan Pembinaan Pramuka Siswa PK-PLK	Jumlah Siswa yang Telah Dibina		2 Orang	6,000,000.0			2 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	03	012	Workshop Manajemen Berbasis Sekolah SLB	Jumlah Kepala Sekolah yang Telah Mengikuti Workshop Manajemen Berbasis SLB		25 Orang	63,667,821.78			25 Orang	55,777,340.38	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	03	013	Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah SLB	Jumlah Operator/Teknisi Sekolah yang Telah Mengikuti Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen SLB		2 Orang	6,000,000.0			2 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	03	014	Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum SLB	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum SLB		5 Sekolah	6,000,000.0			5 Sekolah	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	04		PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER DAN SEKOLAH SEHAT (Prioritas)	% Sekolah yang menerapkan budaya sehat dan Faham Radikalisme % SMA/SMK yang bebas Narkoba (Prioritas) % Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama		52 % 92 % 54.25 %	3,211,939,732.07			53 % 93 % 55.6 %	3,247,248,243.09	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	04	001	Pembinaan Program Sekolah Sehat	Jumlah Sekolah yang Menerapkan Sekolah Sehat		75 Sekolah	240,000,000.0			75 Sekolah	241,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	04	002	Kampanye Sekolah Anti Pergaulan Bebas, Anti Faham Sesat dan Radikalisme	Jumlah Siswa/Sekolah yang Terlibat Dalam Kampanye Mengikuti Anti Paham Radikalisme		100 Sekolah	152,000,000.0			100 Sekolah	154,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	04	003	Pelaksanaan Tes Urine	Jumlah Siswa yang Telah Mengikuti Tes Urine		1000 Orang	30,000,000.0			1000 Orang	35,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	04	004	Kampanye Anti Rokok dan Narkoba	Jumlah Sekolah/Siswa yang Terlibat Dalam Kampanye Anti Rokok dan Narkoba		100 sekolah	583,239,732.07			100 sekolah	593,448,243.09	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	04	005	Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata (Sekolah Berbasis Lingkungan)	Jumlah Sekolah yang Telah Melaksanakan Sekolah Adiwiyata	24 kabupaten/ kota	35 Sekolah	124,000,000.0			35 Sekolah	124,500,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	04	006	Pengelolaan Kantin Sehat	Jumlah Kantin Sekolah yang Sehat		40 Unit	197,700,000.0			40 Unit	197,800,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	04	007	Pengelolaan Bank Sampah Sekolah	Jumlah Bank Sampah Sekolah yang Terbentuk		45 Unit	170,000,000.0			45 Unit	170,500,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	04	008	Kepemimpinan Siswa Menyongsong Masa Depan Terpadu	Jumlah Siswa yang Telah Mengikuti Kepemimpinan Siswa Menyongsong Masa Depan Terpadu		100 Orang	140,000,000.0			100 Orang	145,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	04	009	Gerakan 15 menit mengaji	Jumlah Sekolah yang Telah Melaksanakan Gerakan 15 Menit Mengaji Secara Baik		100 Sekolah	765,000,000.0			100 Sekolah	765,500,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	04	010	Pelaksanaan Lomba Portopolio Pendidikan karakter Tematik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba Portopolio Pendidikan Karakter Tematik		100 orang	125,000,000.0			100 orang	130,000,000.0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	01	01.00	04	011	Pembentukan dan Penguatan Kader Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga dan Masyarakat	Jumlah Orang Tua Siswa dan Tokoh Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Kader Pendidikan Karakter		1000 orang	630,000,000.0			1000 orang	630,500,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	04	012	Workshop Pembinaan Karakter Organisasi Kesiswaan	Jumlah Siswa Anggota Organisasi Kesiswaan yang Mengikuti Pembinaan Karakter (OSIS, Pramuka, PMR, dan UKS)		75 orang	55,000,000.0			75 orang	60,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	05		PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN SMA/SMK/SLB BAGI SISWA MISKIN (Prioritas)	Cakupan siswa SMA/SMK/SLB miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan (Prioritas)		59.8 %	120,000,000.0			64.68 %	140,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	05	040	Pengelolaan Data Penerima Bantuan Pendidikan	Validitas Data Siswa Yang Mendapatkan Bantuan Pendidikan		1 Dokumen	105,000,000.0			1 Dokumen	120,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	05	041	Pengelolaan Pendistribusian Bantuan Pendidikan	Pendistribusian siswa yang mendapatkan Bantuan Pendidikan		1 Dokumen	15,000,000.0			1 Dokumen	20,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH (Prioritas)	% Tamatan SMA/SMK/SLB yang lulus Perguruan Tinggi Negeri yang bereputasi (Prioritas)		48.25 %	892,276,999.78			49.65 %	897,384,309.72	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	001	Peningkatan passing grade/tryout dalam menghadapi UMPTN	Jumlah Siswa yang Telah Mengikuti Tryout		10000 Orang	261,276,999.78			10000 Orang	262,384,309.72	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	002	Pemetaan Kopetensi Siswa dalam Memilih Program Studi	Jumlah Siswa yang Mengikuti Pemetaan Kompetensi		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	003	Workshop Pengembangan Kurikulum SMA 2013	Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Kurikulum SMA 2013		2 orang	6,000,000.0			2 orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	004	Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	Jumlah Peserta Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA		2 Orang	6,000,000.0			2 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	005	Pelatihan Manajemen Bagi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala SLB	Jumlah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB yang Dilatih		50 Orang	23,000,000.0			50 Orang	20,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	006	Pelatihan Manajemen Bagi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB	Jumlah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB yang Dilatih		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	007	Workshop Pendalaman Materi Program IPA, IPS dan Bahasa SMA yang di UN kan	Jumlah Guru Mata Pelajaran yang Mengikuti Workshop Pendalaman Materi Program IPA, IPS, dan Bahasa		10 Orang	19,000,000.0			10 Orang	18,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	008	Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Sekolah Menengah (SMA)	Jumlah PTK yang Mengikuti Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	009	Bimbingan Teknis Pembelajaran Berbasis Keunggulan Lokal SMA	Jumlah PTK SMA yang Mengikuti Pelatihan Pembelajaran Berbasis Keunggulan Lokal		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	010	Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen SMA	Jumlah Guru yang Mengikuti Workshop Pengembangan SIM SMA		1 orang	6,000,000.0			1 orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	011	Pelaksanaan Penilaian Peserta Didik Berbasis Komputer SMA	Jumlah Siswa SMA yang Mengikuti Penilaian Berbasis Komputer		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	012	Pelaksanaan Penilaian Peserta Didik Berbasis Komputer SMK	Jumlah Siswa SMK yang Mengikuti Penilaian Berbasis Komputer		1 orang	6,000,000.0			1 orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	013	Pembinaan Siswa Kelas Khusus	Jumlah Siswa Kelas Khusus yang Dibina		2 Orang	6,000,000.0			2 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	01	01.00	06	014	Pengembangan Program Studi Keahlian Berbasis Keunggulan Lokal SMK	Jumlah Program Studi Keahlian Berbasis Keunggulan Lokal SMK		2 studi	6,000,000.0			2 studi	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	015	Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Industri SMK	Jumlah Guru yang Mengikuti Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Industri SMK		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	016	Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal SMA	Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal SMA		10 Orang	19,000,000.0			10 Orang	17,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	017	Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Atas (SMA)	Jumlah Lokasi Pemetaan Penjamin Mutu Pendidikan Menengah (SMA)		1 Lokasi	176,000,000.0			1 Lokasi	177,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	018	Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	Jumlah Lokasi Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)		1 Lokasi	176,000,000.0			1 Lokasi	177,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	019	Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi siswa SMA/SMK	Jumlah Sekolah yang Mengikuti Tambahan Bahasa Asing		1 Sekolah	6,000,000.0			1 Sekolah	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	020	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional Perbaikan (UNP) SMA	Jumlah Sekolah Penyelektora UNP		1 Sekolah	6,000,000.0			1 Sekolah	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	021	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)		1 Sekolah	6,000,000.0			1 Sekolah	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	022	Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum Muatan Lokal SMA	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal SMA		1 Sekolah	6,000,000.0			1 Sekolah	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	023	Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMA	Jumlah Guru yang Mengikuti Bimtek Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)		10 Orang	21,500,000.0			10 Orang	18,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	024	Bimbingan teknis hasil pemetaan mata pelajaran muatan lokal SMA	Jumlah Guru yang Mengikuti Bimtek Hasil Pemetaan Mata Pelajaran Muatan Lokal		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	025	Penyusunan Bahan Ajar Mulok SMA	Jumlah Guru yang Mengikuti Penyusunan Bahan Ajar Mulok SMA		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	026	Workshop Kelompok Peminatan Ilmu - ilmu Bahasa dan Budaya Kurikulum 2013 SMA	Jumlah Guru yang Mengikuti Workshop Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya Kurikulum 2013 SMA		10 Orang	21,500,000.0			10 Orang	18,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	027	Workshop Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu - ilmu Alam Kurikulum 2013 SMA	Jumlah Guru Yang Mengikuti Workshop Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam Kurikulum 2013 SMA		10 Orang	21,500,000.0			10 Orang	18,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	028	Workshop Kelompok Peminatan Ilmu - ilmu Sosial Kurikulum 2013 SMA	Jumlah Guru Yang Mengikuti Workshop Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial Kurikulum 2013 SMA		10 Orang	21,500,000.0			10 Orang	18,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	029	Pengembangan Kompetensi Keahlian Berbasis Keunggulan Lokal SMK	Terbentuknya Tim Pembina Keahlian Yang Berkompeten Yang Berbasis Keunggulan		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	030	Workshop Manajemen Berbasis Sekolah SMA	Jumlah Kepala Sekolah Yang Telah Mengikuti Workshop Manajemen Berbasis Sekolah		2 Orang	6,000,000.0			2 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	01	01.00	06	031	Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah SMA	Jumlah Operator/Teknisi Sekolah Yang Telah Mengikuti Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	06	032	Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum 2013 SMA	Jumlah Sekolah Yang Telah Menerapkan Secara Baik Kurikulum 2013		5 Sekolah	6,000,000.0			5 Sekolah	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07		PROGRAM PROMOSI MINAT KEILMUAN	Jumlah perolehan medali siswa pada lomba/kejuruan tingkat nasional/International		34 Medali	1,556,884,791.78			36 Medali	1,577,154,889.67	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	001	Bimbingan teknis pendampingan pelajar andalan SULSEL	Jumlah Siswa yang Mendapat Pendampingan Pada Lomba-Lomba Prestasi	24 kabupaten/ kota	1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	002	Seleksi dan Pembinaan OSN SD tingkat provinsi ke tingkat Nasional	Jumlah Siswa yang Mengikuti Seleksi OSN SD		60 Orang	40,100,000.0			60 Orang	41,200,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	003	Penyelenggaraan Seleksi O2SN SD Tingkat Provinsi	Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Seleksi O2SN SD	24 kabupaten/ kota	100 Orang	40,100,000.0			100 Orang	41,200,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	004	Penyelenggaraan Seleksi O2SN SMP Tingkat Provinsi	Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Seleksi O2SN Tingkat Provinsi	24 kabupaten/ kota	100 Orang	90,732,791.78			100 Orang	91,030,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	005	Pelaksanaan & Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa SMK Tk.Provinsi	Jumlah Siswa SMK yang Mengikuti Seleksi dan Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa SMK		150 Orang	90,200,000.0			150 Orang	90,300,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	006	Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi	Jumlah Siswa SMK yang Mengikuti Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi		200 Orang	71,020,000.0			200 Orang	71,030,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	007	Pelaksanaan dan Pembinaan Olimpiade Sains (OSN) SMA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	Jumlah Siswa SMA yang Mengikuti Seleksi OSN Tingkat Provinsi		200 Orang	91,010,000.0			200 Orang	91,020,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	008	Penyelenggaraan dan Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional	Jumlah Siswa SMA yang Mengikuti Seleksi O2SN SMA		200 Orang	161,110,000.0			200 Orang	161,120,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	009	Pelaksanaan dan Pembinaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	Jumlah Siswa SMA yang Mengikuti Seleksi FL2SN		300 Orang	142,320,000.0			300 Orang	142,681,889.67	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	010	Penyelenggaraan dan Pembinaan Olimpiade SAINS SMP Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional	Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Pembinaan OSN SMP		2 Orang	6,000,000.0			2 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	011	Pembinaan Peserta Festival Lomba Seni dan OSN PK/PLK Tk. Nasional	Jumlah Siswa PK-PLK yang Mengikuti Pembinaan FL2SN dan OSN		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	012	Seleksi O2SN Siswa PK/PLK tingkat provinsi ke tingkat Nasional	Jumlah Siswa PK-PLK yang Mengikuti Seleksi O2SN		35 Orang	64,510,000.0			35 Orang	64,520,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	013	Seleksi dan Pembinaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD Tingkat Provinsi ke tingkat Nasional	Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Seleksi dan Pembinaan FLS2N		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	014	Penyelenggaraan Seleksi FLS2N SD Tingkat Provinsi	Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Seleksi FLS2N	24 kabupaten/ kota	70 Orang	44,410,000.0			70 Orang	44,420,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	015	Pembinaan O2SN SD Tingkat Provinsi	Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Pembinaan O2SN	24 kabupaten/ kota	60 Orang	31,000,000.0			60 Orang	32,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	016	Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP	Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI)	24 kabupaten/ kota	50 Orang	31,000,000.0			50 Orang	32,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	017	Seleksi dan Pembinaan OSN SMP tingkat provinsi	Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Seleksi OSN	24 kabupaten/ kota	60 Orang	31,000,000.0			60 Orang	32,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	018	Penyelenggaraan Seleksi FLS2N SMP Tingkat Provinsi	Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Seleksi FLS2N	24 kabupaten/ kota	45 Orang	38,970,000.0			45 Orang	38,980,000.0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	01	01.00	07	019	Olimpiade Sains Guru (OSN) SD dan SMP ke Tingkat Nasional	Jumlah Guru SD dan SMP yang Megikuti Olimpiade Sains Guru		65 Orang	17,330,000.0			65 Orang	17,340,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	020	Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SMA Berprestasi dan Berdedikasi Tk. Provinsi	Jumlah Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SMA Berprestasi dan Berdedikasi Tk. Provinsi		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	021	Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat TAP MPR-RI dan UUD 1945 (Provinsi & Nasional)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Lomba Cerdas Cermat TAP MPR-RI dan UUD 1945	24 kabupaten/ kota	2 Orang	6,000,000.0			2 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	022	Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Inggris SMA	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Lomba Debat Bahasa Inggris		100 Orang	53,500,000.0			100 Orang	53,600,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	023	Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA	Jumlah Peserta Dididk yang Mengikuti Lomba Debat Bahasa Indonesia		100 Orang	53,500,000.0			100 Orang	53,600,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	024	Pelaksanaan dan Pembinaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) Tingkat Provinsi	Jumlah Guru yang Mengikuti Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) Tingkat Provinsi	24 kabupaten/ kota	1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	025	Pelaksanaan Seleksi dan Pembinaan Lomba Parade Cinta Tanah Air Tingkat Provinsi	Jumlah Siswa yang Mengikuti Seleksi dan Pembinaan Lomba Parade Cinta Tanah Air	24 kabupaten/ kota	100 Orang	52,810,000.0			100 Orang	52,820,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	026	Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) SMA Tingkat Provinsi	Jumlah Guru Yang Mengikuti Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) SMA Tingkat Provinsi		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	027	Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat dan Berprestasi SMAN/SMAS	Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Lomba Sekolah Sehat Dan Berprestasi		3 Sekolah	6,000,000.0			3 Sekolah	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	028	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Tingkat Provinsi	Jumlah Siswa SMK yang Mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Tingkat Provinsi		2 Orang	6,000,000.0			2 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	029	Olimpiade Sains Guru SMK Tingkat Provinsi	Jumlah Guru Yang Mengikuti Olimpiade Sains Guru Tingkat Provinsi		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	030	Seleksi FLS2N Siswa PK/PLK tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional (FLS2N)	Jumlah Siswa PK-PLK yang Mengikuti Seleksi FLS2N Tingkat Provinsi		60 Orang	75,992,000.0			60 Orang	75,993,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	031	Festival Pelajar PK-PLK	Jumlah Siswa SMP Yang Mengikuti Festival Pelajar Jenjang SMP		2 Orang	6,000,000.0			2 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	032	Festival Pelajar jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA)	Jumlah Siswa SMA Yang Mengikuti Festival Pelajar		100 Orang	98,330,000.0			100 Orang	98,340,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	033	Festival Pelajar jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	Jumlah SMK yang Mengikuti Festival Pelajar		100 Orang	79,230,000.0			100 Orang	79,240,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	034	Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang SMP tingkat provinsi ke tingkat Nasional	Jumlah Siswa SMP Yang Mengikuti Gala Siswa Tingkat Provinsi Ke Tingkat Nasional		100 Orang	74,710,000.0			100 Orang	74,720,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	035	Penyelenggaraan Lomba Guru,Kepala Sekolah,Pengawas SMP Berprestasi tingkat Provinsi ke tingkat Nasional	Jumlah Guru, Kepsek, Pengawas SMP Yang Mengikuti Seleksi Tingkat Nasional		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	07	036	Penyelenggaraan Lomba Guru,Kepala Sekolah,Pengawas SD Berprestasi tingkat Provinsi ke tingkat Nasional	Jumlah Guru, Kepsek, Pengawas SD Yang Mengikuti Seleksi Tingkat Nasional		1 Orang	6,000,000.0			1 Orang	7,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	08		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	% Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK		80 %	1,409,290,683.33			90 %	1,427,639,157.31	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	01	01.00	08	001	Studi Wawasan Pengembangan dan Pendayagunaan Jaringan Pembelajaran	Jumlah ASN yang Mengikuti Studi Wawasan Pengembangan dan Pendayagunaan Jaringan Pembelajaran		24 Orang	55,470,000.0			26 Orang	57,480,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	08	002	Anugerah KiHajar Tingkat Provinsi	Jumlah Siswa yang Mengikuti Anugrah KiHajar Tingkat Provinsi		100 orang	91,030,683.33			100 orang	91,031,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	08	003	Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Belajar Multimedia	Jumlah Ruang Belajar Multimedia yang Dipelihara		1 Ruang	7,000,000.0			1 Ruang	8,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	08	004	Peningkatan Manajemen UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Manajemen UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Dikelolah		5 Ruang	365,560,000.0			5 Ruang	365,570,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	08	005	TOT Pendayagunaan TIK dalam pembelajaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti TOT Pendayagunaan TIK Dalam Pembelajaran		5 Orang	7,500,000.0			6 Orang	8,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	08	006	Workshop Penyusunan Model Pembelajaran Berbasis TIK untuk Daerah Tertentu	Jumlah Guru yang Mengikuti Workshop Penyusunan Model Pembelajaran Berbasis TIK untuk Daerah Tertentu		5 Orang	7,000,000.0			6 Orang	8,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	08	007	Produksi Program Pembelajaran Muatan Lokal Berbasis ICT	Jumlah Materi Pembelajaran Muatan Lokal Berbasis ICT		2 Materi	7,000,000.0			2 Materi	8,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	08	008	Workshop strategi Pengembangan Sumber Belajar Di Sekolah	Jumlah Guru yang Mengikuti Workshop Strategi Pengembangan Sumber Belajar		75 Orang	48,620,000.0			75 Orang	50,338,157.31	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	08	009	Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK		75 Orang	75,000,000.0			75 Orang	83,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	08	010	Kajian Pendayagunaan Sumber Belajar di Sekolah	Jumlah PTK yang Mengikuti Kajian Pendayagunaan Sumber Belajar di Sekolah		30 Orang	40,910,000.0			30 Orang	40,920,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	08	011	Pemanfaatan Pelayanan Pendidikan Berbasis TIK	Jumlah Layanan Pendidikan Berbasis TIK		10 Unit	682,200,000.0			10 Unit	682,300,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	08	012	Pengadaan Sumber Belajar/Informasi Virtual	Jumlah Sumber Belajar/Informasi Virtual		1 Unit	7,000,000.0			1 Unit	8,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	08	013	Rakor TIK	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Rakor TIK		150 Orang	7,000,000.0			150 Orang	8,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	08	014	Jambore TIK	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Jambore TIK		100 Orang	8,000,000.0			100 Orang	9,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN MUTU DAN DISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	% Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % Guru SMK yang bersertifikat % Jumlah Sekolah yang terpenuhi daftar kebutuhan guru per mata pelajaran dan Standar Tenaga Kependidikan % Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		99.48 %	30,308,001,772.74			99.54 %	30,702,601,402.56	Dinas Pendidikan
								43.16 %				43.37 %		
								1.13 %				1.13 %		
								98.39 %				98.52 %		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						% Guru SMA yang bersertifikat		53.89 %				54.18 %		
1.01	01	01.00	09	001	Pendampingan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SMA Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi	Jumlah guru berprestasi dan berdedikasi		75 Orang	760,000,000.0			75 Orang	765,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	002	Bimbingan Teknis Penilai/ Asesor Terhadap Penilaian Kinerja Guru	Jumlah asesor yang telah mengikuti bimtek		72 Orang	720,000,000.0			72 Orang	725,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	003	Bimbingan Teknis dan Lomba Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan yang telah mengikuti bimbingan	24 kabupaten/ kota	75 Orang	760,000,000.0			75 Orang	770,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	004	Pemetaan Analisis Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan		110 Orang	760,000,000.0			115 Orang	767,601,402.56	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	005	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dan Jenis kegiatan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	24 kabupaten/ kota	115 orang	910,000,000.0			110 orang	920,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	006	Pelaksanaan Academy Of Innovative Education Leadership Bagi Kepala Sekolah	Jumlah Kepala sekolah yang mengikuti kegiatan Jumlah Inovasi yang dihasilkan		110 Orang 100 Orang	760,000,000.0			115 Orang 125 Orang	770,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	007	Pengembangan Kompetensi Pengawas Sekolah	Jumlah pegawai sekolah yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	24 kabupaten/ kota	50 Orang	760,000,000.0			50 Orang	770,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	008	Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Khusus	Jumlah pegawai yang mengikuti jabatan fungsional		50 Orang	760,000,000.0			50 Orang	770,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	009	Pelaksanaan Pemetaan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	jumlah zonasi distribusi guru Jumlah sekolah yang memenuhi standar (rasio) tenaga kependidikan		7600 orang 103 sekolah	760,000,000.0			7600 orang 103 sekolah	770,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	010	Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru sma/smk/slb yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Persentasase tenaga kependidikan sma/smk/slb yang memenuhi kualifikasi S1/DIV		50 Orang 50 Orang	740,000,000.0			50 Orang 50 Orang	750,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	011	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pedagogik	Jumlah guru yang mengikuti pengembangan kompetensi pedagogik		110 Orang	720,000,000.0			115 Orang	730,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	012	Pengembangan Kompetensi Kepribadian dan Sosial	Jumlah Guru yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi Kepribadian dan Sosial		110 Orang	790,000,000.0			110 Orang	800,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	013	Workshop Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Mapel MIPA SMA	Jumlah guru yang telah mengikuti kompetensi Profesional Guru Mapel MIPA SMA		50 Orang	710,000,000.0			50 Orang	720,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	014	Workshop Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Mapel IPS SMA	Jumlah guru yang telah mengikuti Kompetensi Profesional Guru Mapel IPS SMA		50 Orang	720,000,000.0			50 Orang	730,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	015	Workshop Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Mapel Bahasa dan Seni SMA	Jumlah Guru yang telah mengikuti Kompetensi Profesional Guru Mapel Bahasa dan Seni SMA		50 Orang	760,000,000.0			50 Orang	770,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	016	Workshop Pengembangan Kompetensi Mapel Adaptif Bagi Guru SMK	Jumlah Guru yang telah mengikuti Kompetensi Mapel Adaptif Bagi Guru SMK		50 Orang	710,000,000.0			50 Orang	720,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	017	Workshop Pengembangan Kompetensi Mapel Normatif Bagi Guru SMK	Jumlah Guru yang telah mengikuti Kompetensi Mapel Normatif Bagi Guru SMK		50 Orang	710,000,000.0			50 Orang	720,000,000.0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	01	01.00	09	018	Workshop Pengembangan Kompetensi Mapel Produktif Bagi Guru SMK	Jumlah Guru yang telah mengikuti Kompetensi Mapel Produktif Bagi Guru SMK		50 Orang	710,000,000.0			50 Orang	720,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	019	Pendampingan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas PK-PLK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi	Jumlah guru berprestasi dan berdedikasi		50 Orang	810,000,000.0			50 Orang	820,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	020	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Guru BK	Jumlah guru yang mengikuti workshop Pengembangan Kompetensi Guru BK		50 Orang	810,000,000.0			50 Orang	830,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	021	Pengembangan Kompetensi Guru PK-PLK	Jumlah guru yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Guru PK-PLK		50 Orang	810,000,000.0			50 Orang	820,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	022	Workshop Guru Pembimbing Khusus (GPK)	Jumlah Guru yang mengikuti Workshop Guru Pembimbing Khusus (GPK)		50 Orang	780,000,000.0			50 Orang	790,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	023	Pelatihan Guru Inklusi PK-PLK	Jumlah guru yang mengikuti Pelatihan Guru Inklusi PK-PLK		50 Orang	780,000,000.0			50 Orang	790,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	024	Pelatihan Guru Produktif SMK	Jumlah guru SMK yang mengikuti Pelatihan Guru Produktif SMK		50 Orang	910,000,000.0			50 Orang	920,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	025	Workshop Guru Bidang Studi Normatif SMK	Jumlah guru yang mengikuti Workshop Guru Bidang Studi Normatif SMK		50 Orang	878,001,772.74			50 Orang	880,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	026	Workshop Guru Bidang Studi Adaptif SMK	Jumlah guru yang mengikuti Workshop Guru Bidang Studi Adaptif SMK		75 Orang	880,000,000.0			75 Orang	890,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	027	Metode Pembelajaran Membaca Lontara	Jumlah Guru yang mengikuti kegiatan pembelajaran membaca lontara		50 Orang	760,000,000.0			50 Orang	770,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	028	Kurikulum Bahasa Daerah	Jumlah guru yang mengikuti kegiatan pengembangan Kurikulum Bahasa Daerah	24 kabupaten/ kota	30 Orang	710,000,000.0			30 Orang	720,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	029	Seminar Guru Bahasa Indonesia	Jumlah guru bahasa indonesia yang mengikuti seminar		80 orang	760,000,000.0			80 orang	770,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	030	Workshop Guru Bahasa Daerah	Jumlah Guru bahasa daerah yang mengikuti peningkatan kompetensi		72 Orang	760,000,000.0			72 Orang	770,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	031	Workshop Guru Bahasa dan Sastra	Jumlah guru bahasa dan sastra yang mengikuti peningkatan kompetensi		72 Orang	760,000,000.0			72 Orang	770,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	032	Potensi dan Kompetensi Peminatan Jurusan/ Program Studi	Jumlah siswa yang terserap di Perguruan tinggi dan DUDI		100 Orang	710,000,000.0			100 Orang	720,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	033	Workshop Penyusunan Bahan Ajar Muatan Lokal	Jumlah guru yang mengikuti Workshop Penyusunan Bahan Ajar Muatan Lokal		72 Orang	760,000,000.0			72 Orang	770,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	034	Workshop Penyusunan Bahan Ajar Bahasa Daerah	Jumlah guru yang mengikuti Workshop Penyusunan Bahan Ajar Bahasa Daerah		50 orang	800,000,000.0			50 orang	810,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	035	Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang telah mengikuti Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		150 Orang	800,000,000.0			150 Orang	810,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	036	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS		11500 Orang	830,000,000.0			11500 Orang	840,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	037	Verifikasi dan Sertifikasi Pendidik	Jumlah guru yang di sertifikasi		50 Orang	870,000,000.0			50 Orang	875,000,000.0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	01	01.00	09	038	Pengembangan Kompetensi TIK Bagi Pendidik	Jumlah guru yang mengikuti Pengembangan Kompetensi TIK Bagi Pendidik		75 Orang	810,000,000.0			75 Orang	840,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	09	039	Pelaksanaan Seleksi dan Pembinaan dan GTK SMA Berprestasi Tingkat Provinsi	Jumlah Guru yang mengikuti Seleksi dan Pembinaan dan GTK SMA Berprestasi Tingkat Provinsi		192 Orang	800,000,000.0			192 Orang	810,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	13,970,473,264.29			100 %	14,152,363,961.67	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik		12 Bulan	2,150,000,000.0			12 Bulan	2,151,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan		18 Unit 9 Unit	792,559,158.0			20 Unit 12 Unit	813,450,033.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS		52 Orang	2,789,164,106.29			52 Orang	2,811,913,928.20	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia		60 Jenis ATK	2,513,750,000.0			75 Jenis ATK	2,532,500,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		50 Unit	808,750,000.0			50 Unit	827,000,000.31	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		2 Jenis	2,303,750,000.0			2 Jenis	2,335,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran		2 Pameran	1,018,750,000.0			2 Pameran	1,029,500,000.16	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		75 Kali	1,593,750,000.0			85 Kali	1,652,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	3,549,132,461.48			100 %	3,595,340,930.34	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara		2 Unit	327,052,461.48			2 Unit	283,150,930.34	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara		7 Unit	1,510,000,000.0			7 Unit	1,520,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		15 Unit	300,000,000.0			15 Unit	350,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia		16 Unit	98,500,000.0			17 Unit	98,600,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara		30 Unit	220,000,000.0			40 Unit	240,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		50 Unit	628,580,000.0			50 Unit	628,590,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		5 Unit	350,000,000.0			5 Unit	355,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website		2 Sistem Informasi/Aplikasi 5 Berita/Informasi	115,000,000.0			2 Sistem Informasi/Aplikasi 5 Berita/Informasi	120,000,000.0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	01	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	424,727,792.61			100 %	430,257,600.57	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah		34 Orang	26,000,000.0			36 Orang	27,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	70,520,000.0			2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	70,530,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK		7 Usulan Kegiatan	24,200,000.0			7 Usulan Kegiatan	24,300,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi		5 Laporan 5 Jenis	31,000,000.0			5 Laporan 5 Jenis	31,927,600.57	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		10 Laporan	192,007,792.61			10 Laporan	194,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun		2 Laporan	30,000,000.0			2 Laporan	31,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun		1 Laporan	51,000,000.0			1 Laporan	51,500,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	400,590,499.95			100 %	405,806,048.77	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun		20 Orang 10 Laporan	61,860,000.0			20 Orang 10 Laporan	63,012,200.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia		750 Pasang	310,150,000.0			750 Pasang	311,753,848.50	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia		60 Pasang	14,250,000.0			60 Pasang	15,510,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan		40 Orang	14,330,499.95			50 Orang	15,530,000.27	Dinas Pendidikan
1.01	02				Kesehatan									
1.01	02	01.00			Dinas Kesehatan				178,891,281,263.0				178,918,814,555.0	
1.01	02	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN KESEHATAN BRIGADE SIAGA BENCANA (BSB) (Prioritas)	% Penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)		100 %	10,159,896,973.0			100 %	11,385,770,474.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						% Penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)		100 %				100 %		
1.01	02	01.00	01	001	Pengadaan Ambulans Laut dengan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Ambulans Laut yang diadakan	Provinsi Sulawesi Selatan	1 unit	2,000,000,000.0	APBD Prov		1 unit	2,377,770,474.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	01	002	Pemeliharaan Ambulans Laut	Jumlah Ambulans Laut yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	6 unit	150,000,000.0	APBD Prov		7 unit	280,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	01	003	Operasional dan Krew Kapal	Jumlah Ambulans Laut siap siaga	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	6 unit	574,000,000.0	APBD Prov		7 unit	656,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	01	004	Pengadaan Ambulans Darat	Jumlah ambulans darat yang diadakan	Provinsi Sulawesi Selatan Kab/Kota Kab/Kota	3 unit	3,100,000,000.0	APBD Prov		3 unit	4,125,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	01	005	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat (R-4)	Jumlah Kendaraan Operasional Roda Empat (R-4) yang diadakan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	1 unit	450,000,000.0	APBD Prov		0 unit	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	01	006	Pengadaan Perahu Karet	Jumlah Perahu Karet yang diadakan	Provinsi Sulawesi Selatan	2 unit	328,000,000.0	APBD Prov		5 unit	500,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	01	008	Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Jumlah pemakaian bahan bakar untuk pemanasan dan operasional	Provinsi Sulawesi Selatan	5000 liter	50,000,000.0	APBD Prov		10000 liter	100,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	01	010	Operasional Satgas (Satuan Tugas)	Jumlah kegiatan pengendalian dan pemantauan kejadian krisis kesehatan yang dilaksanakan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	365 hari	292,000,000.0	APBD Prov		365 hari	292,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	01	011	Operasional Satlak (Satuan Pelaksana)	Jumlah kejadian Krisis Kesehatan	Kota Makassar Kota Makassar	40 kejadian	555,000,000.0	APBD Prov		40 kejadian	555,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	01	012	Penguatan dan Fasilitasi Public Safety Centre (PSC) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang diberi penguatan	24 kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	150,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	150,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	01	013	Pelatihan BTCLS (Basic Trauma and Cardiac Life Support)	Jumlah angkatan dalam penyelenggaraan Pelatihan BTCLS (Basic Trauma and Cardiac Life Support)	Kota Makassar Kota Makassar	4 angkatan	620,000,000.0	APBD Prov		4 angkatan	620,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	01	014	Peningkatan Kapasitas Petugas Medis dan Paramedis	Jumlah angkatan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Medis dan Paramedis	Kota Makassar Kota Makassar	4 angkatan	800,000,000.0	APBD Prov		4 angkatan	800,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	01	015	Sosialisasi Krisis Kesehatan	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Krisis Kesehatan	Kota Makassar Kota Makassar	2 kali	230,189,600.0	APBD Prov		0 kali	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	01	016	Penguatan Manajemen Krisis Kesehatan	Jumlah paket penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Krisis Kesehatan	Kota Makassar Kota Makassar	2 pt	500,707,373.0	APBD Prov		2 pt	500,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	01	019	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	36 unit	360,000,000.0	APBD Prov		43 unit	430,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	02		PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL (Prioritas)	Jumlah RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan (Prioritas)		6 Unit	130,471,937,258.0			6 Unit	131,495,895,722.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	02	006	Pembangunan Rumah Sakit Regional	Jumlah Rumah Sakit Regional yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	Kabupaten Bone Kota Palopo	1 Unit	105,471,937,258.0	APBD Prov		1 Unit	106,495,895,722.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	02	007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Regional	Jumlah Sarana dan prasarana RS Regional yang tersedia	Kota Makassar Kota Makassar	2 Paket	12,500,000,000.0	APBD Prov		2 Paket	12,500,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	02	008	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Regional	Jumlah Alat Kesehatan di Rumah Sakit Regional yang tersedia	Kota Makassar Kota Makassar	2 Paket	12,500,000,000.0	APBD Prov		2 Paket	12,500,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	02	01.00	03		PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	% Puskesmas yang Menyelenggarakan Program Kesehatan Tradisional % RS yang Terakreditasi Nasional % Puskesmas Terakreditasi % Puskesmas yang menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Penunjang % RS Kabupaten/Kota yang Telah Menjadi BLU Jumlah klinik rest area yang berfungsi (Prioritas)		40 % 80 % 80 % 70 % 85 % 4 Klinik	2,272,390,000.0			45 % 90 % 90 % 80 % 90 % 4 Klinik	1,447,362,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	03	009	Pemilihan Puskesmas Berprestasi (Kinerja Terbaik)	Jumlah Puskesmas Berprestasi (Kinerja Terbaik) Tingkat Provinsi Sulsel yang terpilih	12 Puskesmas terpilih 12 Kab/Kota	12 Puskesmas Berprestasi	300,000,000.0	APBD Prov		12 Puskesmas Berprestasi	300,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	03	010	Monitoring dan Evaluasi Akreditasi dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi Akreditasi FKTP	24 Kab/Kota 24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	150,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	150,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	03	011	Peningkatan dan Penguatan Tenaga Pendamping Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kab/Kota	Jumlah Peserta Peningkatan dan Penguatan Tenaga Pendamping Akreditasi FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	48 orang	105,000,000.0	APBD Prov		48 orang	105,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	03	014	Sosialisasi dan Advokasi Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Advokasi Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di kab/Kota	5 kab/Kota 5 Kab/Kota	600 orang	146,000,000.0	APBD Prov		600 orang	146,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	03	015	Pertemuan Koordinasi dalam mendukung Quickwins Program Pelayanan Darah	Jumlah peserta Pertemuan Koordinasi dalam mendukung Quickwins program Pelayanan Darah	Kota Makassar Kota Makassar	48 orang	224,000,000.0	APBD Prov		0 orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	03	016	Monitoring dan Evaluasi Program Terpadu Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi terpadu tentang pengelolaan Program Kesehatan Tradisional, Gigi Mulut, Laboratorium dan Pelayanan Darah	24 Kab/Kota 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	120,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	138,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	03	019	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan Pelayanan kesehatan	Kota Makassar	12 Bulan	390,000,000.0	APBD Prov		12 Bulan	390,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	03	030	Peningkatan Kapasitas Petugas CSSD RS	Jumlah Petugas dalam pengelolaan CSSD di RS yang meningkat pemahamannya	Kota Makassar Kota Makassar	49 Orang	120,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	03	031	Peningkatan Kapasitas Manajemen Ambulans RS	Jumlah petugas yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan Ambulans RS	Kota Makassar Kota Makassar	49 Orang	120,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	03	034	Workshop Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di RS	Jumlah Tim PPRA yang meningkat pemahamannya tentang pengendalian Resistensi Antimikroba di RS	Kota Makassar Kota Makassar	49 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	03	036	Monev Tatalaksana Program Perkesmas	Jumlah pemantauan pengelolaan Program Perkesmas di Kab/Kota	24 Kab/Kota 24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	120,000,000.0	APBD Prov		0 Kab/Kota	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	03	042	Monev Wahana Internship	Jumlah Wahana Internship di Kab/Kota yang dipantau	Kabupaten Sidenreng Rappang Rumah Sakit Kabupaten Bantaeng	28 Wahana	85,000,000.0	APBD Prov		0 Wahana	0.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Rumah Sakit Kabupaten Barru Rumah Sakit Kabupaten Bulukumba Rumah Sakit Kabupaten Enrekang Rumah Sakit Kabupaten Gowa Rumah Sakit Kabupaten Jeneponto Rumah Sakit Kabupaten Kepulauan Selavar Rumah Sakit Kabupaten Luwu Rumah Sakit Kabupaten Luwu Timur Rumah Sakit Kabupaten Luwu Utara Rumah Sakit Kabupaten Maros Rumah Sakit Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Rumah Sakit Kabupaten Pinrang Rumah Sakit Kabupaten Sinjai Rumah Sakit Kabupaten Soppeng Rumah Sakit Kabupaten Takalar Rumah Sakit Kabupaten Tana Toraja Rumah Sakit Kabupaten Wajo Rumah Sakit Kota Makassar Rumah Sakit Kota Parepare							
1.01	02	01.00	03	043	Pertemuan Pelaporan SIRS Online bagi Petugas Rekam Medik RS	Jumlah Peserta Pelaporan SIRS Online bagi Petugas Rekam Medik RS	Kota Makassar Kota Makassar	105 Orang	117,000,000.0	APBD Prov		105 Orang	118,362,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	03	044	Monev Perizinan RS bagi RS Swasta	Jumlah pemantauan Izin Operasional di RS Swasta	RS Swasta Kabupaten Bone RS Swasta Kabupaten Gowa RS Swasta Kabupaten Luwu RS Swasta Kabupaten Luwu Timur RS Swasta Kabupaten Luwu Utara RS Swasta Kabupaten Pinrang RS Swasta Kabupaten Sidenreng Rappang RS Swasta Kabupaten Takalar	56 RS	75,390,000.0	APBD Prov		0 RS	0.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							RS Swasta Kabupaten Tana Toraja RS Swasta Kabupaten Toraja Utara RS Swasta Kota Makassar RS Swasta Kota Palopo RS Swasta Kota Parepare							
1.01	02	01.00	03	054	Monev Hasil Advokasi Klinik di Rest Area	Jumlah pelaksanaan advokasi klinik di Rest Area	12 Kab/Kota 12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100,000,000.0	APBD Prov		12 Kab/Kota	100,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	04		PROGRAM PELAYANAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) (Prioritas)	% Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Prioritas) % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Prioritas)		12 % 6.5 %	5,692,101,020.0			12.5 % 7 %	5,892,101,020.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	04	008	Pendampingan dalam Pemanfaatan Paket Intervensi Gizi pada Ibu Hamil	Jumlah pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi Gizi pada Ibu Hamil yang terlaksana	Kabupaten Bone Kabupaten Enrekang	2 Kab/Kota	350,000,000.0	APBD Prov		2 Kab/Kota	450,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	04	009	Pendampingan dalam Pemanfaatan Paket Intervensi Gizi pada Anak	Jumlah pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi Gizi pada Anak	Kabupaten Bone Kabupaten Enrekang	2 Kab/Kota	350,000,000.0	APBD Prov		2 Kab/Kota	450,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	04	010	Penyediaan Intervensi Gizi pada Ibu Hamil dalam rangka Penanggulangan Stunting	Jumlah Intervensi Gizi pada Ibu Hamil	Kabupaten Bone Kabupaten Enrekang	5642 Orang	4,289,669,020.0	APBD Prov		5642 Orang	4,289,669,020.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	04	011	Penyediaan Intervensi Micronutrient pada Anak Umur 6 - 24 Bulan dalam rangka Penanggulangan Stunting	Jumlah Intervensi Micronutrient pada Anak Umur 6-24 Bulan	Kabupaten Bone Kabupaten Enrekang	4878 Orang	702,432,000.0	APBD Prov		4878 Orang	702,432,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi. (Prioritas)		6 Unit	653,669,842.0			6 Unit	452,807,939.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	05	024	Pengembangan Infrastruktur Organisasi dan Manajemen RS	Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan RS	Kota Makassar Kota Makassar	2 Dokumen	653,669,842.0	APBD Prov		2 Dokumen	452,807,939.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07		PROGRAM KEFARMASIAN, ALAT KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	% Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar % Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang dibina Pemenuhan Rasio Tenaga Kesehatan % Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang baik % Produk Alkes dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat		80 % 60 % 90 % 59 % 91.1 %	8,254,753,442.0			85 % 65 % 95 % 61 % 91.1 %	8,252,756,482.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	02	01.00	07	001	Pengadaan Obat	Jumlah item obat yang disiapkan sebagai Buffer Stock Provinsi	Kota Makassar Kota Makassar	25 item obat	200,000,000.0	APBD Prov		25 item obat	200,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	002	Pembekalan Tenaga Kesehatan pada Penerapan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Masyarakat	Jumlah tenaga kesehatan yang dibekali dalam penerapan POR (Penggunaan Obat Rasional)	Provinsi Sulawesi Selatan	200 Orang	120,000,000.0	APBD Prov		150 Orang	150,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	003	Sosialisasi E-Monev RKO (Rencana Kebutuhan Obat) untuk RS Swasta Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi e-Monev RKO	Provinsi Sulawesi Selatan	60 Orang	70,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	004	Pemetaan Sarana Distribusi Obat BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dan Vaksin	Jumlah sarana distribusi obat yang dipetakan	Provinsi Sulawesi Selatan	110 Sarana	175,000,000.0	APBD Prov		125 Sarana	200,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	005	Pembekalan Tenaga Kesehatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik di Kab/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang dibekali untuk pembinaan	Provinsi Sulawesi Selatan	32 Tenaga Kesehatan	125,000,000.0	APBD Prov		32 Tenaga Kesehatan	100,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	006	Pembinaan dan Produksi Makanan Bagi Kader Kesehatan	Jumlah kader kesehatan yang dibina dalam produksi makanan	Provinsi Sulawesi Selatan	60 Orang	70,000,000.0	APBD Prov		70 Orang	70,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	007	Pertemuan Pelaksanaan Permenkes 70 Tahun 2014 dalam Penerbitan Sertifikasi Produksi Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Permenkes 70 Tahun 2014	Kota Makassar Kota Makassar	24 Kab/Kota	120,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	120,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	008	Monev Ketersediaan Alat Kesehatan Kab/Kota berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014	Jumlah Kab/Kota yang telah memiliki data ketersediaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas	Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	100,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	100,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	009	Konsultasi Pelaksanaan Sampling Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Jumlah sampel produk Alat Kesehatan dan PKRT yang teruji di BPFK dan BBPOM	Jakarta Jakarta	2 Jenis sampel (alkes&PKRT)	24,000,000.0	APBD Prov		2 Jenis sampel (alkes&PKRT)	24,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	010	Survei ke Sarana Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dalam rangka Perizinan	Jumlah Sarana yang telah disurvei dalam rangka perizinan	Kota Makassar Kota Makassar	40 Sarana PAK/PKRT	50,000,000.0	APBD Prov		30 Sarana PAK/PKRT	45,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	011	Peningkatan Kapasitas Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Surveilans Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mampu melaksanakan Surveilans Produk	Provinsi Sulawesi Selatan	58 Pengelola Program	120,000,000.0	APBD Prov		58 Pengelola Program	120,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	012	Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Jumlah Dokumen tentang data kondisi sarana produksi Alkes dan PKRT yang memenuhi penerapan persyaratan perizinan dan cara pembuatan yang baik	Kabupaten Gowa Kabupaten Maros Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Parepare	80 Dokumen Sarana PAK/PKRT	61,000,000.0	APBD Prov		80 Dokumen Sarana PAK/PKRT	61,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	013	Monev Pelaksanaan Program Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan program Alat Kesehatan dan PKRT	Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	115,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	115,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	014	Pendataan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah jenis profesi tenaga kesehatan di Kab/Kota	Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Bantaeng Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Barru Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Bone	22 Jenis Profesi	100,000,000.0	APBD Prov		22 Jenis Profesi	100,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Bulukumba Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Enrekang Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Gowa Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Jeneponto Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Selavar Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Luwu Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Luwu Timur Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Luwu Utara Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Maros Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Pinrang Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Sidenreng Rappang							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Sinjai Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Soppeng Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Takalar Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Tana Toraja Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Toraja Utara Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kabupaten Waio Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kota Makassar Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kota Palono Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota Kota Parepare							
1.01	02	01.00	07	015	Pertemuan Sosialisasi Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemenuhan SDMK di Provinsi	Kota Makassar	30 Orang	80,000,000.0	APBD Prov		30 Orang	85,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	017	Pertemuan Sosialisasi Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Kabupaten	Jumlah peserta Sosialisasi Pemenuhan SDMK di Kabupaten	Kota Makassar Kota Makassar	111 Orang	155,000,000.0	APBD Prov		111 Orang	120,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	018	Pertemuan Pengelola Program Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Jumlah peserta Pertemuan Pengelola SDMK	Kota Makassar Kota Makassar	24 Orang	80,000,000.0	APBD Prov		24 Orang	85,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	019	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya pemenuhan tenaga kesehatan sesuai analisis beban kerja	Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Bantaeng Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Barru Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Bone Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Bulukumba	24 Kab/Kota	115,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	120,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Enrekang Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Gowa Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Jeneponto Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Selavar Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Luwu Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Luwu Timur Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Luwu Utara Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Maros Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Pinrang Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Sidenreng Rappang Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Sinjai Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Soppeng Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Takalar Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Tana Toraja Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Toraja Utara Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Wajo Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kota Makassar Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kota Palopo Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kota Parepare							
1.01	02	01.00	07	025	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih	Provinsi Sulawesi Selatan	27 Orang (9 Kategori)	300,000,000.0	APBD Prov		27 Orang (9 Kategori)	300,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	02	01.00	07	026	Pengadaan Bahan Obat-Obatan, Bahan Kimia, Bahan Laboratorium, dan Bahan Logistik Kesehatan	Jumlah Obat-Obatan, Bahan Kimia, Bahan Laboratorium, dan Bahan Logistik Kesehatan	Provinsi Sulawesi Selatan	150 Jenis	1,699,912,381.0	APBD Prov		150 Jenis	1,699,912,381.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	027	Pengadaan Alat - Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Jenis	1,057,698,605.0	APBD Prov		10 Jenis	1,071,510,276.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	028	Pertemuan Koordinasi Lintas sektor Pemenuhan NAKES di Provinsi	Jumlah peserta Koordinasi Upaya Pemenuhan NAKES di Provinsi	Kota Makassar Kota Makassar	30 Orang	97,000,000.0	APBD Prov		30 Orang	97,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	029	Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pemenuhan NAKES di Kab/Kota	Jumlah peserta koordinasi dalam upaya pemenuhan NAKES di Kab/Kota	Kota Makassar Kota Makassar	78 Orang	135,000,000.0	APBD Prov		78 Orang	135,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	036	Sosialisasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah jenis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	Kota Makassar Kota Makassar	7 Jenis Jafung	140,000,000.0	APBD Prov		8 Jenis Jafung	140,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	037	Sosialisasi Pemberdayaan Tenaga Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemberdayaan Tenaga Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan	Kota Makassar Kota Makassar	74 orang	140,000,000.0	APBD Prov		74 orang	140,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	038	Koordinasi Upaya Pemenuhan Tenaga Kesehatan pada 6 Rumah Sakit	Jumlah peserta koordinasi pemenuhan tenaga kesehatan 6 RS Regional	Kota Makassar Kota Makassar	50 RS	120,000,000.0	APBD Prov		50 RS	120,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	039	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan	Kota Makassar Kota Makassar	70 orang	140,000,000.0	APBD Prov		70 orang	140,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	040	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan SDM Kesehatan	Kota Makassar Kota Makassar	107 orang	135,000,000.0	APBD Prov		107 orang	135,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	041	Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah jenis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Kota Makassar Kota Makassar	7 Jenis Jafung	135,000,000.0	APBD Prov		8 Jenis Jafung	135,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	042	Pemetaan Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Swasta/Klinik/TNI/POLRI	Jumlah pemetaan tenaga kesehatan pada RS Swasta/Klinik/TNI/POLRI	RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Bantaeng RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Barru RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Bone RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Bulukumba RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Enrekang RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Gowa RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Jeneponto	30 RS	100,000,000.0	APBD Prov		40 RS	100,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Selavar							
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Luwu							
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Luwu Timur							
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Luwu Utara							
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Maros							
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan							
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Pinrang							
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Sidenreng Rappang							
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Sinjai							
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Soppeng							
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Takalar							
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Tana Toraja							
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Toraja Utara							
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kabupaten Wajo							
						RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kota Makassar							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kota Palopo RS Swasta/Klinik/TNI /POLRI Kab/Kota Kota Parepare							
1.01	02	01.00	07	043	Identifikasi dan pemetaan Produsen makanan Khusus yang beredar	Jumlah produsen makanan khusus yang beredar dan telah diidentifikasi serta dipetakan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare	45 Produsen	110,000,000.0	APBD Prov		50 Produsen	115,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	044	Sosialisasi Peraturan Per UU No 24 tahun 2018	Jumlah sarana yang telah tersosialisasi dengan Per UU No 24 Tahun 2018	Kota Makassar	60 Sarana	92,680,485.0	APBD Prov		80 Sarana	95,244,275.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	045	Jejaring Obat dan Pangan dengan Lintas Sektor	Terbentuknya jejaring Obat dan pangan dalam lintas sektor	Kota Makassar	20 orang	80,000,000.0	APBD Prov		30 orang	85,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	046	Evaluasi Penerapan Gema Cermat dalam pemberdayaan Masyarakat bagi tenaga Apoteker dan Apoteker Agent Of Change(AOC)	Jumlah tenaga Apoteker dan Apoteker AOC yang telah dievaluasi Penerapan Gema Cermat dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kota Makassar	130 Apoteker	135,000,000.0	APBD Prov		140 Apoteker	140,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	047	Sosialisasi dan Pembekalan Gema Cermat dalam Pemberdayaan Masyarakat bagi Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang telah dibekali Gema Cermat dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kota Makassar	200 orang	155,000,000.0	APBD Prov		200 orang	160,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	048	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan E-Logistik dan E-Purchasing	Jumlah kab/Kota yang telah menerapkan E-Logistik dan E-Purchasing	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba	24 Kab/Kota	135,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	140,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare							
1.01	02	01.00	07	049	Forum /Advokasi Pengelolaan Obat Satu Pintu (One Gate Policy)	Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan pengelolaan Obat satu pintu (One Gate Policy) di Instansi farmasi Kab/Kota	Kota Makassar	24 Kab/Kota, Provinsi	210,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota, Provinsi	217,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	050	Pertemuan Koordinasi Pengawasan Praktek Kesehatan Ilegal	Jumlah peserta pertemuan koordinasi pengawasan praktek kesehatan ilegal	Kota Makassar Kota Makassar	30 orang	140,000,000.0	APBD Prov		0 orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	051	Monev Pelaksanaan Program Sumber Daya Kesehatan di Kab/Kota	Jumlah pemantauan program sumber daya kesehatan pada kab/kota	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar	24 kab/kota	100,000,000.0	APBD Prov		24 kab/kota	100,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare							
1.01	02	01.00	07	052	Advokasi Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan advokasi pemenuhan 5 jenis profesi tenaga kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di kab/kota	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare	24 Kab/Kota	100,680,486.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	120,244,275.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	053	Monev ketersediaan alat Kesehatan disarana Pelayanan Rujukan	Jumlah kab/Kota yang melaksanakan permenke 56 tahun 2014	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang	24 Kab/Kota	126,660,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	126,660,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo							
1.01	02	01.00	07	054	Bimtek Ketersediaan Alat Kesehatan di sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah kab/Kota yang melaksanakan Permenkes 75 Tahun 2014	Provinsi Sulawesi Selatan	20 orang	95,000,000.0	APBD Prov		20 orang	125,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	055	Pembekalan SDM dalam penerapan CDAKB bagi Perusahaan dan Kab/Kota	Jumlah sarana PAK yang mengusulkan permohonan sertifikasi CDAKB	Kota Makassar Kota Makassar	20 Sarana Alkes	120,000,000.0	APBD Prov		20 Sarana Alkes	150,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	056	Advokasi penggunaan Alkes dalam negeri dan PKRT yang baik dan benar	Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Alkes dalam Negeri	Provinsi Sulawesi Selatan	24 Sarana PAK/PKRT	188,000,000.0	APBD Prov		24 Sarana PAK/PKRT	205,699,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	057	Pembekalan SDM dalam Mengaplikasikan e-Report bagi sarana Distribusi Alkes dan PKRT	Jumlah Sarana Distribusi dan Produksi Alkes dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan dan Distribusi yang baik (54%)	Kota Makassar Kota Makassar	95 Alkes dan PKRT	193,121,485.0	APBD Prov		80 Alkes dan PKRT	205,699,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	058	Survei Sarana dalam rangka sertifikasi CDAKB(cara Distribusi Alat Kesehatan yang baik) dan CPPKRTB (cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang baik)	Jumlah sarana yang disurvei dan tersertifikasi	Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Parepare	20 Sarana	30,000,000.0	APBD Prov		20 Sarana	49,486,275.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	07	059	Edukasi gerakan masyarakat terhadap Penggunaan Alkes dan PKRT yang benar	Jumlah masyarakat yang menggunakan Alkes dan PKRT yang baik	Kota Makassar	60 orang	164,000,000.0	APBD Prov		60 orang	189,301,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08		PROGRAM PROMOSI KESEHATAN, BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (Prioritas)	Prevalensi Balita Kurus (Wasting) Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (Underweight) Prevalensi Balita Stunting (Prioritas) Jumlah Kematian Ibu % Kabupaten Kota yang memiliki kebijakan PHBS Jumlah Kematian Bayi % Lansia Usia ≥ 60 Tahun yang mendapat pelayanan Santun Lansia % Posyandu Aktif		8.25 % 20.3 % 33 % 112 Kasus 45 % 1057 Kasus 65 % 61 %	2,657,684,500.0			8.25 % 18.5 % 33 % 111 Kasus 45 % 1057 Kasus 70 % 61 %	2,329,770,382.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	001	Lomba Posyandu Terbaik Tingkat Provinsi	Jumlah Posyandu terbaik tingkat Provinsi	Posyandu terpilih Provinsi Sulawesi Selatan	5 Posyandu	148,142,250.0	APBD Prov		5 Posyandu	156,160,582.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	007	Penyebaran Informasi Kesehatan Melalui Kampanye Kesehatan	Jumlah penyebaran Informasi kesehatan melalui Kampanye Kesehatan	Kota Makassar Kota Makassar	1 Kali	75,000,000.0	APBD Prov		1 Kali	75,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	008	Penyebaran Informasi Kesehatan melalui Pameran Kesehatan	Jumlah Penyebaran Informasi Kesehatan melalui Pameran	Jakarta Luar Provinsi Sulawesi Selatan	2 Kali	140,000,000.0	APBD Prov		2 Kali	150,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	011	Bimbingan Teknis dalam Upaya Penanggulangan Stunting dengan Pemanfaatan Kelas Ibu Hamil	Jumlah Petugas Gizi yang dibina dalam upaya penanggulangan Stunting melalui Kelas Ibu Hamil	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bulukumba	100 org	120,000,000.0	APBD Prov		120 org	130,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Enrekang Kabupaten Jeneponto Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai							
1.01	02	01.00	08	035	Penyusunan Draft Regulasi dan Implementasinya dalam rangka Penanggulangan Stunting	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyusunan Draft Regulasi dan Implementasi dalam rangka Penanggulangan Stunting	Kota Makassar Kota Makassar	30 Orang	350,000,000.0	APBD Prov		30 Orang	303,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	036	Pertemuan Rutin Tim AMP Provinsi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Rutin Tim AMP Provinsi	Kota Makassar Kota Makassar	35 Orang	150,000,000.0	APBD Prov		35 Orang	150,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	037	Pertemuan Pembahasan Draft Regulasi Penurunan AKI dan AKB	Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Pembahasan Draft Regulasi Penurunan AKI dan AKB	Kota Makassar Kota Makassar	35 Orang	159,400,000.0	APBD Prov		35 Orang	159,400,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	039	Pengembangan Media dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah penyebarluasan informasi melalui radio, TV, media cetak, marchandise, kelompok potensial dan evaluasi media	Kota Makassar Kota Makassar	5 Paket	190,000,000.0	APBD Prov		5 Paket	270,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	041	Pertemuan Tim terkait Penurunan Stunting	Jumlah Peserta Pertemuan Tim terkait Penurunan Stunting	Kota Makassar Kota Makassar	30 Orang	220,000,000.0	APBD Prov		30 Orang	220,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	042	Lomba Desa PHBS Tingkat Provinsi	Jumlah desa PHBS di Kabupaten/Kota yang terpilih	5 Desa terpilih 5 Kabupaten/Kota	5 Desa	148,142,250.0	APBD Prov		5 Desa	156,209,800.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	044	Pertemuan Lansia dan Geriatri Bagi Petugas Kab/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Lansia dan Geriatri	Kota Makassar Kota Makassar	30 Orang	85,000,000.0	APBD Prov		30 Orang	85,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	046	Monev Pelaksanaan Home Care di Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan Home Care di Kab/Kota	Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo Kota Palopo Kota Parepare	12 Kab/Kota	75,000,000.0	APBD Prov		0 Kab/Kota	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	047	Pertemuan Pelayanan Neonatal Esensial	Jumlah Peserta Pertemuan Pelayanan Neonatal Esensial	Kota Makassar Kota Makassar	30 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		30 Orang	100,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	048	Sosialisasi Regulasi Penurunan AKI dan AKB	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Regulasi Penurunan AKI dan AKB	Kota Makassar Kota Makassar	30 Orang	82,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	049	Pengembangan Kapasitas SDM Tenaga Promosi Kesehatan pada Konferensi Nasional Promosi Kesehatan	Jumlah Tenaga Promosi Kesehatan yang mengikuti Konas Promosi Kesehatan	Jakarta Jakarta	10 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	02	01.00	08	050	Monev Penjarangan Kesehatan Anak Sekolah	Jumlah kegiatan Penjarangan Kesehatan Anak Sekolah di Kab/Kota	24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	75,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	75,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	051	Pengembangan UKBM (SBH) melalui Perkemahan tingkat Nasional Saka Bakti Husada	Jumlah pimpinan dan anggota SBH yang mengikuti persiapan dan pelaksanaan PERTINAS SBH	Jakarta Jakarta	1 Orang	140,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	053	Monitoring dan Evaluasi Antenatal Care Terpadu sesuai Standar	Jumlah pemantauan Antenatal Care Terpadu di Kab/Kota	Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Soppeng Kabupaten Toraja Utara Kota Makassar Kota Parepare	10 Kab/Kota	75,000,000.0	APBD Prov		14 Kab/Kota	75,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	056	Monitoring dan Evaluasi Audit Maternal dan Perinatal	Jumlah Audit Maternal dan Perinatal di Kab/Kota	24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	125,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	125,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	08	057	Pertemuan Hasil Pengkajian Kasus Kematian Maternal dan Perinatal oleh Tim AMP Provinsi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Hasil Pengkajian Kasus Kematian Maternal dan Perinatal oleh Tim AMP Provinsi	Kota Makassar Kota Makassar	35 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		35 Orang	100,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) % Orang dengan HIV (ODHA) Mendapatkan Pengobatan Angka Penemuan/Kejadian Malaria per 1.000 Penduduk (API) Angka Kejadian Tuberkulosis/100.000 Penduduk (Case Notification Rate) Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam % Kab/Kota yang minimal 20% Puskesmasnya melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA % Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu		96.5 % 70 % 1 /1000 Penduduk (<) 202 /100000 Penduduk 100 % 90 % 60 %	3,468,419,457.0			96.5 % 75 % 1 /1000 Penduduk (<) 202 /100000 Penduduk 100 % 95 % 70 %	2,740,805,496.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	001	Pengembangan Provincial Epidemiologi Surveillance Team	Jumlah peserta pengembangan PEST (Provincial Epidemiologi Surveillance Team)	Kota Makassar Kota Makassar	70 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		70 Orang	100,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	02	01.00	09	002	Bimbingan Teknis Program Sistem Terpadu Penyakit	Jumlah Kab/Kota sasaran bimbingan teknis Program Sistem Terpadu Penyakit	Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Dinas Kesehatan Kota Makassar Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng Dinas Kesehatan Kabupaten Barru Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Dinas Kesehatan Kota Palopo Dinas Kesehatan Kota Parepare	24 Kab/Kota	65,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	65,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	003	Penyelidikan/Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular	Jumlah KLB penyakit menular yang tertangani	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Luwu	15 Kejadian	250,000,000.0	APBD Prov		15 Kejadian	250,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare 24 Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Selayar							
1.01	02	01.00	09	004	Pengembangan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah kab/Kota yang mengembangkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	24 kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	100,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	100,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	005	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara (Pengembangan Daerah Pilot Project)	Jumlah Peserta Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara (Pengembangan Daerah Pilot Project)	Kota Makassar	60 Orang	80,674,000.0	APBD Prov		60 Orang	80,674,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	007	Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota sasaran monitoring dan evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	100,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	100,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	008	Pemeliharaan Cold Room dan Distribusi Vaksin/Logistik	Jumlah Cold Room yang dipelihara Jumlah Kab/Kota dengan distribusi Vaksin yang berkualitas	Dinas Kesehatan Kota Makassar	1 Unit 10 Kab/Kota	135,000,000.0	APBD Prov		1 Unit 10 Kab/Kota	164,273,496.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	009	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Kesehatan Jiwa Kab/kota	Jumlah Pengelola Kesehatan Jiwa yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Kesehatan Jiwa di Kab/Kota	Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	48 Orang	53,000,000.0	APBD Prov		48 Orang	53,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	011	Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program tentang Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program tentang Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	50 Orang	30,543,000.0	APBD Prov		50 Orang	30,543,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	012	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa Provinsi	Jumlah Peserta Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa Provinsi	Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	40 Orang	65,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	013	Bimbingan Teknis Kesehatan Indra	Jumlah Petugas/Pengelola Program Kesehatan Indra yang mendapat bimbingan teknis Program Kesehatan Indra	Provinsi Sulawesi Selatan	24 Orang	99,215,000.0	APBD Prov		24 Orang	99,215,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	015	Pertemuan/Review Petugas District Surveilans Officer	Jumlah Peserta Pertemuan/Reveiw Petugas District Surveilans Officer	Kota Makassar	60 Orang	53,100,000.0	APBD Prov		60 Orang	53,100,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	02	01.00	09	022	Penggandaan /Cetak Format Hepatitis	Jumlah Format Pencatatan Hepatitis yang tersedia	Kota Makassar	100 Exemplar	20,000,000.0	APBD Prov		100 Exemplar	20,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	023	Pemantauan Evaluasi Program Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	Jumlah Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi Program Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng Kabupaten Bantaeng Dinas Kesehatan Kab. Barru Kabupaten Barru Dinas Kesehatan Kab. Bone Kabupaten Bone Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba Kabupaten Bulukumba Dinas Kesehatan Kab. Enrekang Kabupaten Enrekang Dinas Kesehatan Kab. Gowa Kabupaten Gowa Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto Kabupaten Jeneponto Dinas Kesehatan Kab. Luwu Kabupaten Luwu Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara Dinas Kesehatan Kab. Maros Kabupaten Maros Dinas Kesehatan Kab. Pangkep Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dinas Kesehatan Kab. Pinrang Kabupaten Pinrang Dinas Kesehatan Kab. Selayar Kabupaten Selayar Kepulauan Selayar Dinas Kesehatan Kab. Sidrap Kabupaten Sidenreng Rappang Dinas Kesehatan Kab. Sinjai Kabupaten Sinjai Dinas Kesehatan Kab. Soppeng Kabupaten Soppeng Dinas Kesehatan Kab. Takalar Kabupaten Takalar Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja Kabupaten Tana Toraja	24 Kab/Kota	45,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	45,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Kabupaten Toraja Utara Dinas Kesehatan Kab. Wajo Kabupaten Waio Dinas Kesehatan Kota Makassar Kota Makassar Dinas Kesehatan Kota Palopo Kota Palopo Dinas Kesehatan Kota Parepare Kota Parepare							
1.01	02	01.00	09	024	Bimbingan Teknis dan Supportif Program Pengendalian Penyakit Tuberculosis	Jumlah petugas/pengelola program TB yang yang mendapat bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program P2 TB	Kabupaten Bone Kabupaten Bone Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Kabupaten Wajo Kabupaten Wajo Kota Palopo Kota Palopo Kota Parepare Kota Parepare	15 orang	25,000,000.0	APBD Prov		0 orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	025	Pengadaan/Cetak Format RR Tuberculosis	Jumlah Format Pencatatan Program TB, TB MDR, dan TB HIV yang tersedia	Kota Makassar Kota Makassar	1 Paket	20,000,000.0	APBD Prov		1 Paket	20,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	026	Pengadaan Format RR P2 Kusta	Jumlah Format Pencatatan dan Pelaporan program P2 Kusta yang tersedia	Kota Makassar Kota Makassar	4 Paket Format	10,000,000.0	APBD Prov		4 Paket Format	10,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	029	Pengadaan Logistik Arbovirosis	Jumlah Rapid Diagnostik TEST Demam Berdarah Dengue (DBD) yang tersedia	Kota Makassar Kota Makassar	48 paket	60,000,000.0	APBD Prov		36 paket	45,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	030	Monitoring dan Evaluasi Program Malaria	Jumlah Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan program Malaria	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Gowa Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Soppeng Kabupaten Tana Toraja Kota Parepare 10 Kab/kota Kabupaten Toraja Utara	10 Kab/Kota	40,000,000.0	APBD Prov		10 Kab/Kota	40,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	031	Monitoring dan Evaluasi Program Zoonosis	Jumlah Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan program Zoonosis	Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur	14 Kab/Kota	50,000,000.0	APBD Prov		14 Kab/Kota	60,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Wajo Kota Parepare							
1.01	02	01.00	09	032	Supervisi Supportif Program P2 ISPA	Jumlah Kab/Kota sasaran pembinaan dalam rangka pelaksanaan Program P2 ISPA	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Gowa Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Pinrang Kabupaten Soppeng Kabupaten Tana Toraja Kota Palopo Kota Parepare	12 Kab/Kota	40,000,000.0	APBD Prov		12 Kab/Kota	50,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	033	Monitoring dan Evaluasi Program Vektor	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dalam rangka pelaksanaan Program Vektor	Kabupaten Bone Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara	6 Kab/Kota	30,000,000.0	APBD Prov		6 Kab/Kota	30,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	034	Stool Survey	Jumlah pelaksanaan Survey Prevalensi Kecacingan pada Anak Pra Sekolah dan Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah pada Kab/Kota	Kabupaten Wajo Kota Makassar	2 Kab/Kota	60,000,000.0	APBD Prov		2 Kab/Kota	60,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	049	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program P2 HIV	Jumlah Kab/kota yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan program HIV	Kabupaten Bone Kabupaten Enrekang Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng	6 Kab/kota	40,000,000.0	APBD Prov		10 Kab/kota	50,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	050	Work Shop Advokasi Imunisasi	Jumlah Peserta Work Shop Advokasi Imunisasi	Dinas Kesehatan Provinsi Kota Makassar	25 Orang	30,887,457.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	051	Supervisi Supportif Program Imunisasi	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan program imunisasi	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng	12 Kab/Kota	27,000,000.0	APBD Prov		12 Kab/Kota	30,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Dinas Kesehatan Kota Parepare							
1.01	02	01.00	09	053	Pemeliharaan Mobil Box Angkutan Vaksin	Jumlah mobil angkutan vaksin yang dipelihara	Kota Makassar Kota Makassar	1 Unit	15,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	20,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	054	Monitoring dan Evaluasi Program P2 Kusta	Jumlah Kab/kota yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan Program Kusta	Kabupaten Bone Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Pinrang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng 7 Kab/kota Kabupaten Tana Toraja	7 Kab/kota	30,000,000.0	APBD Prov		7 Kab/kota	30,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	055	Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Imunisasi	Jumlah Peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Imunisasi	Dinas Kesehatan Provinsi Kota Makassar	24 Orang	59,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	058	Pelatihan Kapasitas Petugas SKDR	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas SKDR	Kota Makassar Kota Makassar	48 Orang	150,000,000.0	APBD Prov		48 Orang	150,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	059	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program P2 Hepatitis	Jumlah Petugas Kesehatan yang mendapat bimtek dalam rangka pelaksanaan program Hepatitis	Dinas Kesehatan Kab. Luwu Kabupaten Luwu Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara Dinas Kesehatan Kab. Pinrang Kabupaten Pinrang Dinas Kesehatan Kab. Selayar Kabupaten Kepulauan Selavar Dinas Kesehatan Kab. Soppeng Kabupaten Soppeng	8 Kab/kota	45,000,000.0	APBD Prov		8 Kab/kota	45,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja Kabupaten Tana Toraja Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Kabupaten Toraja Utara							
1.01	02	01.00	09	060	Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana/krisis kesehatan	Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesehatan	24 Kab/kota	40,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/kota	40,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	061		Jumlah Identitas Petugas dan Logistik Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan yang tersedia	Kota Makassar Kota Makassar	2 Paket	10,000,000.0	APBD Prov		2 Paket	10,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	062	Pemeliharaan Kapal Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan	Jumlah Kapal Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan Terpelihara	Kota Makassar Kota Makassar	2 Unit	100,000,000.0	APBD Prov		2 Unit	100,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	064	Bimtek dan Supervisi Supportif Program Bencana/Krisis Kesehatan	Jumlah Bimtek dan Supervisi Supportif Program Bencana/Krisis kesehatan yang dilaksanakan	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	50,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	50,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	065	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Bencana/Krisis Kesehatan Kab/Kota	Jumlah Pengelola Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan yang mengikuti peningkatan kapasitas petugas pengelolaan program bencana/krisis kesehatan Kab/Kota	Kota Makassar Kota Makassar	24 Kab/kota	40,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/kota	40,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	068	Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan	Jumlah Peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan	Kota Makassar Kota Makassar	30 Orang	20,000,000.0	APBD Prov		30 Orang	20,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	069	Pengadaan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan Haji	Jumlah pengadaan media KIE yang tersedia	Kota Makassar Kota Makassar	1 Paket	10,000,000.0	APBD Prov		1 Paket	10,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	070	Pemantauan Embarkasi Debarkasi	Jumlah Jemaah Haji Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar Kota Makassar	60 Orang	30,000,000.0	APBD Prov		60 Orang	30,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	072	Sosialisasi Haji Sehat Bagi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah	Jumlah Peserta Sosialisasi Haji Sehat Bagi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah	Kota Makassar Kota Makassar	30 Orang	20,000,000.0	APBD Prov		30 Orang	20,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	073	Pertemuan Terpadu Berbasis Penyakit tular vektor dan zoonotic	Jumlah Peserta Pertemuan Berbasis Penyakit Tular vektor dan zoonotic	Kota Makassar Kota Makassar	185 Orang	45,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	074	Pertemuan Terpadu Berbasis Penyakit Menular Langsung	Jumlah Peserta Pertemuan Berbasis Penyakit Menular Langsung	Kota Makassar Kota Makassar	185 Orang	45,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	075	Kampanye TBC dalam rangka hari TBC sedunia	Jumlah kegiatan kampanye TB pada kelompok masyarakat berisiko yang dilaksanakan	Kota Makassar	1 Paket	20,000,000.0	APBD Prov		1 Paket	20,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	076	Penguatan Haji Sehat Kab/kota dan Integrasi Program Kesehatan Haji	Kabupaten/Kota dengan tindak lanjut sosialisasi	Kota Makassar Kota Makassar	24 Kab/Kota	50,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	50,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	077	Workshop Orientasi Sistem Komputerisasi dan Informasi Kesehatan Haji	Jumlah Peserta Workshop Orientasi Sistem Komputerisasi dan Informasi Kesehatan Haji	Kota Makassar Kota Makassar	30 Orang	40,000,000.0	APBD Prov		30 Orang	40,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	078	Bimtek dan Supervisi Supportif Program Kesehatan Haji	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam rangka pelaksanaan program kesehatan haji	Dinas Kesehatan 15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	50,000,000.0	APBD Prov		15 Kab/Kota	50,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	02	01.00	09	079	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Kesehatan Haji Kab/Kota	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Kesehatan Haji Kab/Kota	Kota Makassar Kota Makassar	24 Kab/Kota	40,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	40,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	080	Pertemuan Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Kota Makassar Kota Makassar	24 Kab/Kota	190,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	190,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	081	Monitoring dan Evaluasi Program P2 Typoid	Jumlah petugas/pengelola program tifoid kab/kota yang mendapat bimbingan teknis pelaksanaan program Tifoid	Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Luwu Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Takalar Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Parepare	9 Kab/kota	50,000,000.0	APBD Prov		10 Kab/kota	55,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	082	Workshop Pelibatan organisasi Profesi dalam Program TB	Jumlah peserta workshop dalam rangka penyusunan rencana tindak lanjut masing masing peran organisasi profesi dalam penanggulangan TB	Kota Makassar Kota Makassar	50 Orang	30,000,000.0			0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	083	Investigasi dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan investigasi dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Wilayah terjadinya kasus KIPI Provinsi Sulawesi Selatan	7 Kab/Kota	25,000,000.0	APBD Prov		7 Kab/Kota	35,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	085	Pengadaan Media KIE Imunisasi	Jumlah Media KIE Imunisasi yang tersedia	Dinas Kesehatan Provinsi Kota Makassar	1 Paket	25,000,000.0	APBD Prov		0 Paket	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	087	Penyusunan PERDA TB	Jumlah Ranperda TB yang disusun	Kota Makassar Kota Makassar	1 Paket	100,000,000.0	APBD Prov		0 Paket	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	088	Pelatihan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM) bagi Pengelola Program Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah Pengelola Program Yang Terlatih Implementasi Kawasan tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Kota Makassar Kota Makassar	80 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	089	Monitoring dan Evaluasi Usaha Berhenti Merokok (UBM)	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar	24 Kab./Kota	70,000,000.0	APBD Prov		24 Kab./Kota	70,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Makassar Kota Palopo Kota Palopo Kota Parepare Kota Parepare Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang							
1.01	02	01.00	09	090	Monitoring Impelementasi KTR di Kantor	Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan Impelementasi Kawasan Tanna Rokok (KTR)	24 Kab./Kota Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab./Kota	70,000,000.0	APBD Prov		24 Kab./Kota	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	091	Worshop Hipertensi	Jumlah Peserta Workshop Hipertensi	Kota Makassar Kota Makassar	50 Orang	70,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	093	Pertemuan Koordinasi Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL)	Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL)	Kota Makassar Kota Makassar	50 Orang	70,000,000.0	APBD Prov		50 Orang	70,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	094	Sosialisasi Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi Tenaga Kesehatan dan Guru	Jumlah Peserta Sosialisasi IPWL bagi Tenaga Kesehatan dan Guru	Kota Makassar Kota Makassar	50 Orang	60,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	09	098	Monev Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Deteksi Dini Melalui Pelayanan Terpadu (PANDU) Penyakit Tidak Menular (PTM)	24 Kab./Kota Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab./Kota	70,000,000.0	APBD Prov		0 Kab./Kota	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10		PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA	% Puskesmas yang mengembangkan Program Kesehatan Kerja % Kualitas Air Minum Memenuhi Syarat % Puskesmas yang mengembangkan Program Kesehatan Olahraga		88 % 89 % 70 %	616,317,280.0			88 % 89 % 70 %	245,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Cakupan Akses Sanitasi Dasar		93 %				93 %		
1.01	02	01.00	10	001	Pembinaan dan Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan Tatanan Kawasan Sehat	24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab./Kota Swasti Saba Wistara	150,000,000.0	APBD Prov		0 Kab./Kota Swasti Saba Wistara	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10	005	Konsultasi Teknis Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah klasifikasi penghargaan Swasti Saba	24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab./Kota Swasti Saba Wistara	50,000,000.0	APBD Prov		0 Kab./Kota Swasti Saba Wistara	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10	008	Senam Sehat dan Bugar bagi Karyawan Dinas Kesehatan	Jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) yang mengikuti senam setiap pelaksanaan senam	Kota Makassar Kota Makassar	100 orang	50,000,000.0	APBD Prov		100 orang	40,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10	016	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Sehat	Jumlah Kawasan Sehat melalui pendekatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/kota	24 kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/kota	101,317,280.0	APBD Prov		24 Kab/kota	80,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10	018	Pengamatan Dampak Keterpaparan Peptisida terhadap pekerja informal	Jumlah pengamatan dampak keterpaparan peptisida terhadap pekerja informal	24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan	60 Orang	20,000,000.0	APBD Prov		60 Orang	30,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10	020	Pembinaan Kesehatan Kerja Sektor Informal di Kabupaten	Jumlah kabupaten yang dibina sektor informalnya	24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/kota	35,000,000.0	APBD Prov		0 Kab/kota	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10	021	Pertemuan Rutin Tim Gerakan Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	Jumlah peserta pertemuan rutin tim GP2SP	Kota Makassar Kota Makassar	30 Orang	10,000,000.0	APBD Prov		30 Orang	10,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10	022	Pemantauan Tim Gerakan Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) ke Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang di pantau	Kota Makassar Kota Makassar	30 Perusahaan Binaan	10,000,000.0	APBD Prov		30 Perusahaan Binaan	10,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10	023	Pembinaan Sarana Kesehatan Pemeriksa Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Sarana Kesehatan PMI yang di Bina	Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bulukumba Kota Makassar Kota Parepare	3 Sarkes	10,000,000.0	APBD Prov		4 Sarkes	10,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10	024	Pemantauan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Lingkungan Kerja Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di pantau	Kota Makassar Kota Makassar	20 Faskes	20,000,000.0	APBD Prov		20 Faskes	20,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10	025	Pengadaan Rambu-Rambu Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) di Lingkup Dinas Kesehatan Prov. Sulsel	Jumlah dan Jenis Rambu-Rambu K3	Kota Makassar Kota Makassar	5 Jenis	10,000,000.0	APBD Prov		5 Jenis	10,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10	026	Pengamatan Penyakit akibat Kerja di Daerah Migran	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengamatan penyakit akibat kerja di Daerah Migran	Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bulukumba Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai	2 Kab/kota	10,000,000.0	APBD Prov		2 Kab/kota	10,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10	027	Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi Karyawan Dinas Kesehatan Prov. Sulsel	Jumlah peserta yang diukur kebugarannya	Kota Makassar Kota Makassar	50 Orang	25,000,000.0	APBD Prov		50 Orang	25,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10	029	Bimbingan Teknis Percepatan Desa STBM	Jumlah Desa STBM	Desa dengan cakupan STBM rendah Provinsi Sulawesi Selatan	24 Desa	75,000,000.0	APBD Prov		0 Desa	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	10	030	Pelaksanaan Verifikasi Desa STBM	Jumlah Desa STBM	Desa STBM Provinsi Sulawesi Selatan	10 Desa	40,000,000.0	APBD Prov		0 Desa	0.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	11		PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Cakupan Kepesertaan Kemitraan Asuransi Kesehatan Menuju Universal Coverage		100 % 100 %	466,907,030.0			100 % 100 %	378,538,626.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	11	001	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Gratis Integrasi ke dalam Program JKN/KIS	Jumlah peserta Pertemuan Evaluasi dalam rangka Pemantapan Kesehatan Gratis Integrasi ke Program JKN	Kota Makassar Kota Makassar	100 Orang	76,907,030.0	APBD Prov		100 Orang	60,638,626.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	02	01.00	11	002	Deseminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke Program JKN	Jumlah Sosialisasi dan informasi Kesehatan Gratis Integrasi ke program JKN melalui Media Cetak dan Elektronik	Kota Makassar Kota Makassar	4 kali	65,000,000.0	APBD Prov		4 kali	65,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	11	003	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke Program JKN	Jumlah kab./kota sasaran monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan gratis integrasi JKN	24 Kab./Kota Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab./Kota	95,000,000.0	APBD Prov		24 Kab./Kota	75,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	11	005	Konsultasi & Bimtek Pemantapan Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke Program ke JKN	Jumlah Petugas/pengelola JKN Kab/Kota mendapat bimbingan teknis dan jumlah pengelola JKN Provinsi yang melakukan konsultasi ke Pusat	Dinas Kesehatan 24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	168 Orang	105,500,000.0	APBD Prov		168 Orang	75,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	11	006	Monitoring Evaluasi Pelaporan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Fasilitas Kesehatan	Jumlah kab./kota sasaran monitoring dan evaluasi pelaporan yan kes penduduk miskin di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	82,500,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	72,500,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	11	007	Advokasi & Sosialisasi dalam rangka Sulawesi Selatan menuju Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2019	Jumlah kab./kota sasaran advokasi dan sosialisasi dalam rangka Sulawesi Selatan menuju Universal Health Coverage (UHC) 2019	Kab/Kota yang belum UHC Provinsi Sulawesi Selatan	12 Kab./Kota	42,000,000.0	APBD Prov		11 Kab./Kota	30,400,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	7,871,233,570.0			100 %	7,895,657,711.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Kota Makassar	12 Bulan	1,605,000,000.0	APBD Prov		12 Bulan	1,605,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Kota Makassar	51 Unit 23 Unit	150,000,000.0	APBD Prov		51 Unit 23 Unit	150,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kantor Dinkes Prov.Sulsel Kota Makassar	65 Orang	2,230,800,000.0	APBD Prov		65 Orang	2,230,800,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Kota Makassar	36 Jenis ATK	800,000,000.0	APBD Prov		36 Jenis ATK	800,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Kota Makassar	35 Unit	250,000,000.0	APBD Prov		40 Unit	250,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Kota Makassar	3 Jenis	2,179,613,570.0	APBD Prov		3 Jenis	2,138,455,711.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu	122 Kali	655,820,000.0	APBD Prov		127 Kali	721,402,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare Pusat							
1.01	02	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	5,397,445,267.0			100 %	5,488,810,077.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	Kota Makassar	4 Unit	400,000,000.0	APBD Prov		4 Unit	400,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Kota Makassar	8 Unit	2,081,496,140.0	APBD Prov		8 Unit	2,167,545,868.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	23 Unit	700,000,000.0	APBD Prov		23 Unit	700,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Kota Makassar	5 Unit	136,500,000.0	APBD Prov		5 Unit	136,500,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	20 Unit	100,000,000.0	APBD Prov		20 Unit	100,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Kota Makassar	105 Unit	1,200,000,000.0	APBD Prov		105 Unit	1,200,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Kota Makassar	90 Unit	479,449,127.0	APBD Prov		90 Unit	484,764,209.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembanekan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Kantor Dinkes Prov.Sulsel Kota Makassar	10 Sistem Informasi/Aplikasi 200 Berita/Informasi	300,000,000.0	APBD Prov		10 Sistem Informasi/Aplikasi 200 Berita/Informasi	300,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	373,525,624.0			100 %	378,538,626.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Orang	65,000,000.0	APBD Prov		100 Orang	65,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Kantor Dinkes Prov.Sulsel Kota Makassar	4 Dokumen 2 Dokumen	140,000,000.0	APBD Prov		4 Dokumen 2 Dokumen	145,000,000.0	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		0 Dokumen 4 Dokumen				0 Dokumen 4 Dokumen		
1.01	02	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Kantor Dinkes Prov.Sulsel Kota Makassar	84 Laporan 20 Jenis	124,600,000.0	APBD Prov		84 Laporan 20 Jenis	124,600,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kantor Dinkes Prov.Sulsel Kota Makassar	12 Laporan	17,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	17,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kantor Dinkes Prov.Sulsel Kota Makassar	2 Laporan	10,400,000.0	APBD Prov		2 Laporan	10,400,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Kantor Dinkes Prov.Sulsel Kota Makassar	1 Laporan	16,525,624.0	APBD Prov		1 Laporan	16,538,626.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	535,000,000.0			100 %	535,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaianya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Kota Makassar	527 Orang 8 Laporan	60,000,000.0	APBD Prov		527 Orang 8 Laporan	60,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Kota Makassar	468 Pasang	200,000,000.0	APBD Prov		468 Pasang	200,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Kota Makassar	508 Pasang	200,000,000.0	APBD Prov		508 Pasang	200,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar Kota Makassar	40 Orang	75,000,000.0	APBD Prov		40 Orang	75,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	01.01			UPT Transfusi Darah				14,087,682,232.96				14,258,079,298.51	
1.01	02	01.01	03		PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang memperoleh transfusi darah		100 %	9,457,778,825.61			100 %	9,565,273,186.37	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	03	001	Peningkatan Pelayanan Penyediaan Darah	Jumlah pengumpulan darah dalam dan luar gedung	Kota Makassar	36000 Pendoron	7,435,000,247.0			38000 Pendoron	7,506,000,250.0	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	03	002	Uji saring dan Quality Control	Jumlah jenis pemeriksaan pada proses laboratorium uji saring darah donor terhadap penyakit HIV, Sypilis, Hepatitis B, Hepatitis C, dan proses uji silang serasi antara darah donor dengan darah pasien di UTD Prov. Sulsel	Kota Makassar	4 jenis pemeriksaan	1,749,983,973.0			4 jenis pemeriksaan	1,786,478,330.76	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	03	003	Pemusnahan Limbah Medis	Jumlah limbah medis dari hasil pengolahan darah transfusi yang dimusnahkan	Kota Makassar	5857 kg	205,000,000.0			5857 kg	205,000,000.0	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	03	006	Pelestarian Donor Darah Sukarela	Jumlah jenis penghargaan yang diterima	Kota Makassar	5 Jenis	67,794,605.61			5 Jenis	67,794,605.61	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	3,916,597,892.54			100 %	3,962,320,278.30	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	200,000,000.0			12 Bulan	210,000,000.0	UPT Transfusi Darah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	02	01.01	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	10 Unit 1 Unit	470,000,000.0			10 Unit 1 Unit	500,000,000.0	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	384 Orang	1,064,800,000.0			384 Orang	1,064,800,000.0	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	36 Jenis ATK	320,000,000.0			36 Jenis ATK	320,000,000.0	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	12 Unit	55,000,000.0			12 Unit	55,000,000.0	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	3 Jenis	1,410,000,000.0			3 Jenis	1,410,000,000.0	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Pusat/Prov/Kab/Kota	79 Kali	396,797,892.54			80 Kali	402,520,278.30	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	686,036,465.08			100 %	702,861,750.58	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	1 Unit	155,000,000.0			1 Unit	155,000,000.0	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	11 Unit	170,000,000.0			11 Unit	180,000,000.0	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	14 Unit	220,000,000.0			15 Unit	220,000,000.0	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		12 Unit	95,000,000.0			12 Unit	100,000,000.0	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan		1 Sistem Informasi/Aplikasi	46,036,465.08			1 Sistem Informasi/Aplikasi	47,861,750.58	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	27,269,049.73			100 %	27,624,083.26	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia		70 Pasang	18,559,464.0			70 Pasang	18,759,464.0	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.01	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi tentang pelayanan darah		100 orang	8,709,585.73			100 orang	8,864,619.26	UPT Transfusi Darah
1.01	02	01.02			UPT Pelatihan Kesehatan				4,068,684,230.90				3,821,657,082.87	
1.01	02	01.02	17		PROGRAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TENAGA KESEHATAN	Cakupan Tenaga Kesehatan yang telah bersertifikasi		100 %	1,475,000,000.0			100 %	1,775,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	17	001	Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikut diklat teknis kesehatan		200 Tenaga Kesehatan	300,000,000.0			300 Tenaga Kesehatan	400,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	17	002	Pelaksanaan Pelatihan Tekhnis Keperawatan	Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan Tekhnis Keperawatan		200 Perawat	300,000,000.0			300 Perawat	400,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	17	003	Pelaksanaan Pelatihan Tekhnis Kebidanan	Jumlah bidan yang mengikuti pelatihan tekhnis kebidanan		90 Perawat	150,000,000.0			120 Perawat	200,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	17	009	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kesehatan Olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kesehatan olahraga		90 Orang	150,000,000.0			120 Orang	200,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	17	010	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kesehatan Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan		90 Orang	150,000,000.0			120 Orang	200,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	17	011	Pelaksanaan Pelatihan Tekhnis Kefarmasian	Jumlah peserta yang megikuti pelatihan		30 Perawat	100,000,000.0			60 Perawat	150,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	17	012	Pelaksanaan Rumpun Diklat Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat jabatan fungsional kesehatan		60 Perawat	100,000,000.0			90 Perawat	150,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	02	01.02	17	021	Promosi dan Publikasi Kediklitan	Jenis Publikasi Kediklitan		3 Jenis	150,000,000.0			3 Jenis	0.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	17	024	Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Kimia Pakai Habis	Jumlah Obat-Obatan dan Bahan Kimia yg Tersedia		250 Jenis	75,000,000.0			250 Jenis	75,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	18		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAJIAN MUTU PELATIHAN TEKNIS KESEHATAN	Cakupan Pelatihan yang terakreditasi		100 %	240,000,000.0			100 %	130,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	18	001	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Akademisi / Kesehatan	Jumlah Jasa Tenaga Ahli Akademisi / Kesehatan		6 Orang	80,000,000.0			6 Orang	80,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	18	003	Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Jumlah Aparat yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		7 Orang	100,000,000.0			7 Orang	50,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	18	006	Workshop peningkatan kapasitas kelembagaan, keorganisasian, ketatalaksanaan mutu pegawai dalam lingkup UPT Pelatihan Kesehatan	Jumlah peserta workshop		50 Orang	60,000,000.0			0 Orang	0.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	1,271,514,699.0			100 %	1,317,133,449.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik		12 Bulan	350,000,000.0			12 Bulan	350,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan		10 Unit 2 Unit	7,500,000.0			10 Unit 2 Unit	10,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS		45 Orang	110,000,000.0			45 Orang	110,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	100 Jenis ATK	241,349,699.0			100 Jenis ATK	256,349,699.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	30 Unit	32,475,000.0			40 Unit	40,593,750.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	40 Jenis	180,190,000.0			40 Jenis	200,190,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	dalam dan luar kota makassar	20 Kali	350,000,000.0			20 Kali	350,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	930,669,531.90			100 %	478,023,633.87	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	51	003	Pembangunan Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dibangun		1 Unit	118,366,059.90			0 Unit	0.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	6 Unit	337,303,472.0			6 Unit	100,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		11 Unit	170,000,000.0			11 Unit	180,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	25 Unit	200,000,000.0			30 Unit	93,023,633.87	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	40 Unit	55,000,000.0			45 Unit	55,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website		0 Sistem Informasi/Aplikasi 0 Berita/Informasi	50,000,000.0			0 Sistem Informasi/Aplikasi 0 Berita/Informasi	50,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	151,500,000.0			100 %	121,500,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.02	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	170 Pasang	121,500,000.0			170 Pasang	121,500,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	02	01.02	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia		60 Pasang	30,000,000.0			0 Pasang	0.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	01.03			UPT RSK Gigi dan Mulut				12,563,901,586.87				12,727,479,210.77	
1.01	02	01.03	03		PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan		100 %	600,000,000.0			100 %	650,000,000.0	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	01.03	03	002	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut		130000 Orang	600,000,000.0	APBD Prov		140000 Orang	650,000,000.0	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	01.03	12		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSKD Gigi dan Mulut		100 %	963,901,586.87			100 %	577,479,210.77	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	01.03	12	001	Rehabilitasi sedang/berat dan pengembangan bangunan rumah sakit	Jumlah gedung yang direhabilitasi		1 Paket	463,901,586.87	APBD Prov		1 Paket	200,000,000.0	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	01.03	12	002	Pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan dan kedokteran yang diadakan	Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Kota Makassar	15 Jenis	500,000,000.0	APBD dan DAK		15 Jenis	377,479,210.77	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	01.03	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	% Peningkatan pendapatan RSKD Gigi dan Mulut		0 %	11,000,000,000.0			0 %	11,500,000,000.0	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	01.03	15	001	Peningkatan kinerja pelayanan RS BLUD	Jumlah layanan RS BLUD	RS Khusus Daerah Gigi dan Mulut Kota Makassar	14 Unit layanan	11,000,000,000.0	APBD Prov		14 Unit layanan	11,500,000,000.0	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	02.00			Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji				101,096,995,840.30				101,822,643,524.14	
1.01	02	02.00	03		PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan		90 %	430,000,000.0			95 %	380,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	03	001	Peningkatan SDM Tenaga Keperawatan	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan	Kota Makassar	40 Orang	80,000,000.0			40 Orang	80,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	03	002	Pembimbingan dan Survei Simulasi Akreditasi	Jumlah Dokumen Akreditasi Rumah Sakit	Kota Makassar	1 Dokumen	200,000,000.0			1 Dokumen	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	03	004	Pelatihan Manajemen Rawat Jalan	Jumlah peserta pelatihan	Kota Makassar	30 Orang	50,000,000.0			0 Orang	0.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	03	007	Peningkatan Kapasitas Tenaga Medik di setiap KSM	Jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi	Kota Makassar	30 Orang	50,000,000.0			30 Orang	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	03	008	Pelatihan Excellence Service	Jumlah peserta pelatihan	Kota Makassar	30 Orang	50,000,000.0			30 Orang	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelebagaannya berdasarkan spesialisasi		1 RS	350,000,000.0			1 RS	350,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	05	002	Peningkatan Mutu Spesialisasi Rumah Sakit	Jumlah peserta pelatihan tenaga Rumah Sakit	Kota Makassar	30 Orang	150,000,000.0			30 Orang	150,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	05	003	Workshop Pembuatan Clinical Patway	Jumlah peserta workshop	Kota Makassar	30 Orang	200,000,000.0			30 Orang	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	12		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Labuang Baji		80 %	39,583,795,840.30			80 %	39,631,153,524.14	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	12	001	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	Jumlah Kebutuhan Peralatan Medis RS yang tersedia	Kota Makassar	12 Bulan	20,625,584,480.0			12 Bulan	22,183,312,928.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	12	002	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rutin	Jumlah Kebutuhan Rutin Peralatana Medis RS yang tersedia	Kota Makassar	12 Bulan	150,000,000.0			12 Bulan	150,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	12	003	Peningkatan Sarana Lingkungan Rumah Sakit	Jumlah Sarana Lingkungan RS yang tersedia	Kota Makassar	1 Paket	200,000,000.0			1 Paket	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	12	004	Pembangunan Tahap III Gedung A & B dan Gedung Perawatan Anak Rumah Sakit	Jumlah Sarana Dan Prasarana RS yang terbangun	Kota Makassar	1 Paket	17,958,211,360.30			1 Paket	16,447,840,596.14	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	12	007	Pengadaan Linen Operasi	Alat Sterilisasi pada Ruang CCSD	Kota Makassar	1 Set	100,000,000.0			1 Set	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	02	02.00	12	009	Pengadaan Alat Laundry Dan Kesehatan Lainnya	Jumlah peralatan Laundry	Kota Makassar	1 Paket	500,000,000.0			1 Paket	500,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	12	010	Pengadaan Media Promosi Kesehatan RS / CHT	Jumlah Media Promosi Tentang Bahaya Rokok di RS yang tersedia	Kota Makassar	1 Paket	50,000,000.0			1 Paket	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	13		PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan sarana dan prasarana RSUD Labuang Baji dalam kondisi baik		80 %	1,550,000,000.0			80 %	1,600,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	13	001	Kalibrasi Alat Kesehatan RS	Jumlah Jenis-Jenis Alat kesehatan yang terkalibrasi	Kota Makassar	1 Paket	100,000,000.0			1 Paket	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	13	002	Pengadaan / Pemeliharaan Instalasi Sarana Dan Prasarana RS	Jumlah Instalasi Sarana Dan Prasarana RS yang dipelihara	Kota Makassar	1 Unit	500,000,000.0			1 Unit	500,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	13	003	Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman dan Sarana Parkir RS	Jumlah taman dan parkir RS yang terpelihara	Kota Makassar	2 Unit	50,000,000.0			2 Unit	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	13	004	Pemeliharaan Rutin Kebersihan Rumah Sakit	Jumlah RS yang terpelihara kebersihannya	Kota Makassar	1 RS	700,000,000.0			1 RS	750,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	13	006	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung RS	Jumlah Gedung RS yang dipelihara	Kota Makassar	1 Tahun	200,000,000.0			1 Tahun	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	% Peningkatan pendapatan RSUD Labuang Baji		100 %	48,000,000,000.0			100 %	49,000,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	15	001	Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pengelola manajemen Keuangan, Tata Kelola dan Perencanaan BLUD	Kota Makassar	12 12 Bulan	48,000,000,000.0			12 12 Bulan	49,000,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	16		PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan Obat-obatan, Makan Minum dan Logistik RS/UPTD Kesehatan		80 %	3,200,000,000.0			80 %	3,200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	16	001	Pengadaan Obat-Obatan	Jumlah pengadaan obat-obatan	Kota Makassar	12 Bulan	2,000,000,000.0			12 Bulan	2,000,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	16	003	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan bahan habis pakai	Kota Makassar	12 Bulan	1,200,000,000.0			12 Bulan	1,200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		90 %	7,106,400,000.0			90 %	7,161,840,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	190 Orang	6,552,000,000.0			190 Orang	6,552,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	2 Jenis ATK	55,000,000.0			2 Jenis ATK	60,500,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	1 Unit	330,000,000.0			1 Unit	363,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Makassar	25 Kali	169,400,000.0			25 Kali	186,340,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		60 %	281,500,000.0			60 %	299,650,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	90 Unit	181,500,000.0			90 Unit	199,650,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	Kota Makassar	1 Sistem Informasi/Aplikasi	100,000,000.0			1 Sistem Informasi/Aplikasi	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		90 %	200,000,000.0			90 %	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	50,000,000.0			1 Dokumen	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		1 Dokumen 1 Dokumen				1 Dokumen 1 Dokumen		
1.01	02	02.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	Kota Makassar	1 Usulan Kegiatan	50,000,000.0			1 Usulan Kegiatan	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	1 Laporan	50,000,000.0			1 Laporan	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	1 Laporan	50,000,000.0			1 Laporan	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		98 %	395,300,000.0			98 %	0.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	RSUD Labuang Baji Kota Makassar	1 Laporan	200,000,000.0			0 Laporan	0.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	563 Pasang	195,300,000.0			0 Pasang	0.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	03.00			Rumah Sakit Khusus Daerah				42,148,273,930.76				42,697,029,781.29	
1.01	02	03.00	12		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSKD		100 %	2,856,400,214.59			100 %	2,893,589,550.78	Rumah Sakit Khusus Daerah
1.01	02	03.00	12	002	Rehab Sedang/Berat & Pengembangan bangunan RS/UPTD Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diadakan/Dibangun/Rehab	Kota Makassar	17 Sarana	2,321,300,214.59			17 Sarana	2,358,489,550.78	Rumah Sakit Khusus Daerah
1.01	02	03.00	12	003	Pengadaan Perlengkapan RS/UPTD Kesehatan	Jumlah Jenis Perlengkapan yang Diadakan	Kota Makassar	15 Jenis	535,100,000.0			15 Jenis	535,100,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah
1.01	02	03.00	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	% Peningkatan pendapatan Rumah Sakit Khusus Daerah		100 %	31,591,276,385.64			100 %	32,002,583,804.09	Rumah Sakit Khusus Daerah
1.01	02	03.00	15	001	Peningkatan Kinerja RS BLUD	Jumlah Pendapatan Jumlah Pasien Rawat Inap Jumlah Pasien Rawat Jalan	Kota Makassar	39193 Juta Rupiah 6132 Pasien 64405 Pasien	31,591,276,385.64			41153 Juta Rupiah 7052 Pasien 74066 Pasien	32,002,583,804.09	Rumah Sakit Khusus Daerah
1.01	02	03.00	16		PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan obat-obatan, makan minum dan logistik RS/UPTD Kesehatan		100 %	1,316,938,678.77			100 %	1,334,084,761.81	Rumah Sakit Khusus Daerah
1.01	02	03.00	16	003	Pengadaan Bahan-bahan Logistik RS	Jumlah Bahan-bahan Logistik yang Diadakan	Kota Makassar	50 Jenis	1,316,938,678.77			50 Jenis	1,334,084,761.81	Rumah Sakit Khusus Daerah
1.01	02	03.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	6,383,658,651.76			100 %	6,466,771,664.61	Rumah Sakit Khusus Daerah
1.01	02	03.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	255 Orang	6,383,658,651.76			255 Orang	6,466,771,664.61	Rumah Sakit Khusus Daerah
1.01	02	04.00			Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar				59,038,765,949.87				58,907,430,125.22	
1.01	02	04.00	03		PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan		90 %	1,465,375,000.0			95 %	1,323,643,750.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	03	001	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan	Jakarta, Yogyakarta, Bali dll Luar Sulawesi Selatan Makassar Kota Makassar	40 Orang	250,000,000.0	APBD Prov		50 Orang	250,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	03	002	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Kesehatan	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	1 Dokumen	250,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	250,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	03	003	Akreditasi Rumah Sakit/ UPTD Kesehatan	Jumlah pelaksanaan survey penilaian	Jakarta, Yogyakarta dll Luar Sulsel	1 Kali	295,375,000.0	APBD Prov		1 Kali	268,643,750.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						akreditasi	RSUD Haji Makassar RSUD Haji Makassar							
1.01	02	04.00	03	005	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan	Jumlah kegiatan promosi kesehatan yang dilaksanakan	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	12 Bulan	350,000,000.0	APBD Prov		12 Bulan	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	03	006	Survey Kepuasan Pasien/ Pelanggan	Jumlah pelaksanaan survey kepuasan pasien/pelanggan	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	1 Kali	150,000,000.0	APBD Prov		1 Kali	175,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	03	007	Pengembangan Tipe Rumah Sakit	Jenis dan Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan tipe rumah sakit	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	1 Kali	170,000,000.0	APBD Prov		1 Kali	180,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi		1 RS	825,000,000.0			1 RS	925,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	05	001	Monitoring dan Evaluasi Spesialisasi Rumah Sakit	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi <u>spesialisasi rumah sakit</u>	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	1 Dokumen	125,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	225,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	05	002	Studi Kelayakan Spesialisasi Rumah Sakit	Jumlah kajian spesialisasi yang disusun	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	1 Dokumen/Kajian	350,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen/Kajian	300,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	05	003	Peningkatan Mutu dan Spesialisasi Rumah Sakit	Jumlah Aparatur kesehatan yang ditingkatkan <u>spesialisasinya</u>	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	30 Orang	350,000,000.0	APBD Prov		35 Orang	400,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	12		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Haji Makassar		87.5 %	14,176,593,082.71			90 %	13,479,999,999.50	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	12	001	Rehabilitasi Sedang/Berat dan Pengembangan Bangunan Rumah Sakit/UPTD Kesehatan	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang direhabilitasi dan dikembangkan	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	3 Unit	2,750,000,000.0	APBD dan DAK		3 Unit	1,850,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	12	002	Pengadaan Alat alat kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit/ UPTD Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	6 Jenis	8,000,000,000.0	APBD dan DAK		5 Jenis	8,000,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	12	004	Pengadaan Mebeuler Rumah Sakit/UPTD Kesehatan	Jumlah meubeler yang diadakan	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	15 Unit	120,000,000.0	APBD Prov		15 Unit	130,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	12	006	Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ UPTD Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan dikembangkan	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	1 Unit	3,306,593,082.71	APBD dan DAK		1 Unit	3,499,999,999.50	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	13		PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan sarana dan prasarana RSUD Haji Makassar dalam kondisi baik		92.5 %	1,170,000,000.0			95.5 %	1,119,415,093.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	13	001	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana rumah sakit	Jumlah jenis sarana dan prasarana Rumah Sakit yang dilakukan <u>pemeliharaan</u>	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	2 Jenis	720,000,000.0	APBD Prov		2 Jenis	669,415,093.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	13	002	Pemeliharaan rutin/ berkala alat - alat kesehatan dan kedokteran rumah sakit/ UPTD Kesehatan	Jumlah jenis/unit alkes dan alked yang dipelihara	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	10 Unit	450,000,000.0	APBD Prov		10 Unit	450,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	% Peningkatan pendapatan RSUD Haji Makassar		1 %	40,329,297,867.16			1 %	40,854,371,282.72	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	15	001	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja RS BLUD	Jumlah pasien rawat jalan yang terlayani Jumlah pasien rawat inap yang terlayani Jumlah pendapatan rumah sakit	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	29123 Pasien 10935 Pasien 40169640000 Rp	40,329,297,867.16	APBD Prov		29413 Pasien 11044 Pasien 41073456900 Rp	40,854,371,282.72	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		90 %	150,000,000.0			95 %	375,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Jakarta, Ygyakarta, Bali dll Luar Provinsi Sulsel	15 Kali	150,000,000.0	APBD Prov		20 Kali	375,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Makassar Provinsi Sulsel							
1.01	02	04.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		90 %	802,500,000.0			95 %	700,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	1 Unit	300,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	350,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	20 Unit	302,500,000.0	APBD Prov		25 Unit	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	10 Berita/Informasi	200,000,000.0	APBD Prov		10 Berita/Informasi	150,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		92.5 %	120,000,000.0			95 %	130,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	RSUD Haji Makassar Kota Makassar	4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	120,000,000.0	APBD Prov		4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	130,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	05.00			Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah				23,386,835,103.39				23,561,323,553.12	
1.01	02	05.00	03		PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan		100 %	100,000,000.0			100 %	100,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	03	001	Akreditasi Rumah Sakit/UPTD Kesehatan	Jumlah Dokumen Akreditasi Rumah Sakitr	Kota Makassar	1 Dokumen	100,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	100,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi		1 RS	360,000,000.0			1 RS	370,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	05	001	Studi Kelayakan Spesialisasi Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan yang Tersedia	Kota Makassar	1 Dokumen	60,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	70,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	05	002	Peningkatan Mutu dan Kualitas Spesialisasi Layanan Rumah Sakit	Jumlah Tenaga Spesialisasi Layanan yang Terlatih	Kota Makassar	20 Orang	250,000,000.0	APBD Prov		20 Orang	250,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	05	003	Monitoring Dan Evaluasi Spesialisasi Layanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang Tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	50,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	50,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	12		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Ibu dan Anak Sitti Fatimah		100 %	5,675,000,000.0			100 %	5,820,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	12	002	Pengadaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / UPTD Kesehatan	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Diadakan	Kota Makassar	1 Unit	400,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	450,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	12	003	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit / UPTD Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan dan Kedokteran yang Diadakan	Kota Makassar	15 Unit	5,275,000,000.0	APBD Prov		20 Unit	5,370,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	13		PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan sarana dan prasarana RSUD Ibu dan Anak Sitti Fatimah dalam kondisi baik		100 %	350,904,254.39			100 %	350,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	02	05.00	13	001	Pemeliharaan Rutin Berkala / Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / UPTD Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Dipelihara	Kota Makassar	7 Jenis	140,000,000.0	APBD Prov		7 Jenis	150,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	13	002	Pemeliharaan Rutin / Berkala Limbah Rumah Sakit / UPTD Kesehatan	Jumlah Ipal Rumah Sakit yang Direhabilitasi	Kota Makassar	1 Unit	140,904,254.39	APBD Prov		1 Unit	150,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	13	003	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit / UPTD Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan yang Dipelihara	Kota Makassar	120 Jenis	70,000,000.0	APBD Prov		130 Jenis	50,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	% Peningkatan pendapatan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah		7.5 %	16,110,930,849.0			7.5 %	16,320,689,560.80	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	15	001	Peningkatan Kinerja Pelayanan Rumah Sakit BLUD	Jumlah Pasien Rawat Inap Jumlah Pasien Rawat Jalan Jumlah Pendapatan	Kota Makassar	5300 Pasien 3400 Pasien 16110930849 Rupiah	16,110,930,849.0			5400 Pasien 3500 Pasien 16320689558.82 Rupiah	16,320,689,560.80	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	725,000,000.0			100 %	525,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	15 Orang	300,000,000.0	APBD Prov		15 Orang	300,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	1 Unit	25,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	25,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Makassar	1 Kali	400,000,000.0	APBD Prov		1 Kali	200,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	65,000,000.0			100 %	75,633,992.32	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	1 Unit	55,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	60,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	05.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	5 Unit	10,000,000.0	APBD Prov		5 Unit	15,633,992.32	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
1.01	02	06.00			Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi				22,199,345,164.17				22,488,372,908.39	
1.01	02	06.00	03		PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan		100 %	411,824,468.05			100 %	415,884,314.04	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	02	06.00	03	001	Jasa Pembersihan Dan Pengendalian Hama (Pest Control)	Jumlah Kunjungan Pembersihan Hama		144 Kali	104,400,000.0			144 Kali	104,400,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	02	06.00	03	002	Pengemangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan	Jumlah Media Promosi Yang Disediakan		2 Jenis	207,424,468.05			2 Jenis	211,484,314.04	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	02	06.00	03	003	Pengukuran Kepuasan Pelanggan	Jumlah Pelanggan Yang Merasa Puas Terhadap Pelayanan RSKD Ibu dan Anak Pertiwi		13571 Orang	100,000,000.0			13909 Orang	100,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	02	06.00	12		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSKD Ibu dan Anak Pertiwi		100 %	1,999,222,837.45			100 %	2,013,534,324.91	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	02	06.00	12	001	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS	Jumlah Alat-Alat Kesehatan RS Yang Diadakan		30 Unit	1,382,222,837.45			30 Unit	1,396,534,324.91	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	02	06.00	12	003	Pembangunan Gedung RS	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab		1 Unit	617,000,000.0			1 Unit	617,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	02	06.00	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	% Peningkatan pendapatan RSKD Ibu dan Anak Pertiwi		5 %	19,788,297,858.67			5 %	20,058,954,269.44	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	02	06.00	15	001	Peningkatan Kinerja Pelayanan Rumah Sakit BLUD	Jumlah Pasien Rawat Jalan		9057 Pasien	19,788,297,858.67			9283 Pasien	20,058,954,269.44	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Jumlah Pasien Rawat Inap Jumlah pendapatan		4514 Pasien 17314111268 Rupiah				4626 Pasien 18179816831 Rupiah		
1.01	02	07.00			Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat			13,404,528,334.73				13,229,050,626.16	
1.01	02	07.00	03		PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan		100 %	100,000,000.0		100 %	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	03	002	Peningkatan Kualitas dokter dan paramedis	Jumlah dokter dan paramedis yang mengikuti workshop dan bimtek baik laki-laki maupun perempuan		2 Orang	50,000,000.0		2 Orang	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	03	007	Jasa Pembersihan dan Pengendalian Hama (Pest Control)	Jenis pembersihan dan pengendalian hama (pest control)		2 Jenis Tindakan	50,000,000.0		2 Jenis Tindakan	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelebagaannya berdasarkan spesialisasi		1 RS	207,882,978.70		1 RS	210,589,542.69	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	05	002	Peningkatan mutu dan kualitas spesialisasi layanan RS	Jumlah Tenaga Spesialisasi Layanan yang Terlatih		20 Orang	107,882,978.70		20 Orang	110,589,542.69	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	05	003	Monitoring dan evaluasi spesialisasi layanan RS	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang Tersusun		1 Dokumen	100,000,000.0		1 Dokumen	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	12		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat		100 %	945,343,786.22		100 %	612,208,711.27	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	12	002	Rehabilitasi Sedang/Berat dan Pengembangan Bangunan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang di rehabilitasi		1 Unit	545,343,786.22		1 Unit	362,208,711.27	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	12	009	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan		1 Unit	100,000,000.0		1 Unit	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	12	011	Pengadaan Mebeuler Rumah Sakit	Jumlah mebeuler RS yang diadakan		5 Unit	100,000,000.0		3 Unit	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	12	012	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Jumlah perlengkapan rumah tangga RS yang diadakan		4 Unit	100,000,000.0		2 Unit	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	12	013	Pengadaan Ranjang Pasien/Hospital Bed	Jumlah ranjang pasien/hospital Bed yang diadakan		2 Unit	100,000,000.0		0 Unit	0.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	13		PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik		100 %	250,000,000.0		100 %	250,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	13	001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang dipelihara		5 Unit	100,000,000.0		5 Unit	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	13	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah RS yang dipelihara		1 Unit	50,000,000.0		1 Unit	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	13	005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat-alat kesehatan RS yang dipelihara		5 Unit	100,000,000.0		5 Unit	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	% Peningkatan pendapatan RSUD Sayang Rakyat		2 %	10,134,295,211.47		2 %	10,266,240,206.35	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	15	001	Peningkatan Kinerja Pelayanan RS BLUD	Jumlah Pasien Rawat Jalan Jumlah Pasien Rawat Inap Jumlah pendapatan BLUD		0 Orang 3054 Orang 10134295211.47 Rp	10,134,295,211.47		0 Orang 3359 Orang 10266240206.35 Rp	10,266,240,206.35	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	16		PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan Obat-obatan, Makan Minum dan Logistik RS/UPTD Kesehatan		100 %	935,473,404.14		100 %	947,652,942.12	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	16	001	Pengadaan Obat-obatan RS	Jumlah Obat-obatan RS yang diadakan		10 Jenis	900,000,000.0		10 Jenis	900,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	16	003	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	Jumlah Jenis Logistik RS yang Diadakan		5 Jenis	35,473,404.14		5 Jenis	47,652,942.12	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	02	07.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	501,532,954.20			100 %	502,359,223.73	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik		12 Bulan	301,532,954.20			12 Bulan	302,359,223.73	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		20 Kali	200,000,000.0			20 Kali	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		100 %	100,000,000.0			100 %	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		5 Unit	50,000,000.0			5 Unit	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		5 Unit	50,000,000.0			5 Unit	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	30,000,000.0			100 %	40,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi		1 Laporan 1 Jenis	30,000,000.0			1 Laporan 1 Jenis	40,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	200,000,000.0			100 %	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	02	07.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia		250 Pasang	200,000,000.0			250 Pasang	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
1.01	03				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1.01	03	01.00			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				940,135,864,741.02				898,134,418,895.61	
1.01	03	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)		100 %	800,000,000.0			100 %	0.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	01	003	Survey dan Investigasi Pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kelayakan study (FS) yang disusun	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	100,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 Dokumen	0.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	01	004	Desain Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen detail desain (DED) yang disusun	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	400,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 Dokumen	0.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	01	005	Sosialisasi Kebijakan dan Pengaturan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Orang	100,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 Orang	0.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	01	006	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RISPAM yang disusun	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	200,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 Dokumen	0.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM)		100 %	800,000,000.0			100 %	0.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	02	001	Survey dan Investigasi Pengembangan Pengolahan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kelayakan study (FS) pengembangan pengolahan Air Limbah Domestik lintas Kab/Kota	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	100,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 Dokumen	0.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	02	003	Desain Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen detail desain pengembangan pengolahan air limbah domestik lintas kab/kota yang disusun	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	400,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 Dokumen	0.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	03	01.00	02	004	Sosialisasi Kebijakan dan Pengaturan Pengolahan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Orang	100,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 Orang	0.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	02	005	Penyusunan Rencana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan air limbah yang disusun	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	200,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 Dokumen	0.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA (Prioritas)	% Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenaneannva (SPM) Jumlah tambahan luas lahan yang terlayani sistem pengairan irigasi (Prioritas)		69.47 % 15014.3 Ha	255,556,510,793.0			69.47 % 15014.3 Ha	224,853,496,217.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	03	001	Inventarisasi database kondisi jaringan irigasi, sarana prasarana irigasi dan air bersih	Jumlah dokumen database Jaringan Irigasi, sarana prasarana irigasi dan air bersih	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dok.	150,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 Dok.	150,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	03	002	Perencanaan Teknis dan Study Pengembangan jaringan Irigasi & Air Bersih, Rawa Tambak & Air Baku	Jumlah dokumen perencanaan Teknis dan Study Pengembangan jaringan Irigasi, Rawa Tambak dan Air Baku	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Palopo	25 Dok.	12,164,846,049.0	APBD Prov	opd parsial	25 Dok.	12,212,318,740.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	03	003	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Air Bersih	Luas areal Daerah Irigasi yang di rehabilitasi Luas areal Daerah Irigasi yang di tingkatkan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selavar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur	9237.8 Ha. 5776.5 Ha.	190,850,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	9237.8 Ha. 5776.5 Ha.	190,850,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Palopo Kota Parepare							
1.01	03	01.00	03	004	Perbaikan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Luas areal Daerah Irigasi yang direhabilitasi Luas areal Daerah Irigasi yang ditingkatkan	D.I. Alakaraje Kabupaten Sidenreng Rappang D.I. Bili-Bili Kabupaten Gowa D.I. Lanca Kabupaten Bone D.I. Makawa Kabupaten Luwu	795 Ha 0 Ha	8,087,806,087.0	APBD dan DAK	opd parsial	735 Ha 0 Ha	8,209,123,179.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	03	006	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Tambak, Rawa Sawah, Ladang Garam, Pantai dan Air Baku	Panjang saluran irigasi rawa tambak, pantai dan air baku yang direhabilitasi Panjang saluran irigasi rawa tambak, pantai dan air baku yang ditingkatkan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo	35525 M 10000 M	3,552,500,000.0	APBD Prov	opd parsial	36058 M 10000 M	3,605,787,500.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kota Palopo Kota Parepare							
1.01	03	01.00	03	007	Pengendalian, Operasi dan Pemeliharaan sarana Prasarana irigasi dan jaringan pengairan lainnya	Panjang sarana prasarana irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	7752 Meter	8,869,051,032.0	APBD Prov	opd parsial	5374 Meter	9,002,086,798.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	03	008	Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Komisi Irigasi	Jumlah Rapat Penyusunan Rencana OP	Kota Makassar	1 Kegiatan Rapat	203,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 Kegiatan Rapat	206,045,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	03	009	Peningkatan infrastruktur irigasi melalui program IPDMIP	Luas cakupan layanan peningkatan produktivitas nilai dan keberlanjutan irigasi pertanian melalui program IPDMIP	D.I. Kalosi Kabupaten Pinrang	2879 Ha	31,070,307,625.0		opd parsial	0 Ha	0.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	03	010	Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Sadang	Wilayah cakupan Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Sadang berkualitas	Kabupaten Pinrang	1 WS	152,250,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 WS	154,533,750.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	03	011	Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Jeneberang	Wilayah cakupan Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Jeneberang berkualitas	Kabupaten Gowa	1 WS	152,250,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 WS	154,533,750.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	03	012	Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Pompengan Larona	Wilayah cakupan Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Pompengan Larona berkualitas	Kota Palopo	1 WS	152,250,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 WS	154,533,750.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	03	013	Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Walanae Cenranae	Wilayah cakupan pembinaan dan pelaksanaan Sumber Daya Air di Wilayah WS. Walanae Cenranae berkualitas	Kabupaten Wajo	1 WS	152,250,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 WS	154,533,750.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	04		PROGRAM BINA KONSTRUKSI (Prioritas)	% Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar (Prioritas)		90 %	4,040,867,400.0			95 %	4,068,460,770.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	04	001	Pembinaan, Peningkatan Kompetensi Lembaga/asosiasi Jasa Konstruksi tingkat Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kompetensi jasa konstruksi Jumlah Dokumen Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Jumlah Asosiasi/Badan Usaha/OPD yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kompetensi jasa konstruksi Jumlah Kab/Kota yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kompetensi jasa konstruksi Jumlah Dokumen Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Jumlah Asosiasi/Badan Usaha/OPD yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kompetensi jasa konstruksi	Kota Makassar	24 Kab/Kota 3 Dokumen 40 Asosiasi 24 Kab/Kota 3 Dokumen 40 Asosiasi	857,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	24 Kab/Kota 3 Dokumen 40 Asosiasi 24 Kab/Kota 3 Dokumen 40 Asosiasi	857,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	03	01.00	04	003	Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Jasa Konstruksi	Jumlah laporan Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Jasa Konstruksi Jumlah laporan Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Jasa Konstruksi	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	3 Laporan 3 Laporan	1,733,867,400.0	APBD Prov	opd parsial	3 Laporan 3 Laporan	1,761,460,770.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	04	004	Identifikasi Pelaku Jasa Konstruksi di Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Pelaku jasa konstruksi di Sulawesi Selatan yang teridentifikasi Jumlah Pelaku jasa konstruksi di Sulawesi Selatan yang teridentifikasi	Provinsi Sulawesi Selatan	3 Dokumen 3 Dokumen	450,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	3 Dokumen 3 Dokumen	450,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	04	005	Pembinaan, Peningkatan Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan mutu pelaksanaan jasa konstruksi Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan mutu pelaksanaan jasa konstruksi	Provinsi Sulawesi Selatan	6 Kegiatan 6 Kegiatan	1,000,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	6 Kegiatan 6 Kegiatan	1,000,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05		PROGRAM PRESERVASI JALAN (Prioritas)	% Tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (mantap) (SPM)		65.43 %	316,319,776,635.40			68.41 %	319,767,539,568.87	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	001	Pengaturan Teknis, Pemeliharaan berkala dan Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Paket Pasca bencana alam yang ditangani Jumlah paket Silpa yang terbayarkan Jumlah Paket Pasca bencana alam yang ditangani Jumlah paket Silpa yang terbayarkan		6 Paket 0 Paket 6 Paket 0 Paket	9,126,577,499.04	APBD Prov	opd parsial	6 Paket 1 Paket 6 Paket 1 Paket	9,582,906,373.98	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	002	Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pemeliharaan lalan Jumlah Laporan Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pemeliharaan lalan		12 Laporan 12 Laporan	206,718,750.0	APBD Prov	opd parsial	12 Laporan 12 Laporan	217,054,687.50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	003	Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Paket Jembatan yang direhabilitasi Jumlah Paket Silpa 2017 yang terbayarkan Jumlah Paket Jembatan yang direhabilitasi Jumlah Paket Silpa 2017 yang terbayarkan		1 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket	2,310,030,468.41	APBD Prov	opd parsial	1 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket	2,425,531,991.85	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	004	Identifikasi rawan bencana ruas jalan provinsi	Jumlah dokumen ruas - ruas provinsi rawan bencana Jumlah dokumen ruas - ruas provinsi rawan bencana		1 Dokumen 1 Dokumen	735,918,750.0	APBD Prov	opd parsial	1 Dokumen 1 Dokumen	772,714,687.50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	005	Pengadaan, Pemeliharaan, Pengendalian Penggunaan Peralatan Jalan dan Jembatan	Jumlah Alat-alat Laboratorium Jalan dan lembatan yang diadakan Jumlah alat berat / Peralatan yang diadakan, jumlah alat berat yang dipelihara		0 Set Alat Laboratorium 5 Unit Alat berat/Peralatan	11,293,780,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 Set Alat Laboratorium 5 Unit Alat berat/Peralatan	11,785,319,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Alat-alat Laboratorium Jalan dan jembatan yang diadakan Jumlah alat berat / Peralatan yang diadakan, jumlah alat berat yang dipelihara		0 Set Alat Laboratorium 5 Unit Alat berat/Peralatan				0 Set Alat Laboratorium 5 Unit Alat berat/Peralatan		
1.01	03	01.00	05	006	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah I Luwu Utara	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah I Luwu Utara Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah I Luwu Utara	Kabupaten Luwu Utara	12 Laporan 12 Laporan	263,497,500.0	APBD Prov	opd parsial	12 Laporan 12 Laporan	276,672,375.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	008	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah II Tator	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah II Tana Toraja Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah II Tana Toraja	Kabupaten Tana Toraja	12 Laporan 12 Laporan	263,497,500.0	APBD Prov	opd parsial	12 Laporan 12 Laporan	276,672,375.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	010	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah III Pare-Pare	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah III Pare-Pare Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah III Pare-Pare	Kota Parepare	12 Laporan 12 Laporan	263,497,500.0	APBD Prov	opd parsial	12 Laporan 12 Laporan	276,672,375.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	012	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah IV Makassar	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah IV Makassar Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah IV Makassar	Kota Makassar	12 Laporan 12 Laporan	263,497,500.0	APBD Prov	opd parsial	12 Laporan 12 Laporan	276,672,375.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	014	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah V Bone	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah V Bone Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah V Bone	Kabupaten Bone	12 Laporan 12 Laporan	263,497,500.0	APBD Prov	opd parsial	12 Laporan 12 Laporan	276,672,375.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	03	01.00	05	016	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah VI Bulukumba	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah VI Bulukumba Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah VI Bulukumba	Kabupaten Bulukumba	12 Laporan 12 Laporan	263,497,500.0	APBD Prov	opd parsial	12 Laporan 12 Laporan	276,672,375.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	018	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Tana Toraja, Toraja Utara, dan Enrekang	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan kondisinya Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan kondisinya	Kabupaten Enrekang Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara	4 Km 4 Km	30,800,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	5 Km 5 Km	42,350,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	019	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pinrang, Sidrap, Barru, dan Kota Pare-Pare	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan kondisinya Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan kondisinya	Kabupaten Barru Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kota Parepare	7 Km 7 Km	59,290,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	6.5 Km 6.5 Km	55,055,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	020	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Makassar, Kab. Maros dan Pangkep	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya	Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kota Makassar	1 Km 1 Km	8,470,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 Km 1 Km	9,317,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	021	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Gowa dan Takalar	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya	Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar	2.5 Km 2.5 Km	18,370,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	2 Km 2 Km	18,634,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	022	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bone	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya	Kabupaten Bone	2 Km 2 Km	16,940,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	2 Km 2 Km	18,634,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	023	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Soppeng dan Wajo	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya	Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo	8 Km 8 Km	66,656,928,444.91	APBD Prov	opd parsial	8 Km 8 Km	66,330,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	024	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bulukumba dan Sinjai	Jumlah Paket Silpa 2017 yang terbayarkan Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya Jumlah Paket Silpa 2017 yang terbayarkan Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya	Kabupaten Bulukumba Kabupaten Sinjai	0 Paket 3 Km 0 Paket 3 Km	19,305,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 Paket 2 Km 0 Paket 2 Km	9,680,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	025	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Selayar	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya	Kabupaten Kepulauan Selayar	1.5 Km	9,900,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1.5 Km	9,900,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya		1.5 Km				1.5 Km		
1.01	03	01.00	05	027	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Utara	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Luwu Utara	43 Km 496 M 43 Km 496 M	1,440,780,000.0	APBD Prov	opd parsial	51 Km 496 M 51 Km 496 M	1,704,780,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	028	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Timur	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Luwu Timur	50 M 34 Km 50 M 34 Km	1,125,300,000.0	APBD Prov	opd parsial	50 M 44 Km 50 M 44 Km	1,455,300,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	029	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu dan Palopo	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Luwu Kota Palopo	68 Km 50 M 68 Km 50 M	2,270,400,000.0	APBD Prov	opd parsial	97 Km 50 M 97 Km 50 M	3,227,400,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	030	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Toraja Utara	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Toraja Utara	20 M 102 Km 20 M 102 Km	3,383,820,000.0	APBD Prov	opd parsial	20 M 102 Km 20 M 102 Km	3,383,820,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	031	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Tana Toraja	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Tana Toraja	53 Km 50 M 53 Km 50 M	1,772,100,000.0	APBD Prov	opd parsial	53 Km 50 M 53 Km 50 M	1,772,100,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	032	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Enrekang	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Enrekang	257 M 56 Km	1,868,790,000.0	APBD Prov	opd parsial	257 M 56 Km	1,868,790,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin		257 M 56 Km				257 M 56 Km		
1.01	03	01.00	05	033	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pinrang	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Pinrang	59 Km 349 M 59 Km 349 M	1,827,210,000.0	APBD Prov	opd parsial	59 Km 349 M 59 Km 349 M	1,827,210,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	034	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Sidrap	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Sidenreng Rappang	257 M 78 Km 257 M 78 Km	2,413,620,000.0	APBD Prov	opd parsial	257 M 78 Km 257 M 78 Km	2,413,620,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	035	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Barru	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Barru	357 M 48 Km 357 M 48 Km	1,603,140,000.0	APBD Prov	opd parsial	357 M 48 Km 357 M 48 Km	1,603,140,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	036	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Makassar dan Kab. Takalar	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Takalar Kota Makassar	87 Km 117 M 87 Km 117 M	2,775,765,481.14	APBD Prov	opd parsial	87 Km 117 M 87 Km 117 M	2,875,620,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	037	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Gowa dan Maros	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Gowa Kabupaten Maros	79 Km 117 M 79 Km 117 M	2,726,555,518.86	APBD Prov	opd parsial	79 Km 117 M 79 Km 117 M	2,726,555,518.86	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	038	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pangkep	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	50 M	652,410,000.0	APBD Prov	opd parsial	50 M	652,410,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin		19 Km 50 M 19 Km				19 Km 50 M 19 Km		
1.01	03	01.00	05	039	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Ruas Gowa - Malino di Kab. Gowa	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Gowa	110 Km 110 Km	3,649,140,000.0	APBD Prov	opd parsial	110 Km 110 Km	3,649,140,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	040	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Ruas Gowa - Sapaya di Kab. Gowa	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Gowa	102 M 89 Km 102 M 89 Km	2,937,330,000.0	APBD Prov	opd parsial	102 M 89 Km 102 M 89 Km	2,951,190,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	041	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Bone Barat Kab. Bone	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Bone	300 M 113 Km 300 M 113 Km	3,739,230,000.0	APBD Prov	opd parsial	300 M 113 Km 300 M 113 Km	3,739,230,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	042	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Bone Timur Kab. Bone	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Bone	107 M 37 Km 107 M 37 Km	1,250,700,000.0	APBD Prov	opd parsial	107 M 37 Km 107 M 37 Km	1,250,700,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	043	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Soppeng	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Soppeng	143 Km 960 M 143 Km 960 M	4,587,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	141 Km 960 M 141 Km 960 M	4,550,700,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	044	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Wajo	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Wajo	450 M 106 Km	3,563,670,000.0	APBD Prov	opd parsial	450 M 106 Km	3,563,670,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin		450 M 106 Km				450 M 106 Km		
1.01	03	01.00	05	045	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Jeneponto dan Bantaeng	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Jeneponto	160 M 59 Km 160 M 59 Km	1,967,130,000.0	APBD Prov	opd parsial	160 M 59 Km 160 M 59 Km	1,967,130,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	046	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Sinjai	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Sinjai	450 M 93 Km 450 M 93 Km	3,068,010,000.0	APBD Prov	opd parsial	450 M 92 Km 450 M 92 Km	3,068,010,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	047	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bulukumba	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Bulukumba	83 Km 245 M 83 Km 245 M	2,622,510,000.0	APBD Prov	opd parsial	83 Km 245 M 83 Km 245 M	2,622,510,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	048	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Selayar	Panjang Jalan Provinsi yang ditingkatkan, serta dipelihara secara berkala Panjang Jembatan Provinsi yang ditingkatkan, serta dipelihara secara berkala Panjang Jalan Provinsi yang ditingkatkan, serta dipelihara secara berkala Panjang Jembatan Provinsi yang ditingkatkan, serta dipelihara secara berkala	Kabupaten Kepulauan Selayar	5 Km 50 m 5 Km 50 m	854,700,000.0	APBD Prov	opd parsial	5 Km 50 m 5 Km 50 m	854,700,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	05	051	Pengadaan Aspal untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin	Jumlah Aspal yang tersedia untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Jumlah Aspal yang tersedia untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan		617446 Kg 617446 Kg	9,234,526,723.04	APBD Prov	opd parsial	648318 Kg 648318 Kg	9,696,253,059.18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	06		PROGRAM PENANGGULANGAN DAERAH-DAERAH POTENSI BANJIR (Prioritas)	Jumlah daerah potensi banjir yang tertangani (Prioritas)		8 Kawasan	450,000,000.0			8 Kawasan	456,750,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	06	001	Inventarisasi potensi Daerah rawan banjir	Jumlah Daerah yang berpotensi banjir	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Kab./Kota	50,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	2 Kab./Kota	50,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	06	003	Pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana pengendali banjir	Jumlah bahan pengendalian banjir	Provinsi Sulawesi Selatan	440 Unit/Lap.	230,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	440 Unit/Lap.	233,750,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah bahan pengendalian banjir		8250 Lembar/Lap.				8250 Lembar/Lap.		Ruang
1.01	03	01.00	06	004	Operasi dan pemeliharaan stasiun hidrologi, kualitas air, dan fasilitas penunjang lainnya	Jumlah Stasiun Hidrologi, kualitas air dan fasilitas penunjang lainnya	Provinsi Sulawesi Selatan	21 Kab./Kota; Lap.	170,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	21 Kab./Kota; Lap.	173,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	07		PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA (Prioritas)	Panjang Sungai/Danau/Waduk yang dipelihara (Prioritas) Cakupan Data Potensi Sumber Daya Air yang tersedia daya potensinya (Prioritas)		17000 Meter 90 %	21,311,448,550.0			22000 Meter 95 %	21,721,120,277.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	07	002	Pengelolaan dan pengendalian konservasi dan pengembangan sungai, danau, dan waduk	Jumlah Penahan Sedimen, Embung, dan Cekdam yang terbangun Panjang perkuatan tebing sungai	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Palopo Kota Parepare	5 Bangunan 6500 m	10,173,235,521.0	APBD Prov	opd parsial	5 Bangunan 6600 m	10,400,834,054.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	07	003	Pengendalian operasi dan pemeliharaan sungai, danau dan waduk	Panjang sungai yang di normalisasi	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur	17000 m/Lap.	10,529,213,029.0	APBD Prov	opd parsial	22000 m/Lap.	10,702,151,223.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Palopo Kota Parepare							
1.01	03	01.00	07	005	Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan Teknis UPT Wil. S. Jeneberang	Wilayah cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Jeneberang berkualitas	Kabupaten Gowa	1 WS	152,250,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 WS	154,533,750.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	07	006	Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan Teknis UPT Wil. S. Saddang	Wilayah cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Saddang berkualitas	Kabupaten Pinrang	1 WS	152,250,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 WS	154,533,750.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	07	007	Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan Teknis UPT Wil. S. Walanae Cenranae	Wilayah cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Walanae Cenranae berkualitas	Kabupaten Wajo	1 WS	152,250,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 WS	154,533,750.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	07	008	Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan Teknis UPT Wil. S. Pompengan Larona	Wilayah cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Pompengan Larona berkualitas	Kota Palopo	1 WS	152,250,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 WS	154,533,750.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	09		PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	% Panjang ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi		100 %	224,861,482,285.10			100 %	225,557,167,469.86	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	09	001	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu, Luwu Utara, dan Kota Palopo	Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun Panjang Jalan Provinsi yang dibangun Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Utara Kota Palopo	38 M 10.5 Km 38 M 10.5 Km	97,266,711,035.10	APBD Prov	opd parsial	30 M 10.5 Km 30 M 10.5 Km	99,281,772,657.36	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	09	002	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Timur	Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun Panjang Jalan Provinsi yang dibangun Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	Kabupaten Luwu Timur	14 M 3 Km 14 M 3 Km 0	24,243,200,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 M 3 Km 0 M 3 Km 0	21,450,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	09	003	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Tana Toraja, Toraja Utara, dan Enrekang	Jumlah paket Silpa 2017 yg dibayarkan Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun	Kabupaten Enrekang Kabupaten Tana Toraja	0 Paket 15 M	33,482,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 Paket 0 M	32,000,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Panjang Jalan Provinsi yang dibangun Jumlah paket Silpa 2017 yg dibayarkan Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	Kabupaten Toraja Utara	22 Km 0 Paket 15 M 22 Km				4 Km 0 Paket 0 M 4 Km		
1.01	03	01.00	09	004	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pinrang, Sidrap, Barru, dan Kota Pare-Pare	Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun Panjang Jalan Provinsi yang dibangun Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	Kabupaten Barru Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kota Parepare	40 M 17 Km 40 M 17 Km	37,700,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	18 M 3.5 Km 18 M 3.5 Km	37,508,240,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	09	006	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Soppeng dan Wajo	Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun Panjang Jalan Provinsi yang dibangun Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo	130 M 10 Km 130 M 10 Km	16,919,500,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 M 2 Km 0 M 2 Km	19,360,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	09	007	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bulukumba dan Sinjai	Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun Panjang Jalan Provinsi yang dibangun Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	Kabupaten Bulukumba Kabupaten Sinjai	6 M 0 Km 6 M 0 Km	2,032,800,000.0	APBD Prov	opd parsial	14 M 0 Km 14 M 0 Km	5,217,520,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	09	009	Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan 12 Laporan	374,850,000.0	APBD Prov	opd parsial	12 Laporan 12 Laporan	393,592,500.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	09	010	Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan 12 Laporan	264,600,000.0	APBD Prov	opd parsial	12 Laporan 12 Laporan	277,830,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	09	011	Pembinaan, Pengaturan Teknis, Pengendalian Lingkungan dan Pengaman Jalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengaturan Teknis, Pengendalian Lingkungan dan Pengaman jalan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengaturan Teknis, Pengendalian Lingkungan dan Pengaman jalan	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Laporan 2 Laporan	307,821,250.0	APBD Prov	opd parsial	2 Laporan 2 Laporan	318,212,312.50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	03	01.00	09	012	Pembinaan dan Evaluasi mutu Penyelenggaraan Jalan dan jembatan	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan 1 Laporan	750,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 Laporan 1 Laporan	750,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	09	016	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Selayar	Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun Panjang Jalan Jembatan Provinsi yang dibangun Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun Panjang Jalan Jembatan Provinsi yang dibangun	Kabupaten Kepulauan Selayar	9 M 1.5 Km 9 M 1.5 Km	11,520,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 M 1.5 Km 0 M 1.5 Km	9,000,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	10		PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	% Ketaatan terhadap RTRW		100 %	1,865,000,000.0			100 %	1,892,975,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	10	001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen RTR Provinsi yang disusun Jumlah Dokumen KLHS RTR Provinsi yang disusun Jumlah Perda RTR Provinsi yang ditetapkan	Provinsi Sulawesi Selatan	2 RTR KSP 2 KLHS RTR KSP 2 Perda RTRW	1,015,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	2 RTR KSP 2 KLHS RTR KSP 2 Perda RTRW	1,030,225,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	10	002	Fasilitasi dan Pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	Jumlah cakupan fasilitasi dan pembinaan Kab/Kota dalam menyusun rencana tata ruangnya	Provinsi Sulawesi Selatan	7 RTRW Kab/RDTR/RTR KSK	300,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	8 RTRW Kab/RDTR/RTR KSK	304,500,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	10	003	Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Jumlah Rekomendasi penyelenggaraan penataan ruang yang diberikan	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Rekomendasi	150,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	10 Rekomendasi	152,250,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	10	004	Penyusunan dan Penetapan ketentuan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi	Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Jumlah Dokumen RTR Provinsi yang dilengkapi dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang	Provinsi Sulawesi Selatan	11 Papan Larangan 1 Naskah Teknis	150,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	11 Papan Larangan 1 Naskah Teknis	152,250,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	10	005	Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kab / Kota	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan Pengendalian Pemanfaatan ruang Kab/Kota	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Kab./Kota	150,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	2 Kab./Kota	152,250,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	10	006	Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruane Jumlah PPNS yang dibina Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang oleh PPNS penataan ruang yang tertangani	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan 20 Org 2 Kasus	100,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 Laporan 20 Org 2 Kasus	101,500,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	12		PROGRAM PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI	% Kesesuaian perencanaan dengan penyelenggaraan jalan dan jembatan		100 %	43,923,644,292.31			100 %	44,487,703,055.69	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	12	002	Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Jalan	Jumlah Kajian naskah akademik Ranperda yang disusun Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Jalan	Provinsi Sulawesi Selatan	0 Naskah Akademik 4 Dokumen	683,081,746.23	APBD Prov	opd parsial	0 Naskah Akademik 4 Dokumen	692,644,890.68	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Kajian naskah akademik Ranperda yang disusun Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Jalan		0 Naskah Akademik 4 Dokumen				0 Naskah Akademik 4 Dokumen		
1.01	03	01.00	12	004	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen 1 Dokumen	8,240,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 Dokumen 1 Dokumen	8,281,200,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	12	007	Inventarisasi Quarry dan Penyelidikan Struktur Lapisan Tanah	Jumlah dokumen penyelidikan struktur lapisan tanah dan inventarisasi quarry Jumlah dokumen penyelidikan struktur lapisan tanah dan inventarisasi quarry	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen 1 Dokumen	1,160,810,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 Dokumen 1 Dokumen	1,175,900,530.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	12	008	Pengembangan konsep pra-rencana, Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen pra-rencana Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Jumlah dokumen pra-rencana Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Dokumen 18 Dokumen 12 Dokumen 18 Dokumen	32,476,492,546.08	APBD Prov	opd parsial	12 Dokumen 18 Dokumen 12 Dokumen 18 Dokumen	32,954,248,735.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	12	009	Pembuatan dan Pemutakhiran Leger Jalan dan Penyusunan Laik Fungsi Jalan	Jumlah Dokumen Penyusunan Laik Fungsi Jalan Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pemutakhiran Leger Jalan Jumlah Dokumen Penyusunan Laik Fungsi Jalan Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pemutakhiran Leger Jalan	Provinsi Sulawesi Selatan	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	1,363,260,000.0	APBD Prov	opd parsial	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	1,383,708,900.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	13		PROGRAM PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN GEDUNG	% Bangunan /Gedung /Lingkungan Negara yang Terkelola		100 %	34,835,632,015.0			100 %	32,102,528,736.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	13	001	Pembangunan dan peningkatan bangunan dan lingkungan gedung	Jumlah Konstruksi Bangunan Negara dan Public Services yang terbaneun Jumlah Pembangunan Islamic Center Makassar Jumlah pembangunan dan peningkatan bangunan Mesjid di kawasan CPI Jumlah pembangunan dan peningkatan bangunan Negara Asset Dinas Perencanaan Pembangunan Gedung Perencanaan Saluran Pembuang di Kawasan CPI kewenangan Provinsi	Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Luwu Kabupaten Sidenreng Rappang	2 Bangunan 0 Bangunan 0 % 0 Bangunan 0 Dokumen 0 Dokumen	34,835,632,015.0	APBD Prov	opd parsial	2 Bangunan 0 Bangunan 0 % 0 Bangunan 0 Dokumen 0 Dokumen	32,102,528,736.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Wajo Kota Makassar							
1.01	03	01.00	14		PROGRAM PENGENDALIAN JALAN AKSES WILAYAH TERISOLIR (Prioritas)	Jumlah pembangunan akses wilayah terisolir yang dikendalikan (Prioritas)		3 Wilayah	700,000,000.0			3 Wilayah	700,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	14	001	Survei dan Investigasi Kelayakan Pembangunan Jalan Akses Wilayah Terisolir / Pusat pertumbuhan ekonomi baru	Jumlah dokumen survei dan investigasi kelayakan pembangunan jalan akses wilayah terisolir / Pusat pertumbuhan ekonomi baru Jumlah dokumen survei dan investigasi kelayakan pembangunan jalan akses wilayah terisolir / Pusat pertumbuhan ekonomi baru	Provinsi Sulawesi Selatan	3 Dokumen 3 Dokumen	200,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	3 Dokumen 3 Dokumen	200,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	14	003	Monitoring dan Evaluasi pembangunan jalan akses wilayah terisolir / Pusat pertumbuhan ekonomi baru	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan jalan akses wilayah terisolir / pusat pertumbuhan ekonomi baru Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan jalan akses wilayah terisolir / pusat pertumbuhan ekonomi baru	Provinsi Sulawesi Selatan	3 dokumen 3 dokumen	500,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	3 dokumen 3 dokumen	500,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	25,112,147,786.84			100 %	14,213,334,765.12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Bulan	3,071,361,017.50	APBD Prov	opd parsial	12 Bulan	1,786,443,826.23	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan	Provinsi Sulawesi Selatan	25 Unit 48 Unit	1,462,147,636.93	APBD Prov	opd parsial	25 Unit 48 Unit	80,964,402.75	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Provinsi Sulawesi Selatan	241 Orang	8,744,325,709.93	APBD Prov	opd parsial	241 Orang	7,432,879,898.28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	60 Jenis ATK	3,212,095,332.76	APBD Prov	opd parsial	60 Jenis ATK	1,836,191,934.08	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Unit	1,898,526,418.93	APBD Prov	opd parsial	100 Unit	503,419,350.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	3 Jenis	2,259,163,681.93	APBD Prov	opd parsial	3 Jenis	875,512,475.65	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar	2 Pameran	1,757,788,681.93	APBD Prov	opd parsial	2 Pameran	374,613,750.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	262 Kali	2,706,739,306.93	APBD Prov	opd parsial	288 Kali	1,323,309,128.13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	03	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	5,724,865,817.91			100 %	5,345,070,246.14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	6 Unit	229,445,000.0	APBD Prov	opd parsial	6 Unit	156,045,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	26 Unit	571,025,000.0	APBD Prov	opd parsial	26 Unit	501,040,800.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas roda dua yang dipelihara Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	25 Unit 48 Unit	2,977,535,984.17	APBD Prov	opd parsial	25 Unit 48 Unit	2,964,594,304.14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Unit 36 Jenis	1,505,559,056.0	APBD Prov	opd parsial	10 Unit 36 Jenis	1,430,115,256.48	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	48 Unit	261,355,777.74	APBD Prov	opd parsial	48 Unit	188,274,885.52	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Kota Makassar	5 Sistem Informasi/Aplikasi 60 Berita/Informasi	179,945,000.0	APBD Prov	opd parsial	5 Sistem Informasi/Aplikasi 60 Berita/Informasi	105,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	2,188,019,396.60			100 %	1,723,299,001.95	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti forum perangkat daerah	Kota Makassar	150 Orang	160,236,814.29	APBD Prov	opd parsial	150 Orang	40,000,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Buku Data dan Informasi yang terpublikasi Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	Kota Makassar	3 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 100 Buku 0 Dokumen	815,636,814.29	APBD Prov	opd parsial	3 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 100 Buku 0 Dokumen	695,599,280.42	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan	2 Usulan Kegiatan	650,408,953.73	APBD Prov	opd parsial	2 Usulan Kegiatan	533,049,721.53	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	12 Laporan	561,736,814.29	APBD Prov	opd parsial	12 Laporan	454,650,000.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	1,646,469,768.86			100 %	1,244,973,787.98	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian	Kota Makassar	1 Laporan 400 Orang	301,575,949.46	APBD Prov	opd parsial	1 Laporan 400 Orang	164,034,459.27	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	03	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Non PNS Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	240 Pasang 400 Pasang	948,432,225.65	APBD Prov	opd parsial	240 Pasang 400 Pasang	821,070,368.71	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	40 Pasang seragam pameran 400 Pasang	396,461,593.75	APBD Prov	opd parsial	40 Pasang seragam pameran 400 Pasang	259,868,960.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.01	04				Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1.01	04	01.00			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				105,536,440,319.97				106,810,488,025.11	
1.01	04	01.00	01		PROGRAM PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH (Prioritas)	% Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah (SPM) % Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam (SPM)		100 % 100 %	1,120,000,000.0			100 % 100 %	1,142,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	01	001	Penyediaan Fasilitas Tanggap Darurat Kawasan Permukiman	Jumlah Tenda Darurat Yang Tersedia Jumlah Toilet Mobile yang Tersedia Jumlah Tangki Air Mobile Yang Tersedia Jumlah Personil Siaga Bencana	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Unit 1 Unit 1 Unit 10 Orang	750,000,000.0	APBD Prov		2 Unit 1 Unit 1 Unit 10 Orang	750,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	01	003	Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah lokasi pendataan dan fasilitas relokasi program pemerintah provinsi	Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	150,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	150,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	01	004	Fasilitas Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Instan Sederhana Sehat yang terbangun akibat bencana Jumlah lokasi identifikasi dan pendataan rumah korban bencana provinsi	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan	4 Unit 24 Kab/Kota	220,000,000.0	APBD Prov		4 Unit 24 Kab/Kota	242,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MBR (Prioritas)	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (SPM) Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (SPM)		2.25 % 5 %	3,000,000,000.0			2.75 % 5 %	3,000,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	04	01.00	02	001	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Keluarga Miskin dan MBR yang terfasilitasi dalam peningkatan kualitas perumahan	Provinsi Sulawesi Selatan	200 KK	3,000,000,000.0	APBD Prov		200 KK	3,000,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN FASILITAS UMUM (Prioritas)	Jumlah fasilitas rest area yang terbangun (Prioritas) Jumlah Fasilitas Pendukung Kawasan Pariwisata		2 Lokasi 0 lokasi	64,355,000,000.0			2 Lokasi 0 lokasi	63,738,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	03	005	Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pucak	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak	Pucak Kabupaten Maros	1583 Meter 0 Dokumen	1,500,000,000.0	APBD Prov		1583 Meter 0 Dokumen	1,500,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	03	008	Pembangunan Rest Area Sulawesi Selatan	Jumlah Rest Area yang Terbangun	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Kawasan	60,000,000,000.0	APBD Prov		2 Kawasan	60,000,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	03	013	Pembangunan Fasum kawasan permukiman	Jumlah Fasum (RTH, Area Parkir dan lapangan Upacara) yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Kawasan	2,105,000,000.0	APBD Prov		8 Kawasan	1,738,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	03	020	Pembangunan RTH Sulawesi Selatan	Jumlah RTH yang Terbangun di Sulawesi Selatan Jumlah dokumen perencanaan RTH	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Kawasan 0 Dokumen	750,000,000.0	APBD Prov		1 Kawasan 0 Dokumen	500,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	04		PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN (Prioritas)	% Kawasan kumuh yang tertata (Prioritas) Cakupan Pembinaan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota Luasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi		56 % 24 Kab/Kota 840 Ha	3,900,000,000.0			63 % 24 Kab/Kota 820 Ha	4,000,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	04	002	Penataan Kawasan Kumuh	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertata Jumlah Dokumen DED Penataan Kawasan Kumuh	Provinsi Sulawesi Selatan	7 Kawasan 7 Dokumen	3,900,000,000.0	APBD Prov		7 Kawasan 8 Dokumen	4,000,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	05		PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH (Prioritas)	Jumlah RT pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih (Prioritas) Cakupan Pembinaan Penanganan Air Minum Kab/Kota		1750 RT 24 Kab/Kota	12,560,000,000.0			1750 RT 24 Kab/Kota	12,885,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	05	004	Perencanaan pengembangan sistem jaringan air minum kawasan permukiman	Jumlah dokumen DED pembangunan jaringan SPAM SMA/SMK se Sulsel	Kota Makassar	1 Dokumen	250,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	250,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	05	005	Pembangunan dan Pengembangan sistem jaringan air minum kawasan permukiman	Jumlah sistem pengelolaan / jaringan SPAM kawasan SMA/SMK se Sulsel Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada kawasan pesisir dan kepulauan yang terbangun	Balusu Barru Kabupaten Barru	7 kawasan 5 Kawasan	12,160,000,000.0	APBD Prov		9 kawasan 5 Kawasan	12,485,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Bone, Soping dan Wajo Jumlah dokumen Perencanaan Air Bersih SMA/SMK Kab. Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara	Desa karumpa, Kec Takabonerate Desa Latondu kec. Takabonerate Desa Menara Indah Kec. Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selavar Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto	0 Dokumen 0 Dokumen				0 Dokumen 0 Dokumen		
1.01	04	01.00	05	006	Pembinaan teknis pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan air minum	Jumlah aparat provinsi dan kab/kota yang ikut serta dalam pembinaan teknis pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan air minum	Makassar Kota Makassar	48 orang	150,000,000.0	APBD Prov		48 orang	150,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	06		PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	Cakupan Pembinaan Penanganan Sanitasi Kabupaten/Kota % Sekolah yang memiliki Infrastruktur sanitasi Layak		24 Kab/Kota 10 %	4,590,000,000.0			24 Kab/Kota 10 %	4,430,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	06	001	Pembangunan sarana dan Prasarana drainase dan air limbah	Jumlah sarana dan prasarana drainase dan air limbah yang terbangun pada kws SMA/SMK se Sulawesi Selatan Pembayaran SILPA Pekerjaan Drainase SMA 6 Enrekang	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Kws. SMA/SMK 0 Kws. SMA	2,000,000,000.0	APBD Prov		8 Kws. SMA/SMK 0 Kws. SMA	1,600,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	06	002	Perencanaan sarana dan prasarana drainase dan air limbah	Jumlah dokumen perencanaan (DED) pembangunan drainase dan air limbah SMA/SMK Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	100,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	120,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	06	003	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Se Sul - Sel	Jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun pada kws. SMA / SMK se sulsel	Provinsi Sulawesi Selatan	11 kawasan	2,200,000,000.0	APBD Prov		12 kawasan	2,400,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	06	004	Perencanaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Se Sulawesi Selatan	Jumlah DED Sarana Dan Prasarana Persampahan SAM/SMK Dan Kawasan Permukiman Se Sul - Sel	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	140,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	160,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	06	005	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan SeSulawesi Selatan	jumlah aparat provinsi dan kab/kota yang meningkatkan pengetahuannya tentang pemngelolaan air limbah dan persampahan	Kota Makassar	50 orang	150,000,000.0	APBD Prov		50 orang	150,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	08		PROGRAM SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Usaha Jasa/Pelaksana Perencana Rumah dan PSU Kemampuan Menengah Tersertifikasi		50 Unit	200,000,000.0			50 Unit	200,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	08	007	Sertifikasi Tenaga Ahli Perancangan Dan Perencanaan Perumahan Permukiman	Jumlah Tenaga Ahli Yang Bersertifikat Perancangan Dan Perencanaan Rumah, Dan PSU Tingkat Kemamouan Meneneah Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung	Kota Makassar	60 Orang 0 Dokumen	200,000,000.0	APBD Prov		60 Orang 0 Dokumen	200,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	9,337,680,000.0			100 %	10,431,580,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	04	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Makassar Kota Makassar	12 Bulan	720,000,000.0	APBD Prov		12 Bulan	864,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Makassar Kota Makassar	20 Unit 12 Unit	66,000,000.0	APBD Prov		20 Unit 12 Unit	72,600,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Makassar Kota Makassar	62 Orang	3,397,680,000.0	APBD Prov		62 Orang	3,397,680,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Makassar Kota Makassar	100 Jenis ATK	414,000,000.0	APBD Prov		100 Jenis ATK	496,800,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Makassar Kota Makassar	25 Unit	55,000,000.0	APBD Prov		25 Unit	60,500,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Makassar Kota Makassar	20 Jenis	185,000,000.0	APBD Prov		20 Jenis	200,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Makassar Kota Makassar	2 Pameran	300,000,000.0	APBD Prov		2 Pameran	300,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Makassar Kota Makassar	140 Kali	4,200,000,000.0	APBD Prov		150 Kali	5,040,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	2,610,223,086.0			100 %	2,971,100,000.11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	51	001	Pembangunan Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dibangun		1 Unit	1,200,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	1,200,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Makassar Kota Makassar	1 Unit	400,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	425,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Makassar Kota Makassar	29 Unit	485,223,086.0	APBD Prov		29 Unit	635,062,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Makassar Kota Makassar	35 Unit	325,000,000.0	APBD Prov		35 Unit	350,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Makassar Kota Makassar	30 Unit	50,000,000.0	APBD Prov		30 Unit	75,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Makassar Kota Makassar	5 Sistem Informasi/Aplikasi 5 Berita/Informasi	150,000,000.0	APBD Prov		5 Sistem Informasi/Aplikasi 5 Berita/Informasi	286,038,000.11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	425,000,000.0			100 %	500,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	04	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Makassar Kota Makassar	50 Orang	275,000,000.0	APBD Prov		50 Orang	350,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Makassar Kota Makassar	3 Laporan 3 Jenis	150,000,000.0	APBD Prov		3 Laporan 3 Jenis	150,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	840,000,000.0			100 %	880,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Makassar Kota Makassar	160 Pasang	320,000,000.0	APBD Prov		160 Pasang	350,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Makassar Kota Makassar	160 Pasang	220,000,000.0	APBD Prov		160 Pasang	230,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	04	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Makassar Kota Makassar	200 Orang	300,000,000.0	APBD Prov		200 Orang	300,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.01	05				Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan									
1.01	05	01.00			Satuan Polisi Pamong Praja				15,200,156,879.87				16,358,998,674.35	
1.01	05	01.00	01		PROGRAM LAYANAN DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM)		100 %	695,000,000.0			100 %	804,998,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	001	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran Perda		16 Kasus	115,000,000.0			18 Kasus	115,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	002	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Praktek Ilegal	Jumlah Operasi Penertiban terhadap Praktek-praktek kerja ilegal		20 Kali	100,000,000.0			20 Kali	150,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	003	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah peserta Bimtek Pemberkasan Hasil Penyelidikan		40 Orang	25,000,000.0			40 Orang	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	004	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Area Kawasan Tanpa Rokok		15 Kali	30,000,000.0			20 Kali	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	005	Pemetaan Kasus Non Yustisi	Jumlah data dan Peta lokasi kasus pelanggaran Perda		7 Lokasi	90,000,000.0			8 Lokasi	90,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	006	Penerapan Kebijakan pada Pedoman Penyelidikan dan Penyidikan	Jumlah pelanggaran Perda dan Pergub Provinsi Sulawesi Selatan yang tertangani		9 Kasus	35,000,000.0			11 Kasus	35,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	007	Penyelidikan dan Penyidikan kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang terselesaikan		3 Kasus	35,000,000.0			3 Kasus	35,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	008	Penyelenggaraan Kerjasama Bantuan Hukum	Jumlah peserta rapat hubungan kerjasama bantuan hukum dalam penegakan perda		120 orang	15,000,000.0			130 orang	19,998,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	009	Satgas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan	Jumlah Aparat Satgas Penegakan Perda dan Pergub Sulawesi Selatan		120 Orang	250,000,000.0			130 Orang	300,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI POLISI PAMONG PRAJA	Cakupan petugas satpol yang terlatih		100 %	1,405,000,000.0			100 %	1,670,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	001	Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sat.Pol.PP	Jumlah peserta Aparat Sat.Pol.PP dalam peningkatan kualitas SDM		110 Orang	150,000,000.0			110 Orang	200,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	05	01.00	02	002	Pelatihan Dasar/ Kesamaptaan Sat.Pol.PP	Jumlah peserta pelatihan dasar/ kesamaptaan personil Pol.PP		65 Orang	470,000,000.0			75 Orang	500,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	003	Pembinaan Mental, Spritual dan Etika Pegawai Sat.Pol.PP	Jumlah peserta pembinaan Mental, Spritual dan Etika Pegawai Sat.Pol.PP		250 Orang	150,000,000.0			300 Orang	200,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	004	Penguatan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Rekrutmen Tenaga Teknis Operasional Sat.Pol.PP		100 Orang	100,000,000.0			100 Orang	140,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	005	Pembinaan Pelatihan Rescue Sat.Pol.PP	Jumlah anggota Sat.Pol.PP terlatih dalam penyelamatan		40 Orang	30,000,000.0			45 Orang	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	006	Bimbingan dan Penyuluhan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta masyarakat yang diberikan bimbingan dan penyuluhan		50 Orang	25,000,000.0			65 Orang	25,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	007	Pembinaan, Penyuluhan dan Pemahaman tentang Perda, Pergub dan Hukum Daerah	Jumlah peserta Aparat Sat.Pol.PP yang mengikuti penyuluhan dan pemahaman Perda, Pergub dan Hukum Daerah		75 Orang	25,000,000.0			85 Orang	35,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	008	Pembinaan, Penyuluhan dan edukasi potensi masyarakat melalui deteksi dini Penanganan gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Bimtek Aparat Sat.Pol.PP dalam penanganan deteksi dini		50 Orang	55,000,000.0			50 Orang	60,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	009	Bimbingan Teknis Penanganan Gejala Sosial	Jumlah peserta Bimtek Aparat Sat.Pol.PP penanganan secara dini gejala sosial		60 Orang	30,000,000.0			65 Orang	35,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	010	Focus Group Discussion (FGD) Kewaspadaan Dini	Jumlah peserta FGD kewaspadaan dini		65 Orang	30,000,000.0			0 Orang	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	011	Satgas Kewaspadaan Dini dan Peringatan	Jumlah Aparat Satgas Kewaspadaan dini dan peringatan dini dari Sat.Pol.PP		60 Orang	150,000,000.0			65 Orang	200,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	012	Forum Kewaspadaan Dini	Jumlah peserta Forum kewaspadaan dini		50 Orang	150,000,000.0			50 Orang	150,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	013	Pemetaan Wilayah Kewaspadaan Dini	Jumlah lokasi yang telah dipetakan rawan gangguan Trantibum dan Tranmas		15 Lokasi	40,000,000.0			15 Lokasi	65,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan		100 %	858,000,000.0			100 %	980,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	001	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Aparat Sat.Pol.PP dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah Draf RANPERDA Trantibum Provinsi Sulawesi Selatan		15 Kali 0 kali	105,000,000.0			20 Kali 0 kali	105,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	002	Penanganan Gangguan Trantibum	jumlah Pengamanan Gangguan Trantibum		120 Kali	250,000,000.0			140 Kali	300,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	003	Penyelenggaraan Patroli Wilayah	Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan		90 Kali	130,000,000.0			95 Kali	130,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	004	Penyelenggaraan Apel Besar Sat.Pol.PP	jumlah penyelenggaraan Apel besar secara terpusat di Sulsel		3 Kali	200,000,000.0			3 Kali	250,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	005	Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan aparat Sat.Pol.PP yang dilaksanakan		140 Kali	35,000,000.0			160 Kali	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	05	01.00	03	006	Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Lembaga/ Instansi Terkait	Jumlah Pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan Trantibum yang terlaksana		5 Kali	18,000,000.0			6 Kali	20,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	007	Operasi Penertiban gangguan ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat		7 Kali	40,000,000.0			8 Kali	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	008	Penyusunan Juknis dan SOP Pengendalian Operasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Juknis dan SOP pengendalian Operasi penyelenggaraan Trantibum	Kota Makassar	5 Dokumen	30,000,000.0			6 Dokumen	35,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	009	Satgas Pengendalian Operasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah aparat satgas operasi pengendalian Trantibum		110 Orang	30,000,000.0			120 Orang	35,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	010	Pemetaan Wilayah Operasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah data lokasi operasi yang telah dipetakan penertiban Gangguan Trantibum dan Tranmas		6 Dokumen	20,000,000.0			7 Dokumen	25,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Cakupan petugas perlindungan masyarakat		100 %	685,000,000.0			100 %	910,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	001	Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	jumlahPencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba		65 Orang	40,000,000.0			65 Orang	45,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	002	Bimtek Bela Negara	Jumlah peserta Bimtek Bela Negara		60 Orang	40,000,000.0			60 Orang	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	003	Penyuluhan dan Sosialisasi Linmas	Jumlah peserta Sosialisasi Linmas		60 Orang	200,000,000.0			60 Orang	300,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	004	Analisis Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Analisis Data Gangguan Trantibum		4 Dokumen	100,000,000.0			4 Dokumen	200,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	005	Pembinaan dan Pemberdayaan SatLinmas	Jumlah Peserta Pembinaan SatLinmas		65 Orang	80,000,000.0			70 Orang	80,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	006	Penguatan perlindungan masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Pelaksanaan penguatan Linmas dalam penanganan penyandang PMKS		11 Kali	50,000,000.0			14 Kali	50,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	007	Pengembangan Potensi masyarakat dan penanganan bencana dan pengungsi	Jumlah pelaksanaan pengembangan potensi masyarakat dalam menangani bencana dan pengungsi		20 Kali	50,000,000.0			20 Kali	50,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	008	Penyusunan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah audio/ visual Profil Dokumentasi kegiatan Sat.Pol.PP Provinsi Sulawesi Selatan		1 Buah/ Tahun	40,000,000.0			1 Buah/ Tahun	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	009	Bimtek Sistem Informasi Manajemen/ Data dan Informasi Pelaporan Sat.Pol.PP	Jumlah Peserta Bimtek Sistem Informasi Manajemen/ Data dan Pelaporan Sat.Pol.PP yang Responsif Gender		70 Orang	30,000,000.0			75 Orang	35,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	010	Pengembangan Potensi Masyarakat dalam mewujudkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan pembinaan pengembangan potensi masyarakat dalam mewujudkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum		20 Kali	35,000,000.0			25 Kali	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	011	Gladi Penanggulangan dan Penanganan Pasca Bencana	Jumlah peserta gladi penanggulangan dan penanganan Pasca Bencana		125 Orang	20,000,000.0			135 Orang	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		100 %	515,000,000.0			100 %	561,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemn kebakaran (WMMK)		100 %				100 %		
1.01	05	01.00	06	001	Gladi Penanggulangan Kebakaran	Jumlah peserta gladi penanggulangan kebakaran		65 Orang	35,000,000.0			70 Orang	47,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	06	002	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Aset Daerah	Jumlah peserta rapat koordinasi penanggulangan kebakaran aset daerah		60 Orang	40,000,000.0			65 Orang	54,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	06	003	Bimtek mentality dan kesamaptaan bagi anggota Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta Bimtek mentality dan kesamaptaan bagi anggota Pemadam Kebakaran		65 Orang	150,000,000.0			70 Orang	155,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	06	004	Pemetaan Wilayah Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah lokasi yang telah dipetakan Rawan Bencana Kebakaran se Sulawesi Selatan		20 Dokumen	135,000,000.0			25 Dokumen	140,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	06	005	Gladi Lapang Penyelamatan Bencana Kebakaran	Jumlah peserta gladi penyelamatan bencana kebakaran		65 Orang	25,000,000.0			70 Orang	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	06	006	Satgas Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Aset Daerah	Jumlah aparat satgas penanggulangan dan penyelamatan kebakaran aset daerah		70 Orang	130,000,000.0			80 Orang	135,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	9,465,000,000.0			100 %	9,830,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, Internet, Dokumentasi/Publikasi, Koran/ Majalah, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	150,000,000.0			12 Bulan	200,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	9 Unit 30 Unit	100,000,000.0			10 Unit 30 Unit	150,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	jumlah Jasa Tenaga Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Jasa Kebersihan Kantor serta Jasa Sopir yang terbavarkan	Kota Makassar	12 Bulan	8,000,000,000.0			12 Bulan	8,000,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	50	004	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor		12 Bulan	200,000,000.0			12 Bulan	200,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia		120 Jenis ATK	150,000,000.0			130 Jenis ATK	200,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		30 Unit	35,000,000.0			30 Unit	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		65 Jenis	400,000,000.0			75 Jenis	500,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran		2 Pameran	30,000,000.0			2 Pameran	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		200 Kali	400,000,000.0			250 Kali	500,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	635,000,000.0			100 %	750,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara		100 Unit	45,000,000.0			100 Unit	55,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	05	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	15 Unit	200,000,000.0			20 Unit	250,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	115 Unit	150,000,000.0			115 Unit	180,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		12 Unit	150,000,000.0			12 Unit	150,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	180 Unit	40,000,000.0			205 Unit	55,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website		120 Berita/Informasi	50,000,000.0			125 Berita/Informasi	60,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	222,156,879.87			100 %	133,000,674.35	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar	60 Orang	100,000,000.0			0 Orang	0.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang disusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang disusun dan dilaporkan	Kota Makassar	2 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 24 Dokumen	40,000,000.0			2 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 24 Dokumen	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan		24 Laporan	20,000,000.0			24 Laporan	25,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	27 Laporan	30,000,000.0			27 Laporan	35,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	2 Laporan	25,000,000.0			2 Laporan	25,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Kota Makassar	2 Laporan	7,156,879.87			2 Laporan	8,000,674.35	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	720,000,000.0			100 %	720,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kota Makassar	30 Laporan	60,000,000.0			30 Laporan	60,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	130 Pasang	200,000,000.0			130 Pasang	200,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	250 Pasang	400,000,000.0			250 Pasang	400,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan		40 Orang	60,000,000.0			50 Orang	60,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	02.00			Badan Penanggulangan Bencana Daerah				7,822,878,185.58				7,924,729,335.63	
1.01	05	02.00	07		PROGRAM PENCEGAHAN, MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah aparat/personil siaga bencana Jumlah kawasan evakuasi bencana		75 Orang 24 Lokasi	907,010,010.55			75 Orang 24 Lokasi	916,215,035.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	07	016	Gerakan Aksi Pengurangan Risiko Bencana melalui Fasilitasi Komunitas Sekolah Sungai/Gunung/Laut	Jumlah peserta gerakan aksi PRB	Kota Makassar	150 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		175 Orang	100,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	05	02.00	07	017	Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan	jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	Kota Makassar	450 orang	707,010,010.55	APBD Prov		500 orang	716,215,035.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	07	018	Penyusunan Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Kota Makassar	5 Dokumen	100,000,000.0	APBD Prov		5 Dokumen	100,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	08		PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah posko penanganan darurat bencana Cakupan ketersediaan bahan logistik pada Gudang stock % Jumlah korban bencana yang dievakuasi		24 Unit 5 Jenis 100 %	2,482,002,249.66			24 Unit 5 Jenis 100 %	2,516,920,985.07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	08	007	Penguatan dan Pengembangan Fungsi PUSDALOPS PB	jumlah SDM pengelola data kebencanaan	Kota Makassar	300 orang	790,000,000.0	APBD Prov		500 orang	950,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	08	012	Penyebarluasan informasi Kebencanaan melalui Media Massa dan Media Sosial	Jumlah peserta penyebarluasan informasi kebencanaan melalui media massa dan media sosial	Kota Makassar	350 orang	620,526,547.79	APBD Prov		250 orang	416,920,985.07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	08	013	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penanganan Darurat serta Pengelolaan Data dan Informasi	jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	Kota Makassar	500 orang	1,071,475,701.87	APBD Prov		500 orang	1,150,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	09		PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah perbaikan sarana dan prasarana umum serta sosial ekonomi pasca bencana Jumlah SDM yang terlatih dalam penanggulangan bencana		10 Unit 75 Orang	829,037,319.04			10 Unit 75 Orang	839,831,096.27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	09	007	Verifikasi Faktual Proposal Pascabencana	jumlah proposal yang diverifikasi	Kota Makassar	8 proposal	429,037,319.04	APBD Prov		8 proposal	400,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	09	010	Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi	jumlah dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi	Kota Makassar	1 dokumen	100,000,000.0	APBD Prov		1 dokumen	139,831,096.27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	09	011	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi	jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur dalam rehabilitasi dan rekonstruksi	Kota Makassar	300 orang	300,000,000.0	APBD Prov		300 orang	300,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	2,088,613,312.91			100 %	2,115,806,330.99	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	350,000,000.0	APBD Prov		12 Bulan	370,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	Kota Makassar	4 Unit 10 Unit	50,000,000.0	APBD Prov		4 Unit 10 Unit	50,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	40 Orang	780,000,000.0	APBD Prov		40 Orang	780,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	10 Jenis ATK	200,000,000.0	APBD Prov		10 Jenis ATK	200,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	9 Unit	50,000,000.0	APBD Prov		11 Unit	50,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	05	02.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	5 Jenis	100,000,000.0	APBD Prov		5 Jenis	100,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar	3 Pameran	158,613,312.91	APBD Prov		3 Pameran	165,806,330.99	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Makassar	220 Kali	400,000,000.0	APBD Prov		250 Kali	400,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	206,552,527.63			100 %	209,241,769.28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	2 Unit	45,000,000.0	APBD Prov		2 Unit	70,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	14 Unit	100,000,000.0	APBD Prov		14 Unit	100,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	45 Unit	61,552,527.63	APBD Prov		50 Unit	39,241,769.28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	731,748,085.01			100 %	741,275,190.28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar	450 Orang	200,000,000.0	APBD Prov		450 Orang	200,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar	2 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	261,748,085.01	APBD Prov		2 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	271,275,190.28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Kota Makassar	5 Laporan 5 Jenis	120,000,000.0	APBD Prov		5 Laporan 5 Jenis	120,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	24 Laporan	50,000,000.0	APBD Prov		24 Laporan	50,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	3 Laporan	50,000,000.0	APBD Prov		3 Laporan	50,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Kota Makassar	1 Laporan	50,000,000.0	APBD Prov		1 Laporan	50,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	577,914,680.78			100 %	585,438,928.69	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kota Makassar	40 Orang 8 Laporan	116,160,000.0	APBD Prov		40 Orang 8 Laporan	127,776,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	80 Pasang	34,848,000.0	APBD Prov		80 Pasang	38,332,800.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	05	02.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	80 Pasang	34,848,000.0	APBD Prov		80 Pasang	38,332,800.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar	400 Orang	392,058,680.78	APBD Prov		400 Orang	380,997,328.69	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	06				Sosial									
1.01	06	01.00			Dinas Sosial				26,409,318,857.88				28,622,962,475.68	
1.01	06	01.00	01		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (Prioritas)	% Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (Prioritas) % Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM) % Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (Prioritas)		100 %	1,128,704,776.46			100 %	1,092,749,137.04	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	01	001	Bimbingan Sosial Bagi Tuna Sosial (Wanita Tuna Susila, BWBLP, Waria, ODHA dan Gepeng)	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan bimbingan sosial		50 orang	47,500,000.0			50 orang	47,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	01	003	Bimbingan Sosial Penanggulangan Pencegahan NAPZA	Jumlah masyarakat, pelajar yang mendapatkan bimbingan sosial penanggulangan pencegahan Napza		70 orang	68,404,776.0			50 orang	47,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	01	005	Pemulangan Warga Negara Migran, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar dari Titik Debar Kasih ke Daerah Kab/Kota Provinsi Asal	Jumlah pekerja migran, korban tindak kekerasan dan orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal		300 orang	160,000,000.46			300 orang	140,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	01	006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kesiapsiagaan & Mitigasi Bencana Terhadap Petugas Provinsi, Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Provinsi dan Relawan yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana		50 orang	47,500,000.0			50 orang	47,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	01	007	Pelaksanaan Distribusi Logistik Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Alam Pada Kabupaten/Kota	jumlah Logistik Tanggap darurat dan Pasca Bencana Kab/Kota		24 Kab/Kota	150,000,000.0			24 Kab/Kota	170,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	01	009	Bimbingan Teknis Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Sosial	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bimbingan teknis dukungan psikososial		65 Orang	38,000,000.0			65 Orang	38,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	01	011	Pelaksanaan Distribusi Logistik Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sosial pada Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik Tanggap darurat dan Pasca Bencana Kab/Kota yang terlaksana		24 Kab/Kota	100,000,000.0			24 Kab/Kota	100,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	01	012	Koordinasi lintas sektor dalam penanganan gelandangan dan pengemis Kab/Kota	jumlah koordinasi lintas sektor penanganan gelandangan dan pengemis		50 Orang	47,500,000.0			50 Orang	47,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	01	017	Pemberdayaan Eks korban Penyalugunaan NAPZA melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Eks Penyalugunaan NAPZA yang menerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)		100 Orang	50,000,000.0			0 Orang	0.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	01	020	Bantuan Sosial Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	jumlah bantuan sosial alat bantu bagi penyandang disabilitas		20 orang	200,000,000.0			20 orang	214,949,137.04	Dinas Sosial

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	06	01.00	01	022	Rekrutmen Tenaga Pelopor Perdamaian	jumlah tenaga pelopor perdamaian		48 orang	47,300,000.0			48 orang	47,300,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	01	024	Pengembangan Wirausaha bagi Penyandang Disabilitas Produktif	jumlah penyandang disabilitas produktif yang mendapatkan pengembangan wirausaha		50 orang	172,500,000.0			50 orang	192,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	02		PROGRAM PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (Prioritas)	Cakupan anak dalam panti/lembaga kesejahteraan sosial yang dibina % Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)		425 Jiwa 100 %	4,549,728,801.25			425 Jiwa 100 %	4,763,956,692.75	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	02	001	pelayanan dan pembinaan sosial pada PPRSA Inang matutu makassar	Jumlah Anak Balita 0- 5 Tahun Yang Mendapatkan Pelayanan dan Reabilitas di PPRSA Inang Matutu		65 Balita	732,320,000.0			65 Balita	767,320,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	02	002	pelayanan dan pembinaan sosial pada anak terlantar pada PPSBK nirannuang bulukumba	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dan Pembinaan pada PPSBK Nirannuang Bulukumba		100 Anak	915,700,000.0			100 Anak	965,700,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	02	003	pelayanan dan pembinaan sosial anak terlantar pada PPSBR makkareso maros	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dan Pembinaan Pada PPSBR Makkareso Maros		110 Anak	1,011,937,000.0			110 Anak	1,061,937,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	02	004	pembinaan dan rehabilitasi sosial anak jalanan pada PPSBR makkareso maros	Jumlah Anak Jalanan Yang Mendapatkan Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial pad PPSBR Maakkareso Maros		70 Anak	519,000,000.0			70 Anak	569,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	02	010	pelayanan dan Pembinaan Sosial pada PPRSA Seroja Bone	jumlah persentase pembinaan sosial anak di PPSRA Seroia Bone		80 Anak	1,061,871,801.25			80 Anak	1,071,543,055.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	02	020	Penguatan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kab/Kota	jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak yang mendapatkan penguatan kapasitas		50 orang	47,500,000.0			50 orang	48,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	02	023	Pemberdayaan sosial gelandangan dan pengemis melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan usaha ekonomi produktif		50 orang	150,000,000.0			50 orang	125,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	02	024	Home visit dan sidang tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA)	jumlah home visit dan sidang tim PIPA		30 orang	45,900,000.0			30 orang	59,800,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	02	026	Koordinasi lintas sektor penanganan kesejahteraan sosial anak	Jumlah koordinasi lintas sektor penanganan kesejahteraan sosial Anak		50 Orang	65,500,000.0			50 Orang	95,156,637.75	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil (KAT) yang mendapatkan pengembangan kemampuan dan potensi % PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya % PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		800 Jiwa 0.7 % 1.1 %	11,734,601,334.89			800 Jiwa 0.8 % 1.2 %	11,696,404,061.18	Dinas Sosial

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	06	01.00	03	009	Penjajagan lokasi dan penyiapan kondisi masyarakat daerah komunitas adat terpencil	Jumlah Penjajagan lokasi dan pemberdayaan KAT		2 Lokasi	210,000,000.0			2 Lokasi	225,304,061.18	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	03	010	Koordinasi teknis pendamping dan operator keluarga harapan	Jumlah pendamping operator keluarga harapan yang melakukan koordinasi		500 Orang	236,500,000.0			500 Orang	241,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	03	011	Koordinasi lintas sektor penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahterah (RASTRA)	Jumlah koordinasi lintas sektor penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahterah (RASTRA)		50 Orang	60,000,000.0			0 Orang	0.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	03	012	Bantuan Sosial untuk Pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		4000 KK	10,000,000,000.0			4000 KK	10,000,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	03	020	Identifikasi dan seleksi calon pendamping dan penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin perkotaan	jumlah calon pendamping/ penerima bantuan yang diidentifikasi dan di seleksi		50 orang	71,001,334.89			50 orang	62,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	03	021	Bimbingan teknis pendamping dan penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin perkotaan	jumlah pendamping/penerima manfaat yang me dapatkan bimbingan teknis pemberdayaan fakir miskin		50 orang	47,100,000.0			50 orang	47,100,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	03	022	Pemberdayaan fakir miskin perkotaan melalui bantuan kelompok usaha bersama (KUBE)	jumlah fakir miskin perkotaan yang menerima bantuan kelompok usaha bersama		150 KK	300,000,000.0			150 KK	300,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	03	024	Identifikasi dan seleksi calon pendamping dan penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin pedesaan	jumlah calon pendamping/ penerima bantuan yang diidentifikasi dan di seleksi		70 Orang	52,500,000.0			70 Orang	62,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	03	025	Bimbingan teknis pendamping dan penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin pedesaan	jumlah pendamping/penerima manfaat yang me dapatkan bimbingan teknis pemberdayaan fakir miskin		50 orang	47,500,000.0			50 orang	47,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	03	026	Pemberdayaan fakir miskin pedesaan melalui bantuan kelompok usaha bersama (KUBE)	jumlah fakir miskin pedesaan yang menerima bantuan kelompok usaha bersama		150 KK	300,000,000.0			150 KK	300,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	03	028	Identifikasi dan seleksi calon pendamping dan penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin pesisir, tertinggal dan pulau pulau kecil	Jumlah calon pendamping/penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin pesisir yang diidentifikasi dan di seleksi		100 Orang	62,500,000.0			150 Orang	62,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	03	029	Bimbingan teknis pendamping dan penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin pesisir, tertinggal dan pulau pulau kecil	jumlah pendamping/penerima manfaat yang me dapatkan bimbingan teknis pemberdayaan fakir miskin		100 Orang	47,500,000.0			150 Orang	47,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	03	030	Pemberdayaan fakir miskin pesisir, tertinggal dan pulau pulau kecil melalui bantuan kelompok usaha bersama (KUBE)	jumlah fakir miskin pesisir yang menerima bantuan kelompok usaha bersama		150 KK	300,000,000.0			150 KK	300,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	04		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang dibina		246 LKS	874,468,037.13			246 LKS	784,551,341.31	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	04	001	Bimbingan dan pengembangan kerja sama kemitraan lembaga kesejahteraan sosial(orsos)	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan bimbingan dan pengembangan kerjasama kemitraan		50 orang	50,000,000.0			0 orang	0.0	Dinas Sosial

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	06	01.00	04	004	Bimbingan sosial pekerja sosial masyarakat	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang mendapatkan bimbingan sosial		50 orang	50,000,000.0			0 orang	0.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	04	005	Bimbingan sosial karang taruna	Jumlah karang taruna yang mendapatkan bimbingan sosial		50 orang	47,500,000.0			50 orang	47,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	04	006	Bimbingan teknis tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang mendapatkan bimbingan teknis		50 orang	47,500,000.0			50 orang	47,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	04	008	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional	Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional yang Terpelihara		2 TMP/MPN	179,868,037.13			2 TMP/MPN	189,951,341.31	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	04	009	Penanaman nilai kepahlawanan,keperintisan,kesetiakawanan dan restorasi sosial	jumlah penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial		3 hari-hari besar	402,000,000.0			3 hari-hari besar	402,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	04	010	Pengusulan dan rekomendasi calon pahlawan nasional,perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan	Jumlah pengusulan dan rekomendasi yang mendapatkan persetujuan penganugerahan gelar pahlawan nasional sekaligus tanda kehormatan lainnya		50 Orang	19,600,000.0			50 Orang	19,600,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	04	011	Bimbingan dan penyuluhan sosial	jumlah penyuluh sosial yang mendapatkan bimbingan		150 orang	78,000,000.0			150 orang	78,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	05		PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	Cakupan eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mendapatkan pembinaan		100 Jiwa	927,926,513.17			100 Jiwa	974,450,461.43	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	05	001	pelayanan dan rehabilitasi sosial pada PPSKW mattirodeceng makassar	Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan bimbingan dan pelayanan pada PPSKW Mattirodeceng Makassar		100 Orang	927,926,513.17			100 Orang	974,450,461.43	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	06		PROGRAM PELAYANAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO (Prioritas)	Cakupan lansia yang memperoleh perawatan di panti jompo % Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)		75 Jiwa 100 %	1,176,487,732.56			75 Jiwa 100 %	1,191,805,193.19	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	06	001	pelayanan sosial pada PPSLU mappakasunggu pare-pare	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan pada PPSLU Mappakasunggu Pare pare		75 orang	959,375,000.0			75 orang	959,375,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	06	003	bimbingan dan pendamping lanjut usia potensial	Jumlah lanjut usia potensial yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan		50 Orang	92,112,732.56			50 Orang	107,430,193.19	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	06	004	pemberdayaan lanjut usia potensial melalui usaha ekonomi produktif	jumlah lanjut usia potensial yang mendapatkan pemberdayaan		50 orang	125,000,000.0			50 orang	125,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	4,666,293,108.44			100 %	4,777,697,602.49	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik		12 Bulan	412,843,108.44			12 Bulan	434,000,000.0	Dinas Sosial

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	06	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS		71 Orang	2,336,400,000.0			71 Orang	2,336,400,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia		3 Jenis ATK	212,850,000.0			3 Jenis ATK	212,850,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		5 Unit	50,000,000.0			5 Unit	65,247,602.49	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		4 Jenis	1,165,800,000.0			4 Jenis	1,190,800,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran		3 Pameran	100,000,000.0			3 Pameran	100,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		88 Kali	388,400,000.0			88 Kali	438,400,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	971,541,100.94			100 %	2,984,190,227.78	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara		7 Unit	345,000,000.0			7 Unit	1,845,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		10 Unit	228,700,000.0			10 Unit	238,190,227.78	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara		1 Unit	20,000,000.0			1 Unit	20,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		300 Unit	340,841,100.94			300 Unit	844,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		5 Unit	37,000,000.0			5 Unit	37,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	333,857,984.96			100 %	338,204,699.67	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah		50 Orang	38,500,000.0			50 Orang	38,500,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	99,659,984.96			4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	104,006,699.67	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi		2 Jenis	88,000,000.0			2 Jenis	88,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		4 Laporan	107,698,000.0			4 Laporan	107,698,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	45,709,468.08			100 %	18,953,058.84	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasinya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun		5 Orang 0 Laporan	27,000,000.0			0 Orang 0 Laporan	0.0	Dinas Sosial

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01	06	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia		20 Pasang	15,000,000.0			20 Pasang	15,000,000.0	Dinas Sosial
1.01	06	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia		2 Pasang	3,709,468.08			2 Pasang	3,953,058.84	Dinas Sosial
1.02					Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
1.02					01	Tenaga Kerja								
1.02					01	01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			17,026,080,996.28			17,019,636,731.56	
1.02	01	01.00	01		PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA (Prioritas)	% Pencari kerja yang ditempatkan Rasio daya serap tenaga kerja (Prioritas)		3.91 % 58.78 %	1,738,500,000.0			4.13 % 59.09 %	1,738,500,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	01	001	Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri	Jumlah kelompok usaha mandiri yang mengikuti pembinaan	Provinsi Sulawesi Selatan	21 Kelompok	953,500,000.0			21 Kelompok	953,500,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	01	002	Penyelenggaraan Padat Karya	Jumlah penganggur yang mengikuti program padat karya	Provinsi Sulawesi Selatan	80 Orang	193,900,000.0			80 Orang	193,900,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	01	003	Pameran Bursa Kerja Daerah (Job Fair)	Data dan informasi lowongan kerja di perusahaan	Kota Makassar	1000 Orang	78,500,000.0			1000 Orang	78,500,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	01	004	Monitoring dan Pengendalian Tenaga Kerja Lokal dan Asing	Data dan informasi penempatan tenaga kerja lokal, tenaga kerja imigran dan tenaga kerja asing di kab/kota	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	200,000,000.0			24 Kab/Kota	200,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	01	005	Penyediaan Informasi Pasar dan Bursa Kerja	Data dan informasi pasar dan bursa kerja di kab/kota	Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	49,000,000.0			24 Kab/Kota	49,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	01	006	Pemerdayaan Tenaga Kerja AKL/AKAD	Jumlah tenaga kerja AKAD/AKL yang mengikuti pemberdayaan	Kota Makassar	20 Orang	50,000,000.0			20 Orang	50,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	01	007	Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	Jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas yang mendapatkan pemberdayaan/pembinaan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	80 Orang	99,600,000.0			80 Orang	99,600,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	01	008	Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah angkatan kerja dan stake holder terkait yang mengikuti sosialisasi	Kota Makassar	50 Orang	26,000,000.0			50 Orang	26,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	01	009	Pelayanan Sentra Penanganan TKI Terpadu	Pelayanan Penanganan TKI Terpadu	Kota Parepare Luar Provinsi Sulawesi Selatan	12 Bulan	88,000,000.0			12 Bulan	88,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		71.4 % 80 %	2,299,650,000.0			71.4 % 85 %	2,299,650,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	02	001	Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	Provinsi Sulawesi Selatan	360 Orang	977,600,000.0			360 Orang	977,600,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	02	002	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	Provinsi Sulawesi Selatan	45 Orang	258,000,000.0			45 Orang	258,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	02	003	Uji Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi	Provinsi Sulawesi Selatan	20 Orang	50,000,000.0			20 Orang	50,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	02	005	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi	Provinsi Sulawesi Selatan	10 LPK	41,000,000.0			10 LPK	41,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	02	006	Bimtek Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah orang yang mengikuti bimtek pelatihan berbasis kompetensi	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	70 Orang	163,750,000.0			70 Orang	163,750,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	01	01.00	02	008	Sosialisasi Pembinaan Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah stakeholder pelatihan yang mengikuti sosialisasi	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	20 Orang	50,000,000.0			20 Orang	50,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	02	009	Pemagangan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pemagangan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	150 Orang	100,000,000.0			150 Orang	100,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	02	010	Standarisasi Kompetensi Tenaga Kerja	Data dan informasi tenaga kerja yang memiliki standarisasi yang kompeten	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	41,000,000.0			1 Dokumen	41,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	02	011	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah warga transmigrasi yang mengikuti pelatihan	Provinsi Sulawesi Selatan	50 Orang	69,700,000.0			50 Orang	69,700,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	02	012	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah calon tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	Provinsi Sulawesi Selatan	80 Orang	329,500,000.0			80 Orang	329,500,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	02	013	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	Provinsi Sulawesi Selatan	40 Orang	96,000,000.0			40 Orang	96,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	02	015	Pengukuran Produktivitas	Data dan informasi pengukuran produktivitas tenaga kerja	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	44,100,000.0			1 Dokumen	44,100,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	02	017	Pelayanan dan Pembinaan UPTD BPK	Pelayanan dan pembinaan pelatihan UPTD	Kota Makassar	12 Bulan	79,000,000.0			12 Bulan	79,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	% Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan di perusahaan		78.13 % 39.64 % 12.8 %	1,673,000,000.0			86.13 % 52.85 % 16.01 %	1,693,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	001	Penanganan Kasus Ketenagakerjaan	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang ditangani di perusahaan	Kabupaten Gowa Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Takalar Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	150 Kasus	141,000,000.0			150 Kasus	141,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	002	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang diperiksa	Kabupaten Gowa Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Takalar Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	300 Perusahaan	350,000,000.0			300 Perusahaan	350,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	003	Pemeriksaan dan Pengujian Objek dan Peralatan K3	Data dan informasi objek dan peralatan K3 perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian	Kabupaten Gowa Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Takalar Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	100 Perusahaan	48,000,000.0			100 Perusahaan	48,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	006	Pembinaan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang mengikuti pembinaan	Kota Makassar	60 Orang	20,000,000.0			60 Orang	20,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	01	01.00	03	007	Pelatihan Keselamatan dan Kecelakaan Kerja (K3)	Jumlah tenaga kerja perusahaan yang mengikuti pelatihan keselamatan dan kecelakaan kerja (K3)	Kota Makassar	60 Orang	150,000,000.0			60 Orang	150,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	011	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Wilayah I	Jumlah perusahaan lingkup wilayah I yang diperiksa	Kabupaten Barru Kabupaten Enrekang Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kota Parepare	150 Perusahaan	130,000,000.0			150 Perusahaan	135,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	012	Pendataan Objek Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	Data dan informasi objek pengawasan ketenagakerjaan Wilayah I	Kabupaten Barru Kabupaten Enrekang Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kota Parepare	1 Dokumen	43,000,000.0			1 Dokumen	43,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	013	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Wilayah II	Jumlah perusahaan lingkup wilayah II yang diperiksa	Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kota Palopo	150 Perusahaan	130,000,000.0			150 Perusahaan	135,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	014	Pendataan Objek Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II	Data dan informasi objek pengawasan ketenagakerjaan Wilayah II	Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kota Palopo	1 Dokumen	43,000,000.0			1 Dokumen	43,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	015	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Wilayah III	Jumlah perusahaan lingkup wilayah III yang diperiksa	Kabupaten Bone Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo	150 Perusahaan	130,000,000.0			150 Perusahaan	135,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	016	Pendataan Objek Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III	Data dan informasi objek pengawasan ketenagakerjaan Wilayah III	Kabupaten Bone Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo	1 Dokumen	43,000,000.0			1 Dokumen	43,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	017	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Wilayah IV	Jumlah perusahaan lingkup wilayah IV yang diperiksa	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bulukumba Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar	150 Perusahaan	130,000,000.0			150 Perusahaan	135,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	018	Pendataan Objek Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV	Data dan informasi objek pengawasan	jeneponto	1 Dokumen	43,000,000.0			1 Dokumen	43,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ketenagakerjaan Wilayah IV	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bulukumba Kabupaten Kepulauan Selayar							
1.02	01	01.00	03	019	Pelayanan Pemeriksaan Pengawasan UPTD Wilayah I	Kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan pemeriksanaan pengawasan UPTD Wilayah	Kota Parepare	12 Bulan	68,000,000.0			12 Bulan	68,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	020	Pelayanan Pemeriksaan Pengawasan UPTD Wilayah II	Kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan pemeriksanaan pengawasan UPTD Wilayah	Kota Palopo	12 Bulan	68,000,000.0			12 Bulan	68,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	021	Pelayanan Pemeriksaan Pengawasan UPTD Wilayah III	Kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan pemeriksanaan pengawasan UPTD Wilayah	Kabupaten Bone	12 Bulan	68,000,000.0			12 Bulan	68,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	022	Pelayanan Pemeriksaan Pengawasan UPTD Wilayah IV	Kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan pemeriksanaan pengawasan UPTD Wilayah	Kabupaten Bulukumba	12 Bulan	68,000,000.0			12 Bulan	68,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	04		PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		964 % 2 % 50 % 100 %	1,268,850,000.0			972 % 1.9 % 54.76 % 100 %	1,268,850,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	04	001	Koordinasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh	Jumlah anggota SP/SB yang mengikuti rapat koordinasi/workshop	Kota Makassar	45 Orang	40,850,000.0			45 Orang	40,850,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	04	002	Pengupahan dan Jaminan Purna Kerja	Fasilitasi Dewan Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	23 Orang	500,000,000.0			23 Orang	500,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	04	003	Pemberdayaan LKS Tripartit	Fasilitasi Tim LKS Tripartit dalam mewujudkan hubungan industrial yang kondusif (Pengusaha, Pekerja,	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	27 Orang	400,000,000.0			27 Orang	400,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	04	004	Sosialisasi Penyusunan dan Penetapan UMP	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi (Unsur Pengusaha, Unsur Pekerja, Unsur Pemerintah)	Kota Makassar	50 Orang	34,000,000.0			50 Orang	34,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	04	005	Monitoring Pelaksanaan Syarat-Syarat Kerja	Data dan informasi pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan kab/kota	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	48,000,000.0			1 Dokumen	48,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	04	006	Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti bimtek	Kota Makassar	60 Orang	150,000,000.0			60 Orang	150,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	04	007	Pembinaan Jaminan Sosial Kesejahteraan tenaga Kerja	Jumlah pekerja yang mengikuti program jamsostek	Provinsi Sulawesi Selatan	95000 Orang	48,000,000.0			100000 Orang	48,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	01	01.00	04	009	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang dapat diselesaikan	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Kasus	48,000,000.0			100 Kasus	48,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	3,888,430,996.28			100 %	3,931,986,731.56	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kantor Disnakertrans Prov. Sulsel Kota Makassar	12 Bulan	541,000,000.0	APBD Prov		12 Bulan	541,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kantor Disnakertrans Prov. Sulsel Kota Makassar	7 Unit 10 Unit	50,000,000.0	APBD Prov		7 Unit 10 Unit	50,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kantor Disnakertrans Prov. Sulsel Kota Makassar	20 Orang	720,000,000.0	APBD Prov		20 Orang	720,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	16 Jenis ATK	552,300,000.0			16 Jenis ATK	550,300,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Jenis	1,494,150,000.0			2 Jenis	1,511,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar	1 Pameran	50,000,000.0			1 Pameran	50,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		12 Kali	480,980,996.28			12 Kali	509,686,731.56	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	4,510,000,000.0			100 %	4,590,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	51	003	Pembangunan Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dibangun	Tamalanrea Kota Makassar	1 Unit	3,500,000,000.0			1 Unit	3,500,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara		2 Unit	370,000,000.0			2 Unit	390,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		17 Unit	160,000,000.0			17 Unit	170,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		7 Unit	450,000,000.0			7 Unit	500,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		1 Unit	30,000,000.0			1 Unit	30,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	601,450,000.0			100 %	601,450,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah		52 Orang	16,600,000.0			52 Orang	16,600,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	110,100,000.0			4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	110,100,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK		2 Usulan Kegiatan	228,400,000.0			2 Usulan Kegiatan	228,400,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	01	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi		4 Laporan 3 Jenis	161,350,000.0			4 Laporan 3 Jenis	161,350,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		12 Laporan	50,000,000.0			12 Laporan	50,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun		19 Laporan	35,000,000.0			19 Laporan	35,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	250,000,000.0			100 %	100,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun		241 Orang 1 Laporan	100,000,000.0			241 Orang 1 Laporan	100,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia		240 Pasang	150,000,000.0			0 Pasang	0.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	02				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1.02	02	01.00			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				10,526,967,763.61				10,261,005,566.60	
1.02	02	01.00	01		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (Prioritas)	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Prioritas)		30.9 %	931,360,000.0			30.8 %	886,360,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	01	002	Pembentukan Model Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Kab/kota yang dibina pengembangan PATBM dan jumlah kab/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Maros Kabupaten Sinjai Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	3 Kab/kota	75,000,000.0	APBD Prov		3 Kab/kota	75,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	01	004	Pengasuhan Berbasis Hak Anak Dalam Keluarga dan Institusi	Jumlah kader organisasi/pemerintah dan non pemerintah yang difasilitasi edukasi pengasuhan berbasis hak anak	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	50 Orang	85,360,000.0	APBD Prov		65 Orang	80,360,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	01	005	Pengembangan Model Layanan Integratif Perlindungan Perempuan Termasuk TPPO	Jumlah Kab/kota yang mengembangkan model layanan integratif perlindungan perempuan termasuk TPPO	Kabupaten Bulukumba Kabupaten Maros Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Kab/kota	110,000,000.0	APBD Prov		2 Kab/kota	110,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	01	006	Pembentukan Model Pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak (SPA) bagi lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Jumlah Kab/Kota yg terlat[h penerapan model SPA berbasis PPRA	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	3 kab/kota	110,000,000.0	APBD Prov		3 kab/kota	90,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	01	007	Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan	Kabupaten Bantaeng	100 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		100 Orang	80,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						kampanye perkawinan anak	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan							Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	01	008	Pelayanan integratif dan rujukan Korban ktP/ktA	Jumlah Kasus perempuan dan anak korban KtP/KtA yang mendapatkan layanan pengaduan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	60 kasus	451,000,000.0	APBD Prov		60 kasus	451,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA	% Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga yang terstandarisasi		35 %	776,601,500.0			45 %	689,601,500.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	02	001	Penyusunan kebijakan teknis Pelaksanaan PUG	Jumlah kebijakan teknis yang ditetapkan	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	50,000,000.0	APBD Prov		0 Dokumen	0.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	02	007	Workshop PPRG Bagi Calon Fasilitator	Jumlah calon fasilitator yang mengikuti workshop PPRG	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	25 Orang	72,000,000.0	APBD Prov		30 Orang	76,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	02	01.00	02	010	Pendampingan/mentoring pelaksanaan PUG bagi perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah provinsi yang mendapatkan pendampingan/mentoring Jumlah perangkat daerah kab/kota yang mendapatkan pendampingan/mentoring	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Soppeng Kota Makassar Kota Parepare Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	10 OPD Provinsi 5 Kab.Kota	120,000,000.0	APBD Prov		13 OPD Provinsi 4 Kab.Kota	100,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	02	013	Penyusunan Kebijakan Teknis Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Kebijakan Ketahanan Keluarga	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	40,000,000.0	APBD Prov		0 Dokumen	0.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	02	015	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Indikator Pembangunan Ketahanan Keluarga	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan dimonitoring pencapaian indikator pembangunan ketahanan keluarga	Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Pinrang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Toraja Utara Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	8 Kab/Kota	110,000,000.0	APBD Prov		8 Kab/Kota	110,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	02	016	Workshop Kewirausahaan Bagi Perempuan Kelompok Rentan Provinsi dan Lintas Kab/Kota	Jumlah perempuan kelompok rentan yang mengikuti workshop kewirausahaan	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	200 Orang	54,500,500.0	APBD Prov		200 Orang	73,500,500.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	02	018	Workshop Kader/Pengurus Organisasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial	Jumlah peserta kader organisasi kemasyarakatan yang mengikuti workshop dan didampingi dalam pemberdayaan bidang politik, hukum, ekonomi dan Sosial	Kabupaten Bone Kabupaten Luwu Utara Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	160 Orang	90,101,000.0	APBD Prov		160 Orang	90,101,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	02	019	Penguatan dan Pengembangan Layanan PUSPAGA	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga	Kabupaten Barru Kabupaten Kepulauan Selavar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	3 Unit	70,000,000.0	APBD Prov		3 Unit	70,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	02	020	Operasionalisasi dan Penguatan focalpoin PUG	Jumlah focal poin PUG perangkat daerah yang ditingkatkan kapasitas dlm pelaksanaan fungsinya	Kota Makassar	30 Focal Point PUG	80,000,000.0	APBD Prov		30 Focal Point PUG	80,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						jumlahnya	Provinsi Sulawesi Selatan							1. Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	02	021	TOT Pemberdayaan Perempuan di Bidang Polhukosek bagi lembaga organisasi /lembaga masyarakat	jumlah fasilitator terlatih pada lembaga layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi	Kota Makassar	80 orang	90,000,000.0	APBD Prov		80 orang	90,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	% Kabupaten/Kota Layak Anak Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000)		58 % 2.92	899,184,580.0			70 % 2.9	852,286,578.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
1.02	02	01.00	03	002	Workshop Konvensi Hak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti workshop implementasi Konvensi Hak Anak menuju KLA	Kota Makassar	40 Orang	30,000,000.0	APBD Prov		40 Orang	30,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03	003	Penyediaan Layanan dan Materi Komunkasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah lembaga yang mengikuti pengembangan layanan informasi, Komunikasi dan edukasi (KIE) pencegahan kekerasan anak	Kota Makassar	30 Lembaga	71,150,000.0	APBD Prov		30 Lembaga	71,150,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03	004	Pengembangan Model/ Percontohan Desa Bebas Pornografi dan Bebas Pekerja Anak	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan model desa/kelurahan Bebas Pornografi dan Bebas Pekerja Anak dan desa/kelurahan tematik	Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Soppeng Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Parepare Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	150 Orang	75,000,000.0	APBD Prov		150 Orang	75,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03	005	Pengembangan dan Penyediaan Fasilitas Kegiatan Budaya, Kreatifitas, dan Rekreasi Ramah Anak	Jumlah peserta pelaksanaan pengembangan dan penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bulukumba Kabupaten Jeneponto Kabupaten Soppeng Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	50 Orang	43,000,000.0	APBD Prov		50 Orang	45,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03	006	Pendampingan Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah peserta pengelola lembaga yang mengikuti pengembangan layanan perlindungan khusus anak	Kabupaten Bone Kabupaten Maros Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare	40 orang	59,250,000.0	APBD Prov		40 orang	60,250,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan							
1.02	02	01.00	03	007	Bimtek Pemenuhan Hak Anak Menuju Sekolah Ramah Anak	Jumlah Peserta Bimtek PHA menuju Sekolah Ramah Anak (SRA) dari beberapa Sekolah Binaan Provinsi	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	48 Orang	40,000,000.0	APBD Prov		48 Orang	40,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03	010	Penyelenggaraan Festival Forum Anak Tingkat Daerah dan Nasional	Jumlah Provinsi yang mengikuti Forum Anak Nasional (FAN) dan Hari Anak Nasional (HAN) 2019 Jumlah peserta Forum Anak SULSEL dan Forum Anak Nasional (FAN)	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	0 Provinsi 750 Orang	90,000,000.0	APBD Prov		0 Provinsi 750 Orang	90,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03	011	Workshop Gugus tugas Penyelenggara Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Gugus tugas Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	50 Orang	60,784,580.0	APBD Prov		50 Orang	60,886,578.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03	015	Penyusunan MOU/Kerjasama pelaksanaan PHA antar Lembaga Pemerintah, Lembaga Masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama sinergitas antar lembaga dalam penyediaan layanan pemenuhan hak anak tingkat provinsi dan lintas kab/kota	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	40,000,000.0	APBD Prov		2 Dokumen	40,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03	019	Workshop Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak (PPRA)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak (PPRA)	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	40 Orang	50,000,000.0	APBD Prov		40 Orang	55,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03	022	Workshop Kelompok Anak/Forum Anak Daerah Menjadi Agen Perubahan (Pelapor dan Pelopor/2P)	Jumlah peserta dari kelompok anak/forum anak yang mengikuti pelatihan sebagai agen perubahan (Pelapor dan Pelopor/2P)	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	50 Orang	50,000,000.0	APBD Prov		50 Orang	55,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03	023	Pembentukan dan penguatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media peduli anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pembentukan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media peduli anak	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	75 Orang	50,000,000.0	APBD Prov		75 Orang	50,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03	026	Pelatihan Standar Layanan Bagi Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Jmh lembaga penyedia layanan AMPK yg mengikuti pelatihan Standar Layanan	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	10 Lembaga	80,000,000.0	APBD Prov		10 Lembaga	80,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03	028	Pembentukan Model SPA (SIStem perlindungan Anak) berbasis PPRA	Jumlah Kab/Kota yg terlat[h] penerapan model SPA berbasis PPRA	Kabupaten Gowa Kabupaten Maros Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	3 kab/kota	60,000,000.0	APBD Prov		0 kab/kota	0.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03	029	Penyediaan layanan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Jumlah Kab/Kota yang memiliki layanan Pusat	Kota Makassar	5 lembaga	50,000,000.0	APBD Prov		5 lembaga	50,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Informasi Sahabat Anak (PISA)	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan							Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	03	030	TOT bagi Calon Fasilitator dan Motivator Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Calon Fasilitator dan Motivator terlatih	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	30 Orang	50,000,000.0	APBD Prov		30 Orang	50,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	04		PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	% Lembaga layanan Perlindungan Perempuan sesuai standar		50 %	554,859,485.0			62.5 %	540,859,485.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	04	005	Supervisi pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan perlindungan perempuan di Kab/ Kota dalam mendorong Kab/ Kota Membantu UPT PPA	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan supervisi pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dalam mendorong kab/kota menuju UPT.PPA	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	5 Kab/kota	90,000,000.0	APBD Prov		5 Kab/kota	90,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	04	007	Lokakarya Tenaga Pendamping Korban Kekerasan Pada Lembaga Penyedia Layanan Termasuk TPPO	Jumlah Peserta lembaga layanan yang melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kondisi khusus termasuk TPPO yang mengikuti lokakarya	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	50 Orang	40,000,000.0	APBD Prov		50 Orang	40,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	04	010	Lokakarya Bagi Tenaga Penyedia Layanan Perempuan Korban Kekerasan (Layanan Pengaduan, Pencatatan Kasus, Manajemen Kasus, Teknik Pendampingan, Konseling, Mediator, Caring For Carigivers, Litigasi dan Non Litigasi)	Jumlah Petugas Layanan yang menjadi peserta lokakarya Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan (Layanan Pengaduan, Pencatatan Kasus, Manajemen Kasus, Teknik Pendampingan, Konseling, Mediator, Caring For Carigivers, Litigasi dan Non Litigasi)	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	200 Orang	90,000,000.0	APBD Prov		200 Orang	95,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	04	015	Supervisi Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Bina Keluarga TKI (GT Bina Keluarga TKI) Perempuan Provinsi dan Kab/ Kota	Jumlah Gugus Tugas Bina Keluarga TKI (GT Bina Keluarga TKI) Perempuan Provinsi dan Kab/ Kota terbentuk	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Toraja Utara Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	4 GT.BK.TKI	60,000,000.0	APBD Prov		4 GT.BK.TKI	60,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	02	01.00	04	017	Workshop Penyusunan standar operasional pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang	Jumlah peserta Workshop Penyusunan standar operasional pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	50 Orang	40,000,000.0	APBD Prov		50 Orang	40,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	04	018	Penyusunan kebijakan teknis Perlindungan Perempuan dari kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang	Jumlah dokumen kebijakan teknis perlindungan perempuan Tk.Provinsi yang terumuskan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	50,000,000.0	APBD Prov		2 Dokumen	50,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	04	022	Workshop Penguatan Kapasitas Bagi Paralegal Perlindungan Perempuan tingkat Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Workshop Paralegal Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	50 Orang	40,048,826.0	APBD Prov		50 Orang	40,048,826.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	04	023	Rapat Koordinasi Teknis Pencegahan Kekerasan Perempuan termasuk TPPO	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Teknis Pencegahan Kekerasan Perempuan termasuk TPPO	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	50 Orang	39,815,000.0	APBD Prov		50 Orang	39,815,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	04	035	Gerakan Bersama (Kampanye) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan termasuk TPPO	Jumlah peserta lembaga layanan yang melaksanakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kondisi khusus termasuk TPPO yang mengikuti lokakarya	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	200 Orang	104,995,659.0	APBD Prov		200 Orang	85,995,659.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	05		PROGRAM PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	% Korban KtP/A yang memperoleh layanan komprehensif pada UPT PPA		75 %	249,577,450.0			80 %	258,377,450.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	02	01.00	05	002	Penyediaan Perlindungan Rumah Aman	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani di rumah aman	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	24 Korban	87,365,000.0	APBD Prov		24 Korban	91,365,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	05	003	Pendampingan pemberdayaan korban KtP/KtA	Jumlah korban KtP/KtA, TPPO yang mendapatkan pelayanan pendampingan pemberdayaan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	60 Korban	26,295,875.0	APBD Prov		60 Korban	28,295,875.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	05	004	Pelaporan data dan informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Laporan data dan informasi pelayanan terhadap perempuan dan anak korban KtP/KtA	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	47,316,575.0	APBD Prov		1 Laporan	49,316,575.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	05	005	Pengembangan Managemen Mutu Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah dokumen evaluasi kepuasan pelanggan	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	8,600,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	9,400,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	05	006	Pelatihan Keterampilan Teknis Petugas Layanan & jejaring layanan	Jumlah tenaga layanan P2TP2A dan jejaring kerja yang dilatih keterampilan teknis pelayanan terpadu KtP/KtA	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	30 Orang	80,000,000.0	APBD Prov		30 Orang	80,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	06		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	% Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di daerah		85 %	656,594,926.0			87 %	613,646,301.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	06	003	Diseminasi Data dan Informasi Gender dan Anak	Intensitas diseminasi gender dan anak melalui media	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	12 bulan	212,498,000.0	APBD Prov		12 bulan	165,498,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	06	007	Workshop Pengelolaan Data Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Aplikasi Simfoni PPA	Jumlah petugas pencatatan pelaporan Simfoni PPA yang mengikuti workshop	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	60 Orang	49,950,280.0	APBD Prov		60 Orang	51,950,280.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	06	011	Workshop Pengelolaan dan Analisis Data Gender dan Anak	Jumlah pengelola data perangkat daerah terlatih teknik penyajian dan analisis data gender dan anak yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	90 Orang/OPD	65,000,000.0	APBD Prov		90 Orang/OPD	65,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	06	014	Workshop Penyajian Informasi Responsif Gender dan Anak Bagi Media	Jumlah peserta terinformasi penyajian informasi yang responsif gender dan anak	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	50 Orang	50,000,000.0	APBD Prov		50 Orang	50,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	06	016	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Informasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan	Jumlah Kab/kota lokasi monitoring dan evaluasi	Kabupaten Bantaeng	24 Kab/kota	200,814,500.0	APBD Prov		24 Kab/kota	201,814,500.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Perlindungan Anak		Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan							Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	06	019	Workshop Pengelolaan Aplikasi Sistem Data dan Informasi Gender dan Anak	Jumlah petugas pengelola sistem informasi gender dan anak daerah yang terinformasi teknis pengaplikasian SIGA daerah	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	98 Orang	78,332,146.0	APBD Prov		98 Orang	79,383,521.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	4,612,986,931.96			100 %	4,553,933,954.67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	12 Bulan	90,500,000.0	APBD Prov		12 Bulan	89,750,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	8 Unit 8 Unit	13,600,000.0	APBD Prov		9 Unit 8 Unit	13,400,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	02	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	17 Orang	476,460,000.0	APBD Prov		18 Orang	498,960,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	40 Jenis ATK	359,745,000.0	APBD Prov		40 Jenis ATK	402,742,465.67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	15 Unit	8,675,642.0	APBD Prov		15 Unit	6,575,500.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan	6 Jenis	3,109,036,289.96	APBD Prov		6 Jenis	3,020,905,989.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	1 Pameran	91,820,000.0	APBD Prov		1 Pameran	60,750,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kabupaten Bantaeng	120 Kali	463,150,000.0	APBD Prov		120 Kali	460,850,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan							Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	652,214,147.0			100 %	659,143,396.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	2 Unit	212,053,799.0	APBD Prov		2 Unit	216,647,896.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	17 Unit	155,115,500.0	APBD Prov		19 Unit	152,415,500.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	20 Unit	242,400,000.0	APBD Prov		23 Unit	245,080,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	02	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	20 Unit	30,644,848.0	APBD Prov		23 Unit	33,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	24 Sistem Informasi/Aplikasi 1 Berita/Informasi	12,000,000.0	APBD Prov		24 Sistem Informasi/Aplikasi 1 Berita/Informasi	12,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	117,226,495.0			100 %	118,178,959.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	105 Orang	37,650,000.0	APBD Prov		105 Orang	38,596,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen	69,576,495.0	APBD Prov		2 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen	69,582,959.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	20 Jenis 20 Laporan	5,000,000.0	APBD Prov		20 Jenis 20 Laporan	5,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	2 Laporan 1 Laporan 12 Laporan	5,000,000.0	APBD Prov		2 Laporan 1 Laporan 12 Laporan	5,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	200,171,821.0			100 %	201,019,821.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	3 Laporan 3 Orang	20,500,000.0	APBD Prov		3 Laporan 3 Orang	20,900,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	02	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	65 Pasang	56,500,507.0	APBD Prov		65 Pasang	56,948,507.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	02	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	65 Pasang	123,171,314.0	APBD Prov		65 Pasang	123,171,314.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	03				Pangan									
1.02	03	01.00			Dinas Ketahanan Pangan				16,214,142,329.79				16,600,651,332.46	
1.02	03	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % Pengawasan keamanan pangan		93.2 % 100 %	3,590,000,000.0			93.35 % 100 %	3,860,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	01	007	Pembinaan dan Pemantauan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah kelompok yang dibina	Provinsi Sulawesi Selatan	50 kelompok	345,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	50 kelompok	400,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	01	008	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah lomba yang diikuti	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan	2 Jenis	375,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	2 Jenis	380,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	01	010	Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT)	Frekuensi pengawasan terpadu ke produsen pangan segar	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Kali	385,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	2 Kali	405,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	01	012	Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Jumlah Sertifikat PSAT Jumlah produk pangan segar yang terdaftar	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Sertifikat 10 Nomor Pendaftaran	320,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	10 Sertifikat 10 Nomor Pendaftaran	350,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	01	015	Penyusunan Dokumen Sistem Jaminan Mutu	Jumlah Dokumen Sistem Jaminan Mutu	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	345,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 Dokumen	400,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	01	017	Penyebarluasan Informasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu	Jumlah Dokumen ekspose PSAT	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	355,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 Dokumen	370,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	01	023	Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Penerima Manfaat Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah kelompok yang dibina	Provinsi Sulawesi Selatan	100 kelompok	750,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	100 kelompok	800,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	01	024	Pengembangan Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Kelompok yang dibina	Provinsi Sulawesi Selatan	50 Kelompok	345,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	50 Kelompok	370,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	01	025	Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah KRPL yang dibina	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	50 Kelompok	370,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	50 Kelompok	385,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN PANGAN DAN KERAWANAN PANGAN	% Ketersediaan pangan utama Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Provinsi setara beras (ton)		100 % 150 Juta Ton	1,878,256,809.0			100 % 155 Juta Ton	2,150,718,353.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	02	002	Penyusunan Peta Kerawanan Pangan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Kerawanan Pangan dan Kerentanan Pangan (PSVA)	Provinsi Sulawesi Selatan	1 dokumen	586,256,809.0	APBD Prov	opd parsial	1 dokumen	510,718,353.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	02	008	Pembinaan dan Pemantuan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah lumbung pangan yang dipantau	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	55 kelompok	596,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	60 kelompok	780,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	02	009	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan serta Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan	Provinsi Sulawesi Selatan	1 dokumen	696,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 dokumen	860,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	03		PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN	Cakupan ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan		100 %	1,000,000,000.0			100 %	1,075,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	03	001	Pengembangan dan Pemantauan Distribusi Pangan Strategis	Jumlah Dokumen hasil pemantauan	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	300,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 Dokumen	350,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	03	01.00	03	002	Pengembangan dan Pemantauan Harga Pangan Strategis	Jumlah Dokumen Data harga pangan strategis secara real time	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	250,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	2 Dokumen	325,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	03	003	Analisis Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen analisis distribusi dan harga pangan	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	100,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 Dokumen	0.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	03	004	Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan Strategis	Jumlah dokumen Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan Strategis	Provinsi Sulawesi Selatan	2 dokumen	350,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	2 dokumen	400,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	6,827,900,352.65			100 %	7,014,068,819.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	1,290,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	12 Bulan	1,306,095,281.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	84 Orang	3,829,900,000.0	APBD Prov	opd parsial	84 Orang	3,878,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	12 Jenis ATK	501,000,352.65	APBD Prov	opd parsial	12 Jenis ATK	507,498,538.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	20 Unit	75,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	20 Unit	80,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	10 Jenis	500,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	10 Jenis	606,300,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan	7 Pameran	300,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	7 Pameran	300,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	100 Kali	332,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	100 Kali	336,175,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	1,125,000,000.0			100 %	1,175,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	Kota Makassar	4 Unit	100,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	4 Unit	100,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	2 Unit	350,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	2 Unit	350,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	50 Unit	200,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	50 Unit	200,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Kota Makassar	20 Unit	75,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	20 Unit	75,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	20 Unit	50,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	20 Unit	50,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	20 Unit	200,000,000.0	APBD dan DAK	opd parsial	20 Unit	250,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	20 Unit	100,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	20 Unit	100,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Kota Makassar	3 Sistem Informasi/Aplikasi 5 Berita/Informasi	50,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	3 Sistem Informasi/Aplikasi 5 Berita/Informasi	50,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	03	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	975,000,000.0			100 %	1,050,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Orang	125,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	100 Orang	125,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang disusun dan dilaporkan Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang disusun Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	400,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	450,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	Kota Makassar	10 Usulan Kegiatan	35,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	10 Usulan Kegiatan	35,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	5 Jenis 5 Laporan	50,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	5 Jenis 5 Laporan	50,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	12 Laporan	275,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	12 Laporan	300,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	2 Laporan	50,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	2 Laporan	50,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Kota Makassar	1 Laporan	40,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 Laporan	40,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	817,985,168.14			100 %	275,864,160.46	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian	Kota Makassar	12 Laporan 700 Orang	255,485,168.14	APBD Prov	opd parsial	12 Laporan 700 Orang	275,864,160.46	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	50 Pasang	562,500,000.0	APBD Prov	opd parsial	0 Pasang	0.0	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	04				Pertanahan									
1.02	04	01.00			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				105,536,440,319.97				106,810,488,025.11	
1.02	04	01.00	01		PROGRAM PENATAAN KEAGRARIAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERBATASAN ANTAR DAERAH,PROVINSI	Penyelesaian Kasus tanah Provinsi Penyelesaian Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum		100 % 3 Lokasi	2,598,537,233.97			100 % 3 Lokasi	2,632,808,025.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.02	04	01.00	01	001	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Jumlah Pengadaan Tanah	Kabupaten Wajo	1 Kawasan	2,598,537,233.97	APBD Prov		1 Kawasan	2,632,808,025.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.02	05				Lingkungan Hidup									
1.02	05	01.00			Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup				10,982,478,515.38				11,125,466,560.59	
1.02	05	01.00	01		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Prioritas)	% Penurunan Jumlah Beban Pencemaran		44 %	936,750,015.95			47 %	943,823,873.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Cakupan lokasi kerusakan sumber daya alam yang dipulihkan Indeks kualitas udara (Prioritas) Indeks kualitas air (Prioritas)		20 % 88.75 77.72				20 % 88.8 77.78		
1.02	05	01.00	01	001	Pemantauan Kualitas Air	Jumlah sungai dan danau yang diketahui status kualitas airnya	Danau Matano, Danau Tempe, Sungai Tallo, Sungai Maros, Sungai Jeneberang, Sungai Pangkajene, Sungai Sigeri, Sungai Kalibone, Sungai Taman Roya, Sungai Pappa, Sungai Karajae, Sungai Bila, Sungai Kelara, Sungai Kariango, Sungai Saddang, Sungai Tino, Sungai Awo, Sungai Walanae, Sungai Lamasi, Sungai Pareman, Sungai Bialo, Sungai Lolisang, Sungai Tangka, Sungai Tarumpakkae Provinsi Sulawesi Selatan	22 Sungai dan 2 Danau	175,000,000.0			24 Sungai dan 2 Danau	175,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	01	002	Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah kab/kota yang dipantau status mutu udaranya	Makassar, Maros, Pangkajene, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Parepare, Pinrang, Palopo, Tana Toraja, Toraja Utara, Bulukumba, Luwu, Sidrap, Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan	17 Kab/kota	100,000,000.0			20 Kab/kota	100,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	01	003	Pemantauan kualitas tanah	Jumlah lokasi pemantauan kualitas tanah	Enrekang, Toraja, Maros Provinsi Sulawesi Selatan	3 Kab/kota	75,000,000.0			3 Kab/kota	75,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	05	01.00	01	004	Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang diawasi tingkat ketaatannya terhadap izin lingkungan dan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi	Kabupaten Kepulauan Selayar,Kabupaten Bulukumba,Kabupaten Bantaeng,Kabupaten Jeneponto,Kabupaten Takalar,Kabupaten Gowa,Kabupaten Sinjai,Kabupaten Bone,Kabupaten Maros,Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,Kabupaten Barru,Kabupaten Soppeng,Kabupaten Wajo,Kabupaten Sidenreng Rappang,Kabupaten Pinrang,Kabupaten Enrekang,Kabupaten Luwu,Kabupaten Tana Toraja,Kabupaten Luwu Utara,Kabupaten Luwu	65 Usaha dan/atau kegiatan	236,750,015.95			70 Usaha dan/atau kegiatan	243,823,873.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	01	006	Inventarisasi kerusakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kab/kota yang di inventarisasi kerusakan sumber daya alamnya	SULAWESI SELATAN	10 Lokasi	100,000,000.0			10 Lokasi	100,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	01	007	Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi yang dipulihkan sumber daya alamnya	Sulawesi Selatan	1 Lokasi	200,000,000.0			1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	01	008	Pemantauan Kualitas Air Laut	Jumlah Laut yang diketahui Kualitas Status Mutunya	Sulawesi Selatan	4 Laut	50,000,000.0			4 Laut	50,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3	% Penanganan Sampah Kabupaten/Kota Cakupan Limbah B3 yang Dikelola		50 % 90 %	5,364,744,562.72			52 % 95 %	5,434,591,668.92	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02	001	Pengembangan Fasilitas Tekhnis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Jumlah lokasi pengembangan fasilitas Teknis pengelolaan sampah dan limbah B3	SULAWESI SELATAN	5 Lokasi	770,944,108.0			5 Lokasi	788,315,879.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02	002	Pembinaan Pemanfaatan B3 dan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam pemanfaatan dan Pengelolaan LB3	Sulawesi Selatan	150 Perusahaan	947,933,491.0			175 Perusahaan	965,305,262.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02	003	Pembinaan Adipura dan Kalpataru	Jumlah Kab/kota yang dibina untuk penilaian Adipura dan Kalpataru	24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan	15 Kab/kota	397,933,491.0			15 Kab/kota	415,305,262.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02	004	Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kab/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	SULAWESI SELATAN	24 Kab/kota	497,933,491.0			24 Kab/kota	515,305,262.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02	005	Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	SULAWESI SELATAN	500 ton	1,989,999,981.72			550 ton	1,930,360,003.92	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02	006	Penyelenggaraan Ketatausahaan UPTD Pengelolaan Limbah B3	Jumlah pelayanan ketatausahaan UPTD pengelolaan Limbah B3	SULAWESI SELATAN	7 Jenis	590,000,000.0			7 Jenis	630,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02	007	Penjaminan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah dokumen penjaminan pengelolaan limbah B3	SULAWESI SELATAN	3 Dokumen	170,000,000.0			3 Dokumen	190,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	05	01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup		100 %	476,484,313.87			100 %	482,687,973.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	03	001	Penatausahaan Administrasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah PAD yang dihasilkan dari jasa Laboratorium Lingkungan	SULAWESI SELATAN	650000000 Rupiah	210,484,313.87			700000000 Rupiah	213,687,973.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	03	002	Pengembangan Mutu Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Parameter yang Ter Akreditasi	Sulawesi Selatan	60 Parameter	136,000,000.0			65 Parameter	137,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	03	003	Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah sampel yang diuji	Sulawesi Selatan	1100 sampel	130,000,000.0			1150 sampel	132,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	04		PROGRAM PENAAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	% Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kelompok Masyarakat atau lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan Lingkungan Hidup		100 %	687,907,433.26			100 %	701,986,050.26	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	04	001	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi tindak lanjut Kasus/Perkara LH yang ditangani	Sulawesi Selatan	14 Rekomendasi	68,000,000.0			16 Rekomendasi	69,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	04	002	Identifikasi, Investigasi, Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Provinsi, Lokasi Usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Sulawesi Selatan	14 Rekomendasi	68,000,000.0			16 Rekomendasi	69,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	04	004	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	Jumlah Kab/kota dan sekolah yang dibina	Sulawesi Selatan	110 Sekolah dan Kab/kota	229,373,580.0			120 Sekolah dan Kab/kota	230,373,580.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	04	005	Pemberian Penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	Jumlah Penerima penghargaan lingkungan hidup	Sulawesi Selatan	60 Sekolah	110,000,000.0			80 Sekolah	114,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	04	007	Penerapan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi	Sulawesi Selatan	20 MHA dan Kearifan Lokal	131,592,747.0			20 MHA dan Kearifan Lokal	132,495,237.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	04	009	Pembinaan dan Penerapan Ekolabel, Teknologi Ramah Lingkungan	Jumlah Kab/kota yang dibina dalam penerapan ekolabel dan teknologi ramah lingkungan	Sulawesi Selatan	6 Produk	80,941,106.26			7 Produk	87,117,233.26	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	05		PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN	Cakupan penilaian dokumen lingkungan kabupaten/kota Cakupan pemantauan emisi Gas Rumah Kaca		100 %	793,842,730.75			100 %	804,178,286.69	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	05	001	Koordinasi Pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca)	Jumlah Dokumen Pelaporan penurunan emisi gas Rumah kaca (GRK)	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	300,000,000.0			1 Dokumen	302,500,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	05	004	Pembinaan dan Pengawasan dan pelaksanaan KLHS dan RPPLH di Kabupaten/Kota/Prov. Sulawesi selatan	Jumlah kab/kota yang dibina dalam Pelaksanaan KLHS dan RPPLH	SULAWESI SELATAN	24 Kab/Kota	230,000,000.0			24 Kab/Kota	235,678,286.69	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	05	005	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	151,500,000.0			1 Dokumen	152,500,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	05	006	Penilaian Dokumen Lingkungan	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang di Nilai	SULAWESI SELATAN	7 Dokumen	112,342,730.75			7 Dokumen	113,500,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	05	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	1,770,211,980.39			100 %	1,793,259,523.99	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah tenaga non PNS yang diadakan	Kantor DPLH Kota Makassar	21 orang	718,200,000.0			21 orang	718,200,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang Tersedia	Kota Makassar	70 Jenis ATK	250,000,000.0			80 Jenis ATK	250,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	60 Unit	20,000,000.0			60 Unit	20,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat atau pertemuan yang disediakan makanan dan minumannya.	Kota Makassar	260 Rapat	350,000,000.0			270 Rapat	350,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah pameran yang dilaksanakan dan diikuti	Kota Makassar	1 Pameran	182,011,980.39			1 Pameran	155,059,523.99	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi	SULAWESI SELATAN DAN JAWA	45 Kali	250,000,000.0			50 Kali	300,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	362,045,877.45			100 %	366,759,588.71	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas untuk kendaran dinas dan operasional kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	Kota Makassar	30000 Liter 62 jenis	45,354,877.45			35000 Liter 62 jenis	50,068,588.71	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Kota Makassar	100 unit	316,691,000.0			100 unit	316,691,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	460,564,739.30			100 %	466,561,131.84	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum PD	Kota Makassar	100 orang	30,000,000.0			100 orang	30,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	SULAWESI SELATAN	8 Dokumen	30,000,000.0			8 Dokumen	30,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	Kota Makassar	1 Usulan Kegiatan	50,000,000.0			1 Usulan Kegiatan	50,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Sulawesi Selatan	4 Jenis	157,064,739.30			4 Jenis	158,061,131.84	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	3 Laporan	91,500,000.0			3 Laporan	91,500,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		3 Laporan	100,000,000.0			3 Laporan	105,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan OPD	Kantor DPLH Kota Makassar	4 Laporan	2,000,000.0			4 Laporan	2,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	129,926,861.69			100 %	131,618,464.18	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Cakupan ASN yang mendapatkan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kantor DPLH Kota Makassar	100 Pasang	65,000,000.0			100 Pasang	65,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah ASN yang diadakan pakaian dinas lapangan dan pakaian khusus hari-hari tertentu.	Kantor DPLH Kota Makassar	110 ASN	64,926,861.69			115 ASN	66,618,464.18	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	06				Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02	06	01.00	01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				6,209,825,357.62			6,277,655,469.71		
1.02	06	01.00	01		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan penerbitan akta kelahiran Cakupan Perekaman KTP-el Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan Cakupan Kepemilikan KTP-el		88 % 98 % 15 % 91 %	1,590,124,884.04			88 % 99 % 15 % 93 %	1,606,921,860.80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	01	001	Bimtek Pelayanan Perekaman KTP-el	Jumlah peserta Bimtek Jumlah peserta Bimtek		96 Orang 96 Orang	300,000,000.0		opd parsial	96 Orang 96 Orang	300,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	01	002	Fasilitas Pelaksanaan Penerbitan KTP-el Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/kota yang di fasilitasi Jumlah Kabupaten/kota yang di fasilitasi		24 Kabupaten/ Kota 24 Kabupaten/ Kota	200,000,000.0		opd parsial	24 Kabupaten/ Kota 24 Kabupaten/ Kota	200,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	01	003	Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun	Jumlah Peserta Jumlah Peserta		50 Orang 50 Orang	190,000,000.0		opd parsial	50 Orang 50 Orang	190,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	01	004	Pembinaan Penerbitan Akta Kematian	Jumlah Peserta Jumlah Peserta		75 Orang 75 Orang	10,000,000.0		opd parsial	75 Orang 75 Orang	10,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	01	007	Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring		24 Kab/Kota 24 Kab/Kota	239,155,884.04		opd parsial	24 Kab/Kota 24 Kab/Kota	255,952,860.80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	01	008	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kab/Kota tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Jumlah Peserta Jumlah Laporan Jumlah Peserta		2 Laporan 80 Orang 2 Laporan 80 Orang	190,000,000.0		opd parsial	2 Laporan 80 Orang 2 Laporan 80 Orang	190,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	01	010	Pembinaan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi		75 Orang 75 Orang	10,000,000.0		opd parsial	75 Orang 75 Orang	10,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	01	013	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelayanan adminduk Jumlah koordinasi dan konsultasi pelayanan adminduk		24 Kali 24 Kali	300,000,000.0		opd parsial	24 Kali 24 Kali	300,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	01	014	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring		24 Kab/Kota 24 Kab/Kota	150,969,000.0		opd parsial	24 Kab/Kota 24 Kab/Kota	150,969,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala provinsi		100 %	1,130,344,902.98			100 %	1,141,155,704.49	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	02	003	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan SIAK Jumlah Kegiatan Pengelolaan SIAK		4 Kegiatan 4 Kegiatan	200,000,000.0		opd parsial	4 Kegiatan 4 Kegiatan	200,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	02	004	Peningkatan Kapasitas Administrator Data Base Pengelola SIAK	Jumlah Peserta Jumlah Peserta		80 Orang 80 Orang	300,000,000.0		opd parsial	80 Orang 80 Orang	300,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	02	006	Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi		82 Peserta 82 Peserta	200,000,000.0		opd parsial	82 Peserta 82 Peserta	200,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	02	008	Penyajian data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan yang tersedia Jumlah Dokumen Kependudukan yang tersedia		1 Dokumen 1 Dokumen	230,344,902.98		opd parsial	1 Dokumen 1 Dokumen	241,155,704.49	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	02	010	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kab/Kota tentang PIAK, Pemanfaatan Data dan Dokumen	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		50 OPD	200,000,000.0		opd parsial	50 OPD	200,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kependudukan dan Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office)	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		50 OPD				50 OPD		
1.02	06	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	2,080,304,289.71			100 %	2,103,170,306.31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan		3 Unit 9 Unit	46,275,806.35		opd parsial	3 Unit 9 Unit	51,849,009.67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS		26 Orang 26 Orang	908,552,183.34		opd parsial	26 Orang 26 Orang	914,125,386.66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia Jumlah ATK yang tersedia		30 Jenis ATK 30 Jenis ATK	170,926,933.34		opd parsial	30 Jenis ATK 30 Jenis ATK	176,500,136.66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		12 Jenis 12 Jenis	679,732,183.34		opd parsial	12 Jenis 12 Jenis	680,305,386.66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran		1 Pameran 1 Pameran	50,000,000.0		opd parsial	1 Pameran 1 Pameran	50,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas Jumlah perjalanan dinas		34 Kali 34 Kali	224,817,183.34		opd parsial	35 Kali 35 Kali	230,390,386.66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	735,660,414.60			100 %	743,936,491.86	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara		1 Unit 1 Unit	283,034,805.93		opd parsial	1 Unit 1 Unit	285,793,498.52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		12 Unit 12 Unit	223,014,804.33		opd parsial	12 Unit 12 Unit	225,773,496.67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		3 Unit 3 Unit	204,610,804.34		opd parsial	3 Unit 3 Unit	207,369,496.67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		20 Unit 20 Unit	25,000,000.0		opd parsial	20 Unit 20 Unit	25,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	413,390,866.29			100 %	417,471,106.25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah		160 Orang 160 Orang	105,634,288.95		opd parsial	160 Orang 160 Orang	106,994,368.91	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	06	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan		1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	178,114,288.67		opd parsial	0 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	179,474,368.67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		15 Laporan	129,642,288.67		opd parsial	15 Laporan	131,002,368.67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	260,000,000.0			100 %	265,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya		2 Laporan 64 Orang	100,000,000.0		opd parsial	2 Laporan 70 Orang	100,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia		64 Pasang	60,000,000.0		opd parsial	70 Pasang	65,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	06	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia		64 Pasang	100,000,000.0		opd parsial	70 Pasang	100,000,000.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02	07				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1.02	07	01.00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				17,104,329,567.42				17,381,453,201.36	
1.02	07	01.00	01		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAAN	Peningatan jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masvarakat Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya		5 % 60 RTM	1,000,111,095.63			5 % 60 RTM	1,018,228,548.11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	01	001	Identifikasi Pemanfaatan Produk TTTG Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Lokasi Identifikasi Pemanfaatan Produk TTTG Masyarakat	Lokasi Produk TTTG	6 Lokasi	137,812,500.0	APBD Prov	identifikasi pemanfaatan TTTG hasil lomba	6 Lokasi	144,703,125.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	01	002	Pengembangan Inovasi TTTG Perdesaan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Juara Lomba Inovasi TTTG Tingkat Provinsi	Kota Makassar	6 Juara	452,099,595.63	APBD Prov	lomba inovasi TTTG	6 Juara	457,713,423.11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	01	004	Bimtek Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	Jumlah Peserta Bimtek Pemanfaatan TTTG	Kota Makassar	60 Orang	260,199,000.0	APBD Prov	bimtek bagi pelaku TTTG	60 Orang	265,812,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	01	010	Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sumberdaya Alam dan TTTG	Jumlah Lokasi Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan SDA dan TTTG	kab/kota	24 Lokasi	150,000,000.0	APBD Prov		24 Lokasi	150,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	07	01.00	02		PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Jumlah BUMDES yang difasilitasi		180 BUMDES	1,219,458,183.67			180 BUMDES	1,235,335,104.61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	02	001	Workshop Pengembangan Kerjasama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Peserta Workshop Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten	Kota Makassar	90 Orang	147,679,000.0	APBD Prov		90 Orang	149,663,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	02	002	Bimtek Manajemen Pengelolaan Kerja Sama Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Peserta Bimtek Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten	Kota Makassar	60 Orang	135,179,000.0	APBD Prov		60 Orang	137,163,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	02	004	Identifikasi Kelembagaan Bumdes Berprestasi	Jumlah Lokasi Identifikasi Kelembagaan BUMDES	Kota Makassar	21 Lokasi	269,585,183.67	APBD Prov		21 Lokasi	271,569,104.61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	02	008	Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan Unit Usaha Bumdes Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Pengelolaan Unit Usaha Bumdes	Kota Makassar	60 Orang	135,579,000.0	APBD Prov		60 Orang	137,563,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	02	009	Bimtek Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pengelola Usaha Ekonomi Masyarakat yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kota Makassar	120 Orang	225,779,000.0	APBD Prov		120 Orang	227,763,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	02	010	Identifikasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta Identifikasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Kota Makassar	60 Peserta	100,383,000.0	APBD Prov		60 Peserta	102,372,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	02	013	Bimtek Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta Aparat Pelaku Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Makassar	90 Orang	153,295,000.0	APBD Prov		90 Orang	155,279,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	02	015	Pengendalian dan Pembinaan Program Pendampingan Desa Tingkat Provinsi	Jumlah Aparat Teknis dan Pendamping Profesional yang dibina dan ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Makassar	30 Orang	51,979,000.0	APBD Prov		30 Orang	53,963,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	% Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LSM yang aktif) % Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LPM Berprestasi) % Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)		0.3 % 6.25 % 1 %	1,386,548,500.0			0.35 % 6.25 % 1 %	1,324,833,875.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	03	001	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Lokasi Monev Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat	Kota Makassar	24 Lokasi	250,000,000.0	APBD Prov		24 Lokasi	250,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	03	002	Identifikasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kabupaten Kota Lokasi Identifikasi Swadaya Masyarakat	Kota Makassar	24 Kab / Kota	170,887,500.0	APBD Prov		24 Kab / Kota	179,431,875.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	03	004	Bimtek Peningkatan SDM Pengelola Kelembagaan Adat Desa	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Kelembagaan Adat Istiadat	Kota Makassar	90 Orang	183,600,000.0	APBD Prov		90 Orang	192,780,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	03	005	Sosialisasi Program dan Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Peserta adat Istiadat dan Nilai-Nilai sosial Budaya Masyarakat	Kota Makassar	30 Orang	51,987,000.0	APBD Prov		30 Orang	53,974,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	03	006	Identifikasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Peserta dari Unsur LSM dan LPM yang mengikuti Identifikasi Kelembagaan	Kota Makassar	300 Orang	427,000,000.0	APBD Prov		240 Orang	341,600,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	07	01.00	03	009	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga dan Pelayanan Dasar	Jumlah Aparatur dan Kader Yang Mengikuti Bimtek	Kota Makassar	120 Orang	171,387,000.0	APBD Prov		120 Orang	173,374,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	03	011	Lomba Kelembagaan Pokjolan Posyandu Berprestasi	Jumlah Juara Lomba	Kota Makassar	3 Juara	131,687,000.0	APBD Prov		3 Juara	133,674,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	Jumlah aparat desa yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah desa berstatus swasembada		660 Aparat Desa 2 Desa Swasembada	3,474,954,357.90			580 Aparat Desa 2 Desa Swasembada	3,390,773,641.84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	001	Workshop Penataan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Aparat Teknis PMD yang Mengikuti Workshop	Kota Makassar	120 Orang	156,300,000.0	APBD Prov		120 Orang	164,115,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	002	Identifikasi Status Perkembangan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Kabupaten Lokasi Identifikasi Status Perkembangan Desa	Kota Makassar	21 Kabupaten	137,812,500.0	APBD Prov		21 Kabupaten	144,703,125.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	003	Workshop Implementasi Kewenangan Bagi Perangkat Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Perangkat Desa yang Mengikuti Workshop	Kota Makassar	120 Orang	154,300,000.0	APBD Prov		120 Orang	162,015,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	004	Bimtek Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Pengelola ADD/PAD Tingkat Kabupaten dan Perangkat Desa yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kota Makassar	60 Orang	94,547,000.0	APBD Prov		60 Orang	98,202,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	005	Identifikasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Kabupaten Lokasi Identifikasi Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Kota Makassar	21 Kabupaten	137,812,500.0	APBD Prov		21 Kabupaten	144,703,125.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	006	Bimtek Sistem Informasi Pegelolaan Keuangan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kota Makassar	30 Orang	67,597,000.0	APBD Prov		30 Orang	71,252,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	007	Bimtek Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Perangkat Desa dan Pengurus BPD yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kota Makassar	30 Orang	71,847,000.0	APBD Prov		30 Orang	75,502,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	009	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa	Jumlah Lokasi Monev dan Pembinaan Kerjasama Desa	Kab/Kota	15 Lokasi	157,500,000.0	APBD Prov		15 Lokasi	157,500,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	010	Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Juara Perlombaan Desa / Kelurahan Tingkat Provinsi	24 Kab/Kota Jakarta	12 Juara	1,455,120,614.0	APBD Prov		12 Juara	1,527,876,645.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	011	Pengembangan Potensi Desa Melalui Pekan Inovasi Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Display, Layanan Informasi Kegiatan yang ditampilkan	Kota Makassar	12 Display	156,470,743.90	APBD Prov		12 Display	126,802,746.84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	012	Bimtek Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek	Kota Makassar	240 Orang	513,600,000.0	APBD Prov		160 Orang	342,400,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	020	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan Desa	Jumlah Lokasi Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan Desa	Kab/Kota	10 Lokasi	105,000,000.0	APBD Prov		10 Lokasi	105,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	021	Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Perangkat Desa	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek PTPD	Kota Makassar	60 Orang	267,047,000.0	APBD Prov		60 Orang	270,702,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	05		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PERDESAAN (Prioritas)	Jumlah kelompok binaan PKK (Prioritas) % Posyandu aktif % PKK aktif		1 Kelompok Binaan PKK 99.95 % 100 %	2,260,155,715.14			1 Kelompok Binaan PKK 99.97 % 100 %	2,289,582,155.56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	05	001	Sosialisasi Kebijakan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi	Jumlah Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang Terlibat	Kota Makassar	400 Orang	839,200,000.0	APBD Prov		400 Orang	839,200,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	05	002	Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Jambore PKK	Jumlah Peserta yang Mengikuti HKG dan Jambore PKK	Kota Makassar Luar Provinsi	700 Orang	502,683,000.0	APBD Prov		700 Orang	507,587,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	07	01.00	05	003	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Perencanaan dan Pembangunan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti Workshop Perencanaan dan pembangunan partisipasi masyarakat	Kota Makassar	60 Orang	94,883,000.0	APBD Prov		60 Orang	99,787,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	05	004	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan dalam Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Kader yang Mengikuti Pelatihan budi daya cacing	Kota Makassar	90 Orang	209,383,000.0	APBD Prov		90 Orang	214,287,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	05	005	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemenuhan Sandang Pangan	Jumlah Kader yang Mengikuti Pelatihan pengolahan sumber pangan alternatif	Kota Makassar	60 Orang	98,690,715.14	APBD Prov		60 Orang	103,595,155.56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	05	006	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan / Keluarga	Jumlah lansia yang mengikuti pembinaan	Kota Makassar	90 Orang	424,233,000.0	APBD Prov		90 Orang	429,137,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	05	007	Workshop Identifikasi Kelompok Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta dari unsur Posyandu dan PKK yang mengikuti Workshop Identifikasi Kelompok Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Kota Makassar	50 Orang	91,083,000.0	APBD Prov		50 Orang	95,989,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	4,568,053,739.21			100 %	4,841,227,659.58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	401,848,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	12 Bulan	408,310,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	10 Unit 20 Unit	19,000,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	11 Unit 20 Unit	19,150,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	29 Orang	1,083,014,402.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	29 Orang	1,137,165,122.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	60 Jenis ATK	800,237,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	60 Jenis ATK	906,699,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	771 Unit	33,491,995.21	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	771 Unit	39,951,385.19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	2 Jenis	595,258,650.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	2 Jenis	625,021,582.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar	2 Pameran	349,420,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	2 Pameran	355,882,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Makassar	185 Kali	1,285,783,692.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	185 Kali	1,349,048,570.39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	1,602,723,425.87			100 %	1,637,558,189.16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	4 Unit	721,343,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	4 Unit	725,237,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	29 Unit	341,343,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	29 Unit	345,237,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	32 Unit	385,098,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	32 Unit	404,352,900.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	85 Unit	48,596,425.87	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	85 Unit	52,494,289.16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	Kota Makassar	8 Sistem Informasi/Aplikasi	106,343,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	8 Sistem Informasi/Aplikasi	110,237,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website		36 Berita/Informasi				36 Berita/Informasi		
1.02	07	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		90 %	1,156,923,550.0			90 %	1,196,877,977.50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar	90 Orang	378,000,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	90 Orang	396,900,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar	4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	282,188,550.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	4 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen	296,297,977.50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi		24 Laporan 10 Jenis	393,378,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	24 Laporan 10 Jenis	395,693,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	12 Laporan	76,678,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	12 Laporan	78,993,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	5 Laporan	21,679,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	5 Laporan	23,994,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Kota Makassar	1 Laporan	5,000,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	1 Laporan	5,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	435,401,000.0			100 %	447,036,050.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kota Makassar	3 Orang 12 Laporan	150,000,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	3 Orang 12 Laporan	150,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	240 Pasang	117,600,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	240 Pasang	123,480,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	163 Pasang	52,700,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	163 Pasang	52,700,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar	85 Orang	115,101,000.0	APBD Prov	kegiatan rutin kantor	85 Orang	120,856,050.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	08				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1.02	08	01.00			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				10,526,967,763.61				10,261,005,566.60	
1.02	08	01.00	01		PROGRAM PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1.1 % (BPS)	390,937,505.80			1.1 % (BPS)	396,027,376.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
						Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		0 % (SIAK)			0 % (SIAK)			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	08	01.00	01	001	Sistem Pemetaan dan Proyeksi Pengendalian Kependudukan	Jumlah Pemetaan Pengendalian Penduduk Jumlah Pemetaan Pengendalian Penduduk	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Pemetaan dan Aplikasi 0 Pemetaan	168,691,485.80	APBD Prov		2 Pemetaan dan Aplikasi 0 Pemetaan	170,388,108.66	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	01	002	Rencana Induk Pengendalian Penduduk	Jumlah Kebijakan RIPDUK Prov. Sulsel	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Kebijakan	114,341,735.0	APBD Prov		2 Kebijakan	116,038,358.67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	01	003	Penyusunan Analisis dan Model Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah dokumen Analisis dan model Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	107,904,285.0	APBD Prov		1 Dokumen	109,600,908.67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN KELUARGA BERENCANA	% Penggunaan kontrasepsi jangka panjang Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi pasangan usia subur % Peserta KB Aktif Rasio Total Fertility Rate		23.25 % 66.54 % 72.66 % 2.26	222,295,505.61			23.25 % 66.54 % 73.06 % 2.24	225,189,715.69	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	02	001	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan KB di Prov. Sulsel	Jumlah SKPD Kabupaten/Kota yang Mengikuti Rakor	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan	55 Orang	50,279,835.20	APBD Prov		55 Orang	51,244,571.90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Provinsi Sulawesi Selatan							Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	02	002	Pertemuan Stakeholder Dalam Upaya Peningkatan Program KB	Jumlah Pertemuan	Kota Makassar	1 Pertemuan	90,785,835.20	APBD Prov		1 Pertemuan	91,750,571.90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	02	004	Sosialisasi Model KIE KB Berbasis Kearifan Lokal	Jumlah Peserta	Kabupaten Bulukumba Kota Parepare Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	60 Orang	81,229,835.21	APBD Prov		60 Orang	82,194,571.89	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA	Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina Cakupan Kab/Kota yang menyelenggarakan Pembinaan Keluarga Sejahtera secara terpadu berkesinambungan dan terencana		1700 Klp 100 %	262,957,416.24			1800 Klp 100 %	266,381,030.24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	03	001	Pembinaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Kelompok UPPKS	Jumlah Kelompok UPPKS	Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Pinrang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Toraja Utara Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	80 Orang	74,348,805.40	APBD Prov		80 Orang	75,490,010.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	03	002	Pembinaan Bina Ketahanan Keluarga BKB, BKR dan BKL Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Pinrang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Toraja Utara Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kelompok	105,473,805.41	APBD Prov		24 Kelompok	106,615,010.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	03	007	Pelatihan Advokasi Bagi Pengurus Kelompok Kerja Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	80 Orang	83,134,805.43	APBD Prov		80 Orang	84,276,010.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02	09				Perhubungan									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif (Rp)		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02	09	01.00			Dinas Perhubungan			29,605,353,729.15				28,184,116,371.80		
1.02	09	01.00	01		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN DAN ANGKUTAN PELAYARAN (Prioritas)	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas) Jumlah pelabuhan strategis provinsi Jumlah pelabuhan yang beroperasi		1028 Orang 11 Lokasi 35 Lokasi				1047 Orang 11 Lokasi 35 Lokasi	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	01	004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha	Jumlah Laporan	Makassar Kota Makassar	1 Laporan	50,000,000.0			1 Laporan	50,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	01	006	Design pembuatan Kapal Ferry	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	75,000,000.0			0 Dokumen	0.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	01	020	Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan regional yang dipelihara	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Takalar Kabupaten Wajo	2 Pelabuhan	4,984,441,115.54			2 Pelabuhan	5,000,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	01	026	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Angkutan Sungai dan Penyeberangan Bira	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT	Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	325,000,000.0			1 Laporan	350,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	01	027	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Selayar	Jumlah Laporan Pelayanan Teknis UPT	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Laporan	325,000,000.0			1 Laporan	350,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	01	028	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Takalar	Jumlah Laporan Pelayanan Teknis UPT	Kabupaten Takalar	1 Laporan	325,000,000.0			1 Laporan	350,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	01	029	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Bone	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Teknis	Kabupaten Bone	1 Laporan	325,000,000.0			1 Laporan	350,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	01	030	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Luwu Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT	Kabupaten Luwu Timur	1 Laporan	325,000,000.0			1 Laporan	350,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	01	031	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Bira	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT	Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	325,000,000.0			1 Laporan	350,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	01	033	Penyusunan Perencanaan Teknis Pelabuhan dan Dermaga Wisata	Jumlah Dokumen FS, RIP, DED Pelabuhan dan Dermaga Wisata	Kota Makassar	3 Lokasi	1,750,000,000.0			3 Lokasi	1,750,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	01	035	Pembangunan Dermaga Wisata	Jumlah Dermaga Wisata	Kota Makassar	1 Lokasi	1,100,000,000.0			1 Lokasi	1,084,290,031.28	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	01	037	Operasional Kapal Pelra	Jumlah Kapal	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kota Makassar	1 Kapal	400,000,000.0			1 Kapal	400,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	01	038	Diklat Teknis Non Struktural Bidang Pelayaran	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	Kota Makassar	10 Orang	500,000,000.0			10 Orang	500,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	01	039	Kampanye Keselamatan Pelayaran	Jumlah Peserta	Kota Makassar	700 Orang	700,000,000.0			700 Orang	700,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (Prioritas)	Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi		22 % 78 Ruas	3,460,903,391.31			22 % 78 Ruas	2,899,963,148.38	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	02	001	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ yang Terpasang	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone	9 Jenis	1,305,238,391.31			9 Jenis	1,350,298,148.38	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Wajo							
1.02	09	01.00	02	005	Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah lokasi Penyusunan Andalalin Jumlah Ruas Jalan	Kota Makassar	2 Lokasi 5 Jalan	306,000,000.0			2 Lokasi 5 Jalan	306,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	02	009	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Peserta	Kota Makassar	50 Orang	50,000,000.0			50 Orang	50,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	02	014	Koordinasi Pelaksanaan RAD - GRK	Jumlah Laporan	Kota Makassar	1 Laporan	50,000,000.0			1 Laporan	50,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	02	016	Pemeliharaan Halte dan Pemindahannya	Jumlah Halte dalam Kondisi Baik dan Yang dipindahkan	Kabupaten Gowa Kabupaten Maros Kabupaten Takalar Kota Makassar	20 unit	43,665,000.0			30 unit	43,665,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	02	022	Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)	Jumlah Titik Daerah Rawan Kecelakaan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo	5 Lokasi	75,000,000.0			5 Lokasi	75,000,000.0	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kota Parepare							
1.02	09	01.00	02	025	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Transportasi Mamminasata	Jumlah Laporan	Kabupaten Gowa Kabupaten Maros Kabupaten Takalar Kota Makassar	1 Laporan	250,000,000.0			1 Laporan	250,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	02	026	Diklat Teknis Non Struktural Bidang Lalu Lintas	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat	Kota Makassar	10 orang	606,000,000.0			0 orang	0.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	02	029	Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah titik keramaian / Pusat Kegiatan Jumlah Ruas Jalan	Kota Makassar	2 Lokasi 5 Jalan	625,000,000.0			2 Lokasi 5 Jalan	625,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	02	030	Kampanye Keselamatan Transportasi Darat	Jumlah Peserta Jumlah Peserta	Kota Makassar	50 Orang 50 Orang	150,000,000.0			50 Orang 50 Orang	150,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	03		PROGRAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN	% Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan % Layanan Angkutan Darat Jumlah Terminal Bis Terkelola Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun		50 % 54 % 10 Lokasi 365000 Orang	3,783,470,212.28			60 % 56 % 13 Lokasi 485000 Orang	3,232,729,677.04	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	03	001	Pembangunan Terminal Type B Di Jeneponto (Tahap II)	Jumlah Terminal yang dibangun	Kabupaten Jeneponto	1 Lokasi	1,393,470,212.28			1 Lokasi	1,442,729,677.04	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	03	003	Diklat Teknis Non Struktural Bidang Angkutan Jalan	Jumlah PNS	Kota Makassar	10 Orang	50,000,000.0			10 Orang	50,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	03	007	Pelayanan Perizinan Angkutan Orang Dalam Trayek	Jumlah Badan Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek Jumlah Kartu Pengawasan yang di buat	Kota Makassar	10 Badan Usaha 500 Kartu Pengawasan	75,000,000.0			10 Badan Usaha 500 Kartu Pengawasan	75,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	03	008	Pelayanan Perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Jumlah Badan Usaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Jumlah Kartu Pengawasan yang di buat	Kota Makassar	10 Badan Usaha 500 Kartu Pengawasan	75,000,000.0			10 Badan Usaha 500 Kartu Pengawasan	75,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	03	011	Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Jumlah Laporan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Timur Kabupaten Takalar Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare	3 Laporan	75,000,000.0			3 Laporan	75,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	03	014	Pemilihan Abdi Yasa Teladan	Jumlah Peserta	Kota Makassar	15 Orang	75,000,000.0			15 Orang	75,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	03	016	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan Wilayah I	Jumlah Laporan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bulukumba Kabupaten Jeneponto Kabupaten Sinjai	1 Laporan	250,000,000.0			1 Laporan	250,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	03	017	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan Wilayah II	Jumlah laporan	Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Soppeng	1 Laporan	250,000,000.0			1 Laporan	250,000,000.0	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Wajo Kota Parepare							
1.02	09	01.00	03	018	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan Wilayah III	Jumlah Laporan	Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kota Palopo	1 Laporan	250,000,000.0			1 Laporan	250,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	03	019	Peningkatan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B	Jumlah Terminal Tipe B	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Jeneponto Kabupaten Sinjai	3 Lokasi	610,000,000.0			3 Lokasi	610,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	03	020	Pelaksanaan Pelayanan Terminal Tipe B	Jumlah Terminal tipe B	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Jeneponto Kabupaten Sinjai	3 Laporan	80,000,000.0			3 Laporan	80,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	03	021	Pembinaan Pengemudi dan pengelola Angkutan	jumlah pengelola/pengemudi angkutan yg dibina	Kota Makassar	300 Orang	600,000,000.0			0 Orang	0.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	04		PROGRAM PERENCANAAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Transportasi		7 Dokumen	635,415,861.06			7 Dokumen	300,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	04	002	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Urusan Perhubungan	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	10,000,000.0			0 Dokumen	0.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	04	005	Kampanye Keselamatan Penerbangan dan perkeretaapian	Jumlah Peserta	Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Tana Toraja Kota Makassar	200 peserta	200,000,000.0			200 peserta	200,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	04	009	Kajian Penataan Transportasi Massal Mamminasata	Jumlah Dokumen	Kabupaten Gowa Kabupaten Maros Kabupaten Takalar Kota Makassar	1 Dok	100,000,000.0			0 Dok	0.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	04	022	Survey Jumlah dan Komposisi Moda Angkutan di Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Jeneponto Kabupaten Sinjai Kota Makassar	1 Laporan	44,415,861.06			0 Laporan	0.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	04	025	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor Perhubungan	Jumlah Dokumen	Kota Makassar	1 Dokumen	100,000,000.0			1 Dokumen	100,000,000.0	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	09	01.00	04	028	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan	Jumlah peserta rakor teknis perhubungan	Kota Makassar	100 Orang	81,000,000.0			0 Orang	0.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	04	035	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Transportasi	Jumlah Dokumen	Kota Makassar	1 Dokumen	100,000,000.0			0 Dokumen	0.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	7,920,237,546.86			100 %	8,023,356,281.89	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kantor dinas Perhubungan Prov. Sulsel Kota Makassar	12 Bulan	624,450,000.0	APBD Prov		12 Bulan	632,568,735.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	38 Unit 63 Unit	105,000,000.0	APBD Prov		38 Unit 63 Unit	130,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	120 Orang	4,176,000,000.0	APBD Prov		120 Orang	4,176,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	36 Jenis ATK	811,450,000.0	APBD Prov		36 Jenis ATK	811,450,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		8 Unit	98,337,546.86			8 Unit	143,337,546.89	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		2 Jenis	405,000,000.0			2 Jenis	430,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran		1 Pameran	200,000,000.0			1 Pameran	200,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		200 Kali	1,500,000,000.0			200 Kali	1,500,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	907,409,202.01			100 %	859,223,353.86	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara		1 Unit	50,000,000.0			2 Unit	80,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara		2 Unit	100,000,000.0			2 Unit	100,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		101 Unit	600,000,000.0			101 Unit	600,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara		5 Unit	80,000,000.0			0 Unit	0.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		50 Unit	77,409,202.01			50 Unit	79,223,353.86	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	966,863,733.92			100 %	979,451,963.07	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah		125 Orang	133,108,389.0			125 Orang	137,696,619.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan		4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	345,750,000.0			4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	347,750,000.0	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		3 Dokumen				3 Dokumen		
1.02	09	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi		1 Laporan 100 Jenis	300,000,000.0			1 Laporan 100 Jenis	300,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		12 Laporan	51,000,000.0			12 Laporan	54,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun		2 Laporan	120,555,344.92			2 Laporan	120,555,344.07	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun		1 Laporan	16,450,000.0			1 Laporan	19,450,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	421,612,666.17			100 %	305,101,916.28	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia		235 Pasang	303,112,666.17			235 Pasang	305,101,916.28	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan		61 Orang	118,500,000.0			61 Orang	0.0	Dinas Perhubungan
1.02	10				Komunikasi dan Informatika									
1.02	10	01.00			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				21,238,297,091.71				21,514,812,324.67	
1.02	10	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT (Prioritas)	% Penerapan e-Government pada lingkup Perangkat Daerah (Prioritas)		78 %	9,932,559,414.41			80 %	10,066,618,943.50	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	01	001	Pembangunan dan Pemeliharaan Command Center	Jumlah Jenis Kelengkapan Command Centre		1 Paket	1,563,150,000.0		opd parsial	1 Paket	1,579,900,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	01	002	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optic (FO) Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah OPD/Unit Kerja yang terkoneksi jaringan Fiber Optic (FO)		47 OPD	2,029,703,469.41		opd parsial	47 OPD	2,046,453,472.50	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	01	003	Peningkatan Akses Internet Bandwith	Jumlah Kapasitas Bandwith Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahap II Jumlah Kapasitas Bandwith Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahap I		700 MBps 700 MBps	2,308,150,000.0		opd parsial	800 MBps 800 MBps	2,324,900,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	01	004	Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Keras	Jumlah Unit Videotron yang Tersedia Jumlah Jenis Perangkat Keras yang Tersedia		1 Jenis 12 Jenis	1,745,650,000.0		opd parsial	1 Jenis 14 Jenis	1,762,400,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	01	005	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Jumlah Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dan dikelola		21 Aplikasi	1,813,150,000.0		opd parsial	28 Aplikasi	1,829,900,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	01	006	Monitoring Layanan Infrastruktur Jaringan dan Bandwith Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Access Point Jaringan dan Bandwith yang termonitor		50 Access Point	212,150,000.0		opd parsial	70 Access Point	228,900,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	01	007	Pengembangan Sumber Daya e-Government	Jumlah Sumber Daya Manusia yang meningkat kualitasnya dalam bidang E-Government		16 Orang	150,150,000.0		opd parsial	16 Orang	166,900,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	01	009	Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi	Jumlah peserta Bimtek Pengembangan Aplikasi		60 Orang	110,455,945.0		opd parsial	60 Orang	127,265,471.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	02		PROGRAM PENGEMBANGAN BARUGA LAYANAN PUBLIK (Prioritas)	% Pemanfaatan Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik (Prioritas)		100 %	1,056,253,415.0			100 %	1,070,005,466.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	10	01.00	02	001	Pengembangan Baruga Layanan Aduan Masyarakat	Jumlah Aduan Masyarakat Yang Masuk dan Ditindaklanjuti		1910 Aduan	844,200,000.0		opd parsial	2110 Aduan	851,100,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	02	002	Pengelolaan Konten dan Berita Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Konten dan Berita yang Tersedia		1900 Konten/Berita	212,053,415.0		opd parsial	2000 Konten/Berita	218,905,466.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	03		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	% Layanan Konten Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi berkualitas baik		90 %	1,643,526,973.0			90 %	1,664,274,139.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	03	001	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah sengketa Informasi yang diselesaikan		100 Sengketa	1,006,710,000.0		opd parsial	100 Sengketa	1,009,000,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	03	002	Sosialisasi Regulasi dan Kualitas Layanan Informasi Publik	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi		100 Peserta	32,610,000.0		opd parsial	100 Peserta	34,920,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	03	003	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas PPID	Jumlah Peserta Bimtek PPID		110 Orang	42,510,000.0		opd parsial	110 Orang	44,820,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	03	004	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Kab/Kota Yang Dinilai Berdasarkan Layanan Keterbukaan Informasi Publik		24 Kab/Kota	138,610,000.0		opd parsial	24 Kab/Kota	140,910,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	03	005	Pengelolaan Informasi Publik	Jumlah Data Informasi Publik dari OPD		600 Informasi Publik	75,746,973.0		opd parsial	700 Informasi Publik	78,044,139.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	03	006	Rumusan Kebijakan Teknis Daerah Terkait Layanan Yang Dikecualikan	Jumlah Dokumen hasil Rumusan Kebijakan Teknis Daerah terkait Layanan Informasi yang dikecualikan		2 Dokumen	50,210,000.0		opd parsial	2 Dokumen	52,520,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	03	007	Monitoring dan Evaluasi PPID	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi		4 Laporan	64,710,000.0		opd parsial	4 Laporan	67,020,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	03	008	Pengembangan Sarana dan Prasarana PPID	Jumlah Infrastruktur Sistem Portal PPID		1 Sistem	103,710,000.0		opd parsial	1 Sistem	106,020,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	03	009	Pengembangan Sarana dan Prasarana Integrasi Sistem	Jumlah e-aplikasi yang terintegrasi		1 e-aplikasi	128,710,000.0		opd parsial	1 e-aplikasi	131,020,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	04		PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	% Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi		65 %	590,595,542.0			85 %	598,284,890.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
						% Desiminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilakukan sesuai dengan Strategi komunikasi (STRAKOM)		65 %				85 %		
1.02	10	01.00	04	001	Peningkatan Sumber Daya Komunikasi	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Ditingkatkan		60 Orang	39,799,000.0		opd parsial	70 Orang	40,760,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	04	002	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik		24 Laporan	44,799,000.0		opd parsial	24 Laporan	45,760,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	04	003	Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media	Jumlah Mitra Media Dalam Pelaksanaan Publikasi		3 Media	44,299,000.0		opd parsial	3 Media	45,260,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	04	004	Literasi Media Sosial	Jumlah Peserta yang mengikuti Literasi Pengguna Media Sosial		85 Orang	13,602,542.0		opd parsial	85 Orang	14,564,890.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	10	01.00	04	006	Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pemanfaatan Komunikasi Publik		2 Laporan	125,799,000.0		opd parsial	2 Laporan	126,760,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	04	007	Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat	Jumlah Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat Yang Dilaksanakan		1 Pertunjukan	158,999,000.0		opd parsial	1 Pertunjukan	159,960,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	04	008	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kab/Kota Prov Sulsel	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan		24 Kab/Kota	26,499,000.0		opd parsial	24 Kab/Kota	27,460,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	04	009	Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	Jumlah Layanan Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat		2 Layanan	136,799,000.0		opd parsial	2 Layanan	137,760,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		75 %	3,631,901,663.0			100 %	3,679,086,723.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS		43 Orang	1,511,290,000.0		opd parsial	43 Orang	1,520,730,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia		82 Jenis ATK	436,438,100.0		opd parsial	90 Jenis ATK	445,868,100.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		80 Jenis	1,016,470,000.0		opd parsial	80 Jenis	1,025,910,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran		1 Pameran	110,363,563.0		opd parsial	1 Pameran	119,808,623.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		65 Kali	557,340,000.0		opd parsial	66 Kali	566,770,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	1,272,109,422.0			100 %	1,287,899,787.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara		1 Unit	62,589,422.0		opd parsial	1 Unit	65,739,787.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		22 Unit	558,070,000.0		opd parsial	22 Unit	561,230,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		28 Unit	497,550,000.0		opd parsial	30 Unit	500,710,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		20 Unit	77,850,000.0		opd parsial	25 Unit	81,010,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan		45 Sistem Informasi/Aplikasi	76,050,000.0		opd parsial	45 Sistem Informasi/Aplikasi	79,210,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	224,838,679.0			100 %	225,817,778.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah		155 Orang	12,026,779.0		opd parsial	155 Orang	12,365,878.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan		1 Dokumen 2 Dokumen	72,770,000.0		opd parsial	1 Dokumen 2 Dokumen	73,090,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun		4 Dokumen 4 Dokumen				4 Dokumen 4 Dokumen		
1.02	10	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi		1 Laporan 6 Jenis	42,821,900.0		opd parsial	1 Laporan 6 Jenis	42,821,900.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		15 Laporan	97,220,000.0		opd parsial	15 Laporan	97,540,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		95 %	200,243,279.0			95 %	202,850,377.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	10	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia		429 Pasang	200,243,279.0		opd parsial	472 Pasang	202,850,377.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	11				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1.02	11	01.00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				22,207,547,695.05				23,444,603,626.16	
1.02	11	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK UKM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Prioritas)	% Pertumbuhan UKM Bagi Masyarakat Sangat Miskin Dan Miskin (Prioritas)		20 %	11,294,900,000.0			20 %	12,532,900,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	01	001	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan petani miskin yang mengikuti diklat kewirausahaan	Jumlah masyarakat petani miskin yang mengikuti diklat kewirausahaan	Sulawesi Selatan	50 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK	untuk peningkatan pengetahuan	50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	01	002	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi nelayan	Jumlah masyarakat nelayan miskin yang mengikuti diklat wirausaha	Sulawesi Selatan	50 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK	peningkatan pengetahuan	50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	01	003	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan	Jumlah peserta masyarakat miskin kaum perempuan yang mengikuti diklat wirausaha	Sulawesi selatan	50 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK	peningkatan pengetahuan bagi perempuan	50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	01	004	Pelatihan kewirausahaan bagi pelajar/siswa	Jumlah pelajar/siwa yang mengikuti diklat wirausaha	Sulawesi Selatan	150 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK	Peningkatan pengetahuan	50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	01	005	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi purnabakti	Jumlah purnabakti yang mengikuti diklat kewirausahaan	Sulawesi Selatan	150 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK	Peningkatan pengetahuan dalam mengelola usaha	50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	01	007	Pendidikan dan pelatihan bagi pendamping KUMKM	Jumlah pendamping yang mengikuti diklat	Sulawesi Selatan	72 Orang	1,232,900,000.0	APBD dan DAK		72 Orang	1,232,900,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	01	008	Sout Sulawesi kreatif Hub	Jumlah sarana dan prasarana pendukung SSCH yang diadakan	Kota Makassar	6 Jenis	4,000,000,000.0	APBD Prov	Gedung untuk penyaluran kreativitas Pemuda/pemudi	6 Jenis	4,500,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	01	009	Pengembangan sarana produksi KUMKM	Jumlah dukungan sarana produksi yang diadakan		2 Unit	5,562,000,000.0			3 Unit	6,300,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	02		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DAN PROMOSI PRODUK UMKM (Prioritas)	Cakupan promosi produk UMKM pada Rest Area (Prioritas)		10 Produk	900,000,000.0			10 Produk	900,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	02	001	Bimbingan Tehnis peningkatan daya saing produk dan legalitas usaha	Jumlah pengelola yang mengikuti bimtek	Sulawesi selatan	50 Orang	300,000,000.0	APBD dan DAK		50 Orang	300,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	02	002	Pameran Promosi produk unggulan UMKM dalam dan luar negeri	Jumlah produk yang diikutkan dalam pameran/promosi	dalam dan luar daerah	50 Produk	300,000,000.0	APBD dan DAK		50 Produk	300,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	02	003	Workshop Peningkatan kualitas desain kemasan produk UMKM	Jumlah peserta yang memiliki produk yang mengikuti workshop desain kemasan	Sulawesi Selatan	50 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	11	01.00	02	004	Bimbingan teknis pengembangan usaha melalui kemitraan, dan pemasaran produk orientasi ekspor	Jumlah UMKM yang mengikuti bimtek	Sulawesi Selatan	50 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	02	005	Pelatihan vocational berbasis e-commerce	Jumlah pengelola UMKM yang mengikuti diklat e-commerce	Sulawesi Selatan	50 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	03		PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DAN PENGEMBANGAN PRODUK PEMASARAN BAGI KOPERASI DAN UMKM	Jumlah KUMKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana Jumlah produk baru yang terfasilitasi perizinan		10 Unit 5 Produk	300,000,000.0			10 Unit 5 Produk	300,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	03	001	Pendampingan penilaian Koperasi berprestasi dan tokoh Koperasi penerima award Koperasi	Jumlah penerima penghargaan Koperasi berprestasi dan tokoh Koperasi penerima award	Sulawesi Selatan	20 Orang/Koperasi	175,000,000.0	APBD dan DAK		20 Orang/Koperasi	175,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	03	002	Pengembangan dan penguatan kelembagaan Koperasi wanita	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan penguatan kelembagaan Koperasi wanita	Sulawesi Selatan	100 Orang	125,000,000.0	APBD dan DAK		100 Orang	125,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	04		PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA PRODUKTIF BAGI KUMKM	% Jumlah KUMKM yang terfasilitasi lembaga Keuangan % Pengelola yang terfasilitasi diklat		20 % 20 %	775,000,000.0			20 % 20 %	775,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	04	001	Bimbingan teknis pengembangan permodalan usaha Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis pengembangan permodalan usaha Koperasi	Sulawesi Selatan	50 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	04	002	Pembinaan Koperasi jasa dan produksi dengan lembaga keuangan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Koperasi jasa dan produksi	Sulawesi Selatan	50 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	04	007	Pelatihan ekonomi produktif (UEP) bagi masyarakat pesisir/nelayan	Jumlah masyarakat pesisir/nelayan yang mengikuti pelatihan	Sulawesi Selatan	50 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	04	009	Pemanfaatan produk unggulan dengan pendekatan OVOP melalui Koperasi	Jumlah pengelola Koperasi yang mengikuti produk unggulan dengan pendekatan OVOP	Sulawesi selatan	50 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	04	010	Pengembangan usaha kemitraan Koperasi dengan BUMN/BUMD/BUMS	Jumlah pengelola Koperasi yang mengikuti pengembangan usaha kemitraan dengan BUMN/BUMD/BUMS	Sulawesi Selatan	75 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		75 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	04	012	Temu kemitraan pemasaran produk Koperasi	Jumlah pengelola Koperasi yang mengikuti temu kemitraan pemasaran produk Koperasi	Sulawesi Selatan	50 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	04	015	Temu konsultasi dan evaluasi kinerja dan koordinator PPKL	Jumlah peserta yang mengikuti temu konsultasi dan evaluasi kinerja PPKL dan koordinator PPKL se Sulawesi Selatan	Kota Makassar	53 Orang	75,000,000.0	APBD dan DAK		53 Orang	75,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	04	016	Bimbingan teknis standarisasi penyuluhan dan advokasi Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis standarisasi penyuluhan dan advokasi Koperasi	Sulawesi Selatan	50 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	05		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN UMKM	Jumlah Koperasi aktif Jumlah Usaha Kecil menjadi usaha Menengah Jumlah Koperasi skala besar		100 Unit 50 Unit 2 Unit	1,400,000,000.0			100 Unit 50 Unit 2 Unit	1,400,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	11	01.00	05	001	Temu konsultasi pembenahan Koperasi tidak aktif	Jumlah peserta temu konsultasi pembenahan Koperasi tidak aktif	Sulawesi Selatan	50 Orang	75,000,000.0	APBD dan DAK		50 Orang	75,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	05	003	Bimbingan teknis penyusunan laporan RAT	Jumlah pengurus/pengelola yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan laporan RAT	Sulawesi Selatan	100 orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		100 orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	05	006	Pengembangan Koperasi Primer dan sekunder	Jumlah pengelola koperasi primer dan sekunder provinsi yang mengikuti pengembangan	Sulawesi Selatan	100 orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		100 orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	05	010	Temu konsultasi pencapaian koperasi skala besar	Jumlah peserta yang mengikuti temu konsultasi pencapaian koperasi skala besar	Sulawesi selatan	30 orang	75,000,000.0	APBD dan DAK		30 orang	75,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	05	012	Bimbingan teknis peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan kepatuhan kelembagaan syariah	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan kepatuhan kelembagaan syariah	Sulawesi Selatan	50 orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	05	014	Pengawasan koperasi di bidang pelaksanaan kegiatan organisasi dan kelengkapan legalitas	Jumlah koperasi yang telah diawasi pelaksanaan kegiatan organisasi dan kelengkapan legalitas usaha	Sulawesi Selatan	50 orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	05	019	Bimbingan teknis penyusunan neraca pemisahan USP/KSP	Jumlah pengelola KPS/USP yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan dan pemisahan neraca	Sulawesi Selatan	50 orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	05	020	Diklat SKKNI	Jumlah peserta yang mengikuti diklat SKKNI	Sulawesi Selatan	25 orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		25 orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	05	025	Bimbingan teknis rehabilitasi terhadap koperasi yang menerima sanksi	Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti bimbingan teknis rehabilitasi terhadap koperasi yang menerima sanksi	Sulawesi Selatan	50 orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	05	028	Bimbingan teknis penyelesaian kasus internal pra penyerahan penegakan hukum	Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti bimbingan teknis penyelesaian kasus	Sulawesi Selatan	50 orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	05	029	Workshop pengembangan kewirausahaan industri kreatif	Jumlah peserta workshop pengembangan kewirausahaan industri kreatif	Sulawesi Selatan	50 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	05	034	Diklat pembuatan akte dan badan hukum Koperasi	Jumlah pengelola yang mengikuti diklat	Sulawesi Sealatan	100 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		100 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	05	038	Diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi	Sulawesi Selatan	100 Orang	150,000,000.0	APBD dan DAK		100 Orang	150,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	05	042	Pelatihan penilai kesehatan Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penilai kesehatan Koperasi	Sulawesi selatan	50 Orang	100,000,000.0	APBD dan DAK		50 Orang	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	4,750,000,000.0			100 %	4,750,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	1,500,000,000.0	APBD Prov	unrtuk pembayaran listrik gedung perkantoran dan gedung CCC	12 Bulan	1,500,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	11	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	12 Unit 35 Unit	25,000,000.0	APBD Prov	untuk penggunaan kedinasan dan operasional	12 Unit 35 Unit	25,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	75 Orang	2,500,000,000.0	APBD Prov	Untuk kesejahteraan tenaga Non PNS lingkup Dinas Koperasi dan UKM	75 Orang	2,500,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	25 Jenis ATK	175,000,000.0	APBD Prov	Untuk kelancaran pelaksanaan adminstrasi	25 Jenis ATK	175,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	16 Unit	50,000,000.0	APBD Prov	untuk penerangan disetiap ruangan	16 Unit	50,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	12 Jenis	150,000,000.0	APBD Prov	Untuk menjamu tamu dan peserta rapat	12 Jenis	150,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	dalam dan luar daerah	150 Kali	350,000,000.0	APBD Prov	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	150 Kali	350,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	2,158,647,695.05			100 %	2,157,703,626.16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	4 Unit	1,100,000,000.0	APBD Prov	Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan	4 Unit	900,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	47 Unit	500,000,000.0	APBD Prov	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	47 Unit	500,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	4 Unit	358,647,695.05	APBD Prov	Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan	4 Unit	557,703,626.16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	5 Unit	200,000,000.0	APBD Prov	Untuk memperlancar pelayanan	5 Unit	200,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	100,000,000.0			100 %	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kantor Pusat Kota Makassar Kantor UPT	4 Laporan	100,000,000.0	APBD Prov	untuk kelancaran pengelolaan administrasi keuangan	4 Laporan	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	529,000,000.0			100 %	529,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kota Makassar	150 Orang 6 Laporan	50,000,000.0	APBD Prov	Kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian	150 Orang 6 Laporan	50,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	300 Pasang	195,000,000.0	APBD Prov	untuk keseragaman dalam bekerja	300 Pasang	195,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	90 Pasang	84,000,000.0	APBD Prov	untuk keseragaman dalam bekerja	90 Pasang	84,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Provinsi Sulawesi Selatan	200 Orang	200,000,000.0	APBD Prov	Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai peraturan	200 Orang	200,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	12				Penanaman Modal									
1.02	12	01.00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				7,580,515,000.0				7,996,632,000.0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	12	01.00	01		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)		13.02 Triliun	783,991,544.0			13.02 Triliun	782,019,124.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	01	001	Pemantauan perkembangan penanaman modal	Jumlah Perusahaan yang terpantau di Kab/Kota	Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan	60 Perusahaan	542,009,544.0			60 Perusahaan	545,037,124.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	01	002	Pembinaan perusahaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang terfasilitasi di Kab/Kota	Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan	10 Perusahaan	150,333,200.0			10 Perusahaan	145,333,200.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	01	003	Pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Kab/Kota yang di awasi	Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan	8 Perusahaan	91,648,800.0			8 Perusahaan	91,648,800.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)		870 Proyek	1,269,285,992.0			922 Proyek	1,302,348,880.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	02	007	Pembuatan Sarana Promosi Investasi	Jumlah sarana dan prasarana promosi yang disiapkan Jumlah media promosi elektronik	Enrekang, Wajo Sulawesi Selatan	1 Paket 2 Unit	65,382,682.0			1 Paket 2 Unit	68,070,311.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	02	008	Pengembangan Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kesepakatan Kerjasama	Indonesia	1 Kesepakatan	105,223,183.0			1 Kesepakatan	107,910,813.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	02	010	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal/Investasi Daerah	Jumlah pameran Jumlah temu usaha Jumlah workshop promosi	Dalam dan Luar Negeri	10 Pameran 2 Temu usaha 1 Workshop	1,098,680,127.0			10 Pameran 2 Temu usaha 1 Workshop	1,126,367,756.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	03		PROGRAM PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		13 Orang/proyek	724,397,299.0			14 Orang/proyek	836,993,382.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	03	002	Penyusunan Mitra Bisnis Potensial Sulsel	Jumlah buku	Sulawesi Selatan	100 Buku	75,000,000.0			100 Buku	85,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	03	005	Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan penanaman modal	Makassar Sulawesi Selatan	1 Regulasi	166,783,000.0			1 Regulasi	191,783,100.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	03	007	Pengembangan Aparat DPMPTSP Provinsi, Kab/Kota dan Dunia Usaha	Jumlah Peserta dari DPMPTSP provinsi, kab/kota, dan dunia usaha	Sulawesi Selatan	100 Orang	182,217,000.0			100 Orang	207,374,282.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	03	008	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Potensi Penanaman Modal	Jumlah website Jumlah buku Jumlah peta sektor potensi unggulan	Sulawesi Selatan	1 Website 200 Buku 0 Peta	300,397,299.0			1 Website 200 Buku 0 Peta	352,836,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	04		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN		15 %	1,236,720,879.0			15 %	1,344,699,775.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	04	001	Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Sulawesi Selatan	25000 Dokumen izin dan non izin	790,220,979.0			25000 Dokumen izin dan non izin	912,499,775.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	04	003	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diproses Tersedianya Mall Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan Mobile di Rest Area	Enrekang, Wajo Provinsi Sulawesi Selatan	13000 Izin dan Non Izin 1 Unit 2 Unit	258,796,400.0			13000 Izin dan Non Izin 1 Unit 2 Unit	247,011,500.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	04	004	Pengaduan Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pengaduan penanaman modal	Sulawesi Selatan	24 Pengaduan	187,703,500.0			24 Pengaduan	185,188,500.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		75 %	2,127,454,378.0			80 %	2,216,963,278.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	12	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	530,000,200.0			12 Bulan	545,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	18 Orang	665,783,178.0			18 Orang	680,783,178.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	130 Jenis ATK	348,972,000.0			130 Jenis ATK	364,864,278.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	50 Unit	37,974,000.0			50 Unit	46,590,822.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	3 Jenis	205,725,000.0			3 Jenis	205,725,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Makassar	10 Kali	339,000,000.0			10 Kali	374,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		75 %	745,229,801.0			80 %	774,464,180.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	1 Unit	44,540,788.0			1 Unit	44,540,788.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	21 Unit	427,309,212.0			21 Unit	427,309,212.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	32 Unit	273,379,801.0			32 Unit	302,614,180.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		80 %	254,674,870.0			80 %	257,990,649.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar	50 Orang	19,202,500.0			50 Orang	26,175,618.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Sulawesi Selatan	4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	142,328,500.0			4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	142,328,500.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	7 Laporan	93,143,870.0			7 Laporan	89,486,531.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		90 %	438,760,237.0			95 %	481,152,732.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kota Makassar	82 Orang 9 Laporan	206,360,237.0			82 Orang 9 Laporan	276,360,237.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	82 Pasang	232,400,000.0			82 Pasang	204,792,495.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02	13				Kepemudaan dan Olahraga									
1.02	13	01.00			Dinas Kepemudaan dan Olahraga			40,494,452,845.02				27,437,793,310.78		
1.02	13	01.00	01		PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN PRAMUKA	% Organisasi pemuda yang aktif Jumlah lembaga pramuka yang aktif		10.56 % 25 Kwarda/Kwarcab	1,490,000,000.0			11.31 % 25 Kwarda/Kwarcab	1,480,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	01	002	Temu Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan, Kepemudaan dan Dewan Kerja Kepramukaan	Jumlah peserta unsur dewan kerja daerah kepramukaan Jumlah peserta unsur lembaga kepemudaan Jumlah lembaga kemahasiswaan	Kota Makassar	25 Kwarda/Kwarcab 11 Forum 10 BEM	105,000,000.0			25 Kwarda/Kwarcab 11 Forum 10 BEM	120,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	01	005	Pembinaan Lembaga Kepemudaan dengan Pola Kemitraan	Jumlah lembaga kepemudaan Jumlah peserta dialog pemuda	Sulawesi Selatan	49 OKP 200 orang	425,000,000.0			49 OKP 200 orang	335,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	01	010	Pitaran Pelatih Kepramukaan dan Kemah Bakti Pramuka	Jumlah peserta pitaran pelatih kepramukaan Jumlah peserta kemah bakti pramuka	Kota Makassar	100 Orang 200 Orang	320,000,000.0			100 Orang 200 Orang	325,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	01	011	Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda	Jumlah peserta pameran hasil karya pemuda Jumlah lomba pada pekan raya pemuda Jumlah peserta pekan raya pemuda Jumlah pemuda hasil seleksi Kapal Pemuda Nusantara Jumlah pemuda hasil seleksi pertukaran pemuda antar negara	Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan	24 kab/kota 8 event 1000 orang 10 orang 5 Orang	340,000,000.0			24 kab/kota 9 event 1000 orang 10 orang 5 Orang	390,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	01	012	Peningkatan IPTEK dan Mental Spiritual Pemuda	Jumlah peserta pengembangan moral etika Jumlah peserta pelatihan IT	[object Object]Sulawesi Selatan	100 Orang 400 Orang	300,000,000.0			100 Orang 500 Orang	310,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	02		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (Prioritas)	% Wirausaha muda Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas)		14.6 % 900 Pemuda	2,435,000,000.0			14.6 % 900 Pemuda	2,492,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	02	001	Seleksi, Pemusatan Pelatihan Paskibraka dan Studi Wawasan	Jumlah Paskibraka Sulawesi Selatan Jumlah peserta seleksi Paskibraka Jumlah peserta studi wawasan	Kota Makassar Luar daerah	73 Orang 150 Orang 110 Orang	1,505,000,000.0			73 Orang 150 Orang 110 Orang	1,510,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	02	005	Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah peserta pengembangan kepemimpinan pemuda Jumlah pemuda pelopor hasil seleksi Jumlah peserta kesukarelawan pemuda	Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan	70 orang 5 orang 200 orang	270,000,000.0			80 orang 5 orang 200 orang	277,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	02	006	Pembinaan dan Pengelolaan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah kelompok wirausaha muda yang dibina Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta lomba wirausaha muda	Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan	25 kelompok 200 orang 120 orang	660,000,000.0			25 kelompok 200 orang 120 orang	705,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	03		PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN	Cakupan atlet pelajar berprestasi Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan		11 % 7 Jenis	4,710,000,000.0			12 % 7 Jenis	2,814,427,876.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	13	01.00	03	001	Kejuaraan Olahraga Daerah (KEJURDA) Pelajar Sulawesi Selatan	Jumlah cabang olahraga yang dilombakan	Provinsi Sulawesi Selatan	7 Cabang olahraga	80,000,000.0			0 Cabang olahraga	0.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	03	011	Gebyar Olahraga Pendidikan	Jumlah peserta gebyar	Sulawesi Selatan	500 Orang	100,000,000.0			500 Orang	105,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	03	012	Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan	Jumlah atlet POPNAS Sulawesi Selatan Jumlah atlet POPWIL Sulawesi Selatan Jumlah peserta Liga Pendidikan usia pelajar Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada POPDA Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada KEIURDA	Luar Provinsi Sulawesi Selatan	150 atlet 0 atlet 24 kab/kota 0 cabor 6 cabor	2,300,000,000.0			0 atlet 100 atlet 24 kab/kota 8 cabor 0 cabor	1,858,427,876.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	03	013	Pemberian Penghargaan Atlet Prestasi Daerah	Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Internasional Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Nasional	Kota Makassar	50 Atlet dan pelatih 0 Atlet dan pelatih	1,580,000,000.0			0 Atlet dan pelatih 15 Atlet dan pelatih	336,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	03	014	Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus	Jumlah atlet Sulawesi Selatan pada PEPARPENAS Jumlah atlet penyandang Tuna Grahita Jumlah peserta Senam Kebugaran Jasmani Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada PEPARPEDA Jumlah event yang dilombakan pada festival olahraga tradisional Jumlah peserta invitasi olahraga tradisional	Luar Provinsi Sulawesi Selatan	0 atlet 75 atlet 24 kab/kota 0 CABOR 7 event 50 orang	650,000,000.0			90 atlet 75 atlet 24 kab/kota 6 CABOR 7 event 0 orang	515,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	04		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	Cakupan pembinaan olahraga Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi olahraga Cakupan pelatih yang bersertifikasi		36 % 300 Atlet 30 Cabor 14.75 %	3,165,000,000.0			38 % 500 Atlet 32 Cabor 14.75 %	3,175,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	04	011	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	Jumlah cabang olahraga daerah yang dibina Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PON Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PRA PON Jumlah atlet PPOD yang diseleksi Jumlah pelatih PPOD yang diseleksi Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada kejuaraan nasioal Jumlah event internasional	Indonesia	47 Cabang olahraga 0 Cabang olahraga 0 Cabang olahraga 1226 atlet 216 pelatih 0 Cabor 0 Event	1,175,000,000.0			47 Cabang olahraga 0 Cabang olahraga 0 Cabang olahraga 1226 atlet 216 pelatih 0 Cabor 0 Event	1,075,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	04	012	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Disabilitas	Jumlah cabang olahraga disabilitas yang dilombakan Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PEPARNAS/KEIURNAS	Indonesia	10 Cabang olahraga 12 Cabang olahraga	500,000,000.0			0 Cabang olahraga 13 Cabang olahraga	500,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	04	013	Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga Prestasi	Jumlah cabang olahraga yang dilombakan	Sulawesi Selatan	47 Cabang olahraga	500,000,000.0			47 Cabang olahraga	500,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	13	01.00	04	014	Peningkatan Kompetensi Tenaga Keolahragaan	Jumlah tenaga keolahragaan yang mengikuti uji kompetensi Jumlah wasit yang mengikuti pelatihan berlisensi Jumlah pelatih yang mengikuti pelatihan berlisensi Jumlah peserta peningkatan kapasitas pelatih fisik	Kota Makassar	30 orang 95 wasit 95 pelatih 50 orang	390,000,000.0			30 orang 100 wasit 100 pelatih 50 orang	410,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	04	015	Pengembangan dan Event Olahraga Unggulan Daerah	Jumlah event olahraga unggulan daerah Jumlah cabang olahraga unggulan daerah	Sulawesi Selatan	11 Event 24 Cabor	600,000,000.0			12 Event 24 Cabor	690,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda		85 % 85 %	22,717,188,308.02			85 % 85 %	11,139,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Jumlah prasarana pemuda yang diadakan Jumlah sarana pemuda yang diadakan	Kota Makassar	5 Unit 10 unit	150,000,000.0			0 Unit 0 unit	150,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	002	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Jumlah prasarana pemuda yang dipelihara Jumlah sarana pemuda yang dipelihara	Kota Makassar	10 Unit 5 Unit	75,000,000.0			0 Unit 0 Unit	0.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	003	Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Jumlah prasarana pemuda yang direhab	Kota Makassar	3 Unit	500,000,000.0			3 Unit	500,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	004	Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Jumlah perlengkapan sarana dan prasarana yang diadakan	Kota Makassar	0 Jenis	200,000,000.0			10 Jenis	200,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	Kota Makassar	2 Unit	200,000,000.0			2 Unit	200,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	006	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	Kota Makassar	0 Unit	100,000,000.0			15 Unit	110,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	007	Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang direhab	Kota Makassar	5 Unit	155,188,308.02			0 Unit	500,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	008	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Asrama PPLP	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Asrama PPLP yang diadakan	Kota Makassar	15 Unit	100,000,000.0			15 Unit	150,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	010	Rehab Sedang/berat Gedung Asrama PPLP	Jumlah Gedung Asrama PPLP yang direhab	Kota Makassar	0 Unit	200,000,000.0			3 Unit	200,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	011	Lanjutan Pembangunan Stadion Barombong	Jumlah gedung stadion yang dibangun	Kota Makassar	1 Unit	19,501,000,000.0			1 Unit	6,779,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	012	Pemeliharaan Gedung Asrama PPLP	Jumlah gedung asrama PPLP yang dipelihara	Kota Makassar	2 Gedung	100,000,000.0			0 Gedung	100,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	013	Pengadaan Alat-alat Kelengkapan Olahraga Atlet PPLP, SKO dan Atlet PPOD	Jumlah alat-alat kelengkapan olahraga atlet PPOD yang diadakan Jumlah alat-alat kelengkapan olahraga atlet SKO yang diadakan Jumlah alat-alat kelengkapan olahraga atlet PPLP yang diadakan	Kota Makassar	11 Jenis 15 Jenis 7 Jenis	200,000,000.0			11 Jenis 15 Jenis 7 Jenis	1,000,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	015	Pengelolaan dan Pengembangan UPT Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah layanan UPT Sarana Prasarana	Kota Makassar	4 Jenis	110,000,000.0			4 Jenis	115,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	13	01.00	05	018	Pemeliharaan Stadion dan Lapangan Olahraga	Jumlah stadion yang dipelihara Jumlah lapangan bola yang dipelihara Jumlah lintasan atletik yang dipelihara	Kota Makassar	3 Unit 3 unit 5 unit	276,000,000.0			3 Unit 3 unit 5 unit	310,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	021	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Wisma Pemuda	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Wisma Pemuda yang diadakan	Kota Makassar	10 Jenis	395,000,000.0			10 Jenis	350,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	05	022	Pengelolaan dan Pengembangan Gedung/Wisma Pemuda, GOR dan Stadion Olahraga	Jumlah stadion olahraga yang dikelola dan dikembangkan Jumlah gedung olahraga yang dikelola dan dikembangkan Jumlah gedung/wisma pemuda yang dikelola dan dikembangkan	Kota Makassar	3 Unit 1 Unit 17 Unit	455,000,000.0			3 Unit 1 Unit 17 Unit	475,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET	Cakupan Pembinaan Atlet Muda		8.22 %	835,000,000.0			8.22 %	946,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	06	001	Pengelolaan dan Pengembangan UPT Balai Pengembangan Atlet	Jumlah layanan UPT Balai Pengembangan Atlet	Kota Makassar	4 Jenis	160,000,000.0			4 Jenis	165,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	06	005	Tes Pengukuran dan Outboard Atlet PPLP dan SKO Sulawesi Selatan	Jumlah atlet PPLP dan SKO yang dimonitoring dan evaluasi Jumlah atlet PPLP dan SKO yang mengikuti outboard	Kota Makassar	200 Atlet 200 atlet	155,000,000.0			200 Atlet 200 atlet	171,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	06	006	Seleksi dan Pembinaan Atlet Sentra Pengembangan Olahraga	Jumlah atlet SKO/PPLP yang mengikuti Kejurnas Jumlah peserta uji coba atlet SKO/PPLP Jumlah atlet SKO dan PPLP hasil seleksi Jumlah cabang olahraga SKO dan PPLP	Kota Makassar	131 atlet 125 atlet 100 atlet 14 cabor	520,000,000.0			131 atlet 125 atlet 100 atlet 15 cabor	610,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	3,698,545,637.0			100 %	3,919,546,534.78	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	34,600,193.0			12 Bulan	36,600,215.78	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 3 yang terbavarkan	Kota Makassar	7 Unit 8 Unit 1 Unit	19,400,000.0			7 Unit 10 Unit 1 Unit	22,400,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	43 Orang	1,104,000,000.0			43 Orang	1,104,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	35 Jenis ATK	170,545,444.0			35 Jenis ATK	174,546,319.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	5 Unit	30,000,000.0			5 Unit	35,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	2 Jenis	2,000,000,000.0			2 Jenis	2,200,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar	1 Pameran	90,000,000.0			1 Pameran	95,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Luar daerah Sulawesi Selatan	48 Kali	250,000,000.0			48 Kali	252,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	316,718,900.0			100 %	317,718,900.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	13	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	10 Unit	150,000,000.0			10 Unit	150,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	10 Unit	100,000,000.0			10 Unit	100,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	10 Unit	25,718,900.0			10 Unit	25,718,900.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Kota Makassar	2 Sistem Informasi/Aplikasi 200 Berita/Informasi	41,000,000.0			2 Sistem Informasi/Aplikasi 250 Berita/Informasi	42,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	841,000,000.0			100 %	862,100,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Sulawesi Selatan	100 Orang	230,000,000.0			100 Orang	235,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar	4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	310,000,000.0			4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	315,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	Kota Makassar	15 Usulan Kegiatan	32,000,000.0			15 Usulan Kegiatan	35,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Kota Makassar	2 Laporan 2 Jenis	110,000,000.0			2 Laporan 2 Jenis	115,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	7 Laporan	110,000,000.0			7 Laporan	112,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	2 Laporan	30,000,000.0			2 Laporan	30,100,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Kota Makassar	1 Laporan	19,000,000.0			1 Laporan	20,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	286,000,000.0			100 %	292,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kota Makassar	130 Orang 20 Laporan	61,000,000.0			130 Orang 20 Laporan	62,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	130 Pasang	150,000,000.0			130 Pasang	155,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar	100 Orang	75,000,000.0			100 Orang	75,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	14				Statistik									
1.02	14	01.00			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				21,238,297,091.71				21,514,812,324.67	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	14	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL	%Sistem data dan statistik yang terintegrasi Cakupan ketersediaan data statistik sektoral		68 % 65 %	570,449,827.0			73 % 70 %	576,698,606.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	001	Penyusunan Validasi Data Output dan Interpretasi Output Data Statistik	Jumlah Laporan Validasi Data Output dan Interpretasi Output Data Statistik		4 Laporan	11,540,000.0		opd parsial	5 Laporan	12,110,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	002	Pembangunan Sistem Satu Data Statistik	Jumlah Sistem Aplikasi Satu Data		2 Aplikasi	196,640,000.0		opd parsial	2 Aplikasi	197,210,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	003	Pengembangan Infarstruktur Statistik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan		1 Aplikasi	59,840,000.0		opd parsial	1 Aplikasi	60,410,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	004	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Teknis		8 Orang	61,640,000.0		opd parsial	8 Orang	62,210,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	005	Bimbingan Teknis	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimbingan Teknis		125 Orang	11,399,827.0		opd parsial	125 Orang	11,948,606.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	006	Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah laporan hasil Penguatan Kelembagaan		2 Laporan	11,840,000.0		opd parsial	2 Laporan	12,410,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	007	Manajemen Produk Diseminasi	Jumlah Publikasi Data		24 Data	48,000,000.0		opd parsial	24 Data	48,000,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	008	Sinkronisasi Antara Data Dengan Metadata	Jumlah Penyediaan Data Informasi yang terstruktur		2 Laporan	24,140,000.0		opd parsial	2 Laporan	24,710,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	009	Pengelolaan Hasil Analisis Data	Jumlah Laporan Hasil Analisis Data		4 Laporan	10,000,000.0		opd parsial	4 Laporan	10,000,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	010	Identifikasi Kebutuhan Data Melalui Forum Satu Data	Jumlah Data OPD Statistik Sektoral yang teridentifikasi melalui Forum Satu Data		45 Data OPD	10,000,000.0		opd parsial	45 Data OPD	10,000,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	011	Membangun Implementasi Rancangan Pengumpulan Data	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan Implementasi Rancangan Data Informasi Statistik Sektoral		45 OPD	21,640,000.0		opd parsial	45 OPD	22,210,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	012	Pelaksanaan Pengumpulan Data OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi Statistik Sektoral yang dikumpulkan		1 Laporan	25,640,000.0		opd parsial	2 Laporan	26,210,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	013	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Sektoral		4 Laporan	46,490,000.0		opd parsial	4 Laporan	47,060,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	014	Integrasi Data, Klasifikasi Data, Penginputan Data dan Agregat Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral yang teridentifikasi melalui Forum Satu Data		1 Laporan	9,140,000.0		opd parsial	2 Laporan	9,710,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	14	01.00	01	015	Pengelolaan Hasil Pengolahan Data	Jumlah Laporan Pengelolaan Hasil Pengolahan Data		2 Laporan	22,500,000.0		opd parsial	2 Laporan	22,500,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	15				Persandian									
1.02	15	01.00			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				21,238,297,091.71				21,514,812,324.67	
1.02	15	01.00	01		PROGRAM PEMANFAATAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI	% Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian		60 %	313,473,452.0			70 %	317,464,280.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	15	01.00	01	001	Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Aset Informasi atau Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Data Celah Kerawanan dan Nilai Resiko Keamanan Sistem Elektronik Hasil Kegiatan Security Assesment Sistem Elektronik		47 Data OPD	21,663,452.0		opd parsial	47 Data OPD	22,234,280.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	15	01.00	01	002	Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan atas terjadinya Insiden Keamanan Informasi		47 OPD	41,660,000.0		opd parsial	47 OPD	42,230,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	15	01.00	01	003	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan		100 Orang	41,660,000.0		opd parsial	100 Orang	42,230,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	15	01.00	01	004	Pembentukan Computer Security Incident Respons Team (CSIRT) di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi		185 Orang	6,950,000.0		opd parsial	200 Orang	6,950,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	15	01.00	01	005	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Jaringan Komunikasi Sandi		24 Kab/Kota	31,660,000.0		opd parsial	24 Kab/Kota	32,230,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	15	01.00	01	006	Implementasi dan Pengelolaan Sertifikat Elektronik Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik		120 Orang	21,660,000.0		opd parsial	135 Orang	22,230,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	15	01.00	01	007	Penyusunan Peraturan Tentang Tata Kelola/Manajemen dan Prosedur Teknis Operasional Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Jumlah Peraturan Kepala Daerah dan Pedoman tentang SOP Penrapan Keamanan Informasi		5 SOP	51,660,000.0		opd parsial	5 SOP	52,230,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	15	01.00	01	008	Pengelolaan Alat Pendukung Utama Persandian Yang Digunakan Pemerintah Daerah	Jumlah Alat Pendukung Utama Persandian yang digunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		15 APU	96,560,000.0		opd parsial	15 APU	97,130,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1.02	16				Kebudayaan									
1.02	16	01.00			Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan				26,687,734,078.55				26,886,555,236.78	
1.02	16	01.00	01		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu % Kegiatan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan norma agama		10 Event 2 Jenis 100 %	3,183,231,793.65			12 Event 2 Jenis 100 %	2,717,181,687.79	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	01	001	Pekan Budaya Daerah Sulawesi Selatan	Jumlah pelaksanaan Pekan budaya Daerah		1 Kali	341,225,001.65			1 Kali	341,224,999.79	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	01	002	Sosialisasi Peraturan Cagar Budaya Prov. Sulawesi Selatan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Cagar Budaya Prov. Sulawesi Selatan		125 Orang	110,000,000.0			0 Orang	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	01	003	Peningkatan Kualitas Pengelola Museum dan Cagar Budaya	Jumlah Peserta Peningkatan Kualitas Pengelola Museum dan Cagar Budaya		50 Orang	56,465,000.0			50 Orang	66,465,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	01	004	Festival Keraton Nusantara	Jumlah Partisipasi Festival Keraton Nusantara		1 Kali	190,114,000.0			1 Kali	190,114,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	01	007	Pertunjukan Seni Dalam Daerah	Jumlah Pementasan pada event seni dalam daerah		24 Kali	437,000,000.0			24 Kali	195,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	01	008	Pertunjukan Seni Luar Daerah	Jumlah Pementasan pada event seni luar daerah		4 kali	395,590,000.0			4 kali	406,040,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	01	011	Pembinaan Lembaga Kesenian di Sulawesi Selatan	Jumlah lembaga kesenian yang mendapatkan pembinaan		5 Lembaga Kesenian	125,000,000.0			5 Lembaga Kesenian	125,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	01	012	Pengadaan Sarana Pertunjukan Kesenian	Jumlah pengadaan sarana pertunjukan kesenian		1 Paket	102,738,000.0			1 Paket	167,738,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	01	013	Pengenalan dan Edukasi Museum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengenalan dan Edukasi Museum		1 Kali	100,000,000.0			0 Kali	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	01	016	Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Nasional	Jumlah Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara		120 orang	65,863,792.0			120 orang	70,863,688.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	01	023	Kemah Seni Se Sulsel	Jumlah Pelaksanaan Kemah Seni		1 Kali	130,200,000.0			1 Kali	135,200,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	16	01.00	01	028	Pameran Temporer Museum Luar Daerah	Jumlah Partisipasi Pameran Temporer Museum Luar Daerah		3 Kali	254,168,000.0			3 Kali	254,168,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	01	029	Temu Taman Budaya se Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Temu Taman Budaya		1 Kali	293,868,000.0			1 Kali	294,368,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	01	031	Konservasi, Preparasi dan Labeling Koleksi Museum	Terpeliharanya koleksi museum lagaligo		250 Buah Koleksi	75,000,000.0			250 Buah Koleksi	75,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	01	035	Pameran Temporer Museum Dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pameran Temporer Museum Dalam Daerah		1 Kali	106,000,000.0			1 Kali	121,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	01	036	Pagelaran Musik Langgam Daerah Sulsel	Jumlah Pelaksanaan Pagelaran Musik Langgam		1 Kali	150,000,000.0			1 Kali	175,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	01	050	Workshop dan Pameran Seni	Jumlah workshop/ pameran seni yang dilaksanakan		1 Kali	150,000,000.0			1 Kali	100,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	01	051	Pemilihan Duta Museum	Jumlah Duta Museum yang terpilih		2 Orang	100,000,000.0			0 Orang	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	02		PROGRAM PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN NILAI NILAI BUDAYA	Cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		8 % 250 Benda Budaya 14 Karya Budaya	1,517,538,275.0			10 % 250 Benda Budaya 16 Karya Budaya	1,301,695,411.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	02	003	Internalisasi Pemahaman Sejarah Bagi Generasi Muda	Jumlah peserta Internalisasi Pemahaman Sejarah Bagi Generasi Muda		50 orang	59,300,000.0			100 orang	69,300,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	02	004	Pemeliharaan Koleksi Museum di Sulawesi Selatan	Jumlah Pemeliharaan Koleksi Museum di Sulawesi Selatan		100 koleksi	60,713,127.0			100 koleksi	60,713,127.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	02	005	Pemeliharaan Museum di Sulawesi Selatan	Jumlah Museum yang dipelihara		1 Museum	152,800,000.0			1 Museum	152,800,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	02	008	Seminar Penguatan Ketahanan Budaya Daerah	Jumlah peserta Seminar Penguatan Ketahanan Budaya Daerah		100 Orang	39,475,000.0			100 Orang	39,475,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	02	009	Pengusulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Jumlah Pengusulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)		20 Karya Budaya	165,825,800.0			20 Karya Budaya	165,825,800.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	02	010	Kongres Kebudayaan Daerah	Jumlah Kongres Kebudayaan Daerah		200 Orang	123,077,222.0			200 Orang	133,077,222.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	02	011	Pemeliharaan Rumah Adat	Jumlah Rumah Adat yang dipelihara		2 Unit	385,842,864.0			1 Unit	150,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	02	015	Penetapan Cagar Budaya dan Situs Tingkat Provinsi	Jumlah cagar budaya yang di tetapkan		3 Cagar Budaya	64,063,750.0			3 Cagar Budaya	64,063,750.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	02	018	Pemeliharaan Cagar Budaya dan Situs	Jumlah Cagar Budaya dan Situs		2 Cagar Budaya dan Situs	466,440,512.0			3 Cagar Budaya dan Situs	466,440,512.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	6,013,923,865.06			100 %	6,278,923,865.06	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	950,980,000.0			12 Bulan	950,980,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	Kota Makassar	7 Unit 15 Unit	20,000,000.0			7 Unit 15 Unit	20,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS		82 Orang	2,167,400,000.0			84 Orang	2,167,400,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
1.02	16	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia		40 Jenis ATK	283,468,860.0			40 Jenis ATK	288,468,860.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	16	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		23 Unit	28,900,000.0			23 Unit	38,900,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		0 Jenis	1,797,495,000.0			0 Jenis	1,947,495,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran		0 Pameran	100,000,000.0			0 Pameran	100,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		48 Kali	665,680,005.06			48 Kali	765,680,005.06	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	2,204,061,816.0			100 %	2,491,044,258.13	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara		3 Unit	1,393,281,816.0			2 Unit	1,593,281,816.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		24 Unit	324,480,000.0			24 Unit	374,480,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		0 Unit	316,300,000.0			0 Unit	323,282,442.13	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		100 Unit	120,000,000.0			100 Unit	135,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembankan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website		0 Sistem Informasi/Aplikasi 0 Berita/Informasi	50,000,000.0			0 Sistem Informasi/Aplikasi 0 Berita/Informasi	65,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	504,366,000.0			100 %	472,951,098.24	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah		125 Orang	108,816,000.0			125 Orang	123,816,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	56,570,000.0			4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	56,570,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK		2 Usulan Kegiatan	190,400,000.0			2 Usulan Kegiatan	200,400,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi		1 Laporan 0 Jenis	65,500,000.0			0 Laporan 0 Jenis	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		4 Laporan	26,080,000.0			4 Laporan	31,080,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun		2 Laporan	50,000,000.0			2 Laporan	50,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun		1 Laporan	7,000,000.0			1 Laporan	11,085,098.24	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	16	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	673,488,880.23			100 %	682,257,470.94	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun		0 Orang 0 Laporan	42,188,880.23			0 Orang 0 Laporan	50,957,470.94	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia		215 Pasang	322,000,000.0			215 Pasang	322,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	16	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia		0 Pasang	309,300,000.0			0 Pasang	309,300,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
1.02	17				Perpustakaan									
1.02	17	01.00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				9,196,555,901.56				9,316,291,857.17	
1.02	17	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat yang dibina		120000 Orang 80 Unit	1,100,000,000.0			130000 Orang 85 Unit	1,100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	004	Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Perpustakaan	125,000,000.0	APBD Prov		100 Perpustakaan	125,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	009	Bimtek Perpustakaan	Jumlah peserta bimtek	Kota Makassar	200 Orang	150,000,000.0	APBD Prov		200 Orang	150,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	020	Road Show Pengembangan Kegemaran Membaca	Jumlah peserta	Kota Makassar	1000 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		1000 Orang	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	027	Bedah Buku Terbitan Daerah Sulsel	Jumlah Peserta Jumlah Judul Buku	Provinsi Sulawesi Selatan	120 Orang Judul	150,000,000.0	APBD Prov		120 Orang Judul	150,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	035	Pengembangan Otomasi Perpustakaan	Jumlah data otomasi yang diinput ke pangkalan data	Kota Makassar	3500 Lembar	100,000,000.0	APBD Prov		3500 Lembar	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	036	Pekan Perpustakaan dan Wisata Baca	Jumlah peserta pekan perpustakaan dan budaya baca	Kota Makassar	1500 Orang	150,000,000.0	APBD Prov		1500 Orang	150,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	037	Pengembangan, pemberdayaan bahan Pustaka dan Kearifan Lokal	Jumlah naskah	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Exp	100,000,000.0	APBD Prov		10 Exp	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	038	Road show Story Telling	Jumlah peserta road show	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Orang	125,000,000.0	APBD Prov		100 Orang	125,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	039	Up Grading Berkala Pustakawan	Jumlah peserta upgrading berkala	Provinsi Sulawesi Selatan	200 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		200 Orang	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan per satuan penduduk Jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang memiliki sertifikat		0.03 1200 Orang	325,000,000.0			0.03 1300 Orang	325,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	02	005	Sinkronisasi Peningkatan Digitalisasi Alih Media Informasi Perpustakaan	Jumlah koleksi naskah kuno sulsel yang dialih media	Provinsi Sulawesi Selatan	42 Judul	100,000,000.0	APBD Prov		42 Judul	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	02	006	Fasilitasi Pengiat Literasi Perpustakaan	Jumlah Pengiat literasi	Provinsi Sulawesi Selatan	33 Orang	125,000,000.0	APBD Prov		33 Orang	125,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	02	008	Pengembangan Otomasi Layanan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	Kota Makassar	15000 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		15000 Orang	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PERPUSTAKAAN	Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		252000 Jenis 320000 Buku	375,000,000.0			253000 Jenis 330000 Buku	375,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	03	010	Pelestarian dan Pemeliharaan Bahan Perpustakaan	Jumlah koleksi buku yang dipelihara dan jumlah bahan perpustakaan yang dilestarikan	Provinsi Sulawesi Selatan	200 Exp	100,000,000.0	APBD Prov		200 Exp	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	03	013	Pengolahan Bahan Perpustakaan	Jumlah bahan pustaka	Kota Makassar	15000 Exp	200,000,000.0	APBD Prov		15000 Exp	200,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	17	01.00	03	015	Akuisisi Bahan Pustaka	Jumlah Bagan pustaka	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Exp	75,000,000.0	APBD Prov		100 Exp	75,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	4,105,555,901.56			100 %	4,125,291,857.17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	500,000,000.0			12 Bulan	500,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	5 Unit 12 Unit	75,000,000.0			5 Unit 12 Unit	75,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	91 Orang	3,155,555,901.56			91 Orang	3,175,291,857.17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	20 Jenis ATK	100,000,000.0			20 Jenis ATK	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	20 Unit	75,000,000.0			20 Unit	75,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	40 Jenis	50,000,000.0			40 Jenis	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar	1 Pameran	50,000,000.0			1 Pameran	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Luar Provinsi Sulawesi Selatan	71 Kali	100,000,000.0			71 Kali	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	1,050,000,000.0			100 %	1,150,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	4 Unit	300,000,000.0			4 Unit	300,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	17 Unit	125,000,000.0			17 Unit	125,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	6 Unit	500,000,000.0			6 Unit	600,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	20 Unit	75,000,000.0			20 Unit	75,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Kota Makassar	4 Sistem Informasi/Aplikasi 50 Berita/Informasi	50,000,000.0			4 Sistem Informasi/Aplikasi 50 Berita/Informasi	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	500,000,000.0			100 %	500,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar	48 Orang	75,000,000.0			48 Orang	75,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar	4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	125,000,000.0			4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	125,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	17	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan 3 Jenis	50,000,000.0			1 Laporan 3 Jenis	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	5 Laporan	150,000,000.0			5 Laporan	150,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	3 Laporan	50,000,000.0			3 Laporan	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Kota Makassar	1 Laporan	50,000,000.0			1 Laporan	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	141,000,000.0			100 %	141,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kota Makassar	5 Orang 4 Laporan	50,000,000.0			5 Orang 4 Laporan	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	150 Pasang	40,000,000.0			150 Pasang	40,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	150 Pasang	51,000,000.0			150 Pasang	51,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18				Kearsipan									
1.02	18	01.00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				9,196,555,901.56				9,316,291,857.17	
1.02	18	01.00	01		PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	% Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku		60 %	600,000,000.0			80 %	600,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	01	008	Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Terbaik Kab/Kota Prov. Sulsel	Jumlah peserta pemilik LKD terbaik	Provinsi Sulawesi Selatan	24 Unit kerja	100,000,000.0	APBD Prov		24 Unit kerja	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	01	011	Sosialisasi Kearsipan	Jumlah peserta	Kota Makassar	150 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		150 Orang	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	01	015	Bimtek Kearsipan	Jumlah peserta	Kota Makassar	150 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		150 Orang	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	01	017	Penyusunan Pedoman Kearsipan	Jumlah pedoman yang disusun	Kota Makassar	2 Exp	100,000,000.0	APBD Prov		2 Exp	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	01	018	Penilaian Kinerja dan Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Prov. Sulsel	Jumlah peserta pemilihan arsiparis teladan	Provinsi Sulawesi Selatan	80 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		80 Orang	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	01	019	Pengawasan Kearsipan	Jumlah unit kerja yang diawasi pengarsipannya	Provinsi Sulawesi Selatan	20 Unit kerja	100,000,000.0	APBD Prov		25 Unit kerja	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	02		PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Jumlah dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan		60 %	300,000,000.0			80 %	300,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	02	004	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang akan dibersihkan	Kota Makassar	350000 Lembar	100,000,000.0	APBD Prov		350000 Lembar	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	02	014	Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis	Jumlah khasanah	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Khasanah	150,000,000.0	APBD Prov		2 Khasanah	150,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	02	015	Penelusuran Arsip	Jumlah penelusuran	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Kab/Kota/Prov	50,000,000.0			4 Kab/Kota/Prov	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar		5 Unit	250,000,000.0			5 Unit	250,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	03	001	Penyimpanan dan Penataan Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Sudah Tertata	Kota Makassar	28932 Box	150,000,000.0	APBD Prov		28932 Box	150,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	03	003	Peningkatan, Pemeliharaan dan perawatan Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dipelihara dan dibersihkan, jumlah arsip statis yang dirawat/dilestarikan	Provinsi Sulawesi Selatan	4500 Lembar	100,000,000.0	APBD Prov		4500 Lembar	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	18	01.00	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ARSIP	Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat		20 Lembaga/Instansi	450,000,000.0			20 Lembaga/Instansi	450,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	04	001	Pengembangan Layanan Kearsipan	Jumlah pengunjung yang menggunakan layanan arsip	Kota Makassar	1500 Orang	50,000,000.0	APBD Prov		1500 Orang	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	04	009	Penelusuran dan Penggandaan Karya Ilmiah Khasanah Sulsel	Jumlah Penggandaan karya ilmiah	Provinsi Sulawesi Selatan	500 Exp	125,000,000.0	APBD Prov		500 Exp	125,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	04	011	Layanan Tertib Arsip Dinamis	Jumlah yang terlayani	Provinsi Sulawesi Selatan	5 OPD/SMA	100,000,000.0	APBD Prov		5 OPD/SMA	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	04	012	Workshop Pengelolaan Arsip Dinamis	Jumlah peserta workshop	Kota Makassar	50 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		50 Orang	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	04	013	Publikasi dan Promosi Kearsipan	Jumlah publikasi dan promosi kearsipan	Provinsi Sulawesi Selatan	3 OPD/PT	75,000,000.0	APBD Prov		3 OPD/PT	75,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.00					Urusan Pilihan									
2.00	01				Pariwisata									
2.00	01	01.00			Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata				26,687,734,078.55				26,886,555,236.78	
2.00	01	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA (Prioritas)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan lokal Peningkatan jumlah produk usaha ekonomi kreatif (Prioritas) Lama Kunjungan Wisata Jumlah pengguna rest area sebagai spot wisata alternatif (Prioritas)		300000 WNA 7500000 WNI 2 Jenis 5 Hari 1000 Orang	4,954,375,430.49			300000 WNA 7500000 WNI 2 Jenis 5 Hari 1000 Orang	5,243,103,750.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
2.00	01	01.00	01	001	Pekan Raya Sulsel	Jumlah Pelaksanaan Pekan Raya Sulsel		1 Event	66,250,000.0			1 Event	76,250,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
2.00	01	01.00	01	002	Direct Promotion Dalam Negeri	Jumlah promosi pariwisata sulsel di dalam negeri	Luar Daerah	3 event	409,349,250.0			4 event	585,799,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
2.00	01	01.00	01	004	Pengadaan Bahan Promosi	Jumlah Bahan Promosi		5500 Exemplar	415,785,000.0			5500 Exemplar	420,785,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
2.00	01	01.00	01	005	Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Media Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik		6 Media	100,000,000.0			6 Media	100,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
2.00	01	01.00	01	006	Celebes Travel Mart (CTM)	Jumlah Pelaksanaan Celebes Travel Mart (CTM)		1 Kali	165,700,000.0			1 Kali	175,700,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
2.00	01	01.00	01	007	Familiarization Trip (Fam Trip)	Jumlah pelaksanaan Fam Trip (Familiarization Trip)		1 Kali	89,400,000.0			1 Kali	89,400,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
2.00	01	01.00	01	009	Analisa Data Kunjungan Wisatawan Nusanantara/Mancanegara	Jumlah informasi data Kunjungan Wisatawan		1 informasi	112,147,200.0			1 informasi	122,147,200.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
2.00	01	01.00	01	010	Survey Pengembangan Pasar Pariwisata	Jumlah informasi hasil survey pasar		1 Informasi	127,500,000.0			0 Informasi	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
2.00	01	01.00	01	011	Pembuatan Buku Profil Pariwisata Sulsel	Jumlah Pembuatan Buku Profil Pariwisata Sulsel		200 EXP	92,274,800.0			200 EXP	97,274,800.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
2.00	01	01.00	01	014	Launching Calender of Event (CoE) Sulawesi selatan	Jumlah Pelaksanaan Launching Calender of Event (CoE) Sulawesi Selatan		1 event	100,000,000.0			1 event	100,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
2.00	01	01.00	01	015	Wonderfull Event Sulawesi Selatan	Jumlah event Wonderfull Event Sulawesi Selatan		4 event	730,000,000.0			4 event	830,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
2.00	01	01.00	01	016	Pembinaan Event Budaya dan Pariwisata di Kab/Kota	Jumlah event Pembinaan Event Budaya dan Pariwisata di Kab/Kota		8 Event	809,089,000.0			8 Event	809,089,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
2.00	01	01.00	01	017	Pasar Ramadhan Wisata	Jumlah event Pasar Ramadhan Wisata		1 Kali	100,000,000.0			1 Kali	100,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
2.00	01	01.00	01	018	Misi Promosi Pariwisata Luar Negeri	Jumlah Misi Promosi Pariwisata Luar Negeri		3 Kali	388,111,000.0			3 Kali	388,111,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	01	01.00	01	019	Misi Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah Misi Promosi Pariwisata Dalam Negeri		1 Kali	171,000,000.0			1 Kali	181,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	01	020	Sales Mission	Jumlah Misi Penjualan di Luar Negeri	Luar Negeri	1 Event	296,590,500.0			2 Event	452,385,750.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	01	025	Pekan Produk Kreatif	Jumlah Pelaksanaan Jumlah Partisipasi Pekan Produk Kreatif		1 Kali 1 Kali	296,900,000.0			1 Kali 1 Kali	311,900,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	01	026	Workshop Desain Produk Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Workshop Desain Produk Ekonomi Kreatif		50 Orang	116,016,680.49			0 Orang	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	01	027	Kumpul ASIK (Asosiasi Industri Kreatif)	Jumlah Pelaksanaan Kumpul ASIK (Asosiasi Industri Kreatif)		1 Kali	139,050,000.0			1 Kali	149,050,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	01	028	Gelar Pesona Sulawesi Selatan	Jumlah Kegiatan Gelar Pesona Sulawesi Selatan		3 Kali	142,912,000.0			3 Kali	152,912,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	01	032	Fashion Show Sutra	Jumlah Peserta Fashion Show Sutra		40 Orang	86,300,000.0			50 Orang	101,300,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	02		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL (Prioritas)	Jumlah Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal (Prioritas)		2 Kab/Kota	316,014,072.12			2 Kab/Kota	368,514,072.12	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	02	001	Sosialisasi Wisata Halal	Jumlah Peserta Sosialisasi Wisata Halal		200 Orang	78,514,072.12			200 Orang	83,514,072.12	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	02	002	Sertifikasi Usaha Pariwisata Halal	Jumlah Usaha Pariwisata yang Bersertifikat Halal		5 Usaha Pariwisata	237,500,000.0			6 Usaha Pariwisata	285,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	04		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang didukung/difasilitasi menjadi destinasi wisata unggulan		2 Destinasi Wisata	5,440,760,946.0			2 Destinasi Wisata	5,855,338,542.82	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	04	001	Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Destinasi	Jumlah Peserta Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Destinasi		100 Orang	104,385,000.0			100 Orang	104,385,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	04	002	Penataan Destinasi Wisata Sulawesi Selatan	Jumlah Destinasi Wisata yang meningkat		2 Destinasi	4,035,057,446.0			2 Destinasi	5,073,388,342.82	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	04	003	Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Daya Tarik Wisata Sulawesi Selatan	Jumlah Kab./Kota yang terinventarisasi dan Identifikasi potensi daya tarik wisatanya		6 Kab./Kota	150,100,000.0			6 Kab./Kota	150,100,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	04	006	Jelajah Wisata Baru	Jumlah jalur wisata di kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD)		1 Jalur Kawasan Strategi Pariwisata Daerah	86,337,200.0			1 Jalur Kawasan Strategi Pariwisata Daerah	86,337,200.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	04	007	Perencanaan Destinasi dan Inventarisasi Pariwisata Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi		2 Dokumen	500,000,000.0			0 Dokumen	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	04	008	Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Sulsel	jumlah peserta forum		100 Orang	61,294,000.0			100 Orang	61,294,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	04	009	Focus Grup Discussion (FGD) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)	Jumlah Pelaksanaan FGD KSPD		3 Kali	123,753,300.0			0 Kali	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	04	010	Inventarisasi Usaha Jasa Industri Pariwisata Daerah	Jumlah Industri Pariwisata yang terinventarisasi di Kab./Kota		24 Kab/Kota	140,100,000.0			24 Kab/Kota	140,100,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	04	011	Penyusunan Travel Pattern	Jumlah Pola Perjalanan yang dihasilkan		2 Pola	166,620,000.0			2 Pola	166,620,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	04	013	Sosialisasi Sertifikasi Usaha Jasa Industri Pariwisata	Jumlah Peserta Sosialisasi Pariwisata		100 Orang	73,114,000.0			100 Orang	73,114,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	05		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Cakupan penyelenggaraan event pariwisata bekerjasama dengan lembaga kemitraan		12 Event	1,879,973,000.0			12 Event	1,475,545,080.68	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	05	001	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kepariwisataan	Jumlah Masyarakat Desa Wisata yang diberdayakan Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang diberdayakan		3 Desa 10 Kelompok	151,800,000.0			4 Desa 10 Kelompok	171,800,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	05	002	Pelatihan SDM Bidang Pariwisata	Jumlah Peserta		260 Orang	393,566,000.0			260 Orang	393,566,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	05	003	Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona	Jumlah peserta		200 Orang	164,300,000.0			200 Orang	164,300,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	01	01.00	05	005	Kompetisi Kelompok Sadar Wisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang ikut dalam kompetisi		10 Kelompok	208,322,800.0			0 Kelompok	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
2.00	01	01.00	05	008	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pariwisata	Jumlah Laporan Monev hasil tindak lanjut Kerjasama		2 Laporan	116,700,000.0			2 Laporan	116,700,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
2.00	01	01.00	05	009	Inventarisasi Kerjasama Antar Kab/Kota	Jumlah Kerjasama Kab./Kota yang ter-inventarisasi		12 Kab./Kota	91,700,000.0			12 Kab./Kota	91,700,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
2.00	01	01.00	05	010	Kerjasama Masyarakat Bidang Kepariwisataaan	Jumlah Stakeholder yang bekerjasama		3 Kerjasama	324,584,200.0			3 Kerjasama	343,479,080.68	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
2.00	01	01.00	05	012	Pendataan SDM Usaha Pariwisata	Jumlah Kab/Kota yang didata		12 Kab/Kota	240,000,000.0			0 Kab/Kota	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
2.00	01	01.00	05	015	Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata	Jumlah SDM yang tersertifikasi		200 Orang	189,000,000.0			200 Orang	194,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
2.00	02				Pertanian									
2.00	02	02.00			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				37,013,328,553.21				36,545,229,202.92	
2.00	02	02.00	03		PROGRAM HILIRISASI PETERNAKAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan (Prioritas)		29493840000 Rp	6,261,903,750.0			37059609113 Rp	4,992,232,399.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	001	Pembinaan, Revitalisasi RPH-R/RPU dan Sertifikasi Kelayakan Dasar	Jumlah RPH-R/RPU yang direvitalisasi Jumlah RPH-R/RPU dan Unit Usaha yang memiliki NKV Jumlah RPH-R/RPU yang mendapatkan Pembinaan Fasilitasi dan Strukturisasi Managemen Jumlah Unit Pengolahan Daging Umum Bersertifikat Halal dan NKV	Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kota Makassar Kota Palopo	1 Unit RPHRPH-R/RPU 1 Unit RPH-R/RPU 2 Unit RPH-R/RPU 1 Unit	283,000,000.0	APBD Prov		1 Unit RPHRPH-R/RPU 1 Unit RPH-R/RPU 2 Unit RPH-R/RPU 1 Unit	283,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	005	Pengembangan Pasar Ternak	Jumlah Pasar Ternak di Sulsel	Provinsi Kota Makassar	1 Unit	500,000,000.0	APBD Prov		0 Unit	0.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	008	Penumbuhan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan	Jumlah Pelaku Usaha mendapatkan Pembinaan Kelompok Pasca panen di kab/kota Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pengolahan Limbah Jumlah buku inventaris usaha pengolahan hasil peternakan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selavar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang	100 Pelaku Usaha 2 Dokumen 80 Buku	415,000,000.0	APBD Prov		100 Pelaku Usaha 2 Dokumen 85 Buku	425,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare							
2.00	02	02.00	03	009	Penyusunan Data Base Pelaku Usaha dan Harga Komoditi Peternakan	Jumlah Buku Kebutuhan dan Harga Komoditi Ternak dan Produk Peternakan Jumlah Buku database Pelaku Usaha	24 kab/kota	20 Buku 35 Buku	150,000,000.0	APBD Prov		40 Buku 45 Buku	200,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	011	Pengawasan Tim Jejaring Keamanan Pangan	Jumlah Unit Usaha/Pasar yang mendapatkan Pengawasan Tim jejaring Keamanan Pangan	10 Kab/Kota	15 Unit Usaha/Pasar	65,000,000.0	APBD Prov		18 Unit Usaha/Pasar	70,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	012	Pengambilan dan Pengujian sampel produk pangan Hewani UPT PMPP	Jumlah Pengambilan dan Pengujian sampel Produk Hewani UPT PMPP	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare	180 sampel	200,000,000.0	APBD Prov		200 sampel	220,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	013	Pelayanan Rekomendasi Usaha Peternakan	Jumlah surat Permohonan dan surat Persetujuan Teknis	Provinsi Kota Makassar	800 surat permohonan dan surat Persetujuan Teknis	100,000,000.0	APBD Prov		800 surat permohonan dan surat Persetujuan Teknis	110,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	015	Pengawasan dan Peningkatan Mutu Kualitas Pakan Berbasis pengujian	Jumlah Pengambilan dan Pengujian sampel pakan, pengujian sampel dan pengawasan peredaran	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone	170 sampel	216,000,000.0	APBD Prov		180 sampel	240,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						pakan	Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare							
2.00	02	02.00	03	016	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan UPT PMPP	Jumlah peralatan peningkatan pelayanan UPT PMPP Jumlah SDM laboratorium petugas pengambil contoh produk pangan hewani yang mendapatkan pelatihan Jumlah SDM laboratorium Pengujian Pangan Hewani yang mendapatkan pelatihan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai	397 Buah/Unit 22 Orang 9 Orang	400,000,000.0	APBD Prov		412 Buah/Unit 22 Orang 10 Orang	415,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare							
2.00	02	02.00	03	018	Pengembangan Kelembagaan Kelompok Ternak Unggulan	Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Pembinaan bagi kelompok ternak Jumlah Dokumen DataBase Penyuluh dan Kelompok Tani Jumlah Dokumen Road Map Penguatan Kelembagaan Agribisnis Mandiri Petani/Peternak	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Palopo Kota Parepare Provinsi Kota Makassar	33 Kelompok 50 Dokumen 0 Dokumen	95,000,000.0	APBD Prov		37 Kelompok 50 Dokumen 1 Dokumen	300,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	020	Pengembangan, Pemanfaatan Biogas dan Adaptasi dan Mitigasi RAD-GRK	Jumlah Dokumen Adaptasi dan Mitigasi RAD-GRK nan Dokumen Jumlah Peserta Pertemuan pengembangan dan pemanfaatan Biogas Jumlah kelompok penerima pengadaan Biogas	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen 60 Orang 4 Kelompok	225,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen 70 Orang 6 Kelompok	250,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare							
2.00	02	02.00	03	021	Promosi Hasil Produksi Peternakan	Jumlah promosi/pameran usaha peternakan	Luar Provinsi Provinsi Kota Makassar	2 Pameran	200,000,000.0	APBD Prov		2 Pameran	200,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	024	Penyusunan Media Informasi dan Komunikasi Penyuluhan Peternakan	Jumlah edisi buletin informasi dan komunikasi yang diterbitkan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara	4 Edisi	60,000,000.0	APBD Prov		4 Edisi	65,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare							
2.00	02	02.00	03	027	Survey Identifikasi Desain wilayah pengembalaan	Jumlah dokumen profil wilayah penggembalaan Jumlah Penyusunan Dokumen Pedum Kriteria dan Persyaratan Teknis Pembangunan Prasarana Usaha Peternakan Jumlah Dokumen Analisis kemampuan daya tampung lahan	24 kab/kota Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Soppeng	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	300,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	300,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	028	Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan UPT PMPP	Persentase Kepuasan Pelanggan UPT PMPP	Provinsi Kota Makassar	85 %	60,000,000.0	APBD Prov		85 %	70,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	029	Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah, Kelayakan Usaha	Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah dan Kelayakan Usaha (Kewirausahaan) Jumlah peserta pertemuan pelaku usaha Peternakan	Provinsi Kota Makassar	60 Orang 30 Orang	60,000,000.0	APBD Prov		60 Orang 30 Orang	60,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	030	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Antara Kelompok Tani Dengan Pihak Perbankan dan Asuransi	Jumlah peserta pertemuan permodalan asuransi usaha ternak Jumlah Kelompok Tani/UMKM yang terfasilitasi dalam Membentuk Lembaga Keuangan Mikro	24 Kab/Kota	50 Orang 3 Kelompok	155,000,000.0	APBD Prov		50 Orang 3 Kelompok	155,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	032	Pembinaan Asuransi Usaha Ternak	Jumlah Peserta Pembinaan Asuransi Ternak	22 Kab/Kota	50 Orang	72,000,000.0	APBD Prov		50 Orang	72,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	033	Bimbingan Teknis Pengolahan Limbah Ternak Unggas dan Limbah Pasar Menjadi Pupuk Organik	Jumlah Peserta Bimtek Pengolahan Limbah Menjadi Pupuk Organik	Provinsi Kota Makassar	60 Orang	50,000,000.0	APBD Prov		60 Orang	50,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	034	Pembinaan Teknis Bidang Pembiayaan dan Investasi	Jumlah Kelompok Tani Peternak Jumlah Laporan Pembinaan Teknis Pembinaan dan Investasi Jumlah laporan Monev Perkembangan kredit , Investasi dan Kemitraan Jumlah SDM pelaku usaha UMKM yang mendapatkan pelatihan	24 kab/Kota	5 Kelompok 2 Laporan 3 Laporan 50 Orang	320,000,000.0	APBD Prov		5 Kelompok 2 Laporan 3 Laporan 50 Orang	320,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	035	Pendampingan untuk pengembangan kapasitas dan Produktivitas	Jumlah Kelompok Tani Model Agribisnis	24 Kab/Kota	20 Kelompok	150,000,000.0	APBD Prov		20 Kelompok	150,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	036	Pengawasan Kesmavet dan Pengawasan Mutu Pangan Asal Hewan	Jumlah Pengambilan Sampel Mutu Pangan Asal Hewan Jumlah RPH yang mendapatkan sertifikasi halal	24 Kab/Kota	200 Sampel 0 RPH	111,903,750.0	APBD Prov		200 Sampel 0 RPH	111,903,750.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	038	Sosialisasi Pengujian Mutu Pakan/Bahan Pakan	Jumlah peserta pertemuan sosialisasi	Provinsi Kota Makassar	20 orang	30,000,000.0	APBD Prov		20 orang	30,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	041	Komunikasi Informasi dan Edukasi Penyakit Zoonosis dan, Pengawasan Kesrawan	Jumlah Peserta KIE Penyakit Zoonosis dan Pengawasan Kesrawan Jumlah pembinaan penyakit Zoonosis di kab/kota	Provinsi Kota Makassar	25 Orang 0 Kabupaten/Kota	80,000,000.0	APBD Prov		25 Orang 0 Kabupaten/Kota	80,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	03	042	Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan Dalam proses sertifikasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi NKV pada unit usaha bidang peternakan	24 Kab./Kota	35 Orang	64,000,000.0	APBD Prov		0 Orang	0.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	02.00	03	043	Pembangunan dan Pengembangan RPH-R Modern	Jumlah RPH-R Modern yang di bangun dan dikembangkan	Prov. Sul-Sel	1 Unit	1,900,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	815,328,649.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	11		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) Prioritas (Rabies, Anthrax, Hog Cholera, Avian Influenza, Brucellosis)		4947 Kasus	3,403,000,000.0			4452 Kasus	3,611,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	11	001	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyakit Hewan	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pembinaan dan monitoring	24 Kab./Kota	15 Unit Usaha	77,000,000.0	APBD Prov		15 Unit Usaha	77,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	11	003	Peningkatan Kapasitas Petugas Medik dan Paramedik	Jumlah peserta Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Medik dan Paramedik Jumlah peserta Pertemuan analisa Ekonomi Bidang Kesehatan Hewan	Provinsi Kota Makassar	30 Orang 30 Orang	180,000,000.0	APBD Prov		30 Orang 30 Orang	280,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	11	004	Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Penyakit Reproduksi	Jumlah Pengadaan vaksin dan obat-obatan	24 Kab./Kota	704946 Dosis	2,000,000,000.0	APBD Prov		775440 Dosis	2,010,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	11	007	Pembinaan dan Monitoring Peredaran Obat Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan dan Monitoring dan Tersusunnya Buku Data Base Perusahaan/Depo Obat Hewan Jumlah Peternak yang mendapatkan Sosialisasi Penggunaan Antibiotik dan Jumlah Peternak yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Antibiotik	24 Kabupaten/Kota	30 Unit 0 Orang	88,000,000.0	APBD Prov		30 Unit 0 Orang	90,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	11	010	Peningkatan Kapasitas Pengawasan Obat Hewan	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Obat Hewan Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM	Provinsi Kota Makassar	50 Orang 0 Orang	240,000,000.0	APBD Prov		50 Orang 0 Orang	245,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	11	011	Pengawasan Mutu Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan yang di uji	Bogor BPPMSOH	80 Sampel	160,000,000.0	APBD Prov		85 Sampel	165,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	11	012	Pelayanan Kesehatan Hewan dan Klinik hewan	Jumlah hewan yang diobati/ditangani	Provinsi Kota Makassar	340 Ekor	180,000,000.0	APBD Prov		375 Ekor	200,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	11	013	Peningkatan KIE Kepada Tenaga Medis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Pertemuan Tenaga Medis dan Masyarakat yang mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Provinsi Kota Makassar	35 Orang 0	60,000,000.0	APBD Prov		40 Orang 0	65,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	11	014	Peningkatan Pelayanan Pengujian Penyakit Hewan	Jumlah Pengujian Penyakit hewan	24 Kabupaten/Kota	3600 sampel	310,000,000.0	APBD Prov		3650 sampel	370,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	11	015	Penguatan Kelembagaan UPT BK3	Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan SDM	Provinsi Kota Makassar	4 Orang	108,000,000.0	APBD Prov		4 Orang	109,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TERNAK (Prioritas)	Jumlah Populasi ternak kecil Jumlah Populasi ternak sapi perah (Prioritas) Jumlah Populasi ternak unggas Jumlah Populasi ternak kuda (Prioritas) Jumlah Populasi ternak kerbau (Prioritas) Jumlah produksi telur (Prioritas)		1828228 Ekor 1434 Ekor 141334762 Ekor 191527 Ekor 127387 Ekor 179260404 Kg	19,488,720,000.0			1920748 Ekor 1455 Ekor 155018412 Ekor 197272 Ekor 140765 Ekor 188223425 Kg	19,873,792,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Populasi sapi potong (Prioritas) Jumlah produksi daging (Prioritas) Jumlah produksi susu (Prioritas)		1404487 Ekor 140872302 Kg 3504851 Kg				1480894 Ekor 142349489 Kg 3645045 Kg		
2.00	02	02.00	13	001	Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong di Luwu Utara (Seko dan Rampi)	Jumlah Dokumen Penyusunan Amdal, Survey Identifikasi dan Desain (SID) Jumlah Kawasan Pengembangan breeding center kawasan seko dan rampi	Kabupaten Luwu Utara	0 Dokumen 2 Kawasan	600,000,000.0	APBD Prov		0 Dokumen 2 Kawasan	500,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	014	Revitalisasi Pus Keswan	Jumlah Revitalisasi Puskeswan	Kota Parepare Kab. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Kac. Bara Batu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kec. Taneterilau Kabupaten Barru Kec. Bantimurung Kabupaten Maros Kec. Belopa Kabupaten Luwu Kec. Biringkanaya Kota Makassar Kec. Bolu Kabupaten Toraja Utara Kec. Liliriaja Kabupaten Soppeng Kec. Maiwa Kabupaten Enrekang Kec. Majauleng Kabupaten Wajo Kec. Makale Kabupaten Tana Toraja Kec. Mancani Kota Palopo Kec. Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang Kec. Pajukukang Kabupaten Bantaeng Kec. Polongbangkeng Kabupaten Takalar Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Kec. Tamarunang Kabupaten Gowa Kec. Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Kec. Tomoni Kabupaten Luwu Timur Kec. Turatea Kabupaten Jeneponto	24 Unit/kab.kota	500,000,000.0	APBD Prov		24 Unit/kab.kota	500,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kec. Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang Kec.Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba							
2.00	02	02.00	13	015	Pengembangan Pos Pelayanan Peternakan Terpadu	Jumlah Pembuatan Aplikasi Pos Pelayanan Terpadu Satu Atap Pendampingan Untuk Layanan Kesehatan dan Inseminasi Buatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Pos Pelayanan Peternakan Terpadu	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jenepono Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare	0 Sistem 1 Dokumen	150,000,000.0	APBD Prov		0 Sistem 0 Dokumen	0.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	019	Analisis Supplay Demand Ternak dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak Kecil	Jumlah Peserta Pertemuan Analisis Supplay Demand dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak Kecil	24 Kab/Kota	50 Orang	250,000,000.0	APBD Prov		50 Orang	250,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	021	Analisa Supplay Demand dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak Besar	Jumlah Peserta Pertemuan Analisa Supplay Demand Ternak Besar dan Pertemuan Lalu Lintas Ternak Besar	24 Kab/Kota	48 Orang	200,000,000.0	APBD Prov		48 Orang	200,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	022	Pengembangan Inseminasi Buatan	Jumlah pengadaan Straw Semen Beku Jumlah Peserta Pertemuan Penetapan Wilayah dan Target Akseptor Jumlah Pengadaan N2cair	24 Kab/Kota	9000 Straw 50 orang 0 liter	240,000,000.0	APBD Prov		9000 Straw 50 orang 0 liter	290,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	023	Pengembangan Populasi Ternak Unggas dan Aneka Ternak	Jumlah Pengadaan Ternak Ayam Buras, Ayam Petelur dan Itik	10 kab./kota	49650 Ekor	4,445,000,000.0	APBD Prov		50310 Ekor	4,500,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare							
2.00	02	02.00	13	027	Pengembangan Populasi Ternak Kecil	Jumlah Pengadaan Ternak Kambing dan Babi Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Ternak Kecil	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare	300 Ekor 100 orang	990,000,000.0	APBD Prov		300 Ekor 100 orang	1,005,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	02.00	13	028	Peningkatan Produksi Ternak Bibit Ruminansia	Jumlah Pakan Konsentrat dan Pakan Hasil Samping Pertanian jumlah ternak sapi yang dipelihara	Kabupaten Maros	132130 Kg 181 ekor	795,000,000.0	APBD Prov		148190 Kg 203 ekor	890,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	030	Peningkatan Prasarana dan Sarana Peralatan dan Mesin Peternakan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Sarana Peralatan dan Mesin Peternakan	24 kab./kota	7 Jenis	300,000,000.0	APBD Prov		9 Jenis	350,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	031	Analisis Supplay Demand Ternak Unggas dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak Unggas dan Aneka Ternak	Jumlah Laporan Analisis Supplay Demand Bibit Ternak Unggas dan Aneka Ternak serta Jumlah Laporan Pengawasan Lalu Lintas Ternak Unggas dan Aneka Ternak	24 Kab/Kota	6 Laporan	200,000,000.0	APBD Prov		6 Laporan	250,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	033	Penguatan Kelembagaan UPT Pelayanan IB & Produksi Semen	Jumlah SDM yang mengikuti Kursus-kursus pelatihan Jumlah Peserta Bimtek Petugas Handling Semen dan ISIKHNAS IB jumlah peserta in house training Penerapan ISO 9001:2015	24 Kab/Kota Kota Makassar	11 Orang 50 Orang 0 orang	190,000,000.0	APBD Prov		11 Orang 50 Orang 0 orang	210,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	034	Pengolahan Lahan Kebun Rumput UPTD IB	Jumlah Luas Pengolahan Lahan Kebun Rumput UPTPIB-PS	24 Kab/Kota	20 Ha	230,000,000.0	APBD Prov		20 Ha	230,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	040	Peningkatan Penerapan Teknologi Embrio Transfer	Jumlah Embrio Transfer Sapi Bali	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare	15 Embrio	50,000,000.0	APBD Prov		20 Embrio	65,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	041	Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak Kecil	Jumlah Peserta Pertemuan Pengembangan Wilayah	Kabupaten Enrekang	40 Orang	50,000,000.0	APBD Prov		40 Orang	50,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Sumber Bibit Ternak Kecil	Kabupaten Jeneponto Kabupaten Maros Kabupaten Pinrang							
2.00	02	02.00	13	042	Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak Besar	Jumlah Wilayah Pengembangan Sumber Bibit Ternak Besar	Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Takalar Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo	13 Wilayah	300,000,000.0	APBD Prov		13 Wilayah	300,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	043	Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak Unggas dan Aneka Ternak	Jumlah Wilayah Pengembangan Sumber Bibit Ternak Unggas dan Aneka Ternak Jumlah Dokumen Perencanaan dan Amdal Penetapan Kawasan Sumber Bibit Ayam Buras Unggulan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Maros Kabupaten Pinrang Kabupaten Sinjai Kota Palopo	5 Wilayah 0 Dokumen	250,000,000.0	APBD Prov		5 Wilayah 0 Dokumen	255,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	045	Inventarisasi Bahan Pakan dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Dokumen Data Base Bahan Pakan dan Hijauan Pakan Ternak	6 Kab/Kota	1 Dokumen	159,720,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	175,692,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	047	Pengembangan Mutu Pakan dan Hijauan Makanan Ternak	Jumlah Produsen Pakan dan Kelompok Ternak yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Mutu Pakan jumlah Sampel Pengawasan kualitas dan keamanan pakan	24 Kab./Kota 3 Kab/Kota	6 Produsen / Kelompok Ternak 200 sampel	321,000,000.0	APBD Prov		8 Produsen / Kelompok Ternak 250 sampel	383,100,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	049	Pengembangan dan Penguatan UPT Pembibitan Ternak dan HPT	Jumlah sarana dan prasarana pada UPT-PT HPT	Kabupaten Maros	15 Unit	150,000,000.0	APBD Prov		15 Unit	200,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	050	Pemeliharaan Ternak dan Produksi Semen Beku	Jumlah Bahan Pakan Ternak	Kabupaten Maros Provinsi Kota Makassar	137335 Kg	516,000,000.0	APBD Prov		151068 Kg	520,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	052	Peningkatan Produksi Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Jumlah Produksi Bibit Rumpul dan Bibit Legum	Kabupaten Maros	2420 Stek	180,000,000.0	APBD Prov		2662 Stek	200,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	053	Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Sarana Peternakan Jumlah Dokumen Data Base PLA dan UPIA Peternakan	24 kab./kota 24 Kab./Kota	240 Paket/Unit 2 Dokumen	1,682,000,000.0	APBD Prov		250 Paket/Unit 2 Dokumen	1,600,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Luas Penanaman Hijauan Pakan Ternak	Barru, Pinrang, Maros, Tana Toraja, Soppeng, Luwu Utara Makassar	15 Hektar				15 Hektar		
						Jumlah Lokasi Tata Kelola Air		5 Lokasi				5 Lokasi		
						Jumlah kawasan pengembalaan		6 kab				6 kab		
2.00	02	02.00	13	055	Pembinaan Pengelolaan Pakan dan Formulasi Ransum	Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pembinaan, Pengelolaan Pakan dan Formulasi Ransum	24 Kab./Kota	60 Orang	50,000,000.0	APBD Prov		60 Orang	50,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	13	061	Pengendalian dan Penjaringan Betina Produktif	Jumlah Ternak Betina Produktif di RPH-R/RPU Jumlah Penyelamatan Pemotongan Betina Produktif di RPH-R/RPU	Kabupaten Bantaeng	100 Kelompok 300 Ekor	1,000,000,000.0	APBD Prov		100 Kelompok 350 Ekor	1,000,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
							Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare							
2.00	02	02.00	13	062	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung UPT Peternakan (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana UPT Peternakan	Kabupaten Maros Provinsi Kota Makassar	4 Paket	1,000,000,000.0	DAK		4 Paket	1,000,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	5,416,468,580.0			100 %	5,454,468,580.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik (Bulan)	Kota Makassar	12 Bulan	987,000,000.0	APBD Prov		12 Bulan	990,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	35 Unit 52 Unit	130,000,000.0	APBD Prov		31 Unit 49 Unit	130,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	02.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Desa Pucak Kabupaten Maros Kota Makassar Kota Makassar	110 Orang	2,414,468,580.0	APBD Prov		110 Orang	2,414,468,580.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	18 Jenis ATK	320,000,000.0	APBD Prov		21 Jenis ATK	330,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	4 Unit	15,000,000.0	APBD Prov		4 Unit	20,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamanuan makan dan minum yang tersedia	Provinsi Kota Makassar	3906 Jenis	1,230,000,000.0	APBD Prov		4100 Jenis	1,230,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Provinsi Kota Makassar	1 Pameran	100,000,000.0	APBD Prov		1 Pameran	100,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Provinsi Kota Makassar	40 Kali	220,000,000.0	APBD Prov		43 Kali	240,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	928,150,000.0			100 %	1,028,650,000.71	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	Provinsi Kota Makassar	1 Unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	80,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Provinsi Kota Makassar	6 Unit	308,150,000.0	APBD Prov		6 Unit	308,650,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara Jumlah service/perbaikan kendaraan dinas roda 4 jumlah service/perbaikan kendaraan dinas roda 2 Bahan bakar kendaraan dinas	Provinsi Kota Makassar	1 Unit 31 unit 49 unit 80 Unit	250,000,000.0	APBD Prov		1 Unit 31 unit 49 unit 80 Unit	250,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Provinsi Kota Makassar	1 Unit	100,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	100,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Provinsi Kota Makassar	1 Unit	10,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	30,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Provinsi Kota Makassar	10 Unit	100,000,000.0	APBD Prov		13 Unit	130,000,000.71	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Provinsi Kota Makassar	80 Unit	80,000,000.0	APBD Prov		85 Unit	90,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Provinsi Kota Makassar	1 Sistem Informasi/Aplikasi 12 Berita/Informasi	30,000,000.0	APBD Prov		1 Sistem Informasi/Aplikasi 12 Berita/Informasi	40,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	1,077,236,223.21			100 %	1,142,236,223.21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Provinsi Kota Makassar	72 Orang	129,736,223.21	APBD Prov		72 Orang	139,736,223.21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun dan Perubahannya jumlah dokumen Renja dan Perubahan yang disusun dan ditetapkan	Provinsi Kota Makassar	4 Dokumen 2 Dokumen	542,500,000.0	APBD Prov		4 Dokumen 2 Dokumen	592,500,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun yaitu LKPJ , LPPD dan Rentra OPD Jumlah Pejabat Struktural yang ditetapkan kinerjanya Penyusunan dokumen lakip Jumlah usulan kegiatan pada kementerian dan kelembagaan Jumlah data program prioritas nasional yang dilaporkan Jumlah peserta Sosialisasi PUG Tingkat Kab/kota		2 Dokumen 37 orang 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 0 Orang				2 Dokumen 37 orang 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 0 Orang		
2.00	02	02.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	Provinsi Kota Makassar	2 Usulan Kegiatan	100,000,000.0	APBD Prov		2 Usulan Kegiatan	100,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	Provinsi Kota Makassar	2 Laporan	100,000,000.0	APBD Prov		2 Laporan	100,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan laporan realisasi fisik dan keuangan tiap triwulan	Provinsi Kota Makassar	12 Laporan 3 Laporan	110,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan 3 Laporan	110,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun jumlah laporan monitoring program dan kegiatan OPD	Provinsi Kota Makassar	2 Laporan 4 Laporan	50,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan 4 Laporan	50,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan dan Pengawasan	Provinsi Kota Makassar	1 Laporan 2 Laporan	45,000,000.0	APBD Prov		1 Laporan 2 Laporan	50,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	437,850,000.0			100 %	442,850,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun jumlah Pendidikan dan Pelatihan aparatur	Provinsi Kota Makassar	133 Orang 1 Laporan 32 Orang	65,000,000.0	APBD Prov		133 Orang 1 Laporan 34 Orang	70,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Provinsi Kota Makassar	133 Pasang	157,550,000.0	APBD Prov		133 Pasang	157,550,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Provinsi Kota Makassar	133 Pasang	215,300,000.0	APBD Prov		133 Pasang	215,300,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	03.00			Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan				197,412,883,358.15				199,777,723,844.93	
2.00	02	03.00	01		PROGRAM HILIRISASI PERTANIAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Pertanian (Prioritas)		460835232750 Rp	94,300,000,000.0			463034340435 Rp	94,750,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	01	001	Penyediaan Benih/Bibit untuk Mendukung Peningkatan Produksi	Jumlah Benih/Bibit Padi, Jagung dan Talas Satoimo yang disalurkan	Kabupaten Kepulauan Selayar	7000000 Kg	17,000,000,000.0		opd parsial	7000000 Kg	17,000,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Benih/Bibit Padi, Jagung dan Talas Satoimo yang disalurkan Jumlah Benih/Bibit Padi, Jagung dan Talas Satoimo yang disalurkan	Kabupaten Pinrang Kabupaten Takalar	7000000 Kg 7000000 Kg				7000000 Kg 7000000 Kg		
2.00	02	03.00	01	002	Pengembangan Jaringan Irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpipaan, Irigasi Perpompaaan, Sumur Bor dan Embung Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpipaan, Irigasi Perpompaaan, Sumur Bor dan Embung Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpipaan, Irigasi Perpompaaan, Sumur Bor dan Embung		20000 Ha 20000 Ha 20000 Ha	65,000,000,000.0		opd parsial	20000 Ha 20000 Ha 20000 Ha	65,400,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	01	003	Pengadaan Alsintan Pasca Panen	Pembangunan Pabrik Gabah dan Tersedianya Mesin Pengolahan jagung Operasional Pembangunan Pabrik gabah dan Pengolahan jagung Pembangunan Pabrik Gabah dan Tersedianya Mesin Pengolahan jagung Operasional Pembangunan Pabrik gabah dan Pengolahan jagung Pembangunan Pabrik Gabah dan Tersedianya Mesin Pengolahan jagung Operasional Pembangunan Pabrik gabah dan Pengolahan jagung		2 Paket 0 Paket 2 Paket 0 Paket 2 Paket 0 Paket	11,000,000,000.0		opd parsial	0 Paket 1 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket 1 Paket	11,000,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	01	004	Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Sentra Informasi Pertanian	Jumlah Aparat yang dilatih SMIPP Jumlah Aparat yang dilatih SMIPP Jumlah Aparat yang dilatih SMIPP		50 orang 50 orang 50 orang	1,300,000,000.0		opd parsial	50 orang 50 orang 50 orang	1,350,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02		PROGRAM HILIRISASI PERKEBUNAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perkebunan (Prioritas)		6000000 Rp	780,000,000.0			7000000000 Rp	800,000,001.01	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	001	Pengadaan Alat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Kakao	Jumlah alat Pengolahan Pasca Panen yang diadakan		50 Unit	100,000,000.0		opd parsial	50 Unit	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	002	Pengadaan Alat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Kopi	Jumlah alat Pengolahan Pasca Panen yang diadakan		50 Unit	50,000,000.0		opd parsial	50 Unit	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	005	Pengadaan Alat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Cengkeh	Jumlah alat Pengolahan Pasca Panen yang diadakan		5 Unit	20,000,000.0		opd parsial	5 Unit	20,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	006	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Pasca Panen Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Peserta peningkatan kapasitas SDM bidang pasca panen pengolahan hasil perkebunan		170 Orang	50,000,000.0		opd parsial	180 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	007	Penyebarluasan Informasi Pasar dan Produk Unggulan Perkebunan	Jumlah Kabupaten yang mendapatkan informasi produk unggulan Perkebunan		16 Kabupaten	60,000,000.0		opd parsial	18 Kabupaten	70,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	03.00	02	008	Pameran/Expo Produk Olahan Hasil Perkebunan	Jumlah Pameran yang diikuti		2 Expo	50,000,000.0		opd parsial	2 Expo	50,000,001.01	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	009	Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditi Perkebunan	Jumlah Kabupaten yang dipantau dan dievaluasi harga komoditi perkebunan		24 Kabupaten	50,000,000.0		opd parsial	24 Kabupaten	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	010	Bimtek Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditi Perkebunan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi perkebunan		80 Orang	50,000,000.0		opd parsial	90 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	011	Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan		120 Orang	20,000,000.0		opd parsial	130 Orang	20,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	012	Fasilitas Pelabelan dan Kemasan Produk Olahan Perkebunan	Jumlah UKM yang di fasilitasi pebelan dan kemasan produk olahan perkebunan		10 UKM	70,000,000.0		opd parsial	13 UKM	80,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	013	Pengembangan Agrowisata	Jumlah peserta pengembangan agrowisata		10 Orang	50,000,000.0		opd parsial	10 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	014	Pembangunan Unit Layanan Pengembangan Kawasan Perkebunan	Jumlah Bangunan ULPKP		2 Unit	50,000,000.0		opd parsial	2 Unit	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	015	Pengadaan Sarana Pendukung ULPKP	Jumlah Sarana Pendukung ULPKP		2 Paket	20,000,000.0		opd parsial	2 Paket	20,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	020	Pengembangan Usaha Produk Perkebunan Unggulan	Jumlah peserta pengembangan usaha produk perkebunan unggulan		100 Orang	10,000,000.0		opd parsial	100 Orang	10,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	021	Kemitraan Usaha Pengembangan Agrowisata Perkebunan	Jumlah peserta kemitraan usaha dan agrowisata perkebunan		100 Orang	10,000,000.0		opd parsial	100 Orang	10,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	022	Pembinaan Inovasi Usaha Perkebunan	Jumlah peserta pembinaan usaha perkebunan		80 Orang	50,000,000.0		opd parsial	80 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	023	Pengawasan dan Pendampingan Teknologi Pengembangan Tanaman Kakao	Jumlah laporan pengawasan dan pendampingan teknologi kakao		5 Laporan	10,000,000.0		opd parsial	5 Laporan	10,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	024	Pengawasan dan Pendampingan Teknologi Pengembangan Tanaman Kopi	Jumlah laporan pengawasan dan pendampingan teknologi pengembangan tanaman kopi		2 Laporan	10,000,000.0		opd parsial	2 Laporan	10,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	02	025	Pengawasan dan Pendampingan Teknologi Pengembangan Tanaman Rempah	Jumlah laporan pengawasan dan pendampingan teknologi pengembangan tanaman rempah		2 Laporan	50,000,000.0		opd parsial	2 Laporan	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Jumlah produksi kedelai dan palawija Jumlah produksi padi Produktivitas padi Produktivitas jagung Produktivitas kedelai dan palawija Jumlah produksi jagung		17087 Ton 6645775 Ton 51 Kw/Ha 57 Kw/Ha 14 Kw/Ha 2688281 Ton	7,600,000,000.0			17428 Ton 6978063 Ton 51 Kw/Ha 57 Kw/Ha 14 Kw/Ha 2822695 Ton	7,625,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04	004	Peningkatan Produksi dan Pengembangan Talas Satoimo	Cakupan pengembangan talas satoimo Cakupan pengembangan talas satoimo Cakupan pengembangan talas satoimo		12 lokasi 12 lokasi 12 lokasi	300,000,000.0		opd parsial	13 lokasi 13 lokasi 13 lokasi	350,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	03.00	04	005	Peningkatan Produksi dan Pengembangan Kacang-Kacangan	Jumlah kelompok binaan dalam rangka pengembangan produksi kacang-kacangan Jumlah kelompok binaan dalam rangka pengembangan produksi kacang-kacangan Jumlah kelompok binaan dalam rangka pengembangan produksi kacang-kacangan		15 Kelompok 15 Kelompok 15 Kelompok	150,000,000.0		opd parsial	16 Kelompok 16 Kelompok 16 Kelompok	150,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04	006	Peningkatan Produksi dan Pengembangan Umbi-Umbian	Jumlah kelompok binaan pengembangan umbi-umbian Jumlah kelompok binaan pengembangan umbi-umbian Jumlah kelompok binaan pengembangan umbi-umbian		15 kelompok 15 kelompok 15 kelompok	150,000,000.0		opd parsial	16 kelompok 16 kelompok 16 kelompok	150,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04	016	Pertemuan Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pertemuan Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Pertemuan Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Pertemuan Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		2 kali 2 kali 2 kali	300,000,000.0		opd parsial	2 kali 2 kali 2 kali	300,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04	017	Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		40 orang 40 orang 40 orang	225,000,000.0		opd parsial	40 orang 40 orang 40 orang	225,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04	019	Perbanyak Benih Jagung	Luas Perbanyak Benih jagung Hibrida Luas Perbanyak Benih jagung Komposit Luas Perbanyak Benih jagung Hibrida Luas Perbanyak Benih jagung Komposit Luas Perbanyak Benih jagung Hibrida Luas Perbanyak Benih jagung Komposit		10 Ha 15 Ha 10 Ha 15 Ha 10 Ha 15 Ha	450,000,000.0		opd parsial	10 Ha 15 Ha 10 Ha 15 Ha 10 Ha 15 Ha	450,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04	020	Perbanyak Benih Kedelai	Jumlah benih sumber yang dikembangkan Jumlah benih sumber yang dikembangkan Jumlah benih sumber yang dikembangkan		600 Kg 600 Kg 600 Kg	175,000,000.0		opd parsial	650 Kg 650 Kg 650 Kg	150,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04	021	Perbanyak Benih Kacang Tanah	Jumlah benih sumber yang dikembangkan Jumlah benih sumber yang dikembangkan Jumlah benih sumber yang dikembangkan	Kabupaten Gowa Kabupaten Sinjai	530 Kg 530 Kg 530 Kg	75,000,000.0		opd parsial	540 Kg 540 Kg 540 Kg	75,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04	022	Perbanyak Benih Kacang Hijau	Luas perbanyak Benih Kacang Hijau Luas perbanyak Benih Kacang Hijau Luas perbanyak Benih Kacang Hijau		3 Ha 3 Ha 3 Ha	75,000,000.0		opd parsial	3 Ha 3 Ha 3 Ha	75,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04	025	Pengembangan SDM Kelembagaan Perbenihan	Jumlah Benih yang di Uji		350000 Kg	450,000,000.0		opd parsial	350000 Kg	450,000,000.0	Dinas Tanaman

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Tanaman Pangan	Jumlah Benih yang di Uji Jumlah Benih yang di Uji		350000 Kg 350000 Kg				350000 Kg 350000 Kg		Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04	026	Peningkatan Produksi dan Pengembangan Padi	Jumlah kelompok binaan Jumlah kelompok binaan Jumlah kelompok binaan		70 kelompok 70 kelompok 70 kelompok	1,000,000,000.0		opd parsial	80 kelompok 80 kelompok 80 kelompok	1,000,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04	027	Peningkatan Produksi dan Pengembangan Jagung dan Sereal	Jumlah kelompok binaan jagung Jumlah kelompok binaan jagung Jumlah kelompok binaan jagung		70 kelompok 70 kelompok 70 kelompok	250,000,000.0		opd parsial	80 kelompok 80 kelompok 80 kelompok	250,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04	028	Perbanyak Benih Padi	Jumlah benih sumber yang dikembangkan Jumlah benih sumber yang dikembangkan Jumlah benih sumber yang dikembangkan		2900 kg 2900 kg 2900 kg	2,000,000,000.0		opd parsial	3000 kg 3000 kg 3000 kg	2,000,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04	029	Penguatan dan Pengembangan Kelembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Jumlah IKB yang dibina Jumlah IKB yang dibina Jumlah IKB yang dibina	Provinsi Sulawesi Selatan	27 Unit 27 Unit 27 Unit	1,000,000,000.0		opd parsial	27 Unit 27 Unit 27 Unit	1,000,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	04	030	Perbanyak Benih Tanaman Pangan	Jumlah Benih Tanaman Pangan yang dikembangkan Jumlah Benih Tanaman Pangan yang dikembangkan Jumlah Benih Tanaman Pangan yang dikembangkan	Provinsi Sulawesi Selatan	5 Ton 5 Ton 5 Ton	1,000,000,000.0		opd parsial	5 Ton 5 Ton 5 Ton	1,000,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	05		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU PRODUK HORTIKULTURA	Jumlah produksi tanaman hortikultura Produktivitas tanaman hortikultura Jumlah bibit Hortikultura bersertifikat yang siap ditanam		23264 Ton 58 Kw/Ha 10000 Pohon	5,800,000,000.0			23497 Ton 58 Kw/Ha 10000 Pohon	6,200,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	05	001	Peningkatan Produksi dan Mutu serta Pengembangan Tanaman Hias	Jumlah/jenis tanaman hias yang dikembangkan Jumlah/jenis tanaman hias yang dikembangkan Jumlah/jenis tanaman hias yang dikembangkan	Provinsi Sulawesi Selatan	7 Paket 7 Paket 7 Paket	350,000,000.0		opd parsial	8 Paket 8 Paket 8 Paket	375,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	05	002	Peningkatan Produksi dan Mutu serta Pengembangan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka	Jumlah benih yang dikembangkan Jumlah benih yang dikembangkan Jumlah benih yang dikembangkan		3 Paket 3 Paket 3 Paket	350,000,000.0		opd parsial	3 Paket 3 Paket 3 Paket	375,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	05	003	Peningkatan Produksi dan Mutu serta Pengembangan Buah-Buahan	Cakupan lokasi/kelompok pembinaan Cakupan lokasi/kelompok pembinaan Cakupan lokasi/kelompok pembinaan		30 Kelompok 30 Kelompok 30 Kelompok	1,500,000,000.0		opd parsial	35 Kelompok 35 Kelompok 35 Kelompok	1,750,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	05	007	Pengembangan dan Pemeliharaan Kebun Hortikultura	Cakupan monev hortikultura Cakupan monev hortikultura Cakupan monev hortikultura		16 IKB 16 IKB 16 IKB	150,000,000.0		opd parsial	16 IKB 16 IKB 16 IKB	150,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	05	008	Perbanyak Benih dan Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura	Jenis Benih yang dikembangkan Jenis Benih yang dikembangkan		13 Jenis 13 Jenis	800,000,000.0		opd parsial	14 Jenis 14 Jenis	900,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jenis Benih yang dikembangkan		13 Jenis				14 Jenis		
2.00	02	03.00	05	009	Pertemuan Koordinasi Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura	Jumlah Peserta Pertemuan Jumlah Peserta Pertemuan Jumlah Peserta Pertemuan	Provinsi Sulawesi Selatan	130 Orang 130 Orang 130 Orang	150,000,000.0		opd parsial	140 Orang 140 Orang 140 Orang	150,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	05	010	Perbanyak Benih Hortikultura	Jenis Benih/Bibit Hortikultura yang dikembangkan Jenis Benih/Bibit Hortikultura yang dikembangkan Jenis Benih/Bibit Hortikultura yang dikembangkan	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis	1,000,000,000.0		opd parsial	10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis	1,000,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	05	011	Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Hortikultura	Jenis Benih Hortikultura yang disediakan Jenis Benih Hortikultura yang disediakan Jenis Benih Hortikultura yang disediakan		8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis	500,000,000.0		opd parsial	8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis	500,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	05	012	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura	Jumlah IKB yang dibina Jumlah IKB yang dibina Jumlah IKB yang dibina	Provinsi Sulawesi Selatan	17 Unit 17 Unit 17 Unit	1,000,000,000.0		opd parsial	17 Unit 17 Unit 17 Unit	1,000,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	06		PROGRAM PENGOLAHAN HASIL, PASCA PANEN, PENGEMBANGAN AGRIBISNIS, DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat kehilangan hasil panen Jumlah Kelompok Tani yang menjalankan usaha agribisnis		8 % 35 Poktan	1,665,000,000.0			8 % 40 Poktan	1,725,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	06	003	Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengolahan Hasil dan Pasca Panen Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengolahan Hasil dan Pasca Panen Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengolahan Hasil dan Pasca Panen		25 Kelompok 25 Kelompok 25 Kelompok	665,000,000.0		opd parsial	30 Kelompok 30 Kelompok 30 Kelompok	675,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	06	004	Penyebaran Informasi Agribisnis, Pengolahan Hasil dan Pasca Panen	Frekuensi Promosi Agribisnis Frekuensi Promosi Agribisnis Frekuensi Promosi Agribisnis	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Kali 10 Kali 10 Kali	600,000,000.0		opd parsial	10 Kali 10 Kali 10 Kali	650,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	06	005	Fasilitasi Sertifikasi Jaminan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tersusunnya Dokumen Jaminan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura Tersusunnya Dokumen Jaminan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura Tersusunnya Dokumen Jaminan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	Provinsi Sulawesi Selatan	8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen	400,000,000.0		opd parsial	8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen	400,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	07		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan iaringan irigasi Cakupan ketersediaan alat dan mesin pertanian		20000 Ha 412 Unit	51,737,985,999.50			20000 Ha 424 Unit	52,955,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	07	002	Penyediaan Bantuan dan Pengembangan Jalan Tani	Jumlah jalan tani yang dibangun Jumlah jalan tani yang dibangun Jumlah jalan tani yang dibangun		120 Paket 120 Paket 120 Paket	17,832,985,999.50		opd parsial	130 Paket 130 Paket 130 Paket	18,428,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	03.00	07	003	Penyediaan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang disalurkan Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang disalurkan Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang disalurkan		250 Unit 250 Unit 250 Unit	13,080,000,000.0		opd parsial	275 Unit 275 Unit 275 Unit	13,107,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	07	004	Penyediaan Bantuan Pupuk dan Pestisida	Jumlah Pupuk yang disalurkan Jumlah Pupuk yang disalurkan Jumlah Pupuk yang disalurkan		100 Paket 100 Paket 100 Paket	20,000,000,000.0		opd parsial	120 Paket 120 Paket 120 Paket	20,520,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	07	005	Pengelolaan Kebutuhan Lahan dan Air	Cakupan Pembinaan/monev Pengelolaan Lahan dan Air Cakupan Pembinaan/monev Pengelolaan Lahan dan Air Cakupan Pembinaan/monev Pengelolaan Lahan dan Air	Provinsi Sulawesi Selatan	20 Kelompok 20 Kelompok 20 Kelompok	275,000,000.0		opd parsial	25 Kelompok 25 Kelompok 25 Kelompok	300,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	07	006	Pengelolaan Kebutuhan Alat dan Mesin Pertanian	Cakupan Pembinaan Monev Alsin Cakupan Pembinaan Monev Alsin Cakupan Pembinaan Monev Alsin	Provinsi Sulawesi Selatan	100 kelompok 100 kelompok 100 kelompok	275,000,000.0		opd parsial	150 kelompok 150 kelompok 150 kelompok	300,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	07	007	Pengelolaan Kebutuhan Pupuk dan Pestisida	Cakupan Monev Penyaluran Pupuk dan Pestisida Cakupan Monev Penyaluran Pupuk dan Pestisida Cakupan Monev Penyaluran Pupuk dan Pestisida	Provinsi Sulawesi Selatan	60 Kelompok 60 Kelompok 60 Kelompok	275,000,000.0		opd parsial	65 Kelompok 65 Kelompok 65 Kelompok	300,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	08		PROGRAM PENYEDIAAN BENIH BERMUTU PENGENDALIAN OPT DAN STATISTIK PERTANIAN	% Penurunan serangan OPT % Penggunaan benih padi bersertifikat Cakupan ketersediaan data statistik pertanian		4.7 % 66 % 100 %	3,750,000,000.0			4.6 % 67 % 100 %	3,750,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	08	002	Sertifikasi dan Pelabelan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Cakupan Supervisi Sertifikasi Benih Cakupan Supervisi Sertifikasi Benih Cakupan Supervisi Sertifikasi Benih	Provinsi Sulawesi Selatan	20 Penangkar 20 Penangkar 20 Penangkar	300,000,000.0		opd parsial	20 Penangkar 20 Penangkar 20 Penangkar	300,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	08	003	Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Cakupan Penilaian Uji Varietas Benih Cakupan Penilaian Uji Varietas Benih Cakupan Penilaian Uji Varietas Benih	Provinsi Sulawesi Selatan	15 Penangkar 15 Penangkar 15 Penangkar	400,000,000.0		opd parsial	15 Penangkar 15 Penangkar 15 Penangkar	400,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	08	004	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Cakupan Pengawasan Peredaran Benih Cakupan Pengawasan Peredaran Benih Cakupan Pengawasan Peredaran Benih	Provinsi Sulawesi Selatan	15 Lokasi 15 Lokasi 15 Lokasi	150,000,000.0		opd parsial	15 Lokasi 15 Lokasi 15 Lokasi	150,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	08	007	Peramalan dan Pengamatan Serangan OPT dan DPI	Cakupan Peramalan dan Pengamatan Serangan OPT Cakupan Peramalan dan Pengamatan Serangan OPT	Provinsi Sulawesi Selatan	15 Lokasi 15 Lokasi	750,000,000.0		opd parsial	15 Lokasi 15 Lokasi	750,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Cakupan Peramalan dan Pengamatan Serangan OPT		15 Lokasi				15 Lokasi		
2.00	02	03.00	08	010	Gerakan Pengendalian OPT	Cakupan Pengendalian OPT Cakupan Pengendalian OPT Cakupan Pengendalian OPT	Provinsi Sulawesi Selatan	5 Unit 5 Unit 5 Unit	550,000,000.0		opd parsial	5 Unit 5 Unit 5 Unit	550,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	08	013	Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Dokumen Ketersediaan Data Statistik Jumlah Dokumen Ketersediaan Data Statistik Jumlah Dokumen Ketersediaan Data Statistik	Provinsi Sulawesi Selatan	3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	150,000,000.0		opd parsial	3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	150,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	08	014	Peramalan dan Pengamatan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Pengamatan serangan OPT dan DPI Peramalan OPT Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura setiap Musim Tanam Pengamatan serangan OPT dan DPI Peramalan OPT Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura setiap Musim Tanam Pengamatan serangan OPT dan DPI Peramalan OPT Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura setiap Musim Tanam	Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kabupaten/Kota 1 Dokumen Peramalan 24 Kabupaten/Kota 1 Dokumen Peramalan 24 Kabupaten/Kota 1 Dokumen Peramalan	750,000,000.0		opd parsial	24 Kabupaten/Kota 1 Dokumen Peramalan 24 Kabupaten/Kota 1 Dokumen Peramalan 24 Kabupaten/Kota 1 Dokumen Peramalan	750,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	08	015	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi	700,000,000.0		opd parsial	2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi	700,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	09		PROGRAM PENYULUHAN DAN PELATIHAN SDM PERTANIAN	Rasio ketersediaan penyuluh pertanian dan pelaku utama pertanian		0.5 %	2,450,000,000.0			0.5 %	2,500,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	09	001	Peningkatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Penyuluhan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Movev Program Penyuluhan Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan sinergitas program penyuluhan pertanian Jumlah Dokumen Perencanaan dan Movev Program Penyuluhan Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan sinergitas program penyuluhan pertanian Jumlah Dokumen Perencanaan dan Movev Program Penyuluhan Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan sinergitas program penyuluhan pertanian	Provinsi Sulawesi Selatan	3 Dokumen 50 orang 3 Dokumen 50 orang 3 Dokumen 50 orang	175,000,000.0		opd parsial	3 Dokumen 50 orang 3 Dokumen 50 orang 3 Dokumen 50 orang	175,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	03.00	09	003	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	Jumlah Dokumen Programa Penyuluhan Pertanian Jumlah Dokumen Programa Penyuluhan Pertanian Jumlah Dokumen Programa Penyuluhan Pertanian	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	50,000,000.0		opd parsial	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	09	005	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani	Provinsi Sulawesi Selatan	5 Unit 5 Unit 5 Unit	125,000,000.0		opd parsial	5 Unit 5 Unit 5 Unit	125,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	09	013	Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Orang 100 Orang 100 Orang	375,000,000.0		opd parsial	100 Orang 100 Orang 100 Orang	400,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	09	015	Pemberdayaan BPP melalui Adopsi Teknologi	Jumlah BPP lokasi diseminasi paket teknologi Jumlah BPP lokasi diseminasi paket teknologi Jumlah BPP lokasi diseminasi paket teknologi	Provinsi Sulawesi Selatan	10 BPP 10 BPP 10 BPP	150,000,000.0		opd parsial	10 BPP 10 BPP 10 BPP	150,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	09	016	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Pertanian	Jumlah Penyuluh yang terlatih dalam pengembangan TPH Jumlah kategori yang diikuti pada Penerima Penghargaan Penyuluhan Pertanian Dokumen Data base ketenagaan SDM Pertanian Jumlah Penyuluh yang memperoleh pembinaan karier Jumlah Penyuluh yang terlatih dalam pengembangan TPH Jumlah kategori yang diikuti pada Penerima Penghargaan Penyuluhan Pertanian Dokumen Data base ketenagaan SDM Pertanian Jumlah Penyuluh yang memperoleh pembinaan karier Jumlah Penyuluh yang terlatih dalam pengembangan TPH Jumlah kategori yang diikuti pada Penerima Penghargaan Penyuluhan Pertanian	Provinsi Sulawesi Selatan	40 orang 3 kategori 1 dokumen 50 orang 40 orang 3 kategori 1 dokumen 50 orang 40 orang 3 kategori	775,000,000.0		opd parsial	40 orang 3 kategori 1 dokumen 50 orang 40 orang 3 kategori 1 dokumen 50 orang 40 orang 3 kategori	800,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Dokumen Data base ketenagaan SDM Pertanian Jumlah Penyuluh yang memperoleh pembinaan karier		1 dokumen 50 orang				1 dokumen 50 orang		
2.00	02	03.00	09	017	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang diadvokasi dan diseminasi paket teknologi Jumlah Pelaku Utama, Gap /KEP yang berprestasi Jumlah peserta sarasehan KTNA, Tudang Sipulung, PEDANA dan PENAS Jumlah Kelembagaan Petani yang dibina Jumlah materi penyuluhan pertanian yang disusun pada cyber extension Jumlah BPP yang diadvokasi dan diseminasi paket teknologi Jumlah Pelaku Utama, Gap /KEP yang berprestasi Jumlah peserta sarasehan KTNA, Tudang Sipulung, PEDANA dan PENAS Jumlah Kelembagaan Petani yang dibina Jumlah materi penyuluhan pertanian yang disusun pada cyber extension Jumlah BPP yang diadvokasi dan diseminasi paket teknologi Jumlah Pelaku Utama, Gap /KEP yang berprestasi Jumlah peserta sarasehan KTNA, Tudang Sipulung, PEDANA dan PENAS Jumlah Kelembagaan Petani yang dibina Jumlah materi penyuluhan pertanian yang disusun pada cyber extension	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Unit 5 Orang 50 Orang 10 Unit 15 Materi 10 Unit 5 Orang 50 Orang 10 Unit 15 Materi 10 Unit 5 Orang 50 Orang 10 Unit 15 Materi	800,000,000.0		opd parsial	10 Unit 5 Orang 50 Orang 15 Unit 20 Materi 10 Unit 5 Orang 50 Orang 15 Unit 20 Materi 10 Unit 5 Orang 50 Orang 15 Unit 20 Materi	800,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	10		PROGRAM FASILITASI PRASARANA DAN SARANA BERBANTUAN	Jumlah proyek bantuan WISMP dan LOAN untuk sektor pertanian		3 Proyek	7,187,588,000.0			3 Proyek	7,051,974,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	10	001	Pembangunan, Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian	Provinsi Sulawesi Selatan	5 Unit 5 Unit 5 Unit	3,170,574,000.0		opd parsial	5 Unit 5 Unit 5 Unit	3,034,974,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	10	002	Peningkatan Produktivitas Pertanian Beririgasi Melalui Program IPDMIP	Kontrak dengan Petani Penangkar Benih Dukungan Balai Benih Tanaman Pangan tentang Perbenihan	Provinsi Sulawesi Selatan	23 Penangkar 1 Proposal	1,200,000,000.0		opd parsial	23 Penangkar 1 Proposal	1,200,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu F-3 Peralatan Sertifikasi Benih Padi Fasilitasi Proses Sertifikasi Benih Padi Pelatihan Dasar Fasilitasi Rantai Nilai Kontrak dengan Petani Penangkar Benih Dukungan Balai Benih Tanaman Pangan tentang Perbenihan Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu F-3 Peralatan Sertifikasi Benih Padi Fasilitasi Proses Sertifikasi Benih Padi Pelatihan Dasar Fasilitasi Rantai Nilai Kontrak dengan Petani Penangkar Benih Dukungan Balai Benih Tanaman Pangan tentang Perbenihan Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu F-3 Peralatan Sertifikasi Benih Padi Fasilitasi Proses Sertifikasi Benih Padi Pelatihan Dasar Fasilitasi Rantai Nilai Kontrak dengan Petani Penangkar Benih Dukungan Balai Benih Tanaman Pangan tentang Perbenihan Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu F-3 Peralatan Sertifikasi Benih Padi Fasilitasi Proses Sertifikasi Benih Padi Pelatihan Dasar Fasilitasi Rantai Nilai		107982 Kg 1 Paket 1 Paket 50 Orang 23 Penangkar 1 Proposal 107982 Kg 1 Paket 1 Paket 50 Orang 23 Penangkar 1 Proposal 107982 Kg 1 Paket 1 Paket 50 Orang				107982 Kg 1 Paket 1 Paket 50 Orang 23 Penangkar 1 Proposal 107982 Kg 1 Paket 1 Paket 50 Orang		
2.00	02	03.00	10	003	Perluasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian Melalui Proyek READ-SI (PHLN)	Jumlah Peserta penyegaran penyuluh pertanian Jumlah Dukungan operasional manajemen pengelolaan READSI Jumlah Peserta penyegaran penyuluh pertanian Jumlah Dukungan operasional manajemen pengelolaan READSI Jumlah Peserta penyegaran penyuluh pertanian Jumlah Dukungan operasional manajemen pengelolaan READSI	Provinsi Sulawesi Selatan	180 Orang 1 Paket 180 Orang 1 Paket 180 Orang 1 Paket	1,392,014,000.0		opd parsial	180 Orang 1 Paket 180 Orang 1 Paket 180 Orang 1 Paket	1,392,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	10	004	Modernisasi dan Rehabilitasi Sistem Irigasi Strategis dan Mendesak (SIMURP)	Jumlah Peserta penyegaran penyuluh pertanian Jumlah Dukungan operasional manajemen pengelolaan SIMURP Jumlah Peserta penyegaran penyuluh pertanian Jumlah Dukungan operasional manajemen pengelolaan SIMURP Jumlah Peserta penyegaran penyuluh pertanian Jumlah Dukungan operasional manajemen pengelolaan SIMURP	Provinsi Sulawesi Selatan	120 Orang 1 Paket 120 Orang 1 Paket 120 Orang 1 Paket	750,000,000.0		opd parsial	120 Orang 1 Paket 120 Orang 1 Paket 120 Orang 1 Paket	750,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	03.00	10	005	Pelayanan Kewirausahaan dan Dukungan Ketenagakerjaan Muda (YESS Programme)	Jumlah Dukungan operasional manajemen pengelolaan YESS Programme Jumlah Peserta penyegaran penyuluh pertanian Jumlah Dukungan operasional manajemen pengelolaan YESS Programme Jumlah Peserta penyegaran penyuluh pertanian Jumlah Dukungan operasional manajemen pengelolaan YESS Programme Jumlah Peserta penyegaran penyuluh pertanian	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Paket 60 orang 1 Paket 60 orang 1 Paket 60 orang	675,000,000.0		opd parsial	1 Paket 60 orang 1 Paket 60 orang 1 Paket 60 orang	675,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN	Produktivitas Komoditi Kelapa Sawit Produktivitas Komoditi Tembakau (Nikotin rendah) Produktivitas Komoditi Tebu (Gula) Produktivitas Komoditi Kelapa (Kopra) Produktivitas Komoditi Cengkeh (Biji Kering) Produktivitas Komoditi Kopi Produktivitas Komoditi Kakao Nilai Produksi Komoditi Kelapa Sawit Nilai Produksi Komoditi Kopi Nilai Produksi Komoditi Tebu (Gula) Nilai Produksi Komoditi Kelapa (Kopra) Nilai Produksi Komoditi Cengkeh (Biji Kering) Nilai Produksi Komoditi Jambu Mete Nilai Produksi Komoditi Pala Nilai Produksi Komoditi Lada Nilai Produksi Komoditi Kakao Volume Produksi Komoditi Kelapa Sawit Volume Produksi Komoditi Kopi Volume Produksi Komoditi Tebu (Gula) Produktivitas Komoditi Pala Produktivitas Komoditi Lada Volume Produksi Komoditi Kelapa (Kopra)		4369 Kg/Ha 1061 Kg/Ha 1204 Kg/Ha 694 Kg/Ha 545 Kg/Ha 590 Kg/Ha 788 Kg/Ha 2275850000 Triliun 2189655000 Triliun 83150000 Triliun 785925000 Triliun 2874750000 Triliun 486675000 Triliun 28800000 Triliun 1373000000 Triliun 7598745000 Triliun 91034 Ton 33687 Ton 3326 Ton 131 Kg/Ha 763 Kg/Ha 52395 Ton		3,302,898,513.75		4387 Kg/Ha 1104 Kg/Ha 1252 Kg/Ha 712 Kg/Ha 558 Kg/Ha 592 Kg/Ha 891 Kg/Ha 2284950000 Triliun 2452380000 Triliun 103770000 Triliun 1342600000 Triliun 3044820000 Triliun 578440000 Triliun 35000000 Triliun 1759000000 Triliun 9540650000 Triliun 91398 Ton 35034 Ton 3459 Ton 136 Kg/Ha 782 Kg/Ha 53704 Ton	2,663,063,218.92	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Volume Produksi Komoditi Lada Volume Produksi Komoditi Kakao Volume Produksi Komoditi Pala Volume Produksi Komoditi jambu Mete Volume Produksi Komoditi Cengkeh (Biji Kering) Produktivitas Komoditi Jambu Mete		6865 Ton 168861 Ton 192 Ton 13905 Ton 19165 Ton 424 Kg/Ha				7036 Ton 190813 Ton 200 Ton 144610 Ton 19644 Ton 441 Kg/Ha		
2.00	02	03.00	16	001	Intensifikasi Tanaman Kakao	Luas areal tanaman kakao yang diintensifikasi	Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara	500 Ha	1,000,000,000.0		opd parsial	500 Ha	206,540,328.92	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	002	Intensifikasi Tanaman Kopi	Luas areal tanaman kopi yang diintensifikasi	Kabupaten Enrekang Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara	500 Ha	100,000,000.0		opd parsial	500 Ha	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	003	Intensifikasi Tanaman Kelapa	Luas areal tanaman kelapa yang diintensifikasi	Kabupaten Barru Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Takalar	380 Ha	20,000,000.0		opd parsial	380 Ha	20,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	004	Intensifikasi Tanaman Kelapa Sawit	Luas areal tanaman kelapa sawit yang di intensifikasi	Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kota Palopo	100 Ha	10,000,000.0		opd parsial	100 Ha	10,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	005	Intensifikasi Tanaman Cengkeh	Luas areal tanaman cengkeh yang di intensifikasi		100 Ha	35,000,000.0		opd parsial	100 Ha	40,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	006	Intensifikasi Tanaman Pala	Luas areal tanaman pala yang di intensifikasi		200 Ha	48,400,000.0		opd parsial	200 Ha	53,240,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	007	Intensifikasi Tanaman Lada	Luas areal tanaman lada yang di intensifikasi		200 Ha	56,870,000.0		opd parsial	200 Ha	62,557,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	008	Intensifikasi Tanaman Jambu Mete	Luas areal tanaman jambu mete yang di intensifikasi		100 Ha	200,000,000.0		opd parsial	100 Ha	250,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	009	Rehabilitasi Tanaman Cengkeh	Luas lahan rehabilitasi tanaman cengkeh		100 Ha	20,000,000.0		opd parsial	100 Ha	20,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	010	Rehabilitasi Tanaman Lada	Luas lahan rehabilitasi tanaman lada		35 Ha	20,000,000.0		opd parsial	35 Ha	200,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	011	Peremajaan Tanaman Pala	Luas lahan peremajaan tanaman pala		50 Ha	20,000,000.0		opd parsial	50 Ha	20,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	012	Peremajaan Tanaman Cengkeh	Luas lahan peremajaan tanaman cengkeh		100 Ha	48,400,000.0		opd parsial	100 Ha	53,239,990.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	013	Identifikasi dan Inventarisasi OPT	Jumlah Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang di identifikasi dan di inventarisasi		15 OPT	20,000,000.0		opd parsial	17 OPT	25,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	014	Pengendalian OPT Tanaman Lada	Luas lahan yang terkendali		6 Ha	20,000,000.0		opd parsial	7 Ha	25,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	03.00	16	015	Pengendalian OPT Tanaman Kopi	Luas lahan yang terkendali OPT tanaman kopi		7 Ha	38,115,000.0		opd parsial	8 Ha	41,926,500.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	016	Pengendalian OPT Tanaman Kakao	Luas lahan tanaman kakao yang terkendali OPT		7 Ha	142,350,000.0		opd parsial	8 Ha	46,585,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	017	Pengendalian OPT Tanaman Cengkeh	Luas lahan yang terkendali OPT tanaman cengkeh		7 Ha	39,204,000.0		opd parsial	8 Ha	43,124,400.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	020	Sertifikasi Benih Perkebunan	Jumlah sertifikat benih perkebunan		500 Sertifikat	20,000,000.0		opd parsial	500 Sertifikat	25,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	021	Demplot Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Jumlah demplot konservasi air dan antisipasi anomali iklim		5 Unit	10,000,000.0		opd parsial	6 Unit	10,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	022	Demfarm Integrasi Ternak Sapi dengan Tanaman Jambu Mete	Jumlah kabupaten yang mendapatkan demplot		2 Kabupaten	20,000,000.0		opd parsial	2 Kabupaten	25,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	023	Pengendalian Hama Terpadu PBK pada Tanaman Kakao	Jumlah luas lahan terkendali OPT tanaman kakao		7 Ha	123,500,000.0		opd parsial	8 Ha	165,850,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	024	Pengadaan Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah bibit yang disalurkan		10000 Pohon	300,000,000.0		opd parsial	5714 Pohon	200,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	025	Pengadaan Pupuk NPK	Jumlah pupuk NPK yang disalurkan		65000 Kg	250,000,000.0		opd parsial	70000 Kg	270,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	026	Pengadaan Pupuk Organik	Jumlah pupuk organik cair yang disalurkan Jumlah pupuk organik yang disalurkan		0 Ltr 10000 Kg	200,000,000.0		opd parsial	0 Ltr 10000 Kg	200,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	027	Pengadaan Pupuk dan Pestisida (UPT-PSBP2)	Jumlah hektar kebun dinas yang mendapatkan pupuk dan pestisida		361 Ha	291,059,513.75		opd parsial	361 Ha	300,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	028	Pemeliharaan Tanaman Sumber Benih dan Produksi	Jumlah hektar tanaman sumber benih dan produksi yang terpelihara		361 Ha	50,000,000.0		opd parsial	361 Ha	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	029	Pembangunan Kebun Produksi Tanaman Perkebunan	Luas areal pembangunan kebun tanaman perkebunan		20 Ha	100,000,000.0		opd parsial	20 Ha	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	16	030	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau	Jumlah Luas Lahan Jumlah Peserta Pelatihan		45 Ha 0 Org	100,000,000.0		opd parsial	50 Ha 0 Org	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PERKEBUNAN	% Peningkatan jumlah hasil panen tanaman perkebunan Cakupan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam produksi tanaman perkebunan		100 % 6 Jenis	12,541,455,358.0			100 % 7 Jenis	13,562,671,625.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	001	Pengembangan Kemitraan Managemen Petani dengan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Jumlah peserta pengembangan kemitraan managemen petani dengan Lembaga Ekonomi Masyarakat		120 Orang	50,000,000.0		opd parsial	130 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	002	Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan	Jumlah kabupaten yang diawasi peredaran benih perkebunannya		22 Kab/Kota	10,000,000.0		opd parsial	22 Kab/Kota	10,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	003	Demfarm Penggunaan Kapur dan Pupuk Tanaman Kakao	Kabupaten yang di Demfarm penggunaan kapur dan pupuk tanaman kakao		2 Kab	10,000,000.0		opd parsial	2 Kab	10,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	004	Peningkatan SDM Petugas dan Petani Perkebunan dalam Mengelola Bibit dan Pemeliharaan Tanaman	Jumlah peserta Peningkatan SDM Petugas dan Petani Perkebunan dalam Mengelola Bibit dan Pemeliharaan Tanaman		35 Orang	10,000,000.0		opd parsial	40 Orang	1,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	03.00	18	005	Sosialisasi Gangguan Usaha Perkebunan dan Kebakaran Lahan	Jumlah peserta Sosialisasi Gangguan Usaha Perkebunan dan Kebakaran Lahan		300 Orang	100,000,000.0		opd parsial	350 Orang	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	006	Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Kebakaran Lahan	Jumlah peserta penanganan gangguan usaha perkebunan dan kebakaran lahan		100 Orang/Kab	10,000,000.0		opd parsial	100 Orang/Kab	10,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	007	Sosialisasi Kebijakan Teknis Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (GUKP)	Jumlah peserta gangguan usaha dan konflik perkebunan		50 Orang	10,000,000.0		opd parsial	50 Orang	10,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	008	Analisis Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon	Jumlah peserta analisis penerapan model perkebunan rendah emisi karbon		4 Kelompok	70,000,000.0		opd parsial	5 Kelompok	80,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	009	Pengadaan Mesin Pompa Air (Bidang Penyuluhan, Kelembagaan dan Sarana Prasarana)	Jumlah pompa air yang tersedia		30 Unit	50,000,000.0		opd parsial	33 Unit	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	010	Pengadaan Mesin Traktor	Jumlah traktor		3 Unit	286,607,857.0		opd parsial	3 Unit	35,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	011	Monitoring dan evaluasi gangguan usaha dan kebakaran lahan	Jumlah kabupaten yang dimonitoring dan evaluasi		11 kabupaten	100,000,000.0		opd parsial	12 kabupaten	120,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	012	Monitoring dan Evaluasi Agrowisata	Jumlah kabupaten yang di Monitoring dan Evaluasi		20 Laporan	60,000,000.0		opd parsial	20 Laporan	65,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	013	Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan Dalam Rangka Pameran dan Kebutuhan Lain Dinas	jumlah benih tanaman perkebunan yang disiapkan		30 batang	25,000,000.0		opd parsial	35 batang	30,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	014	Orientasi Agronomis Lada	Jumlah peserta orientasi agronomis lada		50 Orang	50,000,000.0		opd parsial	50 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	015	Pengadaan Pompa Air (UPT-PSBP2)	Jumlah Pompa Air yang diadakan (Alsintan)		24 Unit	50,000,000.0		opd parsial	24 Unit	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	016	Pengadaan Jembatan Jalan Produksi Kebun Sumber Benih & Produksi	Jumlah jembatan jalan produksi yang tersedia		1 Unit	139,150,000.0		opd parsial	1 Unit	0.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	017	Monev Kegiatan Lapangan dan Realisasi PAD	Jumlah kabupaten yang di monitoring		50 laporan	121,000,000.0		opd parsial	50 laporan	133,100,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	018	Peningkatan Kemampuan PBT dan Petugas Tehnis	jumlah petugas PBT dan petugas tehnis		5 orang	50,000,000.0		opd parsial	5 orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	020	Pengadaan Mesin Cultivator	Jumlah Cultivator		15 Unit	100,000,000.0		opd parsial	15 Unit	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	021	Peningkatan SDM Petugas Brigade Proteksi	jumlah petugas brigade proteksi		20 orang	50,000,000.0		opd parsial	20 orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	022	Sosialisasi Pemasaran Benih	jumlah peserta sosialisasi pemasaran benih		50 orang	50,000,000.0		opd parsial	50 orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	023	Penguatan Data Base Kelembagaan Petani Perkebunan	Jumlah peserta pengawasan data base kelembagaan petani perkebunan		50 Orang	100,000,000.0		opd parsial	50 Orang	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	024	Bimtek Agroteknologi Tanaman Jambu Mete Yang Berkelanjutan	Jumlah peserta bimtek agroteknologi budidaya tanaman jambu mete		100 Orang	50,000,000.0		opd parsial	125 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	025	Bimtek Intensifikasi Tanaman jambu mete	Jumlah peserta bimbingan teknis intensifikasi tanaman jambu mete		100 Orang	50,000,000.0		opd parsial	125 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	027	Bimtek Intensifikasi Tanaman tebu	Jumlah peserta bimbingan teknis intensifikasi tanaman tebu		200 Orang	60,000,000.0		opd parsial	200 Orang	70,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	028	Bimtek Intensifikasi Tanaman Kakao	Jumlah peserta bimbingan teknis tanaman kakao		240 Orang	50,000,000.0		opd parsial	260 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	03.00	18	030	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (UPT- PSBP2)	jumlah perjalanan dinas		15 kali/orang	70,000,000.0		opd parsial	15 kali/orang	80,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	031	Penguatan Data Base Kelembagaan Petani Perkebunan	Jumlah data base kelembagaan petani perkebunan		20 Data	50,000,000.0		opd parsial	20 Data	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	032	Pelatihan Managemen Kemitraan Usaha	Jumlah peserta pelatihan managemen kemitraan usaha		100 Orang	35,000,000.0		opd parsial	100 Orang	40,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	033	Orientasi Agronomis Cengkeh	Jumlah peserta orientasi cengkeh		50 Orang	50,000,000.0		opd parsial	50 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	034	Rapat Koordinasi Tim/Kelompok Peduli Api	Jumlah peserta rapat koordinasi tim/kelompok peduli api		50 Orang	30,000,000.0		opd parsial	50 Orang	35,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	035	Bimtek Intensifikasi Tanaman Kopi	Jumlah peserta bimbingan teknis intensifikasi tanaman kopi		240 Orang	64,500,000.0		opd parsial	260 Orang	70,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	036	Bimtek Budidaya Tanaman Kemiri Yang Berkelanjutan	Jumlah peserta bimbingan teknis budidaya tanaman kemiri yang berkelanjutan		125 Orang	70,000,000.0		opd parsial	150 Orang	80,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	037	Peningkatan Kapasitas SDM Kebun Sumber Benih	jumlah peserta SDM kebun sumber benih		30 orang	60,000,000.0		opd parsial	30 orang	70,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	038	Pengadaan Pompa Air dan Instalasinya	Jumlah pompa air dan instalasinya pada kebun dinas		5 Unit	66,125,000.0		opd parsial	5 Unit	76,043,750.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	039	Bimtek Budidaya Tanaman Kelapa Yang Berkelanjutan	jumlah peserta budidaya tanaman aren yang berkelanjutan		50 Orang	50,000,000.0		opd parsial	55 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	040	Bimtek Intensifikasi Tanaman kelapa sawit	Jumlah peserta bimbingan teknis intensifikasi tanaman kelapa sawit		200 Orang	50,000,000.0		opd parsial	200 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	041	Bimtek Intensifikasi Tanaman Lada	Jumlah peserta bimbingan teknis tanaman lada		200 Orang	60,000,000.0		opd parsial	200 Orang	70,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	043	Bimtek Budidaya Tembakau	Jumlah peserta bimbingan teknis budidaya tembakau		400 Orang	10,000,000.0		opd parsial	400 Orang	10,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	044	Pertemuan Petugas Pengelola Kebun	jumlah peserta pertemuan petugas pengelola kebun		25 orang	60,500,000.0		opd parsial	25 orang	66,550,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	047	Peningkatan Kapasitas Petugas UPPT Tanaman Perkebunan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas petugas UPPT tanaman perkebunan		50 Orang	100,000,000.0		opd parsial	50 Orang	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	048	Bimtek Intensifikasi Tanaman Pala	Jumlah peserta bimbingan teknis tanaman pala		200 Orang	1,100,500,001.0		opd parsial	200 Orang	170,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	049	Bimtek Agronomis Cengkeh Bagi Petani	Jumlah peserta bimbingan teknis agronomis cengkeh bagi petani		400 Orang	50,000,000.0		opd parsial	400 Orang	199,300,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	050	Pembinaan dan Monev Pengembangan Sumber Benih dan Produksi	Jumlah kabupaten yang dimonitoring dan evaluasi		20 laporan	50,000,000.0		opd parsial	20 laporan	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	051	Bimtek Agronomis Lada Bagi Petani	Jumlah peserta bimbingan teknis ogonomis lada bagi petani		400 orang	50,000,000.0		opd parsial	400 orang	199,300,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	052	Pembinaan Pencegahan Kebakaran Lahan	jumlah kabupaten yang mendapat pembinaan		2 kabupaten	132,250,000.0		opd parsial	2 kabupaten	152,087,500.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	053	Pengadaan Alat dan Mesin Tebu	jumlah alat dan mesin tebu (pompa air)		10 unit	50,000,000.0		opd parsial	10 unit	250,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	054	Pengadaan Pupuk dan Pestisida (UPT-PSBP2)	Jumlah hektar kebun dinas yang mendapatkan pupuk dan pestisida		361 Ha	661,250,000.0		opd parsial	361 Ha	760,437,500.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	055	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tanaman Penyegar	Jumlah kabupaten yang dimonitoring dan evaluasi		1 laporan	66,125,000.0		opd parsial	1 laporan	76,043,750.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	03.00	18	056	Bimtek Agronomis Pala	Jumlah peserta bimbingan teknis agronomis pala		400 Orang	363,000,000.0		opd parsial	400 Orang	399,300,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	057	Bimtek Konservasi Lahan	Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi lahan		700 Orang	700,000,000.0		opd parsial	700 Orang	700,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	058	Bimtek Promosi dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah peserta bimbingan teknis promosi dan pemasaran hasil perkebunan		50 Orang	200,000,000.0		opd parsial	50 Orang	200,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	059	Pengadaan Alat Pertanian Kecil (UPT-PSBP2)	Jumlah alat pertanian kecil		10 Unit	66,125,000.0		opd parsial	10 Unit	76,043,750.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	060	Sosialisasi Peraturan Perbenihan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perbenihan		100 Orang	396,750,000.0		opd parsial	100 Orang	456,262,500.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	061	Bimtek Budidaya Tanaman Aren Yang Berkelanjutan	Jumlah peserta bimbingan teknis budidaya tanaman aren yang berkelanjutan		100 Orang	200,000,000.0		opd parsial	125 Orang	225,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	062	Sosialisasi Bantuan Hibah Perkebunan	Jumlah kabupaten sosialisasi bantuan hibah perkebunan		13 Kabupaten	240,000,000.0		opd parsial	13 Kabupaten	250,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	063	Pengadaan Kontruksi Pagar Kebun Sumber Benih dan Produksi	Panjang kontruksi pagar		1000 meter	500,000,000.0		opd parsial	1000 meter	500,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	064	Sosialisasi Perbenihan Tanaman Perkebunan	Jumlah kabupaten sosialisasi perbenihan tanaman perkebunan		13 Kabupaten	240,000,000.0		opd parsial	13 Kabupaten	250,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	065	Bimtek Integrasi Tanaman Rempah dengan Ternak	Jumlah peserta bimbingan teknis integrasi tanaman rempah dengan ternak		200 Orang	198,375,000.0		opd parsial	200 Orang	228,131,250.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	066	Sosialisasi Penataan dan Pelestarian Lahan	Jumlah peserta sosialisasi penataan dan pelestarian lahan		300 Orang	175,000,000.0		opd parsial	300 Orang	175,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	067	Pembinaan Pencegahan Kebakaran Lahan	Jumlah peserta pembinaan pencegahan kebakaran lahan		200 Orang	250,000,000.0		opd parsial	200 Orang	300,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	070	Pelatihan Managemen Kemitraan Usaha	Jumlah peserta pelatihan managemen kemitraan usaha		100 orang	20,000,000.0		opd parsial	200 orang	20,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	071	Adopsi Agroteknologi Budidaya Tanaman Sagu yang Berkelanjutan	Jumlah peserta adoptasi agroteknologi budidaya tanaman sagu yang berkelanjutan		35 Orang	10,000,000.0		opd parsial	40 Orang	10,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	072	Orientasi Pencegahan Kebakaran Lahan Luar Provinsi	Jumlah peserta pembinaan kebakaran lahan		30 Orang	50,000,000.0		opd parsial	35 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	073	Bimtek Intensifikasi Tanaman Cengkeh	Jumlah peserta intensifikasi tanaman cengkeh		200 Orang	26,000,000.0		opd parsial	200 Orang	27,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	074	Bimtek Peningkatan Produksi Tanaman Kakao Berbasis Bioteknologi	Jumlah peserta bimtek peningkatan produksi tanaman kakao berbasis bioteknologi		240 Orang	26,450,000.0		opd parsial	260 Orang	30,417,500.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	075	Workshop Pengembangan Usaha Agrowisata Perkebunan	Jumlah peserta workshop pengembangan usaha agrowisata perkebunan		50 Orang	26,000,000.0		opd parsial	50 Orang	26,500,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	076	Bimtek Intensifikasi Tanaman kelapa	Jumlah peserta bimbingan teknis intensifikasi tanaman kelapa		200 Orang	26,000,000.0		opd parsial	200 Orang	27,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	077	Pelatihan SDM di Bidang Agrowisata Bagi Aparat Kab/Kota	Jumlah peserta pelatihan SDM di bidang agrowisata		100 Orang	24,000,000.0		opd parsial	100 Orang	24,500,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	078	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani	Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan petani		200 Orang	10,000,000.0		opd parsial	200 Orang	10,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	079	Orientasi Peningkatan Kapasitas Penangkar	Jumlah peserta peningkatan kapasitas penangkar		50 Orang	42,350,000.0		opd parsial	50 Orang	46,585,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	03.00	18	080	Orientasi Petugas dan Petani Ke Sumber Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah peserta orientasi petugas dan petani ke sumber bahan tanaman perkebunan		20 Orang	25,000,000.0		opd parsial	20 Orang	27,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	081	Sosialisasi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Jumlah peserta sosialisasi adaptasi dampak perubahan iklim		300 Orang	15,000,000.0		opd parsial	300 Orang	15,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	082	Orientasi Konservasi pada Lahan Kering	Jumlah peserta orientasi konservasi pada lahan kering		40 orang	25,000,000.0		opd parsial	40 orang	25,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	083	Orientasi Konservasi di Kawasan Lahan Miring	Jumlah peserta orientasi konservasi di kawasan lahan miring		40 Orang	25,000,000.0		opd parsial	40 Orang	25,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	084	Orientasi Pengembangan Agrowisata Bagi Aparat Kab/Kota	Jumlah peserta orientasi pengembangan agrowisata		50 Orang	15,000,000.0		opd parsial	50 Orang	20,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	085	Peningkatan Kapasitas Petugas UPPT Tanaman Perkebunan	Jumlah petugas UPPT tanaman perkebunan yang dilatih		50 Orang	27,500,000.0		opd parsial	50 Orang	28,500,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	086	Pembinaan Kelembagaan Penangkar Benih Perkebunan	Jumlah peserta pembinaan kelembagaan penangkar benih perkebunan		100 Orang	33,062,500.0		opd parsial	100 Orang	38,021,875.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	087	Pembinaan Pencegahan Kebakaran Lahan	Jumlah peserta pembinaan pencegahan kebakaran lahan		250 Orang	25,000,000.0		opd parsial	300 Orang	30,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	088	Pembinaan Penangkar/Produsen Benih	Jumlah Kabupaten yang dibina		22 Kab/Kota	242,000,000.0		opd parsial	22 Kab/Kota	266,200,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	089	Pembinaan, Pengawasan dan Monev Pembangunan Kebun Induk	Jumlah kabupaten yang dibina, monev		12 Kabupaten/Kota	300,000,000.0		opd parsial	12 Kabupaten/Kota	350,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	090	Pembinaan, Pengawasan dan Monev Bantuan Hibah Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah kabupaten yang dibina, monev		22 Kabupaten	150,000,000.0		opd parsial	22 Kabupaten	200,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	091	Pembinaan, Pemantapan dan Monev Bantuan Hibah Mesin Pompa Air	Jumlah kabupaten yang dimonev		12 Kabupaten	90,000,000.0		opd parsial	12 Kabupaten	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	092	Pembinaan, Pemantapan dan Monev Bantuan Hibah Pupuk	Jumlah kabupaten yang dimonev		12 Kabupaten	200,000,000.0		opd parsial	12 Kabupaten	250,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	093	Koordinasi Ke Sumber Pengendalian OPT	Jumlah peserta koordinasi ke sumber pengendalian OPT		12 Orang	67,760,000.0		opd parsial	14 Orang	74,536,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	094	Penguatan Kelembagaan UPT BSMBP	Penataan Usaha UPT BSMBP		1 Kegiatan	181,500,000.0		opd parsial	1 Kegiatan	199,650,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	095	Inventarisasi Data Bantuan Hibah Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah kabupaten yang diinventarisasi bantuan hibah bibit komoditi unggulan perkebunan		13 Kabupaten	100,000,000.0		opd parsial	13 Kabupaten	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	096	Koordinasi ke Sumber Bahan Tanaman Pembangunan Kebun Induk	Jumlah petugas ke sumber bahan tanaman pembangunan kebun induk		20 Orang	85,000,000.0		opd parsial	20 Orang	85,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	097	Inventarisasi Data Bantuan Hibah Pupuk	Jumlah kabupaten yang diinventarisasi data bantuan hibah pupuk		10 Kabupaten	120,000,000.0		opd parsial	10 Kabupaten	120,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	098	Persiapan dan Pembentukan Kemitraan Usaha	Jumlah peserta persiapan dan pembentukan kemitraan usaha		100 Orang	350,000,000.0		opd parsial	200 Orang	400,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	099	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani	Jumlah peserta pelatihan kelembagaan petani		200 Orang	50,000,000.0		opd parsial	200 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	100	Penyuluhan Kelembagaan Petani Produktif	Jumlah peserta penyuluhan kelembagaan petani produktif		200 Orang	50,000,000.0		opd parsial	200 Orang	410,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	03.00	18	101	Pelatihan Perbanyak APH Secara Sederhana di Tingkat Petani	Jumlah peserta pelatihan perbanyak APH secara sederhana di Tingkat petani		350 Orang	50,000,000.0		opd parsial	350 Orang	300,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	102	Pelatihan Teknis Budidaya Kakao Berkelanjutan	Jumlah peserta pelatihan teknis budidaya kakao berkelanjutan		240 Orang	50,000,000.0		opd parsial	260 Orang	254,175,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	103	Pertemuan Teknis Pupuk dan Pestisida	Jumlah peserta pertemuan teknis pupuk dan pestisida		50 Orang	100,000,000.0		opd parsial	50 Orang	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	104	Pertemuan Teknis Alat dan Mesin Perkebunan	Jumlah peserta pertemuan teknis alat dan mesin perkebunan		50 Orang	100,000,000.0		opd parsial	50 Orang	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	105	Pertemuan Petugas Pengamat OPT Perlindungan Tanaman Perkebunan Awal Tahun	Jumlah peserta pertemuan petugas pengamat OPT perlindungan tanaman perkebunan awal tahun		79 Orang	50,000,000.0		opd parsial	79 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	106	Pertemuan Penguatan Kelembagaan Petani	Jumlah peserta pertemuan penguatan kelembagaan petani		100 orang	150,000,000.0		opd parsial	100 orang	304,175,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	107	Pertemuan Teknis Petugas Konservasi Lahan dan Air	Jumlah peserta pertemuan teknis petugas konservasi lahan dan air		50 orang	66,125,000.0		opd parsial	50 orang	76,043,750.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	108	Pertemuan Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah	Jumlah peserta pertemuan pengembangan kawasan tanaman rempah		50 Orang	50,000,000.0		opd parsial	50 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	109	Pertemuan Petugas Pendamping	Jumlah peserta pertemuan petugas pendamping		50 Orang	50,000,000.0		opd parsial	50 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	110	Pertemuan Koordinasi Tebu	Jumlah peserta pertemuan koordinasi tebu, tembakau, kapas		50 orang	50,000,000.0		opd parsial	50 orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	111	Pertemuan Petugas Pengelola Kebun	Jumlah peserta petugas pengelola kebun		20 Orang	66,125,000.0		opd parsial	20 Orang	76,043,750.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	112	Pertemuan Teknis Pengendalian OPT Yang Efektif	Jumlah peserta pertemuan teknis pengendalian OPT yang efektif		50 Orang	50,000,000.0		opd parsial	50 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	113	Pertemuan Penetapan Harga Satuan Benih/Bibit	Jumlah peserta pertemuan penetapan harga satuan benih/bibit		50 Orang	50,000,000.0		opd parsial	50 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	114	Pertemuan Penangkar Bibit/Benih Perkebunan	Jumlah peserta pertemuan penangkar bibit/benih perkebunan		50 Orang	50,000,000.0		opd parsial	50 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	115	Pertemuan Koordinasi Petugas dengan Penyalur Bantuan Hibah Pupuk	Jumlah peserta pertemuan koordinasi petugas dengan penyalur bantuan hibah pupuk		50 Orang	85,000,000.0		opd parsial	50 Orang	85,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	116	Pertemuan Koordinasi Tebu, Kapas dan Tembakau (3 kali)	Jumlah peserta pertemuan koordinasi tebu, kapas dan tembakau		50 Orang	50,000,000.0		opd parsial	50 Orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	117	Pertemuan Petugas Pengamat OPT Perlindungan Tanaman Perkebunan Akhir Tahun	Jumlah peserta pertemuan petugas pengamat OPT perlindungan tanaman perkebunan akhir tahun		79 Orang	130,000,000.0		opd parsial	79 Orang	140,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	118	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (UPT-BSMBP)	jumlah perjalanan dinas		10 OT	50,000,000.0		opd parsial	10 OT	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	119	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (UPT-Proteksi)	jumlah perjalanan dinas		10 kali/orang	92,575,000.0		opd parsial	10 kali/orang	106,461,250.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	120	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (Bidang Tanaman Tahunan dan Penvegar)	jumlah perjalanan dinas		10 kali/orang	20,000,000.0		opd parsial	10 kali/orang	20,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	121	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (Seksi Tanaman Semusim)	jumlah perjalanan dinas		10 kali/orang	50,000,000.0		opd parsial	10 kali/orang	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	122	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Seksi Konservasi	jumlah laporan hasil rapat-rapat dan konsultasi		10 kali/orang	70,000,000.0		opd parsial	10 kali/orang	70,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	02	03.00	18	123	Monitoring dan Evaluasi UPT BSMBP	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi UPT BSMBP		22 Laporan	66,125,000.0		opd parsial	22 Laporan	76,043,750.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	124	Monitoring dan Evaluasi UPT Proteksi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi UPT Proteksi		22 Laporan	66,125,000.0		opd parsial	22 Laporan	76,043,750.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	125	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tanaman Semusim	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi		11 Laporan	66,125,000.0		opd parsial	11 Laporan	76,043,750.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	126	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tanaman Rempah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi		16 Laporan	66,125,000.0		opd parsial	16 Laporan	76,043,750.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	127	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Konservasi Lahan dan Air	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi		13 laporan	66,125,000.0		opd parsial	13 laporan	76,043,750.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	18	128	Monev Pengembangan Sumber Benih dan Produksi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber benih dan produksi		21 Laporan	66,125,000.0		opd parsial	21 Laporan	76,043,750.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	4,812,940,486.90			100 %	4,700,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Bulan	250,000,000.0		opd parsial	12 Bulan	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Provinsi Sulawesi Selatan	15 Unit 35 Unit	62,940,486.90		opd parsial	15 Unit 35 Unit	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Provinsi Sulawesi Selatan	131 Orang	4,100,000,000.0		opd parsial	131 Orang	4,100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Unit	300,000,000.0		opd parsial	100 Unit	400,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Jenis	100,000,000.0		opd parsial	10 Jenis	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	402,215,000.0			100 %	412,215,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Unit	100,000,000.0		opd parsial	100 Unit	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Unit	50,000,000.0		opd parsial	100 Unit	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Unit	180,000,000.0		opd parsial	100 Unit	190,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Unit	72,215,000.0		opd parsial	100 Unit	72,215,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	600,000,000.0			100 %	600,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	60 Orang	100,000,000.0		opd parsial	60 Orang	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Provinsi Sulawesi Selatan	6 Dokumen	100,000,000.0		opd parsial	6 Dokumen	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan		3 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen				3 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen		
2.00	02	03.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Jenis 100 Laporan	150,000,000.0		opd parsial	100 Jenis 100 Laporan	150,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Provinsi Sulawesi Selatan	3 Laporan	100,000,000.0		opd parsial	3 Laporan	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	100,000,000.0		opd parsial	4 Laporan	100,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Laporan	50,000,000.0		opd parsial	2 Laporan	50,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	482,800,000.0			100 %	482,800,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Pasang	282,800,000.0		opd parsial	100 Pasang	282,800,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	02	03.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Pasang	200,000,000.0		opd parsial	100 Pasang	200,000,000.0	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.00	03				Kehutanan									
2.00	03	01.00			Dinas Kehutanan				47,427,350,104.01				47,944,837,688.15	
2.00	03	01.00	20		PROGRAM PENATAAN HUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN (Prioritas)	% Luas kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (Prioritas) Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan		64.67 % 283 Ton 92336.62 M3	3,405,000,000.0			64.67 % 283 Ton 110803.94 M3	3,730,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	001	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Jeneberang I	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Takalar	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	002	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Jeneberang II	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bulukumba Kabupaten Sinjai	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	003	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Selayar	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	004	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Cenrana	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Bone	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	005	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Walanae	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	006	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH	Jumlah lokasi	Kabupaten Maros	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Bulusaraung	pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan							
2.00	03	01.00	20	007	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Ajatappareng	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Barru	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	008	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Bila	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Sidenreng Rappang Kota Parepare	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	009	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Sawitto	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Pinrang	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	010	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Saddang I	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Tana Toraja	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	011	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Saddang II	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Toraja Utara	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	012	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Latimojong	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Luwu	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	013	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Rongkong	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Luwu Utara	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	014	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Kalaena	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	015	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Larona Malili	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Luwu Timur	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	016	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Mata Allo	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Kabupaten Enrekang	1 Lokasi	100,000,000.0	APBD Prov		1 Lokasi	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	017	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Jeneberang I	Jumlah patok batas blok dan petak	Luar Provinsi Sulawesi Selatan	250 buah	100,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	018	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Jeneberang II	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	250 buah	100,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	019	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Selayar	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	250 buah	100,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	020	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Cenrana	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	187 buah	75,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	021	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Walanae	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	187 buah	75,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	022	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Bulusaraung	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	187 buah	75,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	023	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Ajatappareng	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	125 buah	50,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	024	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Bila	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	187 buah	75,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	025	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Sawitto	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	125 buah	50,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	026	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Saddang I	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	187 buah	75,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	027	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Saddang II	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	187 buah	75,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	028	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Latimojong	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	187 buah	75,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	029	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Rongkong	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	250 buah	100,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	030	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Kalaena	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	250 buah	100,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	031	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Larona Malili	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	187 buah	75,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	032	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Mata Allo	Jumlah patok batas blok dan petak	Provinsi Sulawesi Selatan	187 buah	75,000,000.0	APBD Prov		0 buah	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	049	Review perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Jumlah kabupaten/kota pengusul	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Kab/Kota	100,000,000.0	APBD Prov		1 Kab/Kota	100,000,000.0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	03	01.00	20	050	Pembinaan dan pengawasan GANIS dan WASGANIS	Jumlah GANIS dan WASGANIS yang dibina	Provinsi Sulawesi Selatan	40 orang	100,000,000.0	APBD Prov		40 orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	051	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, IUPHHK, IPHHK, IPK	Provinsi Sulawesi Selatan	30 izin	200,000,000.0	APBD Prov		30 izin	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	053	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil hutan	Jumlah industri yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	Provinsi Sulawesi Selatan	60 Industri	50,000,000.0	APBD Prov		60 Industri	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	20	054	Monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PSDH/DR	Jumlah data perhitungan iuran kehutanan Jumlah pemegang izin yang wajib bayar PSDH/DR	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Laporan 60 izin	80,000,000.0	APBD Prov		2 Laporan 60 izin	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21		PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (Prioritas)	Cakupan Ketersediaan Jumlah Bibit Tanaman Hutan Cakupan Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Prioritas) Indeks kualitas tutupan lahan (Prioritas)		1000000 Bibit 1000 Ha 58.64	14,148,550,000.0			1000000 Bibit 1000 Ha 58.66	12,927,250,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	001	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Jeneberang I	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Gowa	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	002	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Jeneberang II	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Sinjai	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	003	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Selayar	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	004	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Cenrana	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Bone	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	005	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Walanae	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Soppeng	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	006	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Bulusaraung	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	007	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Ajatappareng	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Barru	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	008	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Bila	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Sidenreng Rappang	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	009	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Sawitto	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Pinrang	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	010	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Saddang I	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Tana Toraja	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	011	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Saddang II	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Toraja Utara	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	012	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Latimojong	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Luwu	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	013	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Rongkong	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Luwu Utara	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	014	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Kalaena	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Luwu Utara	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	015	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Laronia Malili	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Luwu Timur	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	016	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Mata Allo	Jumlah unit persemaian	Kabupaten Enrekang	1 unit	50,000,000.0	APBD Prov		1 unit	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	017	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK VI dan VII / KPH Jeneberang I	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Gowa	7 Unit 6 Unit 6 Unit	521,500,000.0	APBD Prov		7 Unit 6 Unit 6 Unit	537,500,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	018	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK VII dan VIII / KPH Jeneberang II	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Sinjai	6 unit 6 unit 6 unit	469,500,000.0	APBD Prov		6 unit 6 unit 6 unit	484,500,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	019	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK VIII / KPH Selayar	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug	Kabupaten Kepulauan Selayar	2 unit 3 unit	156,500,000.0	APBD Prov		2 unit 3 unit	161,500,000.0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah unit sumur resapan		3 unit				3 unit		
2.00	03	01.00	21	020	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK V / KPH Cenrana	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Bone	2 unit 3 unit 3 unit	156,500,000.0	APBD Prov		2 unit 3 unit 3 unit	161,500,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	021	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK V / KPH Walanae	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo	4 unit 6 unit 6 unit	313,000,000.0	APBD Prov		4 unit 6 unit 6 unit	323,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	022	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK I / KPH Bulusaraung	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	4 unit 6 unit 6 unit	313,000,000.0	APBD Prov		4 unit 6 unit 6 unit	323,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	023	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK II / KPH Ajatappareng	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Barru Kabupaten Pinrang	2 unit 3 unit 3 unit	156,500,000.0	APBD Prov		2 unit 3 unit 3 unit	161,500,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	024	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK II / KPH Bila	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Sidenreng Rappang	4 unit 6 unit 6 unit	313,000,000.0	APBD Prov		4 unit 6 unit 6 unit	323,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	025	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK II / KPH Sawitto	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Pinrang	2 unit 3 unit 3 unit	156,500,000.0	APBD Prov		2 unit 3 unit 3 unit	161,500,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	026	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK III / KPH Saddang I	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Tana Toraja	3 unit 3 unit 3 unit	208,500,000.0	APBD Prov		3 unit 3 unit 3 unit	214,500,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	027	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK III / KPH Saddang II	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Toraja Utara	3 unit 3 unit 3 unit	208,500,000.0	APBD Prov		3 unit 3 unit 3 unit	214,500,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	028	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Latimojong	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Luwu	4 unit 6 unit 6 unit	313,000,000.0	APBD Prov		4 unit 6 unit 6 unit	323,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	029	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Rongkong	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Luwu Utara	3 unit 3 unit 3 unit	208,500,000.0	APBD Prov		3 unit 3 unit 3 unit	214,500,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	030	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Kalaena	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Luwu Timur	2 unit 3 unit 3 unit	156,500,000.0	APBD Prov		2 unit 3 unit 3 unit	161,500,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	031	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Larona Malili	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara	2 unit 3 unit 3 unit	156,500,000.0	APBD Prov		2 unit 3 unit 3 unit	161,500,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	032	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK III / KPH Mata Allo	Jumlah unit dam penahan Jumlah unit gully plug Jumlah unit sumur resapan	Kabupaten Enrekang	3 unit 3 unit 3 unit	208,500,000.0	APBD Prov		3 unit 3 unit 3 unit	214,500,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	033	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada Wilayah CDK VI dan CDK VII / Wilayah KPH Jeneberang I	Luas pemeliharaan tanaman mangrove Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Takalar	53 hektar 5 hektar 170 hektar	775,500,000.0	APBD Prov		6 hektar 10 hektar 40 hektar	376,000,000.0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Luas pembuatan tanaman mangrove Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat		3 hektar 5 hektar 20 hektar				3 hektar 5 hektar 20 hektar		
2.00	03	01.00	21	034	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK VII dan VIII / KPH Jeneberang II	Luas pemeliharaan mangrove Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman mangrove Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bulukumba Kabupaten Sinjai	14 hektar 3 hektar 120 hektar 3 hektar 3 hektar 20 hektar	548,000,000.0	APBD Prov		6 hektar 6 hektar 40 hektar 3 hektar 3 hektar 20 hektar	351,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	035	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK VIII / KPH Selayar	Luas pemeliharaan tanaman mangrove Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman mangrove Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	Kabupaten Kepulauan Selayar	3 hektar 3 hektar 50 hektar 3 hektar 3 hektar 20 hektar	353,000,000.0	APBD Prov		6 hektar 6 hektar 40 hektar 3 hektar 3 hektar 20 hektar	351,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	036	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK V / KPH Cenrana	Luas pemeliharaan tanaman mangrove Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman mangrove Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	Kabupaten Bone	3 hektar 10 hektar 20 hektar 3 hektar 0 hektar 20 hektar	277,000,000.0	APBD Prov		6 hektar 0 hektar 40 hektar 3 hektar 0 hektar 20 hektar	314,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	037	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK V / KPH Walanae	Luas pemeliharaan tanaman mangrove Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman mangrove Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo	3 hektar 3 hektar 20 hektar 3 hektar 3 hektar 20 hektar	281,000,000.0	APBD Prov		6 hektar 6 hektar 40 hektar 3 hektar 3 hektar 20 hektar	351,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	038	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK I / KPH Bulusaraung	Luas pemeliharaan tanaman mangrove Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman mangrove Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	56 hektar 48 hektar 20 hektar 3 hektar 3 hektar 20 hektar	511,000,000.0	APBD Prov		6 hektar 6 hektar 40 hektar 3 hektar 3 hektar 20 hektar	351,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	039	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK II / KPH Ajatappareng	Luas pemeliharaan tanaman mangrove	Kabupaten Barru	3 hektar	434,250,000.0	APBD Prov		6 hektar	504,250,000.0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman mangrove Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat		0 hektar 53 hektar 3 hektar 3 hektar 30 hektar				3 hektar 58 hektar 3 hektar 3 hektar 36 hektar		
2.00	03	01.00	21	040	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK II / KPH Bila	Luas pemeliharaan tanaman mangrove Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman mangrove Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	Kabupaten Sidenreng Rappang Kota Parepare	3 hektar 10 hektar 20 hektar 3 hektar 0 hektar 20 hektar	276,500,000.0	APBD Prov		6 hektar 0 hektar 40 hektar 3 hektar 0 hektar 20 hektar	314,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	041	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK II / KPH Sawitto	Luas pemeliharaan mangrove Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman mangrove Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	Kabupaten Pinrang	3 hektar 10 hektar 20 hektar 3 hektar 0 hektar 20 hektar	276,500,000.0			6 hektar 0 hektar 40 hektar 3 hektar 0 hektar 20 hektar	314,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	042	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK III / KPH Saddang I	Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat		3 hektar 100 hektar 3 hektar 20 hektar	461,000,000.0			6 hektar 40 hektar 3 hektar 20 hektar	283,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	043	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK III / KPH Saddang II	Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat		3 hektar 20 hektar 3 hektar 20 hektar	220,800,000.0			6 hektar 40 hektar 3 hektar 20 hektar	283,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	044	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK IV / KPH Latimojong	Luas pemeliharaan tanaman mangrove Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman mangrove Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat		3 hektar 43 hektar 185 hektar 3 hektar 3 hektar 20 hektar	713,000,000.0			6 hektar 6 hektar 40 hektar 3 hektar 3 hektar 20 hektar	283,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	045	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK IV / KPH Kalaena	Luas pemeliharaan tanaman mangrove Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman mangrove		3 hektar 23 hektar 20 hektar 3 hektar	267,000,000.0			6 hektar 6 hektar 40 hektar 3 hektar	283,000,000.0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat		3 hektar 20 hektar				3 hektar 20 hektar		
2.00	03	01.00	21	046	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK IV / KPH Larona Malili	Luas pemeliharaan tanaman mangrove Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman mangrove Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat		3 hektar 3 hektar 25 hektar 3 hektar 3 hektar 20 hektar	231,000,000.0			6 hektar 6 hektar 40 hektar 3 hektar 3 hektar 20 hektar	270,500,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	047	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK IV / KPH Rongkong	Luas pemeliharaan tanaman mangrove Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman mangrove Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat		75 hektar 20 hektar 115 hektar 0 hektar 0 hektar 15 hektar	605,000,000.0			0 hektar 0 hektar 30 hektar 0 hektar 0 hektar 15 hektar	184,500,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	048	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK III / KPH Mata Allo	Luas pemeliharaan tanaman bambu Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat Luas pembuatan tanaman bambu Luas pembuatan tanaman hutan rakyat		3 hektar 65 hektar 3 hektar 15 hektar	264,000,000.0			6 hektar 30 hektar 3 hektar 15 hektar	185,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	049	Penyusunan dan pengawasan DAS dan RHL	Luas rancangan RHL Jumlah buku pengelolaan DAS Jumlah pelaksanaan monitoring dan pembinaan RHL	Provinsi Sulawesi Selatan	1000 ha 0 Buku 30 Kali	500,000,000.0	APBD Prov		1000 ha 0 Buku 30 Kali	650,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	050	Pembinaan, penilaian, evaluasi kegiatan RHL dan revegetasi pasca tambang	Jumlah pemegang izin yang melakukan revegetasi pasca tambang	Provinsi Sulawesi Selatan	4 izin	80,000,000.0	APBD Prov		4 izin	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	051	Kampanye/gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada HMPI	Provinsi Sulawesi Selatan	250 Orang	50,000,000.0	APBD Prov		250 Orang	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	052	Penguatan aktivitas kelembagaan forum DAS	Jumlah pertemuan/rapat yang dilaksanakan	Kota Makassar	4 kali	150,000,000.0	APBD Prov		4 kali	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	054	Pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan RHL	Jumlah pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis RHL	Provinsi Sulawesi Selatan	15 kali	138,000,000.0	APBD Prov		15 kali	138,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	055	Pembuatan dan pemeliharaan sumber benih unggul	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dibuat dan dipelihara Jumlah peserta bimbingan teknis pembibitan tanaman hutan bagi pelajar	Provinsi Sulawesi Selatan	4 lokasi 400 orang	300,000,000.0	APBD Prov		4 lokasi 400 orang	300,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	057	Pengujian dan sertifikasi benih dan bibit tanaman hutan	Jumlah pemohon yang diproses sertifikasi Jumlah sampel pengujian	Provinsi Sulawesi Selatan	15 pemohon 15 sampel	100,000,000.0	APBD Prov		15 pemohon 15 sampel	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	058	Pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan	Jumlah kabupaten pengawasan peredaran benih	Provinsi Sulawesi Selatan	23 kabupaten	100,000,000.0	APBD Prov		23 kabupaten	100,000,000.0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	03	01.00	21	059	Identifikasi calon sumber benih tanaman hutan dan identifikasi pengada/pengedar benih dan bibit tanaman hutan	Jumlah laporan pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	50,000,000.0	APBD Prov		1 Laporan	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	060	Koordinasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca	Jumlah pelaksanaan pertemuan adaptasi dan mitigasi RAD GRK	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	5 Kali	150,000,000.0	APBD Prov		5 Kali	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	061	Sosialisasi perbenihan tanaman hutan	Jumlah peserta sosialisasi perbenihan tanaman hutan	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	062	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK I/ KPH Bulusaraung)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	3445 Batang	112,000,000.0	APBD Prov		3445 Batang	112,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	063	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK II/ KPH Aiatappareng)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	Kabupaten Barru	3445 Batang	112,000,000.0	APBD Prov		3445 Batang	112,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	064	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK II/ KPH Bila)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	Kabupaten Sidenreng Rappang Kota Parepare	3445 Batang	112,000,000.0	APBD Prov		3445 Batang	112,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	065	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK II/ KPH Sawitto)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	Kabupaten Pinrang	3445 Batang	112,000,000.0	APBD Prov		3445 Batang	112,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	066	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK III/ KPH Mata Allo)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	Kabupaten Enrekang	3445 Batang	112,000,000.0	APBD Prov		3445 Batang	112,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	067	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK III/ KPH Saddang I)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	Kabupaten Tana Toraja	3445 Batang	112,000,000.0	APBD Prov		3445 Batang	112,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	068	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK III/ KPH Saddang II)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	Kabupaten Toraja Utara	3445 Batang	112,000,000.0	APBD Prov		3445 Batang	112,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	069	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK IV/ KPH Latimojong)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	Kabupaten Luwu Kota Palopo	3445 Batang	112,000,000.0	APBD Prov		3445 Batang	112,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	070	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK IV/ KPH Rongkong)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	Kabupaten Luwu Utara	3445 Batang	112,000,000.0	APBD Prov		3445 Batang	112,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	21	071	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK IV/ KPH Kalaena)	Jumlah batang rehabilitasi lahan	Kabupaten Luwu Timur	3445 Batang	112,000,000.0	APBD Prov		3445 Batang	112,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22		PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL	Luas areal wilayah kelola masyarakat dengan skema perhutanan sosial Jumlah kelompok yang dibentuk dan dibina		44953 Ha	2,895,000,000.0			44953 Ha	2,930,000,000.0	Dinas Kehutanan
								32 Kelompok				32 Kelompok		
2.00	03	01.00	22	001	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK VI dan CDK VII / KPH Jeneberang I	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Gowa	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	002	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK VII dan CDK VIII / KPH Jeneberang II	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Bantaeng	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	003	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK VIII / KPH Selavar	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Kepulauan Selayar	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	004	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK V / KPH Cenrana	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Bone	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	005	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK V / KPH Walanae	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Soppeng	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	006	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK I / KPH Bulusaraung	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Maros	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	007	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK II / KPH Aiatappareng	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Barru	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	008	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK II / KPH Bila	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Sidenreng Rappang	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	009	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK II / KPH Sawitto	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Pinrang	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	010	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK III / KPH Saddang I	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Tana Toraja	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	03	01.00	22	011	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK III / KPH Saddang II	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Toraja Utara	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	012	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Latimojong	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Luwu Kota Palopo	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	013	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Rongkong	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Luwu Utara	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	014	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Kalaena	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Luwu Utara	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	015	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Larona Malili	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Luwu Timur	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	016	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK III / KPH Mata Allo	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Kabupaten Enrekang	2 kelompok tani	150,000,000.0			2 kelompok tani	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	033	Pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Sulawesi Selatan	100 orang	110,000,000.0	APBD Prov		100 orang	120,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	034	Pembinaan, monitoring dan evaluasi perhutanan sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dibina, dimonitoring dievaluasi	Provinsi Sulawesi Selatan	20 kelompok tani	100,000,000.0	APBD Prov		20 kelompok tani	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	035	Pertemuan koordinasi dan peningkatan kapasitas pendamping dan kelompok usaha perhutanan sosial	Jumlah pelaksanaan pertemuan perhutanan sosial Jumlah pendamping dan kelompok usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Sulawesi Selatan	1 kali 16 orang	110,000,000.0	APBD Prov		1 kali 16 orang	120,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	036	Pembentukan koperasi tani hutan dan peningkatan kelas KTH	Jumlah koperasi tani hutan yang dibentuk Jumlah KTH kelas kemampuan madya dan utama	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Kelompok 2 kelompok	85,000,000.0	APBD Prov		1 Kelompok 2 kelompok	90,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	22	037	Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan	Jumlah unit penyelenggara penyuluhan	Provinsi Sulawesi Selatan	16 unit penyelenggaraan	90,000,000.0	APBD Prov		16 unit penyelenggaraan	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23		PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM	% Tindak pidana khusus kehutanan yang ditangani		100 %	4,230,000,000.0			100 %	4,445,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	017	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Jeneberang I	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Takalar	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	018	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Jeneberang II	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bulukumba Kabupaten Sinjai	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	019	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Selayar	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Kepulauan Selayar	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	020	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Cenrana	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Bone	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	021	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Walanae	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	022	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Bulusaraung	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	8 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	023	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Ajatappareng	Jumlah kali patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Barru	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	03	01.00	23	024	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Bila	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Sidenreng Rappang Kota Parepare	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	025	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Sawitto	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Pinrang	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	026	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Saddang I	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Tana Toraja	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	027	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Saddang II	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Toraja Utara	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	028	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Latimojong	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Luwu Kota Palopo	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	029	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Rongkong	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Luwu Utara	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	030	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Kalaena	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	031	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Larona Malili	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Luwu Timur	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	032	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Mata Allo	Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kabupaten Enrekang	18 kali	90,000,000.0	APBD Prov		18 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	033	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan wilayah KPH. Jeneberang I	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	Kabupaten Gowa	1 jenis	150,000,000.0			1 jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	034	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Jeneberang II	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 jenis	150,000,000.0			1 jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	035	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Selayar	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 jenis	150,000,000.0			1 jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	036	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Cenrana	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 jenis	150,000,000.0			1 jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	037	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Walanae	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 Jenis	150,000,000.0			1 Jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	038	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Bulusaraung	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 Jenis	150,000,000.0			1 Jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	039	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Ajatappareng	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 jenis	150,000,000.0			1 jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	040	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Bila	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 jenis	150,000,000.0			1 jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	041	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Sawitto	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 jenis	150,000,000.0			1 jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	042	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Saddang I	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 jenis	150,000,000.0			1 jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	043	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Saddang II	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 jenis	150,000,000.0			1 jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	044	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Latimojong	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 jenis	150,000,000.0			1 jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	045	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Kalaena	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 jenis	150,000,000.0			1 jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	03	01.00	23	046	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Larona Malili	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 jenis	150,000,000.0			1 jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	047	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Rongkong	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 jenis	150,000,000.0			1 jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	048	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Mata Allo	Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan		1 jenis	150,000,000.0			1 jenis	150,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	050	Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga perlindungan dan pengamanan hutan	Jumlah tenaga perlindungan dan pengamanan hutan yang dibina dan ditingkatkan kinasitasnya	Provinsi Sulawesi Selatan	60 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		70 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	051	Monitoring dan koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan	Provinsi Sulawesi Selatan	20 kali	100,000,000.0	APBD Prov		20 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	052	Operasi gabungan dan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	Jumlah pelaksanaan operasi gabungan Jumlah kasus tindak pidana kehutanan	Provinsi Sulawesi Selatan	1 kali 1 kasus	150,000,000.0	APBD Prov		1 kali 1 kasus	200,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	23	054	Pembinaan dan monitoring tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	Provinsi Sulawesi Selatan	5 kali	40,000,000.0	APBD Prov		5 kali	45,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Cakupan luas kebakaran hutan yang dikendalikan		100 %	3,230,000,000.0			100 %	3,280,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	001	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Jeneberang I	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran	Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	002	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Jeneberang II	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Sinjai	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	003	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Selayar	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Kepulauan Selayar	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	004	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Cenrana	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Bone	80 Orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 Orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	005	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Walanae	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	006	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Bulusaraung	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	007	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Ajatappareng	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Barru	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	008	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Bila	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Sidenreng Rappang Kota Parepare	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	009	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Sawitto	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Pinrang	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	010	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Saddang I	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Tana Toraja	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	011	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Saddang II	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Toraja Utara	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	012	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Latimojong	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Luwu Kota Palopo	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	03	01.00	24	013	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Rongkong	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Luwu Utara	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	014	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Kalaena	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	015	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Larona Malili	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Luwu Timur	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	016	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Mata Allo	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Kabupaten Enrekang	80 orang	80,000,000.0	APBD Prov		80 orang	80,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	017	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK I/ wilayah KPH Bulusaraung)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	018	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK II/ wilayah KPH Ajatappareng)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	Kabupaten Barru	12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	019	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK II/ wilayah KPH Bila)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	Kabupaten Sidenreng Rappang Kota Parepare	12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	020	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK II/ wilayah KPH Sawitto)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	Kabupaten Pinrang	12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	021	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK III/ wilayah KPH Mata Allo)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	Kabupaten Enrekang	12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	022	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK III/ wilayah KPH Saddang I)	Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kabupaten Tana Toraja	100 Orang 12 Kali	100,000,000.0	APBD Prov		100 Orang 12 Kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	023	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK III/ wilayah KPH Saddang II)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	Kabupaten Toraja Utara	12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	024	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK IV/ wilayah KPH Latimojong)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan		12 Kali	100,000,000.0			12 Kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan		100 Orang				100 Orang		
2.00	03	01.00	24	025	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK IV/ wilayah KPH Rongkong)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaraan hutan dan lahan Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan		12 Kali 100 Orang	100,000,000.0			12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	026	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK IV/ wilayah KPH Kalaena)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaraan hutan dan lahan Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan		12 Kali 100 Orang	100,000,000.0			12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	027	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK IV/ wilayah KPH Larona Maliii)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaraan hutan dan lahan Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan		12 Kali 100 Orang	100,000,000.0			12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	028	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK V/ wilayah KPH Walanae)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaraan hutan dan lahan Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan		12 Kali 100 Orang	100,000,000.0			12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	029	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK V/ wilayah KPH Cenrana)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaraan hutan dan lahan Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan		12 Kali 100 Orang	100,000,000.0			12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	030	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK VI dan CDK VII/ wilayah KPH Jeneberang I)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaraan hutan dan lahan Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan		12 Kali 100 Orang	100,000,000.0			12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	031	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK VII dan CDK VIII/ wilayah KPH Jeneberang II)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaraan hutan dan lahan Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan		12 Kali 100 Orang	100,000,000.0			12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	032	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK VIII/ wilayah KPH Selayar)	Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaraan hutan dan lahan Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan		12 Kali 100 Orang	100,000,000.0			12 Kali 100 Orang	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	049	Pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan	Jumlah jenis sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan		2 jenis	250,000,000.0			2 jenis	300,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	24	053	Monitoring dan pembinaan, pencegahan, pengendalian dan pasca kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan pembinaan, pengendalian dan pasca kebakaran hutan dan lahan		10 kali	100,000,000.0			10 kali	100,000,000.0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	03	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	11,937,350,104.01			100 %	12,081,837,688.15	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Bulan	1,450,150,104.01	APBD Prov		12 Bulan	1,509,637,688.15	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Provinsi Sulawesi Selatan	30 Unit 35 Unit	185,000,000.0	APBD Prov		30 Unit 35 Unit	195,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	393 Orang	6,307,200,000.0	APBD Prov		393 Orang	6,307,200,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	75 Jenis ATK	900,000,000.0	APBD Prov		75 Jenis ATK	950,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	30 Unit	240,000,000.0	APBD Prov		30 Unit	250,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Jenis	485,000,000.0	APBD Prov		2 Jenis	490,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar	4 Pameran	360,000,000.0	APBD Prov		4 Pameran	360,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	176 Kali	2,010,000,000.0	APBD Prov		176 Kali	2,020,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	3,270,450,000.0			100 %	5,551,750,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	Kota Makassar	1 Unit	55,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	55,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	20 Unit	600,000,000.0	APBD Prov		20 Unit	1,892,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	177 Unit	1,600,000,000.0	APBD Prov		177 Unit	2,100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	300 Unit	815,450,000.0	APBD Prov		500 Unit	1,125,750,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	30 Unit	200,000,000.0	APBD Prov		30 Unit	379,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	1,338,000,000.0			100 %	1,423,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar	75 Orang	170,000,000.0	APBD Prov		75 Orang	180,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	250,000,000.0	APBD Prov		2 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen	300,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas	Luar Provinsi Sulawesi Selatan	1 Usulan Kegiatan	300,000,000.0	APBD Prov		1 Usulan Kegiatan	325,000,000.0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						pembantuan dan DAK	Provinsi Sulawesi Selatan							
2.00	03	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan 100 Jenis	500,000,000.0	APBD Prov		1 Laporan 100 Jenis	500,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	100,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	100,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	2 Laporan	18,000,000.0	APBD Prov		2 Laporan	18,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		80 %	2,973,000,000.0			80 %	1,576,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kota Makassar	968 Orang 1 Laporan	430,000,000.0	APBD Prov		968 Orang 1 Laporan	300,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	1142 Pasang	1,191,000,000.0	APBD Prov		1142 Pasang	1,226,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	2350 Pasang	1,302,000,000.0	APBD Prov		0 Pasang	0.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Provinsi Sulawesi Selatan	75 Orang	50,000,000.0	APBD Prov		75 Orang	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	04				Energi dan Sumber Daya Mineral									
2.00	04	01.00			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				23,333,809,033.22				23,594,642,251.06	
2.00	04	01.00	01		PROGRAM PENYEDIAAN LISTRIK DAN KETAHANAN ENERGI (Prioritas)	% Desa Berlistrik (Prioritas) % Rumah Tangga Pengguna Listrik Jumlah Kapasitas Bio Energi yang terbangun		99 % 98 % 1244 M3	8,138,476,329.17			99.5 % 98.5 % 1296 M3	8,201,471,606.21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	01	010	Pembinaan Pengelolaan dan Pengusahaan Energi Baru Terbarukan, Konservasi Energi Serta Ketenagalistrikan	Jumlah Pengelola energi baru dan terbarukan yang dibina (40 % Pengelola Laki Laki, 60 % Pengelola Perempuan) Jumlah Perusahaan ketenagalistrikan/dan perusahaan yang memiliki i genset terlayani aspek perizinannya Jumlah perusahaan pengguna energi yang dibina	Provinsi Sulawesi Selatan	15 Pengelola 20 Perusahaan 20 Perusahaan/Lemba ga	120,000,000.0	APBD Prov		15 Pengelola 20 Perusahaan 20 Perusahaan/Lemba ga	120,000,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	01	011	Inventarisasi, Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Bioenergi	Jumlah Instalasi Bioenergi yang di bangun Jumlah pembangkit listrik energi baru terbarukan yang terbangun Jumlah Dokumen FS	Provinsi Sulawesi Selatan	311 Unit 2 Unit 3 Dokumen	8,018,476,329.17	APBD Prov		324 Unit 2 Unit 3 Dokumen	8,081,471,606.21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	02		PROGRAM HILIRISASI PERTAMBANGAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Pertambangan (Prioritas)		16724317500000 Rp	1,273,283,244.52			18396749250000 Rp	1,289,860,949.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	02	005	Pembinaan Peningkatan Nilai Tambah dan Produksi Pertambangan	Jumlah pemegang IUPK sektor hilir Jumlah Produksi Logam Jumlah Produksi Non Logam Jumlah Produksi Batuan Jumlah Produksi Batubara	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Izin/Rekomendasi 101640 Ton 18150000 Ton 847000 m3 42350 Ton	194,141,622.26	APBD Prov		13 Izin/Rekomendasi 111804 Ton 19965000 Ton 931700 m3 46585 Ton	202,430,474.50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	04	01.00	02	006	Peningkatan Pelayanan Pengusahaan Pertambangan dan penataan wilayah IUP Di Atas 10 Ha	Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Jumlah Izin/Rekomendasi Usaha Pertambangan	Provinsi Sulawesi Selatan	2200 Ha 121 Izin/Rekomendasi	1,079,141,622.26	APBD Prov		2200 Ha 133 Izin/Rekomendasi	1,087,430,474.50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	03		PROGRAM EKSPLORASI SUMBER DAYA GEOLOGI, KONSERVASI DAN PEMANFAATAN AIR TANAH (Prioritas)	Luas Wilayah Pemetaan (Prioritas) Jumlah Cadangan Sumber Daya (Prioritas) Jumlah Pembangunan Sumur Bor		7500 Ha 25200000 Ton 17 Unit	5,060,911,116.37			8173 Ha 33300000 Ton 18 Unit	5,126,802,416.90	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	03	008	Pembinaan, Pelayanan Pengusahaan, dan Pengembangan Air Tanah	Jumlah Peta Zonasi Konservasi Air Tanah Jumlah Sumur Bor Jumlah Pengguna Air Tanah Jumlah Lokasi Titik Duga	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Peta 17 Unit 35 Pengguna Air Tanah 18 Titik	4,907,940,744.24	APBD Prov		2 Peta 18 Unit 40 Pengguna Air Tanah 20 Titik	4,951,868,277.92	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	03	009	Eksplorasi dan Dokumentary Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan, dan Batubara	Jumlah Cadangan Luas Wilayah Pemetaan Jumlah Dokumentary dan Informasi geologi yang dihasilkan	Provinsi Sulawesi Selatan	25200000 Ton 7500 Ha 1 Laporan	152,970,372.13	APBD Prov		33300000 Ton 8173 Ha 1 Laporan	174,934,138.98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	04		PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN AIR TANAH	% Pertambangan Tanpa Izin		45.97 %	477,455,231.32			85.1 %	483,671,532.18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	04	006	Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan, Geologi, Air Tanah, Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan	Jumlah Pengguna Air Tanah yang Terawasi Jumlah Penyedia Tenaga Listrik Jumlah Pengusaha IUP yang diinspeksi	Provinsi Sulawesi Selatan	55 Pengguna Air Tanah 70 Penyedia Tenaga Listrik 661 IUP	364,863,138.78	APBD Prov		55 Pengguna Air Tanah 75 Penyedia Tenaga Listrik 727 IUP	368,592,919.32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	04	007	Pengendalian dan Evaluasi serta Penertiban Pertambangan Tanpa Izin	jumlah IUP yang diawasi Jumlah Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Provinsi Sulawesi Selatan	661 IUP 174 PETI	112,592,092.54	APBD Prov		727 IUP 94 PETI	115,078,612.86	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	05		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN EKSPLORASI	% Pelayanan Usaha Minerba dan Air Tanah		70 %	534,822,098.42			80 %	541,785,295.91	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	05	001	Pelayanan Uji Laboratorium	Jumlah Sampel Uji	Sulawesi Selatan	375 Sampel	92,570,149.60	APBD Prov		413 Sampel	94,310,948.97	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	05	005	Pelayanan Peta Digital Energi Dan Sumber Daya Mineral	Jumlah peta digital se Sulawesi Selatan yang dibuat	Provinsi Sulawesi Selatan	218 Peta	69,070,149.60	APBD Prov		240 Peta	70,810,948.98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	05	006	Penatausahaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi Mineral, Batubara Dan Air Tanah	Jumlah laporan yang di susun Jumlah peminjaman alat eksplorasi mineral dan air tanah	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan 13 Unit	373,181,799.22	APBD Prov		1 Laporan 13 Unit	376,663,397.96	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN	Jumlah Izin/Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan Jumlah izin Rekomendasi teknis pemanfaatan minerba yang diterbitkan Jumlah Izin/Rekomendasi teknik pemanfaatan EBT dan ketenagalistrikan yang diterbitkan		55 Izin/Rekomtek 323 Izin/Rekomtek 145 Izin/Rekomtek	1,576,584,510.44			55 Izin/Rekomtek 350 Izin/Rekomtek 145 Izin/Rekomtek	1,597,111,091.79	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	001	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Mineral Batuan, Batubara di bawah 10 Ha dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah I	Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	Kabupaten Barru Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	61 Izin/Rekomtek	95,982,042.50	APBD Prov		66 Izin/Rekomtek	97,692,591.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	002	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor	Jumlah izin/rekomtek	Kabupaten Gowa	61 Izin/Rekomtek	95,982,042.54	APBD Prov		66 Izin/Rekomtek	97,692,590.98	Dinas Energi dan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Mineral Batuan, Batubara di bawah 10 Ha dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah II	yang diterbitkan	Kabupaten Jeneponto Kabupaten Takalar							Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	003	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Mineral Batuan, Batubara di bawah 10 Ha dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah III	Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Toraja Utara Kota Palopo	73 Izin/Rekomtek	95,982,042.54	APBD Prov		77 Izin/Rekomtek	97,692,590.98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	004	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Mineral Batuan, Batubara di bawah 10 Ha dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah IV	Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bulukumba Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Sinjai	61 Izin/Rekomtek	95,982,042.54	APBD Prov		65 Izin/Rekomtek	97,692,590.98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	005	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Mineral Batuan, Batubara di bawah 10 Ha dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah V	Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	Kabupaten Bone Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo	61 Izin/Rekomtek	95,982,042.54	APBD Prov		65 Izin/Rekomtek	97,692,590.98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	006	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Mineral Batuan, Batubara di bawah 10 Ha dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah VI	Jumlah Izin/Rekomtek yang diterbitkan	Kabupaten Enrekang Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Tana Toraja Kota Parepare	61 Izin/Rekomtek	95,982,042.54	APBD Prov		66 Izin/Rekomtek	97,692,590.98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	007	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan dibawah 500 kVa Cabang Dinas Wilayah I	Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	Kabupaten Barru Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	20 Izin/Rekomtek	59,982,042.54	APBD Prov		20 Izin/Rekomtek	61,692,590.98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	008	Pembinaan Pengloalan Pengusahaan Sektor Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan dibawah 500 kVa Cabang Dinas Wilayah II	Jumlah Izin/Rekomtek yang diterbitkan	Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Takalar	20 Izin/Rekomtek	59,982,042.54	APBD Prov		20 Izin/Rekomtek	61,692,590.98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	009	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan dibawah 500 kVa Cabang Dinas Wilayah III	Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Toraja Utara Kota Palopo	30 Izin/Rekomtek	59,982,042.54	APBD Prov		30 Izin/Rekomtek	61,692,590.98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	010	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan dibawah 500 kVa Cabang Dinas Wilayah IV	Jumlah izin/rekomtek yang baik dan benar	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bulukumba Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Sinjai	25 Izin/Rekomtek	59,982,042.54	APBD Prov		25 Izin/Rekomtek	61,692,590.98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	011	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan dibawah 500 kVa Cabang Dinas Wilayah V	Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	Kabupaten Bone Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo	20 Izin/Rekomtek	59,982,042.54	APBD Prov		20 Izin/Rekomtek	61,692,590.98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	012	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan dibawah 500 kVa Cabang Dinas Wilayah VI	Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	Kabupaten Enrekang Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Tana Toraja Kota Parepare	30 Izin/Rekomtek	59,982,042.54	APBD Prov		30 Izin/Rekomtek	61,692,590.98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	013	Penatausahaan Administrasi Perkantoran Cabang Dinas Wilayah I	Jumlah dokumen administrasi perkantoran	Kabupaten Maros	1 Dokumen	106,800,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	106,800,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	04	01.00	20	014	Penatausahaan Administrasi Perkantoran Cabang Dinas Wilayah II	Jumlah dokumen administrasi perkantoran	Kabupaten Gowa	1 Dokumen	106,800,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	106,800,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	015	Penatausahaan Administrasi Perkantoran Cabang Dinas Wilayah III	Jumlah dokumen administrasi perkantoran	Kota Palopo	1 Dokumen	106,800,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	106,800,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	016	Penatausahaan Administrasi Perkantoran Cabang Dinas Wilayah IV	Jumlah dokumen administrasi perkantoran	Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	106,800,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	106,800,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	017	Penatausahaan Administrasi Perkantoran Cabang Dinas Wilayah V	Jumlah Dokumen administrasi perkantoran	Kabupaten Bone	1 Dokumen	106,800,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	106,800,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	20	018	Penatausahaan Administrasi Perkantoran Cabang Dinas Wilayah VI	Jumlah dokumen administrasi perkantoran	Kota Parepare	1 Dokumen	106,800,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	106,800,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	2,984,839,001.04			100 %	3,023,700,565.54	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	350,340,000.0	APBD Prov		12 Bulan	350,340,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	8 Unit 7 Unit	18,450,000.0	APBD Prov		8 Unit 7 Unit	18,450,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	38 Orang	1,019,277,019.06	APBD Prov		38 Orang	1,019,277,019.06	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	32 Jenis ATK	471,175,600.0	APBD Prov		32 Jenis ATK	471,175,600.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	225 Unit	8,212,500.0	APBD Prov		225 Unit	8,212,500.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	2 Jenis	237,383,881.98	APBD Prov		2 Jenis	276,245,446.48	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar	1 Pameran	180,000,000.0	APBD Prov		1 Pameran	180,000,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Sulawesi Selatan dan Luar Provinsi	150 Kali	700,000,000.0	APBD Prov		150 Kali	700,000,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	1,473,692,622.25			100 %	1,492,879,587.05	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	10 Unit	497,630,704.25	APBD Prov		10 Unit	508,677,446.05	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	14 Unit	418,620,506.0	APBD Prov		14 Unit	429,667,247.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	45 Unit	470,720,706.0	APBD Prov		45 Unit	481,767,447.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	30 Unit	61,720,706.0	APBD Prov		30 Unit	72,767,447.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	Kota Makassar	1 Sistem Informasi/Aplikasi	25,000,000.0			0 Sistem Informasi/Aplikasi	0.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	1,140,027,328.18			100 %	1,154,870,087.04	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah Jumlah Laporan hasil forum perangkat daerah	Kota Makassar	50 Orang 1 Laporan	39,546,028.18	APBD Prov		50 Orang 1 Laporan	42,514,581.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	Kota Makassar	4 Dokumen	434,543,113.0	APBD Prov		4 Dokumen	437,511,663.04	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		2 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen				2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen		
2.00	04	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas nembantuan dan DAK	Sulawesi Selatan dan Luar Provinsi	4 Usulan Kegiatan	58,646,029.0	APBD Prov		4 Usulan Kegiatan	61,614,581.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Sulawesi Selatan	5 Laporan 5 Jenis	333,646,029.0	APBD Prov		5 Laporan 5 Jenis	336,614,581.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Sulawesi Selatan dan Luar Provinsi	1 Laporan	273,646,129.0	APBD Prov		1 Laporan	276,614,681.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	673,717,551.51			100 %	682,489,119.44	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaianya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kota Makassar dan Luar Provinsi	8 Orang 1 Laporan	56,386,887.51	APBD Prov		8 Orang 1 Laporan	58,579,779.44	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	250 Pasang	132,886,888.0	APBD Prov		255 Pasang	135,079,780.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	125 Pasang	105,586,888.0	APBD Prov		125 Pasang	107,779,780.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sulawesi Selatan	375 Orang	378,856,888.0	APBD Prov		375 Orang	381,049,780.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	05				Perdagangan									
2.00	05	01.00			Dinas Perdagangan				14,839,043,380.49				14,999,693,428.84	
2.00	05	01.00	01		PRGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Prioritas)	Jumlah penyelenggaraan pameran dalam dan luar negeri Jumlah kerjasama antara Pemerintah dan lembaga dunia usaha (Prioritas)		4 Pameran 2 MoU	2,668,260,904.0			5 Pameran 3 MoU	2,689,981,080.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	01	001	Promosi Produk Ekspor dan Unggulan Daerah	Jumlah Lokasi Pameran Promosi Dalam dan Luar Daerah	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	4 Lokasi	1,736,923,015.0	APBD Prov	Disesuaikan dengan Pagu Anggaran	5 Lokasi	1,736,923,015.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	01	002	Misi Dagang Dalam dan Luar Negeri	Jumlah MOU Produk Perdagangan yang Dikerjakamkan	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	2 MOU	931,337,889.0	APBD Prov		3 MOU	953,058,065.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR (Prioritas)	Nilai Total Ekspor Nilai ekspor bersih perdagangan (Prioritas)		1466745667 Rp (Milyar) 146674567 Juta \$ US	6,330,903,152.0			1584085321 Rp (Milyar) 158408532 Juta \$ US	6,393,799,829.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	02	001	Pemantauan dan Pengendalian Impor	Persentase Nilai Impor Sebesar 10 % di Bawah Nilai Ekspor	Provinsi Sulawesi Selatan	10 %	655,000,000.0	APBD Prov		10 %	655,000,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	02	002	Pembinaan Gerakan Peningkatan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Provinsi Sulawesi Selatan	8 %	725,000,000.0	APBD Prov		8 %	747,896,677.0	Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	05	01.00	02	003	Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	Jumlah Desiminasi Hasil-Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Hasil Perundingan	403,189,152.0	APBD Prov		5 Hasil Perundingan	413,189,152.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	02	004	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi	UPTD BPSMB, Jalan Lorong A.P Pettarani I Kota Makassar	3200 Sertifikat	251,000,000.0	APBD Prov		3400 Sertifikat	251,000,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	02	005	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji	Jumlah Sertifikat Penguji	UPTD BPSMB, Jalan Lorong A.P Pettarani I Kota Makassar	2050 Sertifikat	251,000,000.0	APBD Prov		2100 Sertifikat	251,000,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	02	006	Pengembangan dan Penerapan Penilaian Kesesuaian SNI	Jumlah Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia	UPTD BPSMB, Jalan Lorong A.P Pettarani I Kota Makassar	27 Sertifikat	3,595,714,000.0	APBD Prov		30 Sertifikat	3,595,714,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	02	007	Penatausahaan UPT BSPM	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Mendukung Pelayanan Pengujian, Kalibrasi dan Produk	UPTD BPSMB, Jalan Lorong A.P Pettarani I Kota Makassar	4 Unit	450,000,000.0	APBD Prov		4 Unit	480,000,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	03		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Cakupan kelompok pedagang/usaha informal yang dibina		1.08 %	489,824,268.0			1.19 %	496,201,609.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	03	001	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah Barang Beredar Yang Diawasi	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	90000 Unit	116,506,134.0	APBD Prov		95000 Unit	116,506,134.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	03	002	Penyelenggaraan dan Pembinaan BPSK dan LPKSM	Jumlah BPSK yang di Fasilitas	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	2 BPSK	188,068,134.0	APBD Prov		3 BPSK	194,445,475.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	03	003	Peningkatan Pengawasan Tertib Niaga	Jumlah Gudang yang Diawasi	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	15 Gudang	97,750,000.0	APBD Prov		20 Gudang	97,750,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	03	004	Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen	Jumlah Peserta Hari Konsumen Nasional 2019	Provinsi Sulawesi Selatan	60 Peserta	87,500,000.0	APBD Prov		65 Peserta	87,500,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	04		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Jumlah izin usaha perdagangan Nilai perdagangan dalam negeri		5 Izin	1,143,356,382.0			5 Izin	1,158,242,484.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	04	001	Pelaksanaan Sistem Resi Gudang	Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Resi Gudang	Provinsi Sulawesi Selatan	60 Peserta	85,293,257.0	APBD Prov	Disesuaikan dengan Pagu Anggaran	70 Peserta	85,293,257.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	04	002	Database Perkembangan Harga dan Stok Bapokting	Jumlah Database Komoditi yang terpantau	Provinsi Sulawesi Selatan	20 Database Komoditi	80,300,000.0	APBD Prov		25 Database Komoditi	80,300,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	04	003	Pelaksanaan Pasar Murah	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah	24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	6 Lokasi	104,470,000.0	APBD Prov	Disesuaikan dengan Pagu Anggaran	6 Lokasi	104,470,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	04	006	Pengembangan Usaha Perdagangan	Jumlah Data Perizinan Minuman Beralkohol dan Bahan Berbahaya	Provinsi Sulawesi Selatan	5 Data	90,630,000.0	APBD Prov		6 Data	90,630,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	04	008	Pengelolaan Gedung Ballroom CCC	Jumlah Penyewaan Gedung Ballroom CCC	UPTD Balai Pelayanan Distribusi Perdagangan, Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar	25 Penyewaan	521,863,125.0	APBD Prov		25 Penyewaan	521,863,125.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	04	009	Pengelolaan Pusat Distribusi Regional (PDR) Makassar	Jumlah Pelaku Usaha Yang Berpartisipasi	Kawasan Industri Makassar Kota Makassar	10 Pelaku Usaha	45,300,000.0	APBD Prov		12 Pelaku Usaha	50,300,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	04	012	Pengembangan Pasar Tradisional Modern Pare-Pare Jompie	Jumlah Pelaku Usaha yang Berpartisipasi	Kota Parepare	6 Pelaku Usaha	43,700,000.0	APBD Prov		8 Pelaku Usaha	53,586,102.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	04	013	Penyusunan Data Base Sarana Perdagangan	Jumlah Database Perdagangan	Kota Makassar	5 Database	82,300,000.0	APBD Prov		5 Database	82,300,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	04	016	Rapat Koordinasi dan Identifikasi Bapok Menjelang HBKN	Jumlah Peserta Rakor dan Identifikasi Bapok	Kota Makassar	60 Peserta	89,500,000.0	APBD Prov		65 Peserta	89,500,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	08		PROGRAM PENGEMBANGAN CITRA PRODUK	Peningkatan jumlah pemasaran komoditi ekspor		20 Jenis	207,882,978.0			20 Jenis	210,589,542.0	Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Peningkatan jumlah informasi pemasaran komoditi ekspor Peningkatan jumlah lembaga kerjasama promosi produk nerdagangan		20 Informasi 10 Lembaga				20 Informasi 10 Lembaga		
2.00	05	01.00	08	001	Peningkatan Pemasaran Komoditi Ekspor	Jumlah Jenis Komoditi yang di Identifikasi	Provinsi Sulawesi Selatan	20 Jenis	207,882,978.0	APBD Prov	Disesuaikan dengan Pagu Anggaran	20 Jenis	210,589,542.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	2,374,275,159.93			100 %	2,405,187,395.84	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	12 Bulan	266,692,000.0	APBD Prov		12 Bulan	266,692,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	5 Unit 11 Unit	30,000,000.0	APBD Prov		6 Unit 12 Unit	30,000,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	38 Orang	1,228,800,000.0	APBD Prov		38 Orang	1,228,800,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	65 Jenis ATK	433,500,000.0	APBD Prov		70 Jenis ATK	433,500,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	15 Unit	50,177,461.93	APBD Prov		15 Unit	50,177,467.84	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	15 Jenis	45,250,000.0	APBD Prov		15 Jenis	45,250,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Pameran	95,000,000.0	APBD Prov		1 Pameran	125,912,230.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	28 Kali	224,855,698.0	APBD Prov		28 Kali	224,855,698.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	832,363,445.56			100 %	843,200,527.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	1 Unit	100,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	110,837,082.0	Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	05	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	20 Unit	109,748,353.0	APBD Prov		20 Unit	109,748,353.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	18 Unit	610,800,000.0	APBD Prov		20 Unit	610,800,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	18 Unit	11,815,092.56	APBD Prov		20 Unit	11,815,092.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	485,341,815.0			100 %	491,660,797.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar	120 Orang	82,058,359.0	APBD Prov		120 Orang	82,058,359.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen	322,545,933.0	APBD Prov		4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 8 Dokumen	322,545,933.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	3 Laporan	70,737,523.0	APBD Prov		3 Laporan	70,737,523.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	2 Laporan	5,000,000.0	APBD Prov		2 Laporan	11,318,982.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	1 Laporan	5,000,000.0	APBD Prov		1 Laporan	5,000,000.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	306,835,276.0			100 %	310,830,165.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota	5 Orang 1 Laporan	1,000,000.0	APBD Prov		5 Orang 2 Laporan	1,000,000.0	Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	05	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	260 Pasang	157,766,176.0	APBD Prov		270 Pasang	157,766,176.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kantor Dinas Perdagangan Prov. Sulsel, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar	270 Pasang	148,069,100.0	APBD Prov		280 Pasang	152,063,989.0	Dinas Perdagangan
2.00	06				Perindustrian									
2.00	06	01.00			Dinas Perindustrian				24,295,946,418.91				25,429,996,056.43	
2.00	06	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI (Prioritas)	Jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukannya Jumlah kawasan perdagangan yang tertata % Peningkatan produksi industri potensial (Prioritas)		2 Sentra	7,600,000,000.0			2 Sentra	8,025,000,000.0	Dinas Perindustrian
								2 Kawasan				2 Kawasan		
								10 %				10 %		
2.00	06	01.00	01	005	Pengembangan dan pembinaan sentra industri hasil hutan	jumlah sentra industri hasil hutan yang dibentuk dan dibina	Kabupaten Bone Kabupaten Sinjai Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan	2 sentra	250,000,000.0	APBD Prov		2 sentra	300,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	01	006	Pengembangan dan pembinaan sentra industri tekstil dan sutera	jumlah sentra industri tekstil dan sutera yang dibentuk dan dibina	Kabupaten Bone Kabupaten Jeneponto Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan	2 sentra	250,000,000.0	APBD Prov		2 sentra	325,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	01	007	Pengembangan dan pembinaan sentra industri pande besi	jumlah sentra industri pande besi yang dibentuk dan dibina	Kabupaten Bone Kabupaten Enrekang Kabupaten Jeneponto Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Sinjai Kabupaten Takalar Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan	3 sentra	250,000,000.0	APBD Prov		3 sentra	300,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	01	008	Pengembangan dan pembinaan sentra industri kapal rakyat	jumlah sentra industri kapal rakyat yang dibentuk dan dibina	Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan	3 sentra	250,000,000.0	APBD Prov		3 sentra	300,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	01	009	Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Agro	jumlah sentra industri agro yang dibina dan dikembangkan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Enrekang Kabupaten Jeneponto	5 sentra	1,000,000,000.0	APBD Prov		5 sentra	1,100,000,000.0	Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sinjai Kabupaten Takalar Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan							
2.00	06	01.00	01	010	Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Kerajinan dan Aneka	jumlah sentra industri kerajinan dan aneka yang dibina dan dikembangkan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Sinjai Kabupaten Takalar Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan	3 sentra	600,000,000.0	APBD Prov		3 sentra	700,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	01	015	Penataan dan Pengembangan Kawasan Industri	jumlah kawasan industri yang dibentuk dan dikembangkan Jumlah perizinan kawasan industri yang dilaksanakan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bone Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Maros Kabupaten Sinjai Kabupaten Takalar Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan	1 kawasan 1 perizinan	5,000,000,000.0	APBD Prov		1 kawasan 1 perizinan	5,000,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	Jumlah produk industri yang memenuhi standar		4 Produk	3,450,000,000.0			4 Produk	3,460,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	02	006	Penatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) makanan, minuman dan kemasan	jumlah pelayanan yang dilaksanakan pada UPT Mamin dan kemasan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	48 pelayanan	1,000,000,000.0	APBD Prov		48 pelayanan	1,000,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	02	007	Pengembangan Industri Makanan Minuman dan Kemasan Bermitra dengan pelaku usaha industri	jumlah pelaku usaha industri yang bermitra dengan UPT mamin dan kemasan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Enrekang	10 pelaku usaha industri	200,000,000.0	APBD Prov		10 pelaku usaha industri	200,000,000.0	Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Jeneponto Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sinjai Kabupaten Takalar Kabupaten Wajo Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan							
2.00	06	01.00	02	008	Pelayanan dan Pengembangan Teknologi Makanan Minuman dan Kemasan	jumlah IKM yang dikembangkan dan dilayani di UPT mamin dan kemasan	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	10 IKM	350,000,000.0	APBD Prov		10 IKM	350,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	02	009	Pengembangan industri kreatif berbasis komunitas	jumlah industri start up yang dibina dan akses inkubator bisnis oleh tenant	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	10 start up	775,000,000.0	APBD Prov		10 start up	780,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	02	012	Pembinaan standarisasi produk industri	Jumlah IKM yang terstandarisasi Jumlah perizinan industri yang dilaksanakan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare Luar Provinsi Sulawesi Selatan	25 IKM 5 Perizinan	500,000,000.0	APBD Prov		25 IKM 5 Perizinan	500,000,000.0	Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Provinsi Sulawesi Selatan							
2.00	06	01.00	02	022	Pengembangan dan Pembinaan Industri Alat Mesin Pertanian	jumlah prototype alat mesin pertanian yang dikembangkan jumlah sosialisasi dan demonstrasi prototype alat mesin pertanian	Provinsi Sulawesi Selatan sulawesi selatan	3 prototype 5 sosialisasi/ demonstrasi	625,000,000.0	APBD Prov		3 prototype 5 sosialisasi/ demonstrasi	630,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	03		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Cakupan kelompok bina kelompok pengrajin % Industri kecil dan menengah yang berkembang		5 % 10 %	3,850,000,000.0			5 % 10 %	4,100,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	03	001	IKM Expo	Jumlah peserta IKM yang mengikuti IKM expo	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	24 IKM	1,250,000,000.0	APBD Prov		24 IKM	1,300,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	03	007	Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir	jumlah IKM kimia hilir yang dibina dan dikembangkan	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bone Kabupaten Jeneponto Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan	10 IKM	350,000,000.0	APBD Prov		10 IKM	350,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	03	012	Gelar produk dan akses produk serta bahan baku	jumlah IKM ITEA yang		5 IKM	375,000,000.0	APBD Prov		5 IKM	400,000,000.0	Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					tingkat regional, nasional dan internasional industri ITEA	mengikuti gelar dan akses produk	Provinsi Sulawesi Selatan yogyakarta							
2.00	06	01.00	03	014	Pameran produk ikm pada event daerah, Nasional dan Internasional	jumlah IKM yang produknya terpromosikan	jakarta Provinsi Sulawesi Selatan	5 IKM	350,000,000.0	APBD Prov		5 IKM	350,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	03	015	Pembinaan dan Pengembangan industri kecil dan menengah	jumlah IKM yang dibina dan dikembangkan	Provinsi Sulawesi Selatan sulawesi selatan	10 IKM	200,000,000.0	APBD Prov		10 IKM	250,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	03	016	pembinaan dan pembimbingan kelompok pengrajin industri	jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	5 kelompok pengrajin	325,000,000.0	APBD Prov		5 kelompok pengrajin	350,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	03	019	Identifikasi perkembangan IKM	jumlah data ikm yang dihasilkan setelah pengidentifikasian	Provinsi Sulawesi Selatan sulawesi selatan	1 paket data	150,000,000.0	APBD Prov		1 paket data	200,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	03	033	Pembinaan dan pengembangan industri hilirisasi hasil pertambangan	jumlah IKM hilirisasi hasil pertambangan yang dibina dan dikembangkan	Provinsi Sulawesi Selatan sulawesi selatan	3 IKM	250,000,000.0	APBD Prov		3 IKM	300,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	03	034	Pembinaan dan pengembangan industri hilirisasi hasil agro (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan)	jumlah IKM hilirisasi hasil agro (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan) yang dibina	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	3 IKM	300,000,000.0	APBD Prov		3 IKM	300,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	03	035	Pembinaan dan pengembangan industri hilirisasi hasil kehutanan	jumlah IKM hilirisasi hasil kehutanan yang dibina	Kabupaten Bone Kabupaten Luwu Timur	3 IKM	300,000,000.0	APBD Prov		3 IKM	300,000,000.0	Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten Sinjai Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan							
2.00	06	01.00	04		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar		1 Industri 1 Unit	2,800,000,000.0			1 Industri 1 Unit	2,975,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	04	002	Pembinaan kemampuan teknologi industri alat angkut	jumlah IKM alat angkut yang dibina	Kabupaten Bone Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan	50 IKM	250,000,000.0	APBD Prov		50 IKM	300,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	04	003	Klinik Teknologi	Jumlah IKM yang mengakses klinik teknologi	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	25 IKM	200,000,000.0	APBD Prov		25 IKM	300,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	04	004	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Informatika	jumlah IKM elektronika dan informatika yang dibina	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	20 IKM	150,000,000.0	APBD Prov		20 IKM	150,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	04	007	Pelayanan administrasi perkantoran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) logam, alsintan dan tekstil	jumlah UPTD Logam, tekstil dan alsintan yang dilayani administrasi perkantornya	Kabupaten Bone Kabupaten Jeneponto Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan	3 UPTD	300,000,000.0	APBD Prov		3 UPTD	300,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	04	008	Pelayanan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) logam dan alsintan	Jumlah IKM yang dilayani di UPTD LOGam	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	20 IKM	775,000,000.0	APBD Prov		20 IKM	775,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	04	009	Pelayanan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tekstil	jumlah IKM yang dilayani di UPTD Tekstil	Kabupaten Bone Kabupaten Jeneponto Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan	25 IKM	925,000,000.0	APBD Prov		25 IKM	900,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	04	011	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Tekstil dan Produk Tekstil	jumlah IKM tekstil dan sutera yang dibina	Kabupaten Bone Kabupaten Jeneponto Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan	25 IKM	200,000,000.0	APBD Prov		25 IKM	250,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	4,952,946,418.91			100 %	5,094,996,056.43	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	537,946,418.91	APBD Prov		12 Bulan	549,996,056.43	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	4 Unit 16 Unit	110,000,000.0	APBD Prov		4 Unit 16 Unit	120,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	46 Orang	1,600,000,000.0	APBD Prov		46 Orang	1,650,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	12 Jenis ATK	900,000,000.0	APBD Prov		12 Jenis ATK	925,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	9 Unit	30,000,000.0	APBD Prov		9 Unit	35,000,000.0	Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	06	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	2 Jenis	1,300,000,000.0	APBD Prov		2 Jenis	1,325,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar	1 Pameran	200,000,000.0	APBD Prov		1 Pameran	210,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	sulawesi selatan, luar provinsi dan luar negeri	12 Kali	275,000,000.0	APBD Prov		12 Kali	280,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	777,000,000.0			100 %	837,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	Kota Makassar	1 Unit	160,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	170,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kabupaten Enrekang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Parepare	13 Unit	210,000,000.0	APBD Prov		13 Unit	220,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	10 Unit	80,000,000.0	APBD Prov		10 Unit	87,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Kota Makassar	10 Unit	52,000,000.0	APBD Prov		10 Unit	55,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	9 Unit	55,000,000.0	APBD Prov		9 Unit	65,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	3 Unit	80,000,000.0	APBD Prov		3 Unit	85,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	6 Unit	110,000,000.0	APBD Prov		6 Unit	120,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembankan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Kota Makassar	3 Sistem Informasi/Aplikasi 12 Berita/Informasi	30,000,000.0	APBD Prov		3 Sistem Informasi/Aplikasi 12 Berita/Informasi	35,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	730,000,000.0			100 %	802,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar	100 Orang	70,000,000.0	APBD Prov		100 Orang	80,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar sulawesi selatan dan luar provinsi	4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	200,000,000.0	APBD Prov		4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	225,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	Kota Makassar	24 Usulan Kegiatan	100,000,000.0	APBD Prov		24 Usulan Kegiatan	110,000,000.0	Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	06	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Kota Makassar sulawesi selatan	12 Laporan 3 Jenis	200,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan 3 Jenis	225,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	12 Laporan	85,000,000.0			12 Laporan	86,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	2 Laporan	65,000,000.0			2 Laporan	66,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Kota Makassar	12 Laporan	10,000,000.0			12 Laporan	10,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	136,000,000.0			100 %	136,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kota Makassar	72 Orang 72 Laporan	15,000,000.0			72 Orang 72 Laporan	15,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	72 Pasang	50,000,000.0			72 Pasang	50,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar sulawesi selatan	72 Pasang	46,000,000.0			72 Pasang	46,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar	72 Orang	25,000,000.0			72 Orang	25,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	07				Transmigrasi									
2.00	07	01.00			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				17,026,080,996.28				17,019,636,731.56	
2.00	07	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	% Penempatan Transmigrasi		100 %	796,200,000.0			100 %	796,200,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	07	01.00	01	001	Penyusunan Data Base Ketransmigrasian	Peta dan Data Base Ketransmigrasian	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	153,200,000.0			2 Dokumen	153,200,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	07	01.00	01	002	Bimbingan Teknis Ketransmigrasian	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Provinsi Sulawesi Selatan	80 Orang	84,000,000.0			80 Orang	84,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	07	01.00	01	003	Penyusunan Peta Awal Pembangunan Ketransmigrasian	Data peta awal tata ruang pembangunan pemukiman transmigrasi	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	65,000,000.0			1 Dokumen	65,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	07	01.00	01	005	Inventarisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Lokasi Transmigrasi	Data dan informasi kebutuhan sarana prasarana lokasi transmigrasi	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	50,000,000.0			1 Dokumen	50,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	07	01.00	01	006	Pembinaan Usaha Ekonomi Lokasi Transmigrasi	Pembinaan pengembangan potensi usaha ekonomi warga transmigrasi		3 Lokasi	70,000,000.0			3 Lokasi	70,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	07	01.00	01	007	Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	Pelayanan perpindahan dan penempatan transmigrasi	Luar Provinsi Sulawesi Selatan	1 Paket	49,000,000.0			1 Paket	49,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	07	01.00	01	008	Pengukuran Lahan Transmigrasi	Data dan informasi luas lahan permukiman transmigrasi	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	50,000,000.0			1 Dokumen	50,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	07	01.00	01	009	Penataan Kawasan Transmigrasi	Data dan informasi penataan kawasan transmigrasi	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	45,000,000.0			1 Dokumen	45,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	07	01.00	01	010	Perwujudan Ruang Lokasi Transmigrasi	Data dan informasi perwujudan ruang lokasi transmigrasi	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	65,000,000.0			1 Dokumen	65,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	07	01.00	01	013	Klarifikasi Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	Provinsi Sulawesi Selatan	6 Lokasi	123,000,000.0			6 Lokasi	123,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	07	01.00	01	014	Sosialisasi Sistem Penilaian Transmigran dan Pembina UPT Teladan	Jumlah aparaturnya ketransmigrasian yang mengikuti sosialisasi	Provinsi Sulawesi Selatan	60 Orang	42,000,000.0			60 Orang	42,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	08				Kelautan dan Perikanan									
2.00	08	01.00			Dinas Kelautan dan Perikanan				78,403,041,891.43				79,423,822,196.90	
2.00	08	01.00	01		PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas)		20783461644551 Rp	45,732,000,000.0			21822634726778 Rp	47,052,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	01	001	Diseminasi Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan (SITTO BANGKIT)	Jumlah Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan	Kabupaten Bone, Takalar, Maros, Pinrang, Pangkep, Luwu, Lutra, Lutim, Bulukumba, Ilenenonto	100 Unit	5,000,000,000.0			100 Unit	5,000,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	01	006	Inovasi Teknologi Usaha Perikanan Budidaya dalam rangka Pengembangan Komoditas unggulan dan komoditas perikanan lainnya	Jumlah inovasi teknologi usaha perikanan budidaya Komoditas Unggulan dan komoditas perikanan lainnya		120 unit	7,840,000,000.0			120 unit	7,840,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	01	009	Inovasi Teknologi pengembangan usaha Garam	Jumlah Inovasi Teknologi pengembangan usaha garam	Kabupaten Ienepono Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Takalar	35 unit	2,508,000,000.0			35 unit	2,528,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	01	013	Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan (UPT Provinsi)	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan yang terbangun		5 unit	9,000,000,000.0			5 unit	9,000,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	01	016	Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut	Jumlah sarana dan prasarana pokok unit budidaya yang terbangun Jumlah percontohan budidaya laut		0 unit 40 unit	2,000,000,000.0			0 unit 40 unit	1,500,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	01	018	Pengadaan sarana dan prasarana usaha garam	Jumlah sarana dan prasarana usaha garam yang dibangun		16 unit	2,450,000,000.0			16 unit	2,450,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	01	019	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Peningkatan Kapasitas Nelayan	Jumlah kapal yang dibangun Jumlah sarana dan prasarana alat tangkap Jumlah alat bantu tangkap		15 unit 150 unit 100 piece	11,000,000,000.0			15 unit 150 unit 100 piece	11,000,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	01	023	Penguatan pola kemitraan dan promosi produk	Jumlah promosi yang diikuti Jumlah kerjasama pada Mitra Usaha Perikanan dalam memasarkan dan menggunakan produk perikanan		2 kegiatan promosi 1 Mou	200,000,000.0			2 kegiatan promosi 1 Mou	2,000,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	01	026	Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan konsumsi dan non konsumsi	Jumlah inovasi teknologi produk olahan hasil KP konsumsi dan non konsumsi		50 unit	1,000,000,000.0			50 unit	1,000,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	01	032	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pengawasan Jumlah usaha pembudidayaan yang mendapatkan pengawasan		20 unit usaha 100 unit usaha	300,000,000.0			20 unit usaha 100 unit usaha	300,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	01	033	Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah bantuan peralatan pengolahan Jumlah perbaikan bangunan pengolahan unit pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil Jumlah pabrik es yang direhabilitasi		10 Unit 10 Unit 5 unit	3,960,000,000.0			10 Unit 10 Unit 5 unit	3,960,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	08	01.00	01	034	Pengelolaan unit perbenihan yang sesuai standar mutu	Jumlah pengendalian kualitas lingkungan perikanan budidaya perbenihan Jumlah sarana dan prasarana perbenihan yang dioperasikan Jumlah induk unggul yang untuk menghasilkan benih		8 Unit 8 Unit 750 Ekor	474,000,000.0			8 Unit 8 Unit 750 Ekor	474,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi garam rakyat		380743 Ton 5559907 Ton 100522.3 Ton	2,598,000,000.0			386644 Ton 6076403 Ton 105548.41 Ton	2,899,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	02	024	Pengelolaan pelabuhan perikanan dalam rangka optimalisasi produksi	Jumlah Layanan Operasional di pelabuhan perikanan wilayah 2 Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 1		7 Unit 7 Unit	1,200,000,000.0			9 Unit 9 Unit	1,400,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	02	025	Koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi Garam Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap		720 Orang 1260 Orang 1260 Orang 1260 Orang	1,398,000,000.0			720 Orang 1260 Orang 1260 Orang 1260 Orang	1,499,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	03		PROGRAM PENERAPAN MUTU, PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING	Volume ekspor produk KP Nilai ekspor produk KP Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi		173859.35 Ton 453059.62 US\$ Juta 29691.66 Ton	3,370,000,000.0			191245.28 Ton 498365.58 US\$ Juta 31176.24 Ton	3,470,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	03	005	Layanan pengujian Laboratorium dalam rangka pemenuhan standar mutu produk dan pemasaran	Jumlah sampel Produk Yang dilakukan pengujian mutu Jumlah layanan pemenuhan standar mutu		100 Hasil uji mutu 100 UPI	2,100,000,000.0			100 Hasil uji mutu 100 UPI	2,200,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	03	007	Pembinaan Daya Saing Hasil Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Produktif dan Kompetitif serta Sertifikasi Kelayakan Pengolah	Jumlah unit usaha pengolah yang mendapatkan pembinaan daya saing		70 Unit Usaha	70,000,000.0			70 Unit Usaha	70,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	03	010	Penetapan standar produk perikanan untuk memenuhi persyaratan ekspor	Dukungan Fasilitasi Persyaratan sertifikasi produk hasil perikanan Dukungan Fasilitasi Persyaratan sertifikasi perikanan tangkap Dukungan Fasilitasi Persyaratan sertifikasi perikanan budidaya		70 Unit Usaha 25 Unit Usaha 25 Unit Usaha	1,200,000,000.0			70 Unit Usaha 25 Unit Usaha 25 Unit Usaha	1,200,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	08	01.00	04		PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan % Penurunan tindakan IUU Fishing Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil		1034535.52 Ha 7.19 % 60 %	11,787,000,000.0			1037262.09 Ha 6.31 % 80 %	10,960,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	04	001	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah sarana dan prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		5 unit	3,827,000,000.0			5 unit	3,000,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	04	002	Pembangunan/Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil	Jumlah sarana dan prasarana Kawasan Konservasi Perairan daerah Jumlah prasarana pulau-pulau kecil		5 unit 6 unit	1,700,000,000.0			5 unit 6 unit	1,700,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	04	031	Pengawasan Terpadu SDKP	Jumlah Peserta Koordinasi teknis Pengawasan dan pengendalian SDKP Jumlah Pokmasas yang diberdayakan Jumlah Pengawasan Biota Laut yang dilindungi Jumlah Lokasi Pengawasan Terpadu		120 Orang 30 Kelompok 3 Jenis 0 Kali Pengawasan	360,000,000.0			120 Orang 30 Kelompok 3 Jenis 0 Kali Pengawasan	360,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	04	038	Pengelolaan kawasan konservasi,perairan P3K dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan	Jumlah rehabilitasi ekosistem sumberdaya KP Jumlah pengelolaan dan pembinaan pantai berseri Jumlah Tambatan Perahu didaerah pesisir yang dibangun		42 Ha 7 Wilayah 5 Unit	2,100,000,000.0			42 Ha 7 Wilayah 5 Unit	2,100,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	04	039	Penataan dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi dan penataan ruang laut dan pulau-pulau kecil	Jumlah Peserta koordinasi teknis konservasi kawasan dan penataan ruang laut pesisir dan p3k Jumlah penetapan pencadangan kawasan konservasi Jumlah regulasi konservasi dan penataan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil Jumlah dokumen rencana pengelolaan dan rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		120 Orang 3 Kawasan 1 Regulasi 1 Dokumen	300,000,000.0			120 Orang 3 Kawasan 1 Regulasi 1 Dokumen	300,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	04	040	Pengawasan IUU fishing dan pemantauan kapal perikanan	Pengawasan IUU fishing dan pemantauan kapal perikanan		7 Wilayah	3,500,000,000.0			7 Wilayah	3,500,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	9,328,160,891.43			100 %	9,387,355,196.90	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik		12 Bulan	1,252,360,891.43			12 Bulan	1,239,555,196.90	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan		24 Unit 24 Unit	96,000,000.0			24 Unit 24 Unit	96,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	08	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS		148 Orang	3,148,800,000.0			148 Orang	3,148,800,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia		30 Jenis ATK	1,300,000,000.0			30 Jenis ATK	1,350,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		2 Jenis	2,070,000,000.0			2 Jenis	2,072,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran		4 Pameran	260,000,000.0			4 Pameran	280,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		133 Kali	1,201,000,000.0			133 Kali	1,201,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	3,674,881,000.0			100 %	3,722,467,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara		2 Unit	125,000,000.0			2 Unit	125,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara		7 Unit	1,507,954,000.0			7 Unit	1,507,954,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		14 Unit	979,495,000.0			14 Unit	979,495,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia		20 Unit	136,050,000.0			20 Unit	136,050,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara		2 Unit	15,000,000.0			2 Unit	15,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		60 Unit	825,288,000.0			60 Unit	872,874,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		10 Unit	66,094,000.0			10 Unit	66,094,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website		1 Sistem Informasi/Aplikasi 70 Berita/Informasi	20,000,000.0			1 Sistem Informasi/Aplikasi 70 Berita/Informasi	20,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	1,600,000,000.0			100 %	1,610,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen	850,000,000.0			0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen	850,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi		2 Laporan 6 Jenis	500,000,000.0			2 Laporan 6 Jenis	500,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		6 Laporan	250,000,000.0			6 Laporan	260,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00	08	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	313,000,000.0			100 %	323,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasinya kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun		201 Orang 8 Laporan	40,000,000.0			210 Orang 8 Laporan	50,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia		210 Pasang	273,000,000.0			210 Pasang	273,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.00					Fungsi Penunjang Pemerintahan									
3.00	01				Perencanaan Pembangunan									
3.00	01	01.00			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				32,493,514,737.94				27,679,539,307.19	
3.00	01	01.00	01		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas)	%Ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPd yang ditetapkan (Prioritas) % Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd dan APBD (Prioritas) % Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD (Prioritas)		100 % 100 % 97 %	12,132,784,453.35			100 % 100 % 97 %	10,575,533,570.22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	01	002	Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Prov. Sulsel yang disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	Kota Makassar	1 Dokumen	544,399,623.35	APBD Prov	opd parsial	0 Dokumen	0.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	01	003	Penyusunan Dokumen RKPd Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen RKPd yang tersusun dan ditetapkan menjadi Perkada	Kota Makassar	2 Dokumen	556,728,000.0	APBD Prov	opd parsial	2 Dokumen	371,353,848.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	01	005	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	Jumlah Aparatur Perencana OPD yang diberikan Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi e-Planning Jumlah Sistem Informasi e-Planning yang terpelihara, tersedia dan dimanfaatkan Jumlah Laporan Pemeliharaan Berkala e-Planning	Kota Makassar	52 Orang 1 Sistem 1 Laporan	560,942,400.0	APBD Prov	opd parsial	52 Orang 1 Sistem 1 Laporan	167,541,038.40	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	01	007	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah validasi dan reliabel hasil rekonsiliasi data dan informasi dalam SIPD	Kota Makassar	3077 Data	843,337,076.0	APBD Prov	opd parsial	3077 Data	118,638,918.30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	01	009	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen RPJMD (Provinsi dan 24 Kab/Kota) Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen RKPd (Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kab/Kota) Jumlah dokumen evaluasi RPJPD dengan RPJMN/RPJPD dan RTRWN/RTRWP	Kota Makassar	0 Dok 25 Dok 0 Dok	506,296,600.0	APBD Prov	opd parsial	11 Dok 25 Dok 0 Dok	422,954,700.60	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	01	01.00	01	010	Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran	Kota Makassar	2 Laporan	534,910,525.0	APBD Prov	opd parsial	2 Laporan	556,841,856.53	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	01	022	Fasilitasi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan	Rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur Sulawesi	Kota Makassar	12 dokumen	8,586,170,229.0	APBD Prov	opd parsial	12 dokumen	8,938,203,208.39	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU (Prioritas)	Jumlah Kawasan yang difasilitasi perencanaan dan pengembangannya (Prioritas)		3 Kawasan	356,227,346.97			3 Kawasan	360,872,382.58	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	02	001	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi pengembangan pusat pertumbuhan baru Jumlah rekomendasi penyelenggaraan penataan ruang	Kota Makassar	4 rekomendasi 4 rekomendasi	170,588,642.64	APBD Prov	opd parsial	4 rekomendasi 4 rekomendasi	172,820,375.09	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	02	002	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Baru dan Kawasan Khusus	Jumlah Laporan rencana pengembangan kawasan ekonomi baru dan kawasan ekonomi khusus	Kota Makassar	1 laporan	185,638,704.33	APBD Prov	opd parsial	1 laporan	188,052,007.49	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	03		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		10 Rekomendasi	709,675,297.32			10 Rekomendasi	718,911,820.48	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	03	002	Penyusunan Rencana Aksi Daerah / Sustainable Development Goals (SDGs)	Jumlah rencana aksi daerah Sustainable development Goals (SDGs) yang disusun	Kota Makassar	24 Rencana Aksi	366,860,919.04	APBD Prov	opd parsial	24 Rencana Aksi	371,632,797.06	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	03	003	Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyusunan kebijakan program prioritas pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial	Kota Makassar	2 Dokumen	71,318,781.16	APBD Prov	opd parsial	2 Dokumen	72,248,611.39	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	03	004	Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	Kota Makassar	2 Dokumen	129,928,403.44	APBD Prov	opd parsial	2 Dokumen	131,620,158.76	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	03	006	Penyusunan Kebijakan / Program Prioritas Pembangunan pendidikan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan program strategis pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga	Kota Makassar	2 Dokumen	141,567,193.68	APBD Prov	opd parsial	2 Dokumen	143,410,253.27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	04		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Perekonomian		8 Rekomendasi	764,784,633.41			8 Rekomendasi	774,741,307.61	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	04	001	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Dokumen Penanggulangan kemiskinan	Kota Makassar	1 Dokumen	335,412,223.17	APBD Prov	opd parsial	1 Dokumen	339,774,994.38	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	04	002	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Investasi, Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan perencanaan pengembangan investasi, penanaman modal dan PTSP	Kota Makassar	1 Laporan	77,446,750.90	APBD Prov	opd parsial	1 Laporan	78,455,970.99	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	01	01.00	04	003	Koordinasi Pencapaian Indikator Makro	Jumlah Laporan capaian indikator makro	Kota Makassar	1 Laporan	12,809,897.96	APBD Prov	opd parsial	1 Laporan	12,978,838.97	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	04	005	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM	Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM	Kota Makassar	1 Laporan	98,749,893.75	APBD Prov	opd parsial	1 Laporan	100,036,054.70	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	04	009	Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan	Kota Makassar	1 Laporan	125,248,925.10	APBD Prov	opd parsial	1 Laporan	126,879,573.46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	04	010	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kota Makassar	1 Laporan	115,116,942.53	APBD Prov	opd parsial	1 Laporan	116,615,875.11	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	05		PROGRAM PERENCANAAN SUMBERDAYA ALAM	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan SDA ke dalam Dokumen Perencanaan Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis perencanaan pembangunan sumber daya alam		4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	218,529,256.85			4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	221,373,027.12	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	05	003	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan SDA dan LH	Kota Makassar	2 Laporan	218,529,256.85	APBD Prov	opd parsial	2 Laporan	221,373,027.12	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	06		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam dokumen Perencanaan Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan		4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	4,138,734,029.0			4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	3,317,994,822.06	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	06	004	Koordinasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah rekomendasi pembangunan jalan daerah terisolir Jumlah rekomendasi penyelenggaraan jalan dan jembatan Jumlah rekomendasi pengusulan DAK Bidang jalan	Kota Makassar	3 Rekomendasi 4 Rekomendasi 3 Rekomendasi 0	291,300,527.0	APBD Prov	opd parsial	3 Rekomendasi 4 Rekomendasi 3 Rekomendasi 0	623,383,127.78	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	06	005	Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP	Jumlah rekomendasi kelembagaan KOMIR Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PSETK	Kota Makassar	2 Rekomendasi 4 Rekomendasi	3,446,400,000.0	APBD Prov	opd parsial	2 Rekomendasi 4 Rekomendasi	1,836,400,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
3.00	01	01.00	06	009	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah rekomendasi perencanaan sektor pengembangan wilayah	Kota Makassar	3 Laporan	166,150,962.0	APBD Prov	opd parsial	3 Laporan	355,563,058.68	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	01	01.00	06	010	Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Provinsi	Jumlah sistem informasi Geospasial yg dikelola	Kota Makassar	1 Sistem	234,882,540.0	APBD Prov	opd parsial	1 Sistem	502,648,635.60	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	5,317,073,136.89			100 %	3,693,975,354.07	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	261,455,906.96	APBD Prov		12 Bulan	23,098,816.62	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan	Kantor Bappeda Prov.Sulsel Kota Makassar	20 Unit 13 Unit	254,488,511.36	APBD Prov		20 Unit 13 Unit	16,040,844.87	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	30 Orang	854,814,414.98	APBD Prov	opd parsial	30 Orang	624,170,985.23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	25 Jenis ATK	500,460,800.69	APBD Prov	opd parsial	25 Jenis ATK	265,210,773.96	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	2 Jenis	1,844,034,894.04	APBD Prov	opd parsial	2 Jenis	1,626,251,330.53	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar	1 Pameran	415,265,387.49	APBD Prov	opd parsial	1 Pameran	178,907,820.39	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Makassar	3250 Kali	1,186,553,221.37	APBD Prov	opd parsial	3250 Kali	960,294,782.47	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	3,940,146,572.15			100 %	3,395,194,523.05	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	1 Unit	1,053,973,084.49	APBD Prov	opd parsial	1 Unit	948,426,770.85	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	13 Unit	548,711,841.29	APBD Prov	opd parsial	13 Unit	436,597,131.49	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	12 Unit	1,516,112,134.49	APBD Prov	opd parsial	12 Unit	1,416,573,628.50	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	01	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	8 Unit	573,997,634.49	APBD Prov	opd parsial	8 Unit	462,211,640.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Kota Makassar	3 Sistem Informasi/Aplikasi 150 Berita/Informasi	247,351,877.39	APBD Prov	opd parsial	3 Sistem Informasi/Aplikasi 150 Berita/Informasi	131,385,352.21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	986,500,352.02			100 %	720,059,567.46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang disusun Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang disusun dan dilaporkan	Kota Makassar	2 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen	606,243,120.75	APBD Prov	opd parsial	2 Dokumen 4 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen	474,502,721.55	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	3 Laporan	380,257,231.27	APBD Prov	opd parsial	3 Laporan	245,556,845.91	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	249,142,907.17			100 %	159,800,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	01	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya	Kota Makassar	4 Laporan 150 Orang	249,142,907.17	APBD Prov	opd parsial	4 Laporan 150 Orang	159,800,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	02				Keuangan									
3.00	02	01.00			Badan Pendapatan Daerah				56,908,801,610.07				57,519,537,873.38	
3.00	02	01.00	05		PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PAJAK DAERAH	Cakupan ketersediaan pelayanan drivethru, gerai samsat, e-samsat, samsat keliling		100 %	327,760,000.0			100 %	355,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	05	001	Jasa SMS Broadcast kepada Wajib Pajak	Jumlah terkirimnya sms pemberitahuan jatuh tempo pajak kendaraan bermotor	Kota Makassar	242000 Wajib Pajak	77,760,000.0	APBD Prov		266200 Wajib Pajak	80,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	05	002	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Layanan Unggulan Samsat	Jumlah lokasi layanan unggulan samsat yang dimonitoring	Kota Makassar	25 Lokasi	130,000,000.0	APBD Prov		25 Lokasi	145,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	05	003	Peningkatan dan Pengembangan layanan Unggulan Samsat Prov.SulSel	Jumlah ketersediaan inovasi layanan unggulan samsat bagi masyarakat	Kota Makassar	1 Inovasi	120,000,000.0	APBD Prov		1 Inovasi	130,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Pertumbuhan kenaikan pendapatan daerah yang dikelola bendenda		5 %	19,652,698,277.0			5 %	21,004,987,803.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	001	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar I Selatan	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kota Makassar	13313 SP3D	75,461,760.0	APBD Prov		13979 SP3D	90,554,112.0	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	02	01.00	06	002	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar II Utara	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kota Makassar	10013 SP3D	111,628,800.0	APBD Prov		10514 SP3D	133,954,560.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	003	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pare-Pare	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kota Parepare	8491 SP3D	95,184,000.0	APBD Prov		8916 SP3D	114,220,800.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	004	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Palopo	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kota Palopo	8275 SP3D	66,412,800.0	APBD Prov		8689 SP3D	79,695,360.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	005	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bone	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bone	10830 SP3D	112,492,800.0	APBD Prov		11371 SP3D	134,991,360.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	006	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Wajo	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Wajo	7842 SP3D	85,132,800.0	APBD Prov		8234 SP3D	102,159,360.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	007	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bantaeng	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantaeng	8520 SP3D	91,756,800.0	APBD Prov		8946 SP3D	110,108,160.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	008	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Gowa	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Gowa	12502 SP3D	107,452,800.0	APBD Prov		13127 SP3D	128,943,360.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	009	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pinrang	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pinrang	8786 SP3D	91,152,000.0	APBD Prov		9204 SP3D	109,382,400.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	010	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Maros	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Maros	9364 SP3D	92,980,800.0	APBD Prov		9832 SP3D	111,576,960.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	011	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pangkep	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	9541 SP3D	39,312,000.0	APBD Prov		10018 SP3D	47,174,400.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	012	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sidrap	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Sidenreng Rappang	8511 SP3D	50,572,800.0	APBD Prov		8937 SP3D	60,687,360.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	013	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Tana Toraja	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Tana Toraja	8659 SP3D	58,204,800.0	APBD Prov		9092 SP3D	69,845,760.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	014	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Timur	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Luwu Timur	9386 SP3D	72,576,000.0	APBD Prov		9855 SP3D	87,091,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	015	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Soppeng	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Soppeng	7506 SP3D	59,760,000.0	APBD Prov		7888 SP3D	71,712,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	016	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bulukumba	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bulukumba	5677 SP3D	58,492,800.0	APBD Prov		5951 SP3D	70,191,360.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	017	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Barru	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Barru	8958 SP3D	74,880,000.0	APBD Prov		9406 SP3D	89,856,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	018	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Luwu	7960 SP3D	79,372,800.0	APBD Prov		8358 SP3D	95,247,360.0	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	02	01.00	06	019	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sinjai	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Sinjai	8261 SP3D	86,400,000.0	APBD Prov		8674 SP3D	103,680,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	020	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Takalar	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Takalar	9576 SP3D	88,560,000.0	APBD Prov		10055 SP3D	106,272,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	021	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Selayar	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Kepulauan Selayar	6121 SP3D	37,512,000.0	APBD Prov		6427 SP3D	45,014,400.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	022	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Toraja Utara	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Toraja Utara	7434 SP3D	79,372,800.0	APBD Prov		7806 SP3D	95,247,360.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	023	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Utara	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Luwu Utara	7053 SP3D	92,327,040.0	APBD Prov		7406 SP3D	110,792,448.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	024	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Jeneponto	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Jeneponto	7895 SP3D	93,100,320.0	APBD Prov		8290 SP3D	111,720,384.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	025	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Enrekang	Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Enrekang	8014 SP3D	90,892,800.0	APBD Prov		8415 SP3D	109,071,360.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	026	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar I Selatan	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Makassar I Selatan yang ditertibkan	Kota Makassar	1000 Unit	88,488,000.0	APBD Prov		1000 Unit	106,185,600.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	027	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar II Utara	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Makassar II Utara yang ditertibkan	Kota Makassar	1000 Unit	85,680,000.0	APBD Prov		1000 Unit	102,816,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	028	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pare-Pare	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Pare-Pare yang ditertibkan	Kota Parepare	800 Unit	64,080,000.0	APBD Prov		800 Unit	76,896,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	029	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Palopo	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Palopo yang ditertibkan	Kota Palopo	800 Unit	64,080,000.0	APBD Prov		800 Unit	76,896,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	030	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bone	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Bone yang ditertibkan	Kabupaten Bone	1000 Unit	76,976,640.0	APBD Prov		1000 Unit	92,371,968.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	031	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Wajo	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Wajo yang ditertibkan	Kabupaten Wajo	900 Unit	72,000,000.0	APBD Prov		900 Unit	86,400,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	032	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bantaeng	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Bantaeng yang ditertibkan	Kabupaten Bantaeng	500 Unit	41,184,000.0	APBD Prov		500 Unit	49,420,800.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	033	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Gowa	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Gowa yang ditertibkan	Kabupaten Gowa	1000 Unit	79,538,400.0	APBD Prov		1000 Unit	95,446,080.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	034	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pinrang	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Pinrang yang ditertibkan	Kabupaten Pinrang	800 Unit	64,512,000.0	APBD Prov		800 Unit	77,414,400.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	035	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Maros	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Maros yang ditertibkan	Kabupaten Maros	900 Unit	78,480,000.0	APBD Prov		900 Unit	94,176,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	036	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pangkep	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Pangkep yang ditertibkan	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	800 Unit	59,760,000.0	APBD Prov		800 Unit	71,712,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	037	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sidrap	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah sidrap yang ditertibkan	Kabupaten Sidenreng Rappang	900 Unit	80,640,000.0	APBD Prov		900 Unit	96,768,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	038	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Tana Toraja	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah tana toraja yang ditertibkan	Kabupaten Tana Toraja	500 Unit	42,480,000.0	APBD Prov		500 Unit	50,976,000.0	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	02	01.00	06	039	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Timur	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu Timur yang ditertibkan	Kabupaten Luwu Timur	800 Unit	59,414,400.0	APBD Prov		800 Unit	71,297,280.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	040	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Soppeng	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Soppeng yang ditertibkan	Kabupaten Soppeng	600 Unit	45,360,000.0	APBD Prov		600 Unit	54,432,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	041	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bulukumba	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Bulukumba yang ditertibkan	Kabupaten Bulukumba	800 Unit	58,825,520.0	APBD Prov		800 Unit	70,602,624.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	042	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Barru	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Barru yang ditertibkan	Kabupaten Barru	600 Unit	47,520,000.0	APBD Prov		600 Unit	57,024,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	043	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu yang ditertibkan	Kabupaten Luwu	600 Unit	49,680,000.0	APBD Prov		600 Unit	59,616,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	044	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sinjai	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Sinjai yang ditertibkan	Kabupaten Sinjai	600 Unit	51,408,000.0	APBD Prov		600 Unit	61,689,600.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	045	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Takalar	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Takalar yang ditertibkan	Kabupaten Takalar	600 Unit	60,480,000.0	APBD Prov		600 Unit	72,576,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	046	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Selayar	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Selayar yang ditertibkan	Kabupaten Kepulauan Selayar	500 Unit	38,808,000.0	APBD Prov		500 Unit	46,569,600.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	047	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Toraja Utara	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Toraja Utara yang ditertibkan	Kabupaten Toraja Utara	500 Unit	38,808,000.0	APBD Prov		500 Unit	46,569,600.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	048	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Utara	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu Utara yang ditertibkan	Kabupaten Luwu Utara	600 Unit	55,153,440.0	APBD Prov		600 Unit	66,184,128.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	049	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Jeneponto	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Jeneponto yang ditertibkan	Kabupaten Jeneponto	600 Unit	51,148,800.0	APBD Prov		600 Unit	61,378,560.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	050	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Enrekang	Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Enrekang yang ditertibkan	Kabupaten Enrekang	500 Unit	42,480,000.0	APBD Prov		500 Unit	50,976,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	051	Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	Jumlah laporan administrasi pengelolaan pendapatan yang diperiksa	Kota Makassar	30 Laporan	290,030,400.0	APBD Prov		30 Laporan	348,036,480.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	052	Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan Subjek/Objek Pajak	Jumlah laporan hasil monitoring pelaksanaan penertiban dan pendataan subjek/objek pajak	Kota Makassar	8 Laporan	90,360,000.0	APBD Prov		8 Laporan	108,432,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	053	Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan APBD dan Rekonsiliasi Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang disusun Jumlah Laporan LKPJ yang disusun Jumlah Laporan Nota Perhitungan yang disusun	Kota Makassar	12 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	247,760,640.0	APBD Prov		12 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	297,312,768.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	054	Verifikasi dan Analisa Kendaraan Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang	Laporan hasil verifikasi dan analisa kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang	Kota Makassar	4 Laporan	73,728,000.0	APBD Prov		4 Laporan	88,473,600.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	055	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan	Jumlah Laporan potensi pajak yang belum dikelola	Kota Makassar	2 Laporan	76,320,000.0	APBD Prov		2 Laporan	91,584,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	056	Penyusunan Peraturan Perundang undangan Pendapatan Daerah	Jumlah peraturan pelaksanaan teknis bidang pendapatan yang disusun	Kota Makassar	10 Produk Hukum	116,496,000.0	APBD Prov		10 Produk Hukum	139,795,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	057	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok	Laporan hasil Rapat Kerja asistensi, monitoring dan evaluasi Pemanfaatan dana pajak rokok	Kota Makassar	4 Laporan	109,872,000.0	APBD Prov		4 Laporan	131,846,400.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	058	Pemutakhiran Data Base Objek dan Subjek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemutakhiran	Kota Makassar	4 laporan	75,024,000.0	APBD Prov		4 laporan	90,028,800.0	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	02	01.00	06	059	Penyusunan dan Sosialisasi NIKB	Pergub Tentang NIKB	Kota Makassar	75 set	240,120,000.0	APBD Prov		75 set	288,144,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	060	Pembinaan SDM Aparatur Sipil Pendapatan Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan	Kota Makassar	18 Laporan	400,351,680.0	APBD Prov		18 Laporan	480,422,016.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	061	Peningkatan Pengelolaan Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan dan PBBKB	Jumlah movev dan koordinasi	Kota Makassar	6 Laporan	100,800,000.0	APBD Prov		6 Laporan	120,960,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	062	Peningkatan Pengelolaan PKB dan BBNKB	Jumlah movev, konsultasi dan koordinasi	Kota Makassar	10 laporan	110,016,000.0	APBD Prov		10 laporan	132,019,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	063	Evaluasi dan Monitoring Retribusi Daerah dan PADL	Jumlah laporan dan berita acara monitoring Jumlah Buku Pendapatan daerah Kab/Kota	Kota Makassar	4 laporan 50 exp	108,720,000.0	APBD Prov		4 laporan 50 exp	130,464,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	064	Evaluasi Penerimaan PAD pada UPT Bapenda	Jumlah laporan hasil Evaluasi Penerimaan PAD	Kota Makassar	4 laporan	57,600,000.0	APBD Prov		4 laporan	69,120,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	065	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Palopo	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Palopo	Kota Palopo	1 Laporan	150,912,000.0	APBD Prov		1 Laporan	181,094,400.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	066	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.Parepare	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Pare-pare	Kota Parepare	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	067	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Makassar I Selatan	Kota Makassar	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	068	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bone	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Bone	Kabupaten Bone	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	069	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Wajo	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Wajo	Kabupaten Wajo	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	070	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Maros	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Maros	Kabupaten Maros	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		5 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	071	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bantaeng	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Bantaeng	Kabupaten Bantaeng	1 Laporan	78,336,000.0	APBD Prov		1 Laporan	94,003,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	072	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Pangkep	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Pangkep	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	073	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Gowa	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Gowa	Kabupaten Gowa	1 laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	074	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sidrap	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Sidrap	Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Laporan	74,880,000.0	APBD Prov		1 Laporan	89,856,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	075	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Pinrang	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Pinrang	Kabupaten Pinrang	1 laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	076	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Tana Toraja	Kabupaten Tana Toraja	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	077	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Luwu Timur	Kabupaten Luwu Timur	1 laporan	150,912,000.0	APBD Prov		1 laporan	181,094,400.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	078	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Soppeng	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Soppeng	Kabupaten Soppeng	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	079	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bulukumba	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Bulukumba	Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	080	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Jeneponto	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Jeneponto	Kabupaten Jeneponto	1 laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	081	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Enrekang	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Enrekang	Kabupaten Enrekang	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	082	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Luwu	Kabupaten Luwu	1 Laporan	150,912,000.0	APBD Prov		1 Laporan	181,094,400.0	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	02	01.00	06	083	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. makassar II Utara	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Makassar II Utara	Kota Makassar	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	084	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Selayar	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Selayar	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	085	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Toraja Utara	Kabupaten Toraja Utara	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	086	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Luwu Utara	Kabupaten Luwu Utara	1 Laporan	150,912,000.0	APBD Prov		1 Laporan	181,094,400.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	087	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Barru	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Barru	Kabupaten Barru	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	088	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sinjai	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Sinjai	Kabupaten Sinjai	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	089	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Takalar	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Takalar	Kabupaten Takalar	1 Laporan	75,456,000.0	APBD Prov		1 Laporan	90,547,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	090	Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengawasan	Kota Makassar	14 Laporan	169,200,000.0	APBD Prov		14 Laporan	203,040,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	091	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Aparat Fungsional	Jumlah laporan hasil pemutakhiran data tindak lanjut	Kota Makassar	8 laporan	59,760,000.0	APBD Prov		8 laporan	71,712,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	092	Asistensi dan Penyusunan Target Pokok dan Target Perubahan Bidang Pendapatan Daerah	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan target APBD pokok dan perubahan	Kota Makassar	2 laporan	147,456,000.0			2 laporan	176,947,200.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	093	Peningkatan Kapasitas SDM operator Sistem dan Operator Data	Jumlah peserta pelatihan operator sistem dan operator data	Kota Makassar	75 orang	2,160,000.0	APBD Prov		75 orang	2,592,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	096	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan	Kota Makassar	12 Laporan	1,108,867,888.0	APBD Prov		12 Laporan	1,105,933,049.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	097	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar II Utara	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Makassar II Utara	Kota Makassar	12 Laporan	567,101,520.0	APBD Prov		12 Laporan	605,218,242.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	098	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Pare-pare	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Pare-pare	Kota Parepare	12 Laporan	678,267,360.0	APBD Prov		12 Laporan	713,920,832.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	099	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Palopo	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Palopo	Kota Palopo	12 laporan	470,273,040.0	APBD Prov		12 laporan	564,327,648.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	100	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Bone	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Bone	Kabupaten Bone	12 laporan	458,768,160.0	APBD Prov		12 laporan	450,521,792.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	101	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Wajo	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Wajo	Kabupaten Wajo	12 laporan	439,968,960.0	APBD Prov		12 laporan	527,962,752.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	102	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Bantaeng	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Bantaeng	Kabupaten Bantaeng	12 laporan	371,296,800.0	APBD Prov		12 laporan	445,556,160.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	103	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Gowa	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Gowa	Kabupaten Gowa	12 laporan	550,000,000.0	APBD Prov		12 laporan	560,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	104	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Pinrang	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Pinrang	Kabupaten Pinrang	12 laporan	510,000,000.0	APBD Prov		12 laporan	520,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	105	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Maros	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Maros	Kabupaten Maros	12 laporan	310,000,000.0	APBD Prov		12 laporan	330,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	106	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Pangkep	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Pangkep	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	12 Laporan	310,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	330,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	02	01.00	06	107	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Sidrap	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Sidrap	Kabupaten Sidenreng Rappang	12 Laporan	470,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	490,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	108	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja	Kabupaten Tana Toraja	12 Laporan	280,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	300,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	109	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur	Kabupaten Luwu Timur	12 Laporan	420,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	420,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	110	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Soppeng	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Soppeng	Kabupaten Soppeng	12 Laporan	350,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	380,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	111	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Bulukumba	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Bulukumba	Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	300,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	320,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	112	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Barru	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Barru	Kabupaten Barru	12 Laporan	492,072,800.0	APBD Prov		12 Laporan	300,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	113	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Luwu	Kabupaten Luwu	12 Laporan	680,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	400,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	114	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Sinjai	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Sinjai	Kabupaten Sinjai	12 Laporan	320,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	320,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	115	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Takalar	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Takalar	Kabupaten Takalar	12 Laporan	350,197,691.0	APBD Prov		12 Laporan	320,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	116	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Selayar	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Selayar	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 Laporan	380,395,382.0	APBD Prov		12 Laporan	320,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	117	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara	Kabupaten Toraja Utara	12 Laporan	320,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	330,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	118	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara	Kabupaten Luwu Utara	12 laporan	360,000,000.0	APBD Prov		12 laporan	360,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	119	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Jeneponto	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Jeneponto	Kabupaten Jeneponto	12 Laporan	629,209,236.0	APBD Prov		12 Laporan	360,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	120	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Enrekang	Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Enrekang	Kabupaten Enrekang	12 Laporan	300,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	360,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	06	121	Penerapan Elektronik Tilang (e-Tilang)	Jumlah terkirimnya surat pemberitahuan E-Tilang	Kota Makassar	10000 Surat	72,000,000.0	APBD Prov		15000 Surat	86,400,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	22,371,489,701.07			100 %	20,414,847,619.38	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	8,938,053,907.07	APBD Prov		12 Bulan	8,212,644,019.38	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	70 Unit 200 Unit	136,800,000.0	APBD Prov		72 Unit 202 Unit	164,160,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	195 Orang	8,155,000,000.0	APBD Prov		195 Orang	7,350,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	62 Jenis ATK	2,300,000,000.0	APBD Prov		64 Jenis ATK	1,450,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	456 Unit	79,800,000.0	APBD Prov		458 Unit	100,050,000.0	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	02	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	4 Jenis	1,373,328,000.0	APBD Prov		4 Jenis	1,647,993,600.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar	2 Pameran	540,000,000.0	APBD Prov		2 Pameran	640,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalan Dinas Dalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kota Makassar	556 Kali 15 Kali	848,507,794.0	APBD Prov		556 Kali 15 Kali	850,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	11,644,186,720.0			100 %	12,596,302,157.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	26 Unit	1,638,394,080.0	APBD Prov		26 Unit	1,619,350,989.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	175 Unit	2,375,792,640.0	APBD Prov		177 Unit	2,850,951,168.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	470 Unit	6,200,000,000.0	APBD Prov		472 Unit	6,350,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	1148 Unit	980,000,000.0	APBD Prov		1150 Unit	1,176,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembankan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Kota Makassar	4 Sistem Informasi/Aplikasi 120 Berita/Informasi	450,000,000.0	APBD Prov		4 Sistem Informasi/Aplikasi 140 Berita/Informasi	600,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	972,666,912.0			100 %	1,167,200,294.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar	2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	649,194,912.0	APBD Prov		2 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	779,033,894.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Kota Makassar	34 Laporan 4 Jenis	156,000,000.0	APBD Prov		36 Laporan 4 Jenis	187,200,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	12 Laporan	124,272,000.0	APBD Prov		12 Laporan	149,126,400.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	2 Laporan	30,000,000.0	APBD Prov		2 Laporan	36,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Kota Makassar	1 Laporan	13,200,000.0	APBD Prov		1 Laporan	15,840,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	1,940,000,000.0			100 %	1,981,200,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kota Makassar	464 Orang 12 Laporan	36,000,000.0	APBD Prov		466 Orang 12 Laporan	43,200,000.0	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	02	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	955 Pasang	875,000,000.0	APBD Prov		957 Pasang	880,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	1046 Pasang	951,000,000.0	APBD Prov		1046 Pasang	980,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar	150 Orang	78,000,000.0	APBD Prov		150 Orang	78,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	02.00			Badan Keuangan dan Aset Daerah				32,431,804,805.22				29,744,407,185.86	
3.00	02	02.00	01		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH	Rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah Perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung % Belanja Modal terhadap total APBD % Belanja Pendidikan terhadap total APBD % Belanja Kesehatan terhadap total APBD % Belanja Tidak Langsung terhadap Total APBD % Belanja bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa terhadap Total APBD % Belanja Langsung terhadap Total APBD % Program/Kegiatan yang tidak terlaksana % SILPA Capaian Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA tepat waktu		1 0.54 13 % 20 % 10 % 65 % 17 % 35 % 0 % 2 % 100 %	3,797,932,600.0			1 0.54 13 % 20 % 10 % 65 % 18 % 35 % 0 % 2 % 100 %	4,028,205,723.80	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	01	001	Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Buku APBD Provinsi Sulawesi Selatan Pokok, Perubahan dan Parsial Yang Disusun	Kota Makassar	9 Buku	1,548,812,500.0	APBD Prov		9 Buku	1,585,307,062.50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	01	002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Jumlah ASN Laki-Laki Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	Kota Makassar	140 Orang 210 Orang	219,362,850.0	APBD Prov		140 Orang 210 Orang	231,434,567.05	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	01	003	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dikembangkan dan Dipelihara	Kota Makassar	1 Sistem Informasi	577,525,000.0	APBD Prov		1 Sistem Informasi	594,122,825.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	01	004	Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah Regulasi Keuangan Daerah Yang Disusun	Kota Makassar	5 Perda/Pergub	692,901,250.0	APBD Prov		6 Perda/Pergub	734,828,966.25	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	02	02.00	01	005	Perencanaan dan Penganggaran Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Dibuat	Kota Makassar	4 Dokumen	171,881,250.0	APBD Prov		4 Dokumen	213,530,706.25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	01	006	Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibuat	Kota Makassar	4 Laporan	253,085,250.0	APBD Prov		4 Laporan	280,790,358.25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	01	007	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan Yang Dibuat	Kota Makassar	2 Dokumen	75,602,000.0	APBD Prov		2 Dokumen	101,129,826.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	01	008	Penyusunan Profil APBD Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Buku Profil APBD Provinsi Sulawesi Selatan Yang Dibuat	Kota Makassar	1 Buku	258,762,500.0	APBD Prov		1 Buku	287,061,412.50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	02		PROGRAM PENATAUSAHAAN DAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH	% Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah Rata-Rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas Daerah		98 % 2 Hari	2,916,361,675.0			98 % 2 Hari	3,135,174,376.78	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	02	001	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) Yang Diterbitkan	Kota Makassar	721 SPD	211,655,500.0	APBD Prov		721 SPD	248,107,021.50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	02	002	Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana	Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan	Kota Makassar	15660 SP2D	567,224,000.0	APBD Prov		15760 SP2D	603,557,912.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	02	003	Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Bendahara Yang Dibina Terkait Aturan Penatausahaan SP2D (Pajak, Taspen, BPJS Kesehatan)	Kota Makassar	62 Orang	554,177,200.0	APBD Prov		62 Orang	583,716,503.60	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	02	004	Pengelolaan Administrasi Penggajian ASN Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah ASN Yang Dilayani Dalam Rangka Penerbitan SKPP dan Laporan Rekap Gaji/Susulan/Terusan/, Rekan IKK/IKM/ASKES	Kota Makassar	1114 Orang	328,311,000.0	APBD Prov		1114 Orang	366,214,043.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	02	005	Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)	Jumlah Laporan Kuasa BUD Yang Dibuat	Kota Makassar	48 Laporan	656,529,175.0	APBD Prov		48 Laporan	678,569,054.28	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	02	006	Koordinasi dan Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer	Jumlah Laporan Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer Yang Dibuat	Kota Makassar	8 Laporan	395,267,500.0	APBD Prov		8 Laporan	439,885,977.50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	02	007	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah Jumlah ASN Laki-Laki Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Kota Makassar	232 Orang 232 Orang	203,197,300.0	APBD Prov		232 Orang 232 Orang	215,123,864.90	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	03		PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH	% Tindak lanjut temuan kerugian daerah yang diselesaikan % Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu		100 % 100 %	3,292,752,653.77			100 % 100 %	3,506,458,438.27	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	02	02.00	03	001	Pengelolaan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun	Kota Makassar	9 Laporan 75 Laporan	1,865,318,074.0	APBD Prov		9 Laporan 75 Laporan	2,030,342,208.96	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	03	002	Pengelolaan Verifikasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi SPJ OPD Yang Dikelola	Kota Makassar	1560 Laporan	778,510,810.80	APBD Prov		1560 Laporan	854,731,451.34	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	03	003	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah ASN Laki-Laki Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Makassar	260 Orang 390 Orang	176,881,250.0	APBD Prov		260 Orang 390 Orang	143,530,706.25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	03	004	Pengelolaan Tindak Lanjut Dan Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Jumlah Kasus TGR Yang Diproses	Kota Makassar	192 Rekomendasi 15 Kasus	472,042,518.97	APBD Prov		192 Rekomendasi 15 Kasus	477,854,071.72	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	04		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Tepat Waktu		100 %	2,474,814,925.0			100 %	2,677,887,519.04	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	04	001	Evaluasi APBD dan Pemantauan Pelaksanaan Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Gubernur Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan Jumlah SK Gubernur Terkait Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan Jumlah SK Gubernur Terkait Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	Kota Makassar	24 SK Gubernur 24 SK Gubernur 24 SK Gubernur	1,024,231,145.0	APBD Prov		24 SK Gubernur 24 SK Gubernur 24 SK Gubernur	1,102,166,149.89	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	04	002	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dibina Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Dalam Pelaksanaan APBD	Kota Makassar	24 Kabupaten/Kota 24 Kabupaten/Kota	606,585,200.0	APBD Prov		24 Kabupaten/Kota 24 Kabupaten/Kota	660,235,807.60	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	04	003	Pengelolaan Validasi Administrasi Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa	Jumlah Validasi Administrasi/Dokumen Penerima Bantuan Program Provinsi Untuk Kabupaten/Kota Jumlah Validasi Administrasi/Dokumen Penerima Bantuan Keuangan Untuk Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa	Kota Makassar	24 Kabupaten/Kota 24 Kabupaten/Kota	26,015,050.0	APBD Prov		24 Kabupaten/Kota 24 Kabupaten/Kota	26,028,245.65	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Validasi Administrasi/Dokumen Penerima Bagi Hasil Untuk Kabupaten/Kota		24 Kabupaten/Kota				24 Kabupaten/Kota		
3.00	02	02.00	04	004	Rekonsiliasi dan Monitoring Data Realisasi/Laporan Pertanggungjawaban Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Realisasi Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Lainnya dan Bantuan Desa Jumlah Pelaksanaan Monitoring Data Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa	Kota Makassar	24 Kabupaten/Kota	333,066,025.0	APBD Prov		24 Kabupaten/Kota	350,315,883.33	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	04	005	Penyusunan Profil Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan	Jumlah Buku Profil Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Yang Disusun	Kota Makassar	1 Buku	177,595,300.0	APBD Prov		1 Buku	208,994,038.90	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	04	006	Pengembangan Aplikasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Data Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Sistem Pengolahan Data Keuangan Kabupaten/Kota Yang Dikembangkan dan Dipelihara	Kota Makassar	1 Aplikasi	60,752,500.0	APBD Prov		1 Aplikasi	61,412,282.50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	04	007	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Laki-Laki Kabupaten/Kota Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Jumlah ASN Perempuan Kabupaten/Kota Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Kota Makassar	128 Orang 72 Orang	246,569,705.0	APBD Prov		128 Orang 72 Orang	268,735,111.17	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	11,410,869,600.97			100 %	8,605,906,684.90	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	457,715,250.0	APBD Prov		12 Bulan	92,259,652.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan	Kota Makassar	34 Unit 11 Unit	400,364,925.0	APBD Prov		34 Unit 11 Unit	29,163,772.78	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	70 Orang	3,102,511,250.0	APBD Prov		71 Orang	2,939,400,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengerjaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	63 Jenis ATK	1,947,141,086.54	APBD Prov		63 Jenis ATK	1,580,110,024.41	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	40 Unit	427,511,250.0	APBD Prov		40 Unit	56,567,141.46	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	4 Jenis	2,887,996,406.20	APBD Prov		4 Jenis	2,520,895,451.94	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar	1 Pameran	534,011,250.0	APBD Prov		1 Pameran	173,469,500.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	02	02.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Makassar	24 Kali	1,653,618,183.23	APBD Prov		24 Kali	1,214,041,142.31	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	3,433,487,579.01			100 %	2,582,896,710.83	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	Kota Makassar	1 Unit	238,368,670.11	APBD Prov		1 Unit	100,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	1 Unit	588,368,670.11	APBD Prov		1 Unit	459,885,977.50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	45 Unit	1,080,860,170.11	APBD Prov		45 Unit	1,013,443,889.50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	5 Unit	168,368,670.11	APBD Prov		5 Unit	40,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	60 Unit	651,796,361.41	APBD Prov		60 Unit	533,910,251.29	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	80 Unit	467,356,367.05	APBD Prov		80 Unit	335,656,592.54	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	Kota Makassar	48 Berita/Informasi 2 Sistem Informasi/Aplikasi	238,368,670.11	APBD Prov		48 Berita/Informasi 2 Sistem Informasi/Aplikasi	100,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	1,835,484,256.22			100 %	1,853,937,378.11	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar	100 Orang	58,299,096.75	APBD Prov		100 Orang	52,887,815.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang disusun dan dilaporkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang disusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Kota Makassar	39 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen	860,120,000.0	APBD Prov		39 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen	866,947,390.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	Kota Makassar	5 Jenis 13 Laporan	51,090,000.0	APBD Prov		5 Jenis 13 Laporan	52,132,676.56	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	3000 Laporan	699,939,139.97	APBD Prov		3000 Laporan	705,659,178.79	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	77 Laporan	166,036,019.50	APBD Prov		77 Laporan	176,310,317.75	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	1,238,101,515.25			100 %	1,133,994,073.29	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian	Kota Makassar	90 Laporan 120 Orang	356,301,040.25	APBD Prov		90 Laporan 125 Orang	350,488,892.11	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	02	02.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	388 Pasang	340,500,000.0	APBD Prov		403 Pasang	323,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	209 Pasang	281,400,000.0	APBD Prov		319 Pasang	226,500,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	02	02.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar	120 Orang	259,900,475.0	APBD Prov		125 Orang	234,005,181.18	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03				Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
3.00	03	01.00			Badan Kepegawaian Daerah				13,722,299,610.31				13,840,959,173.13	
3.00	03	01.00	02		PROGRAM PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI APARATUR (Prioritas)	Cakupan SDM yang ditempatkan sesuai kompetensinya (Prioritas)		75 %	2,205,000,000.0			75 %	2,205,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	02	001	Pelaksanaan pemetaan dan evaluasi kompetensi bagi pegawai ASN	Jumlah pelaksanaan pemetaan dan evaluasi kompetensi Jumlah penerapan talent management Jumlah alat ukur / bank data soal uji kompetensi	Kota Makassar	2 Kali 1 laporan 2 paket	800,000,000.0	APBD Prov		2 Kali 1 laporan 2 paket	800,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	02	002	Penyusunan metoda / alat ukur penilaian kompetensi	Jumlah alat ukur / bank data soal uji kompetensi	Kota Makassar	1 Paket	100,000,000.0	APBD Prov		1 Paket	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	02	003	Pengolahan hasil penilaian kompetensi	Jumlah rekomendasi hasil penilaian kompetensi	Kota Makassar	1 Dokumen	50,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	02	004	Digitalisasi arsip hasil assessment	Jumlah dokumen hasil assessment yang terdigitalisasi	Kota Makassar	100 Dokumen	50,000,000.0	APBD Prov		100 Dokumen	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	02	005	Pengembangan sistem talent management di lingkup Pemprov.Sulsel	Jumlah sistem yang dibangun dan diterapkan	Kota Makassar	1 Sistem	100,000,000.0	APBD Prov		1 Sistem	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	02	006	Peningkatan kompetensi assessor	Jumlah pelatihan/workshop/bimtek	Kota Makassar	10 Laporan	80,000,000.0	APBD Prov		10 Laporan	80,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	02	007	Konseling kerja peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai	Jumlah peserta yang mengikuti konseling kerja	Kota Makassar	100 Orang	75,000,000.0	APBD Prov		100 Orang	75,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	02	008	Penyusunan pedoman konseling kerja peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai	Jumlah pedoman konseling kerja	Kota Makassar	1 Buku Pedoman	50,000,000.0	APBD Prov		1 Buku Pedoman	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	02	009	Pedoman konseling dan coaching pegawai di lingkup Pemprov Sulsel	Jumlah dokumen pedoman konseling dan coaching pegawai yang disusun/dievaluasi	Kota Makassar	1 Dokumen	50,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	02	011	Sosialisasi peran assessment center dalam pengelolaan sumber daya manusia	Jumlah peserta sosialisasi peran assessment center	Kota Makassar	100 Orang	25,000,000.0	APBD Prov		100 Orang	25,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	02	012	Penataan manajemen dan infrastruktur penilaian kompetensi	Jumlah infrastruktur dan instrumen penilaian kompetensi	Kota Makassar	1 Instrumen	500,000,000.0	APBD Prov		1 Instrumen	500,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	02	013	Workshop peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai	Jumlah peserta peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai	Kota Makassar	120 Orang	25,000,000.0	APBD Prov		120 Orang	25,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	02	015	Penerapan Model Kerja ASN Pemprov.Sulsel berbasis teamwork	Jumlah OPD yang menerapkan model kerja berbasis teamwork	Kota Makassar	1 OPD	200,000,000.0	APBD Prov		1 OPD	200,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	02	016	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Model Kerja ASN	Jumlah laporan monev penerapan model kerja	Kota Makassar	1 Laporan	100,000,000.0	APBD Prov		1 Laporan	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	03		PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	% Terisinya formasi		100 %	150,000,000.0			100 %	160,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	03	001	Seleksi calon peserta pendidikan kedinasan	Jumlah pelamar calon peserta pendidikan kedinasan	Kota Makassar	1000 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		1000 Orang	110,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	03	002	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	Jumlah laporan hasil pemantauan penyelenggaraan pendidikan	Kota Makassar	1 Laporan	50,000,000.0	APBD Prov		1 Laporan	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	03	01.00	04		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KINERJA APARATUR	% Pegawai yang menerima penghargaan Jumlah pegawai yang menerima tunjangan tambahan penghasilan		100 % 26000 Orang	1,227,000,000.0			100 % 26000 Orang	1,180,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	04	002	Pelayanan administrasi pensiun, cuti, dan KGB PNS	Jumlah usulan yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	Kota Makassar	1200 Usulan	260,000,000.0	APBD Prov		1200 Usulan	200,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	04	003	Pengelolaan tunjangan penghasilan PNS berbasis kinerja	Jumlah laporan pengelolaan tunjangan berbasis kinerja	Kota Makassar	12 Laporan	50,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	04	004	Penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai	Jumlah laporan penilaian sasaran kinerja pegawai	Kota Makassar	12 Laporan	50,000,000.0	APBD Prov		0 Laporan	0.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	04	005	Penganugerahan lancana karya satya bagi PNS Pemprov.Sulsel	Jumlah PNS Pemprov.Sulsel penerima lancana karya satya 10, 20, dan 30 tahun	Kota Makassar	380 Orang	80,000,000.0	APBD Prov		380 Orang	80,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	04	006	Penyelenggaraan persemayaman bagi pegawai ASN dan keluarga lingkup Pemprov Sulsel	Jumlah pelayanan persemayaman bagi PNS yang meninggal	Kota Makassar	15 Orang	327,000,000.0	APBD Prov		15 Orang	390,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	04	007	Pembangunan / Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis IT	Jumlah sistem yang terbangun	Kota Makassar	1 Sistem	100,000,000.0	APBD Prov		1 Sistem	200,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	04	009	Bimtek penerapan sistem penilaian kinerja berbasis IT	Jumlah peserta bimtek	Kota Makassar	100 Orang	50,000,000.0	APBD Prov		100 Orang	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	04	010	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen kinerja pegawai	Jumlah rekomendasi hasil monev	Kota Makassar	1 Laporan	100,000,000.0	APBD Prov		0 Laporan	0.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	04	011	Sosialisasi pedoman manajemen kinerja dan pemberian tunjangan kinerja	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan manajemen kinerja pegawai	Kota Makassar	10000 Orang	50,000,000.0	APBD Prov		10000 Orang	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	04	013	Bimtek layanan administrasi pensiun dan cuti PNS	Jumlah peserta bimtek	Kota Makassar	100 Orang	50,000,000.0	APBD Prov		100 Orang	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	04	015	Peringatan HUT KORPRI Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Pelaksanaan Peringatan HUT Korpri	Kota Makassar	1 Kali	50,000,000.0	APBD Prov		1 Kali	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	04	016	Pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang menerima penghargaan	Kota Makassar	25 orang	60,000,000.0	APBD Prov		25 orang	60,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN APARATUR	% Pegawai yang menerima sanksi disiplin		100 %	660,000,000.0			100 %	660,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	05	001	Penanganan kasus-kasus kepegawaian	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	Kota Makassar	10 Kasus	70,000,000.0	APBD Prov		10 Kasus	70,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	05	002	Pelaksanaan sumpah / janji PNS	Jumlah pelaksanaan sumpah / janji PNS	Kota Makassar	2 Kali	35,000,000.0	APBD Prov		2 Kali	35,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	05	003	Pengelolaan administrasi izin perkawinan dan izin perceraian PNS	Jumlah permohonan izin yang ditangani	Kota Makassar	10 Permohonan	30,000,000.0	APBD Prov		10 Permohonan	30,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	05	004	Bimbingan teknis penanganan kasus-kasus kepegawaian	Jumlah peserta Bimtek	Kota Makassar	100 Orang	25,000,000.0	APBD Prov		100 Orang	25,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	05	005	Pelayanan administrasi kenaikan pangkat	Jumlah usulan yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	Kota Makassar	6000 Dokumen	365,000,000.0	APBD Prov		6000 Dokumen	365,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	05	006	Pelayanan administrasi perpindahan PNS	Jumlah penyelesaian usulan pindah pegawai yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	Kota Makassar	3857 Dokumen	110,000,000.0	APBD Prov		3857 Dokumen	110,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	05	007	Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Lingkup Pemprov.Sulsel dan Kab/Kota	Jumlah peserta rakernis pengelolaan administrasi kenaikan pangkat lingkup pemprov.sulsel	Kota Makassar	100 Orang	25,000,000.0	APBD Prov		100 Orang	25,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	06		PROGRAM PENGEMBANGAN KARIER APARATUR	% Kebutuhan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai standar yang telah ditentukan		100 %	1,300,000,000.0			100 %	1,300,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	06	001	Penataan dan pengelolaan kebijakan manajemen kepegawaian penempatan pegawai dalam JPT dan Jabatan Administrasi sesuai sistem meritokrasi SDM aparatur	Jumlah dokumen dan regulasi pembinaan karier ASN Jumlah instrumen (sistem) pola karier	Kota Makassar	1 Dokumen 1 Sistem	130,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen 1 Sistem	130,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	03	01.00	06	002	Sosialisasi kebijakan manajemen kepegawaian yang berbasis sistem meritokrasi SDM aparatur	Jumlah peserta	Kota Makassar	150 Orang	25,000,000.0	APBD Prov		150 Orang	25,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	06	003	Penataan dalam JPT secara terbuka di lingkungan Pemprov.Sulsel	Jumlah pelaksanaan pengisian jabatan secara terbuka	Kota Makassar	8 Kali	500,000,000.0	APBD Prov		8 Kali	500,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	06	004	Penataan dalam Jabatan Administrasi sesuai merit sistem di lingkungan Pemprov.Sulsel	Jumlah pelaksanaan pengisian jabatan secara merit sistem	Kota Makassar	8 Kali	100,000,000.0	APBD Prov		8 Kali	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	06	005	Penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan pejabat JPT dan JA serta kepala instansi vertikal di lingkungan dan di wilayah kerja Pemprov.Sulsel	Jumlah pelaksanaan pengambilan sumpah	Kota Makassar	8 Kali	150,000,000.0	APBD Prov		8 Kali	150,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	06	006	Pengelolaan administrasi JPTP dan JA di lingkungan pemerintah kab/kota se Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen	Kota Makassar	10 Dokumen	75,000,000.0	APBD Prov		10 Dokumen	75,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	06	007	Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Jumlah pelaksanaan ujian	Kota Makassar	2 Kali	30,000,000.0	APBD Prov		2 Kali	30,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	06	008	Pengelolaan izin belajar dan tugas belajar bagi PNS Pemprov Sulsel	Jumlah usulan yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	Kota Makassar	300 Usulan	35,000,000.0	APBD Prov		300 Usulan	35,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	06	009	Penataan PNS dalam jabatan fungsional	Jumlah penatausahaan dalam jabatan fungsional	Kota Makassar	1000 SK	130,000,000.0	APBD Prov		1000 SK	130,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	06	010	Rapat koordinasi jabatan fungsional	Jumlah peserta rakor jabatan fungsional	Kota Makassar	100 Orang	25,000,000.0	APBD Prov		100 Orang	25,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	06	011	Penyusunan rencana kebutuhan diklat ASN	Jumlah dokumen rencana kebutuhan diklat	Kota Makassar	2 Dokumen	100,000,000.0	APBD Prov		2 Dokumen	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	07		PROGRAM PERENCANAAN DAN INFORMASI ASN	Cakupan pegawai yg direkrut sesuai dengan usulan formasi CPNS Cakupan ketersediaan data dan informasi kepegawaian		100 % 100 %	630,000,000.0			100 % 100 %	630,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	07	001	Penyusunan analisis kebutuhan PNS	Jumlah dokumen analisis kebutuhan PNS	Kota Makassar	2 Dokumen	60,000,000.0	APBD Prov		2 Dokumen	60,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	07	002	Seleksi penerimaan CPNS / PPPK	Jumlah pelamar CPNS formasi umum	Kota Makassar	9300 Orang	160,000,000.0	APBD Prov		9400 Orang	160,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	07	003	Pengangkatan PNS / PPPK	Jumlah CPNS yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS Jumlah pelamar yang lulus dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS/PPK	Kota Makassar	150 Orang 150 Orang	40,000,000.0	APBD Prov		150 Orang 150 Orang	40,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	07	004	Pengelolaan data tata naskah kepegawaian	Jumlah data PNS yang dikelola	Kota Makassar	6000 Dokumen	200,000,000.0	APBD Prov		6000 Dokumen	200,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	07	005	Pengelolaan arsip digital kepegawaian	Jumlah data PNS yang dikelola	Kota Makassar	6000 Dokumen	50,000,000.0	APBD Prov		6000 Dokumen	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	07	006	Pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian	Jumlah sistem informasi yang dikelola	Kota Makassar	1 Sistem	120,000,000.0	APBD Prov		1 Sistem	120,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	5,090,299,610.31			100 %	5,205,959,173.13	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	60,000,000.0	APBD Prov		12 Bulan	60,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	10 Unit 20 Unit	25,000,000.0	APBD Prov		10 Unit 20 Unit	25,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	32 Orang	1,115,000,000.0	APBD Prov		32 Orang	1,115,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengeraman	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	60 Jenis ATK	1,300,000,000.0	APBD Prov		60 Jenis ATK	1,350,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	100 Unit	20,000,000.0	APBD Prov		100 Unit	20,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	03	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	4 Jenis	1,350,000,000.0	APBD Prov		4 Jenis	1,365,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar	2 Pameran	70,000,000.0	APBD Prov		2 Pameran	70,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Makassar	185 Kali	1,150,299,610.31	APBD Prov		190 Kali	1,200,959,173.13	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	1,760,000,000.0			100 %	1,780,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	1 Unit	300,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	300,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	25 Unit	550,000,000.0	APBD Prov		25 Unit	560,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	65 Unit	500,000,000.0	APBD Prov		70 Unit	500,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	85 Unit	110,000,000.0	APBD Prov		90 Unit	120,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Kota Makassar	3 Sistem Informasi/Aplikasi 48 Berita/Informasi	300,000,000.0	APBD Prov		3 Sistem Informasi/Aplikasi 48 Berita/Informasi	300,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	330,000,000.0			100 %	350,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar	100 Orang	10,000,000.0	APBD Prov		100 Orang	10,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	130,000,000.0	APBD Prov		4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	140,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Kota Makassar	1 Laporan 2 Jenis	100,000,000.0	APBD Prov		1 Laporan 2 Jenis	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	12 Laporan	60,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	70,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	3 Laporan	20,000,000.0	APBD Prov		3 Laporan	20,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Kota Makassar	2 Laporan	10,000,000.0	APBD Prov		2 Laporan	10,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		90 %	370,000,000.0			90 %	370,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	110 Pasang	120,000,000.0	APBD Prov		110 Pasang	120,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	03	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	221 Pasang	150,000,000.0	APBD Prov		221 Pasang	150,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar	300 Orang	100,000,000.0	APBD Prov		300 Orang	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	02.00			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				17,527,616,417.36				17,755,819,879.99	
3.00	03	02.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR (Prioritas)	Cakupan SDM Aparatur yang lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Manajerial (Prioritas)		100 %	3,112,493,647.42			100 %	3,153,071,934.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	01	001	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan kepemimpinan		180 Orang	1,095,913,000.42			200 Orang	1,098,799,900.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	01	002	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Latsar	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan Latsar		120 Orang	723,538,147.0			120 Orang	733,596,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	01	003	Pendampingan dan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Latsar dan Pelatihan Revolusi Mental	Jumlah pembinaan penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III dan Tk IV, diklat Latsar dan diklat peningkatan Revolusi mental kab/kota se susel Jumlah Rapat koordinasi pengembangan kompetensi manajerial prov. dan kab./kota		24 Kab/kota/Instansi Pembina 30 Orang	161,133,000.0			24 Kab/kota/Instansi Pembina 30 Orang	168,501,100.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	01	004	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Revolusi Mental	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan Revolusi Mental		60 Orang	209,300,000.0			60 Orang	210,500,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	01	006	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Fungsional	Jumlah aparat yang mengikuti diklat fungsional Jumlah aparat yang mengikuti diklat MOT berbasis e-learning		85 Orang 0 orang	335,000,000.0			85 Orang 0 orang	344,400,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	01	007	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Teknis	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan teknis Jumlah aparat yang mengikuti workshop pengembangan e-learning		125 Orang 0 orang	320,000,000.0			125 Orang 0 orang	328,225,434.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	01	008	Pendampingan Penyelenggaraan Rumpun Diklat Teknis dan Fungsional dan Pemerintahan Provinsi dan Kab/Kota se Susel	Jumlah pelatihan teknis , fungsional dan pemerintahan yang diselenggarakan Jumlah peserta rapat koordinasi pengembangan kompetensi teknis/fungsional dan pemerintahan		24 Kab/kota se susel/Instansi Pembina 24 Kab/kota se susel/Instansi Pembina	176,200,000.0			24 Kab/kota se susel/Instansi Pembina 24 Kab/kota se susel/Instansi Pembina	177,640,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	01	009	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Pemerintahan	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan pemerintahan		25 Orang	91,409,500.0			25 Orang	91,409,500.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	11		PROGRAM PERENCANAAN KEDIKLATAN	Cakupan ketersediaan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan		100 %	687,809,418.93			100 %	696,764,458.07	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	11	001	Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kediklatan	Jumlah sertifikat ISO 9001 2015		3 Dokumen	109,095,000.93			3 Dokumen	110,095,000.07	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	03	02.00	11	002	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan	Jumlah aparatur satuan pamong praja lingkup pemerintah prov. sulsel dan Kab/Kota Se SulSel meningkat kompetensinya ASN lingkup pemprov sulsel dan Inspektorat/ BKDD/BKPSDM Kab/Kota Se Sulawesi Selatan		40 Orang 0 orang	126,905,000.0			40 Orang 0 orang	127,905,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	11	003	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi	Jumlah peningkatan kompetensi penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi bagi ASN pemerintah Prov. SulSel Jumlah peningkatan kompetensi penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi bagi ASN pemerintah Prov. SulSel		30 Orang 40 Orang	189,809,418.0			30 Orang 40 Orang	196,764,458.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	11	005	Monitoring dan Evaluasi	Monev pra diklat pada kab./kota prov. sulsel, Monev penyelenggaraan diklat (in diklat) BPSDM prov. sulsel, Monev penyelenggaraan diklat (in diklat) Kab/kota		250 10 Angkatan dan 1 angkatan pasca diklat 24 kab/kota	262,000,000.0			250 10 Angkatan dan 1 angkatan pasca diklat 24 kab/kota	262,000,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	12		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN INOVASI PELATIHAN	Cakupan pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar ISO		100 %	657,311,426.83			100 %	665,869,392.73	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	12	001	Promosi dan Publikasi Pelatihan	Jumlah promosi dan publikasi pelatihan		2 Dokumen	210,070,926.83			2 Dokumen	213,929,442.73	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	12	002	Membangun Kemitraan dan Jejaring	Jumlah lembaga kemitraan jejaring		24 Mou/PKS/KSO	134,401,000.0			24 Mou/PKS/KSO	134,401,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	12	004	Pelaksanaan Inovasi Pelatihan dan Penguatan Kelembagaan	Jumlah peserta pelaksanaan inovasi pelatihan dan penguatan kelembagaan		25 Orang	108,889,500.0			25 Orang	110,588,950.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	12	005	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi	Jumlah pengelola media instruksional Jumlah peserta diklat Pengembangan talent management		25 Orang 25 Orang	203,950,000.0			125 Orang 25 Orang	206,950,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	7,343,409,081.67			100 %	7,439,017,710.93	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik		12 Bulan	1,430,388,081.67			12 Bulan	1,463,596,710.93	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan		13 Unit 13 Unit	21,800,000.0			13 Unit 13 Unit	22,200,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS		68 Orang	1,549,740,000.0			68 Orang	1,611,740,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia		30 Jenis ATK	592,651,000.0			30 Jenis ATK	592,651,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	03	02.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		5 Unit	80,000,000.0			5 Unit	80,000,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		40 Jenis	3,218,830,000.0			40 Jenis	3,218,830,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		50 Kali	450,000,000.0			50 Kali	450,000,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	3,368,993,947.37			100 %	3,412,857,075.48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara		41 Unit	1,960,338,947.37			41 Unit	1,984,202,075.48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		13 Unit	570,280,000.0			13 Unit	580,280,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		76 Unit	838,375,000.0			76 Unit	848,375,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	1,594,705,312.13			100 %	1,615,467,820.02	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah		50 Orang	160,075,000.13			50 Orang	163,947,500.02	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	637,819,293.0			4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	644,709,320.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi		10 Laporan 12 Jenis	225,145,000.0			10 Laporan 12 Jenis	225,145,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		12 Laporan	460,350,019.0			12 Laporan	470,350,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun		2 Laporan	98,500,000.0			2 Laporan	98,500,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun		4 Laporan	12,816,000.0			4 Laporan	12,816,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	762,893,583.01			100 %	772,771,488.76	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun		120 Orang 4 Laporan	762,893,583.01			120 Orang 4 Laporan	772,771,488.76	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	04				Penelitian dan Pengembangan									
3.00	04	01.00			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				32,493,514,737.94				27,679,539,307.19	
3.00	04	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN (Prioritas)	% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah (Prioritas)		20 %	2,832,716,752.81			20 %	2,893,882,932.54	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	01	003	Penguatan Kluster Inovasi	Jumlah Produk Komoditas Unggulan Daerah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kluster Inovasi	Provinsi Sulawesi Selatan	5 Produk 1 Rekomendasi	230,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	5 Produk 1 Rekomendasi	230,000,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	01	008	Pengembangan Riset pada Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan Balitbangda Prov. Sulsel	Jumlah Data dan Informasi Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Provinsi Sulawesi Selatan	1 rekomendasi	256,267,297.83	APBD Prov	opd parsial	1 rekomendasi	256,323,795.98	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	01	009	Laboratorium Inovasi	Persentase Kebijakan Inovasi di Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	70 % 20 %	300,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	80 % 20 %	300,000,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	01	014	Revitalisasi Kebun Raya Pucak	Jumlah Kebun Raya	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Kebun Raya	2,046,449,454.98	APBD Prov	opd parsial	1 Kebun Raya	2,107,559,136.56	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	02		PROGRAM KELITBANGAN DAN PEMANFAATAN IPTEK DAERAH	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil Kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah		9 Rekomendasi	847,200,000.0			9 Rekomendasi	847,200,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	02	002	Pemeliharaan Benih Eksplorasi dan Tanaman Koleksi	Jumlah Spesies Benih Hasil Eksplorasi Jumlah Pemeliharaan Tanaman Koleksi	Provinsi Sulawesi Selatan	50 Spesies 300 pohon	150,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	50 Spesies 500 pohon	150,000,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	02	003	Eksplorasi Tumbuhan Sulawesi	Jumlah Tumbuhan Sulawesi	Provinsi Sulawesi Selatan	70 Spesies	100,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	80 Spesies	100,000,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	02	007	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik	Provinsi Sulawesi Selatan	1 rekomendasi	150,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 rekomendasi	150,000,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	02	008	Pengembangan Kebijakan dan Isu-isu Strategis Sektor Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Quick Research Isu-isu Strategis Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Peraturan/Program Pemerintah Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	1 rekomendasi 1 rekomendasi	100,000,000.0	APBD Prov	opd parsial	1 rekomendasi 1 rekomendasi	100,000,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	04	01.00	02	013	Peningkatan Kualitas Kelitbangan Utama	Jumlah Rancangan Rekomendasi Dewan Riset Daerah (DRD) Jumlah Rancangan Kelitbangan Rekomendasi Majelis Pertimbangan (MP) Jumlah Persidangan Tim Pengendali Mutu (TPM)	Provinsi Sulawesi Selatan	4 rancangan 2 rancangan 4 sidang	347,200,000.0	APBD Prov	opd parsial	4 rancangan 2 rancangan 4 sidang	347,200,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	05				Sekretariat Dewan									
3.00	05	01.00			Sekretariat DPRD				240,514,695,499.36				245,203,444,926.29	
3.00	05	01.00	01		PROGRAM PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT	% Usulan reses yang diakomodir		100 %	35,702,068,373.19			100 %	36,018,329,625.25	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	01	001	Reses DPRD	Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.	Kab/Kota	3 Kegiatan	31,931,482,137.19	APBD Prov		3 Kegiatan	32,183,530,350.91	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	01	002	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Kab/Kota	7 Kegiatan	3,770,586,236.0	APBD Prov		7 Kegiatan	3,834,799,274.34	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	02		PROGRAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	% Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD		100 %	27,856,831,390.61			100 %	29,185,809,757.05	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	02	001	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD	Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD	Kota Makassar	18 Kegiatan	6,551,012,760.0	APBD Prov		18 Kegiatan	6,586,114,036.0	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	02	002	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Musyawarah	Kota Makassar	4 Kegiatan	1,915,087,555.01	APBD Prov		4 Kegiatan	1,958,791,537.89	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	02	003	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi	Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi	Kota Makassar	11 Kegiatan	14,676,867,300.0	APBD Prov		11 Kegiatan	15,685,654,030.0	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	02	004	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Makassar	6 Kegiatan	1,825,904,960.0	APBD Prov		6 Kegiatan	2,008,495,456.0	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	02	005	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Anggaran	Kota Makassar	4 Kegiatan	2,496,499,972.0	APBD Prov		4 Kegiatan	2,546,149,969.20	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	02	006	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kehormatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kehormatan	Kota Makassar	4 Kegiatan	391,458,843.60	APBD Prov		4 Kegiatan	400,604,727.96	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Cakupan anggota DPRD yang kompeten dibidangnya		100 %	18,961,895,664.63			100 %	19,182,733,640.04	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	03	001	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Legislasi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Legislasi	Kota Makassar	4 Kegiatan	14,149,895,440.0	APBD Prov		4 Kegiatan	14,264,884,984.0	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	03	002	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Anggaran	Kota Makassar	4 Kegiatan	2,991,616,118.70	APBD Prov		4 Kegiatan	3,040,777,730.57	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	03	003	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Pengawasan	Kota Makassar	2 Kegiatan	815,094,105.93	APBD Prov		2 Kegiatan	821,251,925.47	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	05	01.00	03	004	Penyediaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Diketahui Status Kesehatan	Kota Makassar	85 Orang	1,005,290,000.0	APBD Prov		85 Orang	1,055,819,000.0	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	04		PROGRAM PRODUK HUKUM DAERAH	Jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya		16 Ranperda	119,151,844,668.69			16 Ranperda	120,968,806,465.17	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	04	001	Pembentukan Rancangan Perda/Perda APBD	Jumlah Rancangan Perda Menjadi Perda APBD	Kota Makassar	3 Rancangan Perda	11,960,206,974.0	APBD Prov		3 Rancangan Perda	12,556,227,671.40	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	04	002	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur	Jumlah Keputusan DPRD terkait LKPJ Gubernur	Kota Makassar	1 Keputusan	1,481,761,744.79	APBD Prov		1 Keputusan	1,531,715,248.88	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	04	003	Pembentukan Rancangan Perda/Perda Non APBD	Jumlah Rancangan Perda Non APBD yang dibahas	Kota Makassar	13 Rancangan Perda	20,307,120,949.90	APBD Prov		13 Rancangan Perda	20,837,833,044.89	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	04	004	Penyebarluasan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang disosialisasikan	Kab/Kota	20 Kegiatan	85,402,755,000.0	APBD Prov		20 Kegiatan	86,043,030,500.0	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	21,216,382,630.43			100 %	21,492,612,544.72	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	1,996,770,057.04	APBD Prov		12 Bulan	2,001,038,713.99	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	34 Unit 35 Unit	123,420,000.0	APBD Prov		34 Unit 35 Unit	135,762,000.0	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	209 Orang	7,964,498,092.48	APBD Prov		214 Orang	8,010,947,901.73	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	185 Jenis ATK	3,638,520,264.12	APBD Prov		190 Jenis ATK	3,702,372,290.53	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	13 Unit	343,595,780.55	APBD Prov		13 Unit	377,955,358.61	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	3 Jenis	4,724,932,074.12	APBD Prov		3 Jenis	4,847,425,281.53	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Kota Makassar	1 Pameran	278,905,000.0	APBD Prov		1 Pameran	306,795,500.0	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Makassar	303 Kali	2,145,741,362.12	APBD Prov		310 Kali	2,110,315,498.33	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	11,033,596,977.31			100 %	11,677,250,568.08	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	Kota Makassar	6 Unit	987,262,242.56	APBD Prov		6 Unit	1,001,282,359.83	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	5 Unit	2,241,091,690.95	APBD Prov		5 Unit	2,750,200,860.05	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	69 Unit	1,607,402,970.95	APBD Prov		69 Unit	1,628,143,268.05	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Kota Makassar	260 Unit	2,729,326,690.95	APBD Prov		260 Unit	2,752,259,360.05	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	5 Unit	798,600,000.0	APBD Prov		5 Unit	808,460,000.0	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	141 Unit	1,160,521,690.95	APBD Prov		141 Unit	1,176,573,860.05	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	20 Unit	1,007,241,690.95	APBD Prov		20 Unit	1,037,965,860.05	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	05	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Kota Makassar	1 Sistem Informasi/Aplikasi 82 Berita/Informasi	502,150,000.0	APBD Prov		1 Sistem Informasi/Aplikasi 84 Berita/Informasi	522,365,000.0	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	1,696,221,164.68			100 %	1,718,305,373.62	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar	2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	219,615,000.0	APBD Prov		2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	231,038,592.47	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Kota Makassar	16 Laporan 2 Jenis	1,261,952,164.68	APBD Prov		16 Laporan 2 Jenis	1,268,147,381.15	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	12 Laporan	108,900,000.0	APBD Prov		12 Laporan	109,790,000.0	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	2 Laporan	42,834,000.0	APBD Prov		2 Laporan	45,117,400.0	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Kota Makassar	13 Laporan	62,920,000.0	APBD Prov		13 Laporan	64,212,000.0	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	4,895,854,629.82			100 %	4,959,596,952.36	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kota Makassar	123 Orang 11 Laporan	108,927,132.42	APBD Prov		126 Orang 11 Laporan	113,976,705.22	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	919 Pasang	2,921,904,347.40	APBD Prov		922 Pasang	2,964,094,782.14	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	351 Pasang	1,435,473,150.0	APBD Prov		357 Pasang	1,449,020,465.0	Sekretariat DPRD
3.00	05	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar	127 Orang	429,550,000.0	APBD Prov		130 Orang	432,505,000.0	Sekretariat DPRD
3.00	06				Sekretariat Daerah									
3.00	06	01.00			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				21,238,297,091.71				21,514,812,324.67	
3.00	06	01.00	18		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Peningkatan jumlah kerjasama informasi aktif media massa		65 Media Massa	1,386,059,760.46			70 Media Massa	1,404,105,775.92	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3.00	06	01.00	18	001	Pelayanan Publikasi Kegiatan Pemprov Sulsel	jumlah Publikasi Berita jumlah Publikasi Berita jumlah Publikasi Berita		1800 berita/publikasi 1800 berita/publikasi 1800 berita/publikasi	520,000,000.0		opd parsial	2000 berita/publikasi 2000 berita/publikasi 2000 berita/publikasi	524,105,775.92	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						jumlah Publikasi Berita		1800 berita/publikasi				2000 berita/publikasi		
3.00	06	01.00	18	002	Publikasi Media Nasional	jumlah kerja sama dengan media nasional jumlah kerja sama dengan media nasional jumlah kerja sama dengan media nasional jumlah kerja sama dengan media nasional		2 media 2 media 2 media 2 media	360,000,000.0		opd parsial	3 media 3 media 3 media	370,000,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3.00	06	01.00	18	003	Penyiapan Bahan Informasi Media Cetak	jumlah advetorial jumlah advetorial jumlah advetorial jumlah advetorial		60 advetorial 60 advetorial 60 advetorial 60 advetorial	420,000,000.0		opd parsial	70 advetorial 70 advetorial 70 advetorial 70 advetorial	425,000,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3.00	06	01.00	18	004	Penyiapan Bahan Dokumentasi	jumlah jenis bahan dokumentasi jumlah jenis bahan dokumentasi jumlah jenis bahan dokumentasi jumlah jenis bahan dokumentasi		3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis	86,059,760.46		opd parsial	3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis	85,000,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3.00	06	01.00	21		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEHUMASAN MEDIA SOSIAL	Cakupan Teknologi Informasi yang digunakan		100 %	416,285,664.84			100 %	421,705,559.25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3.00	06	01.00	21	001	Pengelolaan dan Penyaringan Informasi	jumlah media sosial dan website jumlah media sosial dan website jumlah media sosial dan website jumlah media sosial dan website		5 berita 5 berita 5 berita 5 berita	316,285,664.84		opd parsial	5 berita 5 berita 5 berita 5 berita	311,705,559.25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3.00	06	01.00	21	002	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah peserta koordinasi kehumasan Jumlah peserta koordinasi kehumasan Jumlah peserta koordinasi kehumasan Jumlah peserta koordinasi kehumasan		300 orang 300 orang 300 orang 300 orang	100,000,000.0		opd parsial	300 orang 300 orang 300 orang 300 orang	110,000,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3.00	06	01.01			Biro Hukum				4,174,377,126.98				4,215,706,411.86	
3.00	06	01.01	07		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM DAERAH	Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi		12 Perda 50 Perda	618,394,074.43			12 Perda 50 Perda	612,786,827.79	Biro Hukum
3.00	06	01.01	07	005	Pemantauan Hasil Klarifikasi dan Evaluasi Perda Kab/Kota Wilayah I	Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap produk hukum daerah	Kota Makassar	12 Kabupaten/Kota	50,000,000.0	APBD Prov		12 Kabupaten/Kota	50,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	07	006	Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I	Jumlah pelaksanaan Pengkajian Produk Hukum Kabupaten/Kota	Kota Makassar	12 Kabupaten/Kota	60,000,000.0	APBD Prov		12 Kabupaten/Kota	60,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	07	007	Evaluasi/Asistensi Ranperda Kab/Kota Wilayah I	Jumlah dokumen Sinkronisasi Antara Kebijakan Nasional dan Daerah	Kota Makassar	120 Dokumen	61,000,000.0	APBD Prov		120 Dokumen	61,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	07	008	Evaluasi/Asistensi Ranperda Kab/Kota Wilayah II	Jumlah dokumen Sinkronisasi Antara Kebijakan Nasional dan Daerah	Kota Makassar	120 Dokumen	65,000,000.0	APBD Prov		120 Dokumen	65,000,000.0	Biro Hukum

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.01	07	009	Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah II	Jumlah dokumen Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	12 Dokumen	25,000,000.0	APBD Prov		12 Dokumen	25,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	07	010	Rakontek Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah I Dan Wilayah II Kabupaten / Kota	Jumlah peserta Rakontek Binwas Produk Hukum Kabupaten / Kota	Kota Makassar	24 Orang	43,700,000.0	APBD Prov		24 Orang	43,700,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	07	011	Pemantauan Hasil Fasilitas Dan Evaluasi Perda Kab/Kota Untuk Wilayah II	Jumlah Pembinaan Terhadap Produk Hukum Daerah	Kota Makassar	12 Dokumen	23,000,000.0	APBD Prov		12 Dokumen	23,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	07	013	Pembinaan Dokumentasi Melalui JDIIH	Jumlah Jaringan Informasi Hukum	Kota Makassar	1 Program	42,450,000.0	APBD Prov		1 Program	41,450,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	07	015	Pengkajian Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Kab/Kota Wilayah I	Jumlah dokumen Sinkronisasi Antara Kebijakan Nasional dan Daerah	Kota Makassar	10 Dokumen	45,000,000.0	APBD Prov		10 Dokumen	41,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	07	016	Pengkajian Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Kab/Kota Wilayah II	Jumlah dokumen sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah	Kota Makassar	10 Dokumen	45,000,000.0	APBD Prov		10 Dokumen	45,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	07	017	Rapat Koordinasi isu- Isu Aktual Tentang Hukum	Jumlah peserta rapat koordinasi Isu-Isu Aktual Tentang Hukum	Kota Makassar	24 Orang	95,994,074.43	APBD Prov		24 Orang	95,386,827.79	Biro Hukum
3.00	06	01.01	07	018	Sistem Informasi Pengendalian Evaluasi dan Konsultasi Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota Wil I dan II	Jumlah kab/kota fasilitas dan evaluasi secara online	Kota Makassar	24 Kabupaten/Kota	20,000,000.0	APBD Prov		24 Kabupaten/Kota	20,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	07	019	FGD Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Jumlah pelaksanaan FGD Penyusunan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	Kota Makassar	24 Kabupaten/Kota	42,250,000.0	APBD Prov		24 Kabupaten/Kota	42,250,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	08		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM RANGKA PEMANTAPAN ADVOKASI DAN PENGAMANAN YURIDIS KEROV BIJAKAN PEMERINTAHAN	% LHP aparat fungsional prov dan kab/kota yang ditindaklanjuti		100 %	677,342,553.13			100 %	663,296,993.93	Biro Hukum
3.00	06	01.01	08	002	Advokasi hukum dengan Konsultan Hukum dan Pakar Hukum	Jumlah Advokasi Hukum dengan Konsultan Hulum dan Pakar Hukum yang dilaksanakan	Kota Makassar	22 Kasus/ Perkara	76,000,000.0	APBD Prov		22 Kasus/ Perkara	86,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	08	003	Pemantapan Tugas Yudisial Pemda	Jumlah advokasi hukum dengan konsultan hukum dan pakar hukum yang terlaksana	Kota Makassar	22 Kasus / Perkara	477,342,553.13	APBD Prov		22 Kasus / Perkara	453,296,993.93	Biro Hukum
3.00	06	01.01	08	004	Tindak Lanjut Hasil Temuan Aparat Pengawasan Fungsional	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan	Kota Makassar	22 Kasus / Perkara	52,000,000.0	APBD Prov		22 Kasus / Perkara	52,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	08	006	Pengelolaan Pengaduan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Kota Makassar	15 Dokumen	42,000,000.0	APBD Prov		15 Dokumen	42,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	08	009	Forum Komunikasi Bagian Hukum Pemerintah Daerah Prov. Sulsel	Jumlah Peserta Forum Komunikasi Bantuan Hukum	Kota Makassar	24 Kabupaten/Kota	30,000,000.0	APBD Prov		24 Kabupaten/Kota	30,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	09		PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN PRODUK HUKUM MELALUI SOSIALISASI DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan		2 Jenis	374,387,609.03			2 Jenis	375,876,895.87	Biro Hukum
3.00	06	01.01	09	007	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Di Bidang Hukum	Peserta bintek kapasitas aparat pemda dibidang hukum	Kota Makassar	24 Orang	79,950,000.0	APBD Prov		24 Orang	79,950,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	09	009	Monitoring pelaksanaan RANHAM Provinsi Sulsel	Jumlah kab/kota yang dimonitoring dalam rangka pelaksanaan RAN HAM	Kota Makassar	24 Kab/Kota	75,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	75,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	09	010	Penyuluhan hukum tentang produk hukum daerah	Jumlah peserta penyuluhan	Kota Makassar	24 Orang	43,450,000.0	APBD Prov		24 Orang	43,450,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	09	011	Bimtek Legal Drafting Tentang Peraturan Daerah	Jumlah peserta Bimtek Legal Drafting Tentang Peraturan Daerah	Kota Makassar	24 Orang	68,600,000.0	APBD Prov		24 Orang	68,600,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	09	015	Bimtek Penyusunan/perancangan Rancangan Peraturan Gubernur	Jumlah peserta bintek perancangan/penyusunan peraturan gubernur	Kota Makassar	24 Orang	65,600,000.0	APBD Prov		24 Orang	65,600,000.0	Biro Hukum

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.01	09	016	Workshop Tentang Hukum Tata Pemerintahan Daerah	Jumlah Peserta Workshop Tata Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	24 Orang	41,787,609.03	APBD Prov		24 Orang	43,276,895.87	Biro Hukum
3.00	06	01.01	10		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM LEGISLASI DAERAH	Cakupan rancangan produk hukum/produk hukum (Perda,Pergub,Keppub, dan PKS) yang dikaji dan finalisasi		100 %	674,534,931.49			100 %	682,483,883.71	Biro Hukum
3.00	06	01.01	10	003	Pemantapan/Harmonisasi,Pembahasan dan Penetapan Ranperda	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Yang Diharmonisasi Dari Pembahasan Hingga Penetapan Ranperda	Kota Makassar	15 Dokumen	250,374,949.0	APBD Prov		15 Dokumen	250,374,949.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	10	004	Pengkajian Rancangan Peraturan Gubernur	Jumlah rancangan Peraturan Gubernur yang dikaji	Kota Makassar	50 Dokumen	106,333,334.0	APBD Prov		50 Dokumen	106,333,334.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	10	005	Pengkajian Naskah Keputusan Gubernur	Jumlah rancangan Keputusan Gubernur yang dikaji	Kota Makassar	1000 Naskah	75,034,982.49	APBD Prov		1000 Naskah	82,983,934.71	Biro Hukum
3.00	06	01.01	10	006	Pengkajian Rancangan MOU/Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	Jumlah rancangan Mou/Nota kesepahaman/Nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang dikaji	Kota Makassar	6 Dokumen	30,000,000.0	APBD Prov		6 Dokumen	30,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	10	008	Pra Ranperda Propemperda dan Evaluasinya	Jumlah rancangan peraturan daerah yang diharmonisasi dari pembahasan hingga penetapan ranperda	Kota Makassar	10 Dokuman	167,791,666.0	APBD Prov		10 Dokuman	167,791,666.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	10	020	Otentifikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen Otentifikasi Produk Hukum Daerah	Kota Makassar	1000 Dokumen	45,000,000.0	APBD Prov		1000 Dokumen	45,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	1,466,297,799.36			100 %	1,484,607,307.04	Biro Hukum
3.00	06	01.01	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	4 Unit 4 Unit	39,000,000.0	APBD Prov		4 Unit 4 Unit	30,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	22 Orang	800,000,000.0	APBD Prov		22 Orang	800,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	20 Jenis ATK	248,648,899.68	APBD Prov		20 Jenis ATK	254,803,653.52	Biro Hukum
3.00	06	01.01	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	2 Jenis	208,648,899.68	APBD Prov		2 Jenis	199,803,653.52	Biro Hukum
3.00	06	01.01	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Makassar	40 Kali	170,000,000.0	APBD Prov		45 Kali	200,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	268,420,159.54			100 %	301,654,503.52	Biro Hukum
3.00	06	01.01	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	4 Unit	192,420,159.54	APBD Prov		4 Unit	225,654,503.52	Biro Hukum
3.00	06	01.01	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	7 Unit	51,000,000.0	APBD Prov		7 Unit	51,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	41 Unit	25,000,000.0	APBD Prov		48 Unit	25,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	30,000,000.0			100 %	30,000,000.0	Biro Hukum

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.01	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	10,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	10,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Kota Makassar	1 Laporan	20,000,000.0	APBD Prov		1 Laporan	20,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	65,000,000.0			100 %	65,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	41 Pasang	35,000,000.0	APBD Prov		41 Pasang	35,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.01	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	4 Pasang	30,000,000.0	APBD Prov		4 Pasang	30,000,000.0	Biro Hukum
3.00	06	01.02			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				2,786,565,636.54				2,822,845,750.83	
3.00	06	01.02	11		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENATAAN PEMERINTAHAN	Cakupan ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu Rata-Rata Capaian SPM Perangkat Daerah Rata-Rata Capaian SPM Kabupaten/Kota Cakupan Fasilitasi Administrasi Pengangkatan Kepala Daerah, Pengangkatan dan Pergantian Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota		100 % 100 % 100 % 100 %	600,126,717.20			100 % 100 % 100 % 100 %	607,940,158.09	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	11	001	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah jenis dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu ke DPRD	Kota Makassar	2 jenis	71,355,940.0	APBD Prov		2 jenis	72,225,005.56	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	11	002	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Yang Dihilangkan Jumlah Laporan Yang Dihilangkan Jumlah aplikasi e-LPPD yang tersedia	Kota Makassar	2 Dokumen 1 Dokumen 0 Aplikasi	164,068,346.0	APBD Prov		2 Dokumen 1 Dokumen 0 Aplikasi	164,935,601.0	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	11	004	Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Lingkup Pemprov Sulsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	Kota Makassar	168 Orang	40,374,340.08	APBD Prov		168 Orang	41,242,500.09	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	11	007	Monitoring Penyusunan LPPD/LKPJ Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	Kota Makassar	24 Kabupaten/ Kota	50,817,440.04	APBD Prov		24 Kabupaten/ Kota	51,685,600.08	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	11	008	Koordinasi dan Fasilitasi Kunjungan Kerja	Jumlah kunjungan kerja anggota MPR, DPR/DPD RI, Watimpres dan DPRD Provinsi lain yang difasilitasi	Kota Makassar	160 Kunjungan kerja	6,686,440.08	APBD Prov		200 Kunjungan kerja	7,554,600.09	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	11	009	Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan	Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dalam rangka HUT kab/kota	Kota Makassar	24 Kab/kota di Sulsel	62,967,440.0	APBD Prov		24 Kab/kota di Sulsel	63,835,600.09	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	11	010	Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring, Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi dan Kabbupaten/Kota se Sulawesi Selatan	Jumlah Kab/kota yang dimonitoring dan dievaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nva	Kota Makassar	24 Kab/kota	30,167,440.0	APBD Prov		24 Kab/kota	31,035,600.09	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah SKPD Provinsi yang dimonitoring dan dievaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya		6 SKPD Provinsi				6 SKPD Provinsi		
3.00	06	01.02	11	011	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kab/Kota Yang dimonitoring dan dievaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota	24 Kab/Kota	45,401,790.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	46,269,950.09	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	11	014	Penyusunan Administrasi Pejabat Negara dan Daerah	Fasilitasi SK usulan pengangkatan Bupati dan Wakil, Wakilkota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Penerbitan SK pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota Fasilitasi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan KDH/WKDH	Kota Makassar	30 SK 30 SK 30 PAW	128,287,541.0	APBD Prov		30 SK 30 SK 30 PAW	129,155,701.0	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	13		PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Cakupan Koordinasi Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah		100 %	143,969,356.90			100 %	145,843,787.79	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	13	001	Penataan Penyelenggaraan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Jumlah peserta rapat koordinasi peran Gubernur di tingkat Prov. Sulsel	Kota Makassar	72 orang	143,969,356.90	APBD Prov		72 orang	145,843,787.79	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	14		PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH	Peningkatan jumlah kerjasama daerah		22 MoU	40,380,556.61			24 MoU	40,906,297.40	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	14	001	Pelayanan Administrasi Kerjasama Daerah	Jumlah MoU/Pks yang difasilitasi	Kota Makassar	40 MoU/Pks	40,380,556.61	APBD Prov		40 MoU/Pks	40,906,297.40	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	22		PROGRAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KAB/KOTA	% Segement Batas Wilayah yang terfasilitasi		100 %	75,877,391.17			100 %	76,865,288.38	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	22	001	Penegasan Batas Antara Kabupaten/ Kota dan Provinsi	Tertib Administrasi Penegasan Batas Daerah Kab/Kota	Kota Makassar	24 Kab/Kota	75,877,391.17	APBD Prov		24 Kab/Kota	76,865,288.38	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	1,648,575,685.23			100 %	1,670,039,566.61	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	24 Orang	734,729,000.0	APBD Prov		24 Orang	740,094,970.0	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	60 Jenis ATK	115,527,341.23	APBD Prov		60 Jenis ATK	120,893,222.61	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Kota Makassar	7 Jenis	427,548,372.0	APBD Prov		7 Jenis	432,914,432.0	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Makassar	145 Kali	370,770,972.0	APBD Prov		170 Kali	376,136,942.0	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	263,567,552.79			100 %	266,999,110.55	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	10 Unit	174,639,932.0	APBD Prov		11 Unit	175,783,786.55	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	12 Unit	33,714,686.79	APBD Prov		14 Unit	34,858,538.0	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	11 Unit	55,212,934.0	APBD Prov		13 Unit	56,356,786.0	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.02	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	14,068,376.64			100 %	14,251,542.01	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.02	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 8 Dokumen	14,068,376.64	APBD Prov		4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 8 Dokumen	14,251,542.01	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.00	06	01.06			Biro Kesejahteraan Rakyat				6,364,607,079.23				7,421,432,743.64	
3.00	06	01.06	02		PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL (Prioritas)	% Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas) % Penurunan Penduduk Buta Aksara AlQuran (Prioritas) % Penurunan Kejahatan terhadap Kesulitan (Prioritas)		1.25 % 10 % 10 %	1,642,184,053.79			1 % 10 % 10 %	2,102,300,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	02	001	Pengembangan Tahfidz di Sulsel	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Tahfidz di Sulsel	Dalam dan Luar Sulsel	100 orang	480,000,000.0	APBD Prov		100 orang	500,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	02	002	Peningkatan Kualitas Guru Mengaji di Sulsel	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Guru Mengaji di Sulsel	Sulsel	360 orang	253,200,000.0	APBD Prov		400 orang	375,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	02	003	Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Sulsel	Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Sulsel	Kota Makassar	80 orang	17,600,000.0	APBD Prov		80 orang	17,600,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	02	004	Rapat Koordinasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sulawesi Selatan	Jumlah orang yang mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sulawesi Selatan	Kota Makassar	80 orang	20,000,000.0	APBD Prov		80 orang	20,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	02	005	Pembentukan Warga Peduli HIV dan AIDS di Sulsel	Jumlah Warga Peduli HIV dan AIDS di Sulsel		500 orang	120,000,000.0	APBD Prov		600 orang	200,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	02	007	Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Sulawesi Selatan	Jumlah orang yang mengikuti Keg. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Sulawesi Selatan	Kota Makassar	50 orang	27,200,000.0	APBD Prov		50 orang	27,200,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	02	008	Rapat Koordinasi Penanggulangan Pergaulan Bebas di Sulawesi Selatan	Jumlah orang yang mengikuti Keg. Rapat Koordinasi Penanggulangan Pergaulan Bebas di Sulawesi Selatan		50 orang	12,500,000.0	APBD Prov		50 orang	12,500,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	02	009	Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Pergaulan Bebas di Sulawesi Selatan	Jumlah jenis media informasi penanggulangan pergaulan bebas yang dihasilkan		4 jenis	106,684,053.79	APBD Prov		4 jenis	200,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.06	02	010	Bimbingan Belajar Baca Alquran Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Belajar Baca Alquran Bagi ASN Lingkup Pemerintah Prov. Sulsel		200 orang	75,000,000.0	APBD Prov		200 orang	100,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	02	011	Penyusunan Produk Hukum terkait Pergaulan Bebas/Penanggulangan Narkoba di Sulsel	terbentuknya produk hukum pergaulanbebas/penanggulangan narkoba di Sulsel		1 buah	200,000,000.0	APBD Prov		1 buah	250,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	02	012	Inovasi Keaksaraan Fungsional Bisa Baca Tulis Alquran	Terlaksananya Kegiatan Inovasi Keaksaraan Fungsional Bisa Baca Tulis Alquran		1 Keg	330,000,000.0	APBD Prov		1 Keg	400,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	05		PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG KEAGAMAAN	% Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan		20 %	1,890,816,005.10			20 %	2,080,816,005.10	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	05	001	Monitoring & Evaluasi Bantuan Sarana Rumah Ibadah, Lembaga Keagamaan & Kegiatan Keagamaan	Jumlah ASN yang melakukan Monitoring dan evaluasi Bantuan Sarana Rumah Ibadah, Lembaga Keagamaan dan Kegiatan Keagamaan	Dalam dan Luar Sulsel	25 orang/kali	15,000,000.0	APBD Prov		25 orang/kali	15,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	05	002	Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Terselenggaranya MTQ/STQ Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	sulsel	1 keg	559,000,000.0	APBD Prov		1 keg	569,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	05	003	Pengiriman Kafilah Pada MTQ / STQ Tingkat Nasional	Jumlah Qari-Qariah dan Pendamping Utusan Sulsel yang difasilitasi pada Event MTQ / STQ Nasional		30 orang	605,000,000.0	APBD Prov		75 orang	615,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	05	006	Rekrutmen dan Pembekalan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) Prov. Sulsel	Jumlah Calon Anggota Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)	Kota Makassar	150 orang	430,000,000.0	APBD Prov		150 orang	600,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	05	009	Temu Koordinasi Dai dan Pemuka Agama	jumlah orang yang mengikuti Kegiatan temu Koordinasi Dai dan Pemuka Agama	Kota Makassar	50 orang	10,800,000.0	APBD Prov		50 orang	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	05	012	Pembinaan dan Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Jumlah bulan kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Kota Makassar	12 bulan	129,600,000.0	APBD Prov		12 bulan	129,600,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	05	013	Optimalisasi Peran dan Fungsi Sarana Peribadatan	Jumlah orang yang mengikuti Keg. Optimalisasi Peran dan Fungsi Sarana Peribadatan	Kota Makassar	50 orang	10,800,000.0	APBD Prov		50 orang	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	05	014	Temu Koordinasi Peningkatan Manajemen Masjid	Jumlah Orang Yang Mengikuti Keg. Temu Koordinasi Peningkatan Manajemen Masjid		50 orang	10,800,000.0	APBD Prov		50 orang	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	05	015	Pengembangan Kapasitas Muallaf di Sulsel	Jumlah orang yang mengikuti Keg Pengembangan Kapasitas Muallaf di Sulsel	Kota Makassar	50 orang	13,200,000.0	APBD Prov		50 orang	13,200,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	05	019	Pembinaan dan Peningkatan paduan suara Gerejawi	Jumlah orang yang mengikuti Keg Pembinaan dan Peningkatan Paduan Suara Gerejawi		50 orang	11,200,000.0	APBD Prov		50 orang	11,200,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	05	020	Pengelolaan Gedung LPTQ Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah bulan pemeliharaan Gedung LPTQ Prov. Sulsel	Kota Makassar	12 bulan	63,016,005.10	APBD Prov		12 bulan	63,016,005.10	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	05	022	Rapat Koordinasi Kerukunan Beragama di Sulsel	Jumlah orang yang mengikuti Keg Rapat Koordinasi Kerukunan Beragama di Sulsel	Kota Makassar	50 orang	10,800,000.0	APBD Prov		50 orang	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.06	05	023	Pembinaan dan Penataan Lembaga Penyelenggara Ibadah Umroh	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan dan Penataan Lembaga Penyelenggara Ibadah Umroh	Kota Makassar	50 orang	10,800,000.0	APBD Prov		50 orang	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	05	024	Pembinaan Mental dan Spritual ASN	Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Mental dan Spritual ASN		50 orang	10,800,000.0	APBD Prov		50 orang	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	06		PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	% Pelaksanaan Koordinasi dibidang kepemudaan, keolahragaan, pendidikan dan seni budaya % Pelaksaaan koordinasi dibidang perlindungan dan kerawanan sosial % Pelaksanaan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga		20 % 20 % 20 %	697,368,744.0			20 % 20 % 20 %	877,368,744.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	06	001	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah orang yang mengikuti Keg. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar	60 orang	10,400,000.0	APBD Prov		60 orang	10,400,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	06	002	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan GERMAS di Sulawesi Selatan	Jumlah orang yang mengikuti Keg. Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan GERMAS di Sulawesi Selatan	Kota Makassar	50 orang	10,400,000.0	APBD Prov		50 orang	10,400,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	06	003	Forum Dialog Pemerintah dengan Organisasi Pemuda	Jumlah orang yang mengikuti Keg. Forum Dialog Pemerintah dengan Organisasi Pemuda	Kota Makassar	60 orang	13,800,000.0	APBD Prov		60 orang	13,800,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	06	004	Pengadaan ATM Beras Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah ATM yang diperdakan	Sulsel	10 Unit	455,000,000.0	APBD Prov		15 Unit	635,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	06	005	Temu Koordinasi Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Sulsel	Jumlah orang yang mengikuti Temu Koordinasi Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Sulsel	Kota Makassar	50 orang	10,800,000.0	APBD Prov		50 orang	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	06	006	Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan	Jumlah orang yang mengikuti Keg. Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kota Makassar	50 orang	10,800,000.0	APBD Prov		50 orang	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	06	007	Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak	Jumlah orang yang mengikuti Keg. Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak	Kota Makassar	50 orang	10,800,000.0	APBD Prov		50 orang	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	06	008	Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Keluarga Berencana	Jumlah orang yang mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Keluarga Berencana	Kota Makassar	50 orang	10,400,000.0	APBD Prov		50 orang	10,400,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	06	013	Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani Bagi PNS Lingkup Kantor Gubernur	Jumlah Jasa Tenaga Instruktur Pemandu SKI	Kota Makassar	1 orang	20,168,744.0	APBD Prov		1 orang	20,168,744.0	Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.06	06	014	Temu Koordinasi Kebijakan Keolahragaan di Sulawesi Selatan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kegiatan Temu Koordinasi Kebijakan Keolahragaan di Sulawesi Selatan		50 orang	10,800,000.0	APBD Prov		50 orang	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	06	015	Temu Koordinasi Kebijakan Kepemudaan di Sulawesi Selatan	Jumlah orang yang mengikuti Temu Koordinasi Kebijakan Kepemudaan di Sulawesi Selatan	Kota Makassar	50 orang	10,800,000.0	APBD Prov		50 orang	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	06	017	Penguatan Manajemen Kesekretariatan Tim Pembina UKS/M Kab/Kota se Sulsel	Jumlah orang yang mengikuti Penguatan Manajemen Kesekretariatan Tim Pembina UKS/M Kab/Kota se Sulsel	Kota Makassar	50 orang	10,800,000.0	APBD Prov		50 orang	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	06	018	Rapat Koordinasi Tim Pembina UKS/M Kab/Kota Se Sulsel	Jumlah orang yang mengikuti keg Rapat Koordinasi Tim Pembina UKS/M Kab/Kota se Sulsel	Kota Makassar	100 orang	12,400,000.0	APBD Prov		100 orang	12,400,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	06	019	Pembinaan dan Penilaian UKS/M Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Penilaian UKS/M Tingkat Prov. Sulsel	Dalam dan luar daerah	24 Kab/Kota	100,000,000.0	APBD Prov		24 Kab/Kota	100,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	1,992,620,680.61			100 %	2,166,034,668.99	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	5 Unit 10 Unit	15,000,000.0	APBD Prov		5 Unit 10 Unit	15,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	22 Orang	800,000,000.0	APBD Prov		22 Orang	800,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	25 Jenis ATK	200,000,000.0	APBD Prov		25 Jenis ATK	220,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	100 Unit	10,000,000.0	APBD Prov		100 Unit	10,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		2 Jenis	650,000,000.0	APBD Prov		2 Jenis	700,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		120 Kali	317,620,680.61	APBD Prov		120 Kali	421,034,668.99	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	108,682,446.80			100 %	161,588,431.40	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	1 Unit	50,000,000.0	APBD Prov		0 Unit	0.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	16 Unit	20,182,446.80	APBD Prov		16 Unit	20,588,431.40	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	10 Unit	27,500,000.0	APBD Prov		10 Unit	130,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	20 Unit	6,000,000.0	APBD Prov		20 Unit	6,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Kota Makassar	1 Sistem Informasi/Aplikasi 60 Berita/Informasi	5,000,000.0	APBD Prov		1 Sistem Informasi/Aplikasi 60 Berita/Informasi	5,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.06	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	29,935,148.93			100 %	30,324,894.15	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar	80 Orang	10,800,000.0	APBD Prov		80 Orang	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	6,135,148.93	APBD Prov		4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	6,524,894.15	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	Kota Makassar	3 Laporan 3 Jenis	2,500,000.0	APBD Prov		3 Laporan 3 Jenis	2,500,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	12 Laporan	5,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	5,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	2 Laporan	3,000,000.0	APBD Prov		2 Laporan	3,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Kota Makassar	1 Laporan	2,500,000.0	APBD Prov		1 Laporan	2,500,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	3,000,000.0			100 %	3,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.06	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kota Makassar	50 Orang 50 Laporan	3,000,000.0	APBD Prov		50 Orang 50 Laporan	3,000,000.0	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.00	06	01.07			Biro Organisasi				6,756,196,807.64				6,844,160,137.57	
3.00	06	01.07	01		PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN (Prioritas)	Cakupan fasilitas penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kab/kota (Prioritas)		100 %	1,725,942,609.91			100 %	1,748,413,781.71	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	01	001	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2016 Jumlah dokumen keterangan/penjelasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2016 Jumlah dokumen layanan administrasi penataan kelembagaan Provinsi dan Pemerintah Pusat		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 15 Dokumen	590,000,000.0			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 15 Dokumen	600,000,000.0	Biro Organisasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.07	01	002	Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sulse	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam penataan kelembagaan	24 Kabupaten/Kota se Sulse	1 Dokumen	408,000,000.0			1 Dokumen	410,400,000.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	01	003	Pembinaan dan Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sulse		1 Dokumen 1 Dokumen	160,000,000.0			1 Dokumen 1 Dokumen	181,687,583.71	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	01	004	Pembinaan dan Penataan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota se Sulse yang dibina penyusunan tugas dan fungsi Jumlah dokumen tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sulse		24 Kab/Kota 53 Dokumen	125,902,906.91			24 Kab/Kota 53 Dokumen	98,002,026.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	01	005	Pembinaan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan penyusunan standar kompetensi jabatan Kab /Kota se Sulse Jumlah standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sulse yang disusun		24 Kab/Kota 53 PD	230,000,000.0			24 Kab/Kota 53 PD	242,043,675.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	01	006	Pembinaan dan Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan penyusunan Evaluasi Jabatan Kab/Kota se Sulse Jumlah pembinaan dan penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sulse		24 Kab/Kota 53 PD	212,039,703.0			24 Kab/Kota 53 PD	216,280,497.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	17		PROGRAM PENGUATAN KETATALAKSANAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov. Sulse Cakupan Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulse Cakupan Fasilitasi Penataan Tatalaksana Umum Lingkup Prov. Sulse Cakupan Fasilitasi Penataan Tatalaksana Umum Lingkup Prov.Sulse Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov.Sulse Cakupan Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulse		53 OPD Prov 53 OPD Prov 53 OPD Prov 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota 142 UPT 34 Cabang Dinas 24 Kab/Kota	1,550,915,120.23			53 OPD Prov 53 OPD Prov 53 OPD Prov 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota 142 UPT 34 Cabang Dinas 24 Kab/Kota	1,571,107,495.06	Biro Organisasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.07	17	007	Penyelenggaraan Tatalaksana Umum	Jumlah pembinaan penyelenggaraan Tatalaksana Umum Kab/Kota se Sulsel Jumlah kelompok Budaya Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		24 Kab/Kota 53 PD	149,395,905.0			24 Kab/Kota 53 PD	151,237,655.06	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	17	008	Pengumpulan Data, Penyusunan Profil Pejabat dan Pengadaan Buku Kerja Pemerintah Prov. Sulsel	Jumlah Buku Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1000 Buku		1000 Buku Kerja	61,200,000.0			1000 Buku Kerja	62,424,000.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	17	009	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (ID Card)	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai (ID Card) PNS Lingkup Pemerintah Prov. Sulsel yang tersedia		2400 ID Card	90,000,000.0			2510 ID Card	94,500,000.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	17	010	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penerapan Tata Naskah Dinas lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel	Jumlah pembinaan, fasilitasi dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terlaksananya fasilitasi penerapan Tata Naskah Dinas lingkup pemerintah Kab/Kota se Sulsel Jumlah pembinaan, fasilitasi dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terlaksananya fasilitasi penerapan Tata Naskah Dinas lingkup Perangkat Daerah Pemprov Sulsel		24 Kab/Kota 53 PD	153,000,000.0			24 Kab/Kota 53 PD	156,060,000.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	17	011	Penilaian Abdibaktitani bagi UKPP berprestasi Bidang Pertanian Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel	Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) bidang pertanian Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel yang dilakukan Penilaian Abdibaktitani nasional lingkup perangkat daerah provinsi Sulsel Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) bidang pertanian Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel yang dilakukan Penilaian Abdibaktitani nasional lingkup pemerintah kab/kota		3 PD 24 Kab/Kota	128,520,000.0			3 PD 24 Kab/Kota	131,090,400.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	17	012	Pembinaan dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulsel	Jumlah Kab/Kota se Sulsel yang dibina dalam penyusunan peta proses bisnis Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dibina dalam penyusunan peta proses bisnis		24 Kab/Kota 53 PD	393,720,000.0			24 Kab/Kota 53 PD	401,594,400.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	17	013	Penilaian Unit Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	Jumlah Inovasi yang diikutsertakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional		80 Inovasi	214,200,000.0			80 Inovasi	218,484,000.0	Biro Organisasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Inovasi yang diikutsertakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Jumlah Unit Pelayanan yang difasilitasi dalam penyusunan proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup pemerintah provinsi Jumlah Unit Pelayanan yang difasilitasi dalam penyusunan proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup kabupaten/kota Jumlah Unit Pelayanan yang difasilitasi dalam rangka mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik lingkup pemerintah provinsi Jumlah Unit Pelayanan yang difasilitasi dalam rangka mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik lingkup kabupaten/kota Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dikembangkan/direplikasi tingkat provinsi Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dikembangkan/direplikasi tingkat nasional		30 Inovasi 53 PD 24 Kab/Kota 53 PD 24 Kab/Kota 2 Inovasi 2 Inovasi				30 Inovasi 53 PD 24 Kab/Kota 53 PD 24 Kab/Kota 2 Inovasi 2 Inovasi		
3.00	06	01.07	17	014	Pembinaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibina dalam memahami Reformasi Birokrasi Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2024 Laporan penyelenggaraan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2019 Jumlah peserta Bimbingan Penyelenggaraan Pelaksanaan reformasi Birokrasi Kab/Kota		53 PD 24 Kab/Kota 1 Dokumen 1 Laporan 48 Orang	151,980,000.0			53 PD 24 Kab/Kota 1 Dokumen 1 Laporan 48 Orang	155,019,600.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	17	015	Pembinaan dan Evaluasi Unit Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan dan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Jumlah Unit Pelayanan dan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang telah dibina dan difasilitasi dalam penyusunan SPP, Maklumat Pelayanan dan SKM se Sulsel		1 Laporan	200,099,215.23			1 Laporan	191,017,440.0	Biro Organisasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Unit Pelayanan dan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang telah dievaluasi dalam penyusunan SPP, Maklumat Pelayanan dan SKM se Sulsel Jumlah Unit Pelayanan Publik dan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang telah menyusun dan menerapkan SPP, Maklumat Pelayanan dan SKM se Sulsel sesuai pedoman Terseleenggaranya Forum Konsultasi Publik Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan		1 Laporan 1 Laporan 1 laporan 0 1 Dokumen				1 Laporan 1 Laporan 1 laporan 0 1 Dokumen		
3.00	06	01.07	17	016	Penilaian/ Penyusunan Indeks Pelayanan Publik Prov. Sulsel	Jumlah Unit Pelayanan Publik terkait penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik Indeks pelayanan publik Provinsi Sulawesi Selatan		1 Laporan/Dokumen 1 Dokumen	8,800,000.0			1 Laporan/Dokumen 1 Dokumen	9,680,000.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	29		PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	Cakupan Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Cakupan Pembinaan SAKIP Kab/Kota		53 OPD Prov 24 Kab/Kota	253,003,979.22			53 OPD Prov 24 Kab/Kota	256,298,002.94	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	29	017	Pembinaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Prov. Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi SAKIP Jumlah PD Provinsi Sulsel yang difasilitasi penerapan SAKIP Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun 2018 Jumlah Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2018		24 Kab/Kota 53 PD 1 Laporan 1 Laporan	206,593,979.22			24 Kab/Kota 53 PD 1 Laporan 1 Laporan	207,567,502.94	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	29	019	Pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP)	Jumlah aplikasi E-SAKIP yang dipelihara dan dikelola		1 Aplikasi	46,410,000.0			1 Aplikasi	48,730,500.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	2,368,043,674.40			100 %	2,473,623,005.72	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Kota Makassar	12 Orang	508,708,888.0			12 Orang	600,000,000.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	80 Jenis ATK	458,892,181.0			80 Jenis ATK	454,422,617.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar	50 Unit	14,025,000.0			50 Unit	15,427,500.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		20 Jenis	720,345,605.40			20 Jenis	730,824,551.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		40 Kali	666,072,000.0			40 Kali	672,948,337.72	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	604,035,887.64			100 %	526,651,181.0	Biro Organisasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.07	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kota Makassar	1 Unit	87,711,199.64			0 Unit	0.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		6 Unit	180,000,000.0			6 Unit	185,000,000.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	12 Unit	299,092,500.0			12 Unit	305,074,350.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	80 Unit	37,232,188.0			80 Unit	36,576,831.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	56,160,000.0			100 %	67,392,000.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	21,600,000.0			4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	25,920,000.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		1 Laporan	34,560,000.0			1 Laporan	41,472,000.0	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	198,095,536.24			100 %	200,674,671.14	Biro Organisasi
3.00	06	01.07	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun		550 Orang 1 Laporan	198,095,536.24			550 Orang 1 Laporan	200,674,671.14	Biro Organisasi
3.00	06	01.08			Biro Umum				71,368,607,037.94				72,297,801,451.01	
3.00	06	01.08	23		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI NASKAH/SURAT KEDINASAN	Cakupan jumlah administrasi ketatausahaan dan naskah dinas yang dikelola		20 Jenis	2,435,794,265.0			20 Jenis	2,767,794,265.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	23	001	Penyimpanan, pengelolaan, dan pemeliharaan arsip naskah kedinasan	Jumlah arsip, naskah kedinasan pemerintah provinsi sulawesi selatan yang tersimpan, terkelola dan terpelihara melalui biro umum dan perlengkapan	Provinsi Sulawesi Selatan	55902 naskah	17,000,000.0	APBD Prov		55937 naskah	19,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	23	002	Pengadaan undangan dan atribut perayaan hari - hari tertentu pemerintah provinsi sulawesi selatan	Jumlah undangan dan atribut perayaan hari tertentu yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	50400 lembar	63,000,000.0	APBD Prov		50400 lembar	73,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	23	003	Pengendalian dan pendistribusian naskah	Jumlah naskah / undangan pemerintah provinsi sulawesi selatan yang terkendali dan terdistribusi	Provinsi Sulawesi Selatan	12785 naskah	35,000,000.0	APBD Prov		12785 naskah	45,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	23	004	Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan aparat fungsional	Jumlah laporan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Provinsi Sulawesi Selatan	3 laporan	25,000,000.0	APBD Prov		3 laporan	30,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	23	005	Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	Jumlah aparat yang melakukan pelayanan administrasi ketatausahaan	Provinsi Sulawesi Selatan	176 Aparatur	2,140,794,265.0	APBD Prov		180 Aparatur	2,440,794,265.0	Biro Umum

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.08	23	006	Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Administrasi Kedinasan	Jumlah jenis pembinaan pengembangan pelayanan administrasi aparatur yang dilaksanakan	Provinsi Sulawesi Selatan	4 jenis	155,000,000.0	APBD Prov		4 jenis	160,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	24		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH	Cakupan jumlah pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan		2160 Pelayanan	23,044,294,000.0			2170 Pelayanan	23,486,294,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	24	001	Sosialisasi / bimbingan teknis pelayanan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengadaan barang jasa SETDA	Jumlah peserta sosialisasi / bimbingan teknis pelayanan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengadaan barang jasa SETDA	Provinsi Sulawesi Selatan	510 Orang	622,000,000.0	APBD Prov		510 Orang	624,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	24	002	Penyediaan kebersihan dan keindahan kantor / rumah jabatan	Jumlah gedung perkantoran, rumah jabatan dan halaman yang terlayani kebersihan keindahannya	Provinsi Sulawesi Selatan	14 bangunan	2,700,290,000.0	APBD Prov		14 bangunan	2,800,290,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	24	003	Pembuatan / pemeliharaan taman kantor / rumah jabatan	Jumlah pertamanan yang dibuat / dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	2 pertamanan	810,000,000.0	APBD Prov		2 pertamanan	820,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	24	004	Penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah jenis jasa perlengkapan dan jenis jasa peralatan kantor yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	14 jenis	2,500,000,000.0	APBD Prov		14 jenis	2,700,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	24	005	Penyediaan spanduk / umbul - umbul peringatan hari tertentu	Jumlah spanduk / umbul - umbul yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	1500 buah	120,000,000.0	APBD Prov		1500 buah	140,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	24	006	Pembuatan / pemeliharaan area parkir dan sarana olahraga kantor gubernur	Jumlah area parkir dan area sarana olahraga yang tersedia dan terjamin keamanannya	Provinsi Sulawesi Selatan	1 area	470,000,000.0	APBD Prov		1 area	480,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	24	007	Rehabilitasi sedang / berat gedung persewaan	Jumlah gedung persewaan yang direhabilitasi	Provinsi Sulawesi Selatan	1 gedung	400,000,000.0	APBD Prov		1 gedung	400,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	24	008	Peningkatan kualitas pelayanan gedung / tempat persewaan	Jumlah gedung / tempat persewaan yang terjamin pelayanannya	Provinsi Sulawesi Selatan	5 gedung / tempat	450,000,000.0	APBD Prov		5 gedung / tempat	450,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	24	009	Rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan / rumah dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas yang di rehabilitasi	Provinsi Sulawesi Selatan	3 unit	2,000,000,000.0	APBD Prov		3 unit	2,000,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	24	010	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Jumlah gedung perkantoran yang direncanakan direhabilitasi	Provinsi Sulawesi Selatan	10 gedung	3,000,000,000.0	APBD Prov		10 gedung	3,000,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	24	011	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang bertanggung asuransinya	Provinsi Sulawesi Selatan	2 jenis	762,004,000.0	APBD Prov		2 jenis	862,004,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	24	012	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah acara kegiatan perjamuan makanan dan minuman yang di rencanakan	Provinsi Sulawesi Selatan	890 acara kegiatan	8,800,000,000.0	APBD Prov		900 acara kegiatan	8,800,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	24	013	Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	Jumlah pegawai yang melakukan koordinasi dan konsultasi antar lembaga pelayan kerumahtanggaan dan perlengkapan	Provinsi Sulawesi Selatan	137 pegawai	410,000,000.0	APBD Prov		139 pegawai	410,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	25		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KETATAUSAHAAN DAN INVENTARISASI ASET SEKRETARIAT DAERAH	Cakupan jumlah barang dan jasa yang dikelola		1068 Unit	202,000,000.0			1088 Unit	202,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	25	001	Perencanaan kebutuhan barang dan jasa	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang dan jasa yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	2 dokumen	25,000,000.0	APBD Prov		2 dokumen	25,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	25	002	Pengendalian rencana tahunan pemeliharaan barang	Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan barang yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	2 dokumen	15,000,000.0	APBD Prov		2 dokumen	15,000,000.0	Biro Umum

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.08	25	003	Pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan	Jumlah dokumen pemeriksaan dan penerimaan barang/pekerjaan yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	1034 dokumen	20,000,000.0	APBD Prov		1054 dokumen	20,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	25	004	Pengendalian dan pendistribusian barang SETDA Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen administrasi pengendalian dan pendistribusian barang yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	10 dokumen	17,000,000.0	APBD Prov		10 dokumen	17,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	25	005	Inventarisasi barang lingkup sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen penginventarisasian barang yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	9 dokumen	25,000,000.0	APBD Prov		9 dokumen	25,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	25	006	Penyediaan data informasi pengelolaan barang daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	9 laporan	100,000,000.0	APBD Prov		9 laporan	100,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	26		PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH	Cakupan jumlah dokumen administrasi penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah		15295 Dokumen	1,960,000,000.0			15395 Dokumen	1,960,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	26	001	Sosialisasi / bimbingan teknis pelayanan ketatausahaan keuangan SETDA	Jumlah peserta sosialisasi / bimbingan teknis pelayanan ketatausahaan keuangan SETDA	Provinsi Sulawesi Selatan	73 Orang	500,000,000.0	APBD Prov		71 Orang	500,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	26	002	Fasilitasi dan verifikasi, penyusunan APBD SETDA Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen RKA, DPA yang disusun pada kegiatan fasilitasi dan verifikasi penyusunan APBD SETDA	Provinsi Sulawesi Selatan	36 dokumen	235,000,000.0	APBD Prov		36 dokumen	235,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	26	003	Pengelolaan data progres RAPBD - APBD SETDA Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan progres RAPBD-APBD SETDA Provinsi Sulawesi Selatan yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	9 laporan	99,000,000.0	APBD Prov		9 laporan	99,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	26	004	Pengelolaan administrasi perbendaharaan SETDA Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen administrasi perbendaharaan keuangan yang dikelola	Provinsi Sulawesi Selatan	14044 dokumen	350,000,000.0	APBD Prov		14094 dokumen	350,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	26	005	Pengelolaan data administrasi daftar gaji SETDA Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah unit kerja yang terkoordinasi dalam pembuatan daftar gaji setiap bulannya	Provinsi Sulawesi Selatan	9 unit kerja	75,000,000.0	APBD Prov		9 unit kerja	75,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	26	006	Pengelolaan data dan pengujian penagihan surat perintah membayar SETDA Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen SPM penagihan pembayaran yang dikelola dan teruji	Provinsi Sulawesi Selatan	969 dokumen	115,000,000.0	APBD Prov		1009 dokumen	115,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	26	007	Pengendalian dan verifikasi surat pertanggungjawaban SETDA Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah unit kerja yang terlayani akan pengendalian dan verifikasi SPInya	Provinsi Sulawesi Selatan	9 unit kerja	30,000,000.0	APBD Prov		9 unit kerja	30,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	26	008	Penyusunan pelaporan dan analisa APBD SETDA Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan yang tersedia pada bagian keuangan SETDA Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan	27 laporan	256,000,000.0	APBD Prov		27 laporan	256,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	26	009	Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pegawai yang melakukan koordinasi dan konsultasi pada lembaga pengelolaan keuangan daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	41 Pegawai	300,000,000.0	APBD Prov		43 Pegawai	300,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	27		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Cakupan jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		11654 Pelayanan	9,595,687,069.0			11774 Pelayanan	9,520,881,483.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	27	001	Pengadaan pakaian kedinasan dan pakaian khusus hari-hari tertentu KDH-WKDH	Jumlah pakaian KDH-WKDH yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas kedinasan	Provinsi Sulawesi Selatan	20 Pasang	110,000,000.0	APBD Prov		20 Pasang	110,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	27	002	Koordinasi konsultasi KDH-WKDH dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah perjalanan dinas KDH-WKDH	Provinsi Sulawesi Selatan	187 kali	2,900,000,000.0	APBD Prov		197 kali	2,900,000,000.0	Biro Umum

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.08	27	003	Penyelenggaraan kerumahtangga rumah jabatan KDH-WKDH	Jumlah perjamuan kerumahtangga KDH-WKDH	Provinsi Sulawesi Selatan	2880 perjamuan	3,605,000,000.0	APBD Prov		2880 perjamuan	3,605,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	27	004	Pelayanan penerimaan tamu pemerintah provinsi sulawesi selatan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah penyelenggaraan acara kegiatan KDH-WKDH dalam penerimaan tamu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan	1520 Acara kegiatan	2,980,687,069.0	APBD Prov		1530 Acara kegiatan	2,905,881,483.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	18,464,267,632.0			100 %	18,564,267,632.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Bulan	7,200,000,000.0	APBD Prov		12 Bulan	7,300,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Provinsi Sulawesi Selatan	337 Orang	7,564,267,632.0	APBD Prov		339 Orang	7,564,267,632.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	5 Jenis ATK	400,000,000.0	APBD Prov		5 Jenis ATK	400,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Provinsi Sulawesi Selatan	2000 Kali	3,300,000,000.0	APBD Prov		2010 Kali	3,300,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	14,596,564,071.94			100 %	14,706,564,071.01	Biro Umum
3.00	06	01.08	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	3 Unit	500,000,000.0	APBD Prov		3 Unit	500,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Unit	1,100,000,000.0	APBD Prov		10 Unit	1,100,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	51	005	Pengadaan Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah mobil jabatan/dinas yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Unit	2,500,000,000.0	APBD Prov		2 Unit	2,500,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	319 Unit	4,546,564,071.94	APBD Prov		322 Unit	4,546,564,071.01	Biro Umum
3.00	06	01.08	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	200 Unit	2,300,000,000.0	APBD Prov		189 Unit	2,400,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Unit	310,000,000.0	APBD Prov		4 Unit	320,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	175 Unit	2,300,000,000.0	APBD Prov		169 Unit	2,300,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Unit	490,000,000.0	APBD Prov		4 Unit	490,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	Provinsi Sulawesi Selatan	3 Sistem Informasi/Aplikasi	550,000,000.0	APBD Prov		3 Sistem Informasi/Aplikasi	550,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	1,070,000,000.0			100 %	1,090,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	710 Pasang	490,000,000.0	APBD Prov		720 Pasang	500,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.08	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	427 Pasang	580,000,000.0	APBD Prov		427 Pasang	590,000,000.0	Biro Umum
3.00	06	01.10			Biro Administrasi Pimpinan				7,908,539,131.13				6,036,117,235.84	
3.00	06	01.10	18		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Peningkatan jumlah kerjasama informasi aktif media massa		65 Media Massa	2,386,059,760.46			70 Media Massa	1,404,105,775.92	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	18	001	Pelayanan Publikasi Kegiatan Pemprov Sulsel	jumlah Publikasi Berita		1800 berita/publikasi	620,000,000.0		opd parsial	2000 berita/publikasi	524,105,775.92	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	18	002	Publikasi Media Nasional	jumlah kerja sama dengan media nasional		2 media	560,000,000.0		opd parsial	3 media	370,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	01.10	18	003	Penyiapan Bahan Informasi Media Cetak	jumlah advetorial		60 advetorial	520,000,000.0		opd parsial	70 advetorial	425,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	18	004	Penyiapan Bahan Dokumentasi	jumlah jenis bahan dokumentasi		3 jenis	686,059,760.46		opd parsial	3 jenis	85,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	19		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	Cakupan ketersediaan layanan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah		3 Jenis	976,615,412.16			3 Jenis	584,122,744.05	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	19	001	Pelayanan Tamu Pemerintah Provinsi Sulsel	jumlah tamu yang dilayani		1000 orang/tamu	256,615,412.16		opd parsial	1250 orang/tamu	154,122,744.05	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	19	002	Koordinasi Antar Lembaga/Instansi	jumlah acara yang dikordinasikan		2250 kegiatan	360,000,000.0		opd parsial	2500 kegiatan	160,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	19	003	Protokol Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah acara /kegiatan		2250 acara/kegiatan	360,000,000.0		opd parsial	2500 acara/kegiatan	270,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	3,150,265,849.84			100 %	3,191,281,214.28	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan		11 Unit 11 Unit	27,000,000.0		opd parsial	11 Unit 11 Unit	27,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah jasa Tenaga Non PNS		45 Orang	1,550,000,000.0		opd parsial	48 Orang	1,550,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia		26 Jenis ATK	385,000,000.0		opd parsial	26 Jenis ATK	390,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		20 Unit	30,265,849.84		opd parsial	20 Unit	30,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	50	007	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia		34 Jenis	250,000,000.0		opd parsial	34 Jenis	250,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		2 Jenis	200,000,000.0		opd parsial	2 Jenis	200,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran		1 Pameran	338,000,000.0		opd parsial	1 Pameran	350,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		700 Kali	370,000,000.0		opd parsial	750 Kali	394,281,214.28	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	710,632,349.07			100 %	264,025,691.50	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara		3 Unit	150,000,000.0		opd parsial	3 Unit	50,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		11 Unit 11 Unit	160,632,349.07		opd parsial	11 Unit 11 Unit	164,025,691.50	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		7 Unit	230,000,000.0		opd parsial	9 Unit	30,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		14 Unit	170,000,000.0		opd parsial	16 Unit	20,000,000.0	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	330,741,819.11			100 %	335,047,962.43	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan		4 Dokumen 1 Dokumen	330,741,819.11		opd parsial	4 Dokumen 1 Dokumen	335,047,962.43	Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		2 Dokumen 4 Dokumen				2 Dokumen 4 Dokumen		
3.00	06	01.10	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik % ASN berkinerja sangat baik % ASN berkinerja sangat baik		100 % 100 % 100 %	354,223,940.49			100 % 100 % 100 %	257,533,847.66	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun		550 Orang 1 Laporan	198,095,536.24		opd parsial	550 Orang 1 Laporan	200,674,671.14	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	01.10	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia		230 Pasang	156,128,404.25		opd parsial	250 Pasang	56,859,176.52	Biro Administrasi Pimpinan
3.00	06	02.00			Badan Keuangan dan Aset Daerah				32,431,804,805.22				29,744,407,185.86	
3.00	06	02.00	20		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan ketersediaan data aset yang akurat Cakupan Aset (tanah) milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sertifikat Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan		6 Jenis 57 % 28 %	2,032,000,000.0			6 Jenis 62 % 32 %	2,219,946,280.84	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	06	02.00	20	001	Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah sertifikat aset tetap tanah	Kota Makassar	30 Sertifikat	500,000,000.0	APBD Prov		30 Sertifikat	500,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	06	02.00	20	002	Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Hasil Kajian Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan	Kota Makassar	4 Kajian	396,000,000.0	APBD Prov		4 Kajian	440,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	06	02.00	20	003	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	Kota Makassar	58 Laporan	93,000,000.0	APBD Prov		58 Laporan	97,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	06	02.00	20	004	Pengembangan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipelihara dan dikembangkan	Kota Makassar	1 Sistem Informasi/Aplikasi	175,000,000.0	APBD Prov		1 Sistem Informasi/Aplikasi	205,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	06	02.00	20	005	Penertiban Aset Bermasalah	Jumlah Aset Bermasalah yang Teridentifikasi	Kota Makassar	11 Aset	280,000,000.0	APBD Prov		13 Aset	301,446,280.84	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	06	02.00	20	006	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	Kota Makassar	7 Dokumen	20,000,000.0	APBD Prov		7 Dokumen	23,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	06	02.00	20	008	Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa	Jumlah standar harga barang dan jasa yang disusun	Kota Makassar	2 Standar	6,500,000.0	APBD Prov		2 Standar	7,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	06	02.00	20	009	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang ditetapkan Status Penggunaannya Jumlah Kendaraan Bantuan Hibah yang difasilitasi	Kota Makassar	58 OPD 0 Kendaraan	12,000,000.0	APBD Prov		58 OPD 0 Kendaraan	13,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	06	02.00	20	013	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penghapusan barang milik daerah	Kota Makassar	1 Dokumen	73,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	82,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	06	02.00	20	014	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan BMD	Kota Makassar	58 OPD	6,000,000.0	APBD Prov		58 OPD	7,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	06	02.00	20	015	Pengamanan Fisik Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Jenis Pengamanan Fisik Aset Tanah dan Bangunan	Kota Makassar	2 Jenis	250,000,000.0	APBD Prov		2 Jenis	300,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	02.00	20	016	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan BMD yang disusun	Kota Makassar	1 Jenis	64,000,000.0	APBD Prov		1 Jenis	72,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	06	02.00	20	018	Revaluasi/Appraisal Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang direvaluasi/dinilai	Kota Makassar	1 Dokumen	150,000,000.0	APBD Prov		1 Dokumen	165,000,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	06	02.00	20	019	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Persediaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Persediaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar	1 Laporan	6,500,000.0	APBD Prov		1 Laporan	7,500,000.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	06	04.00			Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan				9,107,469,325.52				8,218,233,613.82	
3.00	06	04.00	03		PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	% Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan rencana pembangunan sumber dana APBD % Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan rencana pembangunan sumber dana APBN		100 % 100 %	1,517,952,998.62			100 % 100 %	828,602,461.85	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	03	001	Penyusunan Informasi Belanja Daerah Prov. SULSEL	Jumlah Laporan penyusunan Informasi Belanja Daerah Prov. Sulsel Jumlah Laporan penyusunan Informasi Belanja Daerah Prov. Sulsel Jumlah Laporan penyusunan Informasi Belanja Daerah Prov. Sulsel Jumlah Laporan penyusunan Informasi Belanja Daerah Prov. Sulsel		12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan	233,152,998.62		opd parsial	12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan	134,000,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	03	002	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Prov. SULSEL	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Prov. Sulsel Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Prov. Sulsel Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Prov. Sulsel Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Prov. Sulsel		12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan	215,000,000.0		opd parsial	12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan	117,000,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	03	003	Pengukuran Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Prov. SULSEL	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Prov. Sulsel Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Prov. Sulsel Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Prov. Sulsel Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Prov. Sulsel		4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan	264,500,000.0		opd parsial	4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan	165,199,999.85	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	03	004	Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Prov. SULSEL	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan DAK Prov. Sulsel Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan DAK Prov. Sulsel Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan DAK Prov. Sulsel		4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	179,500,000.0		opd parsial	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	80,000,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan DAK Prov. Sulsel		4 Laporan				4 Laporan		
3.00	06	04.00	03	005	Pengendalian dan Pemantauan Program Prioritas Daerah Prov. SULSEL	Jumlah Laporan Pemantauan Program-Program Prioritas Daerah Prov. Sulse Jumlah Laporan Pemantauan Program-Program Prioritas Daerah Prov. Sulse Jumlah Laporan Pemantauan Program-Program Prioritas Daerah Prov. Sulse Jumlah Laporan Pemantauan Program-Program Prioritas Daerah Prov. Sulse Jumlah Laporan Pemantauan Program-Program Prioritas Daerah Prov. Sulse		4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan	225,000,000.0		opd parsial	4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan	130,000,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	03	006	Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah Prov. SULSEL	Jumlah Laporan Terkait Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Terkait Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Terkait Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Terkait Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah		4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	275,300,000.0		opd parsial	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	175,500,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	03	007	Sosialisasi Pergub Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Prov. SULSEL	Jumlah ASN Lingkup Prov. Sulsel yang memahami Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD baik perempuan dan laki-laki Jumlah ASN Lingkup Prov. Sulsel yang memahami Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD baik perempuan dan laki-laki Jumlah ASN Lingkup Prov. Sulsel yang memahami Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD baik perempuan dan laki-laki Jumlah ASN Lingkup Prov. Sulsel yang memahami Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD baik perempuan dan laki-laki		150 Peserta Perempuan dan Laki-Laki 150 Peserta Perempuan dan Laki-Laki 150 Peserta Perempuan dan Laki-Laki 150 Peserta Perempuan dan Laki-Laki	125,500,000.0		opd parsial	150 Peserta Perempuan dan Laki-Laki 150 Peserta Perempuan dan Laki-Laki 150 Peserta Perempuan dan Laki-Laki 150 Peserta Perempuan dan Laki-Laki	26,902,462.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	16		PROGRAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN EKONOMI	Peningkatan Jumlah Lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing		8 Lembaga	3,577,752,622.75			10 Lembaga	3,325,635,681.29	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	16	001	Pembentukan dan Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah TPAKD yang dibentuk dan yang dikukuhkan Jumlah TPAKD yang dibentuk dan yang dikukuhkan		6 kab/kota 6 kab/kota	266,400,250.75		opd parsial	2 kab/kota 2 kab/kota	270,400,250.29	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	04.00	16	002	Koordinasi Kelembagaan Keuangan dalam mendukung Ekonomi Inklusif	Jumlah Rapat Koordinasi		4 Kali	115,211,372.0		opd parsial	4 Kali	125,094,431.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
						Jumlah Rapat Koordinasi		4 Kali				4 Kali		
3.00	06	04.00	16	003	Literasi dan Inklusi Produk Jasa Keuangan	Jumlah Peserta yang di Edukasi		300 Org	245,200,000.0		opd parsial	350 Org	245,200,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
						Jumlah Peserta yang di Edukasi		300 Org				350 Org		
3.00	06	04.00	16	004	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi/UKM dalam mendukung Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Koperasi/UKM yang difasilitasi		24 Kab/Kota	456,700,000.0		opd parsial	24 Kab/Kota	466,700,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
						Jumlah Koperasi/UKM yang difasilitasi		24 Kab/Kota				24 Kab/Kota		
3.00	06	04.00	16	006	Koordinasi dan Fasilitasi Sarana BUMN dan BUMD	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pengembangan BUMD, Data Sarana BUMN dan BUMD		24 -Kab/Kota	300,000,000.0		opd parsial	24 -Kab/Kota	300,000,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
						Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pengembangan BUMD, Data Sarana BUMN dan BUMD		24 -Kab/Kota				24 -Kab/Kota		
3.00	06	04.00	16	007	Fasilitasi Pengembangan Industri kecil dan menengah di Sulsel untuk mendorong Ekonomi Inklusif	Jumlah Peserta Sosialisasi Industri Kecil dan Menengah, Data Informasi Industri Kecil dan Menengah		24 Kab/ Kota	317,700,000.0		opd parsial	24 Kab/ Kota	317,700,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
						Jumlah Peserta Sosialisasi Industri Kecil dan Menengah, Data Informasi Industri Kecil dan Menengah		24 Kab/ Kota				24 Kab/ Kota		
3.00	06	04.00	16	008	Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Sarana Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah, Data dan Informasi Sarana Infrastruktur dan Wilayah		24 Kab/Kota	304,400,000.0		opd parsial	24 Kab/Kota	304,400,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
						Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah, Data dan Informasi Sarana Infrastruktur dan Wilayah		24 Kab/Kota				24 Kab/Kota		
3.00	06	04.00	16	009	Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Sektor Peternakan dan Perikanan	Terumusnya Rekomendasi Kebijakan Sektor Peternakan dan Perikanan		100 %	250,000,000.0		opd parsial	100 %	160,000,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
						Terumusnya Rekomendasi Kebijakan Sektor Peternakan dan Perikanan		100 %				100 %		
3.00	06	04.00	16	010	Fasilitasi Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Produk Unggulan Daerah		100 %	260,000,000.0		opd parsial	100 %	170,000,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
						Tersedianya Data dan Informasi Produk Unggulan Daerah		100 %				100 %		
3.00	06	04.00	16	011	Koordinasi Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah	Tersedianya Informasi dan Rekomendasi Pengendalian Inflasi Daerah		1 Laporan	276,000,000.0		opd parsial	1 Laporan	275,000,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tersedianya Informasi dan Rekomendasi Pengendalian Inflasi Daerah		1 Laporan				1 Laporan		
3.00	06	04.00	16	012	Fasilitasi dan Pembinaan Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan	Terusnya Kebijakan Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Terusnya Kebijakan Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan		1 Dokumen 1 Dokumen	230,000,000.0		opd parsial	1 Dokumen 1 Dokumen	135,000,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	16	013	Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Tersedianya Rumusan Kebijakan Penggunaan DBH-CHT Tersedianya Rumusan Kebijakan Penggunaan DBH-CHT		1 Laporan 1 Laporan	472,418,100.0		opd parsial	1 Laporan 1 Laporan	472,418,100.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	16	014	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Meningkatkan Pemahaman Peserta Tentang Ketentuan di Bidang Cukai Meningkatkan Pemahaman Peserta Tentang Ketentuan di Bidang Cukai		300 Org 300 Org	83,722,900.0		opd parsial	350 Org 350 Org	83,722,900.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	2,450,489,775.09			100 %	2,482,394,298.70	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan		4 Unit 9 Unit 4 Unit 9 Unit 4 Unit 9 Unit	35,100,000.0		opd parsial	4 Unit 9 Unit 4 Unit 9 Unit 4 Unit 9 Unit	35,200,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS		24 Orang 24 Orang 24 Orang	337,200,000.0		opd parsial	24 Orang 24 Orang 24 Orang	337,200,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia Jumlah ATK yang tersedia Jumlah ATK yang tersedia		100 Jenis ATK 100 Jenis ATK 100 Jenis ATK	375,189,775.09		opd parsial	100 Jenis ATK 100 Jenis ATK 100 Jenis ATK	380,100,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		50 Jenis 50 Jenis 50 Jenis	1,158,000,000.0		opd parsial	50 Jenis 50 Jenis 50 Jenis	1,169,000,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	04.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas Jumlah perjalanan dinas Jumlah perjalanan dinas		100 Kali 100 Kali 100 Kali	545,000,000.0		opd parsial	100 Kali 100 Kali 100 Kali	560,894,298.70	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	1,230,532,109.95			100 %	1,246,553,209.55	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		6 Unit 6 Unit 6 Unit	476,140,000.0		opd parsial	6 Unit 6 Unit 6 Unit	480,540,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		10 Unit 10 Unit 10 Unit	520,100,000.0		opd parsial	10 Unit 10 Unit 10 Unit	521,100,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		100 Unit 100 Unit 100 Unit	97,992,109.95		opd parsial	100 Unit 100 Unit 100 Unit	107,200,000.0	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembanekan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembanekan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembanekan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website		8 Sistem Informasi/Aplikasi 40 Berita/Informasi 8 Sistem Informasi/Aplikasi 40 Berita/Informasi 8 Sistem Informasi/Aplikasi 40 Berita/Informasi	136,300,000.0		opd parsial	8 Sistem Informasi/Aplikasi 40 Berita/Informasi 8 Sistem Informasi/Aplikasi 40 Berita/Informasi 8 Sistem Informasi/Aplikasi 40 Berita/Informasi	137,713,209.55	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	330,741,819.11			100 %	335,047,962.43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3.00	06	04.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan		4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	330,741,819.11		opd parsial	4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	335,047,962.43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen				4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen		
3.00	06	05.00			Biro Pengadaan Barang/Jasa				7,827,304,501.52				5,903,173,977.06	
3.00	06	05.00	04		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	% Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana % Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa		100 % 100 %	2,149,260,329.61			100 % 100 %	1,417,478,211.87	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	04	001	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan UKPBJ Kab/Kota	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan UKPBJ Kab/Kota		24 Kab/Kota	250,100,000.0		opd parsial	24 Kab/Kota	152,600,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	04	002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UKPBJ	jumlah laporan pengembangan kapasitas kelembagaan UKPBJ		4 laporan	182,560,329.61		opd parsial	4 laporan	88,500,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	04	003	Pemantauan Pelaksanaan LPSE	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan LPSE OPD dan Kab/Kota		4 laporan	178,200,000.0		opd parsial	4 laporan	180,500,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	04	004	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		4 laporan	215,000,000.0		opd parsial	4 laporan	220,210,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	04	005	Penyusunan Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		4 laporan	205,800,000.0		opd parsial	4 laporan	155,400,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	04	006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		4 Laporan	194,000,000.0		opd parsial	4 Laporan	100,210,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	04	008	Rapat Koordinasi UKPBJ Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Peserta Rapat koordinasi pelaksanaan rapat koordinasi UKPBJ Provinsi Sulawesi Selatan baik Perempuan dan Laki-Laki		80 Peserta Perempuan dan Laki-Laki	155,200,000.0		opd parsial	80 Peserta Perempuan dan Laki-Laki	62,099,211.87	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	04	009	Bintek/Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Peserta Bintek/Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik Perempuan dan Laki-Laki		80 peserta Perempuan dan Laki-Laki	150,200,000.0		opd parsial	80 peserta Perempuan dan Laki-Laki	147,959,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	06	05.00	04	010	Peningkatan Kapabilitas SDM Aparatur Sipil Negara Tentang Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik perempuan dan laki-laki		15 orang Baik Perempuan dan Laki-Laki	330,400,000.0		opd parsial	15 orang Baik Perempuan dan Laki-Laki	221,900,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	04	011	Layanan Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Layanan Pendampingan Hukum		4 Paket	287,800,000.0		opd parsial	4 Paket	88,100,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	28		PROGRAM ADMINISTRASI USAHA JASA PEMBANGUNAN	% Capaian Kinerja Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan		100 %	866,280,467.76			100 %	421,700,294.51	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	28	001	Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan	Jumlah Kordinator Usaha Jasa Pembangunan Lingkup Prov. Sulsel yang dibina		24 Kab/Kota	266,749,999.76		opd parsial	24 Kab/Kota	117,600,294.51	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	28	002	Rapat Koordinasi Daerah Usaha Jasa Pembangunan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota		95 peserta	221,000,000.0		opd parsial	100 peserta	25,000,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	28	003	Fasilitasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan		200 peserta	378,530,468.0		opd parsial	200 peserta	279,100,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	2,950,489,775.09			100 %	2,482,394,298.70	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan		4 Unit 9 Unit	35,100,000.0		opd parsial	4 Unit 9 Unit	35,200,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS		24 Orang	637,200,000.0		opd parsial	24 Orang	337,200,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah ATK yang tersedia		100 Jenis ATK	475,189,775.09		opd parsial	100 Jenis ATK	380,100,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		50 Jenis	1,158,000,000.0		opd parsial	50 Jenis	1,169,000,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		100 Kali	645,000,000.0		opd parsial	100 Kali	560,894,298.70	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	1,430,532,109.95			100 %	1,246,553,209.55	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		6 Unit	476,140,000.0		opd parsial	6 Unit	480,540,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		10 Unit	520,100,000.0		opd parsial	10 Unit	521,100,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		100 Unit	197,992,109.95		opd parsial	100 Unit	107,200,000.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website		8 Sistem Informasi/Aplikasi 40 Berita/Informasi	236,300,000.0		opd parsial	8 Sistem Informasi/Aplikasi 40 Berita/Informasi	137,713,209.55	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	430,741,819.11			100 %	335,047,962.43	Biro Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	05.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan		4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	430,741,819.11		opd parsial	4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	335,047,962.43	Biro Pengadaan Barang/Jasa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		4 Dokumen				4 Dokumen		
3.00	07				Pengawasan									
3.00	07	01.00			Inspektorat Daerah				14,595,908,560.57				14,772,922,555.93	
3.00	07	01.00	01		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN DAERAH (Prioritas)	Opini LKPD dari BPK RI (Prioritas)		100 % (Opini WTP)	4,464,952,193.04			100 % (Opini WTP)	4,523,084,315.90	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	01	009	Pemeriksaan Dana BOS	Jumlah Kab/ Kota yang diperiksa	24 Kab/ Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/ Kota	600,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Prioritas	24 Kab/ Kota	600,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	01	010	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi dan Keuangan OPD Provinsi dan Kab/ Kota/ Pamjab Irbanwil I	Jumlah OPD/ Unit Kerja yang di opname kas/ Pengecekan Jumlah OPD/ Unit Kerja yang diperiksa Jumlah Kab/ Kota yang diperiksa	Provinsi Sulawesi Selatan	14 OPD/ Unit Kerja 14 OPD/ Unit Kerja 6 Kab/ Kota	949,952,193.04	APBD Prov	Kegiatan Prioritas	14 OPD/ Unit Kerja 14 OPD/ Unit Kerja 6 Kab/ Kota	959,084,315.90	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	01	011	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi dan Keuangan OPD Provinsi dan Kab/ Kota/ Pamjab Irbanwil IV	Jumlah OPD/Unit Kerja yang diperiksa Jumlah OPD/Unit Kerja yang diopname kas/pengecekan Jumlah kab/kota yang diperiksa	Provinsi Sulawesi Selatan	14 OPD/ Unit Kerja 14 OPD/ Unit Kerja 6 Kab/ Kota	965,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Prioritas	14 OPD/ Unit Kerja 14 OPD/ Unit Kerja 6 Kab/ Kota	982,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	01	012	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi dan Keuangan OPD Provinsi dan Kab/ Kota/ Pamjab Irbanwil III	Jumlah OPD/Unit Kerja yang diperiksa Jumlah OPD/Unit Kerja yang diopname kas/pengecekan Jumlah kab/kota yang diperiksa	Provinsi Sulawesi Selatan	14 OPD/ Unit Kerja 14 OPD/ Unit Kerja 6 Kab/ Kota	965,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Prioritas	14 OPD/ Unit Kerja 14 OPD/ Unit Kerja 6 Kab/ Kota	982,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	01	013	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi dan Keuangan OPD Provinsi dan Kab/ Kota/ Pamjab Irbanwil II	Jumlah OPD/Unit Kerja yang diperiksa Jumlah OPD/Unit Kerja yang diopname kas/pengecekan Jumlah kab/kota yang diperiksa	Provinsi Sulawesi Selatan	14 OPD/ Unit Kerja 14 OPD/ Unit Kerja 6 Kab/ Kota	985,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Prioritas	14 OPD/ Unit Kerja 14 OPD/ Unit Kerja 6 Kab/ Kota	1,000,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Hasil EKPPD Prov. Sulsel % TLHP BPK Jumlah Kab/Kota yang hasil evaluasi SAKIP > CC % TLHP APIP Jumlah Kab/Kota yang hasil EKPPD > Tinggi		100 % 74 % 4 Kab/Kota 76 % 24 Kab/Kota	2,785,615,864.01			100 % 76 % 5 Kab/Kota 80 % 24 Kab/Kota	2,821,792,475.04	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	001	Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah serta OPD	Jumlah RKA OPD yang di Reviu Jumlah Dokumen LKj Pemprov yang di Reviu Jumlah Dokumen RKPD Pemprov yang di Reviu Jumlah Dokumen RPJMD yang di Reviu Jumlah Dokumen Renstra OPD yang di Reviu	Kota Makassar	112 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 30 Dokumen	81,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	112 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 30 Dokumen	81,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	002	Reviu Laporan Keuangan serta Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang di Reviu Jumlah Dokumen LK OPD yang di Reviu	Kota Makassar	4 Triwulan 30 Dokumen	66,600,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	4 Triwulan 30 Dokumen	66,600,000.0	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Dokumen LKPD yang di Reviu		1 Dokumen				1 Dokumen		
3.00	07	01.00	02	003	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah SKPD yang di evaluasi	Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan	40 OPD/ Unit Kerja	52,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	40 OPD/ Unit Kerja	52,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	004	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah OPD yang di evaluasi	Provinsi Sulawesi Selatan	40 OPD/ Unit Kerja	17,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	40 OPD/ Unit Kerja	17,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	005	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP	Jumlah Peserta Rapat Pemutakhiran Tingkat Nasional Jumlah Peserta Rapat Pemutakhiran TLHP BPK/APIP OPD Prov. SulSel Jumlah Peserta Rapat Pemutakhiran TLHP APIP Kab/Kota Jumlah OPD yang dimonev TLHP BKP-RI Jumlah Kab/kota yang dimonev TLHP APIP Jumlah OPD yang dimonev TLHP APIP	Inspektorat Jenderal Kemendagri Luar Provinsi Sulawesi Selatan OPD Lingkup Pemprov Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan	300 Orang 240 Orang 150 Orang 56 OPD 24 Kab/Kota 56 OPD	435,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	0 Orang 240 Orang 150 Orang 56 OPD 24 Kab/Kota 56 OPD	439,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	006	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	Jumlah Kabupaten yang di monev	Provinsi Sulawesi Selatan	21 Kabupaten	250,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	21 Kabupaten	250,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	007	Evaluasi SAKIP	Jumlah Kabupaten/Kota yang di evaluasi Sakip Jumlah OPD yang di evaluasi Sakip	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	7 Kab/ Kota 30 OPD	280,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	7 Kab/ Kota 30 OPD	285,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	008	Pengawasan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP pengawasan tujuan tertentu	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	24 LHP	280,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	24 LHP	284,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	009	Peningkatan dan Pengendalian Pengawasan	Jumlah Kabupaten/ Kota	Provinsi Sulawesi Selatan	18 Kab/ Kota	125,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	18 Kab/ Kota	130,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	010	Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang di asistensi dan Pendampingan	Provinsi Sulawesi Selatan	56 OPD/ Unit Kerja	94,500,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	56 OPD/ Unit Kerja	94,500,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	013	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Koordinasi pengawasan yang dilaksanakan Jumlah rakorwas yang diikuti Jumlah Peserta Rapat koordinasi pengawasan daerah	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	10 Kegiatan 5 Kegiatan 280 Orang	259,515,864.01	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	10 Kegiatan 5 Kegiatan 280 Orang	260,692,475.04	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	014	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Kabupaten/kota yang di evaluasi	Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/ Kota	350,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	24 Kab/ Kota	355,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	015	Pembinaan dan Pemberdayaan Inspektorat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemberdayaan Inspektorat	Provinsi Sulawesi Selatan	20 Laporan	125,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	20 Laporan	129,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	017	Pelatihan Kantor Sendiri dan Penyertaan Diklat Fungsional Pengawasan pada Instansi Terkait	Jumlah ASN yang mengikuti penyertaan diklat fungsional pengawasan pada instansi terkait Jumlah Peserta Pelatihan Kantor Sendiri	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	4 Orang 60 Orang	50,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	4 Orang 60 Orang	50,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	020	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawasan	jumlah laporan penilaian jabatan fungsional	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Laporan	75,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	2 Laporan	79,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	02	021	Pendidikan dan Pemantapan jabatan fungsional pengawasan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan fungsional	Luar Provinsi Sulawesi Selatan	5 Orang	245,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	5 Orang	249,000,000.0	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pemantapan jabatan fungsional pengawasan	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Kegiatan				4 Kegiatan		
3.00	07	01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Jumlah OPD/Unit Kerja yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas		8 OPD/Unit Kerja	2,772,703,522.22			8 OPD/Unit Kerja	2,795,874,642.39	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	03	001	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah peserta rapat Jumlah kab/kota yang difasilitasi Jumlah OPD yang dinilai	Provinsi Sulawesi Selatan	150 Orang 8 Kab/ Kota 20 OPD/ Unit Kerja	90,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	150 Orang 8 Kab/ Kota 20 OPD/ Unit Kerja	90,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	03	002	Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah kab/kota yang dievaluasi Jumlah OPD pelayanan publik yang dievaluasi	Provinsi Sulawesi Selatan	8 Kab/ Kota 20 OPD/ Unit Kerja	100,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	8 Kab/ Kota 20 OPD/ Unit Kerja	100,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	03	003	Penanganan Laporan Gratifikasi	Jumlah peserta sosialisasi Jumlah tim penanganan	Provinsi Sulawesi Selatan	300 Orang 2 tim	200,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	300 Orang 2 tim	200,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	03	004	Penanganan Benturan Kepentingan dan Penanganan Whistle Blower System	Jumlah peserta sosialisasi Jumlah tim penanganan	Provinsi Sulawesi Selatan	300 Orang 6 tim	90,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	300 Orang 6 tim	90,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	03	006	Penilaian internal Zona Integritas	Jumlah OPD yang dinilai	Provinsi Sulawesi Selatan	20 OPD/ Unit Kerja	175,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	20 OPD/ Unit Kerja	175,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	03	007	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah rencana aksi yang diverifikasi	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	9 Sektor	80,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	9 Sektor	80,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	03	008	Verifikasi LHKPN/LHKASN	Jumlah ASN yang melaporkan LHKASN Jumlah ASN yang diverifikasi LHKPN	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	5000 ASN 66 ASN	75,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	5000 ASN 66 ASN	80,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	03	009	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen kapabilitas APIP Jumlah tim telaah sejawat antar Provinsi Jumlah tim telaah sejawat antar Irbanwil	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	20 Dokumen 1 Tim 4 Tim	60,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	20 Dokumen 1 Tim 4 Tim	72,874,642.39	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	03	010	Gelar Pengawasan Daerah	Jumlah peserta gelar pengawasan	Provinsi Sulawesi Selatan	150 Orang	25,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang	150 Orang	25,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	03	012	Sapu Bersih Pungutan Liar	Jumlah kegiatan FGD pembangunan pelayanan publik anti pungutan liar Jumlah kegiatan supervisi/pemantauan pelayanan publik	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	1 kegiatan 4 Kegiatan	1,350,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	1 kegiatan 4 Kegiatan	1,350,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	03	013	Koordinasi APIP dengan APH dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi APIP dan APH	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	527,703,522.22	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	4 Laporan	533,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	05		PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	% Pengaduan Masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti % Pengaduan Masyarakat terhadap Bupati/Walikota yang ditindaklanjuti		100 % 100 %	452,372,071.11			100 % 100 %	458,261,797.96	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	05	003	Penanganan Pengaduan masyarakat Terhadap Perangkat Daerah dan Bupati/ Walikota	Jumlah LHP Pengaduan Masyarakat terhadap OPD Jumlah LHP Pengaduan Masyarakat terhadap Bupati/Walikota	Provinsi Sulawesi Selatan	30 LHP 10 LHP	452,372,071.11	APBD Prov	Kegiatan Penunjang/ Mandatory Audit	30 LHP 10 LHP	458,261,797.96	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	3,064,544,715.27			100 %	3,104,444,020.39	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	07	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar	12 Bulan	635,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Rutin	12 Bulan	640,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbavarkan	Kota Makassar	8 Unit 11 Unit	26,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Rutin	8 Unit 11 Unit	26,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar	112 Orang	993,832,715.27	APBD Prov	Kegiatan Rutin	112 Orang	1,003,732,020.39	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kota Makassar	54 Jenis ATK	390,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Rutin	54 Jenis ATK	400,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar	4 Unit	7,212,000.0	APBD Prov	Kegiatan Rutin	4 Unit	7,212,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	6 Jenis	730,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Rutin	6 Jenis	740,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	2 Pameran	52,500,000.0	APBD Prov	Kegiatan Rutin	2 Pameran	52,500,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	30 Kali	230,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Rutin	30 Kali	235,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	719,538,078.26			100 %	728,906,213.49	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar	2 Unit	250,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Rutin	2 Unit	252,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	10 Unit	250,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Rutin	10 Unit	250,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar	40 Unit	154,538,078.26	APBD Prov	Kegiatan Rutin	40 Unit	160,906,213.49	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar	40 Unit	55,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Rutin	40 Unit	56,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembanekan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Kota Makassar	2 Sistem Informasi/Aplikasi 10 Berita/Informasi	10,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Rutin	2 Sistem Informasi/Aplikasi 10 Berita/Informasi	10,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	174,912,738.28			100 %	177,190,041.22	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	Badan Penghubung Daerah Prov SulSel Luar Provinsi Sulawesi Selatan OPD Pemprov SulSel Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	105,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Rutin	2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	105,190,041.22	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		4 Dokumen				4 Dokumen		
3.00	07	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	69,912,738.28	APBD Prov	Kegiatan Rutin	4 Laporan	72,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		94 %	161,269,378.38			95 %	163,369,049.54	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Provinsi Sulawesi Selatan	10 Orang 2 Laporan	51,269,378.38	APBD Prov	Kegiatan Rutin	10 Orang 2 Laporan	53,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	194 Pasang	110,000,000.0	APBD Prov	Kegiatan Rutin	194 Pasang	110,369,049.54	Inspektorat Daerah
3.00	08				Pemerintahan Umum									
3.00	08	01.00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				8,748,438,024.61				8,855,829,815.58	
3.00	08	01.00	01		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	Cakupan wilayah konflik yang terpetakan		20 %	3,144,402,539.52			20 %	3,182,737,635.34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	01	001	Pemetaan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Wilayah Sulsel	Dokumen Pemetaan Konflik Wilayah	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	173,000,000.0	APBD Prov		2 Dokumen	185,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	01	002	Koordinasi Satgas Kontra Terorisme, Radikalisme dan Narkoba	Jumlah Laporan Satgas Kontra terorisme, radikalisme dan narkoba	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	95,000,000.0	APBD Prov		4 Laporan	101,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	01	003	Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing	Jumlah Laporan Pengawasan dan pemantauan Orang Asing NGO dan lembaga asing	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	93,652,539.52	APBD Prov		4 Laporan	93,987,635.34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	01	004	Pembinaan dan Koordinasi Tiga Pilar Bangdes Mantra	Jumlah Laporan Koordinasi Tiga Pilar Bangdes Mantra	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	97,500,000.0	APBD Prov		4 Laporan	97,500,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	01	005	Pembinaan dan Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Daerah Prov. Sulsel	Jumlah Laporan Forum Kewaspadaan Dini Daerah Prov. Sulsel Jumlah peserta rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan 100 Orang	60,250,000.0	APBD Prov		4 Laporan 100 Orang	60,250,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	01	006	Sinkronisasi Bidang Ipoleksosbudhukam Pimpinan Daerah	Jumlah Laporan Sinkronisasi bidang Ipoleksosbudhukam pimpinan daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	1,800,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	1,820,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	01	007	Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa	Jumlah Laporan Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	825,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	825,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	02		PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	% Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat		15 %	75,877,287.22			20 %	76,865,183.08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	02	001	Pemantauan dan pengendalian Trantibmas	Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian Trantibmas	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	5,877,287.22	APBD Prov		4 Laporan	6,865,183.08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	02	002	Pemantauan dan Pengendalian Unjuk Rasa	Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian unjuk rasa	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	30,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	30,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	02	003	Pengamanan dan Penegakan Hukum dan HAM	Jumlah Objek yang membutuhkan pengamanan	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Objek	40,000,000.0	APBD Prov		4 Objek	40,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	03		PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Cakupan Jumlah konflik antar umat beragama dan etnis		5 Kasus	68,861,236.69			5 Kasus	69,757,786.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	03	001	Pembinaan dan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Laporan Forum Pembauran kebangsaan (FPK)	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	11,211,074.69	APBD Prov		4 Laporan	11,300,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	03	002	Pembinaan dan Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Laporan Forum kerukunan umat beragama (FKUB)	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	18,750,000.0	APBD Prov		4 Laporan	18,750,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	08	01.00	03	004	Pemetaan dan money Potensi Kerawanan terhadap Kerukunan Umat beragama dan Multi Etnis	Jumlah Laporan Pemetaan potensi kerawanan terhadap kerukunan umat beragama dan multi etnis	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	13,900,162.0	APBD Prov		4 Laporan	14,707,786.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	03	005	Pemantapan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah	Jumlah Laporan pemantapan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	15,000,000.0	APBD Prov		4 Laporan	15,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	03	007	Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah laporan pembinaan ideologi, karakter dan wasbang	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	10,000,000.0	APBD Prov		4 Laporan	10,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	04		PROGRAM KETAHANAN EKONOMI DAERAH	Cakupan Rumusan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi		20 %	143,807,194.14			20 %	145,028,531.14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	04	001	Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi daerah	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Laporan	133,557,194.14	APBD Prov		4 Laporan	133,778,531.14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	04	002	Dialog Publik Peningkatan Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi Kab/Kota	Jumlah Peserta Dialog publik peningkatan ketahanan lembaga usaha ekonomi kab/kota	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Peserta	10,250,000.0	APBD Prov		100 Peserta	11,250,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	05		PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN PEMILU	% Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Cakupan Partai Politik peserta Pemilu		78 % 16 Parpol	82,373,630.31			78 % 16 Parpol	83,446,106.29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	05	001	Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik di Sulsel	Jumlah dokumen pemetaan dan evaluasi kondisi politik di Sulsel	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	43,500,000.0	APBD Prov		2 Dokumen	43,500,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	05	002	Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah Laporan Bantuan Keuangan Parnol	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	10,250,000.0	APBD Prov		1 Laporan	10,250,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	05	003	Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	jumlah pertemuan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Pertemuan	8,123,630.31	APBD Prov		4 Pertemuan	8,196,106.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	05	004	Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Peserta Pendidikan Politik Masyarakat	Provinsi Sulawesi Selatan	100 Peserta	10,250,000.0	APBD Prov		100 Peserta	10,250,000.29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	05	005	Pemberdayaan Ormas	Jumlah usulan Surat Keterangan Terdaftar yang dikelola	Provinsi Sulawesi Selatan	4 Dokumen	10,250,000.0	APBD Prov		4 Dokumen	11,250,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	06		PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA	% Tingkat keikutsertaan aparat dan masyarakat bela negara		20 %	225,509,348.39			20 %	227,143,436.40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	06	001	Gerakan Bela Negara	Jumlah Peserta Gerakan Bela Negara	Provinsi Sulawesi Selatan	500 Peserta	225,509,348.39	APBD Prov		500 Peserta	227,143,436.40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	3,483,718,576.29			100 %	3,529,075,379.12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kantor Badan Kesbangpol Prov. Sulsel Kota Makassar	12 Bulan	19,878,576.29	APBD Prov		12 Bulan	21,235,379.12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 vang terbavarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 vang terbavarkan	kantor dispenda prov. sulsek Kota Makassar	7 Unit 19 Unit	13,000,000.0	APBD Prov		7 Unit 19 Unit	15,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	kantor bakesbangpol prov. sulsek Kota Makassar	14 Orang	520,000,000.0	APBD Prov		14 Orang	520,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Kantor bakesbangpol prov. sulsek Kota Makassar	150 Jenis ATK	903,000,000.0	APBD Prov		150 Jenis ATK	905,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	08	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	kantor Bakesbangpol prov. sulsel Kota Makassar	50 Unit	27,000,000.0	APBD Prov		50 Unit	27,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Provinsi Sulawesi Selatan	5 Jenis	1,330,840,000.0	APBD Prov		5 Jenis	1,340,840,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Pameran	90,000,000.0	APBD Prov		1 Pameran	110,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	145 Kali	580,000,000.0	APBD Prov		145 Kali	590,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	1,088,968,773.80			100 %	1,102,365,588.95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	kantor bakesbangpol prov. sulsel Kota Makassar	1 Unit	120,000,000.0	APBD Prov		1 Unit	120,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Makassar	24 Unit	686,218,773.80	APBD Prov		24 Unit	686,615,588.95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Makassar	12 Unit	106,750,000.0	APBD Prov		15 Unit	119,750,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	82 Unit	176,000,000.0	APBD Prov		84 Unit	176,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	156,396,994.67			100 %	157,391,656.94	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar	75 Orang	11,500,000.0	APBD Prov		75 Orang	11,500,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	kantor bakesbangpol prov. sulsel Kota Makassar	35 Dokumen	101,396,994.67	APBD Prov		35 Dokumen	102,391,656.94	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	kantor bakesbangpol prov. sulsel Kota Makassar	12 Laporan	16,000,000.0	APBD Prov		12 Laporan	16,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	kantor bakesbangpol prov. sulsel Kota Makassar	2 Laporan	14,000,000.0	APBD Prov		2 Laporan	14,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	kantor bakesbangpol prov. sulsel Kota Makassar	1 Laporan	13,500,000.0	APBD Prov		1 Laporan	13,500,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	278,522,443.58			100 %	282,018,512.30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang dikelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	kantor bakesbangpol prov. sulsel Kota Makassar	52 Orang 15 Laporan	10,492,443.58	APBD Prov		52 Orang 15 Laporan	13,988,512.30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	185 Pasang	140,030,000.0	APBD Prov		185 Pasang	140,030,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar	104 Pasang	88,000,000.0	APBD Prov		104 Pasang	88,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	08	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	7 Orang	40,000,000.0	APBD Prov		7 Orang	40,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	03.00			Badan Penghubung Daerah				22,687,710,290.54				23,941,451,602.14	
3.00	08	03.00	07		PROGRAM FASILITAS PELAYANAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	% Pelayanan tamu daerah		100 %	1,791,586,377.53			100 %	1,941,256,053.52	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	07	001	Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Jumlah tamu yang terlayani pada Badan Penghubung Daerah		5000 Orang	1,155,586,377.53			5000 Orang	1,205,256,053.52	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	07	002	Penguatan Koordinasi Urusan Daerah pada Pemerintah Pusat	Jumlah laporan hasil koordinasi urusan daerah pada pemerintah pusat		1 Laporan	223,000,000.0			1 Laporan	323,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	07	004	Pertemuan dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Sosial dan Masyarakat asal Sulawesi Selatan se labodetabek	Jumlah sarana dan prasarana pertemuan yang tersedia		1 Laporan	299,500,000.0			1 Laporan	299,500,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	07	005	Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kecakapan Hidup bagi Staf, Karyawan Mess Pemda, serta Tenaga Guide Anjungan TMII	Jumlah peserta workshop		100 Orang	113,500,000.0			100 Orang	113,500,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	08		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH	% Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah		100 %	921,500,000.0			100 %	921,500,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	08	002	Penyelenggaraan Pameran Promosi Daerah	Jumlah pameran promosi daerah pada badan penghubung daerah prov sulsel		1 Pameran	134,000,000.0			1 Pameran	134,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	08	003	Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya di Anjungan Sulawesi Selatan TMII Jakarta	Jumlah pagelaran seni dan budaya di anjungan daerah provinsi sulawesi selatan TMII	Taman Mini Indonesia Indah Jakarta	1 Kegiatan	400,000,000.0			1 Kegiatan	400,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	08	004	Penyelenggaraan Paket Promosi Budaya dan Pariwisata di Jakarta, Surabaya dan Bali	Jumlah promosi budaya dan pariwisata provinsi sulawesi selatan	Bali Bali	1 Pameran	300,000,000.0			1 Pameran	300,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	08	005	Pelestarian dan Pembinaan Tarian Bugis Makassar dan Toraja secara Berkala.	Jumlah kegiatan pembinaan tarian bugis makassar dan toraja secara berkala pada anjungan sulawesi selatan TMII		1 Laporan	87,500,000.0			1 Laporan	87,500,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran		100 %	10,079,159,052.01			100 %	10,230,169,299.62	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik		12 Bulan	956,248,412.01			12 Bulan	956,248,413.62	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan		26 Unit 6 Unit	345,000,000.0			26 Unit 6 Unit	345,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS		92 Orang	4,552,532,240.0			92 Orang	4,552,532,240.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah ATK yang tersedia		26 Jenis ATK	337,500,000.0			26 Jenis ATK	337,500,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		9 Unit	35,650,000.0			9 Unit	35,650,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		2 Jenis	521,100,000.0			2 Jenis	521,100,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		288 Kali	331,500,000.0			288 Kali	331,500,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	50	011	Pelayanan Administrasi dan Operasional Seksi Penghubung Surabaya	Jumlah Tamu yang dilayani pada Seksi Penghubung Surabaya	Jawa Timur	2000 Orang	1,878,000,000.0			2000 Orang	1,953,505,123.0	Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Asrama Mahasiswa yg dikelola		6 Unit				6 Unit		
3.00	08	03.00	50	012	Pelayanan Administrasi dan Operasional Seksi Penghubung Bali	Jumlah Tamu yang dilayani pada Seksi Penghubung Bali		3000 Orang	1,121,628,400.0			3000 Orang	1,197,133,523.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran		100 %	9,699,664,861.0			100 %	10,652,726,249.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara		8 Unit	4,068,014,861.0			8 Unit	4,121,076,249.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		32 Unit	1,134,000,000.0			32 Unit	1,134,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		40 Unit	2,406,150,000.0			40 Unit	3,306,150,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		39 Unit	165,000,000.0			39 Unit	165,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	51	013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama Seksi Penghubung Surabaya	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara		7 Unit	1,520,000,000.0			7 Unit	1,520,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	51	015	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas Seksi Penghubung Surabaya	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		7 Unit	186,000,000.0			7 Unit	186,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	51	016	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Seksi Penghubung Surabaya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		5 Unit	45,000,000.0			5 Unit	45,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	51	017	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Seksi Penghubung Surabaya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		1 Unit	16,000,000.0			1 Unit	16,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	51	018	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama Seksi Penghubung Bali	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara		1 Unit	16,500,000.0			1 Unit	16,500,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	51	020	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas Seksi Penghubung Bali	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		16 Unit	93,000,000.0			16 Unit	93,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	51	021	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Seksi Penghubung Bali	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		6 Unit	40,000,000.0			6 Unit	40,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	51	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Seksi Penghubung Bali	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		6 Unit	10,000,000.0			6 Unit	10,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	130,000,000.0			100 %	130,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan		2 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	75,000,000.0			2 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	75,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		2 Laporan	45,000,000.0			2 Laporan	45,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun		2 Laporan	7,000,000.0			2 Laporan	7,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun		1 Laporan	3,000,000.0			1 Laporan	3,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik		100 %	65,800,000.0			100 %	65,800,000.0	Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.00	08	03.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia		54 Pasang	35,000,000.0			54 Pasang	35,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia		35 Pasang	30,800,000.0			35 Pasang	30,800,000.0	Badan Penghubung Daerah
JUMLAH									3,383,060,510,823.74				3,345,720,245,623.65	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada table berikut ini:

Tabel VII.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama 2019 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021

No	Indikator	Capaian 2019	Perkiraan Capaian 2020	Target 2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB (75,00)
2	Nilai SAKIP	B	BB	BB (76,00)
3	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	B	B	B (85,00)
4	Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air(%)	7.20	4.5	5,92
5	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	63.07	64	65
6	PDRB Perkapita (Juta Rp)	57.04	60.77	65.76
7	Angka Kemiskinan (%)	8.56	12.19	9.1
8	PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone) (JutaRP)	33.110,35	35.050.600	36.946.200
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.97	8.79	7.20
10	Indeks Gini	0.391	0.414	0.414
11	Indeks Williamson	0.63	0,62	0.61
12	IPM	71.66	72.18	72,22
13	Indeks Pendidikan	64.64	66.1	67.02
14	IPG	93.09	93.4	93.62
15	IDG	74,01	75.54	77.07

No	Indikator	Capaian 2019	Perkiraan Capaian 2020	Target 2021
16	Indeks Kesehatan	77.58	77.17	77.31
17	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,92	4.5	6,1
18	Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)	82.027.871	83.035.072	83.797.510
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,5	76,79	77,78
20	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	0,86	1,40	1,70

Sumber : Data Bappelitbangda 2020, (Diolah)

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VII.2.

Kondisi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019, 2020, dan Target 2021

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021	
1			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	1		KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI				
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,92	4,5	6,1
1	1	2	Laju Inflasi	%	2,35	3,0-1,0	3,0-1,0
1	1	3	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	6,01	8,00	8,69
1	1	4	PDRB Perkapita (ADHK)	Juta Rp	37,35		40,72
			PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rp	57,03	60,77	65,76
1	1	5	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	6,28	23,77	23,94
			Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	87,71	91,17	92,36
1	1	6	Indeks Gini		0,391	0,414	0,414
1	1	8	Indeks Ketimpangan Williamson		0,63	0,62	0,61
1	1	9	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	91,44	87,81	90,90
1	1	10	Kontribusi Sektor Pertanian (Tabama/Tanaman Bahan Makanan) Terhadap PDRB	%	6,28	11,31	11,33
1	1	11	PDRB Pertanian	Trilyun Rp	107,42	116,507	125,641
1	1	12	Kontribusi Sektor Perkebunan (TanamanKeras) Terhadap PDRB	%	3,88	1,88	1,89

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
1	1	13	PDRB Perkebunan	Trilyun Rp	19,56	10,21	11,00
1	1	14	PDRB Peternakan	Trilyun Rupiah	5,96	6,0	6,4
1	1	15	Kontribusi sub sektor Peternakan terhadap PDRB	%	1,18	1,21	1,23
1	1	16	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,06	0,08	0,09
1	1	17	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	4,62	6,26	6,72
1	1	18	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	8,42	9,48	9,81
1	1	19	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	14,80	14,90	14,95
1	1	20	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	13,16	8,0	8,30
1	1	21	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri	%	14,7	9,0	9,30
1	1	22	Pertumbuhan PDRB Industri...("Pertumbuhan Industri" di permen)	%	9,91	6,76	6,8
1	1	22	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	43,22	40,72	40,79
1	1	24	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	93,5	83,7	85,3
1	1	25	Penguatan Cadangan Pangan	%	75	451,8	456,3
1	1	26	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	47,2	7,18	6,97
1	2	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,66	72,18	72,22

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
1	2	2	Angka Melek Huruf (AMH)	%	95,12	95,61	95,91
1	2	3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,26	8,38	8,47
1	2	4	Angka Harapan lama Sekolah	Tahun	13,36	13,86	13,72
1	2	5	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,43	70,20	70,30
1	2	6	Angka Partispasi Angkatan Kerja		62,90	61,53	61,72
1	2	8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,97	5,22	4,77
1	2	9	Angka Partisipasi Sekolah	%	95,03	82,45	83,39
1	2	10	Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja	%	36,85	36,77	36,97
1	2	11	Prevalensi Balita Gizi Buruk (Balita Kurus/Wasting)	%	15,3	8%	7,75%
2			ASPEK PELAYANAN UMUM				
			URUSAN WAJIB				
			TERKAIT PELAYANAN DASAR				
2	1		PENDIDIKAN				
2	1	1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	%	99,57	82,78	82,99
2	1	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%	60,14	63,50	63,95

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	1	3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)SMA/SMK/MA	%	77,68	82,45	83,39
2	1	4	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	0,71	0,95	0,92
2	1	5	Angka Kelulusan(AL) SMA/SMK/MA	%	99,99	100	100
			AL SMA	%		99,97	99,98
			AL SMK	%		100,00	100,00
2	1	6	Angka Melanjutkan (AM)SMP/Mt ske SMA/SMK/MA	%	97,2	98,67	98,8
2	1	7	Rasio GuruTerhadap Murid Pendidikan Menengah		1:15	1,14	1,13
2	1	8	Kondisi BangunanSMP/MTsdan SMA/SMK/MAkondisibaik	%	*53,82	90,00	90,50
2	1	9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah		*0,1819444		
2	1	10	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	%	*98,15	95,61	95,91
2	1	11	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	95,12	95,61	95,91
2	1	12	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	98,69	98,81	98,93
			SMA			99,45	99,48
			SMK			98,18	98,39

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	2		KESEHATAN				
2	2	1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Kasus	916	1055	1053
2	2	2	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Kasus	990	1,147	1,145
2	2	3	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Kasus	713	814	812
2	2	4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Poin	66	113	112
2	2	5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per 1000 Balita	11,95	13,95	14,17
2	2	6	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	25,02	-	-
2	2	7	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	1,25	1,23	1,29
2	2	8	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	18,40	19	20
2	2	9	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	42,72	37,72	37,74
2	2	10	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	82	83	84
2	2	11	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	91,91	96,5	97
2	2	12	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	%	95,80	96,5	97
2	2	13	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100
2	2	14	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	98,50	95	95

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	2	15	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Per 100.000 penduduk	1,96	2	2
2	2	16	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	19,04	30	40
2	2	17	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	61	100	100
2	2	18	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 100.000 penduduk	214	207	202
2	2	19	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis	Per 100.000 penduduk	NA	3	3
2	2	20	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkolosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	%	61	75	80
2	2	21	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS	%	NA	90	90
2	2	22	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100
2	2	23	Penderita Diare yang ditangani	Orang	145.457	206.550	218.700
2	2	24	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 penduduk	0,10	< 1	< 1
2	2	25	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0,019	< 0.5	< 0.5
2	2	26	Proporsi Jumlah Penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan Komprehensif	%	Tidak Ada Survey	Indikator tidak lagi digunakan dalam RPJMD	Indikator tidak lagi digunakan dalam RPJMD
2	2	27	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100
2	2	28	Cakupan Kunjungan Bayi	%	89,96	98	98

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	2	29	Cakupan Puskesmas	%	150	100	100
2	2	30	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	87,96	92,5	93
2	2	31	Cakupan Pelayanan Nifas	%	90,35	93,5	94
2	2	32	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	62,87	62	63
2	2	33	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	69,71	72,5	73
2	2	34	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin	%	83,43	100	100
2	2	35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100
2	2	36	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100
2	2	37	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100
2	3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
2	3	1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	33,45	37,54	40,27
2	3	2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/Km	0.00378	0,00022	0,00022
2	3	3	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minima 1,5 Meter)	%	77	80,00	81,00
2	3	4	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	37,02	45,36	46,37

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	3	5	Persentase Sempa dan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar	%	10,11	9,21	8,99
2	3	6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	89,77	88,65	89,53
2	3	7	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	35*	35,00	33,50
2	3	8	Persentase Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik	%	72,26	72,26	74,34
2	3	9	Rasio Jaringan Irigasi	M/Ha	16,49	13,56	13,56
2	3	10	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	87,74	92,09	95,86
2	3	11	Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	87,81	87,95	88,10
2	3	13	Proporsi Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	87,73	85,02	85,87
2	3	14	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	88,34	75,65	76,05
2	3	15	Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh	%	0,158	0,055	0,05
2	3	16	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	%	85,30	84,95	85,10
2	3	17	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	87,73*	76,93	77,69
2	3	18	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Unit/Jiwa	2,53*	2,11	2,12
2	3	19	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	3,94	3,94	10,40

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	3	20	Ketaatan terhadap RTRW	%	66*	70,00	80,00
2	3	21	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	%	25	25,00	26,00
2	3	22	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	60*	50	50
2	3	23	Rasio luas Kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	34,27	34,27	35,00
2	4		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
2	4	1	Rasio Rumah Layak Huni		0,228*	0,201	0,202
2	4	2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0,009	0,039	0,039
2	4	3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	%	0,158	0,143	0,138
2	4	4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani	%	6,41	40,15	40,42
2	5		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
2	5	1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	40,27	40,97	41,67
2	5	2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	95	97	98
2	5	3	Persentase Penegakan PERDA	%	89	90	91
2	6		SOSIAL				

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	6	1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	57,11	60	60
2	6	2	Persentase PMKS yang tertangani	%	57,27	65	65
2	6	3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100
2	6	4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100
2	6	5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	-	50
2	6	6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	45,23	-	-
2	6	7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	66,67	66,67	70
2	6	8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	5,91	5,91	5,91
2	6	9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Sosial)	%	66,65	66,65	70
2	6	10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (BPBD)	%	66,65	66,65	66,65
			Proporsi Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	%	3,40	33,00	4,41
			Proporsi Rumah Tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	%	45,68	46,00	47,21
2			TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR				
2	7		TENAGA KERJA				

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	7	1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	17,21	1,73	2,22
2	7	2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	33,33	54,50	57,21
2	7	3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	4,36	3,57	3,91
2	7	4	Keselamatan dan perlindungan	%	100	40,81	43,29
2	7	5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100
2	7	6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	52,89*	16,94	23,92
2	7	7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	6,74	9,60	12,80
2	7	8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	70,00	71,42	80
2	7	9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	98,75	69,23	71,43
			Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Keatas (% Periode Agustus)	%		44,79	47,52
2	8		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2	8	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	53,10	51,85	52,26
2	8	2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	19	22	22
2	8	3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	69	74	75
2	8	4	Rasio KDRT	%	0,019	0,01	0,01

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	8	5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0,09	0,06	0,05
2	8	6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50,32	45,96	46,28
2	8	7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100
2	8	8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/danPPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100
2	8	9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	50	52	53
2	8	10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100
2	8	11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	239	100	100
2	8	12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	30	50	60
2	8	13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	28	35	40
2	8	14	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SD	%	101	102	103

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	8	15	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMP	%	105,40	105,86	106,32
2	8	16	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMA	%	110,6	68,00	69,00-
2	8	17	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	105,2	68,00	69,00-
2	8	18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	100,6	100	100
2	9		PANGAN				
2	9	1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	363,76	371,04	378,46
2	9	2	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%	47,88	50,27	52,78
2	9	3	Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)	%	24,96	25,46	25,97
2	9	4	Ketersediaan Energi Perkapita	%	3.879	3.918	3.957
2	9	5	Ketersediaan Protein Perkapita	%	112,67	113,80	114,93
2	9	6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100	100
2	10		PERTANAHAN				
2	10	1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	46,62	60,00	85,00
2	10	2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	29,77	100,00	100,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	10	3	Penyelesaian izin lokasi	%	82,9	100,00	100,00
2	11		LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	1	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	11	2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	11	3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	11	4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	11	5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	11	6	Peningkatan Indeks Kualitas Air	%	81,47	0,17	0,95
2	11	7	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	%	88,69	0,03	0,05
2	11	8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	61,14	58,5	60
2	11	9	Laporan Inventarisasi GRK	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	11	10	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	11	11	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Ton	5.373.629,74	680.000	685.000
2	11	12	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	62,86	45	50,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021	
2	11	13	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak Ada	Ada	ada	ada	
2	11	14	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Kasus	17	12	14	
2	11	15	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	
2	11	16	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	%	NA	74	75	
2	11	17	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2	11	18	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		0,94	0,95	0,96	
2	11	19	Rasio bayi berakte kelahiran		0,92	0,93	0,94	
2	11	20	Rasio pasangan berakte nikah		0,26	0,28	0,30	
2	11	21	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	
2	11	22	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	
2	11	23	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	94,39	95%	96%	
2	11	24	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	83,85	92,75%	93,25%	
2	12		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	12	1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	%	17,38	-	-
2	12	2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	1
2	12	3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	43	41	42
2	12	4	Persentase LPM Berprestasi	%	24,33	25,31	25,82
2	12	5	Persentase PKK aktif	%	100	100	100
2	12	6	Persentase Posyandu aktif	%	99,89	99,75	99,89
2	12	7	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	50	60	70
2	12	8	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	0	-	-
2	13		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2	13	1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		-0,030	1,14	1,13
2	13	2	Total Fertility Rate (TFR)		2,74	2,30	2,20
2	13	3	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2	2,30	2,25
2	13	4	Rasio Akseptor KB		52,97	66,74	66,94
2	13	5	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49		52,97	66,74	66,94

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	13	6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per1.000 perempuan usia 15-19 tahun(ASFR 15-19)		31	20	18
2	13	7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	46,99	45,76	43,47
2	13	8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,3	13,00	12,00
2	13	9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	23,6	25,35	26,47
2	13	10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	18,31	19,00	20,00
2	13	11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	75,59	77,00	78,00
2	13	12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	72,31	75,00	75,00
2	13	13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	72,33	75,00	75,00
2	13	14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	23	57	58
2	13	15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	17	80,00	80,00
2	13	16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	98,64	100	100
2	13	17	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	77,98	80,00	80,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	13	18	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0,04	0,01	0,01
2	13	19	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	65,40	100	100
2	13	20	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	75	75,32	77,58
2	13	21	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	1,50	2,00	2,50
2			PERHUBUNGAN				
2	14		Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Orang	13.724*	16.782.962	18.125.599
2	14	1	Rasio ijin trayek		0,20*	1,06	1,06
2	14	2	Persentase layanan angkutan darat	%	0,29	97,50	97,50
2	14	3	Jumlah Pelabuhan Laut /Udara/TerminalBIS	Unit	181	325,00	325,00
2	14	4	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	471	909.039	909.039
2	14	5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan / 1 KM		129	108,00	108,00
2	14	6	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum		24.573.258*	17.229.846	18.952.830
2	15		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	15	1	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	43,98	45,00	50,00
2	15	2	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	32,53	35,00	40,00
2	16		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
2	16	1	Persentase koperasi aktif	%	57,58	70	75
2	16	2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	97,18	97	98
2	17		PENANAMAN MODAL				
2	17	1	investor / proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	1548	821	870
2	17	2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rupiah	11,48	7,00	10,00
2	17	3	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/ Proyek	7	6	7
2	17	4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	10,20	10	15
2	18		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2	18	1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	9,46	9,81	10,58
2	18	2	Persentase wirausaha muda	%	6,04	-	22,02
2	18	3	Cakupan pembinaan olahraga	%	28,00	28,00	36,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	18	4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	57,46	-	22,60
2	18	5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	2,65	8,90	9,58
2	18	6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	76	10	117
2	18	7	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	76	10	100
2	19		STATISTIK				
2	19	1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	19	2	Buku "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka"	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	19	3	Buku PDRB	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	20		PERSANDIAN				
2	20	1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100
2	21		KEBUDAYAAN				
2	21	1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	6	6	10
2	21	2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	2	1	2
2	21	3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	5	12	14

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	21	4	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	0	3	1
2	22		PERPUSTAKAAN				
2	22	1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	365.781	376.754	388.057
2	22	2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp.	582.490	611.615	629.963
2	22	3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit/Jiwa	0.0034	0,37	0,38
2	22	4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	365.781	376.754	388.057
2	22	5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	394.251	406.079	418.261
2	22	6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	3.500	3.605	3.713
2	23		KEARSIPAN				
2	23	1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	56	40	60
2	23	2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	368	379	390
2			PELAYANAN URUSAN PILIHAN				
2	1		PARIWISATA				
2	1	1	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	Wisnu	6.256.376*	1.937.500	2.000.000

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	1	2	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Wisman	115.000	81.250	87.500
2	1	3	Lama kunjungan Wisata	Hari	5	2	3
2	1	4	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	401.800.000	400.000.000	854.000.000
2	2		PERTANIAN				
2	2	1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	21,28	24,76	25,75
2	2	2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	6,01	6,75	7,16
2	2	3	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	3,88	4,69	4,85
2	2	5	Cakupan bina kelompok tani (Perkebunan) Tidak sama di Permen 86	%	85,97	87,09	88,22
			Produktivitas Padi atau bahan pangan utama local lainnya Per Hektar (dipindahkan dari aspek kesejahteraan)	%	50,03	51,49	51,70
2	2	6	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)	Kg	136.772.042	139,478,730	179.367.693
2	2	7	Produktivitas Hasil Peternakan (Telur)	Kg	152.785.412	171,855,523	198.947.567
2	2	8	Produktivitas Hasil Peternakan (Susu)	Kg	1.888.200	3.370.049	3.504.851
2	2	14	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	(%)	1,18	1,21	1,23
			Konsumsi Hasil Peternakan (Daging)	Kg/ Kapita/ Tahun		5,55	5,73

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
			Konsumsi Hasil Peternakan (Telur)	Kg/ Kapita/ Tahun		6,46	6,66
			Konsumsi Hasil Peternakan (Susu)	Kg/ Kapita/ Tahun		2,93	3,02
2	3		KEHUTANAN				
2	3	1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	27,61	28,74	31,00
2	3	2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	13,88	17,41	17,39
2	3	3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Luas Kawasan Lindung/Tota l Kawasan Hutan	75,86	75,67	75,67
2	4		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
2	4	1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	97,80	98,00	98,25
2	4	2	Rasio ketersediaan daya listrik	%	98	98,50	98,75
2	4	3	Persentase pertambangan tanpa ijin	%	15,57	15,57	10
2	4	4	Cadangan Sumber Daya (tidak ada di permen 86 dan bab 2)	Ton	2.400.000	4.000.000	25.200.000
2	4	5	Luas Wilayah Pemetaan (tidak ada di permen 86 ada di bab 2)	Ha	9.200	8,5	7.500
2	5		PERDAGANGAN				

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	5	1	Ekspor Bersih Perdagangan	Juta US\$	59.970.000	45.000.000	55.000.000
2	5	2	Cakupan binakelompok pedagang/usahainformal	%	0,85	0,44	0,55
2	6		PERINDUSTRIAN				
2	6	1	Cakupan bina kelompok pengrajin		1.189	1.194,00	1.225,00
			Kontribusi PDRB Industri Pengelohan	%		10,00	14,48
2	7		TRANSMIGRASI				
2	7	1	Persentase transmigran swakarsa	%	100	100	100
2	8		KELAUTAN DAN PERIKANAN				
2	8	1	Produksi perikanan	%	81,1	50,40	59,20
2	8	2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	58,69	29,47	33,89
2	8	3	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	1,01	0,28	0,30
2	8	11	Cakupan bina kelompok nelayan	%	17,52	20,06	23,89
			Produksi perikanan kelompok nelayan	%	40	21,82	23,32
2	8	12	Nilai Tukar Nelayan	%	107,6	101,35	103,88

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	8	22	Konsumsi Ikan	%	100,6	84,27	97,07
2			PENUNJANG URUSAN				
2	1		PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
2	1	1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	1	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	1	3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	1	4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	1	5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100
2	1	6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100
2	1	7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100
2	2		KEUANGAN				
2	2	1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini	NA	WTP	WTP
2	2	2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	0,58	2,0	2,0

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	2	3	Persentasebelanjapendidikan(20%)	%	42,19	20	20
2	2	4	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	9,01	10	10
2	2	5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	Belanja Langsung:29, 29 Belanja Tidak Langsung : 70,71	Belanja langsung: 30,0 Belanja Tidak Langsung: 70,0	Belanja langsung:35,0 Belanja Tidak Langsung: 65,0
2	2	6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	17,49	16,0	17,0
2	2	7	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	3		KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
2	3	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/	15	20	20
2	3	2		Tahun			
2	3	3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,0	2,0	2,0
2	3	4	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0,6	5,8	5,8
2	3	5	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	59	60	60

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	3	6	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	8.536	8.795	8.8
2	3	7	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	16.243	15.893	15.571
2	4		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
2	4	1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100
2	4	2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100
2	4	3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	20	20	20
NO			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021
2	4	4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	50	60	70
2	5		PENGAWASAN				
2	5	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	74,43	75	77
2	5	2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,04	0,10	0,09
2	5	3	Jumlah temuan BPK	Kasus	18	18	16
2	6		SEKRETARIAT DEWAN				

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2019	Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2020	Target 2021	
2	6	1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi /Kab /Kota	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	
2	6	2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana LimaTahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	
2	6	3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	
3			ASPEK DAYA SAING DAERAH					
3	1		Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rp	25,94	32,15	34,23	
3	2		Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp	11,118	11,159	11.386	
3	3		Nilai Tukar Petani	Poin	104,42	104,70	105,82	
3	4		Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	14,35	17,73	18,85	
3	5		Persentase Desa Berstatus Swasembada	%		277,39	282,94	
3	6		Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)		31,54	51,32	58,04	

BAB VIII PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan tahun ke 2 (dua) dari tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023. Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka proses penyusunannya RKPD berlandaskan pada prioritas pembangunan yang akan mendukung pelaksanaan RKP sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah,

Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas , akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dandan transparansi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2021.
2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2021 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2021, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

8.2. Kesimpulan

1. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.

2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2021.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2021 yaitu : **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Yang Di Dukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM”** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd

M. NURDIN ABDULLAH

Informasi Lebih Lanjut

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jl. Jend. Uripsumoharjo 269 Makassar Telp (0411) 4453070 - 445305 - 320754

Fax (0411) 4453965 - 445445

Website : <http://sulsel.go.id/>

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Jend. Uripsumoharjo 269 Makassar Telp (0411) 453486

Fax (0411) 453869

Email : dokren.sulsel@gmail.com

